



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023**



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

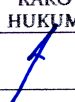
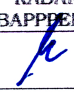
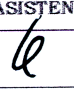
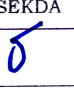
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
 9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);
 10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2023 terdiri dari pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan Penjabaran dari RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RABPD Tahun 2023:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>o</i>

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4





- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja, keluaran sub-kegiatan, hasil kegiatan, serta capaian Program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan pada tahun rencana yang berkenaan.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2023, maka seluruh Perangkat Daerah wajib mengalokasikan anggaran ke rincian Program dan Kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih memperhatikan pengalokasian pada Program Prioritas Daerah serta kinerja hasil yang inovatif;
- (2) Keterbatasan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengakibatkan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2023 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2023, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Juni 2022

Pj. GUBERNUR GORONTALO, 


HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 23



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	4
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	1
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	1
2. Potensi Pengembangan Wilayah	8
3. Wilayah Rawan Bencana	21
4. Aspek Demografi	25
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	27
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	27
2. Fokus Kesejahteraan Sosial	42
3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	44
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	45
1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	45
2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	65
3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan	83
4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan	91
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	102
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	102
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI	



RKPD

Provinsi Gorontalo 2023

TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD.....	108
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	112
2.3.1 Permasalahan Pembangunan	112
2.3.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	113
2.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	117
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	1
3.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo.....	1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	12
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	13
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	14
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	15
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	3
1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	3
2. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023	23
4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah	29
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Tahun 2023	41
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	1
5.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung.....	1
5.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.....	3
5.3 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Strategis Provinsi	6
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
BAB VIII PENUTUP	1



DAFTAR TABEL

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
TABEL 2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota	1
TABEL 2.2 Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo	3
TABEL 2.3 Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo	5
TABEL 2.4 Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Provinsi Gorontalo	5
TABEL 2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020.....	8
TABEL 2.6 Luas Baku lahan menurut Jenis Lahan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 (Ha).....	9
TABEL 2.7 Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha) Di Provinsi Gorontalo tahun 2020.....	10
TABEL 2.8 Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020	11
TABEL 2.9 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2021	12
TABEL 2.10 Populasi Sapi dan Kambing (ekor) Tahun 2020-2021 (ekor)	12
TABEL 2.11 Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 (ekor)	13
TABEL 2.12 Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2010 dan 2021	26
TABEL 2.13 Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo, 2021.....	26
TABEL 2.14 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2019-2021 (Milyar Rupiah)	27



TABEL 2.15	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2019-2021 (persen).....	28
TABEL 2.16	Produk Domestik Regional Bruto seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Tahun 2019 – 2021 (Miliar Rupiah).....	29
TABEL 2.17	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010, Tahun 2019-2021	29
TABEL 2.18	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo September 2020-September 2021	36
TABEL 2.19	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021	38
TABEL 2.20	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2020	40
TABEL 2.21	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo Tahun 2021	40
TABEL 2.22	Dampak Covid19 terhadap Penduduk Usia Kerja Provinsi Gorontalo, 2021	41
TABEL 2.23	Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan Utama Provinsi Gorontalo, Agustus 2020, Februari 2021 dan Agustus 2021	42
TABEL 2.24	Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021	43
TABEL 2.25	Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	43
TABEL 2.26	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun dan 19-24 Tahun, Provinsi Gorontalo tahun 2019-2021	46
TABEL 2.27	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK, 2020-2021	47
TABEL 2.28	Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi	



	jalan tahun 2019-2021	59
TABEL 2.29	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2017-2020	60
TABEL 2.30	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2019-2020	60
TABEL 2.31	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021	64
TABEL 2.32	Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2021	67
TABEL 2.33	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021	68
TABEL 2.34	Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan IKLH Provinsi Gorontalo, 2017-2021	70
TABEL 2.35	Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo, Hasil Pemantauan Tahun 2021.....	71
TABEL 2.36	Status Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	74
TABEL 2.37	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2020	74
TABEL 2.38	Indeks e-Government Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021	77
TABEL 2.39	Jumlah Koperasi Aktif dan Berprestasi Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021	78
TABEL 2.40	Indikator Pembangunan Bidang kebudayaan Tahun 2020-2021.....	81
TABEL 2.41	Jumlah Wisatawan (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021	84
TABEL 2.42	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021	84
TABEL 2.43	Pekembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian Provinsi Gorontalo tahun 2018 - 2021.....	85
TABEL 2.44	Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021....	86



TABEL 2.45	Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan, di Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021	87
TABEL 2.46	Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2019-2021 Provinsi Gorontalo (Milyar Rupiah).....	88
TABEL 2.47	Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021.....	90
TABEL 2.48	Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021.....	90
TABEL 2.49	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021.....	93
TABEL 2.50	Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	95
TABEL 2.51	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021	97
TABEL 2.52	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018-2020	99
TABEL 2.53	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo	99
TABEL 2.54	Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021.....	100
TABEL 2.55	Jumlah Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo 2021	101
TABEL 2.56	Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019	101
TABEL 2.57	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021	102
TABEL 2.58	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021	102
TABEL 2.59	NTP dan NTUP Per Sub sektor di Provinsi Gorontalo tahun 2020 dan 2021	105
TABEL 2.60	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2021	106



TABEL 2.61	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019.....	107
TABEL 2.62	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas berdasarkan status Pendidikan menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018	108
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		1
TABEL 3.1	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)	2
TABEL 3.2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah).....	2
TABEL 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Triwulan IV 2021 (persen).....	3
TABEL 3.4	PDRB Lapangan Usaha Per Kapita ADHB Provinsi Gorontalo Tahun 2018 - 2020	4
TABEL 3.5	IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Januari 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100).....	5
TABEL 3.6	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Provinsi Gorontalo, Agustus 2020, Februari 2021 dan Agustus 2021	7
TABEL 3.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo September 2020-September 2021	8
TABEL 3.8	Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo Menurut Daerah, September 2020 – September 2021	9
TABEL 3.9	Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2022	9
TABEL 3.10	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2022-2023.....	11
TABEL 3.11	Realisasi Pendapatan 2017 s/d 2021	13
TABEL 3.12	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 ...	14
TABEL 3.13	Proyeksi APBD Provinsi Gorontalo TA. 2023	15
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		1



RKPD

Provinsi Gorontalo 2023

TABEL 4.1	Unsur-Unsur Tema RKPD Tahun 2023.....	17
TABEL 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	26
TABEL 4.3	Program Prioritas Provinsi Tahun 2023.....	29
TABEL 4.4	Penyelarasan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023.....	35
TABEL 4.5	Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi.....	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		1
TABEL 7.1	Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo	1
TABEL 7.2	Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo.....	2



DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN	1
GAMBAR 1.1	Acuan Penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo 20232
GAMBAR 1.2	Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi.....	2
GAMBAR 1.3	Keterkaitan Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
GAMBAR 2.1	Peta Provinsi Gorontalo2
GAMBAR 2.2	Peta Topografi Provinsi Gorontalo3
GAMBAR 2.3	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi22
GAMBAR 2.4	Peta Patahan Provinsi Gorontalo23
GAMBAR 2.5	Peta Kawasan Rawan Longsor24
GAMBAR 2.6	Peta Kawasan Rawan Tsunami.....	24
GAMBAR 2.7	Peta Kawasan Rawan Banjir25
GAMBAR 2.8	Capaian dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2021.....	39
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	1
GAMBAR 4.1	Sinergi Arahan RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.....	3
GAMBAR 4.1	Alur Verifikasi Pokok-pokok Pikiran DPRD.....	42
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	1
GAMBAR 5.1	Arahan RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama Daerah.....	8
GAMBAR 5.2	Rincian Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2023-2026.....	11



DAFTAR GRAFIK

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
GRAFIK 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	27
GRAFIK 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Povinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	30
GRAFIK 2.3 Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2017-2021	31
GRAFIK 2.4 PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 s/d 2021 (Juta Rupiah)	33
GRAFIK 2.5 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	33
GRAFIK 2.6 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo, Maret 2017- September 2021	33
GRAFIK 2.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, Maret 2016-September 2021	35
GRAFIK 2.8 Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	46
GRAFIK 2.9 Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2017- 2021	49
GRAFIK 2.10 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten/ Kota se- Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021	50
GRAFIK 2.11 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2021	50
GRAFIK 2.12 Persentase Desa UCI di Kabupaten Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2020	51
GRAFIK 2.13 Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2021	52



GRAFIK 2.14	Jumlah Balita Gizi Buruk + Gizi Kurang (Underweight) per Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 sd 2020.....	53
GRAFIK 2.15	Persentase Stunting di Kabupaten/ Kota se- Provinsi Gorontalo Tahun 2018 - 2020.....	53
GRAFIK 2.16	Jumlah Penemuan Kasus TB Sensitif Obat Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020	54
GRAFIK 2.17	Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD, ISPA/Pneumonia Dan Diare Di Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020.....	56
GRAFIK 2.18	Indikator : Incidence Rate (IR) per 1000 Penduduk Tahun 2018-2020.....	56
GRAFIK 2.19	Indikator : Persentase Penemuan Kasus ISPA / Pneumonia Tahun 2019-2020.....	56
GRAFIK 2.20	Indikator Cakupan Pelayanan Diare per 1.000 penduduk Tahun 2018-2020.....	57
GRAFIK 2.21	Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 s/d 2020.....	57
GRAFIK 2.22	Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021.....	59
GRAFIK 2.23	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	66
GRAFIK 2.24	Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah).....	93
GRAFIK 2.25	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah).....	94
GRAFIK 2.26	Perkembangan NTP dan NTUP Provinsi Gorontalo Tahun 2018 s/d. 2021.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD. RKPD merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang sebelumnya disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPD digunakan sebagai acuan pembangunan mengingat pada periode setelah 2023 Provinsi Gorontalo tidak mempunyai kepala daerah terpilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah, karena menunggu waktu Pilkada Serentak Tahun 2024. Perbedaan yang signifikan antara RPD dan RPJMD adalah pada RPD tidak memuat Visi dan Misi serta jangka waktu pelaksanaan rencana pembangunan yang hanya 4 tahun.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

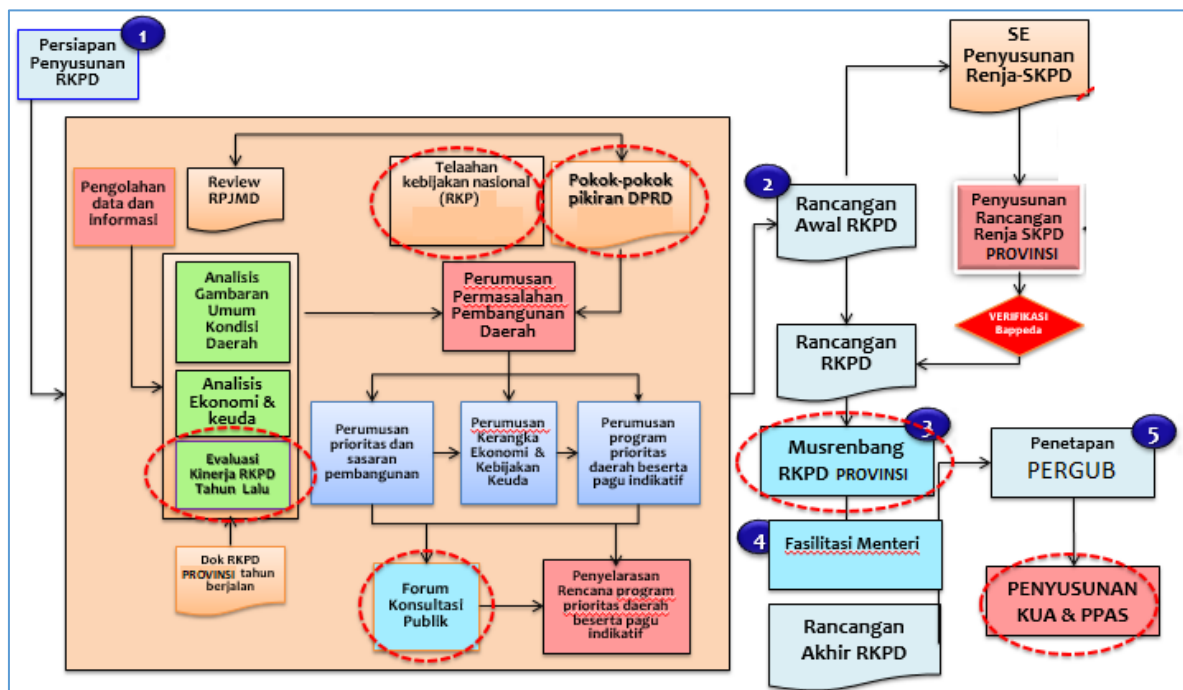
Proses penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan tahapan yang dapat dicermati pada gambar 1.1 dan 1.2:



Gambar 1.1 Acuan Penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo 2023



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



1.2. Landasan Hukum

Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

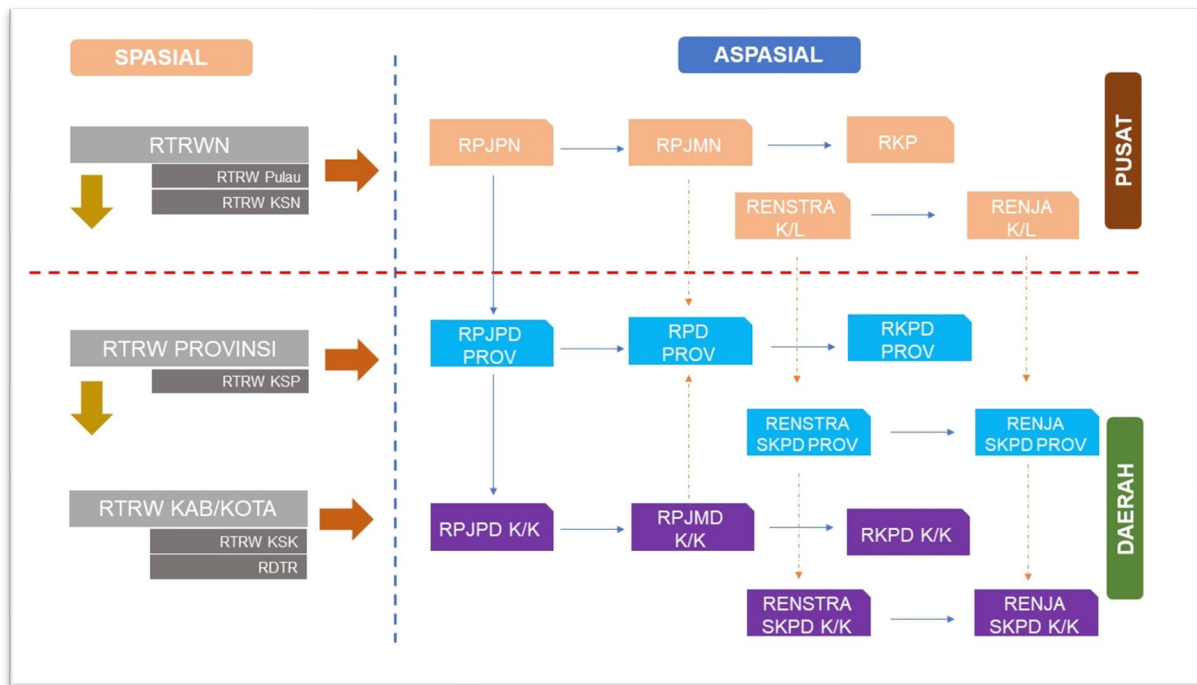


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
19. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2:

Gambar 1.3 Keterkaitan Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Provinsi Gorontalo dalam RPD 2023 - 2026
2. Memberikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
3. Memberikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah
4. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan
5. Optimalisasi partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Tujuan dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah:

1. Untuk menjadi dokumen acuan untuk penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2023
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
3. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
4. Sebagai instrumen evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah



1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya yaitu penyusunan KUA-PPAS dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan disusunnya RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya

Menjelaskan hasil capaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 serta pencapaian indikator RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

2.3. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017-2021.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2023



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2023 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran pembangunan tahun 2023.

4.2 Isu Strategis

Memuat Isu Strategis yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang diuraikan pada BAB II. Dikemukakan pula Isu Strategis Nasional yang perlu menjadi perhatian daerah.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2023 serta prioritas program pembangunan daerah.

4.4 Program Prioritas Daerah

Memuat Program Prioritas Daerah berdasarkan Prioritas Daerah beserta Program Prioritas Daerah yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2023

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yang menjadi bahan sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo pada tahun 2023.

BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. PENUTUP



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000, dan menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember tahun 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, luas Wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257,07 Km², atau hanya sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	1.750,83	15,55
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	84	84	1.521,88	13,52
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.984,31	17,63
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.244,31	37,70
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	124	124	1.676,15	14,89
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	79,59	0,71
75	Provinsi Gorontalo	77	72	657	729	11.257,07	100

Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

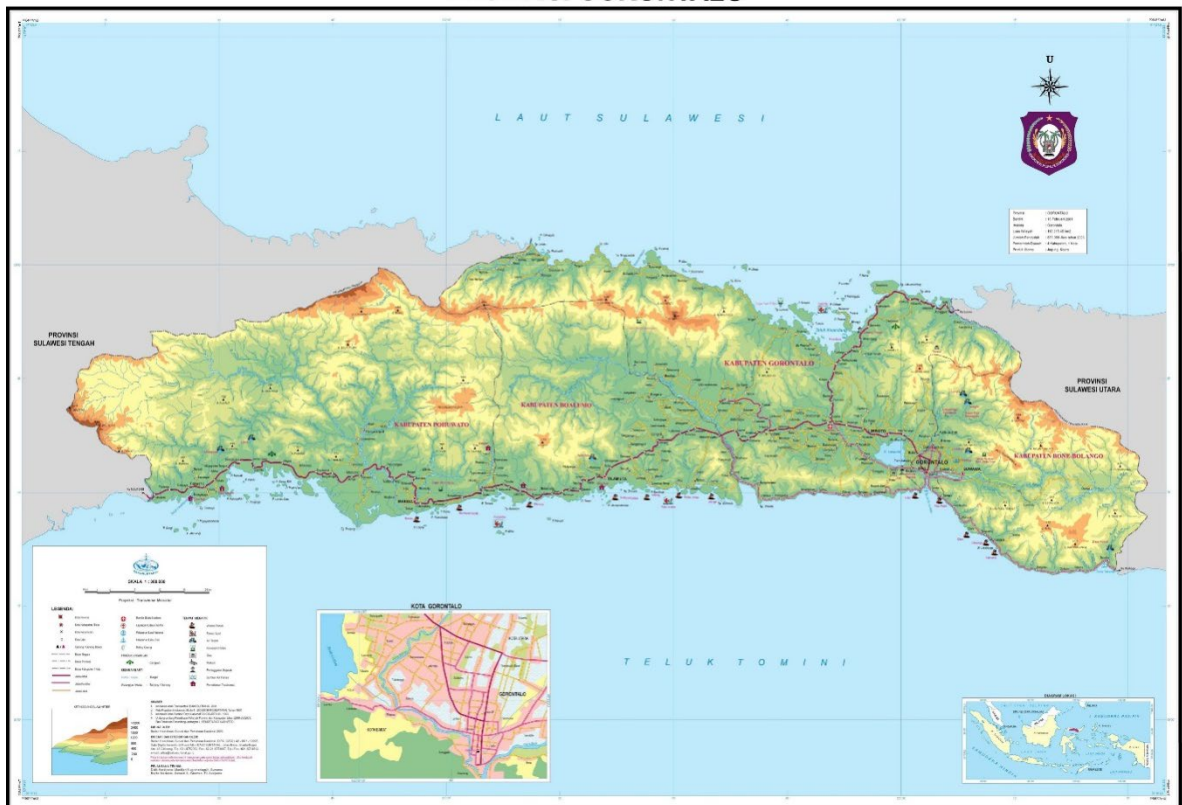
Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 km² atau sebesar 37,7%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 km² atau sebesar 0,71%.





b. Letak Dan Kondisi Geografis

Gambar 2.1
Peta Provinsi Gorontalo,



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Wilayah Provinsi Gorontalo dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula) terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada $0^{\circ} 19' - 0^{\circ} 57'$ Lintang Utara dan $121^{\circ} 23' - 125^{\circ} 14'$ Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

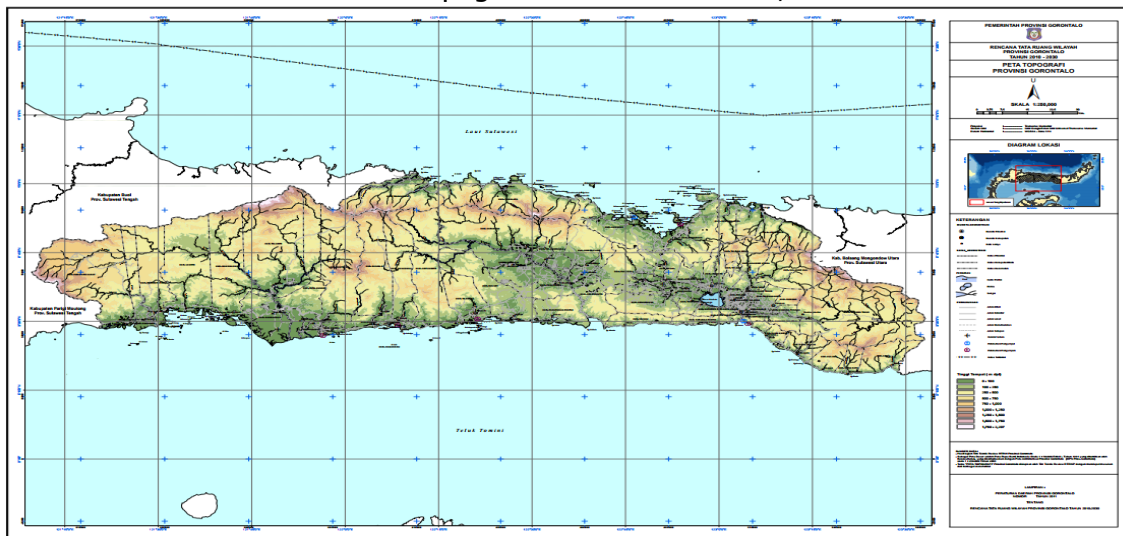
c. Topografi

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954.



Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Provinsi Gorontalo,



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m). Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulung kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	128.552	10,52
B	2-8	74.112	6,07



C	8-15	66.528	5,45
D	15 – 40	113.997	9,33
E	> 40	838.355	68,63
Jumlah		1.221.544	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.

d. Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (*S. Bachri, dkk, 1993*) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuanannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuartar. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen.
- Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokopa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.
- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Diatas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQI) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batu gamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batu gamping terumbu (QI) yang dimulai pada Plistosen Atas – Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).



Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat mengangan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik).

e. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berikut 3 (tiga) satuan Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015.

Tabel 2.3
Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	KODE	LUAS (Km ²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.05.A2	456.944,03
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.485,65
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	3.945

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.4
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Di Provinsi Gorontalo

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
WS Paguyaman	WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)		WS Randangan
1. DAS Paguyaman,	1. DAS Tolinggula,	38. DAS Waluhu	1. DAS Randangan
2. DAS Limba,	2. DAS Potanga,	39. DAS Bilolantunga	2. DAS Beringin
3. DAS Olibuhu,	3. DAS Limbato	40. DAS Tombulilato	3. DAS
4. DAS Tumba,	4. DAS Biawu,	41. DAS Ombulo	DingaMotolohu,
5. DAS Bolangga,	5. DAS Bulolila,	42. DAS Momungaa	4. DAS Patihu,
6. DAS Bubaa,	6. DAS Bulontio,	43. DAS Bangahu	5. DAS Sidorukun,
7. DAS Tumbihi,	7. DAS Boliohulu	44. DAS Mopuya	6. DAS Sukadamai,
8. DAS Limbatihu,	8. DAS Boliyohuto,	45. DAS Kaidundu	7. DAS Wonggarasi,
9. DAS Tabongo,	9. DAS Baladu,	46. DAS Uabanga	8. DAS Lemito,
10. DAS Dulupi,	10. DAS Mooti,	47. DAS Tongo	9. DAS Lomuli,
11. DAS Sambat,	11. DAS Sipatana,	48. DAS Bilungala	10. DAS Milangodaa,
12. DAS Tilamuta,	12. DAS Dulukapa,	49. DAS Tamboo	11. DAS Popayato,
13. DAS Lamu,	13. DAS Deme I,	50. DAS Tolotio	12. DAS Dudeulo,
14. DAS Botumoito,	14. DAS Dunu,	51. DAS Olele	13. DAS Molosipat,
15. DAS Tapadaa,	15. DAS Bubalango,	52. DAS Oluhuta	14. DAS Moutong
16. DAS Salilama,	16. DAS Tengah,	53. DAS Molotabu	
17. DAS Tabulo,	17. DAS SOgu,	54. DAS Botutonuo	
18. DAS Bumbulan,	18. DAS Monano,	55. DAS Modelamo	
19. DAS Libuo	19. DAS Tudi,	56. DAS Buluango	
20. DAS Marisa	20. DAS Tolango,	57. DAS Huangobutu	
	21. DAS Datahu,	58. DAS Inengo	
	22. DAS Popalo,	59. DAS Leato	
	23. DAS Tolangio,	60. DAS Bolango-Bone	
	24. DAS Pontolo,	61. DAS Limboto	
	25. DAS Buda,	62. DAS Pohe	
	26. DAS Posso,	63. DAS TanjungKramat	



	27. DAS Bubode, 28. DAS Sanbungo, 29. DAS Tolotapo, 30. DAS Butoimola, 31. DAS Samia 32. DAS Tapaibuhu 33. DAS Soklat 34. DAS Sapawea 35. DAS Imana 36. DAS Taludaa 37. DAS Sogitia	64. DAS Bongo 65. DAS Lopo 66. DAS Kayu Bulan 67. DAS Bilihu Timur 68. DAS Langgula 69. DAS Lamu 70. DAS Limo'o 71. DAS Lobuto Timur 72. DAS Lobuto 73. DAS Biluhu Barat 74. DAS Huang	
--	---	--	--

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

2) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain :

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

3) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

f. **Klimatologi**

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan



Geofisika, Stasiun Djalaluddin Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2021 berkisar antara 27,1^oc. Suhu terendah terjadi di bulan Februari yaitu 21,6^oc. Sedangkan suhu tertinggi juga terjadi di bulan Oktober dengan 35,10^oc. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relative tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2021 sebesar 85 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2021 yaitu sebesar 2.282 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu mencapai 405 mm. Pada tahun 2021, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,5 m/det.

g. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
- Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
- TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
- Taman Nasional Promosi (TNP) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
- Kawasan Teluk Tomini.

Kawasan Lindung Provinsi meliputi:

- Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
- CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
- CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
- Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) desa olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.

2) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Kawasan Andalan Gorontalo dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
- Kawasan Andalan Marisa dengan sector unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
- Kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan dan pariwisata;

Sedangkan Kawasan Budidaya Provinsi meliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi:

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi.



- (1) Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato :
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato :
- (3) Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konversi di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohuwato:

b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan di beberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha.

Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2019 :

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Jumlah luas hutan dan perairan
Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03
Bone Bolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,10	-	140.144,13
Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
Provinsi Gorontalo	202.348,52	196.522,47	252.663,30	90.092,02	23.254,95	764.881,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

a. Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain :



- Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedele, kacang tanah dan kacang hijau). Luas panen padi sawah adalah 56.061 ha dan produksi 289.656 ton (produktivitas 51,67 kw/ha), dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sekitar 25.104 ha. Untuk padi ladang adalah seluas 38 ha dengan produksi 120 ton (produktivitas 31,58 kw/ha). Luas panen jagung adalah 140.460 ha dengan 677.249 ton produksi (48,22 kw/ha produktivitas), 48% di antaranya berada di Kabupaten Pohuwato.
- Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, daun bawang, bayam, buncis, kangkung, ketimun, cabai besar, cabai rawit, sawi, terong, kacang panjang, kubis, labu siem dan tomat) dan buah-buahan (durian, manga, nangka, nenas, papaya, pisang dan rambutan). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen 2.065 hektar dengan produksi sebanyak 11.822 ton. Dari komoditas buah-buahan, pisang adalah yang utama dengan produksi 4.404 ton.

Adapun luas lahan pertanian Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 2.6

Luas Baku lahan menurut Jenis Lahan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 (Ha)

No	Jenis Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Sawah					
	b. Sawah Irigasi	27.674	27.660	27.027	24.607	26.018
	- Ditanami Padi	27.612	27.598	26.642	24.205	25.727
	- Tidak ditanami padi	62	62	385	275,1	291,1
	- Sementara tidak diusahakan	-	-	-	127	-
	c. Sawah Non Irigasi	8.011	7.104	7.067	7.765	6.470
	- Ditanami padi	5.135	5.083	4.864	6.165	4.756
	- Tidak ditanami padi	2.876	2.022	2.203	1.432,4	1.367,4
	- Sementara tidak diusahakan	-	-	-	168	347
	d. Total lahan sawah (a+b)	35.685	34.764	34.094	32.372	32.488
	- Ditanami padi	32.747	32.681	31.506	30.370	30.483
	- Tidak ditanami padi	2.938	2.084	2.589	1.708	1.658,5
	- Sementara tidak diusahakan	-	-	-	-	347
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	904.017	904.981	998.497	999.229	999.471
	a. Tegak/Kebun	191.941	239.313	244.829	245.086	194.753
	b. Ladang/Huma	37.399	41.382	39.996	39.755	58.076
	c. Lahan yang sementara tidak diusahakan	56.110	49.981	50.088	50.014	48.025
	d. Lainnya (Perkebunan, Hutan Rakyat, Tambak, Kolam/tebat/empang, dll)	618.568	574.304	663.585	664.374	698.616,3
3	Lahan Bukan Pertanian	282.694	283.890	233.840	234.837	270.691
	(rumah, bangunan & halaman, hutan negara, rawa-rawa dll)	282.694	283.890	233.840	234.837	270.690,8
	Total	1.222.396	1.223.635	1.266.432	1.266.438	1.302.650

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 1.302.650 yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 32.488 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 999.471 Ha,



dan Lahan Bukan Pertanian sebesar 270.691 Ha. Luas Baku Lahan di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.7

Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha)
Di Provinsi Gorontalo tahun 2020

.No	Wilayah	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan
		Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
1	Kabupaten Boalemo	4.975	239.208	12.543	256.726
2	Kabupaten Gorontalo	14.187	162.547	23.098	199.832
3	Kabupaten Pohuwato	4.892,4	431.778,6	30.922,8	467.593
4	Kabupaten Bone Bolango	2.081	8.4712	112.850	199.643
5	Kabupaten Gorontalo Utara	5.558	76.879	88.515	170.952
6	Kota Gorontalo	795	4.346	2.762	7.903
	JUMLAH	32.488,4	999.470,6	270.690,8	1.302.649,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Kota Gorontalo, memiliki lahan persawahan yang cukup luas, yakni sebesar 916 Ha dengan produktivitas padi sebesar 6,1 Ton/Ha. Luas areal persawahan ini kian berkurang, karena alih fungsi lahan pertanian. Adapun produksi pertanian lainnya meliputi jagung, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan.

Kabupaten Boalemo, Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo masih di dominasi oleh lahan bukan sawah, sedangkan lahan untuk sawah hanya ada di 4 kecamatan yaitu Mananggu, Botumoito, Paguyaman dan Wonosari. Kecamatan Dulupi masih merupakan penghasil jagung terbesar di Kabupaten ini. Komoditi unggulan Sektor Perkebunan yaitu, tebu, kelapa, kakao, kopi, cengkeh dan jambu mete.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelei, ubi jalar dan ubi kayu; Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang; Komoditas tanaman perkebunan antara-lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala, Cengkih, Kopi, Aren, Vanili, Kayu Manis; dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat, Belimbing, duku, langsung, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Siam/Kepron, Jeruk Besar, mangga, Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun.

Kabupaten Gorontalo, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 bagian yaitu bagian Selatan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat dan Tibawa; sedangkan di bagian Utara meliputi Kecamatan Batudaa dan Bongomeme. Penguatan ekonomi kerakyatan pada kelompok potensial di wilayah ini lebih mengedepankan Sektor Pertanian sebagai *prime mover* pembangunan daerah melalui program "revitalisasi pertanian" dengan potensi Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 13.087 ha, lahan kering 48.479 ha.



Selain itu luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura/tanaman pertanian lainnya seluas 9.846 ha.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi Pertanian berupa padi, jagung dan Perkebunan berupa Cokelat, Cengkih, Kelapa dan Kopi. Sektor Pertanian ini memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB daerah. Luas lahan Pertanian: padi seluas 5.866 Ha, jagung seluas 4.841 Ha; Perkebunan: kelapa seluas 10.765,95 Ha, kopi seluas 89,25 Ha, kakao seluas 1.000,15 Ha dan cengkeh dengan luasan 1.250,59 ha.

Kabupaten Pohuwato, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai *brand* daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 40.000 ha, bahkan tercatat masih ada seluas 19.000 ha lahan yang belum terkelola. Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kemiri, Kopi, Jeruk dan Durian. Luas lahan perkebunan Kelapa sekitar 15.000 ha lebih dengan produksi Kopra mencapai 20.000 ton/tahun.

Di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan dikembangkan secara intensif terutama padi dan jagung. Luas Panen Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 63.970,1 Ha, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya seluas 63.717 Ha. Luas panen padi terbesar berada di kabupaten Gorontalo sekitar 30.509,1 Ha.

Tabel 2.8

Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020

Kabupaten/ Kota	Luas Panen (ha)			Produktivitas (ku/ha)			Produksi (ton)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Boalemo	13.259,9	14.809	10.428	43,8	35,45	42,52	58.123	52.499	44.343
Gorontalo	24.562,7	23.454	30.509	45,7	46,68	41,88	112.198	109.483	127.771
Pohuwato	6.573,2	6.832	6.454	52,3	50,15	48,30	34.379	34.264	31.173
Bone Bolango	4.375,3	4.969	3.875	49,1	48,93	55,83	21.498	24.314	21.634
Gorontalo Utara	15.190,4	11.446	11.195	34,2	37,97	47,90	51.947	43.460	53.629
Kota Gorontalo	1.585,8	2.207	1.508	58,9	54,94	50,54	9.333	12.126	7.624
Provinsi Gorontalo	65.547,3	63.717	63.970	43,86	43,34	44,74	287.478	276.145	286.174

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022

Berbagai komoditi Pertanian potensial dapat mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatkan nilai tambah komoditi produk pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir untuk menunjang potensi pertanian. Berikut adalah luas lahan tegal/kebun, ladang/huma serta



lahan yang sementara tidak diusahakan yang sangat potensial untuk pemanfaatan pertanian tanaman potensial.

Tabel 2.9

Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Tegal/Kebun (ha)	Ladang/Huma (ha)	Sementara tidak diusahakan (ha)
Boalemo	39.453,00	1.422,00	472,00
Gorontalo	51.062,00	11.976,00	3.868,00
Pohuwato	50.671,00	15.628,20	23.762,20
Bone Bolango	12.716,70	3.987,00	11.971,20
Gorontalo Utara	26.786,00	8.602,00	7.948,00
Kota Gorontalo	145,00	-	4,00
Provinsi Gorontalo	180.833,70	41.615,20	48.025,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

Peluang Investasi yang dapat ditawarkan untuk Sektor ini adalah:

1. Industri pakan ternak dengan menggunakan limbah padi dan jagung
2. Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (menggunakan limbah padi dan jagung)
3. Pembangunan Industri makanan (Sari Buah)
4. Pengadaan Penggilingan Padi dan Pengepakan
5. Pengembangan Industri Tepung Beras
6. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
7. Pengembangan lahan sawah
8. Pengadaan Bibit tanaman Padi dan Jagung

b. Potensi Peternakan

Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provinsi Gorontalo Tahun 2021 mencapai 261.690 ekor, sementara populasi ternak kambing 2021 sebesar 107.685 ekor.

Tabel 2.10

Populasi Sapi dan Kambing (ekor) Tahun 2020-2021 (ekor)

Wilayah	Sapi			Kambing		
	2019	2020	2021*	2019	2020	2021*
Boalemo	40.895	42.308	44.667	9.809	10.747	12.048
Gorontalo	92.774	96.681	99.177	49.728	51.096	52.464
Pohuwato	32.056	32.543	32.815	14.836	14.783	14.883
Bone Bolango	46.835	47.384	48.317	7.529	7.604	7.688
Gorontalo Utara	30.784	32.405	32.979	7.866	7.320	7.356
Kota Gorontalo	3.650	3.662	3.735	12.986	12.986	13.246
Provinsi Gorontalo	246.994	254.983	261.690	102.754	104.536	107.685

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo 2022

Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.



Tabel 2.11

Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 (ekor)

Wilayah	Ayam Buras			Ayam Ras Petelur			Ayam Ras Pedaging		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Boalemo	422.856	433.902	402.173	17.242	12.053	46.655	-	153	547
Gorontalo	680.705	686.226	720.135	218.928	145.693	221.428	336.5400	2.878.690	3.572.428
Pohuwato	367.177	367.177	359.288	2.000	6.843	9.472	-	-	-
Bone Bolango	268.991	324.491	324.691	146.900	97.116	134.427	861.440	982.476	97.116
Gorontalo Utara	428.420	432.485	432.490	28.800	17.787	26.333	70.600	-	-
Kota Gorontalo	140.100	120.900	123.318	3.500	987	1.500	232.543	265.216	235.110
Provinsi Gorontalo	2.308.249	2.365.330	2.362.095	417.370	280.479	439.815	4.529.983	4.126.535	3.905.196

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022

Kabupaten Bone Bolango : potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat bone bolango adalah ternak sapi potong yang berjenis sapi bali.

Kabupaten boalemo : Populasi peternakan di wilayah kabupaten ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 40.895 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini.

Kabupaten Gorontalo : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme).

Kabupaten pohuwato : Potensi di sektor peternakan meliputi ternak sapi, kambing, ayam buras, dan itik. Pemerintah daerah (pemda) menaruh perhatian terhadap sektor yang satu ini dengan pemberian bantuan sapi secara bergilir kepada petani peternak. Pemda pohuwato telah menargetkan daerah ini sebagai lumbung ternak sapi di provinsi gorontalo. Populasi sapi telah mencapai 100 ribu ekor.

Pembangunan peternakan perlu dikembangkan karena peternakan turut berperan dalam mendorong terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak yaitu daging, telur dan susu. Selain itu mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan.

Provinsi Gorontalo sangat potensial dan memiliki peluang dalam pengembangan industri disektor peternakan. Peluang pengembangan industri ternak, meliputi:

- Pembangunan industri makanan (pengalengan daging sapi);
- Penggemukan sapi;
- Pengembangan ternak ayam (buras dan pedaging); dan
- Pengembangan industri biogas (limbah kotoran hewan).

**c. Potensi Perikanan**

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 9.638.44 Km² yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu :

1. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya : 1.242.526 ton per tahun.
2. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) potensi perikanan tangkapnya : 597.139 ton per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut.

Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2020 se besar 115.812 ton. Produksi perikanan terbesar berada di Kabupaten Pohuwato yaitu 26.041 ton atau sekitar 19 persen.

Hasil Perikanan terbesar diperoleh dari Budidaya Perikanan Darat yaitu sebesar 15.477,39 ton atau sebesar 54,36% dari keseluruhan produksi yaitu 212.427,50 ton dan 95.991 ton dari hasil Perikanan Laut dengan 8.413 rumah-tangga perikanan. Luas areal Rumput Laut sekitar 14.250 ha dengan produksi 99.454,4 ton sedangkan luas areal Perikanan Tangkap adalah + 50.500 km² dengan potensi 92.171 ton/tahun.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang.

Kota Gorontalo, Sebagian wilayah Kota Gorontalo berbatasan dengan lautan, daerah ini terletak disebelah selatan Kota Gorontalo, luas wilayah laut Kota Gorontalo yakni sebesar 60,84 Km². Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir berprofesi sebagai nelayan, sumber penghasilan utama tersebut menjadi roda bagi perekonomian di daerah pesisir. Adapun produktivitas perikanan kelautan adalah Perikanan tangkap, Budi daya dan Perairan umum.

Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan



Tilamuta dan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah).

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 % dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km² yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir.

Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha.

Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha).

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi perikanan dalam bentuk ikan pelagis, ikan demersal, rumput laut dan berbagai biota laut lainnya. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 13.640 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan).

Kabupaten Pohuwato, Sebagai daerah yang berhadapan dengan Teluk Tomini, Masyarakat di wilayah ini mengandalkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya pemenuhan ekonomi. Berbagai komoditi ikan tangkap dengan mudah bisa didapatkan diperairan laut daerah ini. Jenis produksi ikan tangkap antara lain : Tuna, Cakalang, Layang, Lobster, Teripang, Kerapu dan Ikan Tongkol. Rata-rata produksi ikan tangkap mencapai 10.000 ton, sementara untuk wilayah Teluk Tomini hingga Laut Seram dapat dicapai produksi sebesar 5.000 ton. Untuk mengembangkan perikanan kelautan, Pemerintah Pohuwato telah membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan Wonggarasi. Selain itu juga telah dibangun dermaga dan sarana penunjang usaha perikanan lainnya.

Peluang Investasi di sektor ini adalah :

- Fasilitas Teknologi Pasca Tangkap (pendinginan/*cold storage* untuk pembekuan, pengemasan dan pengalengan);
- Industri Pengalengan Ikan/kemasan;
- Industri tepung Ikan, termasuk ikan segar;
- Industri Pakan ternak dari Limbah Ikan;
- Pengadaan Rumpon;
- Budidaya Kerang Mutiara;
- Budidaya Tambak Udang/Lobster;



- Pembangunan Industri Rumput Laut;
- Pengadaan Armada Penangkapan Ikan.

d. Potensi Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi; sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dll.

Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut :

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan:

- Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).
- Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri.

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang **belum** dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan.

Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit).

Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.

- Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembaga dengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m³ tersebar di Kecamatan Boliyohuto.
- Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai; Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 m³), tersebar di Kecamatan



Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai; Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto; Felspar (jumlah cadangan sekitar 1.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai; dan Andesit (jumlah cadangan sekitar 1.050.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.

- Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi sumberdaya pertambangan logam meliputi: emas, perak, tembaga dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam adalah; granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengalir wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Kabupaten Pohuwato, Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas (> 1.800.000.000 m³); Batu Granit (> 100.000.000 m³); Dasit (300.000.000 m³); Sirtu (100.000.000 m³); Andesit (10.000.000 m³); dan Zeolit 5.000.000 m³). Kesemuanya tersebar di Kecamatan Marisa, Taluditi, Paguat, Popayato dan Patilanggio.

Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya : Iloa Kiri, Iloa Kanan, Gunung Pani, dan Baginite, meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Dalam hal pengolahan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Peluang Investasi disektor ini adalah pengembangan fasilitas teknologi modern bagi pertambangan logam dan non-logam karena selama ini masih diolah oleh masyarakat secara tradisional. Selain itu juga pengembang pembangkit listrik dengan memanfaatkan sungai sungai dan air terjun sebagai pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

e. Potensi Industri

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sektor industri mampu mengatasi permasalahan perekonomian, dengan mengasumsikan bahwa sektor industri mampu menjadi leading sektor bagi sektor lainnya. Sehingga sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan (*forward linkage*), maupun keterkaitan kebelakangan (*backward linkage*). Dengan memanfaatkan potensi



sumber daya alam yang ada, maka Provinsi Gorontalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan.

Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten Gorontalo Utara, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu :

- Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km². Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kg/tahun;
- Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
- Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah aren dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dsb.;
- Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture; Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi. Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro.

Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan *home industry*). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian; Industri Aneka; Industri Logam; dan Industri Perikanan.

Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah

- Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan *nata de coco* di Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di



sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik ini telah meluncurkan ekspor tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet.

- Pabrik Gula Tolangohula berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. Pabrik Gula Tolangohula pada setiap tahun memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat se Provinsi Gorontalo sejumlah 12.000 Ton, sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangkat 1.800 karyawan ditambah 4.000 orang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi.
- Pabrik Rumput Laut. Sebagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan. Kapasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil rumput laut dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara, Boalemo dan juga Pohuwato.

f. **Potensi Pariwisata**

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:

1. *Wisata Pantai* : Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Pantai Karang Putih, Pantai Diyonumo, Pantai Pulau Popaya-Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantai Pohon Cinta, Pantai Langala, Pantai Mananggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenai, Pantai Dunu dan Pantai Ratu Tenilo.
2. *Wisata Laut dan Pulau* : Obyek wisata Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo), Laut Torosiaje (Kabupaten Pohuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara) adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: Objek Wisata Hiu Paus (*whale shark*),



Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli dan Pulau Mohinggito.

3. *Wisata Alam dan Pegunungan* : Obyek wisata Hutan Pinus Dulamayo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air terjun Taludaa, Air terjun Ayuhulalo, Air Terjun Tilamuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo.
4. *Wisata Adat dan Situs Sejarah* : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah Objek Wisata Religi Bubohu, Tumbila Tohe; Rumah Adat Dulohupa; Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), Pendaratan Soekarno dan Pusat Kerawang.
5. *Wisata Kuliner* : Binte Biluhuta merupakan makanan khas di Gorontalo, makanan khas ini terbuat dari Jagung Gorontalo terkenal sebagai daerah penghasil jagung yang subur. Oleh masyarakat pribumi, hasil bumi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kuliner khas Gorontalo, yaitu 'Binte Biluhuta' yang berasal dari bahasa Gorontalo. Binte Biluhuta berbumbu rempah khas Gorontalo dan makanan ini paling enak disantap saat masih panas dan makanan ini bisa Anda dapatkan di rumah makan Gorontalo. Aneka kuliner khas Gorontalo lainnya yakni ayamiloni, ilabulo, sate tuna Gorontalo, sayur putungo, duduli, tiliaya, dan bilenthango yang tidak kalah lezat.

Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan dilapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam jenis *outbond* (*hiking, tracking, climbing* dan *rafting*). Garis pantai Bonebol ada di daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele. Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha.

Kota Gorontalo. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan.



Kabupaten Boalemo. Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik adalah obyek wisata Pantai Boalemo Indah atau dikenal dengan Pantai Bolihutuo.

Kabupaten Gorontalo. Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Rumah Adat/Banthayo Poboide; Danau Limboto; Suaka Margasatwa Nantu; Pentadio Resort; Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan; dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu

Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo; Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/*Orange Fortress*, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630; dan Wisata Religi Tanjung Keramat yaitu Budaya Mandi Safari.

Kabupaten Pohuwato. Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalah Air Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito; Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat; Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat; Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat *cottage-cottage* di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat; Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa; dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi.

a. Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo –

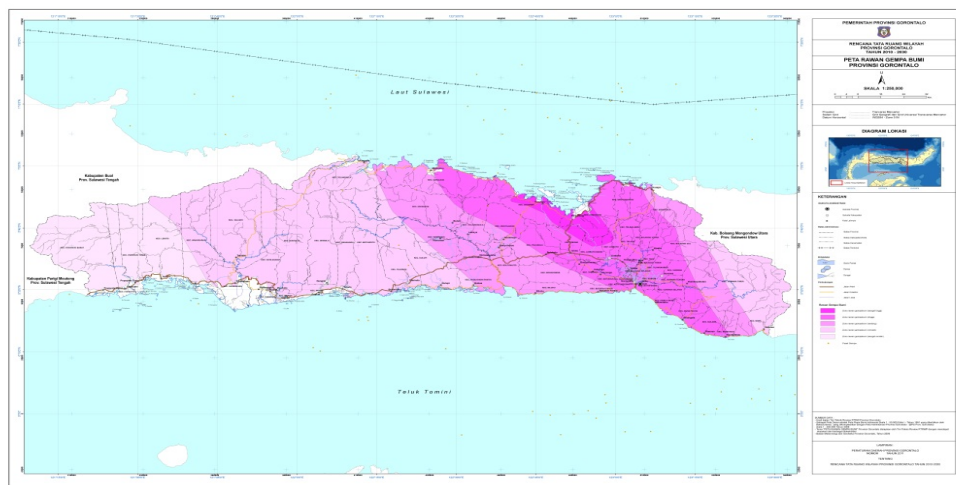


Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik.

Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.
- Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

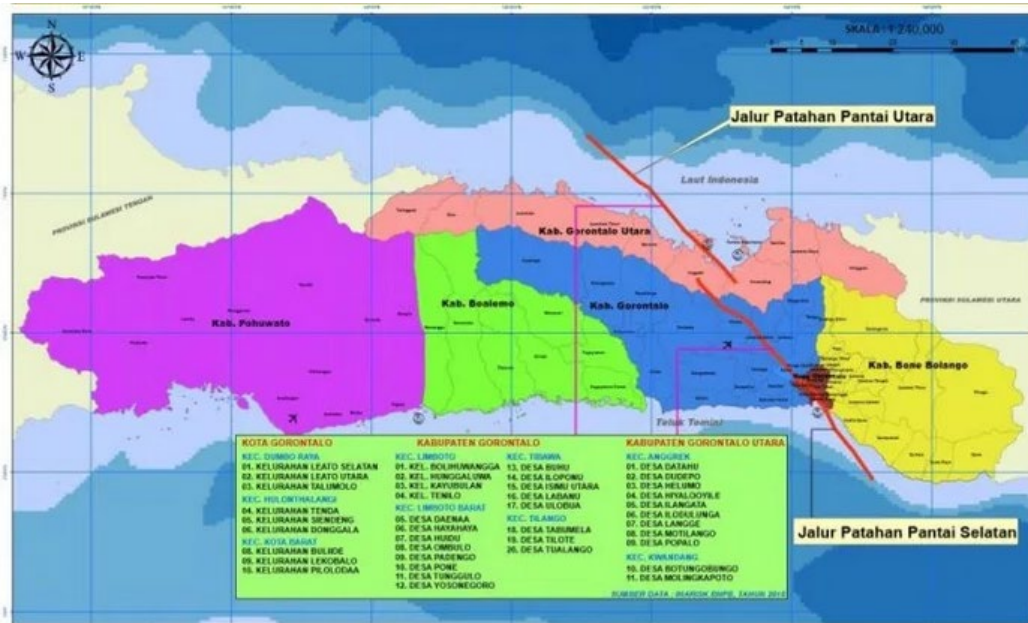
Gambar 2.3
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. Tatanan tektonik geologi yang kompleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas guncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/Modified Mercally Intensity).

Gambar 2.4
Peta Patahan Provinsi Gorontalo



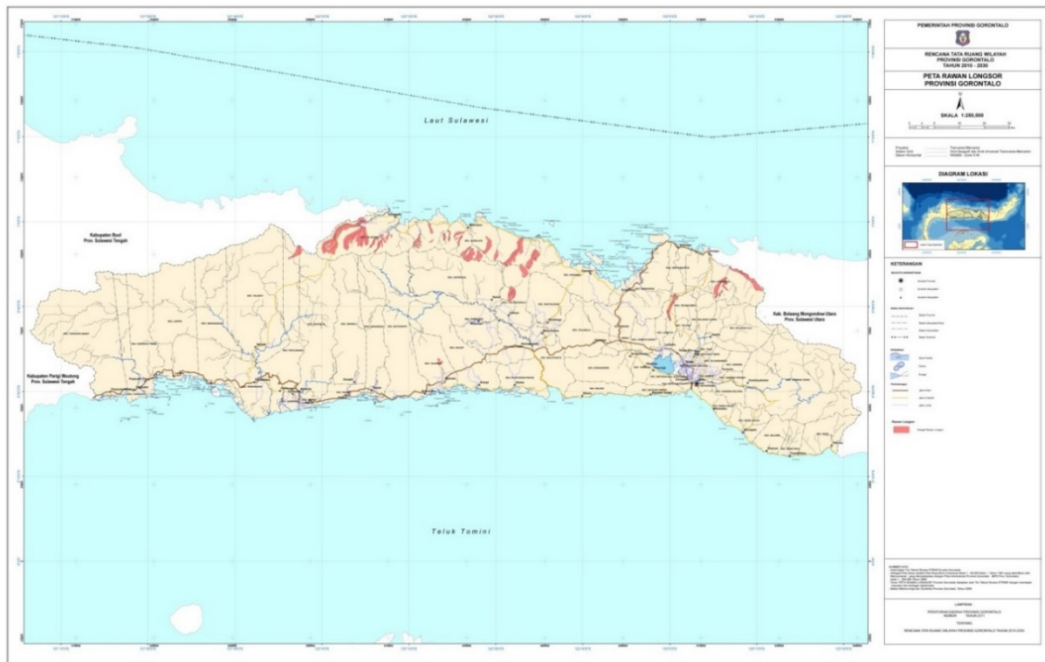
Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2020

b. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsor tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsor dan banjir bandang.

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilmuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

Gambar 2.5
Peta Kawasan Rawan Longsor



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai $\pm 655,8$ km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Manangu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan.

Gambar 2.6
Peta Kawasan Rawan Tsunami

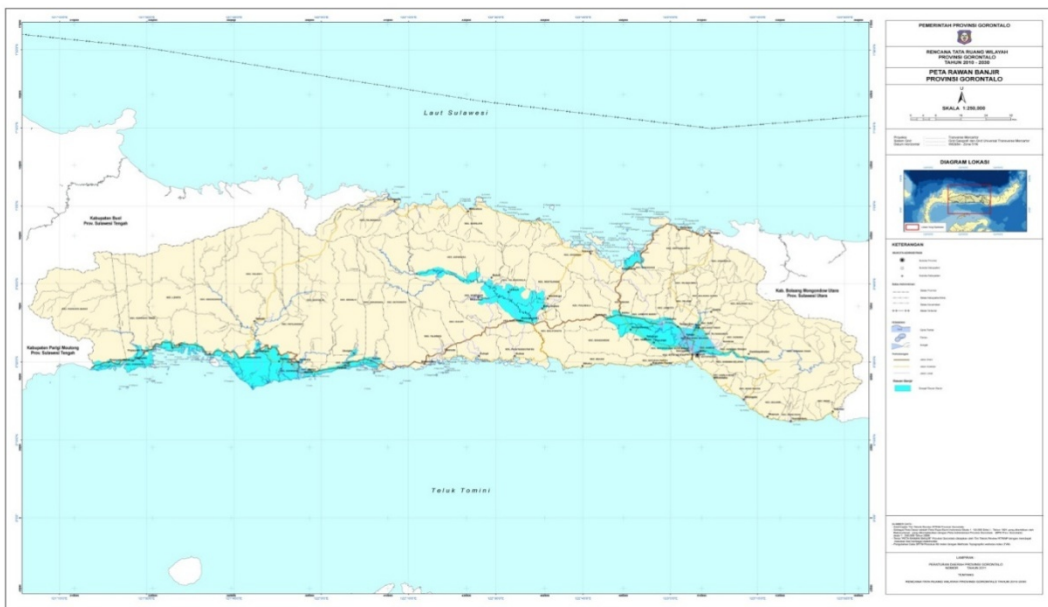


Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

d. Kawasan Rawan Banjir

Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolanghula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

Gambar 2.7
Peta Kawasan Rawan Banjir



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.1.4 Aspek Demografi

Statistik data kependudukan penting digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarahannya persebaran penduduk, persediaan kebutuhan penduduk akan makanan, pendidikan, perumahan dan lapangan pekerjaan. Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan, akan berdampak negatif terhadap pembangunan.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2035 (Pertengahan tahun/ Juni, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebanyak 1.180.948 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 persen dari tahun 2020. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,83 dengan jumlah laki-laki sebanyak 595.833 jiwa dan perempuan



sebanyak 585.115 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 10-29 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur di atas 100.000 jiwa.

Tabel 2.12

Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2010 dan 2021

Nama Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk per tahun		Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk 2020 (jiwa/km ²)		Rasio jenis kelamin	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kab. Boalemo	145.868	147.038	1,18	1,07	12,45	12,45	96	97	104,25	104,17
Kab. Gorontalo	393.107	395.635	0,96	0,86	33,55	33,50	225	226	101,43	101,37
Kab. Pohuwato	146.432	147.689	1,25	1,15	12,50	12,51	35	35	103,66	103,59
Kab. Bone Bolango	162.778	164.277	1,34	1,23	13,89	13,91	82	83	101,23	101,16
Kab. Gorontalo Utara	124.957	126.521	1,78	1,67	10,66	10,71	75	75	104,38	104,31
Kota Gorontalo	198.539	199.788	0,95	0,84	16,94	16,92	2.495	2510	98,89	98,82
1.171.681	1.180.948	1,16	1,06	100	100	104	105	101,90	101,83	

Sumber: Gorontalo dalam angka, BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo, 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	49.490	47.629	97.119
5-9	46.765	45.253	92.018
10-14	52.711	50.142	102.853
15-19	54.472	51.910	106.382
20-24	54.475	52.020	106.495
25-29	52.517	50.463	102.980
30-34	48.755	46.973	95.728
35-39	44.853	43.834	88.687
40-44	42.348	41.573	83.921
45-49	38.127	37.620	75.747
50-54	32.931	33.025	65.956
55-59	27.171	27.586	54.757
60-64	20.135	21.091	41.226
65-69	13.979	15.205	29.184
70-74	8.947	10.262	19.209
75+	8.157	10.529	18.686
Provinsi Gorontalo	595.833	585.115	1.180.948

Sumber: Gorontalo dalam angka, BPS Provinsi Gorontalo, 2022



Berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 101,83 persen. Ini berarti rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat sekitar 100-101 penduduk laki-laki.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

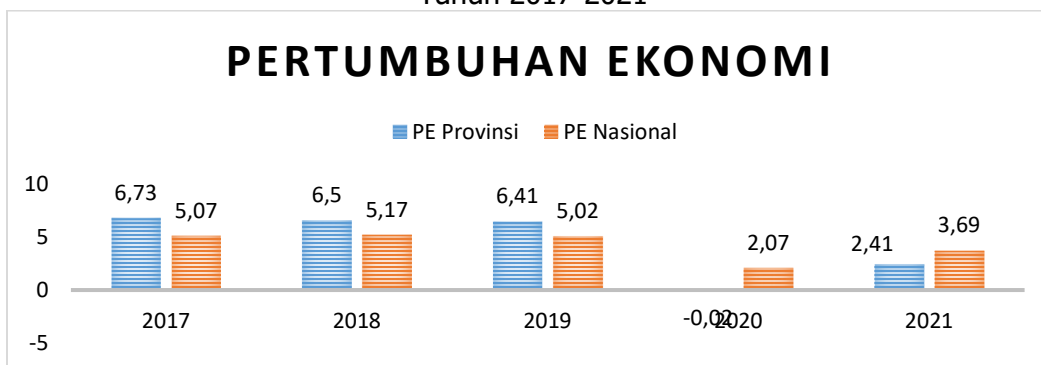
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif, terlebih ditahun 2020 gejala ekonomi akibat pandemi Covid19 mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan. Ekonomi Gorontalo tahun 2021 tumbuh sebesar 2,41 persen meningkat dibanding tahun 2020 sebesar minus 0,02 persen sering dengan kontraksi pertumbuhan Ekonom Nasional tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,69 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,16 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 13,57 persen.

Grafik 2.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.14

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2019-2021 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.018,13	16.188,12	17.085,46	10.652,83	10.478,71	10.665,33
B Pertambangan dan Penggalian	450,54	468,20	483,23	333,86	332,18	339,34
C Industri Pengolahan	1.755,20	1.799,86	1.936,07	1.159,78	1.172,89	1.235,68
D Pengadaan Listrik dan Gas	19,44	21,44	22,00	22,39	25,01	25,67
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	25,71	26,18	26,88	17,99	18,21	18,10
F Konstruksi	4.391,21	4.399,36	4.597,26	3.065,06	3.059,83	3.097,66
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.102,34	5.100,30	5.386,86	3.372,24	3.326,04	3.439,37
H Transportasi dan Pergudangan	2.366,71	2.245,93	2.325,26	1.626,50	1.551,39	1.578,04
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	969,04	964,41	1.008,92	666,95	659,74	685,96



J	Informasi dan Komunikasi	1.100,11	1.145,00	1.184,00	930,48	997,07	1.029,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.635,75	1.869,83	2.140,55	1.116,53	1.266,77	1.380,46
L	Real Estate	771,44	778,97	756,45	558,87	563,73	543,50
M,N	Jasa Perusahaan	38,62	36,49	37,54	26,58	24,86	25,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.599,96	2.628,17	2.644,99	2.073,67	2.077,45	2.076,81
P	Jasa Pendidikan	1.822,04	1.947,54	2.018,18	1.262,79	1.328,11	1.360,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.473,89	1.528,89	1.642,18	1.084,81	1.105,94	1.161,37
R,S, T,U	Jasa lainnya	605,31	581,08	600,53	458,64	437,30	447,15
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		41.145,45	41.729,77	43.896,37	28.429,97	28.425,21	29.109,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Perekonomian Gorontalo yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 mencapai Rp. 43.896,37 Miliar, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar Rp. 41.729,77 Milyar. Sementara PDRB Tahun 2021 yang diukur berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 29.109,96 Milyar.

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2019-2021 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,33	-1,63	1,78	2,37	-0,61	0,66
B	Pertambangan dan Penggalian	4,94	-0,50	2,16	0,06	-0,01	0,03
C	Industri Pengolahan	11,55	1,13	5,35	0,45	0,05	0,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,56	11,71	2,62	0,01	0,01	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,61	1,19	-0,58	0,01	0,00	0,00
F	Konstruksi	2,42	-0,17	1,24	0,27	-0,02	0,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,76	-1,37	3,41	1,33	-0,16	0,40
H	Transportasi dan Pergudangan	4,64	-4,62	1,72	0,27	-0,26	0,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	-1,08	3,98	0,16	-0,03	0,09
J	Informasi dan Komunikasi	7,82	7,16	3,27	0,25	0,23	0,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	13,46	8,97	0,03	0,53	0,40
L	Real Estate	8,20	0,87	-3,59	0,16	0,02	-0,07
M,N	Jasa Perusahaan	5,66	-6,49	1,22	0,01	-0,01	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78	0,18	-0,03	0,21	0,01	0,00
P	Jasa Pendidikan	9,31	5,17	2,45	0,40	0,23	0,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,26	1,95	5,01	0,34	0,07	0,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,87	-4,65	2,25	0,08	-0,08	0,03
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6,40	-0,02	2,41	6,40	-0,02	2,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Perekonomian Provinsi Gorontalo kumulatif tahun 2021 dibanding kumulatif tahun 2020 (*c-to-c*) tumbuh sebesar 2,41 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di seluruh kategori kecuali kategori Real Estate; kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,59 persen, 0,58



persen, dan 0,03 persen. Adapun pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,97 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 5,35 persen, dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,01 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2021 (c-to-c), kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,66 persen; diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,40 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan IV-2021 terhadap kumulatif triwulan IV-2020 (c-to-c) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,97 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,83 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,64 persen.

Tabel 2.16

Produk Domestik Regional Bruto seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Tahun 2019 – 2021 (Miliar Rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.432,33	25.860,27	27.128,56	17.444,99	17.463,28	17.878,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	310,33	310,49	321,78	221,93	219,13	221,81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.725,13	8.247,47	8.679,49	5.659,00	5.272,69	5.411,80
4. Pembentukan modal Tetap Bruto	11.653,27	11.691,59	12.383,79	8.559,36	8.474,68	8.714,47
5. Perubahan Inventori	913,02	731,45	644,81	470,44	372,74	320,17
6. Ekspor Barang dan Jasa	10.312,28	10.090,10	11.441,53	6.254,89	6.102,28	6.771,42
7. Impor Barang dan Jasa	16.200,90	15.201,61	16.703,59	10.180,63	9.479,59	10.208,54
PDRB	41.145,45	41.729,77	43.896,37	28.429,97	28.422,29	29.109,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.17

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010, Tahun 2019-2021

Komponen	Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
	2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,90	0,10	2,38	4,21	0,06	1,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,93	(1,26)	1,22	0,08	(0,01)	0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,00	(6,84)	2,64	1,01	(1,36)	0,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,31	(0,99)	2,83	1,02	(0,30)	0,84
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,91	(2,45)	10,97	0,44	(0,54)	2,35
7. Impor Barang dan Jasa	1,09	(6,89)	7,69	0,41	(2,47)	2,56
PDRB	6,40	(0,02)	2,41	6,40	(0,02)	2,41

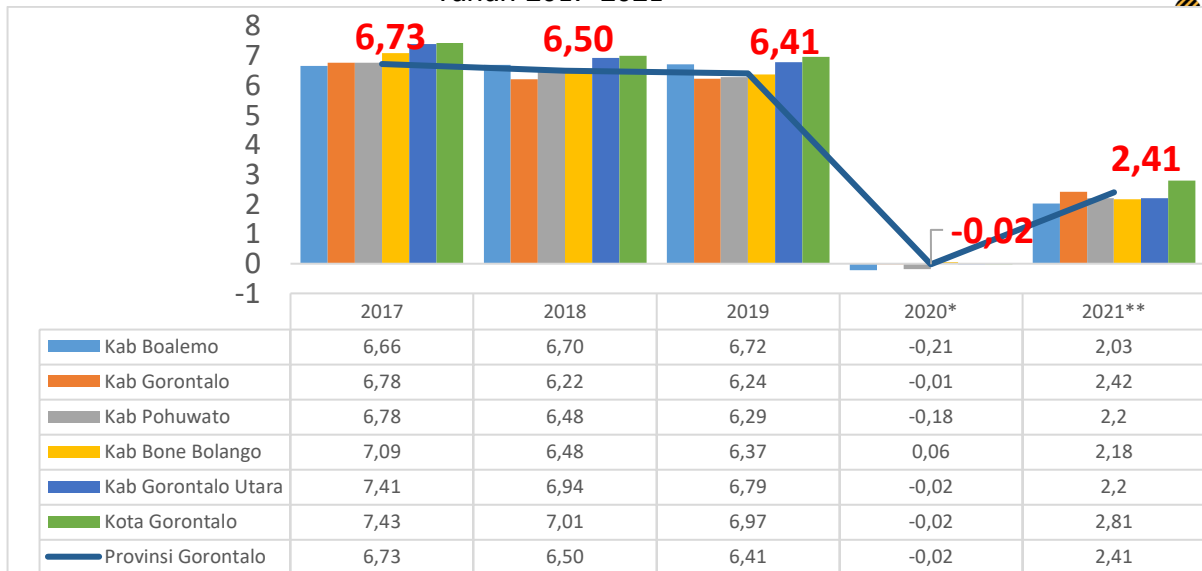
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara



Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Povinsi Gorontalo
Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kondisi ini juga terjadi di semua Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi tercepat dicapai oleh Kota Gorontalo sebesar 2,81 persen.

b. Laju Inflasi

Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2018=100) dibandingkan IHK lama (2012=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

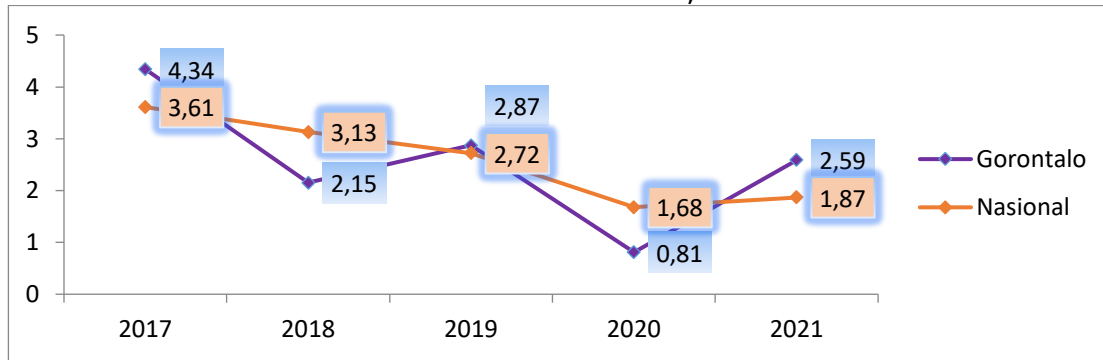
Laju inflasi tahun kalender Provinsi Gorontalo yang dihitung di wilayah Kota Gorontalo pada Desember 2021 dan laju inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) masing-masing sebesar 2,59 persen, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2022, namun demikian selama 5 lima tahun inflasi Kota Gorontalo yang menjadi cerminan inflasi Provinsi Gorontalo masih pada level rendah dan stabil.

Secara umum perkembangan inflasi Nasional dan Gorontalo sebagai berikut:



Grafik 2.3

Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

Peningkatan inflasi tahun 2020 terjadi di beberapa wilayah secara Nasional. Penurunan dan pelanggaran level PPKM dimasa pemulihan ekonomi Pasca Pandemi, mendorong geliat ekonomi dan mobilitas masyarakat yang kembali meningkat, sehingga mempengaruhi permintaan domestik dan berdampak pada peningkatan Indeks Harga Konsumen. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks pada beberapa komponen pengeluaran disepanjang tahun 2021 yaitu : kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya makanan, minuman dan tembakau yang naik sebesar 5,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,63 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen, kelompok Pendidikan sebesar 0,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,05 persen. Sementara Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok kesehatan sebesar -0,25 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,12 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,06 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi di Kota Gorontalo selama tahun 2021 antara lain: cabai rawit sebesar 0,5949 persen, minyak goreng sebesar 0,3303 persen, sewa rumah sebesar 0,0969 persen, rokok putih sebesar 0,088 persen, nasi dengan lauk sebesar 0,081 persen, dan tomat sebesar 0,0576 persen. Di sisi lain beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi di Kota Gorontalo selama tahun 2021 antara lain: bawang merah sebesar -0,1973 persen, telur ayam ras sebesar -0,0427 persen, dan lainnya.

c. PDRB perkapita

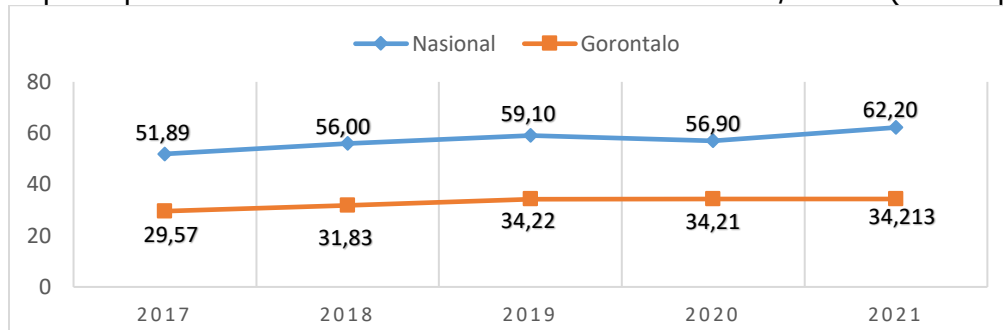
PDRB perkapita merupakan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam arti bahwa semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah walaupun ukuran ini belum mencakup



faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir PDRB perkapita meningkat 15,68%. Secara periodik, pertumbuhan PDRB perkapita naik rata-rata 7 % setiap tahunnya, namun ditahun 2020 karena adanya resesi ekonomi akibat pandemi covid19, PDRB perkapita hanya tumbuh sebesar 0,006%. Tahun 2021 PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo sebesar 34.213 juta, belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 37,56 Juta Rupiah.

Grafik 2.4

PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 s/d 2021 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

d. Indeks Gini

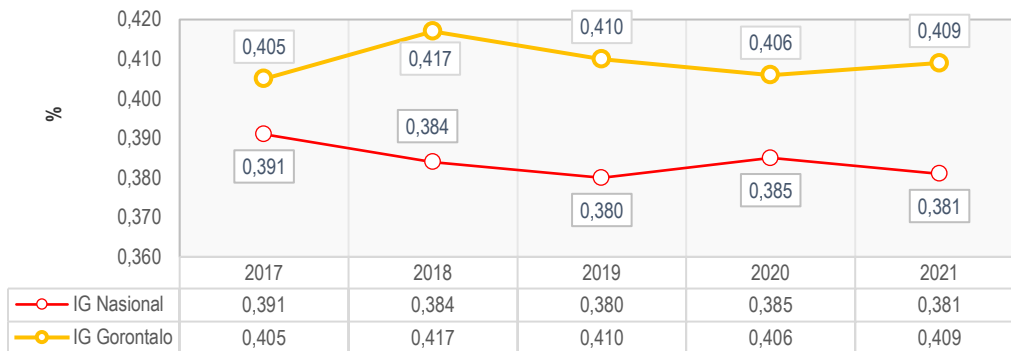
Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi salah satunya melalui pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Nilai Gini Rasio Gorontalo selama periode September 2017-2021 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,409. Angka ini meningkat sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2021 dan naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2020.

Grafik 2.5

Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Keterangan :

$G < 0,3$ = Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$ = Ketimpangan Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 0,009 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,398. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, terjadi peningkatan yang lebih signifikan yakni sebesar 0,017 poin dari gini rasio sebesar 0,390. Untuk daerah perdesaan, Gini Rasio pada September 2021 adalah sebesar 0,390, turun sebesar 0,007 poin dibandingkan Maret 2021 dan turun tipis sebesar 0,001 poin dibandingkan September 2020. Adapun Gini Rasio di daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,397 dan pada September 2020 tercatat sebesar 0,391.

Grafik 2.6

Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo, Maret 2017-September 2021



Sumber : Diolah dari Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh



terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2021 diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo periode Maret 2021-September 2021 mengalami peningkatan mencapai 3,65 persen.
- b. Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang paling besar hingga mencapai 4,06 persen dibandingkan kelompok lainnya. Adapun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah adalah sebesar 3,46 persen dan kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 3,36 persen.
- c. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 3,26 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di daerah perdesaan yang sebesar 3,75 persen.

e. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih menjadi permasalahan yang sangat serius, Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih diatas Nasional, berada pada posisi ke 5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penanganan kemiskinan didaerah, mulai dari pemenuhan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur serta programprogram strategis lainnya. Jika dilihat dari perkembangan 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo cenderung menurun, meskipun masih berada diatas angka rata-rata kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen ditahun 2021. Penurunan tingkat kemiskinan paling signifikan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 di Provinsi Gorontalo menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan.

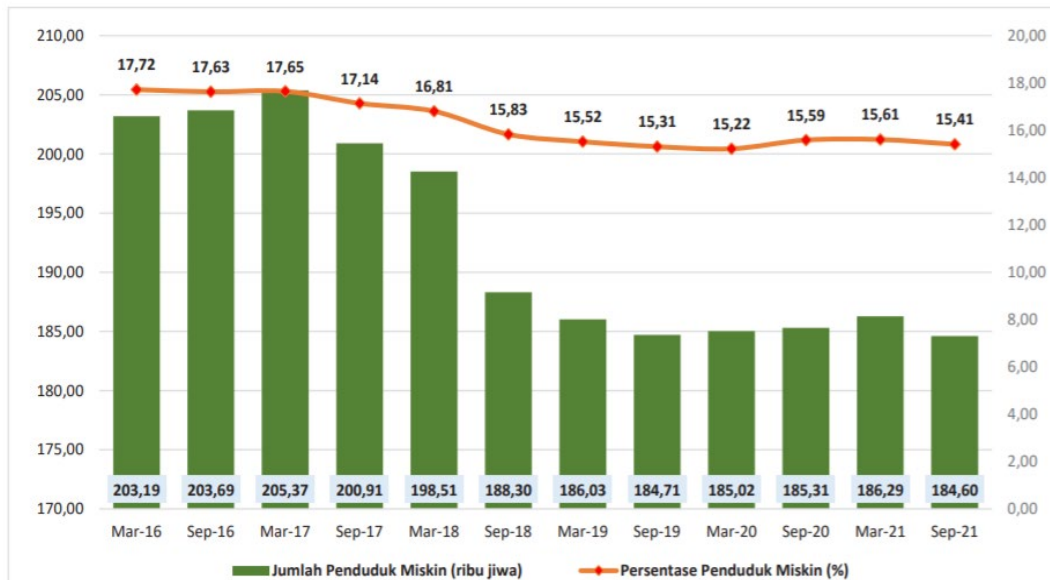
Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016- Maret 2020 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, kecuali pada Maret 2017 yang sempat naik tipis dari September 2016. Penurunan tingkat kemiskinan paling signifikan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Pada September 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan



dibandingkan Maret 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2016 sampai dengan September 2021 disajikan pada Gambar dibawah ini.

Grafik 2.7

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, Maret 2016-September 2021



Sumber: Diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2021 mencapai 184,60 ribu orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,69 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,71 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 15,41 persen, menurun 0,20 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,18 persen poin terhadap September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021-September 2021, jumlah dan persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin perdesaan pada September 2021 tercatat sebanyak 163,09 ribu orang, turun sebanyak 1,1 ribu orang jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebanyak 164,19 ribu orang. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan kondisi September 2021 tercatat sebanyak 21,51 ribu orang, turun sebesar 0,58 ribu orang jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebanyak 22,09 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 4,06 persen, turun 0,17 persen poin dari kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 24,38 persen, turun 0,09 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 24,47 persen.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp389.827,- per kapita per bulan dan pada September 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp400.504,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp10.677,- per kapita per bulan, atau naik



sebesar 2,74 persen. Pada September 2021, GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp298.372,- dan perdesaan sebesar Rp315.316,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan di daerah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahal. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan adalah sebesar Rp102.847,- dan perdesaan sebesar Rp83.491,- maka terlihat bahwa di daerah perkotaan, GKNM cenderung lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa penduduk di daerah perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk di daerah perdesaan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh konsumsi kebutuhan non makanan di perkotaan yang lebih banyak dengan harga relative lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, seperti komoditi perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan, serta jasa. Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar Rp401.219,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp398.806,- per kapita per bulan.

Pada periode Maret 2021–September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar 2,918 naik 0,043 poin dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 2,875, jika dibandingkan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 2,863, nilai ini naik 0,055 poin. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan 0,051 poin dari 0,721 pada Maret 2021 menjadi 0,772 pada September 2021. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,791, nilai ini turun sebesar 0,019 poin. Jika dibandingkan menurut daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,550, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 4,792. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,087, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,315.

Tabel 2.18

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Gorontalo September 2020-September 2021

Indicator/ Periode	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2020	0,433	4,723	2,863
Maret 2021	0,577	4,663	2,875
September 2021	0,550	4,792	2,918
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			



September 2020	0,090	1,326	0,791
Maret 2021	0,116	1,192	0,721
September 2021	0,087	1,315	0,772

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2021-September 2021 antara lain adalah:

- Ekonomi Gorontalo triwulan III- 2021 terhadap triwulan III- 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,04 persen (*y-on-y*). Angka ini jauh meningkat dibanding capaian triwulan III 2020 terhadap triwulan III- 2019 yang berkontraksi sebesar 0,08 persen (*y-on-y*).
- Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 0,45 persen (*y-on-y*), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 0,03 persen.
- Selama periode Maret 2021–September 2021, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,02 persen. Terjadi deflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar -2.24 persen.
- Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,01 persen. Turun 1,27 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.
- Pada Agustus 2021, sebesar 62,39 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal, turun 0,01 persen dibanding Februari 2021.
- Sebanyak 68,06 ribu penduduk usia kerja (7,52 persen) terdampak Covid-19 pada Agustus 2021. Turun sebanyak 50,14 ribu penduduk (42,42 persen) dibandingkan dengan Agustus 2020 yang tercatat sebesar 118,19 ribu penduduk usia kerja.
- NTP kondisi September 2021 tercatat sebesar 104,54, ini sudah di atas 100 artinya pendapatan yang diterima petani cenderung lebih tinggi dari biaya yang dibayarkan petani, atau dengan kata lain petani cenderung untung.

Berdasarkan data statistik kemiskinan kabupaten/Kota se-Provinsi, Persentase Kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Boalemo dengan persentase sebesar 19,00 persen, sementara yang terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,93 persen.

Tabel 2.19

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin (persen)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Boalemo	426.961	450.724	31,63	31,83	18,57	19,00
Gorontalo	475.102	502.964	66,73	67,21	17,56	17,89
Pohuwato	309.174	327.587	28,92	29,22	17,62	18,08
Bone Bolango	424.275	449.543	25,72	25,76	15,81	16,30
Gorontalo Utara	311.200	327.531	19,56	19,34	16,88	17,23
Kota Gorontalo	569.538	598.363	12,46	12,94	5,59	5,93
Provinsi Gorontalo	368.990	389.827	185,02	186,29	15,22	15,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometric indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

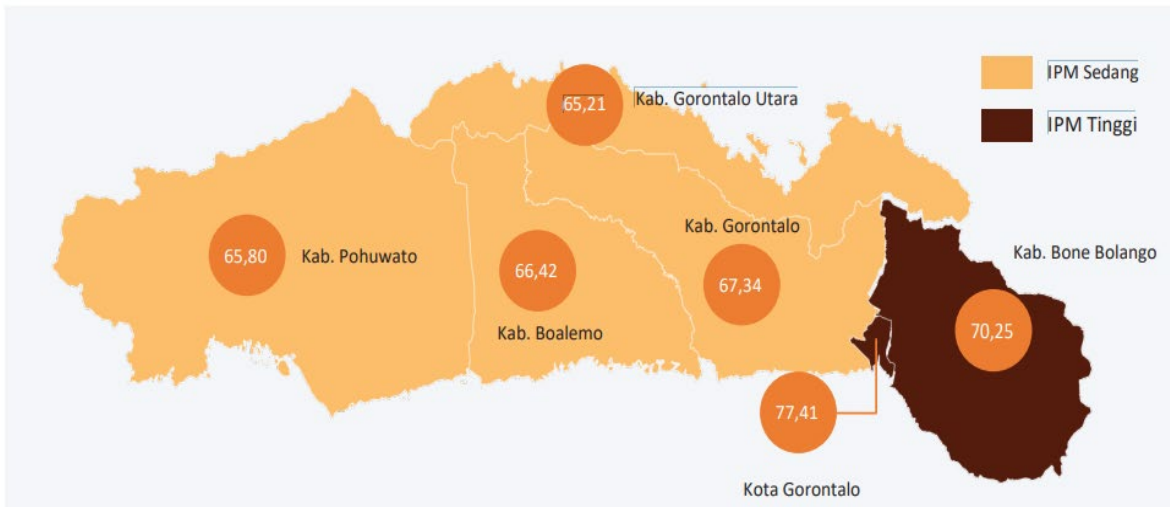
Pada tahun 2021, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 65,21 (Kab. Gorontalo Utara) hingga 77,41 (Kota Gorontalo). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 64,30 tahun (Kab. Pohuwato) hingga 72,53 tahun (Kota Gorontalo). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,38 tahun (Kab. Pohuwato) hingga 14,50 tahun (Kota Gorontalo), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,00 tahun (Kab. Boalemo) hingga 10,37 tahun (Kota Gorontalo). Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 8,94 juta rupiah per tahun (Kab. Boalemo) hingga 12,39 juta rupiah per tahun (Kota Gorontalo). Kabupaten Bone Bolango mengalami perubahan status dari sedang menjadi tinggi di tahun 2021, sehingga status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota menjadi 4 kabupaten yang berstatus "sedang" dan 2 wilayah (Kota



Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango) yang berstatus “tinggi” pada tahun 2021. Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2020 hingga 2021, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat dua kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Boalemo (0,77 persen) dan Kabupaten Pohuwato (0,66 persen).

Gambar 2.8

Capaian dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2021



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2021

g. Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun demikian, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata. Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru.



Tabel 2.20

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2020

Provinsi/ Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Boalemo	80,36	80,82	81,14	81,15	81,52
Kabupaten Gorontalo	80,98	81,18	81,33	81,67	82,72
Kabupaten Pohuwato	91,31	91,11	91,46	91,36	91,40
Kabupaten Bone Bolango	86,71	86,96	87,71	87,54	88,23
Kabupaten Gorontalo Utara	80,44	81,16	81,25	81,16	81,17
Kota Gorontalo	86,09	86,06	86,25	86,23	86,76
PROVINSI GORONTALO	86,64	86,63	86,83	86,73	87,50

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2021 cukup baik yaitu sebesar 87,50 persen. Kondisi IPG terus membaik (mendekati 100) mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki-lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Selain Indeks Pembangunan Gender, terdapat indikator lainnya dalam rangka mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pembangunan, yaitu melalui Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan ditempat manajerial, dan upah pekerja perempuan disektor non pertanian.

Tabel 2.21

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Provinsi/ Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
Boalemo	24	56,31	29,15	70,38
Gorontalo	17,14	59,39	26,75	62,48
Pohuwato	16,67	60,53	36,33	69,41
Bone Bolango	4	58,19	29,73	52,13
Gorontalo Utara	25	56,85	28,07	70,51
Kota Gorontalo	24	59,89	31,25	71,19
PROVINSI GORONTALO	26,67	58,78	26,90	70,40

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 70,40, dengan indikator pendukungnya yaitu Perempuan sebagai tenaga Profesional sebesar 58,78 persen, keterlibatan perempuan di Parlemen sebesar 26,67 persen dan Sumbangan



Pendapatan Perempuan sebesar 26,90 persen. Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi berada di Kota Gorontalo sebesar 71,19, dan terendah adalah Kabupaten Bone Bolango sebesar 52,13 persen.

h. Ketenagakerjaan

Dampak Covid19 tidak hanya terhadap kondisi ekonomi dan kemiskinan, namun juga pada kondisi ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik mengelompokkan Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 menjadi 4 (empat) komponen, yaitu: a) Pengangguran karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; c) Sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Tabel 2.22

Dampak Covid19 terhadap Penduduk Usia Kerja Provinsi Gorontalo, 2021

Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan Agustus 2020 – Agustus 2021	
			Orang	Persen
Pengangguran karena Covid19	6.310	3.795	-2.515	-39,86
Bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid19	2.853	2.515	-388	-11,85
Sementara tidak bekerja karena Covid19	5.730	5.144	-586	10,23
Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerjakarena Covid19	103.299	56.602	-46.697	-45,21
Total Terdampak	118.192	68.056	-50.136	-42,42
Penduduk Usia Bekerja (PUK)	893.745	905.361	11.616	1,3
Persentase terdampak terhadap PUK	13,22	7,52	-5,7	

Keterangan :

Merujuk pada kondisi sebelum pandemic covid 19 (februari 2020)

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Data Badan Pusat Statistik dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 sebanyak 68.056 orang, mengalami penurunan sebesar 50.136 orang atau sekitar 42,42 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 3.795 orang pengangguran karena Covid-19, 2.515 orang bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19, 5.144 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 56.602 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Secara keseluruhan, dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja menurun dari 13,22 persen pada Agustus 2020 menjadi 7,52 persen pada Agustus 2021.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2020 sebesar 4,28 persen, kemudian menurun menjadi 3,01 persen pada Agustus 2021. Pendorong utama penurunan ini adalah terjadinya penurunan TPT di wilayah perkotaan dari 6,42 persen pada Agustus 2020 menjadi 4,34 persen Pada Agustus 2021. Adapun TPT perdesaan juga mengalami penurunan dari 2,73 persen pada Agustus 2020 menjadi 2,01 persen pada Agustus 2021. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. TPT laki-laki pada Agustus 2020 sebesar 4,53 persen menurun menjadi 3,05 persen pada Agustus 2021 sedangkan TPT perempuan pada Agustus 2020 sebesar 3,86 persen menurun menjadi 2,94 persen pada Agustus 2021.

Tabel 2.23

Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan Utama Provinsi Gorontalo, Agustus 2020, Februari 2021 dan Agustus 2021

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus2021	Perubahan 1 tahun	Perubahan 6 bulan
				Aug 20-Aug 21	Feb 21-Aug 21
Penduduk Usia Kerja	893.745	899.332	905.361	11.616	6.029
Angkatan Kerja	593.973	605.913	596.968	2.995	-8.945
Bekerja	568.563	585.225	579.009	10.446	-6.216
Pengangguran	25.410	20.688	17.959	-7.451	-2.729
Bukan Angkatan Kerja	299.772	293.419	308.393	8.621	-14.974
Sekolah	67.189	72.533	64.609	-2.580	-7.924
Mengurus Rumah Tangga	194.191	183.267	200.250	6.059	16.983
Lainnya	38.392	37.619	44.534	6.142	6.915
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,28	3,41	3,01	-1,27	-0,4
Perkotaan	6,42	3,60	4,34	-2,08	0,74
Perdesaan	2,73	3,27	2,01	-0,72	-1,26
Laki-laki	4,53	3,62	3,05	-1,48	-0,57
Perempuan	3,86	3,08	2,94	-0,92	-0,14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,46	67,37	65,94	-0,52	-1,43
Perkotaan	64,72	66,96	64,42	-0,3	-2,54
Perdesaan	67,77	67,70	67,12	-0,65	-0,58
Laki-laki	83,02	83,14	81,60	-1,42	-1,54
Perempuan	49,95	51,70	50,41	0,46	-1,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Harapan Lama Sekolah

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

Tabel 2. 24
Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2019	2020	2021
Boalemo	12,43	12,44	12,45
Bone Bolango	13,45	13,57	13,65
Gorontalo	12,94	13,17	13,18
Gorontalo Utara	12,44	12,45	12,46
Kota Gorontalo	14,32	14,34	14,50
Pohuwato	12,36	12,37	12,38
Provinsi Gorontalo	13,06	13,08	13,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (*mean years school/mys*) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat Pendidikan penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.25
Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Boalemo	6,38	6,53	6,54	6,82	7,00
Gorontalo	6,81	6,83	7,11	7,13	7,30
Pohuwato	6,84	6,85	7,10	7,12	7,26
Bone Bolango	7,84	8,04	8,07	8,31	8,32
Gorontalo Utara	6,68	6,72	6,74	7,03	7,15
Kota Gorontalo	10,32	10,34	10,35	10,36	10,37
Provinsi Gorontalo	7,28	7,46	7,69	7,82	7,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat Pendidikan terakhirnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo, masih relatif sama selama 3 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun.



2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan Seni Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gorontalo memiliki beraneka ragam budaya daerah yang sangat kental dengan adat istiadat Provinsi Gorontalo. Kebudayaan daerah tersebut meliputi tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, upacara keagamaan, rumah adat dan pakaian adat, yang masih dijaga kelestariannya.

Pembangunan dibidang kesenian penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan, karena mempunyai peran penting dalam mendukung pariwisata di Gorontalo. Dengan penguatan terhadap jargon "Serambi Madinah", sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata "*Halal Tourism*". Hal ini dilakukan melalui program Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam melestarikan kebudayaan. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan pengakuan Nasional terus meningkat hingga tahun 2021 sebanyak 7 jenis, sebanyak 480 jenis benda bersejarah tersimpan di museum dan sebanyak 5 jenis dokumen budaya daerah Gorontalo.

Dalam rangka pengembangan seni dan budaya Gorontalo, beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyusunan dokumen karya seni budaya yang diakui secara Nasional maupun Internasional. Sebanyak 5 buku budaya daerah yang disusun dalam rangka pelestarian budaya di Gorontalo yaitu *Upiya Karanji, elengge, longgo, tiliaya dan ilabulo*.

Adapun penghargaan yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2021 dibidang seni dan budaya yaitu Pengakuan Nasional terhadap Karya Seni Budaya Gorontalo (Tidi lo Tihuo, Tidi lo Maluo, Tidi Daa, Tahuda, Le Ningo, Dana-dana, Buruda).

Selain dari aspek seni dan budaya, pengembangan minat bakat lainnya yaitu melalui bidang olahraga. Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pengembangan pemuda dan olahraga, dilakukan melalui Pembinaan dan Pembibitan olahragawan dalam rangka mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari. Tahun 2021 pengembangan pemuda dan olahraga dilakukan melalui pembinaan pemuda dan olahraga sebanyak 859 orang. Melalui program kegiatan yang dilakukan tersebut, Provinsi Gorontalo tahun 2021 memperoleh Medali Tertimbang Olahraga Pelajar Tingkat Nasional dan Internasional sebanyak 12 Medali dari target yang ditetapkan sebanyak 8 Medali.

Prestasi olahraga yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2021 dalam bidang olahraga yaitu :

- 1) Pekan Olahraga Nasional (PON XX Papua) Cabang Olahraga Sepak Takraw meraih 2



Medali Emas

- 2) Pekan Olahraga Nasional (PON XX Papua) Cabang Olahraga Taekwondo meraih 1 Medali Perak
- 3) Pekan Olahraga Nasional (PON XX Papua) Cabang Olahraga E-Sport meraih 1 Medali Perunggu
- 4) Pekan Olahraga Nasional (PON XX Papua) Cabang Olahraga Muay Thai meraih 1 Medali Perunggu
- 5) Kejuaraan Nasional PPLP Lampung Cabang Olahraga Karate meraih 1 Medali Emas dan 2 Medali Perunggu

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut : pemerintah pusat berkewenangan dalam penetapan standar pendidikan, Pemerintah provinsi berkewenangan mengelola pendidikan menengah dan untuk kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar. Sejak diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA DAN SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo dilakukan melalui peningkatan akses bagi masyarakat. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat mengakses fasilitas pendidikan. Penghitungan APS biasanya dibedakan berdasarkan kelompok umur sekolah, misal 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun.

Secara umum, APS Provinsi Gorontalo cenderung mengalami peningkatan pada setiap kelompok umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.26

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun dan 19-24 Tahun, Provinsi Gorontalo tahun 2019-2021

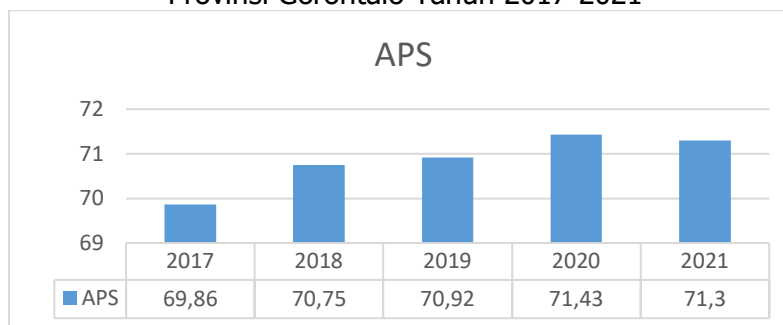
Provinsi	APS											
	7 – 12			13 – 15			16 - 18			19-24		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
GORONTALO	98,96	98,92	99,02	91,64	91,80	92,05	71,44	71,43	71,30	30,97	31,04	31,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tahun 2021, Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun atau jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 71,30

Grafik 2.8

Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun
Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang SMA/SMK/MA. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu melalui bantuan operasional sekolah dan manajemen prodira.

2) Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalannya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkatan Pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkatan pendidikan.



Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*key development milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2.27

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK, 2020-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)					Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	78,11	78,71	78,75	77,30	77,75	98,12	98,14	98,27	96,87	96,86

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/SMK/MA tahun 2021 sebesar 77,75 menunjukkan bahwa hanya 77,75 persen penduduk usia 16 tahun ke atas yang bersekolah di SMA/ SMK/MA. APM SMA/SMK/MA tahun 2021 meningkat 0,45 % dibanding tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan Angka Partisipasi Kasar yang menurun dalam 2 (dua) tahun terakhir. Tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar sebesar 96,86 persen.

Pembangunan bidang pendidikan dilakukan melalui penyediaan dukungan sarana dan prasarana Pendidikan melalui pembangunan sekolah, ruang kelas baru, Laboratorium Komputer bagi SMA/SMK dan SLB, peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui penyediaan beasiswa studi, fasilitasi kegiatan boarding school, bantuan bagi siswa SMK peserta Praktek kerja Industri, mendorong Pendidikan vokasi melalui sertifikasi bagi siswa SMK.

3) Rasio Sekolah

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan khususnya dapat memberantas buta huruf.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2021 rasio siswa per kelas SMA/MA sebesar 1 : 29, sedangkan untuk SMK rasio sekolah 1 : 20. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 29 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 20 peserta



didik. Data ini menunjukkan bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan.

Disamping itu, untuk menciptakan Kegiatan belajar mengajar yang kondusif, juga ditunjang dengan kondisi fisik sekolah dan ruang kelas. Kondisi ruang kelas untuk Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) dalam kondisi baik yaitu sebesar 65,28 persen.

4) Rasio Guru

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian. Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Data dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga untuk guru SMA (PNS dan GTT) sebanyak kurang lebih 1874 orang dan guru SMK (PNS dan GTT) sebanyak 1745v orang yang tersebar di kabupaten/kota se- Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio murid guru SMA/MA tahun 2021 sebesar 1:17, sementara rasio guru SMK 1 : 11. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdikan di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal.

b. Kesehatan

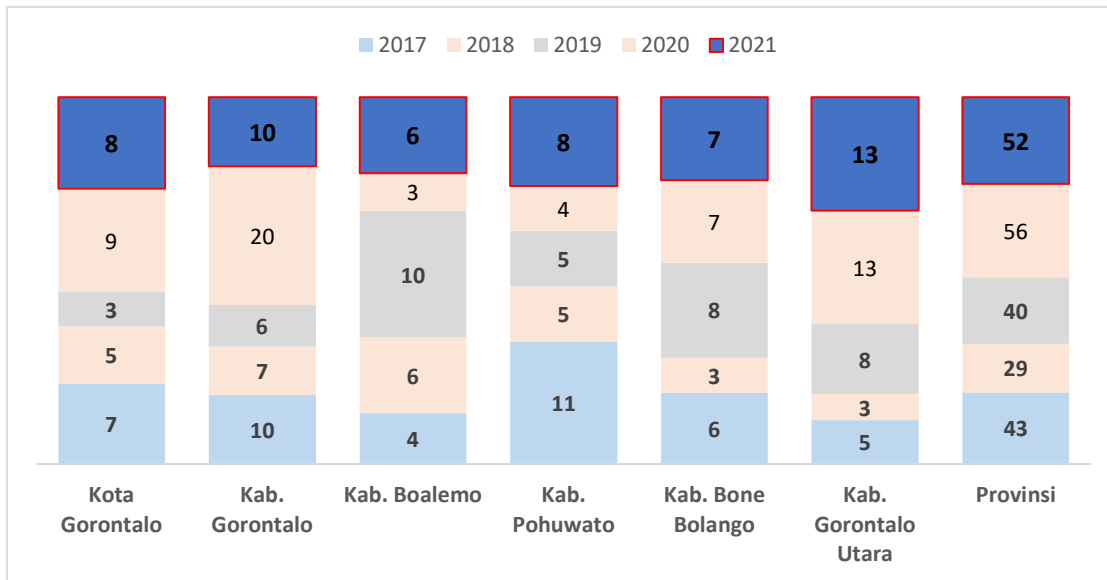
1) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu melahirkan di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas pelayanan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu saat ini didominasi akibat paparan virus corona atau terkonfirmasi Virus Covid-19, sedangkan kasus lainnya diakibatkan karena eklamsia, perdarahan serta penyakit penyerta lainnya yang masih menjadi masalah.

Salah satu penyebab tertinggi dari Angka Kematian Ibu yaitu sebanyak 42% dari faktor eklamsia dan preeklamsia berat. Penyebab dari Angka Kematian Ibu dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik. Selama 2 tahun terakhir Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh pandemi covid19. Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2021 sebesar 251,7 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya yang sempat naik hingga 273 per 100.000 KH ditahun 2020. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan terus ditingkatkan, yang didukung dengan dukung fasilitas sarana dan prasarana. Total sebanyak 22.206 ibu hamil melakukan pemeriksaan K1, dan sebanyak 18.453 ibu hamil melakukan pemeriksaan K4.

Grafik 2.9

Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2017- 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2022

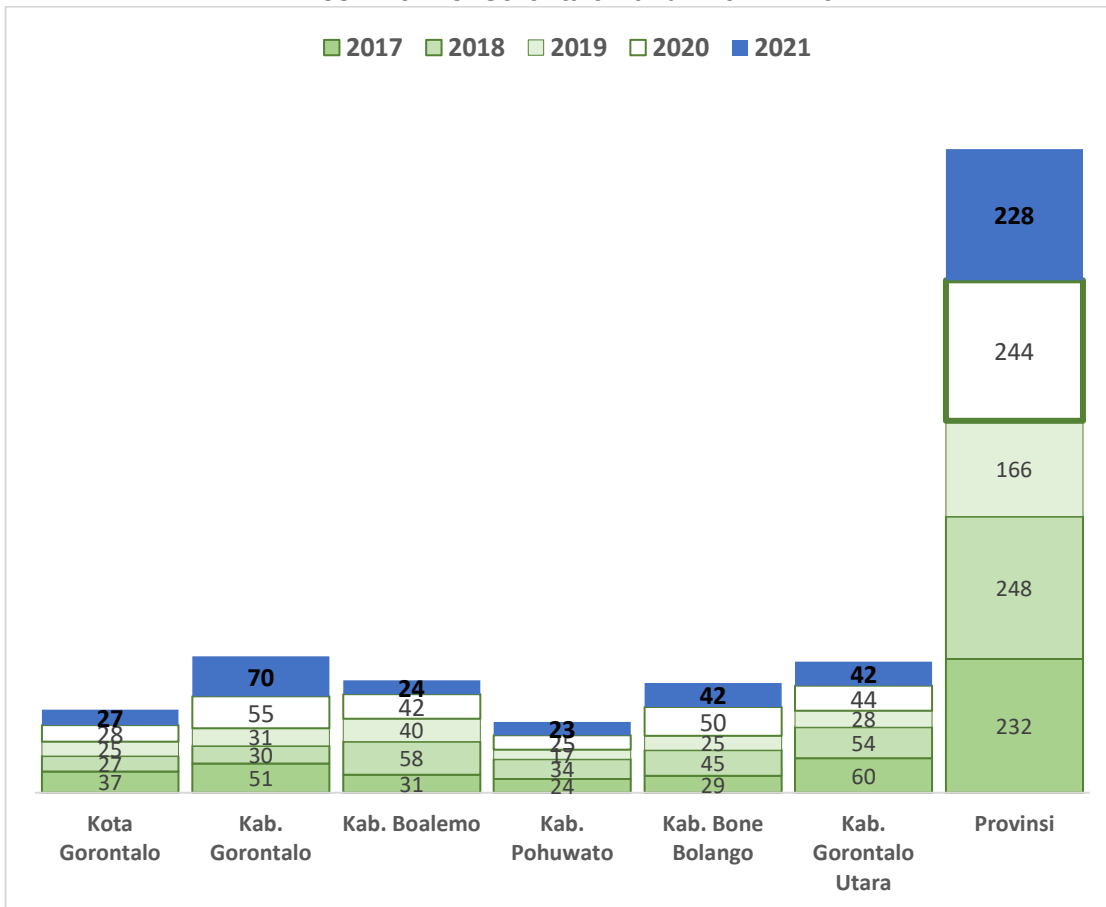
2) Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal

Angka Kematian Bayi/Infan Mortality Rate (IMR), tahun 2021 turun sebesar 11,1 per 1.000 2020 naik lagi menjadi 11,9 per 1000 kelahiran hidup. Kasus angka kematian Bayi di Provinsi Gorontalo masih relative fluktuatif. Sebagian besar penyebab langsung dari kematian bayi adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia dan kelainan kongenital, sedangkan yang menjadi penyebab tidak langsung antar lain riwayat komplikasi pada ibu, faktor lingkungan yang tidak sehat, serta faktor pelayanan kesehatan (kualitas pelayanan antenatal), dipengaruhi oleh kehandalan dan ketelitian Bidan juga kepatuhan ibu hamil melakukan pemeriksaan. Gambaran Jumlah dan Angka Kematian Bayi Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.10

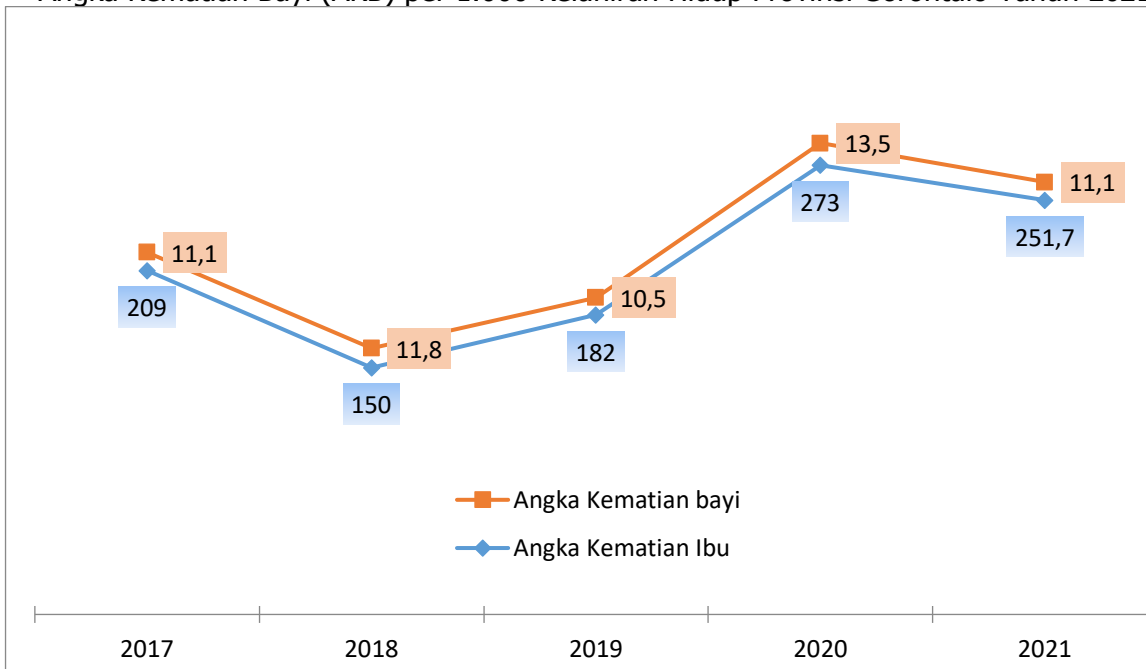
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten/ Kota se- Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2022

Grafik 2.11

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2022

Intervensi langsung Pemerintah Provinsi dalam upaya menekan AKI dan AKB yaitu melalui Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu dengan pendampingan selama

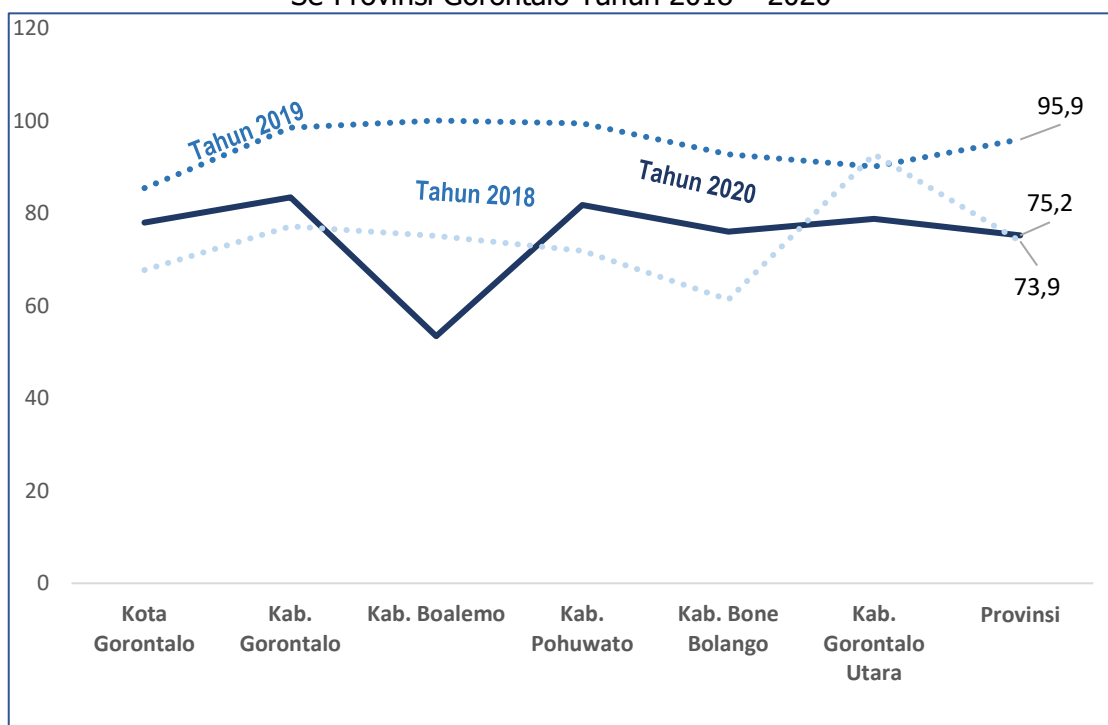


masa kehamilan, selanjutnya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan pemberian makanan tambahan untuk ibu Hamil KEK dan Balita Kurang Gizi, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, PMT, susu ibu hamil dan lainnya memberi dampak yang cukup baik bagi penurunan persentasi BBLR. Kondisi BBLR ini sangat ditentukan oleh kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan. Sebagai upaya meminimalkan jumlah kematian bayi juga dilakukan melalui penyediaan SDM yang terampil dalam menolong persalinan, pemerataan distribusi tenaga Kesehatan dimasing-masing daerah, memastikan kemudahan akses ke fasyankes bagi bumil, peningkatan tata laksana bayi baru lahir melalui kunjungan neonatal, memberikan asupan gizi yang cukup, pemberian ASI dan imunisasi dasar lengkap.

Untuk indikator keberhasilan program imunisasi diukur melalui cakupan desa UCI (*Universal Child Immunization*). Desa UCI adalah desa dimana 80% anak di desa tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap tepat waktu.

Grafik 2.12

Persentase Desa UCI di Kabupaten Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2020



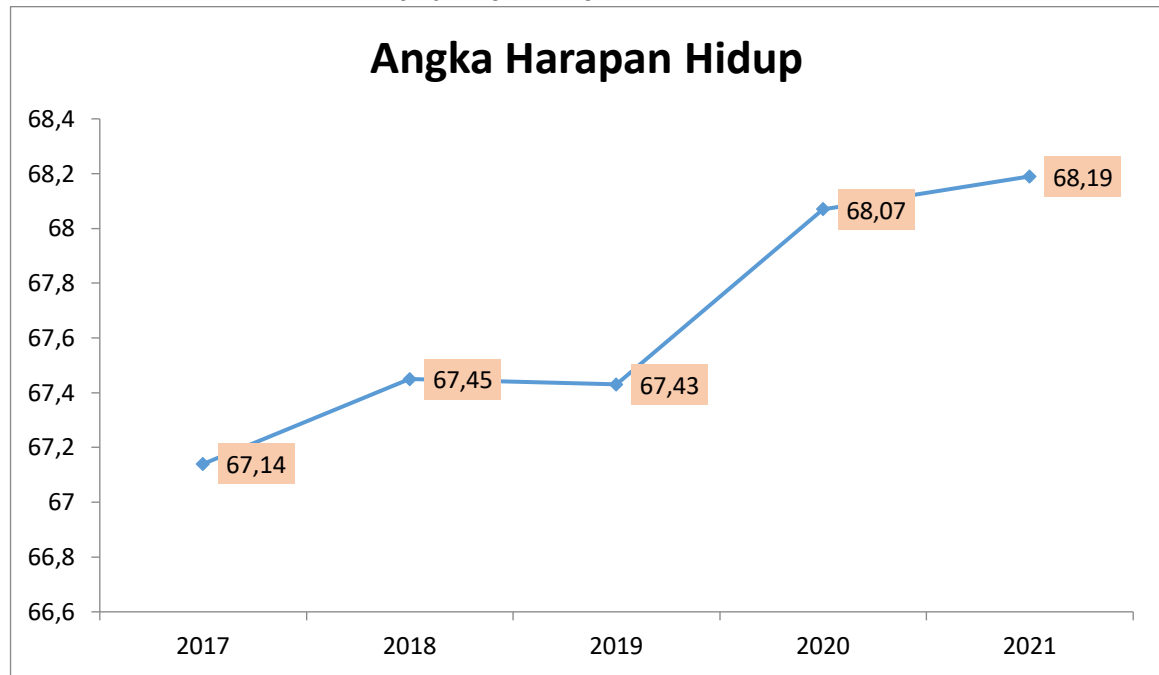
Sumber data : Seksi Surveilans Imunisasi Dikes Provinsi Gorontalo Tahun 2020

3) Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Capaian AHH di Provinsi Gorontalo tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Grafik 2.13
Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 - 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2022

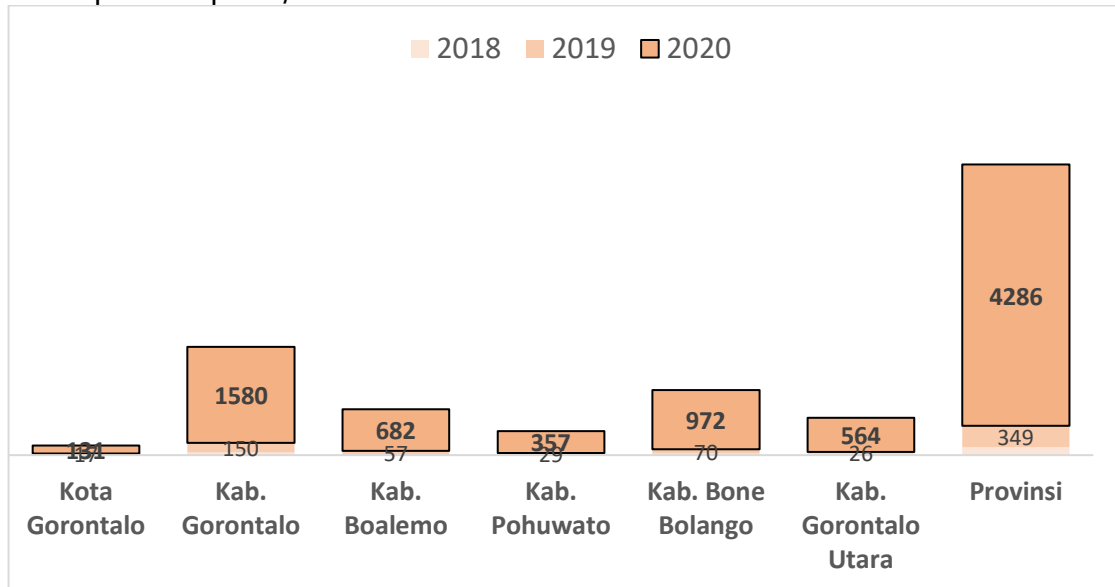
Berdasarkan grafik diatas, AHH Provinsi Gorontalo meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya, sektor kesehatan ikut berkontribusi terhadap peningkatan AHH misalnya meningkatkan angka kecukupan gizi serta terus mengupayakan pencegahan penyakit menular serta menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular.

4) Prevalensi Kekurangan Gizi

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). Prevalensi Underweight tahun 2019 mencapai angka 2,95% meningkat cukup tinggi menjadi 8,21 % pada tahun 2020. Data diambil berdasarkan aplikasi E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Gizi dan Masyarakat) Keadaan status gizi anak balita khususnya jumlah kasus gizi buruk pada usia 0 – 2 tahun di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 meningkat menjadi 2532, jika dibandingkan tahun 2019 hanya berjumlah 349, Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Grafik 2.14
Jumlah Balita Gizi Buruk + Gizi Kurang (Underweight)
per Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 sd 2020

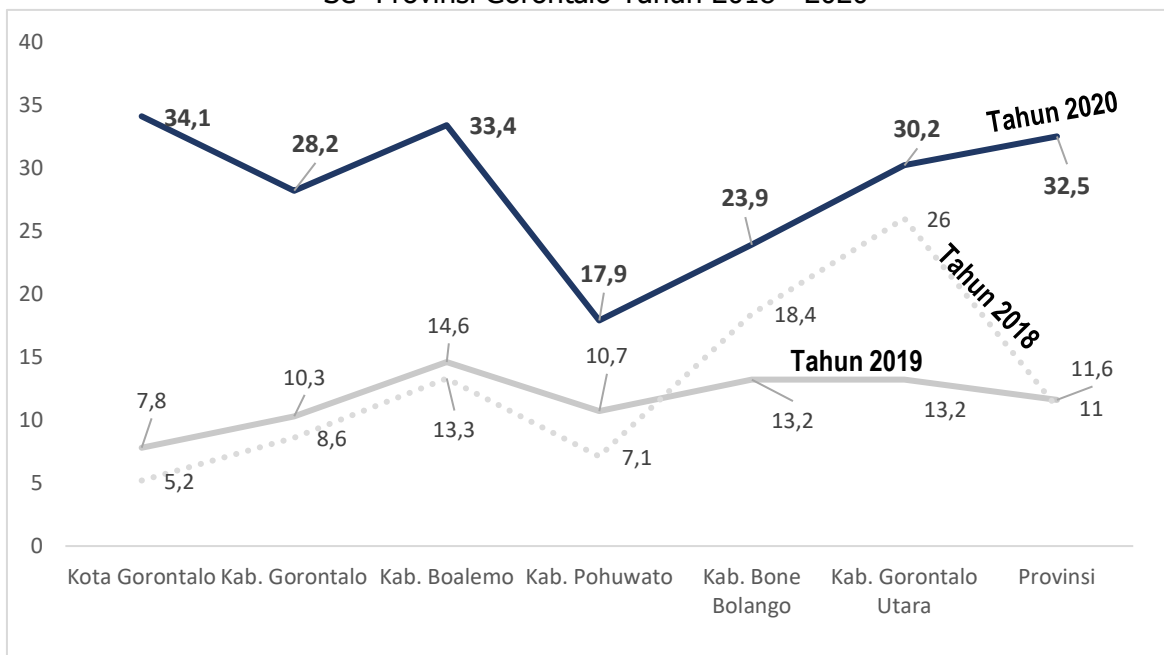


Sumber data : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2020

5) Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru Nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa.

Grafik 2.15
Persentase Stunting di Kabupaten/ Kota
Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2018 - 2020



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentasi stunting meningkat disbanding tahun 2019, data ini berdasarkan hasil inputan e PPGBM namun dapat dipastikan angka ini adalah underreporting, karena dari total sasaran balita yang di





entry berjumlah 105.547 hanya 31,4% yang dilakukan pengukuran, jadi kurang lebih 68,6% balita yang tidak dilakukan pengukuran.

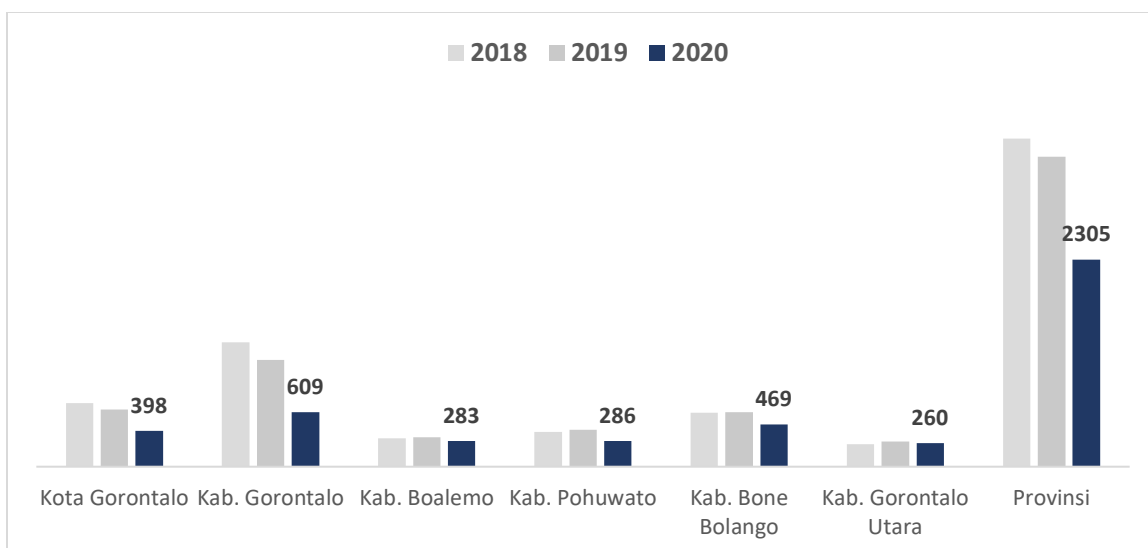
Penanganan kasus gizi buruk dan stunting selain intervensi spesifik oleh sector Kesehatan melalui pemberian makanan tambahan dan vitamin, pemantauan tumbuh kembang, tata laksana gizi buruk dan promosi kesehatan, juga dibutuhkan integrasi penanganan oleh sector diluar Kesehatan dengan intervensi sensitive melalui peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, dan lain lain.

6) Angka Kesakitan (Mordibitas)

Tingkat kesakitan merupakan cermin dari situasi derajat Kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Beberapa indicator morbiditas penyakit tertentu yang merupakan keterkaitan dengan komitmen global. Program utama untuk menekan angka kesakitan adalah dengan mengembangkan system surveilans epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vector penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu. Indikator angka kesakitan / Morbiditas yaitu TBC, HIV/AIDS, Malaria dan penyakit Demam Berdarah (DBD).

Untuk jumlah kasus TBC sensitive obat tahun 2020 yang ditemukan di Provinsi Gorontalo sebanyak 2305 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 1186 kasus, dan terendah berada di Kabupaten Gorontalo Utara hanya 279 kasus. Untuk lebih jelasnya data penemuan kasus TB sensitive obat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 2.16
Jumlah Penemuan Kasus TB Sesnsitif Obat
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020



Sumber : Seksi P2PM Provinsi Gorontalo 2020



Permasalahan lain untuk kasus TBC adalah peningkatan jumlah kasus TBC Resisten Obat (RO), untuk tahun 2020 kasus TB RO mencapai jumlah 35 orang, menurun dari 2019 sebanyak 39 orang, dengan cakupan temuan yang masih dibawah target yaitu 54,9% (target > 60%) dan kasus yang ditangani 53,3% (target >70%) tentunya menjadi permasalahan baru karena jika seseorang tertular dengan TB RO maka orang tersebut akan menjadi penderita kasus TB RO dengan intervensi program yang lebih sulit lagi. Hal yang perlu dilaksanakan di program adalah penemuan kasus sedini mungkin serta peningkatan kualitas tata laksana kasus untuk mencegah peningkatan TB resisten Obat.

Disamping itu, untuk angka kesakitan DBD tahun 2019, tertinggi berada di Kabupaten Pohuwato dengan angka kesakitan 182 per 100.000 penduduk dengan *Case Fatality Rate* (CFR) 2,5% , sedangkan untuk tahun 2020 angka kesakitan tertinggi di Kabupaten Gorontalo utara sebesar 145 per 100.000 penduduk dengan CFR nol dan total CFR provinsi Gorontalo 0,7% atau < 1%, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal penemuan dan tata laksana penderita, khususnya di Kabupaten Gorontalo utara meskipun jumlah kasus tertinggi tetapi CFR nya nol.

Untuk Angka kesakitan Ispa / Pneumonia dapat dilihat cakupan penemuan kasus selama dua tahun terakhir sangat rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara nasional yaitu > 86,8%. Seluruh Kabupaten kota tidak ada yang mencapai target penemuan kasus ispa / pneumonia, yang tertinggi kinerja penemuan kasus adalah Kabupaten Boalemo dengan cakupan 86,6%, sedangkan untuk cakupan di Provinsi Gorontalo hanya berada pada capaian 52,2% pada tahun 2019, dengan adanya pandemi covid-19 cakupan apenemuan pneumonia menurun sampai dengan 22% di tingkat Provinsi, padahal surveilans kasus ispa pneumonia merupakan salah satu indikator Kesehatan masyarakat yang harus tersedia dalam rangka penanganan pandemi covid yang terjadi sejak tahun 2020

Untuk Penyakit Diare masih sering menimbulkan KLB di beberapa daerah, Cakupan pelayanan diare pada balita sampai tahun 2020 di Provinsi Gorontalo baru mencapai 26,4%, akan tetapi satu hal yang baik adalah dari jumlah yang dilayani tersebut sebanyak 73% di tata laksana dengan oralit dan 90,3% di tata laksana menggunakan *zink*, meskipun jumlah penemuan menurun tetapi tata laksana meningkat sehingga CFR nya pun < 1% (0,08%).

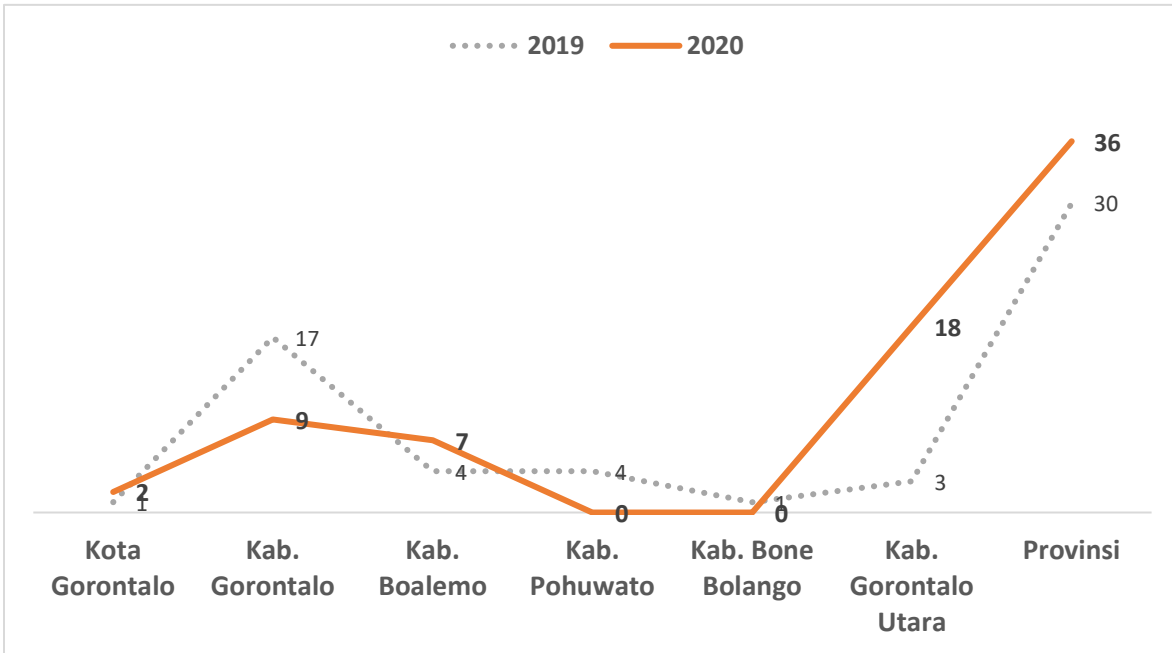
Untuk penyakit malaria di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan indikator *Annual Paracite Incidence* (API) terus mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2017 dan sampai tahun 2020 semua kabupaten / kota API < 1 per mil. Saat ini indikator yang digunakan adalah indikator penemuan kasus baru menuju eliminasi yaitu tidak ditemukannya kasus indigenous atau penularan setempat. Gambaran penanganan penyakit malaria dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Grafik 2.17

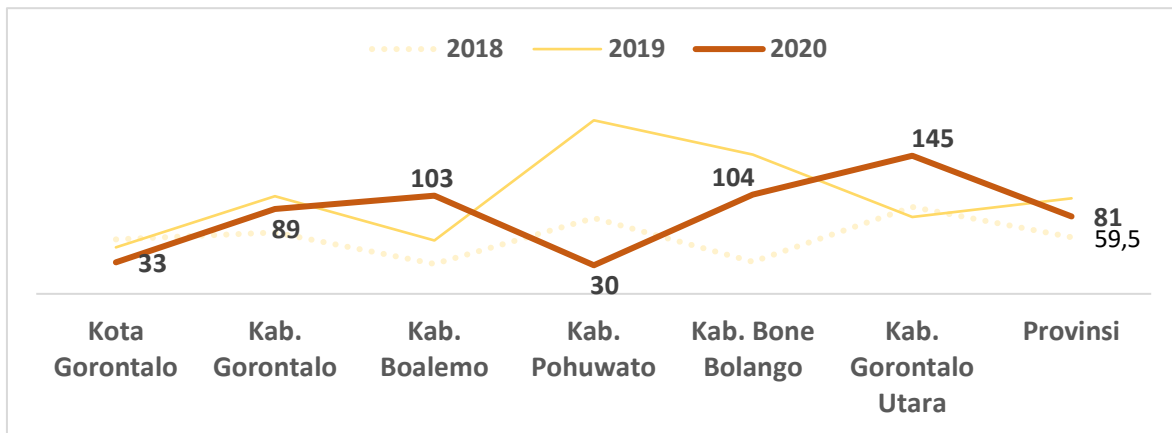
Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD, ISPA/Pneumonia Dan Diare Di Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

Jumlah kasus penyakit malaria yang dilaporkan periode tahun 2019-2020



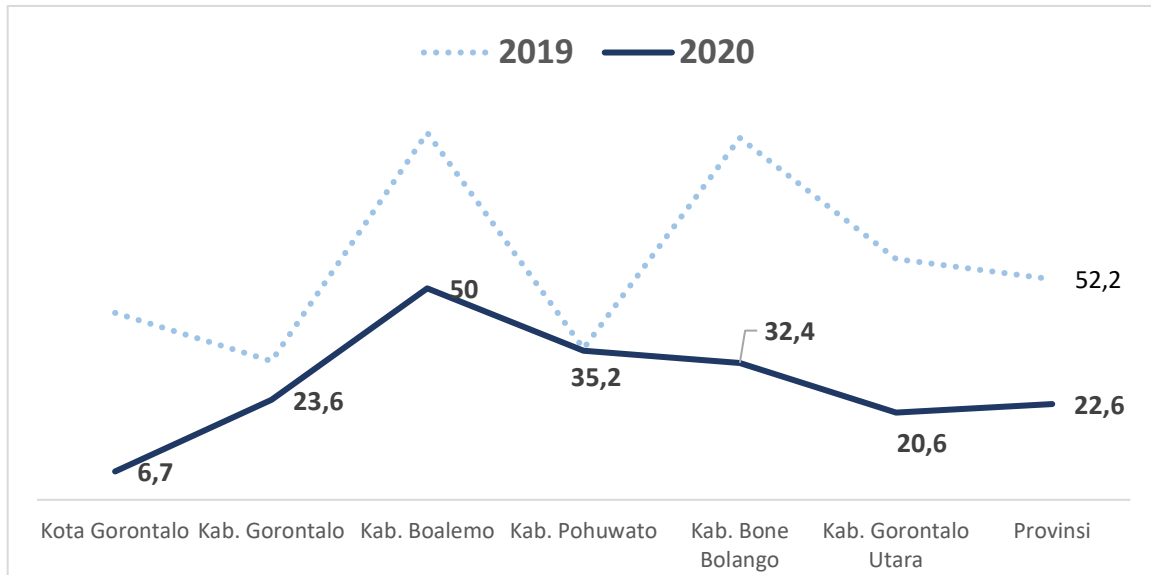
Grafik 2.18

Indikator : Incidence Rate (IR) per 1000 Penduduk Tahun 2018-2020



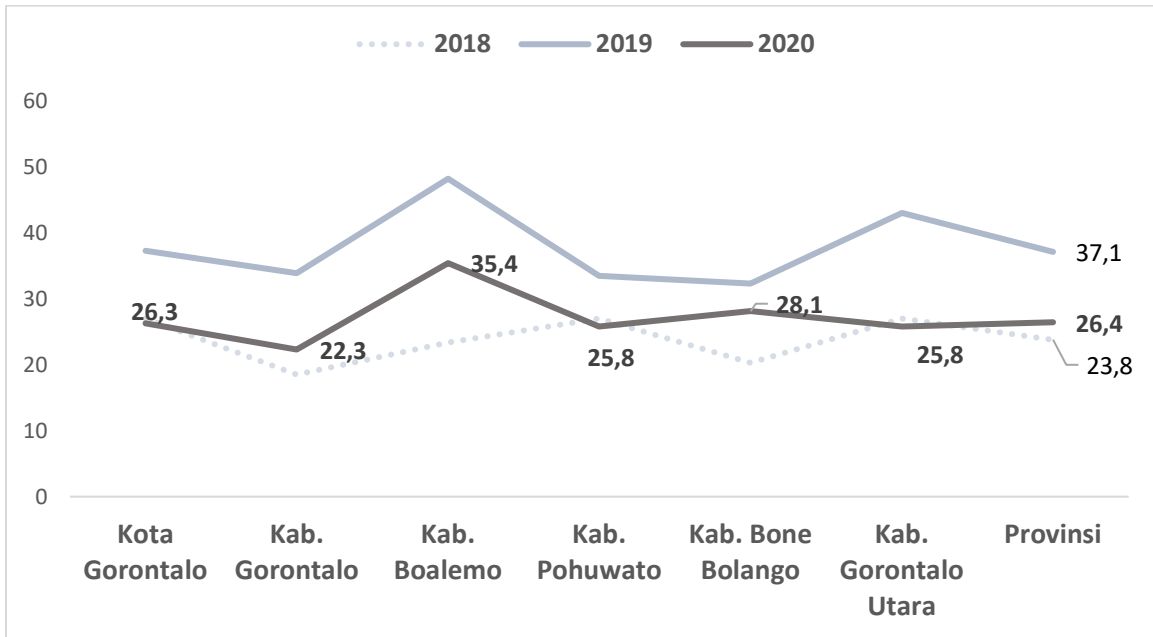
Grafik 2.19

Indikator : Persentase Penemuan Kasus ISPA / Pneumonia Tahun 2019-2020





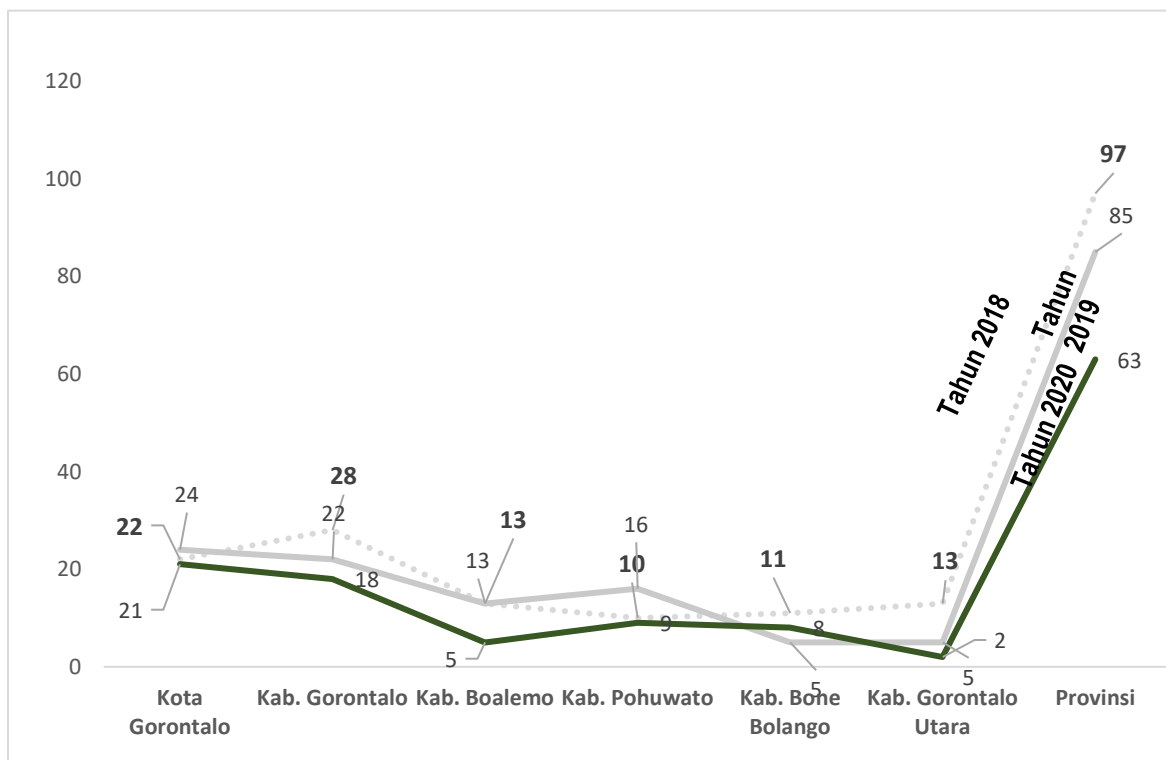
Grafik 2.20
Indikator Cakupan Pelayanan Diare per 1.000 penduduk Tahun 2018-2020



Sumber : seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi

Kecenderungan Jumlah kasus HIV dan AIDS Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ketahun sejak tahun 2011, terus meningkat sampai dengan tahun 2018 jumlah kasus yang ditemukan mulai menurun sampai dengan 2020 dilaporkan 63 kasus baru HIV yang ditemukan, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Grafik 2.21
Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 s/d 2020



Sumber : Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2019





Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, Penanganan intensif secara menyeluruh dan terpadu untuk mencegah dan menanggulangi HIV AIDS melalui pendekatan berbasis masyarakat atau tokoh masyarakat, dengan penguatan pada intervensi di hulu untuk penemuan dini.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 58persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 54,38 persen, sementara untuk kondisi kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo sebesar 89%.

Grafik 2.22

Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2022

Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 5 kategori, sebagai berikut :

Tabel 2.28

Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2019-2021

No	Kondisi	Panjang (km) / persentase (%)		
		2019	2020	2021
1	Kondisi Baik	197,02 km (42,17 %)	220,600 km (47,22%)	256,2 km (54,86%)
2	Kondisi Sedang	37,27 Km (7,98 %)	33,460 km (7,16%)	11,36 km (2,43%)
3	Rusak Ringan	56,48 km (12,09 %)	104,660 km (22,40%)	51,7 km (11,07%)
4	Rusak Berat	176,4 km (40,76%)	108,448 km (23,21%)	147,75 km (31,64%)
Total Panjang Jalan Provinsi		467,17 Km	467,17 Km	467,01 Km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2022

2) Sumberdaya Air dan Irigasi

Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dalam rangka konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air, dimana air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian, mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman, terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air. Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani.

Pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Tahun 2021 luasan sawah yang direhabilitasi dan ditingkatkan jaringan irigasinya sebesar 5048 Ha dari target 11074 Ha. Jumlah Panjang pengaman sungai sebesar 4189 meter dari target 3500 meter , dan jumlah pengaman pantai yang dibangun sebesar 215 meter dari target 900 meter.

**3) Air Minum dan Sanitasi**

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersih untuk perkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM, ketersediaan air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sumber air bersih dipasok dari bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi.

Program-program yang telah dilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu :

- Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
- PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
- DAK Air Minum dan sanitasi

Peningkatan penyediaan pelayanan air minum, sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melalui program 100 0 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Beberapa program yang dilakukan diantaranya melalui program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum dengan membangun sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih, sudah cukup baik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan air minum dan sanitasi layak yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.29

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2017-2020

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020
Boalemo	38,47	51,14	62,19	63,19
Gorontalo	56,93	64,67	76,32	78,18
Pohuwato	59,84	58,29	71,9	66,03
Bone Bolango	54,07	65,07	70,77	77,22
Gorontalo Utara	45,74	58,13	69,83	71,80
Kota Gorontalo	84,99	86,53	86,77	87,61
Provinsi Gorontalo	58,62	65,58	74,57	75,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

Tabel 2.30

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2019-2020

Kabupaten/ Kota	2019	2020
Boalemo	90,08	94,85
Gorontalo	97,72	95,56
Pohuwato	88,81	87,21
Bone Bolango	95,24	96,73



Gorontalo Utara	84,73	87,55
Kota Gorontalo	98,98	97,43
Provinsi Gorontalo	94,19	94,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan dan pemukiman, terdapat 2 sasaran utama pembangunan yaitu Meningkatnya ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan, melalui Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi, serta Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo melalui program kawasan pemukiman. Tahun 2021, ada 150 Unit Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha yang diperbaiki yang tersebar di beberapa wilayah antara lain :

- Kota Gorontalo sebanyak 53 Unit
- Kabupaten Gorontalo sebanyak 87 Unit
- Kabupaten Boalemo sebanyak 10 Unit

Sedangkan Penanganan terkait Rumah Korban Bencana pada tahun 2021 ini tidak ada atau N/A (*Not Available*) dikarenakan tidak terjadinya bencana kategori bencana provinsi. Namun demikian tahun 2017 s/d 2019 realisasi target rumah korban bencana sudah mencapai/ melewati target RPJMD.

Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, tahun 2021 Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha seluas 24 Ha , dengan jenis pekerjaan dan lokasi diantaranya :

1. Kabupaten Gorontalo

- Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 992,97 M2
- Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 636,54 M2
- Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 486,96 M2
- Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 695,73 M2
- Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 485,85 M2

2. Kabupaten Boalemo

- Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 725,01 M2
- Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 1168,74 M2

Selain itu dilaksanakan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat



Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Stabilitas ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori aman dan kondusif. Hal ini tercipta karena adanya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pembinaan terhadap berbagai komponen organisasi masyarakat dengan organisasi social politik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melakukan penegakan perda dan perkara serta peningkatan kualitas produk hukum daerah, melalui kegiatan operasi yustisi dan yustisi penyakit Masyarakat (PEKAT) di Provinsi Gorontalo :

- Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 25-26 Januari 2021 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara berlokasi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
- Operasi Yustisi pada tanggal 20 Maret 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Pelaksanaan Operasi Yustisi di wilayah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan bersama-sama dengan Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo
- Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 22 September 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desiase* 2019 (COVID-19) dan Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.
- Operasi Yustisi pada tanggal 2 November 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda No. 1 Tahun 2019



Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan bersama-sama dengan Satpol PP Kota Gorontalo dan Satpol PP Bone Bolango.

- Operasi Yustisi pada tanggal 4 November 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi di wilayah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan bersama-sama dengan Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo

Dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat, melalui penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan penyandang masalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Selanjutnya setelah dilakukan pembinaan para pengemis/gelandangan oleh Satpol PP Provinsi kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pedataan lebih lanjut.

Selain itu, melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik fokus pada fungsi perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Selain itu pada fungsi perlindungan masyarakat, secara Nasional Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2021, Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Risiko Bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00) sebesar 0,48-0,83 dan memiliki ancaman bencana seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.

Berdasarkan fakta tersebut adanya ancaman bencana di wilayah Indonesia, khususnya di Gorontalo tampaknya masih akan berlanjut karena kondisi tektonik Provinsi Gorontalo dimana Sesar Gorontalo melewati Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk yang padat menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor.

f. Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya kapasitas dan keterampilan keluarga miskin dan rentan melalui pendampingan dan penyediaan kebutuhan dasar,



meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meningkatnya perlindungan dan layanan jaminan social bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya dan meningkatnya kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat.

Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya melalui program pemberdayaan social melalui kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social dengan pemberian tali asih untuk 77 TKSK, bantuan social untuk 10 organisasi karang taruna, bantuan social untuk 6 LKS/LKSA serta bantuan hibah uang untuk 1 LKKS.

Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, dilakukan melalui Program perlindungan dan jaminan social dan Program penangangan bencana. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya bantuan sembako NKRI Peduli 90.000 KPM, Bantuan social KUBE kepada 270 KK/54 KUBE, bimbingan kepada 270 KK Penerima bantuan KUBE, bantuan social bencana alam sebanyak 29 KK, bantuan lauk pauk 1 paket, dan bantuan operasional dapur umum 1 paket.

Upaya prefentif lainnya dilakukan melalui program rehabilitasi sosial, melalui :

- a) Pemberian alat bantu kepada 46 penyandang disabilitas dan bantuan social ke SLB Kabupaten/Kota
- b) Bantuan social permakanan sebanyak 36 LKSA
- c) Bantuan social sandang sebanyak 2 LKS
- d) Layanan Bimbingan Fisik, mental spritual dan social sebanyak 15 LKSA
- e) Pelayanan dan rehabilitasi social sebanyak 143 Orang korban penyalahgunaan NAPZA
- f) Bantuan Sosial Kepada Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebanyak 1 Lembaga
- g) Sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba sebanyak 9 kali Kegiatan/235 Orang

Tabel 2.31

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial
di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan layanan bantuan social KUBE	70%	100%
2	Persentase (%) PSKS yang mampu diberdayakan	68%	88,25%
3	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan social	85%	100%



	serta jaminan social keluarga		
4	Jumlah PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang mampu memanfaatkan bantuan rehabilitasi social termasuk KPO	- 23 Orang Terlantar - 40 Orang Disabilitas - 36 LKSA	- 12 Orang Terlantar - 46 Orang Disabilitas - 36 LKSA
5	Jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai	154.640 KPM	90.000 KPM

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2022

Selain itu, Pemerintah Provinsi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara integratif lintas sektor dilakukan beberapa upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, beasiswa miskin, kesehatan gratis, perlindungan sosial bagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan social, dan bantuan pangan non tunai.

2.1.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

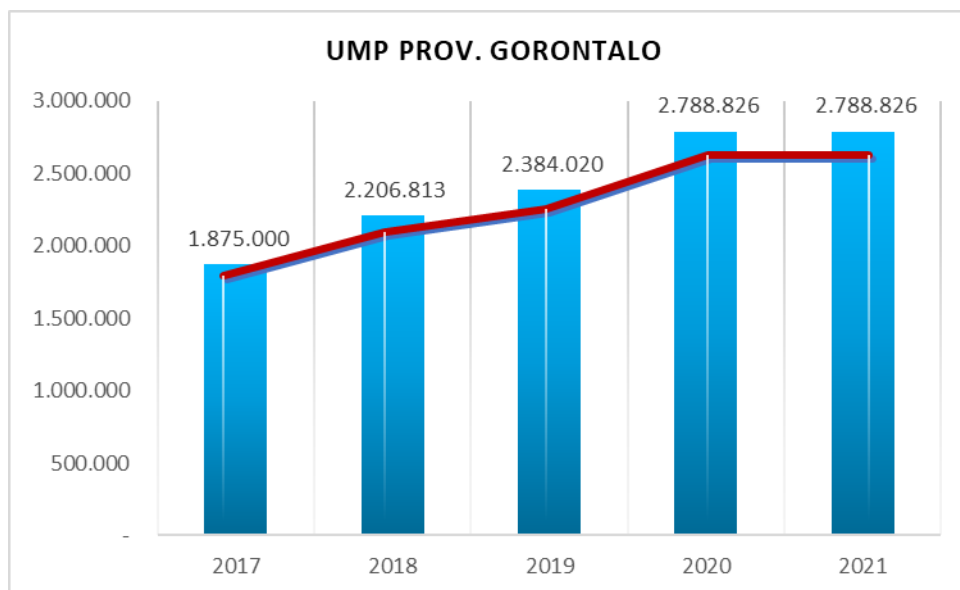
Tahun 2021 Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 15,59 persen, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 19,55 persen. Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja diantaranya melalui Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pemagangan berbasis pengguna kepada 175 orang pencari kerja yang dimagangkan di beberapa perusahaan yang ada di Kota Gorontalo, serta pelatihan pembuatan minyak kelapa kepada 30 orang tenaga kerja di Desa Monano Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango dan di Desa Bukit Aren Kec. Pongongaila Kab. Gorontalo.



Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program pengawasan ketenagakerjaan menjamin pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2021 pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani dan diselesaikan adalah sebanyak 6 kasus (4 kasus diantaranya dilimpahkan ke Kementerian disebabkan tidak adanya anggaran). Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan Norma ketenagakerjaan sebesar 2,28%. Tercatat sampai dengan tahun 2020 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 2.340 perusahaan.

Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Provinsi Gorontalo. Tahun 2021 UMP Provinsi Gorontalo sebesar RP. 2.788.826 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.23
Perkembangan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2022

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; Peningkatan kesetaraan gender; Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.



Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan Pencegahan kasus *Human Trafficking* adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan tugas fungsinya adalah melakukan fasilitas pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang dibentuk sejak tahun 2016 melalui Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan tugas dan fungsinya untuk Perlindungan perempuan meliputi: a. pencegahan tindak kekerasan; b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan; c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan, Sementara Perlindungan Anak meliputi : perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan b. perlindungan khusus anak.

Tabel 2.32

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Kasus	Korban		Persentase Terlayani		
			Anak	Perempuan	%Anak	%Perempuan	%Total
1	Kab. Boalemo	22	14	14	100	100	100
2	Kab. Bone Bolango	53	27	38	81,5	81,6	81,55
3	Kab. Gorontalo	64	44	46	63,6	60,9	62,25
4	Kab. Gorontalo Utara	43	27	35	92,6	94,3	93,45
5	Kab. Pohuwato	48	24	37	62,5	51,4	56,95
6	Kota Gorontalo	108	51	77	98,2	98,7	98,45
	Total (Provinsi Gorontalo)	338	187	247	82,6	81,5	82,05

Sumber : Data P2TP2A Provinsi Gorontalo, 2022

Data P2TP2A menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi sebesar 338 kasus meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 177 kasus kekerasan perempuan dan anak atau naik sebesar 90,96 persen. Melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo, persentase kasus yang terlayani sebanyak 82,05 persen.

c. Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan



(PPH). Skor PPH menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan di daerah. Hasil Analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2021 sebesar 76,66 sementara untuk skor PPH konsumsi sebesar 75,5. Hal ini dipengaruhi oleh produksi kelompok bahan pangan Umbi-umbian, Kacang-kacangan serta sayur dan buah masih sangat rendah sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus untuk pemenuhannya tanpa perlu mendatangkan dari wilayah lain diluar Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.33

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi
Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Skor PPH Ketersediaan	66,6	76,66	66,4	75,64
2.	Skor PPH Konsumsi	84,4	75,5	82,3	90,7

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2022

Skor PPH konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain diversifikasi yang lebih intens baik konsumsi pangan pokok, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat melalui promosi media informasi terkait keberagaman pangan dan manfaatnya, serta pemanfaatan pekarangan rumah dalam menanam sayur dan buah agar dapat terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Jika dibandingkan dengan sasaran target konsumsi pangan dan standar konsumsi pangan yang ideal atau konsumsi pangan normatif, maka diharapkan konsumsi pangan setiap masyarakat agar lebih diperhatikan melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota antara lain kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Gerakan Tanam Cabe (GERTAM Cabe), Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup sehat, GERMAS dalam mengkonsumsi pangan lokal atau Go Pangan Lokal dan juga Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang bersumber dari pangan umbi-umbian untuk dijadikan pangan alternatif sebagai pangan pengganti beras, peningkatan produksi protein hewani terutama unggas, protein nabati, mineral dan serat dari sayuran dan buah menuju pangan yang beranekaragam, berkelanjutan, merata sesuai dengan karakteristik daerah serta kegiatan gelar pangan murah dalam rangka stabilitasi harga dampak dari covid -19. Penyebab Pola konsumsi yang kurang beragam juga ditentukan oleh rendahnya daya beli masyarakat khususnya di daerah perdesaan. Oleh sebab itu konsep ketahanan pangan bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan itu sendiri yakni Tingkat Kesejahteraan Manusia.



Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan di Provinsi Gorontalo, berbagai upaya yang dilakukan diantaranya Program Penanganan kerawanan Pangan di 18 daerah rawan pangan dari 27 daerah rawan pangan yang ditargetkan, melalui penyaluran 1.250 paket bantuan di daerah rawan pangan. Selain itu tahun 2021 dilakukan penyaluran bahan pangan pada 15 Lembaga keuangan desa (LKD) di 27 kios akses pangan yang tersebar di 6 Kabupaten/ Kota. Jenis bantuan yang diberikan untuk masing-masing kios akses terdiri dari Beras 100 Kg, Minyak Kelapa 44 Liter, Gula Pasir 50 Kg dan Telur 150 butir. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi stimulant untuk kios-kios pangan yang ada di desa-desa rawan pangan. Namun karena adanya pandemic Covid 19 sehingga anggaran untuk bantuan kios akses pangan di refocusing sehingga target tidak tercapai 100 persen. Upaya lainnya yaitu melalui peningkatan keanekaragaman bahan pangan diantaranya dengan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang dilakukan melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) dan Kegiatan Edukasi Pola Konsumsi Pangan beragam bergizi seimbang dan aman.

Kebijakan pemerintah lainnya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, diantaranya melalui Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan sebanyak 44 kali di daerah-daerah rawan pangan, dengan jumlah komoditi pangan yang distabilkan harganya sebanyak 6 komoditi yaitu Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Daging, Telur dan Cabe.

Penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 8.000 Kg (8 Ton) bagi masyarakat yang terkena dampak banjir yang berada di Kec. Dulupi Kabupaten Boalemo sebanyak 800 Kg dan bantuan pasca bencana banjir di Kec. Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 4 Ton 730 Kg. Selebihnya bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah juga disalurkan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan di Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara sebanyak 1 Ton 320 Kg dan di Kec. Asparaga Kab. Gorontalo sebanyak 1 Ton 150 Kg. Sedangkan 6 Ton dana APBD Perubahan diberikan untuk bantuan pasca bencana banjir yang berada di Kec. Tilango sebanyak 1 Ton 600 Kg, Kec. Asparaga sebanyak 1 Ton 460 Kg, Kec. Tolangohula sebanyak 490 Kg dan Kec. Boliyohuto sebanyak 250 Kg. Selain itu juga diberikan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan yang berada di Kec. Wonosari sebanyak 1 Ton 600 Kg dan Kec. Paguyaman sebanyak 600 Kg. Untuk Cadangan Pangan Masyarakat yang diberikan kepada Lumbung Pangan, tahun ini tidak dialokasikan karena keterbatasan anggaran. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan juga belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

d. Pertanian



Urusan Pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kebijakan pembangunan bidang Pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sejumlah 15 bidang tanah dari target 22 bidang tanah, diantaranya:

- 1) 1 bidang tanah dengan luas 11.210 m untuk TPA Talumelito yang berlokasi di desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.
- 2) 1 bidang tanah dengan luas 97,36 m untuk Lapas Hutuo yang berlokasi di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Biru Kabupaten Gorontalo.
- 3) 1 bidang tanah dengan luas 1330 m untuk Daerah Irigasi Lomaya-Pilohayanga yang berlokasi di desa Lomaya Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.
- 4) 1 bidang tanah dengan luas 2.165 m untuk Pengadaan Lahan GORR yang berlokasi di desa Botumoputi Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo.
- 5) 1 bidang tanah dengan luas 17.685m untuk Rumah Sakit Bhayangkara yang berlokasi di desa Hutuo Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo.
- 6) 1 bidang tanah dengan luas 458 m untuk Pembangunan Stasiun Pompa Banjir yang berlokasi di desa Hutuo Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo.
- 7) 1 bidang tanah dengan luas 3.615 m untuk PPLP yang berlokasi di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
- 8) 4 bidang tanah dengan luas 6.901 m untuk TPU Makassar yang berlokasi di Makassar Provinsi Sulawesi Utara.

e. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan.

Tabel 2.34

Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan IKLH Provinsi Gorontalo, 2017-2021

No	Indeks	2017	2018	2019	2020	2021
----	--------	------	------	------	------	------



1	Indeks Kualitas Air	48,63	42	47,0	43,5	53.46
2	Indeks Kualitas Udara	99,57	99,46	99,58	98,86	93.96
3	Indeks Tutupan Lahan	75,53	75,58	77,41	79,11	79,21
4	Indeks Kualitas Lingkungan	74,67	72,69	74,93	75,66	77,32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2022

Perhitungan indeks untuk indicator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Hasilnya nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tahun 2021, terjadi pencemaran dengan kategori cemar ringan. Data tersebut diperoleh dari hasil sample di 5 titik pantau air sungai yaitu Sungai Bone (Bone Bolango), Sungai Bionga (Kabupaten Gorontalo), Sungai Buladu (Gorontalo Utara), Sungai Paguyaman (Boalemo) dan Sungai Taluduyunu (Pohuwato).

Tabel 2.35

Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo, Hasil Pemantauan Tahun 2021

NO	NAMA SUNGAI	STATUS MUTU AIR SUNGAI		
		Hulu	Tengah	Hilir
1	Bone	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Cemar SEDANG
2	Paguyaman	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Cemar SEDANG
3	Bionga	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN
4	Buladu	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN
5	Taluduyunu	Cemar BERAT	Cemar BERAT	Cemar SEDANG

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pencemaran air terjadi di hampir semua sungai yang mengalir di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan status mutu air sungai berada pada kondisi cemar ringan sampai dengan cemar sedang. Indeks kualitas air tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 53,46. Nilai tersebut berada pada status bahaya dimana status Sungai Bone Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu dan Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh : Limbah Domestik, Limbah Pertanian, Limbah Peternakan, Limbah Industri, Perilaku masyarakat membuang tinja dan ketersediaan sarana sanitasi (jamban) yang masih kurang, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum maksimal , serta Ilegal Logging dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah.

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai, penurunan kualitas udara, kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau, kerusakan mangrove dan terumbu karang dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat.



Dari total 245.000 Ha lahan di DAS Limboto-Bone Bolango, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di danau Limboto. Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan permukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koefisien pengaliran dan Indeks Erosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah permukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep *waterfront city*. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo, dimana 57% masyarakat tinggal di kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo.

f. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. Namun demikian, tahun 2017 diusulkan direvisi, hal ini terkait dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kali dalam 5 tahun, dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasilnya adalah sebesar 60% pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. Sehingga dokumen RTRW Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi.

Disisi lain, Perwujudan tata ruang wilayah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung optimalisasi dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan kearifan local, menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka



Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan.

g. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain melalui Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil dan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk.\

h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, Program Peningkatan Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Tahun 2021 Jumlah desa tertinggal yang diantaskan sebanyak 5 desa dari 5 desa yang ditargetkan.

Berdasarkan Data Kementerian Desa, Indeks Desa Membangun Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 0,6736, dengan status berkembang, meningkat 2,32 persen



dibanding tahun 2020 sebesar 0,6580. Indeks Desa membangun Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke-16 secara Nasional. Indikator pembentuk indeks desa membangun diukur dari beberapa dimensi seperti Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan, Dimensi Media Sosial, Dimensi Permukiman, Dimensi Keragaman Produksi, Dimensi Perdagangan, Dimensi Akses Kredit, Dimensi Keterbukaan Wilayah serta Dimensi potensi dan tanggap bencana.

Tabel 2.36
Status Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA STATUS MANDIRI	JUMLAH DESA STATUS MAJU	JUMLAH DESA STATUS BERKEMBANG	JUMLAH DESA STATUS TERTINGGAL	JUMLAH DESA STATUS SANGAT TERTINGGAL
GORONTALO	18	191	0	25	139	27	0
BOALEMO	7	82	0	15	59	7	1
BONE BOLANGO	18	160	2	50	88	20	0
POHUWATO	13	101	0	19	64	18	0
GORONTALO UTARA	11	123	0	13	92	18	0
PROVINSI GORONTALO	67	657	2	122	442	90	1

i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk penting dalam pembangunan, agar terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi diseluruh masyarakat. Besarnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, energi, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tahun 2020, Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,16persen.

Tabel 2.37
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)
		2019	2020	
1	Kab. Gorontalo	378.527	393.107	0,96
2	Kab. Boalemo	167.024	145.868	1,18
3	Kab. Pohuwato	161.373	146.432	1,25
4	Kab. Bone Bolango	161.236	162.778	1,34
5	Kab. Gorontalo Utara	115.072	124.957	1,78
6	Kota Gorontalo	219.399	198.539	0,95
Provinsi Gorontalo		1.202.631	1.171.681	1,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021



Pengendalian jumlah penduduk, melalui program Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Kesehatan Provinsi maupun BKKBN secara intens melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan KB berkualitas.

Pengendalian penduduk didukung dengan jumlah angka kelahiran yang relatif stabil. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang Wanita subur sampai dengan akhir masa reproduksinya (15-49) tahun. Sampai dengan Tahun 2018 sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Angka kelahiran total Provinsi Gorontalo masih dalam kisaran 2,5 anak per wanita. Menurut Data SDKI, TFR Gorontalo relative sama dengan pencapaian Nasional yang mengalami stagnansi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu antara 2-3 anak per wanita.

j. Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Pelaksanaan urusan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya Program Peningkatan Layanan Transportasi, Program Peningkatan Kinerja PelayananTransportasi, Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi.

Tahun 2021, melalui kegiatan pelayanan angkutan perintis melayani 5 lintasan yaitu Pusat Kota – Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwoma, Pusat Kota – Boidu – Dulamayo – Mongiilo, Dan Pusat Kota – Pangea. Selanjutnya pelayanan Bus Pariwisata Gorontalo – Botutonuo dan Gorontalo – Lombongo serta Pelayanan bus siswa NKRI gratis, sebagai layanan antar jemput siswa ini tersebar di lima daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi setiap harinya. Masing masing di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Taluditi Dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato Serta KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

Tahun 2021 juga dilaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ Pada 5 Ruas jalan Provinsi sebagai berikut :

1. Pengadaan Traffic Light S3 Centra Media Jln. Cokroaminoto- Jln. P. Hidayat - Jln. Jend Sudirman.



2. Pengadaan RPPJ Tiang Portal (Model Gawang) Jln. Thayeb M Gobel – Simpang 3 Kawasan Perkantoran Pemprov.
3. Pengadaan Rambu Jln. Cokroaminoto- Jln. P. Hidayat - Jln. Rusli Datau - Jln St. Botutihe - Jln. Piola Isa
4. Pita Pengaduh
 - Jln. Thayeb M Gobel (1 Titik)
 - Jln. Thayeb M Gobel / Simpang Tiga Masjid At'Tabiin (2 Titik)
 - Jln. Thayeb M Gobel / Simpang 3 MTS Negeri Gorontalo
 - Jln. Saleh Kadir / Kantor PDI Perjuangan (1 Titik)
 - Limehe Barat (2 Titik)
 - Wonosari (4 Titik)
5. ZOSS Jln. Raden Saleh (SMA 3 Kota Gorontalo), Jln. Thayeb M Gobel (SDN 5 Bulango Selatan)

Sedangkan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ pada ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ pada 14 TL dan 9 WL.

Dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut, terjadi peningkatan kinerja pembangunan disektor perhubungan, diantaranya terjadi peningkatan kapasitas keselamatan transportasi dari 65,8 persen tahun 2020 menjadi 80,8 persen ditahun 2021. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi meningkat menjadi 68 persen tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebesar 58 persen, serta meningkatnya sarana dan prasarana transportasi umum yang tersedia dari 62,7 persen tahun 2020, menjadi 81,7 persen ditahun 2021.

k. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan transparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Beberapa langkah konkrit yang telah dilaksanakan tahun 2021 yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan akses jaringan e-government/layanan informasi sebanyak 310 titik akses dan 36 layanan internet, serta Pemetaan Aplikasi E-Government tahun 2021 sebanyak 50 Domain.

Sementara itu, pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah



Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta *e-Report*, e-Monev (electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan), e-Data, e-Monev, e-Protrack dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik, serta penerapan Siransija untuk pengukuran prestasi kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Disamping itu, melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengintensifkan Keterbukaan Informasi melalui media cetak dan elektronik. Membuka komunikasi dengan masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat. Disamping itu Radio Suara RH bentukan Pemerintah Provinsi juga menjadi wadah dalam menjaring aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat.

Sementara itu, dalam pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik di Instansi Pemerintah terdapat beberapa hambatan/tantangan salah satunya dari aspek tatakelola (manajemen dan *governance*). Disamping itu masalah infrastruktur pendukung dan teknologi dalam pengembangan teknologi informasi. Indeks e-government menunjukkan adanya penurunan dari 3,18 di tahun 2020, turun menjadi 2,51 di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan formulasi perhitungan.

Tabel 2.38
Indeks e-Government Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks e-government	3,77	3,78	3,41	3,18	2,51

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, 2022

I. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Tujuannya adalah untuk peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.

Dalam menunjang hal tersebut, Program yang dilaksanakan meliputi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program



Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM.

Tahun 2021 total Koperasi Aktif mencapai 957 koperasi aktif dari target 708 koperasi aktif dan target jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 koperasi juga tercapai ditahun ini melalui program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Disamping itu, dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi, juga dilakukan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Berdasarkan data Sistem Informasi kredit Program (SIKP) jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit sebanyak 52.247 dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.374.360.419.657,- dan pelaku usaha di sector perdagangan besar dan eceran adalah yang tertinggi dalam pengajuan kredit usaha rakyat yaitu sebanyak 20.094 debitur dengan nilai kredit sebesar Rp. 577.785.868.108,-.

Untuk Program pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek OSS (*Online Submission System*) dan Bantuan Bahan Produksi bagi UMK pasca SHAT. Sedangkan untuk Program Pengembangan UMKM dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan UKM Naik Kelas, Kegiatan Bisnis Kelas bagi UKM, Kegiatan Promosi Produk UKM, Pemberian bantuan kepada UMK Naik kelas serta Bantuan produk kerajinan dan olahan pangan untuk galley UMKM di Bandara Hasanuddin Makassar.

Tabel 2.39

Jumlah Koperasi Aktif dan Berprestasi Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

Indikator	Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Capaian Kinerja Program Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
- Jumlah UKM yang dibina/ naik kelas	50 UKM	75 UKM	50 UKM	50 UKM
- JumlahKoperasiAktif	708 Kop	957 Kop	693 Kop	907 Kop
- JumlahKoperasiBerprestasi	10 Kop	10 Kop	10 Kop	- Kop

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

m. Penanaman Modal

Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan jumlah dan minat investor di Provinsi Gorontalo yaitu melalui Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Tahun 2021 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan 516 Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan yang terdiri atas : Izin di sector pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 1 izin, sector perikanan dan kelautan sebanyak 306 izin, sector Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 47 izin dan 1 non izin, sector Perhubungan sebanyak 65 izin dan 1 non izin, sektor Kesehatan sebanyak 20 izin, sector Pariwisata sebanyak 4 izin, sector Kehutanan sebanyak 38 izin, sektor



ESDM sebanyak 20 izin, sector energi 7 izin dan 2 non izin dan sector Lingkungan Hidup sebanyak 4 izin.

Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi, serta promosi investasi. Tahun 2020 terdapat 2 PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. ESA PUTLII PRAKARSA UTAMA di Kab. Pohuwato (Budidaya Udang Vaname)
2. PT. BUMI PANUA di Kab. Boalemo (Perusahaan Gas)

Dari ketambahan 2 PMA/PMDN tersebut, maka jumlah PMA/PMDN di Provinsi Gorontalo sebanyak 65 PMA/PMDN. sampai dengan tahun 2021 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) PMA/PMDN yang telah dipantau, dibina dan diawasi, dengan Jumlah Realisasi Investasi sebesar Rp.11.473.018.515.581,- (sampai dengan Triwulan III) dari target Rp. 10.145.000.000.000,- yang terdiri atas realisasi investasi PMA sebesar Rp 1.772.168.020.943,- dan PMDN sebesar Rp 9.700.850.494.638,-.

Realisasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 25,76% dari Target 20%, terlihat telah melebihi target yang ditetapkan.

N. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisan program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.



Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Pembinaan Pemuda dan Olahraga dilakuka nmelalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan serta Program Pengelolaan Pendidikan dengan memfasilitasi para pelajar dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Sebanyak 859 orang Pemuda dan Olahraga yang dibina, dengan perolehan Medali Olahraga Pelajar yang diperoleh baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional sebanyak 12 medali tertimbang dari berbagai cabang olahraga yang diikutsertakan, yaitu dari cabang sepak takraw, taekwondo, *e-sport*, Muay Thai dan karate. Perolehan medali tahun 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 medali.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

O. Statistik

Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keanekaragaman data informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik. Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi parameter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi, sehingga program dan kegiatan dalam urusan statistik yakni Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing OPD sebagai penanggungjawab dan penyedia informasi data



sektor dimasing-masing OPD. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD.

Dukungan statistic lainnya adalah melalui penyusunan Buku Profil dan Data Provinsi Gorontalo yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan setiap 5 tahun.

P. Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Di era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam rangka peningkatan aplikasi, muatan layanan publik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta menjamin keamanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berbasis elektronik dan non elektronik.

Q. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan di Provinsi Gorontalo di prioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan Program Urusan Wajib Kebudayaan dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya, melalui Program Pembinaan Kebudayaan.

Guna menyelaraskan kebijakan pengembangan dibidang kebudayaan, pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penyusunan Dokumen Karya Seni Budaya, Sertifikasi ahli Cagar Budaya, Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air, Pendokumentasian adat tradisi dan nilai budaya Gorontalo, Apresiasi seni dan Budaya dan Pelatihan/ Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya Gorontalo.

Dari pelaksanaan program kegiatan tersebut, Tahun 2021 capaian pembangunan bidang kebudayaan teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.40



Indikator Pembangunan Bidang kebudayaan Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	CapaianTahun 2020		CapaianTahun 2021	
		Target	Realiasi	Target	Realisasi
1	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	2 Jenis	1 Jenis	5Jenis	7 Jenis
2	Jenis Benda Bersejarah tersimpan di Museum	6 Jenis	455 Koleksi (8 Jenis)	7Jenis	480 Koleksi (8 Jenis)
3	Dokumen Budaya Daerah Gorontalo	2 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	5 Jenis

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2022

R. Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi–fungsi tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno melalui Pelestarian Karya Cetak dan bibliografi/katalog induk daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah.

Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan.

Dari upaya tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2021 menurun sebanyak 1.914 pemustaka dibanding tahun sebelumnya sebanyak 5.451 pemustaka, terus mengalami penurunan drastic setiap tahunnya akibat adanya pandemic covid-19.

S. Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,



organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan *e-government* dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut system tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel, maka layanan kearsipan tahun 2021, daerah didesain sedemikian hingga rancangan system layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna.

Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kearsipan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui efektifitas dan efisiensi penelusuran, penyelamatan, penduplikasian, dan penataan arsip. Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Arsip dengan kegiatan meliputi penelusuran, penyelamatan dan penduplikasian dokumen arsip berbasis TIK serta Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip melalui Kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun.

2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata untuk mewujudkan pariwisata Gorontalo yang mendunia.

Untuk mengembangkan sector pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga factor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.



Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program Pemasaran Pariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Merebaknya Covid-19 dan diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal bulan Maret 2020 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling menanggung imbas dari adanya covid-19 ini. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar maupun berbagai pembatasan lainnya guna membendung penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal ini mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata, sehingga memberikan dampak yang besar terhadap sektor pariwisata yaitu anjloknya jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar hotel serta restoran juga menurun drastis sebagai imbas dari adanya pandemi ini. Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara hanya mencapai 65 orang dengan target 7.559 orang atau selisih 7.494 Orang. Untuk wisatawan Nusantara terdapat selisih 238.299 Kunjungan dengan target 722.879 dengan realisasi hanya mencapai 484.580 kunjungan. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan domestic hanya mencapai 1,32 hari dengan persentase sebesar 44%.

Tabel 2.41

Jumlah Wisatawan (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara)
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

Wisman/Wisnus	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Wisatawan Mancanegara (Wisman)	7559	65	7.199	2.122
Wisatawan Nusantara (Wisnus)	722.879	484.580	688.566	510.421

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2022

b. Pertanian

Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2021 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,92 persen. Namun peningkatan tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dampak dari adanya pandemic dan masih terus tumbuh di 2021 sebanyak 1,78 persen.

Tabel 2.42

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020*	2021**
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Miliar Rupiah)	16.018,13	16.188,12	17.085,46



Distribusi Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%)	38,93	38,79	38,92
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian	6,33	-1,63	1,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian melakukan upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo melalui bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip *zero waste* melalui *reduce, re-use dan re-cycle*.

Tabel 2.43
Pekembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian
Provinsi Gorotalo tahun 2018 - 2021

No	Indikator (ton)	Tahun			
		2018	2019	2020*	2021**
1	Produksi Padi (Ton)	377.317	304.644	297.536	295,425
2	Produksi Jagung (Ton)	1.580.367	1.820.830	1.333.715	1,537,488
3	Produksi Kedelai	5.349	171	126	N/A

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022

Pencapaian kinerja sector pertanian di tahun 20201 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2021 (ASEM) sebesar 295.425 ton Gabah Kering Giling, belum mencapai target 380.764 ton. Sementara untuk produksi Jagung tahun 2021 sebesar 1.537.488 Ton, naik 0,15 persen dibanding produksi tahun 2020, dan jauh melampaui target sebesar 819.866 ton. Sementara Produksi kedelai tahun 2021 ditargetkan sebesar 4.109 ton di tahun 2021.

Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih padi yang disalurkan sebanyak 6.000 Ha berupa bufferstock dan jumlah benih jagung yang disalurkan sebanyak 3.000 Ha (bufferstock). Sementara untuk penyediaan benih padi unggul tanaman pangan, yang terdiri dari Benih Penjenis (BS) 10 kg Hasil benih Dasar 1,540 kg varietas Ciherang.



Untuk komoditi hortikultura produksi sayuran tahun 2021 mencapai 899,26 ton, tidak mencapai target 4.560 ton, mengalami penurunan tajam dibanding produksi tahun 2020 sebesar 7.554 ton. Sementara untuk produksi buah tahun 2021 mencapai 18.545 ton tidak mencapai target sebesar 24.309 ton, juga mengalami penurunan dibanding produksi tahun 2020 sebanyak 26.687 ton.

Dalam upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura dilakukan melalui penyediaan benih/bibit unggul yang terdiri dari 500 pohon buah kelengkeng, 100 pohon jambu dan 400 pohon alpukat.

Capaian subsektor pertanian lainnya diperoleh dari komoditi perkebunan. Tahun 2021 produksi kelapa sebesar 61.745 ton, meningkat dibanding produksi tahun 2020 sebesar 57.907 ton, dan berada diatas target yang ditetapkan sebesar 57.664 ton. Produksi komoditi kakao tahun 2021 sebesar 3.435 ton, mengalami penurunan dibanding capaian 2020 sebesar 4.438 ton.

Pembangunan sub sektor peternakan juga terus dikembangkan melalui pengembangan bibit ternak, pengembangan dan penerapan teknologi pakan, serta pengembangan kawasan ternak. Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi.

Tabel 2.44
Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

Komoditi	2019	2020	2021
Populasi Sapi	251.003	253.960	259.235
Populasi Kambing	102.585	103.777	107.051
Populasi Unggas	1.866.762	2.293.299	6.472.171

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022

Selama 3 tahun terakhir populasi Kambing, Sapi dan Unggas mengalami peningkatan. Tahun 2021 populasi Sapi sebanyak 259.235 ekor meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 253.960 ekor, dan melampaui target sebesar 239.806 ekor. Sementara populasi kambing tahun 2021 sebanyak 107.051 ekor meningkat dibanding tahun 2020 sebanyak 103.777 ekor, dan melampaui target sebesar 102.982 ekor. Untuk populasi unggas juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya mengembangkan usaha peternakan, tahun 2020 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menyalurkan bibit ternak sapi sebanyak 455 ekor, dan bibit ternak kambing sebanyak 341 ekor dan bibit ternak unggas sebanyak 54.596 ekor. Untuk menunjang peningkatan populasi ternak maupun produksi daging tersebut dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular strategis dengan penyediaan 10.000 dosis obat ternak, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak sapi sejumlah 352.919 kg, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak kambing sejumlah 55.532 kg dan pemenuhan kebutuhan pakan ternak ayam sejumlah 2.000 ekor.



c. Kehutanan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pembangunan urusan pilihan bidang kehutanan di Provinsi Gorontalo memiliki untuk meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan, dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan penegakkan hukum lingkungan dan kehutanan. Pembangunan dan pelestarian hutan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yakni Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dan Program Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Tahun 2021, Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi seluas 1.302Ha hutan yang direhabilitasi. Beberapa kegiatan diantaranya adalah Pembuatan Hutan Rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dahulu atas permintaan masyarakat sekitar lokasi penanaman/pemilik lahan yang disesuaikan dengan tempat tumbuh tanaman. Bibit yang disediakan untuk kegiatan penanaman ini yaitu sebesar 12.000 batang. Bibit bersumber dari BpDASHL sebanyak 8.010 batang. Sedangkan bibit yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3.993 batang dengan jenis bibit yaitu Rambutan, bibit Jeruk Ikan, Bibit pala, bibit manga okulasi dan durian okulasi.

Selain itu dilakukan peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan dan Pengembangan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Wilayah yang terdiri dari KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo, KPH VI Gorontalo, KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Dari kebijakan pemerintah disektor kehutanan tersebut, diperoleh Indeks Tutupan Lahan/Hutan mengalami peningkatan ditahun 2021 sebanyak 79,21 persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 77,11 persen, serta Luas Lahan kritis yang direhabilitasi seluas 1.207 Ha, meningkat dibanding tahun 2020 seluas 178 Ha.

Tabel 2.45

Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan, di Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Tutupan Lahan/Hutan	75,81	79,11	75.88	79.21
2	Luas Lahankritis yang direhabilitasi	1000 Ha	178 Ha	1000 Ha	1.207 Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2022

d. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi ketenagalistrikan melalui urusan energi dan sumberdaya mineral telah melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi



kebutuhan listrik, pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan, sebanyak 450 RTS yang terpenuhi kebutuhan listrik. Peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan melalui program pengelolaan energi terbarukan yakni Pengawasan Ketersediaan Energi terhadap Badan Usaha dan Non Badan Usaha Penyedia Energi 30 SPBU, 17 Agen LPG, serta 1 dokumen laporan hasil pemantauan pembangkit EBT di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.

Selain itu, di sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi bahan tambang yang ada di suatu wilayah merupakan bentuk ketersediaan sumberdaya tambang, dalam hal ini sumberdaya mineral. Sumberdaya alam tersebut merupakan modal yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan untuk menunjang pengembangan suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan konservasi dan upaya untuk kelestarian fungsi ekosistemnya. Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, melalui Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil ada sebanyak 75 usaha pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo yang dibina dan diawasi.

Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya didaerah-daerah sulit air. Tahun 2021 sebanyak 3 titik sumur bor yang disediakan dalam rangka memfasilitasi penyediaan air bersih kepada masyarakat yang terdiridari 1 titik di Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, 1 titik di Desa ButuKec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dan 1 titik di Desa Ayumelingo Kec. Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu penunjang ekonomi Provinsi Gorontalo. Namun demikian, dengan potensi sumber daya mineral yang ada, untuk tahun 2021 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,32 persen terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karenanya pemerintah Provinsi tetap terus melakukan penelitian penyelidikan dan pelayanan geologi kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian terkait dalam rangka menunjang sektor pertambangan.

Dari upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo, kontribusi PDRB dari sektor ini fluktuatif setiap tahunnya, sebagai berikut :

Tabel 2.46

Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRBberdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2019-2021 Provinsi Gorontalo (Milyar Rupiah)

Uraian	Tahun
--------	-------



	2019	2020*	2021**
Pertambahan dan Penggalian berdasarkan Harga Berlaku	450,54	468,20	483,23
Pertambahan dan Penggalian berdasarkan Harga Konstan	333,86	332,18	339,34
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan	4,94	-0,50	2,16
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,10	1,12	1,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

e. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan pengamanan dan stabilisasi perdagangan dalam negeri dan peningkatan akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Provinsi Gorontalo. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Jumlah komoditi ekspor untuk tahun 2021 adalah 10 (sepuluh) komoditi produk ekspor yaitu Fytomaxx vegetable fruit, bungkil kelapa, ikan tuna, kepiting bakau, VCO, molase, Sozo formula manggata 1, kelapa parut, briket arang dan santan kelapa. dengan jumlah komoditi 40.588,418 Tondan nilai eksport \$ 20.123.200.

Capaian pembangunan bidang perdagangan tentunya berpengaruh positif terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.47Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020*	2021**
1	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rp)	5.102,34	5.100,30	5.386,86
2	Laju Pertumbuhan	11,76	-1,38	3,41
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,40	12,22	12,27

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022***f. Perindustrian**

Kebijakan Pembangunan perindustrian difokuskan pada Peningkatan Peran IKM dalam perekonomian daerah, dengan sasaran utamanya adalah peningkatan produktivitas IKM. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Oleh karenanya penting untuk mendorong Pembangunan sektor industri, yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan Workshop e-SMART dan E Katalog bagi IKM Pangan, Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB) Pangan, Penguatan Jumlah Industri Kecil Menengah IKM dan Wira Usaha Baru (WUB) dalam bentuk Stimulan, Fasilitas Halal Bagi IKM Pangan, dan Fasilitas Kemasan Bagi IKM Pangan. Hingga tahun 2021, sudah sebanyak 15.555 IKM yang dibina.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan tersebut, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.48Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020*	2021**
1	Nilai PDRB Sektor Industri (Miliar Rp)	1.755,20	1.799,86	1.936,07
2	Laju Pertumbuhan	11,55	1,13	5,35
3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,27	4,31	4,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi sektor industri terhadap Pertumbuhan PDRB sebesar 4,41 persen, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 Nilai PDRB sektor industri mencapai 1.936,07 Miliar Rupiah.

g. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Provinsi gorontalo merupakan salah satu Provinsi tujuan transmigran. Terdapat 7 kawasan pemukiman transmigrasi Provinsi Gorontalo meliputi Kimtrans Bukit Aren dengan total 158 KK dan Kimtrans Ayumolingo sebanyak 275 KK yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Kimtrans Pangea Sp3 sebanyak 150 KK dan Kimtrans Lito SP 1 sebanyak 186 KK yang berlokasi di Kabupaten Boalemo, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Kimtrans Motihelumo di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 134 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu Puncak, Marisa, Pangea Sp4, Pangea Sp1 termasuk UPT pembinaanya telah diserahkan ke kabupaten bersangkutan. Tahun 2021, kawasan transmigrasi di Gorontalo secara terus menerus dikembangkan dan dikelola melalui Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kegiatannya berupa pembinaan mental spiritual bagi warga transmigrasi. Dari upaya tersebut, tahun 2021 jumlah warga transmigrasi mandiri sebanyak 75 warga di 3 kawasan Kimtrans.

2.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo dilaksanakan untuk mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD, Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran, memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut,



program yang dilaksanakan yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah untuk pemerintah pusat dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi/kab/kota. Selain itu, optimalisasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD hingga penyusunan dokumen Penganggaran KUA PPAAS dan APBD.

Sesuai dengan ketentuan pada permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan tersebut, Bappeda Provinsi Gorontalo melakukan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yang sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras dengan RPD 2023-2026. Proses penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan proses bottom Up, Top Down, Partisipatif, Teknokratis, dan Politis, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD
2. Penyusunan rancangan awal RKPD
3. Penyusunan rancangan RKPD
4. Pelaksanaan musrenbang RKPD (Forum Konsultasi Publik, Forum OPD, Rakortek)
5. Perumusan rancangan akhir RKPD
6. Penetapan RKPD

Selain fungsi Perencanaan, Bappeda juga melaksanakan fungsi lainnya dalam hal pengendalian dan evaluasi pembangunan. Fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan
- b. Hasil rencana pembangunan daerah;
- c. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- d. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- e. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- f. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan

Berikut adalah Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perencanaan Tahun 2022



Tabel 2.49

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD PD	100%	95,60%	100%	91,51%

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022

b. Keuangan

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang , Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Realisasi pendapatan daerah mengalami perkembangan yang cukup membaik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, meskipun masih terdapat fluktuasi dalam peningkatannya. Terlebih ditahun 2020, mengalami penurunan hingga minus 4,22 persen, akibat pandemi covid-19 yang turut memberikan dampak terhadap capaian realisasi pendapatan daerah. Namun demikian, ditengah-tengah kondisi yang masih belum cukup stabil, Pendapatan Daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 5,88 persen. Tercatat realisasi pendapatan tahun 2021 direalisasikan sebesar 1.968.370.374.668,08. Trend Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 2.24

Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)



Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021

Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Gorontalo, tercatat mendapatkan persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi secara Nasional, sebesar 104,60%, dari target pendapatan sebesar Rp. 1,88 Triliun, Realisasi sebesar Rp. 1,968 Triliun. Dimana dari 3 komponen utama pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan yang sah, PAD menjadi penyumbang tertinggi dengan realisasi sebesar 509 Milyar, dari target sebesar 400

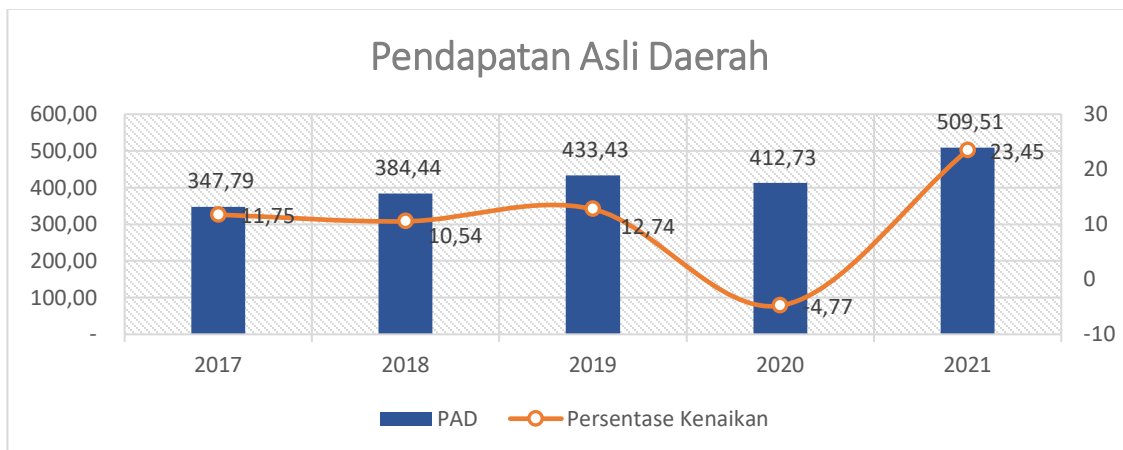


milyar atau sebesar 127,13 persen. PAD mampu mengimbangi dana transfer yang cenderung turun, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.435 triliun, namun terrealisasi sebesar Rp. 1.416 Triliun, sementara dana bagi hasil naik dari Rp. 19,5 miliar menjadi 25,6 miliar. Dari aspek lain, lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami penurunan dari target 5,3 miliar, terrealisasi sebesar 2,4 miliar.

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dipengaruhi oleh peningkatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Dalam rangka optimalisasi PAD, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan Daerah memaksimalkan pelayanan dengan memberikan kemudahan akses layanan seperti mengoptimalkan sistem aplikasi daring yang memudahkan warga melakukan pembayaran serta terhindari dari rumitnya layanan birokrasi, kebijakan insentif bebas denda pajak dan bebas biaya bea balik nama kendaraan bermotor pada hari-hari besar tertentu. Selain itu terdapat layanan samsat *delivery*, samsat *drive thru* dan warkop samsat yang pada dasarnya memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Tahun 2021 realisasi PAD hanya mencapai Rp. 509,51 Triliun, meningkat jauh sebesar 23,45 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 412,73 Triliun.

Grafik 2.25

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)



Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021

Upaya optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah terus dilakukan melalui intervensi sumber-sumber pendapatan daerah baik dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air permukaan dan pajak rokok, serta melakukan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan lainnya, dengan penyiapan sarana dan prasarana bagi OPD pengampu retribusi daerah seperti Labkesda, Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Biro umum dan Badan Pendidikan dan Pelatihan khususnya dalam penyelenggaraan



Diklat. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Struktur Pendapatan daerah Provinsi Gorontalo masih didominasi pendapatan transfer, dimana selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dana transfer berkontribusi rata-rata diatas 70% terhadap total Pendapatan Daerah, sementara kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 25%, selanjutnya untuk lain-lain pendapatan yang sah yang salah satunya bersumber dari dana hibah hanya berkontribusi sebesar rata-rata 5% selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini karena pendapatan yang bersumber dari Hibah Perindo, Jasa Raharja dan Readsi yang selama ini tidak mencapai target pendapatan.

2) Nilai Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2021 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.50

Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat keberhasilannya meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perwujudan *Good Governance and Clean Governance*.

Selain itu, Penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2022 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100 persen.

**c. Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat, dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang menjadi fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Provinsi Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2021 antara lain :

- Identifikasi potensi Kota Tua sebagai obyek wisata budaya di Provinsi Gorontalo;
- Penyusunan dokumen Geopark aspek Cultural Diversity
- Pelaksanaan Survey Pemantauan Status Gizi
- Policy Brief Pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo
- Policy Brief Dokumen Rancang Bangun/Model Replikasi
- Penetapan 1 (satu) Lokasi Pilot Project Uji Coba Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Berbasis Inovasi
- Policy Brief Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo
- Policy Brief kajian litbang lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo

Hasil Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021 Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti sebesar 98,20 persen.

d. Pengawasan

Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas "peran" aparat "pengawasan intern" pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun program yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*). Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin



bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan Tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD.

Optimalisasi kinerja pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja hingga tahun 2021 mencapai predikat B, dan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat B.

e. Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam rangka optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara struktural maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan pelatihan melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kompetensi SDM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat dengan kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional meliputi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar, Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena adanya pandemic covid-19 sehingga berlaku aturan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat berkumpul yang membatasi seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang mewajibkan tatap muka dalam setiap pelaksanaannya.

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Profesionalitas ASN	60%	80,98%	50%	56,94%
2	Akreditasi Lembaga Diklat	B	A	B	A

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, Tahun 2022

**f. Kepegawaian**

Pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan ASN, layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat, pensiunan, pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelolaan data dan pengembangan sistem pelayanan manajemen ASN, manajemen arsip kepegawaian daerah.

Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang efisien, efektif dan akuntabel, dengan sasaran yaitu meningkatkan kualitas pengembangan ASN, meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, meningkatkan sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kepegawaian serta menurunnya jumlah pengaduan.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN meliputi seleksi penerimaan ASN sebanyak 1.490 orang yang terdiri dari PPPK, seleksi penerimaan Praja IPD sebanyak 276 orang, anggota KORPRI yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Spritual sebanyak 517 orang, ASN yang mengikuti Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bakti dan tata upacara persemayaman sebanyak 104 orang, aplikasi layanan manajemen ASN sebanyak 4 layanan, dan arsip kepegawaian yang terpelihara sebanyak 8.892 arsip.
2. Kegiatan mutasi dan promosi ASN meliputi Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan sebanyak 41 orang, jabatan yang diisi melalui seleksi terbuka sebanyak 2 jabatan, Laporan Jabatan JPT, Administrator, Pegawai dan Fungsional sebanyak 2 laporan, SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun sebanyak 1.686 SK dan SK, Nota Usul, Pernyataan Persetujuan/Persetujuan, Surat Perintah penugasan dan Penetapan Pindah Mutasi antar Instansi, Mutasi antar SKPD, Mutasi antar Kabupaten/Kota, Pengalihan CPNS PNS dan PNS DPK/DPB sebanyak 875 SK/Persetujuan.
3. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN meliputi Bantuan penyelesaian akhir studi : 7 orang, Bantuan tugas belajar : 5 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan I : 19 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan II : 21 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan III : 10 orang dan Bantuan studi IPDN Angkatan IV: 18 orang.
4. Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur meliputi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPE, dan TKD bagi ASN sebanyak 4.041 orang dan Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 7 orang.



Melalui pelaksanaan program kegiatan pelayanan ASN, Tahun 2021 Persentase Indeks Kepuasan Layanan Manajemen ASN (skala 50%-100%) sebesar 92% dan Indeks Reformasi Birokrasi berada pada kategori B.

g. Kesekretariatan Daerah

1) Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selama tiga tahun terakhir 2019-2021 Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori B. Nilai SAKIP tahun 2021 mencapai 67,63 atau Predikat B. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 2.52

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Nilai SAKIP	67,70	68,05	67,63
Predikat	B	B	B

Sumber : Menpan-RB, 2022

Selain Penilaian SAKIP, Kementerian Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah maupun K/L. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan Sumber Daya Aparatur.

Adapun hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2.53

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo

No	Komponen	2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokorasi	63,71	63.36	66,33
2	Predikat IRB	B	B	B

Sumber : Menpan-RB 2022



Secara umumnya, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan, dan perbaikan dari semua aspek penilaian mulai dari komponen pengungkit yang terdiri dari : (1) Pemenuhan, (2) Hasil antara area perubahan, (3) Reform, dengan total skor 34,95 persen. Selanjutnya untuk komponen hasil, yang terdiri dari (1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, (2) Kualitas Pelayanan Publik, (3) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, (4) Kinerja Organisasi, dengan skor 31,38. Sehingga total skor Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 66,33 atau predikat B.

Selanjutnya dari sisi tata Kelola pemerintahan, yang ditunjukkan dengan nilai MCP atau *Monitoring Center for Prevention* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Provinsi Gorontalo sebesar 89,72 persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 82,10 persen atau masuk kategori Zona Hijau karena berada diatas 70%. Penilaian MCP meliputi tujuh area perubahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset serta Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Dana Desa. Nilai MCP Provinsi Gorontalo berada diatas rata-rata MCP Nasional yakni sebesar 65 persen.

Tabel 2.54
Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

No	Area Intervensi	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	82,00	100
2	Pengadaan Barang dan Jasa	92,82	94,46
3	Perizinan	99,60	100
4	Pengawasan APIP	82,86	89,31
5	Manajemen ASN	97,38	83,47
6	Optimalisasi Pajak Daerah	48,71	73,63
7	Manajemen Aset Daerah	65,95	77,96
TOTAL		82,10	89,72

Sumber : Korsupgah KPK RI, 2022

Tahun 2021, kinerja reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan perbaikan dan perubahan pola pikir serta budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi sasaran dari delapan area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi 2010- 2025. Hal ini sebagaimana tindaklanjut hasil evaluasi terhadap penilaian tahun sebelumnya, diantaranya melalui perbaikan rumusan tujuan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, perbaikan proses bisnis, serta penilaian kinerja melalui penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), serta inovasi pelayanan publik. Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2021 oleh Kementerian PANRB, indeks rata-rata pelayanan publik Provinsi Gorontalo 3,60 atau kategori B. Hasil uji kepatuhan pelayanan publik berada pada zona hijau atau sangat baik. Selain itu salah satu inovasi Provinsi Gorontalo masuk pada top 99 inovasi



pelayanan publik. Diakhir tahun 2021, sebagaimana amanat PermenPAN-RB Nomor 17 tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melaksanakan Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, yang diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik. Sejumlah 282 jabatan struktural yang terdiri dari 4 orang yang menduduki jabatan administrator, 278 orang yang menduduki jabatan pengawas, disetarakan kedalam jabatan fungsional. Sehingga total jumlah fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi 2.781 orang.

Tabel 2.55
Jumlah Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No	Kategori	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pelaksana	1.073	1.143	2.216
2	Fungsional	1.048	1.733	2.781
3	Pengawas	100	81	181
4	Administrator	105	48	153
5	JPT Pratama	32	5	37
6	JPT Madya	1	0	1
	Total	2.359	3.010	5.369

Sumber : Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo, 2021

2) Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dari upaya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

Indikator	Tahun		
	2017	2018	2019*
Skor LPPD	2,7765	2,9663	n/a
Peringkat secara Nasional	21	11	n/a

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2020



3) Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka optimalisasi tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2021 hasil survey kepuasan masyarakat oleh Lembaga Survey Internal mencapai 58,68 persen.

4) Sekretariat DPRD

Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, serta menunjang peran DPRD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2021 ini hanya bisa memfasilitasi legislative dalam menyelesaikan 1 (satu) Rancangan Perda dan telah disahkan menjadi Perda dikarenakan adanya Covid 19, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas berkerumun dan mengumpulkan banyak orang dan juga tidak dimungkinkan untuk berkonsultasi ke Kementerian terkait penyusunan Peraturan Daerah karena diberlakukan PPKM di tingkat pusat.

Selain itu, Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD menghasilkan 8 MOU, melaksanakan 3 kali kegiatan reses, dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.

Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB gorontalo sebesar 61,98 persen, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah gorontalo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Gorontalo yang mengalami peningkatan pertahunnya.



Tabel 2.57

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020*	2021**
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Miliar Rp)	25.432,33	25.860,27	27.128,56
Distribusi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB	61,81	61,97	61,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terdiri dari pengeluaran berupa

- (1) makanan, minuman dan rokok
- (2) Pakaian dan Alas Kaki
- (3) Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- (4) Kesehatan dan Pendidikan
- (5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya
- (6) Hotel dan restoran
- (7) Lainnya

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi Konsumsi Kolektif maupun konsumsi individu.

Tabel 2.58

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun		
	2019	2020*	2021**
Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHB	8.725,13	8.247,47	8.679,49
Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHK	5.659,00	5.272,69	5.411,80
Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah ADHK	5,00	-6,83	2,64
Distribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB	21,21	19,76	19,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Tabel diatas menunjukkan kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2021 naik tipis 19,77 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,76 persen, dengan laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 2,64 persen. Total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (ADHB) mencapai 8.679,49 Miliar Rupiah.



c. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

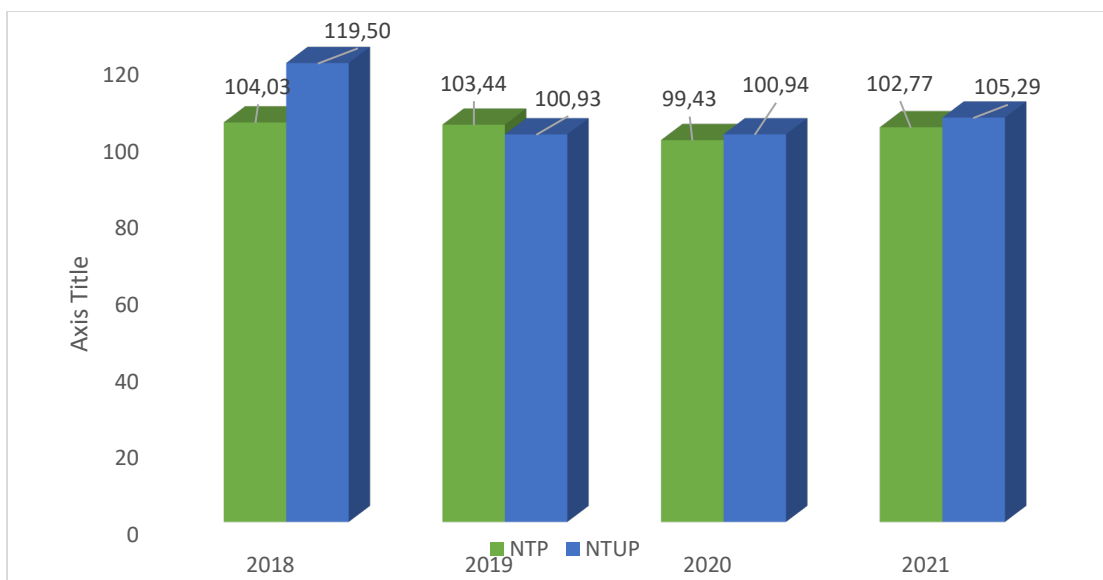
Sampai dengan saat ini NTP dan NTUP menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

Semakin tinggi NTP dan NTUP , secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Grafik 2.26

Perkembangan NTP dan NTUP Provinsi Gorontalo
Tahun 2018 s.d. 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Grafik diatas menunjukkan bahwa Nilai NTUP dari tahun ke tahun berada di angka lebih dari 100 , yang mengindikasikan bahwa harga yang diterima petani memperoleh selisih lebih (surplus) dari seluruh biaya produksi oleh petani atas usaha pertanian. Demikian halnya dengan NTP. Hanya memang di tahun 2020 berada pada posisi di bawah 100 (defisit) pada angka 99,43 yang mengindikasikan daya beli petani rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh dampak pandemi covid yang berimplikasi pada ketidakstabilan harga, sulitnya komoditi lokal bersaing dengan komoditi dari wilayah regional lainnya baik dari segi harga dan kualitas, produksi yang tidak terserap oleh



pasar, perdagangan antar pulau yang tidak leluasa sebagai konsekuensi dari kebijakan PSBB Nasional dan daerah.

Selanjutnya kita akan membandingkan NTP dan NTUP setiap sub sektor, untuk melihat porsi kontribusi sub sektor (y on y) tersebut NTP dan NTUP, sebagai berikut

Tabel 2.59

NTP dan NTUP Per Sub sektor di Provinsi Gorontalo tahun 2020 dan 2021

Subsektor	NTP		NTUP	
	Des 2020	Des 2021	Des 2020	Des 2021
Tanaman Pangan	99,17	102,3	99,73	103,78
Hortikultura	106,20	129,78	108,57	133,98
Tanaman Perkebunan Rakyat	109,72	119,31	108,82	121,00
Peternakan	104,13	103,61	108,49	111,28
Nelayan	92,79	96,92	94,90	100,26
Pembudidaya Ikan	98,75	94,93	94,43	100,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.59 diatas menunjukkan bahwa perbandingan NTP pada bulan Desember 2020 dan Desember 2021 (y on y) terdapat kecenderungan mengalami fluktuasi di hampir semua subsektor. Pada semua petani komoditi pertanian mengalami kenaikan, yaitu pada sub sektor tanaman pangan (3,13) , hortikultra (23,28) dan Nelayan (0,13). Sedangkan untuk sub sektor peternakan jika dibandingkan tahun sebelumnya turun (-0,52) dan pembudidaya Ikan turun (-3,82).

Jika dibandingkan antara NTP , maka NTUP maka cenderung mengalami perbaikan. Perbandingan NTUP bulan yang sama pada tahun sebelumnya terdapat perbaikan diatas angka 100. Yang paling drastis dan signifikan kontribusinya adalah pada tanaman hortikultura yaitu naik sebanyak 25,41 poin dan tanaman perkebunan rakyat naik 12,18 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli petani tanaman hortikultura yang mayoritas adalah petani cabe rawit, bawang merah dan tomat terus mengalami peningkatan daya belinya.

d. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, factor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi Gorontalo telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (Polri), dan dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari keseluruhan jenis kejahatan, Polri secara khusus dan kontinyu memantau dan mengevaluasi perkembangan sebanyak 11 jenis kejahatan khusus yang dikategorikan



sebagai tindak pidana menonjol. Kesebelas jenis kejahatan menonjol tersebut meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan dan korupsi.

Berdasarkan laporan kasus criminal Kepolisian Daerah Gorontalo tahun 2021, jumlah kasus terbanyak masing-masing kantor polisi yaitu di Polres Gorontalo Utara sebanyak 638 kasus tindak pidana.

Tabel 2.60

Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2021

Kepolisian Resort	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan			
	2018	2019	2020	2021
Polres Boalemo	510	378	271	235
Polres Gorontalo	1195	1.013	1.415	563
Polres Pohuwato	615	511	390	338
Polres Bone Bolango	568	482	347	352
Polres Gorontalo Utara	-	...	229	638
Polres Kota Gorontalo	1228	966	829	224
Polda Gorontalo	290	272	294	242
Provinsi Gorontalo	4406	3.622	3.775	2.592

Sumber : Gorontalo Dalam Angka, BPS 2022

Jumlah tindak pidana kriminalitas Provinsi Gorontalo menurut data Kepolisian Daerah Gorontalo Tahun 2021 sebanyak 2.592 kasus, menurun dibanding tahun 2020 sebanyak 3.775 kasus.

Upaya penurunan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo terus dilakukan, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara jajaran Forkopimda Daerah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2) Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan.

Dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan, dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hukum bagi para investor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur terkait kemudahan pelayanan dan perizinan kepada investor antara lain bantuan dalam proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Tata Ruang



Wilayah dan memberikan fasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dilakukan dalam rangka mendorong minat investasi serta meminimalisir permasalahan pengurusan perizinan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membentuk model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara umum penyelesaian proses perizinan di PTSP memerlukan waktu 3 (tiga) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 hari.

Selain itu dalam rangka peningkatan investasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi juga melakukan Mobile Service perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta pelayanan informasi dan pengaduan perizinan.

Disamping perbaikan terhadap pola prosedur perizinan, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga terus berupaya meningkatkan investasi dengan membangun system yang terintegrasi secara online berupa aplikasi promosi potensi investasi daerah (APPIG).

e. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2.61

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019

Wilayah	Rasio Ketergantungan			
	2016	2017	2018	2019 *
Kab. Boalemo	50,80	50,50	46,22	n/a
Kab. Gorontalo	48,90	48,60	45,91	n/a
Kab. Pohuwato	49,60	49,30	43,04	n/a
Kab. Bone Bolango	49,00	48,80	44,40	n/a



Kab. Gorontalo Utara	53,00	52,70	49,00	n/a
Kota Gorontalo	41,10	40,90	38,84	n/a
Prov. Gorontalo	48,20	47,90	44,32	n/a

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (Proyeksi SP2010)

* Data belum tersedia

Tahun 2018, angka *dependency ratio* untuk Provinsi Gorontalo sebesar 44,32, yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44-45 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, rasio ketergantungan mengalami penurunan. Meskipun penurunannya tidak signifikan, namun kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2) Persentase Penduduk berumur 5 Tahun keatas dalam status Pendidikan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya terus memperluas akses pendidikan, agar semua anak usia sekolah memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Tabel 2.62

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas berdasarkan status Pendidikan menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018

Wilayah	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Jumlah yg masih sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
		SD/MI/ paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/SMK/MA/ Paket C	Perguruan Tinggi				
Boalemo	4,53	14,09	5,79	3,73	1,52	25,13	70,34	100,00	
Gorontalo	4,72	13,04	5,53	5,09	3,06	26,72	68,57	100,00	
Pohuwato	5,49	13,64	4,50	5,46	1,13	24,73	69,78	100,00	
Bone Bolango	3,50	12,66	4,97	5,16	4,64	27,43	69,07	100,00	
Gorontalo Utara	4,13	14,10	5,79	3,73	1,92	25,54	70,32	100,00	
Kota Gorontalo	3,19	11,99	4,48	3,94	8,01	28,42	68,39	100,00	
Provinsi Gorontalo	4,30	13,12	5,19	4,62	3,60	26,53	69,17	100,00	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (Susenas Maret 2018)

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan. Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Target pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

Kinerja pembangunan daerah tahun 2021 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022, dimana capaian pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi target kinerja pembangunan selama tahun 2021, diuraikan sebagai berikut :



No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018		2019		2020		2021		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,51	7,19	6,41	7,21	-0,02	7,24	2,41	<	
1.2	IPM	67,01	67,93	67,71	68,49	68,68	69,05	69	=	
1.3	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	31.840.000	27.903.975,97	41.145.45	27.987.687,90	41.729,77	28.071.650,96	43.896,37	>	
1.4	Laju Inflasi Provinsi	2,15	3,67	2,87	3,54	2,47	3,42	2,59	<	
1.5	Indeks Gini	0,417	0,39	0,410	0,38	0,385	0,37	0,381	<	
1.6	Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, Trilyun)	1,80	2,02	1,94	2,27	1,86	2,58	1,97	<	
1.7	Persentase Penduduk Miskin	16,81	16,09	15,31	15,61	15,59	15,14	15,41	=	
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,03	3,44	4,06	3,23	4,28	3,04	3,01	=	
Fokus Kesejahteraan Sosial										
2. Pendidikan										
2.1	Angka Melek Huruf (%)	99,44	99,90	99,86	99,94	99,87	99,98	99,87	=	
2.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,46	7,35	7,69	7,50	7,82	7,70	7,90	>	
2.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	78,71	76,88	78,75	77,25	77,3	77,63	77,75	=	
3. Kesehatan										
3.1	Usia Harapan Hidup	67,14	67,59	67,45	67,76	68,07	67,92	68,19	>	
Fokus Seni Budaya										
4. Kebudayaan										
4.1	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya gorontalo	8	3	7	3	1	3	7	>	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Pelayanan Urusan Wajib										
5. Keluarga Berencana										
5.1	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,5	2,5	2,7	2,48	2,50	2,45	2,50	>	
6. Pekerjaan Umum										
6.1	Kondisi Mantap Jalan (%)	47,64	55,58	59,2	60,39	54,38	65,2	58	<	



No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019		2020		2021		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
6.2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km)	196,94	247,52	252,00	257,52	220,60	267.51 ₉	256,20	<
7. Perumahan									
7.1	Persentase cakupan akses air minum layak (%)	79,20	77,09	86,43	79,02	94,16	81.00		>
7.2	Persentase cakupan akses sanitasi layak (%)	64,30	64,45	76,71	66,06	75,68	67.71		>
7.3	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh (%)	100	80	86	60%	65	40		>
8. Lingkungan Hidup									
8.1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	72,69	72,19	74,93	73,03	75,66	73.39	77,32	>
9. Sosial									
9.1	Penduduk Miskin (orang)	188.300	193.90 ₂	186.030	191,033	185,31	188,15 ₃	184,60	>
10. Pemerintahan									
10.1	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	B	B	B	B	B	BB	B	<
10.2	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	BB	BB	B	<
10.3	Opini laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
10.4	Survey Kepuasan Masyarakat	72,48	65	75,24	70	58	75	58,68	<
10.5	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	N/a	5,89	N/a	5,98	N/a	6.07	N/a	=
11. Ketahanan Pangan									
11.1	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	65,8	66,1	69,23	66,4	75,64	66.6	76,66	>
11.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,5	81,2	89,3	82,8	90,7	66.6	75,5	>
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
12.1	Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan	24	97	32	94	5	91	5	<



No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019		2020		2021		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(desa tertinggal)								
13. Komunikasi dan Informatika									
13.1	Indeks e-government	3,78	3,80	3,41	3,82	3,18	3,83	3,83	=
14. Penanggulangan Bencana									
14.1	Indeks Resiko Bencana (kategori tinggi >0,66-1,00)	0,54 – 0,88	0,48 – 0,83	0,48 – 0,83	0,47-0,77	0,48-0,83	0,37-0,71	0,48-0,83	<
Pelayanan Urusan Pilihan									
15. Pertanian									
15.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,03	104,09	103,44	104,86	99,43	105,63	105,59	=
15.2	Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB (Trilyun Rupiah)	14.580,02	13.020,	16.018,29	13.411,62	16.188,12	13,813,97	17.085,46	>
15.3	Nilai Tukar Petani sub sector peternakan (NTPT)	101,30	103,52	98,21	103,82	103,37	104,12	103,61	<
16. Kehutanan									
16.1	Luas Lahan Kritis (Ha)	1.000	1.000	2.860	1.000	178	1,000	1207	>
17. Pariwisata									
17.1	Wisatawan Mancanegara (orang)	8.532	6,856	11.173	7.199	1.226	7,559	2.122	<
17.2	Wisatawan Nusantara (orang)	957.802	655.672	1.304.254	688.456	431.468	722,879	510.421	<
18. Kelautan dan Perikanan									
18.1	Nilai Tukar Petani Nelayan/ Pembudidaya (NTNP)	101,30	101,20	98,21	101,40	95,54	101,7	96,73	<



2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai Permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021. Beberapa permasalahan dalam pencapaian target pembangunan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah yang berkontraksi cukup hebat akibat Pandemi Covid19. Ekonomi Gorontalo mengalami perbaikan di tahun 2021 dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Perekonomian Provinsi Gorontalo kumulatif tahun 2021 dibanding kumulatif tahun 2020 (*c-to-c*) tumbuh sebesar 2,41 persen atau triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 5,26 persen. Meski demikian di triwulan II Pandemi Covid kembali mengalami pelonjakan kasus varian Delta dan disusul oleh varian lain yaitu Varian Omicron yang tingkat penyebarannya lebih cepat dan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah hingga akhir tahun anggaran 2021.
2. Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak.
3. Pandemi Covid-19 masih memengaruhi keadaan ketenagakerjaan pada Agustus 2021. Secara keseluruhan penduduk usia kerja yang terdampak oleh pandemi Covid-19, mulai dari menjadi pengangguran, menjadi bukan angkatan kerja, berkurang jam kerjanya, hingga menjadi sementara tidak bekerja, sebesar 7,52 persen (68.056 orang). Jumlah penduduk yang menjadi pengangguran akibat pandemi Covid-19 sebanyak 3.795 orang. Angka ini mencapai 21,13 persen dari total pengangguran Agustus 2021. Dampak pandemi covid-19 paling dirasakan oleh penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, yaitu sekitar 83 persen dari total terdampak.
4. Produktivitas komoditi pertanian unggulan yang masih rendah. Pada tahun 2021 produktivitas jagung mengalami penurunan sebanyak 45,24 ton/ha dibanding tahun sebelumnya sebanyak 46,81 ton/ha. Hal ini disebabkan karena system pengairan dalam hal ini irigasi pertanian yang masih belum terkoneksi dengan baik. Disamping itu, masih terdapatnya komoditi yang dibudidayakan pada lahan yang tidak sesuai dengan peta kesesuaian lahan serta masih banyaknya petani yang cenderung sulit beradaptasi dalam menerapkan teknologi pertanian mutakhir.
5. Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup terdampak akibat Pandemi, yang dapat dilihat baik dari Jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami



penurunan signifikan sebesar kurang lebih 60 persen, sehingga mempengaruhi sektor-sektor jasa pariwisata dan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB.

2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pada setiap Sasaran prioritas pembangunan yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara

1. Rendahnya penyediaan destinasi yang menawarkan produk yang beragam dan jasa wisata yang handal.;
2. Masih rendahnya jaminan kemudahan akses, kenyamanan, kebersihan dan keamanan;
3. Masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas;
4. Masih rendahnya investasi di usaha wisata;
5. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi ;
6. Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata halal;
7. Kurangnya Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB;

1. Belum terintegrasinya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Belum maksimalnya Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan;
3. Rendahnya kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen yang belum memadai;
4. Rendahnya tata Kelola system pertanian dan pangan;
5. Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.

Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan

1. Masih kurangnya input, sarana dan prasarana pertanian, perikanan termasuk irigasi;
2. Pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan produksi pangan sangat kurang;
3. Kompetensi Sumberdaya manusia sektor pertanian masih rendah;
4. Belum optimalnya modernisasi pertanian, kelautan dan perikanan;
5. Belum optimalnya peningkatan penganeekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia;



6. Kurangnya sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground;
7. Kurangnya sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan dan balai benih ikan/udang;
8. Rendahnya penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan konservasi.

Sasaran 4 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana

1. Penambangan emas tanpa izin (PETI);
2. Kerusakan Hutan dan Lahan;
3. Rendahnya tingkat ketaatan kegiatan dan atau usaha untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan;
4. Perubahan tata guna lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak mendukung fungsi konservasi;
5. Belum membaiknya sistem drainase makro-mikro dan pembuangan sampah ke badan sungai;
6. Rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir, genangan dan abrasi pantai;
7. Belum optimalnya pelayanan air minum di pedesaan dan daerah rawan air;
8. Belum tersedianya rencana rinci tata ruang, baik itu berupa kawasan strategis maupun rencana detail tata ruang;

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah

1. Kondisi jalan yang rusak berat dan belum terbuka masih tinggi terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan;
3. Masih rendahnya layanan transportasi;
4. Rendahnya peningkatan koordinasi dan advokasi terhadap pelayanan dan penyediaan akses air minum layak di wilayah pedesaan, desa tertinggal dan sangat tertinggal;
5. Lemahnya penguatan kelembagaan KPSPAMS dan Bumdes dalam pengelolaan penyediaan air bersih dan penyediaan sanitasi;
6. Rendahnya peningkatan koordinasi dan advokasi terhadap pelayanan dan penyediaan akses Sanitasi;
7. Rehabilitasi dan penyediaan kelengkapan prasarana jalan diruas jalan provinsi Peralatan keselamatan ruas jalan Provinsi belum optimal;
8. Pembukaan dan Penambahan Ruas Jalan Provinsi Penghubung Pusat-Pusat Kegiatan dan Produksi Yang Belum Terhubung Jaringan Jalan;



9. Pembangunan Infrastruktur Utama dan Pendukung Irigasi Provinsi, pembangunan pengaman pantai dan wilayah sungai kewenangan Provinsi belum optimal;
10. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan Gedung Pemerintah serta penataan lingkungan disekitarnya belum optimal;
11. Dukungan penyediaan lahan terhadap infrastruktur Strategis Nasional dan Infrastruktur Daerah belum optimal;

Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan

1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial;
2. Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM;
3. Digitalisasi promosi dan pemasaran belum optimal;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil belum maksimal;
5. Kurangnya Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri;
6. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi tidak berjalan dengan baik;
7. Pengembangan industri pariwisata halal belum maksimal;
8. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum optimal.

Sasaran 7 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

1. Kualitas pendidikan masih sangat rendah;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan;
3. Nilai APM dari SD sampai perguruan tinggi selalu menurun tiap jenjangnya;
4. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional;
5. Belum optimalnya mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha;
6. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship
7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan yang belum maksimal;
8. Belum optimalnya koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan.

Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Provinsi Gorontalo 68,19 tahun masih dibawah rata-rata nasional 71,57 tahun;
2. Prevalensi penyakit tidak menular di Provinsi Gorontalo cukup tinggi;
3. Tingginya prevalensi merokok penduduk umur ≥ 10 tahun yang secara nasional tertinggi kedua setelah Jawa Barat;



4. Prevalensi stunting sesuai data Susenas dan SSGBI masih 35,10 persen;
5. Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi;
6. Rendahnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi;
7. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda yang belum maksimal;
8. Belum optimalnya koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB;
9. Digitalisasi layanan Kesehatan yang belum memadai;
10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) belum maksimal.

Sasaran 9 : Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq

1. Revitalisasi, pemanfaatan dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo belum maksimal;
2. Rendahnya perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
3. Pengembangan tata kelola pembangunan dan pengelolaan kebudayaan yang belum optimal;
4. Kurangnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Sasaran 10 : Menurunnya tingkat kemiskinan

1. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian bagi masyarakat miskin;
2. Minimnya akses pada pendanaan usaha;
3. Penguatan pengelolaan Data base Fakir Miskin belum maksimal;
4. Penguatan peran kab/kota dalam updating DTKS belum optimal.

Sasaran 11 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman

1. Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi sebesar 94,16 persen)
2. Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2020 persentase rumah tangga kumuh yang ditangani masih sebesar 8,34 persen (tahun 2020)

Sasaran 12: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

1. Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);



2. Masih rendahnya penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi;
3. Pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan (Penguatan SIPD pada pengolahan data pembangunan dan pada perencanaan-penganggaran, pada pengendalian dan pengawasan, Satu Data, Satu Peta) belum maksimal.

2.3.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Tahun 2021

Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Tahun 2021, disajikan dalam bentuk tabel Evaluasi sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, Formulir E.19 Evaluasi terhadap Hasil RKPD.

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi:

1. Persentase Pengembangan Kompetensi ASN = 60%
2. Nilai Akreditasi Lembaga Diklat = B

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket								
					K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17								
Penyesuaian Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keppmendagri Nomor 50/3708 Tahun 2020																												
		5		Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan																								
		5	4	Pendidikan dan Pelatihan																								
I	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	5	4	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	3.276.249	100	%	1.524.814	100	%	534.062	75	%	1.418.461	75,00	265,60	175	%	2.943.275	175	89,84			
						Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100	%	9.700.654	100	%	6.797.919	100	%	3.450.558	75	%	2.225.576	75,00	64,50	175	%	9.023.495	175	93,02			
		5	04	01.1	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	21	dok	2.407.961	11	dok	1.258.209	4	dok	434.053	4	dok	423.590	100	%	97,59	15	dok	1.681.799	71,43	%	69,84
		5	4	01.1	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Adminstrasi dan Keuangan SKPD	10	dok	868.288	6	dok	266.605	2	dok	100.009	2	dok	83.211	100	%	83,20	8	dok	349.816	80,00	%	40,29
		5	4	01.1	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek	50	ASN	986.540	23	ASN	456.837	20	ASN	55.767	1	ASN	22.166	5	%	39,75	24	ASN	479.003	48,00	%	48,55
		5	4	01.1	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia	100	%	5.056.546	100	%	3.577.911	100	%	2.332.052	100	%	2.165.688	100	%	92,87	200	%	5.743.599	100,00	%	100,00
		5	4	01.1	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa kantor yang tersedia tepat waktu	100	%	3.657.568	100	%	2.763.171	100	%	1.062.739	100	%	949.382	100	%	89,33	200	%	3.712.553	100,00	%	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													81,00	80,55		79,89	71,74											
Predikat Kinerja													T	T		T	S											

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)			Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi/ Ket
							K	Rp.(000)		K		Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			
1	2	3			4	5	6			7			8			12=8+9+10+11			13=12/7*100			14=6+12			15=14/5*100			16	17
II	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peserta yang memiliki sertifikasi kompetensi teknis, fungsional dan sosiocultural	100	%	3.950.881	35,64	%	1.332.031	24,75	%	657.459	15	%	614.425	61,98	93,45	51	%	1.946.456	51	%	49,27			
						Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi manajerial	100	%	13.506.338	58,43	%	9.656.072	20,06	%	2.177.977	13		2.042.960	65,60	93,80	72	%	11.699.032	72	%	86,62			
						Persentase Peningkatan Kapasitas Mutu dan Kerjasama kediklatan	100	%	3.718.222	100,00	%	1.255.129	100,00	%	205.927	20		181.351	20,00	88,07	120	%	1.436.480	120	%	38,63			
						Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100	%	11.759.083	100,00	%	7.357.725	100,00	%	258.562	25		240.296	25,00	92,94	125	%	7.598.021	125	%	64,61			
						Persentase Pengembangan Apikasi Sistem Informasi Kediklatan dan Jumlah dokumentasi karya tulis Ilmiah Kediklatan	100	%	1.823.323	100,00	%	196.034	100,00	%	-	#		-	-	-	100	%	196.034	100	%	10,75			
		5	4	02.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen AKD yang dihasilkan	5	dok	724.356	4	dok	561.708	1	dok	105.930	-	dok	65.991	-	%	62,30	4	dok	627.699	80	%	86,66		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis	740	org	3.444.881	390	orang	1.108.982	280	org	657.459	321	org	450.746	100,00	%	68,56	711	org	1.559.728	96	%	45,28		
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah WI dan Fasilitator yang meningkatkan kapasitas dan kompetensiny	75	WI	1.416.024	15	WI	335.561	14	wi		29	org		100,00	%		44	org	575.857	59	%	40,67		
						Jumlah WI yang mengikuti orasi ilmiah	13	WI	312.404	4	WI	193.000	-	WI		-	org		-	%		4	org	193.000	31	%	61,78		
						Jumlah WI yang mengikuti diklat ke jenjang yang lebih tinggi	13	WI	330.000	2	WI	31.245	3	WI		-	org		-	%		2	org	31.245	15	%	9,47		
						Jumlah kegiatan penjamin mutu pendukung akreditasi/reakreditasi lembaga diklat	10	dok	774.807	7	dok	401.030	2	dok		-	dok		-	%		7	dok	401.030	70	%	51,76		
						Persentase Aplikasi Sistem Informasi Yang Dibangun/Dikembangkan	100	%	691.866	100	%	196.034	70	%		60	%		85,71	%		160	%	196.034	100	%	28,33		
						Jumlah Perjanjian kerja sama penyelenggaraan diklat yang tandatangani	28	dok	638.107	22	dok	282.403	6	dok	99.997	4	dok	95.286	66,67	%	95,29	26	dok	377.689	93	%	59,19		
						Jumlah Pejabat Administrasi/Pejabat IV yang memenuhi standar kompetensi jabatannya	200	Org	4.200.000	80	orang	1.425.842	40	org	2.177.977	40		2.042.960	100,00	%	93,80	120		3.468.802	60	%	82,59		
						Jumlah Pejabat Administrasi/Pejabat Eselon III yang memenuhi standar kompetensi jabatannya	150	Org	4.523.957	66	orang	1.543.382	40	org		-	org		-	%		66	org	1.543.382	44	%	34,12		
						Jumlah Calon ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan	114	Org	1.871.505	972	orang	6.195.983	40	org		111	org		100,00	%		1.083	org	6.195.983	100	%	100,00		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	270	org	506.000	90	orang	223.049	60	org		40	org		66,67	%		130	org	223.049	48	%	44,08		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		88,44	82,58		66,33	53,66							
Predikat Kinerja																		T	T		S	R							
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																		7.284.545	6.723.069										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		84,72	81,56		73,11	62,70							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		T	T		S	R							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja - Kegiatan Diklat yang dilaksanakan dengan Pola Kontribusi dan Kerjasama

Faktor Penghambat - Penyesuaian Subkegiatan, Kegiatan, Program dan indikator untuk Pemetaan ke Kepmendagri 50/3708 dan menyulitkan untuk penentuan dan pemisahan indikator serta capaian kinerja. Penggabungan kegiatan pada RPJMD menjadi sub kegiatan pada Kepmendagri 50. Adanya pengurangan anggaran sebesar 200 Juta pada Triwulan II untuk Refocusing

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya - Melakukan Pemetaan terhadap indikator kinerja yang ada dan memaksimalkan kinerja dengan program dan kegiatan sesuai dengan regulasi yang berlaku

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya - Penyesuaian Renja dan Indikator sesuai hasil pemetaan Kepmendagri 50/3708

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

1. Presentase Pengembangan Aparatur : 94%
2. Presentase Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur : 94%
3. Indeks kepuasan layanan Manajemen PNS (skala 50% - 100%) : 94%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Penangg	09	10	11	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	4050701	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100 %	7.493.056	100	4.700.311	100 %	1.019.482	100	998.256	100	97,92	200	5.698.567	200,00	76,05					
				Prosentase Pelaksanaan perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan pelaporan	100 %	2.629.241	100	1.856.953	100 %	369.849	100	369.619	100	99,94	200	2.226.572	200,00	84,68					
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	31 Dokumen	1.879.241	31	1.368.527	6	men	267.041	6	267.022	100	99,99	37	1.635.549	100,00	87,03				
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan	10 Laporan	750.000	39	488.426	2	men	102.808	2	102.597	100	99,79	41	591.023	100,00	78,80				
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek	110 Orang	1.100.000	60	408.202	20	ang	12.895	12	12.894	60	100,00	72	421.096	65,45	38,28				
				Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan khusus pengelolaan Assesment	50 Orang	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan dan prasarana perkantoraan (jumlah unit/paket)	30 Unit/Pak	2.500.000	181	2.317.311	6	Unit/	553.223	8	547.593	133	98,98	189	2.864.904	100,00	100,00				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan dan manajemen administrasi perkantoraan	100 %	3.493.056	100	1.974.798	100 %	453.365	100	437.769	100	96,56	200	2.412.567	100,00	69,07					
Rata-rata capaian kinerja (%)												99	99,07			93,09	74,64						
Predikat kinerja												R	T										

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD					
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Penang	09	10	11
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	4	05	07	#	Program Kepegawaian Daerah	Presentase Pengembangan Aparatur	98 %	7.578.138	100	5.768.091	92 %	1.148.730	92	948.584	100	82,58	192	6.716.675	196,32	88,63						
						2.078.092	Prosentase Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur indeks kepuasan layanan Manajemen PNS (skala 50% - 100%)	98 %	6.591.894	100	3.292.776	92 %	348.499	92	346.593	100	99,45	192	3.639.369	195,59	55,21						
							Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pelamar yang mengikuti Seleksi Penerimaan ASN	2.500 Orang	500.000	4.358	267.800	- ang	-	1.490	-	0,00	5.848	267.800	100,00	53,56						
							Jumlah Calon Praja yang mengikuti seleksi penerimaan Praja IPDN	2.000 Orang	1.420.000	1.221	939.902	400 ang	388.506	276	386.195	69	99,41	1.497	1.326.097	74,85	93,39						
							Jumlah Anggota KORPRI yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Spritual	15.000 Orang	950.000	41.600	900.958	3.000 ang	174.958	517	-	17	0,00	42.117	900.958	100,00	94,84						
							Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bakti dan tata upacara persemayaman	250 Orang	549.940	450	260.652	175 ang	104	173.465	59	0,00	554	434.117	100,00	78,94							
							Jumlah Layanan Manajemen PNS	5 Layanan	1.250.000	5	527.585	1 ran	264.719	4	-	400	0,00	9	527.585	180,00	42,21						
							Jumlah arsip kepegawaian yang terpelihara	30.000 Arsip	500.000	17.569	407.357	6.000 rsip	8.892	264.189	148	99,80	26.461	671.546	100,00	134,31							
							Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan	750 Orang	475.000	262	334.944	150 ang	544.856	41	352.763	27	64,74	303	687.707	40,40	100,00						
							Jumlah jabatan yang diisi melalui seleksi terbuka	25 Jabatan	995.000	24	2.526.183	5 atan	2	352.763	40	64,74	26	2.526.183	104,00	100,00							
							Jumlah Laporan Jabatan JPT, Administrator, Pegawai dan Fungsional di Provinsi Gorontalo	10 Laporan	2.048.000	10	1.380.316	2 rran	2	352.763	100	64,74	12	1.733.079	120,00	84,62							
							Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun	12.500 SK	1.250.000	6.723	1.263.078	2.500 SK	129.812	1.686	127.891	67	98,52	8.409	1.390.969	67,27	100,00						
							Jumlah SK,Nota Usul, Pernyataan Persetujuan/Persetujuan, Surat Perintah penugasan dan Penetapan Pindah Mutasi antar Instansi, Mutasi antar SKPD, Mutasi antar Kabupaten/Kota, Pengalihan CPNS PNS dan PNS DPK/DPB	3.750 SK/Persetujuan	500.000	2.515	203.545	750 erseputusan	186.332	875	185.889	117	99,76	3.390	389.434	90,40	77,89						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Bantuan Studi Tugas Belajar dan izin belajar	190 Orang	1.230.000	77	1.094.716	38 ang	215.368	80	209.626	211	97,33	157	1.304.342	82,63	106,04	Penangg	09	10	11
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah aparatur yang dilayani kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPE dan TKD	15.500 Orang	926.000	12.097	676.107	3.100 ang	72.523	3.971	72.269	128	99,65	16.068	748.376	103,66	80,82				
					Jumlah Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	400 Orang	933.290	77	482.969	25 ang	101.018	7	100.859	28	99,84	84	583.828	21,00	62,56				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													100,85	94,88			91,73	86,37					
Predikat kinerja													SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													3.467.424	3.241.022									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													99,76	93,47									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													ST	T									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penggunaan Virtual Meating dan pelayanan kepegawaian berbasis online dapat mendukung terlaksananya sebagian target r																							
Faktor penghambat : Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran Covid 19																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan dengan realisasi fisik yang rendah akan menjadi prioritas untuk dipacu pada Triwulan berikutnya dan kegiatan yang sesuai jadwal akan tetap dilaksanakan dan menyesuaikan dengan anggaran yang sudah dirasionalisasi																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*):																							

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo**

- Persentase Angka Partisipasi Politik Masyarakat - 81 %
- Persentase Potensi Konflik yang terdeteksi dan tertangani secara terpadu - 100%
- Persentase Capaian Penguatan Wasbang dan Cinta Tanah Air - 100%
- persentase patisipan ketahanan sosial dan ketahanan budaya - 100%
- Jumlah peserta dan laporan aktivitas ketahanan ekonomi daerah - 100%

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)			K
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	8.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100 %	4.244.842	100	2.121.011	100 %	920.771	28	884.727	28	96	128	3.005.738	128	71			
							Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100 %	1.350.631	100	765.016	100 %	3.923.710	-	3.884.203	-	99	100	4.649.220	100	344			
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	40 Jasa	1.833.111	24	1.116.791	8 Jasa	564.888	8	540.583	100	95,70	32	1.657.374	80	90	KesbangPol		
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.898.602	100	769.665	100 %	355.883	100	344.144	100	96,70	200	1.113.809	100	59	KesbangPol		
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	20 Dok	779.989	12	473.880	4 Dok	146.699	4	146.699	100	100	16	620.579	80	80	KesbangPol		
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Dok	570.642	6	291.137	2 Dok	110.350	2	109.630	100	99	8	400.766	80	70	KesbangPol		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12 Dok	3.666.277	12	3.627.874	100	99	12	3.627.874	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	98,09				85,00	74,72	KesbangPol		
Predikat kinerja															ST	T								
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	8.01	06	1.0	01	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan	Persentase Potensi Konflik yang terdeteksi dan tertangani secara terpadu	100 %	4.703.842	100	1.391.557	100 %	5.748.920	#	5.728.936	161	100	261	7.120.493	261	151			
							Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah Dokumen Tim TPKS	15 Dok	1.842.365	6	790.811	3 Dok		2	300.088	67	96	8	1.090.899	53	59		
							Jumlah Rapat Yang Dilaksanakan	10 Kali	448.922	4	538.351	2 Kali	311.440	3	-	-	-	7	538.351	70	100			
							Jumlah Dokumen	5 Dok	389.960	1	78.571		789.736	-	786.512	-	100	1	865.084	20	222			
							Jumlah Rapat Kerja	5 Kali				7 Kali		22	-	100	-	22	-	440	-			
							Jumlah Dokumen Rapat Kerja FKDM	10 Dok/5 Kali	476.724	3	409.626	1 Kali	30.360	1	29.546	100	97	4	439.172	40	92			
					Jumlah Peserta Kegiatan	1.000 Orq	580.849	4	463.739	100 Orq	4.617.385	100	4.612.790	100	100	104	5.076.529	10	874					

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
3		8.01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaann	Persentase Capaian Penguatan Wawasan Kebangsaan	100 %	1.047.778	100	62.815	100	%	259.619	-	249.918	-	96,26	100	312.733	100	30		
		8.01	02	1.0	1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah Peserta Rapat	2.000 Org	1.047.778	480	372.538	100	Org	259.619	150	249.918	100	96,26	630	622.456	32	59		
		8.01	02	1.0	01	- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Rapat	2.000 Org	1.047.778	480	62.815	100	Org	259.619	##	249.918	100	96,26	630	312.733	32	30	KesbangPol	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	96,26			31,50	59,41			
Predikat kinerja																ST	ST							
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	8.01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat	83 %	6.213.176	100	2.963.841	81 %	2.152.651	78	2.147.078	96	99,74	178	5.110.918	214	82,26			
		8.01	03	1.0	1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah Masyarakat yang diberi pemahaman Politik melalui Tatap Muka dan Media	400 Org	675.931	150	210.692	50 Org	1.264.895	50	1.264.653	100	99,98	200	1.475.344	50	218,27			
							Jumlah Dokumen	60 Dok	560.257	20	404.961	6 Dok	244.387	7	244.364	100	99,99	27	649.325	45	115,90			
							Jumlah Pelaksanaan Monitoring	40 Kali	950.000	20	526.993	7 Kali	643.370	9	638.061	100	99,17	29	1.165.054	73	122,64			
		8.01	03	1.0	01	- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang diberi pemahaman Politik melalui Tatap Muka dan Media	400 Org	675.931	150	210.692	50 Org	1.264.895	50	1.264.653	100	99,98	200	1.475.344	50	218,27	KesbangPol		
		8.01	03	1.0	02	- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen	60 Dok	560.257	20	404.961	6 Dok	244.387	7	244.364	100,00	99,99	27	649.325	45	115,90	KesbangPol		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
		8.01	03	1.0	03	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring	40 Kali	950.000	20	526.993	7 Kali	643.370	9	638.061	100	99,17	29	1.165.054	73	122,64	KesbangPol			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	99,72			55,83	152,27				
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	8.01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Partisipan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat	100 %	3.102.423	100	393.767	100 %	1.577.444	#	1.526.396	158	96,76	258	1.920.162	258	62				
		8.01	04	1.0		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	- Jmlh LSM, ORMAS Yang Diberi Penguatan - Data Base LSM & ORMAS	100 LSM/ Ormas 5 Dok	657.507	90	393.767	20 LSM/ Ormas	1.577.444	39	1.526.396	100	96,76	129	1.920.162	100	292	KesbangPol			
		8.01	04	1.0	01	- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jmlh LSM, ORMAS Yang Diberi Penguatan - Data Base LSM & ORMAS	100 LSM/ Ormas 5 Dok	657.507	90	393.767	20 LSM/ Ormas	1.577.444	39	1.526.396	100	96,76	129	1.920.162	129	292	KesbangPol			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	96,76			100,00	292,04				
Predikat kinerja																ST	ST								
6	Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	8.01	05			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	Persentase partisipan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat	100 %	3.102.423	100	1.039.660	100 %	795.593	82	791.624	82	99,50	182	1.831.283	182	59				
		8.01	05	1.0		Kegiatan Perumusan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Jumlah Dokumen Laporan	12 Dok	1.139.608	15	485.722	12 Dok	360.181	12	360.153	100	99,99	27	845.875	100	74				
							Jumlah Peserta Kegiatan	1.500 Orq	1.019.125	2	72.670	40 Orq	408.148	40	404.413	100	99,08	42	477.083	3	47				
							Jumlah Peserta Sosialisasi	1.000 Orq	508.045	450	268.439	20 Orq	27.264	20	27.058	100	99,24	470	295.497	47	58				
		8.01	05	1.0	02	- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	12 Dok	1.139.608	15	485.722	12 Dok	360.181	12	360.153	100	99,99	27	845.875	225	74	KesbangPol			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
		8.01	05	1.0	03	1			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
		8.01	05	1.0	03	1	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Kegiatan	1500	1.019.125	2	72.670	40	Org	408.148	40	404.413	100	99,08	42	477.083	3	47	KesbangPol			
		8.01	05	1.0	04	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	1000	508.045	450	268.439	20	Org	27.264	20	27.058	100	99,24	470	295.497	47	58	KesbangPol			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	99,44			74,90	59,73					
Predikat kinerja																	ST	ST									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														15.378.708		15.212.881											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	98,61	98,09			75,48	151,27					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	ST	ST									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target fisik dapat melampaui target																											
Faktor Penghambat : -																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tetap konsisten dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan memperbaiki kinerja capaian keuangan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD berikutnya																											

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu Pada Sasaran RKPD Provinsi :

- 1 Prosentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah : 100%
- 2 Jumlah Ranperda APBD Kab/Kota sesuai dengan regulasi yang berlaku : 6 kab./kota dan 18 SK
- 3 Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah : 7%
- 4 Pendapatan Daerah (Trilyun Rupiah) : 2,27
- 5 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : WTP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
I.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100	%	8.988.732	100	12.523.043	100	6.267.440	26	5.854.414	26,00	93,41	126,00	18.377.457	100,00	204,45	BKPG
				Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	1.314.995	100	2.319.959	100	713.844	121	686.439	120,83	96,16	220,83	3.006.398	100,00	228,62	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	%	16.554.198	100	6.317.636	100	2.696.415	92	2.439.956	92,00	90,49	192,00	8.757.592	192,00	0,53	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana	100	%	19.480.084	100	5.551.919	100	3.291.322	96	3.150.265	96,00	95,71	196,00	8.702.184	196,00	0,45	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/ bimtek	304	org	715.148	101	653.488	64	279.702	49	264.193	76,56	94,46	150,00	917.681	49,34	1,28	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi	8	dokumen	1.245.885	16	1.201.294	8	482.299	8	459.042	100,00	95,18	24,00	1.660.336	300,00	1,33	BKPG
				Persentase jaringan data dan informasi elektronik yang dibangun	100	%	622.942	100	870.985	100	131.551	100	129.408	100,00	98,37	200,00	1.000.393	200,00	1,61	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan	5	dokumen	143.030	99	247.680	5	99.994	5	97.989	100,00	100,00	104,00	345.669	2.080,00	2,42	
Rata-rata capaian kinerja (%)													94,09	95,70			502,89	1,27		
Predikat kinerja													ST	ST						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPDPovinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDPovinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDPovinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
II	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah	100	persen	4.714.797	100	11.208.834	100	#####	48	103.563.973	48,03	44,80	148,03	114.772.807	100,00	2.434,31	
				Jumlah Ranperda APBD Kab/Kota sesuai dengan regulasi yang berlaku	6	kab./kota dan 18 SK	200.241	6	472.169	6	580.250	6	579.900	6	579.900					
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Jumlah dokumen data dasar untuk KLUA PPA yang tersedia	5	Dokumen	208.414	4	415.994	1	441.853 37.999	1	356.524 34.556	100,00	80,69 90,94	5,00	772.518 34.556	100,00	3,71 -	BKPG
				Jumlah Perda APBD dan pergub penjabaran APBD yang disusun	5	1 Perda dan 1 Pergub	422.761	3	1.566.523	1	569.611	1	550.978	100,00	96,73	4,00	2.117.501	80,00	5,01	
				Jumlah Perda APBD dan pergub penjabaran perubahan APBD yang disusun	5	1 Perda dan 1 Pergub	171.635	3	471.944	1	133.400	1	132.632	100,00	99,42	4,00	604.576	80,00	3,52	
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah pembinaan dan koordinasi ttg pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten/ kota yang dilaksanakan	6	kab./kota dan 18 SK	200.241	6	472.169	6	580.250	8	579.900	133,33	99,94	14,00	1.052.069	233,33	5,25	
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.	Jumlah system pengelolaan keuangan yang tersedia	32	SKPD	609.249	32	1.564.209	32	451.252	32	447.996	100,00	99,28	64,00	2.012.205	200,00	3,30	
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.	Jumlah dokumen penyediaan dana dan arus kas yang disusun	10	dokumen	143.030	4	383.174	2	413.540	2	410.221	100,00	99,20	6,00	793.395	60,00	5,55	
				Penatausahaan administrasi keuangan SKPD sesuai sisdur pengelolaan keuangan	10	Dokumen	364.725	4	671.191	2	466.548	2	463.609	100,00	99,37	6,00	1.134.800	60,00	3,11	
				Jumlah hasil verifikasi SPM SKPD sesuai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD	32	33 SKPD dan 26 menit waktu terbit SP2D	332.687	32	540.051	32	170.419	32	168.222	100,00	98,71	64,00	708.273	200,00	2,13	
				Jumlah dokumen kebijakan teknis perbendaharaan yang disusun	5	Dokumen	250.302	4	399.154	1	301.211	1	265.390	100,00	88,11	5,00	664.544	100,00	2,65	
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun	5	1 Perda, 1 Pergub dan 1 dokumen LKPD	457.695	3	835.279	1	337.671	1	329.213	100,00	97,50	4,00	1.164.492	80,00	2,54	
				Jumlah dokumen laporan keuangan sesuai SAP yang disusun	33	SKPD	426.943	32	683.095	32	247.629	32	245.554	100,00	99,16	64,00	928.649	193,94	2,18	
				Jumlah regulasi tentang akuntansi yang disusun	500	Buku	429.089	200	379.575	100	190.117	25	183.860	25,00	96,71	225,00	563.435	45,00	1,31	
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		6	kab./kota	175.516.768	6	648.100.606	6	227.421.867	6	218.983.253	100,00	96,29	12,00	394.500.021	200,00	2,25	
			Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Kab./Kota yang memperoleh bantuan keuangan	6	kab./kota	75.000.000	6	45.000.000	6	18.450.000	1	18.153.055	16,67	98,39	7,00	93.153.055	116,67	1,24	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Kab./Kota yang memperoleh bagi hasil	6	kab./kota	100.516.768	6	603.100.606	6	208.971.867	6	200.830.198	100,00	96,10	12,00	301.346.966	200,00	3,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)												96,79	95,86			125,56	3,04			
Predikat kinerja												ST	ST							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPDPovinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDProvinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDProvinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
III			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah	100	%	4.714.797	100	11.208.834	100	1.650.074	56,00	844.219	56,00	51,16	156,00	12.053.053	156,00	100,00			
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah buku standarisasi barang dan jasa yang disusun	750	buku	133.561	242	840.209	150	164.209	55,00	146.530	36,67	89,23	297,00	986.739	39,60	7,39			
				Jumlah laporan aset milik daerah yang disusun	125	25 buku per triwulan dan 1 dokumen aset	615.027	115	1.623.948	25	1.126.993	14,00	973.034	56,00	86,34	129,00	2.596.982	103,20	4,22			
				Jumlah dokumen Kebijakan yang diterbitkan	1	Dokumen	149.680	2	663.963	1	358.872	1,00	348.488	100,00	97,11	3,00	1.012.451	300,00	6,76			
Rata-rata capaian kinerja (%)													64,22	90,89			147,60	6,12				
Predikat kinerja													S	ST								
V.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	35	persen	1.847.174	17	7.773.771	7	4.896.440	4,45	4.425.122	63,57	90,37	21,45	12.198.893	61,29	660,41			
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pajak dan dana perimbangan	15	Dokumen	286.059	6	775.815	3	277.617	3,00	214.750	100,00	77,35	9,00	990.565	60,00	3,46	BKPG		
				Jumlah dokumen pelaksanaan rapat koordinasi tingkat regional dan nasional	5	Dokumen	248.371	3	373.526	1	723.711	1,00	516.439	100,00	71,36	4,00	889.965	80,00	3,58			
				Jumlah dokumen pelaksanaan rapat koordinasi pendapatan daerah	5	Dokumen	340.000	3	611.446	1	19.403	1,00	18.101	100,00	93,29	4,00	629.547	80,00	1,85			
				Jumlah dokumen NKB Tahun berjalan yang disusun	5	Dokumen	274.617	3	1.987.357	1	199.355	1,00	198.114	100,00	99,38	4,00	2.185.471	80,00	7,96			
				Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi samsat	25	Dokumen	698.127	10	1.534.424	5	3.676.354	5,00	3.477.718	100,00	94,60	15,00	5.012.142	60,00	7,18			
					100	%		100	2.491.203	100		100,00			200,00							
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	87,20			93,33	4,81				
Predikat kinerja													ST	T								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											245.291.166	115.954.067										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													88,78	92,41			217,35	3,81				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													T	ST								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																						
Faktor penghambat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*																						

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Badan Penghubung Provinsi Gorontalo**

A Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi : Badan Penghubung Provinsi Gorontalo

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun Berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KET	
					K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
I	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	1 20 08 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	100	%	24.817.736	100	%	9.351.692	100	1.280.743	100,00	1.844.882	100,00	144,05	200,00	11.196.574	200,00	45,12	
				Meningkatnya kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan Pelaporan	100	%	1.227.864	100	%	251.977	100	1.993.049	51,97	2.682.240	51,97	134,58	151,97	2.934.217	151,97	238,97	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	11.162.400	100	%	2.692.478	100	577.431	100,00	1.030.596	100,00	178,48	200,00	3.723.074	100,00	33,35	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi keluar Daerah	34	Rapat	1.860.400	36	Rapat	776.556	12	190.320	12,00	240.921	100,00	126,59	48,00	1.017.477	100,00	54,69	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	11.162.400	100	%	2.692.478	100	577.431	100,00	1.030.596	100,00	178,48	200,00	3.723.074	100,00	33,35	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34	Rapat	1.860.400	36	Rapat	776.556	12	190.320	12,00	240.921	100,00	126,59	48,00	1.017.477	100,00	54,69	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	632.536	100	%	868.728	100	512.992	100,00	573.365	100,00	111,77	200,00	1.442.093	100,00	227,99	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	%	632.536	100	%	868.728	100	512.992	100,00	573.365	100,00	111,77	200,00	1.442.093	100,00	227,99	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	24	Org	111.624	10	Org	68.410	10	1.977.049	10,00	2.666.240	100,00	0,00	20,00	2.734.650	83,33	2449,88	
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	Dok	1.116.240	9	Dok	251.977	3	16.000	1,00	16.000	33,33	100,00	10,00	267.977	66,67	24,01	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	24	Org	111.624	10	Org	68.410	10	1.977.049	10,00	2.666.240	100,00	0,00	20,00	2.734.650	83,33	2449,88					
				Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan	15	Dok	1.116.240	9	Dok	251.977	3	16.000	1,00	16.000	33,33	100,00	10,00	267.977	66,67	24,01	
Rata-rata capaian kinerja (%)														144	172	159	2.060.881	90	558		
Predikat kinerja														ST	ST	ST	ST	ST	ST		
II		1 20 08 01 16	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kerjasama Dengan Beberapa Lembaga melalui Promosi dan Penyebaran Luasan Informasi	100	%	1.860.400	100	%	185.314	100	443.901	100,00	569.504	100,00	128,30	200	754.818	200	41	Badan Penghubung
				Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	17	Lap	1.555.200	45	Lap	1.643.445	12	443.901	12,00	569.504	100,00	128,30	57,00	2.212.949	100,00	142,29	
				Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	17	Lap	1.555.200	45	Lap	1.643.445	12	443.901	12,00	569.504	100,00	128,30	57,00	2.212.949	100,00	142,29	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	128,30	57	2.212.949	100,00	142,29		
Predikat kinerja														S	S	R	ST	ST	ST		
III			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Pelayanan pada Kantor Penghubung yang terpenuhi	100	%	7.441.600	100	%	2.430.377	100	689.870	100,00	1.135.878	100,00	164,65	200	3.566.255	200	48	Badan Penghubung
				Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	%	7.441.600	100	%	2.430.377	100	689.870	100,00	1.135.878	100,00	164,65	200,00	3.566.255	100,00	47,92	
				Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	164,65	200	3.566.255
Predikat kinerja														SR	ST	ST	ST	ST	SR		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program										4.407.562	6.232.504										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM 3)										114,81	155,08										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM 3)										ST	ST										
<p>Faktor pendukung keberhasilan kinerja : Laporan Pengawasan Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu</p> <p>Faktor penghambat : Jaringan Sistem Keuangan yang belum maksimal</p> <p>Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</p> <p>Tidak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya</p>																					

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
I.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	5.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100,00	15.884.000	100,00	7.234.551	100,00	3.068.281	103,13	2.598.515	103,13	84,69	203,13	9.833.066	203,13	61,91	
				Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100,00	7.782.000	100,00	3.326.266	100,00	1.219.348	87,50	1.149.770	87,50	94,29	187,50	4.476.036	187,50	57,52	
		5.01 . 01 . 1.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	22	5 Forum, 17 Dok	12	3.326.266	4	1.219.348	4,00	1.149.770	100,00	94,29	16,00	4.476.036	72,73	57,52	BAPPPEDA
		5.01 . 01 . 1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan administrasi dan Keuangan	15	Laporan	9	213.547	3	52.569	3,00	48.210	100,00	91,71	12,00	261.757	80,00	52,35	
		5.01 . 01 . 1.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas / kompetensinya melalui diklat/bimtek	100	Aparatur	100	687.219	100	270.000	100,00	236.494	100,00	87,59	200,00	923.713	200,00	49,40	
		5.01 . 01 . 1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat daerah	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah/unit)	30	Paket	18	3.504.498	8	1.674.008	8,00	1.406.048	100,00	83,99	26,00	4.910.546	86,67	61,57	BAPPPEDA
		5.01 . 01 . 1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	60	Bulan	36	2.829.287	12	1.071.704	12,00	907.763	100,00	84,70	48,00	3.737.050	80,00	67,48	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	88,46				103,88	57,66	
Predikat kinerja												ST	T						
II.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	5.01 . 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan Renja PD	100,00	7.848.000	100,00	3.100.668	100,00	793.591	100,00	726.182	100,00	91,51	200,00	3.826.850	200,00	48,76	
				Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	6,00	5 Pergub RKPd, 1 Perda RPJMD	3,00	1.744.183	1,00	439.727	1,00	413.943	100,00	94,14	4,00	2.158.126	66,67	47,56	
				Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Provinsi dan Kab/Kota	10,00	Dokumen	6,00	738.453	2,00	161.045	2,00	140.145	100,00	87,02	8,00	878.598	80,00	56,87	
				Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur	10,00	Dokumen	6,00	618.031	2,00	192.820	2,00	172.094	100,00	89,25	8,00	790.125	80,00	44,77	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	90,14				75,56	49,73	
Predikat kinerja												ST	T						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
III	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	5.01 . 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan Renja PD</i>	100,00	persen	17.365.000	100,00	5.669.219	100,00	2.054.607	78,55	2.020.741	78,55	98,35	178,55	7.689.960	178,55	44,28	
		5.01 . 03 . 1.01	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental	27	16 Rapat Lingkup SKPD; 6 Koordinasi Daerah; 5	3.895.000	81	1.600.528	27	249.348	27,00	243.415	100,00	97,62	108,00	1.843.943	100,00	47,34	
				Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	26	9 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 5	2.535.000	78	1.072.098	26	366.108	26,00	363.965	100,00	99,41	104,00	1.436.063	100,00	56,65	
				Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan	43	21 Rapat Lingkup SKPD; 17 Koordinasi Daerah; 5	2.545.000	129	857.024	43	132.248	43,00	129.866	100,00	98,20	172,00	986.890	100,00	38,78	
		5.01 . 03 . 1.02	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumer Daya Alam)	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sektor Pertanian dan Pangan	40	18 Rapat Lingkup SKPD; 12 Koordinasi Daerah; 10 Koordinasi Pusat;	3.027.000	120	895.782	40	235.208	40,00	232.556	100,00	98,87	160,00	1.128.338	100,00	37,28	
				Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sektor Dunia Usaha dan Industri	23	9 Rapat Lingkup SKPD; 8 Koordinasi Daerah; 6	2.807.000	69	932.827	23	225.702	23,00	222.711	100,00	98,67	92,00	1.155.538	100,00	41,17	
				Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sektor Kelautan, Perikanan dan Pariwisata	24	8 Rapat Lingkup SKPD; 10 Koordinasi Daerah; 6	2.927.000	72	807.177	24	134.190	24,00	136.550	100,00	101,76	96,00	943.727	100,00	32,24	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		5.01 . 03 . 1.03	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan	45	2.841.000	90	1.029.487	45	328.060	45,00	318.536	100,00	97,10	135,00	1.348.023	100,00	47,45	
				Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sektor Prasarana Ke-Ciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	46	2.718.000	138	968.008	46	203.012	46,00	197.822	100,00	97,44	184,00	1.165.830	100,00	42,89	
				Jumlah Koordinasi/Rapat di Tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air	51	3.045.000	153	1.035.939	51	180.731	51,00	175.320	100,00	97,01	204,00	1.211.259	100,00	39,78	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	98,45			100,00	42,62	
Predikat kinerja													ST	ST					
IV.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	5.05 . 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti	100,00 %	6.906.000	100,00	3.227.291	100,00	1.729.632	55,45	1.702.112	55,45	98,41	155,45	4.929.403	155,45	71,38	
		5.05 . 02 . 1.01	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam pengembangan sosial budaya	5	2.045.000	3	1.156.721	5	1.109.860	5	1.097.382	100,00	99	8	2.254.103	160	110	
		5.05 . 02 . 1.02	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																
		5.05 . 02 . 1.03	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	5	2.816.000	3	1.371.773	4	260.029	4	248.862	100,00	95,71	7	1.620.635	140,00	57,55	
		5.05 . 02 . 1.04	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Prasarana Wilayah	5	2.045.000	3	698.798	1	359.743	1	355.868	100,00	98,92	4	1.054.666	80,00	51,57	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	97,83			126,67	73,12	
Predikat kinerja													ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											8.865.460	8.197.320							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													100,00	93,72			101,53	55,78	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													ST	ST					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : "beberapa kegiatan melebihi target sebelum jadwal yg telah ditetapkan"

Faktor penghambat pencapaian kinerja : "Adanya Kegiatan dalam renja tapi tidak dilaksanakan dikarenakan oleh anggaran yang terbatas"

Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya : kegiatan harus dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya) :

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	50 Ranperda 1500 Pergub/SK	6.494.000	18 766	3.432.980	10 300	564.603	10 300	592.026	100,00 100,00	104,86	28,00 1.066,00	4.025.006	56,00 100,00	61,98	
				Persentase pendampingan kasus terkait penyelenggara Pemerintahan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	100 %	6.291.000	100	4.006.651	100	2.160.310	100	1.906.718	100,00	88,26	200,00	5.913.369	100,00	94,00	
			Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Ranperda	45 Laporan Pendampingan	1.410.000	28	364.203	10	98.392	25	126.526	100,00	100,00	53,00	490.729	100,00	34,80	BIRO HUKUM
				Jumlah peraturan kepala daerah (Pergub dan Keputusan Kepala Daerah yang ditetapkan)	1500 Pergub/SK	1.229.000	1115	310.682	300	140.298	300	139.967	100,00	99,76	1.415,00	450.649	100,00	36,67	
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan pemahamannya tentang peraturan perundang undangan dan jumlah produk hukum dan peraturan perundang-	2040 Orang		600		2800		0		-		600,00		29,41		
				Produk Hukum Daerah dan peraturan hukum lainnya	2250	3.555.000	450	2.758.095	450	170.046	450	169.924	100,00	99,93	900,00	2.928.019	40,00	82,36	
				Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang dikonsultasi publik	6 Rancangan Produk Hukum Daerah	300.000	2	-	6	155.867	6	155.609	100,00	99,83	8,00	155.609	100,00	51,87	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah peraturan kepala daerah (Pergub dan Keputusan Kepala Daerah yang ditetapkan)	1500 Pergub/SK	1.229.000	1115	310.682	300	140.298	300	139.967	100,00	99,76	1.415,00	450.649	100,00	36,67	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Ranperda	45 Laporan Pendampingan	1.410.000	28	364.203	10	98.392	25	126.526	100,00	128,59	53,00	490.729	117,78	34,80	
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan pemahamannya tentang peraturan perundang undangan dan jumlah produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	2040 Orang		600		2.800		-		-		600,00		29,41		
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Produk Hukum Daerah dan peraturan hukum lainnya	2250	3.555.000	450	2.758.095	450	170.046	450	169.924	100,00	99,93	900,00	2.928.019	40,00	82,36	
			Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang dikonsultasi publik	6 Rancangan Produk Hukum Daerah	300.000	2	-	6	155.867	6	155.609	100,00	99,83	8,00	155.609	100,00	51,87	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Penyelesaian Sengketa hukum yang ditangani	30	Laporan Hasil Pendampingan	2.320.000	16	2.729.889	6	1.753.693	6	1.504.806	100,00	85,81	22,00	4.234.695	73,33	100,00	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Jumlah Kasus/penyelenggaraan bantuan	26	Laporan Hasil Penyelenggaraan Bantuan Hukum (26 OBH)	1.016.000	11	305.701	6		12		100,00		23,00	707.613	88,46	69,65	
					Jumlah pasangan suami istri yang mengikuti sidang itsbat nikah	900	Pasutri	2.200.000	388	860.945	100		172		100,00		560,00	860.945	62,22	39,13	
					Jumlah advokat yang memperoleh peningkatan kapasitas, Jumlah OBH yang dipantau dan dievaluasi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat	300	Orang	755.000	148	110.115	75		225		100,00		373,00	110.115	100,00	14,58	
					Jumlah OBH yang dipantau dan dievaluasi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat	6	OBH		2		6		7		100,00		9,00		100,00		
					Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Penyelesaian Sengketa hukum yang ditangani	30	Laporan Hasil Pendampingan	2.320.000	16	2.729.889	6	1.753.693	6	1.504.806	100,00	85,81	22,00	4.234.695	73,33	182,53	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Jumlah Kasus/penyelenggaraan bantuan	26	Laporan Hasil Penyelenggaraan Bantuan Hukum (26 OBH)	1.016.000	11	305.701	6		12		100,00		23,00	707.613	88,46	69,65	
					Jumlah pasangan suami istri yang mengikuti sidang itsbat nikah	900	Pasutri	2.200.000	388	860.945	100		172		172,00		560,00	860.945	62,22	39,13	
					Jumlah advokat yang memperoleh peningkatan kapasitas, Jumlah OBH yang dipantau dan dievaluasi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat	300	Orang	755.000	148	110.115	75		225		100,00		373,00	110.115	100,00	14,58	
					Jumlah OBH yang dipantau dan dievaluasi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat	6	OBH		2		6		7		100,00		9,00	-	100,00	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	97,36			78,78	53,63			
Predikat kinerja													ST	ST							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana, dan SDM Aparatur	100 %	3.601.000	100	1.503.152	100	719.607	100	705.868	100	98,09	200	2.209.020	100,00	61,34		
				Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100 %	1.060.000	100	324.710	100	108.460	100	108.153	100	99,72	200	432.863	100,00	40,84		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan yang tersusun	40	Dokumen	1.060.000	20	324.710	8	108.460	8	108.153	100	100	28	432.863	70	41	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan yang tersusun	40	Dokumen	1.060.000	20	324.710	8	108.460	8	108.153	100	100	28	432.863	70	41	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Diklat	90	Orang	816.000	50	309.975	20	111.416	20	110.388	100	99,08	70,00	420.363	77,78	51,52	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Diklat	90	Orang	816.000	50	309.975	20	98.816	20	97.827	100	99,00	70,00	407.802	77,78	49,98	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang di Sediakan						36	12.600	36	12.561	100	99,69	36,00	12.561	-	-	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	9	Dokumen	1.035.000	5	388.071	1	372.305	1	362.945	100,00	97,49	6,00	751.016	66,67	72,56	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	9	Dokumen	1.035.000	5	388.071	2	330.320	2	326.577	100,00	98,87	7,00	714.648	77,78	69,05	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disersediakan						1	7.500	1	5.683	100,00	75,77	1,00	5.683	-	-	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan						3	34.485	3	30.685	100,00	88,98	3,00	30.685	-	-	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100 %	1.750.000	100	805.106	100	235.886	100	232.535	100	98,58	200,00	1.037.641	100,00	59		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %	1.750.000	100	805.106	100	235.886	100	232.535	100	98,58	200,00	1.037.641	100,00	59		
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	98,71				78,61	56,05	
Predikat kinerja													ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.552.980	3.312.765								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													100,00	98,04				78,69	54,84	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													ST	ST						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya* :																				

Evaluasi Hasil Terhadap RKPD Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Gorontalo
RKPD Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Indikator dan Target Kinerja yang mengacu sasaran RKPD Provinsi : Meningkatkan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

NO	Sasaran	KODE	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KET	
					K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp			
1		1 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	%	9.600.437	100	%	2.257.246.294	100	%	4.170.984.368	90	4.140.981.777	90,32	99	190,32	2.257.246.393	190,32	23.512	Biro Organisasi		
		1 2 1 1	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	3.071.000	100	%	1.019.341.005	100	%	242.381.646	98	237.996.662	98,19	98	198	1.257.337.667	198,191	40.942			
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	3.960.000	100	%	811.945.920	100	%	525.318.125	98,43	517.077.536	98,43	98	198,43	1.329.023.456	198,431	33.561			
		3	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6	org	459.748	6	org	49.911.100	6	org	50.314.100	6	50.289.100	6,00	100	12	100.200.200	200				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	0	0	0	0	%	0	100	%	3.041.617.663	99,47	3.025.371.339	99,47	99	99,47	3.025.371.339	0				
			Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	Dok	1.585.760	6	Dok	301.693.396	6	Dok	197.806.840	6	196.717.690	100,00	99	12	498.411.086	40,00				
			Penatausahaan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	15	Dok	523.929	3	Dok	74.354.873	3	Dok	113.545.994	3	113.529.450	100,0	100	6	187.884.323	40,00				
															-	84			113	-				
															Rata-rata capaian Kinerja (%)		83,68				112,77	24.834		
															Predikat kinerja		T				ST	R		

NO	Sasaran	KODE	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RPKD Povinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KET				
					K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp						
2			Program Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Layanan Kedinasan Kepala Daerah/wakilkepala daerah	100	%	13.178.000.000	100	%	857.176.884	100	%	1.045.467.375	95	1.025.152.669	95,47	98	195	857.176.982	195,47	6,50						
			Fasilitasi penataan kelembagaan provinsi	pembentukan penyempurnaan OPD	32		2.620.000.000	0	0	47.404.666	32	OPD	162.082.619	32	149.938.350	100,00	93	32	250.000.093	100,00	9,54						
			fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota	tersusunnya rekomendasi dan persetujuan, pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi perangkat daerah	100	%	2.450.000.000	100	%	47.404.666	100	%	108.522.420	95,738	103.897.116	96	96	195,73793	375.000.096	195,74	15,31						
			Penataan Analisis Jabatan	tersusunnya dokumen analisis jabatan dan ABK, Evaluasi jabatan, Standar kompetensi jabatan	2	lap	268.000.000	2	lap	47.404.666	2	Lap	160.000.004	2	159.003.200	100	99	4	99	200,00	0,00						
			Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	tersusunnya rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemprov Gorontalo dan Pembinaan kab/kota	3	lap	2.800.000.000	3	lap	80.835.952	1	Lap	162.735.465	1	162.580.150	1,00	100	4	100	133,33	0,00						
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	terlaksananya fasilitasi dan monitoring evaluasi akuntabilitas kinerja	2	dok	1.000.000.000	2	dok	56.531.600	0	0	-	0	-	0,00	-	2	-	100,00	0,00						
			Evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja	terlaksananya fasilitasi peningkatan budaya kerja dan budaya organisasi (Tim RB, dan agen perubahan)	0	0	-	0	0	-	1	dok	131.637.207	33,994	131.197.281	3.399	100	33,993621	100	0,00	0,00						
			Pengelolaan tata laksana pemerintahan	terlaksananya penyusunan peta proses bisnis	25	dok	1.240.000.000	5	dok	250.000.000	5	dok	125.015.951	5	124.974.872	100	100	10	100	40,00	0,00						
			peningkatan pelayanan publik	tersusunnya rencana penyusunan dokumen pengusulan dan monev inovasi pelayanan publik	5	dok/lap	2.800.000.000	2	dok	375.000.000	2	Proposal	195.473.709	2	193.561.700	100,00	99	4	99	80,00	0,00						
															3896,1					849,07	3,11						
															Rata-rata capaian Kinerja (%)		556,59						106,13	3			
															Predikat Kinerja		ST						ST	SR			
															Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program												
																				5.216.451.743							
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)												
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)												
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja					:Pengendalian & Evaluasi dari pimpinan secara terstruktur dalam pencapaian output dan penyerapan anggaran																						
Faktor Penghambat					:Kurangnya Ketersediaan anggaran pada beberapa kegiatan pelayanan kepada pimpinan, sehingga harus berharap dukungan anggaran pada pimpinan Setda																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya					Minimnya Kapasitas SDM guna dalam mendukung pelaksanaan pelayanan keprotokol dan kehumasan secara optimal																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya					Melaksanakan pergeseran anggaran pada kegiatan yang belum terserap sampai dengan T.A 2021 dan Meningkatkan Kapasitas SDM guna mendukung kegiatan pelayanan kepada pimpinan melalui Bimtek																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya					lebih memprioritaskan perencanaan anggaran pada kegiatan pelayanan terhadap pelayanan pimpinan																						
					penambahan alokasi anggaran khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada pimpinan																						

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi Gorontalo:

- 1) Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota : 3 Dokumen
2) Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa Provinsi Gorontalo : 1 Dokumen

NO.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (%)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	1	3	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100 %	1.891.384	100 %	2.636.025	100 %	711.445	100,00 %	552.664	100,00	77,68	200,00	3.188.689	200,00	168,59		
					Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan biro.	11 Lap	370.000	30 Lap	742.380	10 Lap	246.894	10,00	223.282	100,00	90,44	40,00	965.662	100,00	100,00		
					- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah laporan perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan biro.	11 Lap	370.000	30 Lap	742.380	10 Lap	246.894	10,00	223.282	100,00	90,44	40,00	965.662	100,00	100,00		
					Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat/bimtek	23 Org	215.000	41 Org	254.386	19 Org	29.450	19,00	29.534	100,00	100,28	60,00	283.920	100,00	100,00		
					- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat/bimtek	23 Org	215.000	41 Org	254.386	19 Org	29.450	19,00	29.534	100,00	100,28	60,00	283.920	100,00	100,00		
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.	100 %	580.000	100 %	475.547	100 %	86.991	100,00	86.991	100,00	100,00	200,00	562.538	100,00	96,99		
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.	100 %	580.000	100 %	475.547	100 %	86.991	100,00	86.991	100,00	100,00	200,00	562.538	100,00	100,00		
					Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan umum, kepegawaian, keuangan dan aset biro	100 %	726.384	100 %	1.163.712	100 %	348.109	100,00	212.857	100,00	61,15	200,00	1.376.569	100,00	100,00		
					- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan umum, kepegawaian, keuangan dan aset biro	100 %	726.384	100 %	1.163.712	100 %	348.109	100,00	212.857	100,00	61,15	200,00	1.376.569	100,00	100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	87,97			100,00	99,25				
Predikat Kinerja													ST	T								

NO.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPDP Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung-jawab	Ket
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (%)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Program perekonomian dan pembangunan	Persentase peningkatan aktivitas pengendalian ekonomi.	100 %	3.592.420	100 %	773.266	100 %	640.714	100,00	567.056	100,00	88,50	200,00	1.340.322	200,00	37,31		
			Kegiatan pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Jumlah kegiatan rakorev, sosialisasi fakta dan angka, refleksi ekonomi, rakor TPID dan rapat pengendalian bidang ekonomi.	25 keg	1.446.030	15 Keg	294.749	5 Keg	514.057	5,00	513.970	100,00	99,98	20,00	808.719	80,00	55,93		
				Jumlah koordinasi/ monev/pengendalian, konsultasi, penyusunan buku indikator ekonomi dan penggunaan aplikasi SiagadiniGo.	20 keg	2.146.390	12 Keg	478.517	4 Keg	126.657	11,00	53.086	100,00	41,91	23,00	531.603	100,00	24,77		
			- Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah kegiatan rakorev, sosialisasi fakta dan angka, refleksi ekonomi, rakor TPID dan rapat pengendalian bidang ekonomi.	25 Keg	1.446.030	15 Keg	294.749	5 Keg	514.057	5,00	513.970	100,00	99,98	20,00	808.719	100,00	55,93		
				Jumlah koordinasi/ monev/pengendalian, konsultasi, penyusunan buku indikator ekonomi dan penggunaan aplikasi SiagadiniGo.	20 keg	2.146.390	12 Keg	478.517	4 Keg	126.657	11,00	53.086	100,00	41,91	23,00	531.603	100,00	24,77		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	70,95			90,00	40,35		
Predikat Kinerja													ST	S						
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Program kebijakan administrasi pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota	3 Dok	884.690	9 Dok	1.227.835	3 Dok	618.722	2,00	342.472	66,67	55,35	11,00	1.570.307	366,67	177,50		
			Kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota	15 Dok	3.491.735	9 Dok	1.227.835	3 Dok	618.722	8,00	342.472	100,00	55,35	17,00	1.570.307	100,00	44,97		
			- Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Seluruh SKPD mengikuti pendampingan penginputan RKA (APBD) SKPD ke aplikasi eMonev.	5 keg	1.531.825	10 keg	169.082	4 Keg	449.640	4,00	208.489	100,00	46,37	14,00	377.571	100,00	24,65		
			- Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah		6 keg	1.959.910	12 keg	449.640	4 Keg	169.082	6,00	133.983	150,00	79,24	18,00	583.623	100,00	29,78		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	55,35			100,00	44,97		
Predikat Kinerja													ST	R						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										1.970.881	1.462.192									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (Program 1 s.d Program 3)													100,00	71,42			96,67	61,52		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (Program 1 s.d Program 3)													ST	R						
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja : sinergitas dan kerjasama yang baik tingkat internal dan external OPD.																				
Faktor Penghambat : kurang input dan sarana pendukung untuk mobilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pertahankan capaian kinerja																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya *) :																				

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

1. Persentase pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah : 100%
2. Persentase peningkatan layanan pemerintah desa/kelurahan : 100%
3. Persentase Pemasangan pilar batas daerah yang terpasang, koordinasi pelaksanaan PATEN, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan : 100%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD SKPD Provinsi (2021) Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100 %	577.500	100	206.734	100	117.040	67	107.212	66,67	91,60	167	313.946	166,67	54,36		
				Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM	100 %	3.859.192	100	1.622.905	100	1.360.129	81	1.295.186	81,03	95,23	181	2.918.091	181,03	75,61		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	30 Dokumen	577.500	12	206.734	6	117.040	6	107.212	100,00	91,60	18	313.946	60,00	54,36		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana prasarana yang diadakan	12 Paket	638.826	8	226.200	4	827.778	19	783.729	100,00	94,68	27	1.009.929	225,00	158,09		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	3.017.866	100	1.159.819	100	441.399	100	425.450	100,00	96,39	200	1.585.269	200,00	52,53		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek	55 Orang	631.500	34	236.886	12	90.952	18	86.007	100,00	94,56	52	322.893	94,55	51,13		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	94,31			144,89	79,03		
Predikat Kinerja													ST	ST			ST	T		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPDP Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP SKPD Provinsi (2021) Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemasangan pilar batas daerah yang terpasang, koordinasi pelaksanaan PATEN, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	100 %	2.884.578	100	2.437.646	100	484.575	211	465.234	211,00	96,01	311	2.902.881	100,00	100,63		
			Keg - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	4.650.338	100	1.963.745	100	1.271.090	126	1.210.947	-	95,27	226	3.174.692	100,00	68,27		
				Jumlah laporan hasil koordinasi	10 Laporan	804.968	6	174.989	2	140.175	2	131.979	100,00	94,15	8	306.968	100,00	38,13		
				Jumlah laporan hasil koordinasi/konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan dan urusan lainnya	20 Laporan	659.910	21	464.657	20	343.450	20	309.145	100,00	90,01	41	773.802	100,00	117,26		
				Jumlah Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuandan koordinasi PATEN	10 Dokumen	680.360	3	206.388	4		4		100,00		7	206.388	100,00	30,34		
				Jumlah pilar batas yang terpasang	15 Pilar	729.250	2	358.906	3	344.401	16	333.255	100,00	96,76	18	692.161	100,00	94,91		
				Jumlah dokumen penamaan rupabumi (toponimi) di Kab/Kota	5 Dokumen	670.000	3	141.417	1		1		100,00		4	141.417	100,00	21,11		
			Keg - Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah layanan administrasi dan pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	10 Laporan	837.000	23	391.697	2		2		100,00		25	1.112.744	100,00	132,94		
				Jumlah layanan administrasi dan kunjungan kerja bagi aparatur pemerintah dan legislatif Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya, Legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD)	50 Laporan	863.000	37	201.585	17	737.031	17	721.046	100,00	97,83	54	201.585	108,00	23,36		
				Jumlah laporan koordinasi dan layanan administrasi	5 Laporan	661.063	3	27.400	-	-	-	-	-	-	3	27.400	60,00	4,14		
				Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Iuran APPSI Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	895.774	3	470.606	1	190.609	1	180.756	100,00	94,83	4	651.363	80,00	72,72		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	94,72			94,22	59,43		
Predikat Kinerja													SR	ST			ST	R		
3			Program Penataan Organisasi	Persentase pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	4.650.338	100	1.963.745	100	187.410	100	157.575	100	84,08	200	2.121.320	100,00	45,62		
			Keg - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah SPM OPD	6 Dokumen	733.591	12	240.895	6	187.410	6	157.575	100	84,08	18	398.470	100,00	54,32		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPDP Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP SKPD Provinsi (2021) Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100	84,08			100	54		
Predikat Kinerja													ST	T			ST	R		
4	Menurunnya tingkat kemiskinan		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan layanan keagamaan, adat dan budaya	100 %	46.015.200	100	25.307.434	100	19.541.716	322	7.604.019	321,79	38,91	422	32.911.453	421,79	71,52		
			Keg - Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Jumlah pelaksanaan kegiatan adat dan budaya	100 Kegiatan	1.385.200	60	371.288	5	11.882.635	5	9.713.560	100,00	81,75	65	10.084.848	65,00	728,04		
			Keg - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD sektor Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan, Sosial dan Ketahanan Keluarga	25 Kegiatan	540.550	3	85.230	3	7.559.082	3	6.099.349	100,00	80,69	6	6.184.579	24,00	1144,13		
			Keg - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah laporan pelaksanaan rakorev Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Laporan	484.550	3	13.839	5	99.998	5	84.388	100,00	84,39	8	98.227	53,33	20,27		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	82,27			47,44	630,81		
Predikat Kinerja													ST	T			SR	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											22.961.960		10.840.174							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													100,00	88,85			96,64	205,90		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													ST	T			ST	ST		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pagu Anggaran yang besar dapat mengakomodir seluruh program/kegiatan yang ada di SKPD, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai harapan																				
Faktor penghambat : Pagu Indikatif yang ada di Renstra/Renja tidak sama dengan pagu real sehingga terdapat selisih jumlah yang sangat besar																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya* :																				

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Gorontalo (1 Dokumen)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun Berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Gorontalo	5 Dokumen	3.400.000	3 Dokumen	1.585.273	1 Dokumen	1.025.969,7	1,00	1.014.606,34	100	98,89	4	2.599.879	80	76,47				
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket yang di Klarifikasi dan di Verifikasi	1075 Paket	900.000	651 Paket	549.195	215 Paket	585.344,1	411 Pkt	578.101,62	191,16	99	1.062	1.127.297	99	125,26	Bag. Layanan			
			- Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						215 Paket	109.121,5	411 Pkt	106.662,671							Bag. Layanan			
			- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						215 Paket	340.232,4	411 Pkt	338.216,410							Bag. Layanan			
			- Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						215 Paket	135.990,1	411 Pkt	133.222,540							Bag. Layanan			
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase pendampingan dan penerapan regulasi PBJP	100 %	750.000	100 %	186.934	100 %	87.309,2	100%	83.339	100%	95,453	100	270.272,958	100	36,036	Bagian LPSE			
			- Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							21.069,2	100	17.487							Bagian LPSE			
			- Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kategori baru e-katalog daerah dan upgrade aplikasi e-protrack	3 Kategori 1 Aplikasi				3 Kategori 1 Aplikasi	66.240,0	3 Ktgori 1 Aplks	65.852							Bagian LPSE			
			- Pengelblaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Persentase pelaksanaan lelang melalui SPSE (e-Tendering) dan e-Purchasing	100 %	550.000	100 %	95.399	100 %	58.570,3	100	58.570,30	100	100	100	153.969,30	100	27,99	Bagian LPSE			
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			- Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui	150 Orang	400.000	91 orang	94.699	30 Orang	121.059,7	30	121.059,25	100,00	100,00	121	215.758	80,67	53,94	Bag. Pembinaan &			
			- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelola PBJP yang diberikan penugasan	32 OPD	450.000	32 OPD	532.402	32 OPD	117.901,3	32	117.901,05	100,00	100,00	32	650.303	100	144,51	Bag. Pembinaan &			
			- Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis	Persentase layanan konsultasi PBJP	100 %	350.000	100 %	126.644	100 %	55.785,14	100	55.635,16	100,00	99,73	100	182.279	100	52,08	Bag. Pembinaan &			
Rata-rata capaian kinerja (%)													98,69	98,99			96,58	73,30				
Predikat kinerja													ST	ST			ST	S				
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100 %	3.835.150	100 %	2.360.769	100 %	611.114,786	97,87	598.105,096	97,87	97,87	100,00	2.958.874	100,00	77,15				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan Pelaporan	30 Dokumen	485.150	24 Dokumen	716.128	8 Dokumen	84.015,783	8	82.248,00	100,00	97,90	32,00	798.376	106,67	164,56	Bagian LPSE			
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan sarana & prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan program / kegiatan Biro Pengadaan	100 %	1.700.000	100 %	2.575,031	100 %	74.716	100,0	74.714,4	100,00	100,00	100,25	77.289	100,25	4,55	Bagian LPSE			
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase peningkatan Layanan Jasa Administrasi Perkantoran pada Biro Pengadaan	100 %	1.650.000	100 %	1.642.066	100 %	452.383,0	97,59	441.142,75	98	97,52	100,13	2.083.209	100,13	126,26	Bagian LPSE			
			- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
Rata-rata capaian kinerja (%)													99,20	98,47			102,35	98,45				
Predikat kinerja													ST	ST			ST	ST				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.637.084,459	1.612.711,433											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													98,94	98,38			90,00	76,81				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													ST	ST			T	T				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (Mohon diisi) Faktor penghambat : Ada Rasionalisasi Anggaran sehingga beberapa target tidak tercapai Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (Mohon diisi) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : (Mohon diisi) *) diisi oleh Kepala Bappeda																						

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket						
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.								
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	4	01	01	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	1.947.477.320	51,67	896.003.919	100	181.821.298	####	148.438.761	100,00	81,64	151,67	1.044.442.680	151,67	53,63			
								Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100	%	62.118.705.083	94,20	#####	100	#####	92,89	#####	92,89	95,94	187,09	#####	187,09	74,11			
I.		4	01	01	06	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	11	8 Dok dan 3 Lap	1.031.712.320	33	491.324.110	8	68.089.359	8,00	53.243.514	100,00	78,20	41,00	544.567.624	372,73	52,78			
								Jumlah dokumen laporan keuangan	1	Laporan	915.765.000	3	404.679.809	3	44.739.670	3,00	40.110.492	100,00	89,65							
		4	01	01	06	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	11	8 Dok dan 3 Lap	247.421.010	33	491.324.110	8	68.089.359	8,00	53.243.514	100,00	78,20	41,00	544.567.624	372,73	220,10		
		4	01	01	06	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	219.615.000	3	404.679.809	3	44.739.670	3,00	40.110.492	100,00	89,65	6,00	444.790.301	600,00	202,53		
II.		4	01	01	06	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	5	Dokumen	915.765.000	3	404.679.809	4	68.992.269	4,00	55.084.755	100,00	79,84	7,00	459.764.564	100,00	100,00			
		4	01	01	06	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5	Dokumen	915.765.000	3	404.679.809	4	68.992.269	4,00	55.084.755	100,00	79,84	7,00	459.764.564	140,00	50,21		
III.		4	01	01	06	03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset dan Bantuan Barang Hibah Milik Pemprov Gorontalo yang terinventarisir	16	Laporan	1.184.084.145	25	370.830.282	14	168.375.634	14,00	162.378.348	100,00	96,44	39,00	533.208.630	100,00	45,03			
		4	01	01	06	03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset dan Bantuan Barang Hibah Milik Pemprov Gorontalo yang terinventarisir	16	Laporan	1.184.084.145	25	370.830.282	14	168.375.634	14,00	162.378.348	100,00	96,44	39,00	533.208.630	243,75	45,03		BIRO UMUM
								Jumlah dokumen aset lingkup Setda	17	Dokumen	887.986.795	6	281.925.400	-	-	-	-	0,00	0,00	6,00	281.925.400	35,29	31,75			
IV.		4	01	01	06	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran	30	Paket	29.358.347.573	54	#####	28	3.588.815.453	28,00	3.463.374.782	100,00	96,50	82,00	#####	100,00	77,86			
		4	01	01	06	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran	30	Paket	29.358.347.573	54	19.394.693.879	28	3.588.815.453	28,00	3.463.374.782	100,00	96,50	82,00	22.858.068.661	273,33	77,86		
V.		4	01	01	06	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas /kompetensinya melalui diklat/bimtek	55	Org	1.814.679.924	60	594.843.061	50	113.970.000	30,00	105.682.200	60	92,73	90,00	700.525.261	100,00	38,60			
		4	01	01	06	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas /kompetensinya melalui diklat/bimtek	55	Org	1.814.679.924	60	594.843.061	50	113.970.000	30,00	105.682.200	60	92,73	90,00	700.525.261	163,64	38,60		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
VI.		4 01 01 06 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	## %	8.893.625.506	100,00	4.071.465.860	#	1.949.016.812	####	1.848.333.398	100,00	94,83	200,00	5.919.799.258	100,00	66,56				
		4 01 01 06 08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	100 %	8.893.625.506	100,00	4.071.465.860	100	1.949.016.812	100,00	1.848.333.398	100,00	94,83	200,00	5.919.799.258	100,00	66,56				
VII.		4 01 01 06 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	## %	22.052.052.080	100	#####	#	5.386.014.412	####	5.156.588.097	100,00	95,74	200,00	#####	100,00	69,73				
		4 01 01 06 09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara	26 Unit	5.046.072.723	78	2.350.401.778	24	852.071.054	24,00	792.651.457	100,00	93,03	102,00	3.143.053.235	100,00	62,29				
		4 01 01 06 09 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung/ Peralatan Kantor Lainnya	Persentase Hasil Pemeliharaan Gedung/ Peralatan Kantor	100 %	17.005.979.356	100,00	7.870.427.987	100	4.533.943.358	100,00	4.363.936.640	100,00	96,25	200,00	12.234.364.627	100,00	71,94				
VIII		4 01 01 06 18	Kegiatan Fasilitasi Keprotokoleraan	Persentase layanan keumasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di dalam dan luar daerah	## %	7.764.160.925	100	4.831.420.561	#	1.046.518.900	97,31	1.018.400.394	97,31	97,31	197,31	5.849.820.955	100,00	75,34				
		4 01 01 06 18 01	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah laporan koordinasi dan sinergitas Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya	200 Laporan	1.888.307.430	151	1.066.280.277	42	722.169.600	42,00	698.874.124	100,00	96,77	193,00	1.765.154.401	96,50	93,48				
				Jumlah kegiatan pelayanan kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan	200 Laporan	3.803.782.555	226	3.112.384.602	-	-	-	-	-	-	226,00	3.112.384.602	100,00	81,82				
		4 01 01 06 18 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Difasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
		4 01 01 06 18 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokoleraan	Persentase Kegiatan Keprotokoleraan	-	-	-	-	##	324.349.300	100,00	319.526.270	100,00	98,51	100,00	319.526.270	-	0,00				
													Rata-rata capaian kinerja (%)	94,66	###			134,09	65,74			
													Predikat kinerja	ST	ST							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																						
Faktor Penghambat																						
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program	#####	#####							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya													I Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran seluruh program		94,66	###			134,09	65,74		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya *)													Predikat Kinerja dari seluruh Program		ST	ST						

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo**

Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi :

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan		
					K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
I	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana & SDM aparatur	100	%	4.300.000	100	%	2.313.036	100	%	1.546.860	98,52%	1.517.032	98,52%	98,07	101	3.830.068	101	89,07	
				Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	1.500.000	100	%	560.855	100	%	5.760.650	99,59%	5.715.883	99,59%	99,22	101	6.276.737	101	418,45	
1		05 01 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan	100	%	1.100.000	100	%	257.349	100	%	252.519	100%	252.404	100%	99,95	101	509.753	100,00	46	Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
		05 01 1.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan	2	Dok	1.100.000	6	Dok	257.349	8	Dok	252.519	8	252.404	100,00	99,95	14	307.830	100,00	28	
1		05 01 1.06	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	100	%	400.000	100	%	303.506	100	%	5.508.131	99,19%	5.463.479	0,99	99,19	101	5.766.985	100,00	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	100	%	400.000	100	%	303.506	100	%	5.508.131	99,19%	5.463.479	0,99	99,19	101	1.396.202	100,00	
1		05 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Perawatan & Operasional Pemeliharaannya	100	%	3.500.000	100	%	1.960.654	100	%	1.182.046	97,68%	1.154.573	0,98	97,68	101	3.115.226	100,00	89	Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
		05 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Perawatan & Operasional Pemeliharaannya	100	%	3.500.000	100	%	1.960.654	100	%	1.182.046	97,68%	1.154.573	0,98	97,68	101	3.115.226	100,00	89	
1		05 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100	%	800.000	100	%	352.382	100	%	364.814	99,35%	362.459	99,35%	99,35	101	714.842	100,00	89	Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
1		05 01 1.08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Sarana Prasarana	100	%	800.000	100	%	352.382	100	%	364.814	99,35%	362.459	99,35%	99,35	101	714.842	100,00	89	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0,99	99,04			100,00	81,18		
													Predikat kinerja		R	T			T			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RPKD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan		
					K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.				
II	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana	05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Darurat Secara Cepat, Tepat, Terpadu Dan Menyeluruh di Daerah	100	%	3.550.000	100	%	1.899.826	##	%	305.730	0,90	305.270	0,90	99,85	101	2.205.096	101	62,12	01
				Proporsi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Pasca Bencana Secara Terkoordinasi dan Terpadu	100	%	1.300.000	100	%	1.619.644	##	%	4.062.442	100,00	3.595.351	100,00	88,50	200	5.214.995	200	401,15	
1	05 03 1.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Penilaian Kerusakan dan Kerugian serta Kebutuhan Pasca Bencana	1	Dok	250.000	1	Dok	679.881	1	Dok	4.062.442	1,00	3.595.351	100,00	88,50	2	4.275.232	200,00	100		
			Persentase SDM Kebencanaan yang terlatih	100	%	100.000	100	%	98.583	100	%	150.480	99,69%	150.020	1,00	99,69	100	248.603	100,00	100		
1	05 03 1.02 07	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Penilaian Kerusakan dan Kerugian serta Kebutuhan Pasca Bencana	1	Dok	250.000	1	Dok	679.881	1	Dok	4.062.442	1,00	3.595.351	100,00	88,50	2	4.275.232	100,00	1.710		
1	05 03 1.02 08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase SDM Kebencanaan yang terlatih	100	%	100.000	100	%	98.583	100	%	150.480	99,69%	150.020	1,00	99,69	100	248.603	100,00	249		
1	05 03 1.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar yang dipenuhi	100	%	100.000	40	%	199.965	80	%	155.250	64,19%	155.250	0,80	100,00	41	355.215	40,64	100		
1	05 03 1.03 02	Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rata-rata penanganan saat terjadi bencana	3	Jam	250.000	3	Jam	302.668	3	Jam	87.120	-	87.120	-	100,00	3	389.788	100,00	100		
1	05 03 1.03 04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase stok logistik dan peralatan bencana yang tertata	100	%	100.000	100	%	179.628	100	%	68.130	100%	68.130	1,00	100,00	100	247.758	100,00	100		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		50,90	96,07			113,55	100,00		
													Predikat kinerja		SR	R						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											11.675.682		11.133.536									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											25,95		97,55				25,95		90,59			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											R		S									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				: Pendorong Keberhasilan Kinerja yaitu dengan efektifitas dan efisiensi, otoritas (wewenang), disiplin dan inisiatif																		
Faktor penghambat				: Masih ada kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan yang dengan pusat dan belum dilaksanakannya kegiatan seleksi jabatan yang menghambat penyerapan realisasi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				: percepatan kegiatan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang ada																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD Berikutnya*				:																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
		2.18	2.17	1	18			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	2.18	2.17	1	18	Program Pengelolaan Arsip	Presentase penataan arsip statis dan dinamis	100	%	1.255.315.000	100	643.791.030	100	%	142.930.162	263	142.403.731	263	99,63	363	786.194.761	362,72	62,63	-		
		2.18	2.17	1	18	1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Provinsi	Jumlah SDM Aparatur Yang Memahami Pengelolaan Kearsipan Berbasis TIK	390	Peserta Bimtek	456.590.000	156	281.113.300	78	pserta	71.996.434	99	71.524.036	127	99,34	255	352.637.336	65,47	77,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Arsip Berbasis TIK Yang Ditelusuri, Diselamatkan dan Diduplikasi	1.000	Dokumen	798.725.000	300	362.677.730	12	OPD/27 SMA/SMK /MA	70.933.728	66	70.879.695	548	99,92	366	433.557.425	36,57	54,28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	337,56	99,63		393.097.380,50	51,02	65,76				
Predikat kinerja																	S	T								
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	2.18	2.17	1	18	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Presentase penataan arsip statis dan dinamis	100	Persen	441.870.000	100	190.137.267	200	doc	72.014.727	61	72.007.740	30	99,99	161	262.145.007	160,92	59,33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
						3	Kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah OPD Provinsi Gorontalo Yang Melakukan Penyusunan JRA dan Akuisisi Arsip	90	OPD	441.870.000	36	190.137.267	200	doc	72.014.727	61	72.007.740	30	99,99	97	262.145.007	107,69	59,33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	30,46	99,99			107,69	59,33				
Predikat kinerja																	SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													6.121.958.877		5.371.618.962											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	2.133,93	95,83			504,87	48,07				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	S	S								
DM sangat menentukan program/kegiatan SKPD																										
mpoten dibidang masing-masing, Program dan Kegiatan dilaksanakan pada bulan tertentu																										
ukan dalam trivulan berikutnya :																										
in dalam Renja SKPD berikutnya*):																										

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Provinsi Lampung
RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.		K	Rp.
I.	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan Menurunnya tingkat kemiskinan	3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai produktivitas produksi perikanan tangkap per tahun (%)	2,50	Persen	1,50	Persen	1,50	Persen	1,50	Persen	100		3,00		120		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO		
				Jumlah Kawasan Perikanan Terpadu / KPT (Kawasan)	30	Kawasan	10	Kawasan	6	Kawasan	6,00		10.279.476		16,00		53			50,75	
				Presentase Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Pelaku Usaha di Bidang Perikanan	15,65	Persen	9,38	Persen	9,39	Persen	9,39	Persen	12.989.000		9,39		18,77			120	
				Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)	100,00	%	5.213.596	%	354.651	%	354.651	%	8.786.769	97,86	6.802.472	97,86	77,42	197,86		7.157.122	198
		3 25 03 1 01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa kapal > 3 GT dan Alat bantu penangkapan ikan (SMART Fisheries) serta pembinaan bagi kelompok nelayan	780	Paket	49.172.117	88	Paket	14.864.814	43	Paket	3.726.837	43	3.019.674	100	81,03	131	17.884.488	16,79	36,37
				Peningkatan SDM Perikanan Tangkap dengan pelatihan keahlian SKK 60 Mil, Terlaksananya kegiatan temu lapang dan operasional Gerai Mina Bahari Rakyat	13	Kegiatan	1.500.000	4	Kegiatan	570.503	6	Kegiatan	475.394	5	457.330	83	96,20	9	1.027.833	69,23	68,52
		3 25 03 1 01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa kapal > 3 GT dan Alat bantu penangkapan ikan (SMART Fisheries) serta pembinaan bagi kelompok nelayan	780	Paket	49.172.117	88	Paket	14.864.814	43	Paket	3.726.837	43	3.019.674	100	81,03	131	17.884.488	16,79	36,37
			- Pembangunan Perahu Fiber 3 GT Bermesin Tempel 15 PK	Tersedianya Perahu 3 GT bermesin tempel 15 PK (unit)	610	unit	48.000.000	273	Unit	14.769.814	43	Unit	3.392.110	43	2.700.134	100	79,60	316	17.469.947	51,80	36,40
			- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kapal 10 GT dan 5 GT	Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kapal 10 GT dan 5 GT	1	Paket	67.500	-	Paket	-	1	Paket	67.500	1	67.372	100	99,81	1	67.372	100,00	99,81
			- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan PerahuFiber 3GT Bermesin Tempel 15 PK	Tersedianya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan PerahuFiber 3 GT Bermesin Tempel 15 PK	1	Paket	50.005	-	Paket	-	1	Paket	50.005	1	49.885	100	99,76	1	49.885	100,00	99,76
			- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kapal 10 GT	Tersedianya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kapal10 GT	1	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kapal5 GT	Tersedianya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kapal 5 GT	1	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Verifikasi, Movev, Penyerahan Paket bantuan, Penyusunan HPS dan Konsultasi	Terlaksananya Verifikasi, Movev, Penyerahan Paket bantuan, Penyusunan HPS dan Konsultasi	30	Kegiatan	1.054.612	2	Kegiatan	95.000	5	Kegiatan	217.222	5	202.283	100	93,12	7	297.283	23,33	28,19
		3 25 03 1 01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Peningkatan SDM Perikanan Tangkap dengan pelatihan keahlian SKK 60 Mil, Terlaksananya kegiatan temu lapang dan operasional Gerai Mina Bahari Rakyat	13	Kegiatan	1.500.000	4	Kegiatan	570.503	6	Kegiatan	475.394	6	457.330	100	96,20	10	1.027.833	76,92	68,52
			- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	6	Kegiatan	1.500.000	1	Kegiatan	207.646	6	Kegiatan	475.394	6	457.330	100	96,20	7	664.976	116,67	44,33
		3 25 03 1 06	Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (UPTD Pelabuhan)	Tersediaanya sarana penunjang kepelabuhanan (UPTD PP, Gentuma & Tenda, Tilamuta) (bulan)	60	Bulan	1.500.000	12	Bulan	425.394	12	Bulan	7.930.550	12	6.027.936	100	76,01	24	6.453.330	40,00	430,22
				Mutu Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD PP, Gentuma & Tenda, Tilamuta) (bulan)	60	Bulan	3.713.596	12	Bulan	386.869	12	Bulan	856.219	12	774.536	100	90,46	24	1.161.405	40,00	31,27
		3 25 03 1 06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersediaanya sarana penunjang kepelabuhanan (UPTD PP, Tenda, gentuma dan tilamuta) (bulan)	60	Bulan	1.500.000	12	Bulan	425.394	12	Bulan	7.930.550	6	6.027.936	50	76,01	18	6.453.330	30,00	430,22
				Tersediaanya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma dan UPTD PPI Tilamuta)	6	Kegiatan	1.500.000	1	Kegiatan	425.394	20	Kegiatan	7.930.550	19	6.027.936	95	76,01	20	6.453.330	333,33	430,22
		3 25 03 1 06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Mutu Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD PP, Tenda, gentuma dan tilamuta) (bulan)	60	Bulan	3.713.596	12	Bulan	386.869	12	Bulan	856.219	12	774.536	100	90,46	24	1.161.405	40,00	31,27
				Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma dan UPTD PPI Tilamuta)	50	Kegiatan	3.713.596	4	Kegiatan	30.000	10	Kegiatan	856.219	10	774.536	100	90,46	14	804.536	28,00	21,66
											Rata-rata capaian kinerja (%)		99	78,28			123	94,01			
											Predikat kinerja		SR	SR							

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPDP Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah				
		3	25	05	1	01			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.					
II	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan	3	25	05	1	01	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Presentase Optimalisasi pengawasan SDKP di 2 (dua) wilayah Perairan Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi)	100	%	2.927.112	100	%	1.118.353	100	%	1.000.554	100	88,13	200	2.000.161	200	68,33				
		3	25	05	1	01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kapal pengawas/speed pengawas (wilayah)	10	Wilayah	250.000	6	Wilayah	365.643	2	Wilayah	270.930	2,00	255.497	100	94,30	8	621.140	80,00	248,46		
								Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (lokasi)	30	Lokasi	200.000	16	Lokasi	423.753	2	Lokasi	229.624	2,00	210.610	100	91,72	18	634.363	60,00	317,18		
								Terlaksananya operasional pengawasan dan pendampingan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) (bulan)	60	Bulan	240.297	36	Bulan	328.957	12	Bulan	500.000	6,00	415.702	50	83,14	42	744.659	70,00	309,89		
		3	25	05	1	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kapal pengawas/speed pengawas (wilayah)	10	Wilayah	250.000	6	Wilayah	365.643	2	Wilayah	270.930	2	255.497	100	94,30	8	621.140	80,00	248,46		
								Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini	10	lokasi	250.000	6	lokasi	210.380	2	Lokasi	270.930	2	255.497	100	94,30	8	465.877	80,00	186,35		
		3	25	05	1	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (lokasi)	30	Lokasi	200.000	16	Lokasi	423.753	2	Lokasi	229.624	2	210.610	100	91,72	18	634.363	60,00	317,18		
								Edukasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan	15	kegiatan	-	1	kegiatan	2.850	7	Kegiatan	229.624	7	210.610	100	91,72	8	213.460	53,33	#DIV/0!		
		3	25	05	1	01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)/(Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	Terlaksananya operasional pengawasan dan pendampingan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) (bulan)	60	Bulan	240.297	36	Bulan	328.957	12	Bulan	500.000	12	415.696	100	83,14	48	744.653	80,00	309,89	
								Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	10	Kegiatan	70.297	4	Kegiatan	33.045	3	Kegiatan	500.000	3	415.696	100	83,14	7	448.741	70,00	638,35		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	88,13			200	68,33						
Predikat kinerja																SR	SR										

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah			
		K	Rp.(000)	K	Tahun	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.					
III	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan	3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun (%)	1,02	Persen	2.813.669	0,41	persen	158.230	0,61	Persen	3.992.581	0,61	3.904.501	100	97,79	1,02	4.062.731	100	144,39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	
		3	25	04	1	05	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya air payau melalui penyediaan sarana produksi pembudidayaan ikan dan intensifikasi budidaya air payau (khususnya untuk komoditi udang Vaname) serta Pendampingan Usaha Budidaya Payau (kawasan)	15	Kawasan	1.100.000	9	Kawasan	792.625	3	Kawasan	835.088	1,00	833.534	33	99,81	10,00	1.626.159	67	147,83		
								Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya air laut melalui penyediaan sarana produksi perikanan budidaya laut ; pembinaan dan penguatan kapasitas pembudidaya yang menerima bantuan sarpras budidaya laut (kawasan)	15	Kawasan	1.000.000	8	Kawasan	268.548	2	Kawasan	2.785.818	2,00	2.701.457	100	96,97	10,00	2.970.005	67	297,00		
								Tersampainya Informasi dan penerapan Teknologi budidaya kepada Pembudidaya Ikan yang tergabung dalam kelompok Usaha, Penguasaan teknologi perikanan budidaya yang inovatif dan adaptif dalam mendukung program ketahanan pangan dan mampu menyediakan produk yang dapat meningkatkan pendapatan dan gizi masyarakat, Perbaikan kualitas dari komoditas - komoditas yang dibudidayakan di daerah (lokasi)	30	Lokasi	713.669	12	Lokasi	571.253	3	Lokasi	371.675	1,00	369.510	33	99,42	13,00	940.763	43	131,82		
		3	25	04	1	05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya air payau melalui penyediaan sarana produksi pembudidayaan ikan dan intensifikasi budidaya air payau (khususnya untuk komoditi udang Vaname) serta Pendampingan Usaha Budidaya Payau (kawasan)	15	Kawasan	1.100.000	9	Kawasan	792.625	3	Kawasan	835.088	3	833.534	100	99,81	12,00	1.626.159	80		147,83
								Prasarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar	Tersedianya Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar	6	Kegiatan	1.100.000	1	Kegiatan	157.125	16	Kegiatan	835.088	16	833.534	100	99,81	17,00	990.659	283		90,06
		3	25	04	1	05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya air laut melalui penyediaan sarana produksi perikanan budidaya laut ; pembinaan dan penguatan kapasitas pembudidaya yang menerima bantuan sarpras budidaya laut (kawasan)	60	Kegiatan	-	6	Kegiatan	714.772	12	Kegiatan	1.670.200	12	1.601.115	100	95,86	18,00	2.315.886	30		-
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (UPTD BPBLP)	60	Kegiatan	-	6	Kegiatan	714.772	12	Kegiatan	1.670.200	12	1.601.115	100	95,86	18,00	2.315.886	30		-
		3	25	04	1	05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya air laut melalui penyediaan sarana produksi perikanan budidaya laut ; pembinaan dan penguatan kapasitas pembudidaya yang menerima bantuan sarpras budidaya laut (kawasan)	15	Kawasan	1.000.000	8	kawasan	268.548	2	Kawasan	1.115.618	2	1.100.342	100	98,63	10,00	1.368.891	67		136,89
								Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	6	Kegiatan	1.000.000	6	Kegiatan	125.211	5	Kegiatan	1.115.618	5	1.100.342	100	98,63	11,00	1.225.553	183		122,56
		3	25	04	1	05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersampainya Informasi dan penerapan Teknologi budidaya kepada Pembudidaya Ikan yang tergabung dalam kelompok Usaha, Penguasaan teknologi perikanan budidaya yang inovatif dan adaptif dalam mendukung program ketahanan pangan dan mampu menyediakan produk yang dapat meningkatkan pendapatan dan gizi masyarakat, Perbaikan kualitas dari komoditas - komoditas yang dibudidayakan di daerah (lokasi)	30	lokasi	713.669	12	Lokasi	571.253	3	Lokasi	371.675	3	369.510	100	99,42	15,00	940.763	50		131,82
								Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Tersedianya Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	6	Kegiatan		1	Kegiatan	225.818	5	Kegiatan	371.675	5	369.510	100	99,42	6,00	595.328	100		#DIV/0!
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	97,79			100,00	144,39				
Predikat kinerja																		ST	ST								

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah			
									K	Rp.(000)		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.		K	Rp.	
IV	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan	3	25	02			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Presentase kawasan konservasi, pesisir dan jasa kelautan yang terkelola (%)	100	persen	6.656.304	100	Persen	785.963	100	Persen	1.821.244	100	1.720.979	100	94,49	200	2.506.942	200	38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	
		3	25	02	1	01	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi sebagai regulasi dalam pengelolaan kawasan konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut (dokumen/kegiatan)	5	Dokumen (Lokasi)	600.000	2	Dokumen (Lokasi)	13.089	1	Dokumen (Lokasi)	673.860	1	642.248	100	95,31	3,00	655.338	60	109,22		
		3	25	02	1	01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (RPZKKPD)	1	Dok	400.000	1	Dok	8.749	1	Dok	72.746	1	69.628	100	95,71	2,00	78.377	200		19,59
		3	25	02	1	01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	kegiatan	200.000	1	Kegiatan	8.749	13	Kegiatan	601.114	13	572.621	100	95,26	14,00	581.370	467		290,68
		3	25	02	1	02		Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian ekosistem pesisir dan laut dan terlaksananya penzonasian serta pemanfaatan ruang zonasi pesisir dan laut sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku serta berkembangnya produktifitas Garam Rakyat (kegiatan)	35	kegiatan / paket	200.000	11	Kegiatan	246.992	2	Kegiatan	45.540	2	45.527	100	99,97	13	292.519	37		146
		3	25	02	1	02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	35	kegiatan	200.000	3	Kegiatan	58.790	2	Kegiatan	45.540	2	45.527	-	-	5,00	104.317	14		52,16
		2	05	2	05	03		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya penerapan regulasi Perda RZWP3K di Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	5	Perda	300.000	3	Perda	525.882	2	Kegiatan	1.101.844	2	1.033.204	100	93,77	5	1.559.086	100		520
		2	05	2	05	03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	Kegiatan	150.000	1	Kegiatan	57.600	8	Kegiatan	1.080.360	8	1.015.549	-	-	9,00	1.073.149	300		715,43
2	05	2	05	03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2	Kegiatan	150.000	1	Kegiatan	27.547	4	Kegiatan	21.484	4	17.655	-	-	5,00	45.202	250	30,13			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	94,49			200,00	38				
Predikat kinerja																		ST	ST								

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah				
		3	25	06	1	03			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Persen	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K		Rp.			
V	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikanan yang berdaya saing Per Tahunnya	75,00	persen	16.810.964	2,22	Persen	17.307.804	0,89	Persen	3.544.692	0,89	3.515.687	100	99,18	3,11	20.823.491	4,14	124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	
							Nilai persentase (%) kenaikan ketersediaan stock ikan pertahun	10	persen		4,00	Persen		2	Persen	2		100		6,00		60					
		3	25	06	1	03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Bantuan Modal Usaha dan Bahan Baku Ikan Bagi Tibo-tibo (Baku) dan Pedagang Ikan Pemula, Tersedianya pengadaan bahan baku ikan untuk bazar perikanan, Terlaksananya Desiminasi Hasil Olahan Produk Perikanan, Tersedianya Bahan Pangan Olahan Ikan untuk peningkatan jaminan mutu dan gizi masyarakat miskin	275	paket	15.645.165	139	Paket	10.117.259	22	Paket	3.382.811	19	3.369.864	86	99,62	158	13.487.123	57	86		
		3	25	06	1	03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	112	paket / kegiatan	6.773.520	75	paket / kegiatan	4.078.164	22	paket / kegiatan	1.875.970	23	1.871.336	105	99,75	98	5.949.500	88	88	
								Bantuan Bahan Baku Ikan (Bazar Perikanan) untuk pengendalian harga komoditi hasil perikanan (Revisi : Bantuan Bahan Baku Ikan untuk diserahkan kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19)	Jumlah masyarakat yang menerima manfaat bazar perikanan (masyarakat memiliki kemampuan daya beli rendah) / Revisi Bantuan Bahan Baku Ikan untuk diserahkan kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19	50	paket	4.500.000	31	Paket	3.147.619	10	Paket	1.200.000	10	1.198.222	100	99,85	41	4.345.841	82	-	
								Bantuan Bahan Pangan Perikanan untuk yayasani panti asuhan/pondok pesantren	Jumlah yayasani panti asuhan / pondok pesantren	50	Paket	1.523.520	20	Paket	917.181	10	Paket	507.840	8	506.724	-	-	-	-	0	-	
								Verifikasi calon penerima program Bantuan Pangan Perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan dan jasa penunjang	Terlaksananya Verifikasi calon penerima program Bantuan Pangan Perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan dan jasa penunjang	12	bulan	750.000	24	Bulan	13.364	2	Kegiatan	168.130	2	166.390	-	-	-	-	0	-	
		3	25	06	1	03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya program Sistem Logistik Ikan Nasional	500	Kegiatan / Unit	8.375.000	290	Kegiatan / Unit	6.026.225	54	Kegiatan / Unit	1.374.172	54	1.369.373	100	100	344	7.395.598	69	100	
								Bantuan Sarana Pemasaran Roda Dua Bercoolbox Bagi Pedagang Ikan dan penunjang sistem logistik ikan	Jumlah pelaku pemasar hasil perikanan yang terfasilitasi roda dua motor bercoolbox (pedagang ikan bersepeda dan penunjang sistem logistik ikan)	500	unit	7.500.000	234	Unit	2.832.400	45	Unit	1.014.234	45	1.013.407	100	100	279	3.845.807	56	100	
								Pemeliharaan Pabrik Es Tenda	Terlaksananya pemeliharaan Pabrik Es Tenda	1	Paket	200.000	-	Paket	-	1	Paket	200.000	1	199.800	100	100	1	199.800	100	100	
								Koordinasi, Monev SLIN, Pengumpulan Data Logistik Hasil Perikanan, Verifikasi Calon Penerima Bantuan, Koordinasi Program SLIN, Operasional dan Jasa Penunjang	Terlaksananya Koordinasi, Monev SLIN, Pengumpulan Data Logistik Hasil Perikanan, Verifikasi Calon Penerima Bantuan, Koordinasi Program SLIN, Operasional dan Jasa Penunjang	65	kegiatan	650.000	71	Kegiatan	279.529	6	Kegiatan	154.939	6	151.166	100	98	77	430.694	118	100	
								Perencanaan dan Pengawasan Arsitektur	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengawasan Arsitektur	4	kegiatan	25.000	-	Kegiatan	-	2	Kegiatan	5.000	2	5.000	100	100	2	5.000	50	100	
		3	25	06	1	03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemitraan Pelaku Usaha dan Sistem Pemasaran Hasil Perikanan (kegiatan)	50	kegiatan	496.645	1	Kegiatan	12.870	1	Kegiatan	132.669	1	129.155	100	97	2	142.025	4	100	
								Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	5	kegiatan	496.645	1	Kegiatan	12.870	1	Kegiatan	132.669	1	129.155	100	97	2	142.025	40	28,60	
		3	25	06	1	02		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Bidang & UPTD BP2MDPP)	Persentase produktivitas Hasil perikanan yang berdaya saing Per Tahunnya	100	persen	1.165.799	100	Persen	450.335	100	Persen	161.881	100	145.823	100	90,08	200	596.157	200	51,14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. GORONTALO
		3	25	06	1	02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (UPTD BP2MDPP)	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (UPTD BP2MDPP)	500	Data Uji	1.165.799	220	Data Uji	450.335	100	Data Uji	161.881	100	145.823	100	90	320	596.157	64	51,14	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		95,45	98,87			65,13	95,40				
																Predikat kinerja		ST	ST								

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPDPovinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah	
		3	25	01					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.			
VI	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	3	25	01			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Persentase peningkatan layanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Sekretariat Dinas)	100	persen	4.714.155	100	Persen	1.565.711	100	Persen	15.476.987	100	15.074.327	100	97,40	200	16.640.038	200	353		
								Persentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD (UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pavau & Laut)	100	Persen	3.261.275																
								Persentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran & Ketersediaan sarana/prasarana (UPTD Pelabuhan Perikanan gentuma dan Tenda)	100	Persen	2.076.537																
								Persentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran & Ketersediaan sarana/prasarana (UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan)	100	persen	1.157.399																
								Persentase peningkatan layanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BP2MDPP, UPTD BPBLP)																			
		3	25	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya 4 (empat kegiatan perencanaan) ; Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan ; kegiatan operasional untuk menunjang perencanaan dan money serta membangun/peningkatan sistem informasi perikanan (kegiatan)	20	Dok	3.050.000	4	Dok	189.938	4	Dok	563.289	4	525.125	100	93,22	8	715.063	40	23		
		3	25	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	12	Dok	2.250.000	4	Dok	140.000	3	Dok	386.117	4	350.586	133	90,80	8	490.586	67	22		
		3	25	01	1	01	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Perikanan Provinsi Gorontalo	6	Dok	800.000	1	Dok	49.938	1	Dok	177.172	1	174.539	100	98,51	2	224.477	33	28		
		3	25	01	1	02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan keuangan dan Tersedianya dokumen keuangan SKPD selama 12 (dua belas) bulan	60	bulan	55.537.870	12	Bln	10.972.056	12	Bulan	11.003.319	12	10.890.307	100	98,97	24	21.862.363	40	39		
		3	25	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	54.737.870	12	Bulan	10.947.574	12	Bulan	10.853.569	12	10.741.564	100	98,97	24	21.689.138	40	40		
		3	25	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	60	Bulan	800.000	12	Bulan	24.482	12	Bulan	149.750	12	148.743	100	99,33	24	173.225	40	22		
		3	25	01	1	05	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan SDM aparatur 20 orang (SDM teknis 5 orang; SDM Perencanaan 5 orang ; SDM Pegelola Keuangan 5 orang dan SDM Kepegawaian 5 orang)	90	Org	600.000	20	Org	35.260	20	Org	77.492	20	76.250	100	98,40	40	111.510	44	19		
		3	25	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60	Org	600.000	20	Org	35.260	20	Org	77.492	20	76.250	100	98,40	40	111.510	67	19		
		3	25	01	1	06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan (Sekretariat Dinas)	60	Bulan	9.000.000	12	Bulan	1.500.000	12	Bulan	1.616.385	12	1.558.507	100	96,42	24	3.058.507	40	34		
								Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima (UPTD, Balai Perikanan Budidaya Laut dan Pavau) (bulan)	60	Bulan																	
								Belanja Honorarium Pegawai Honorer (12 Bulan), Belanja ATK (12 Bulan), Belanja Listrik (12 Bulan), Belanja Air (12 Bulan), Belanja Penggandaan (1 Tahun), Penjilidan (4 Paket), Belanja Makan Minum (100 OH), Belanja Surat Kabar (12 Bulan) (UPTD Pelabuhan Perikanan gentuma dan Tenda)	60	bulan																	
								Pelayanan administrasi (UPTD, BP2MDPP) selama 12 (dua belas) bulan	60	bulan																	
		3	25	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran selama 12 (dua belas) bulan	60	Bulan	9.000.000	12	Bulan	1.500.000	12	Bulan	1.616.385	12	1.558.507	100	96,42	24	3.058.507	40	34		
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD pp Tenda)																			
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD pp Gentuma)																			
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD pp Tilamuta)																			
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BPBLP)																			
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BP2MDPP)																			

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. GORONTALO

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah			
									K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Bulan	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K		Rp.		
		3	25	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran selama 12 (dua belas) bulan	60	bulan	7.000.000	12	Bulan	1.565.711	12	Bulan	2.216.502	12	2.024.139	100	91,32	24	3.589.850	40	51	
								Tertaksananya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran (UPTD BPBLP)	60	bulan																
								Jasa Service Kendaraan Roda Empat (12 Bulan), Belanja Bahan Bakar Gas dan Pelumas (12 Bulan), Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop (4 Unit), Belanja Pemeliharaan AC (4 Unit), Belanja Pemeliharaan Gedung (1 Unit) dan Bangunan Kantor (1 Paket), (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda)	60	bulan																
								Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran(UPTD. BP2MDPP) selama 12 (dua belas) bulan	60	bulan																
		2	05	2	05	09	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan	60	bulan	7.000.000	12	Bln	1.565.711	12	Bln	2.216.502	12	2.024.139	100	91,32	24	3.589.850	40	51
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP Tenda)																		
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP Gentuma)																		
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP Tilamuta)																		
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BPBLP)																		
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BP2MDPP)																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	95,67			40,89	33,332272					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																38.825.058	35.376.778									
Predikat kinerja																ST	ST									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																99,15	92,21			310,85	46,24					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																ST	ST									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin sehingga pada masing-masing unit kerja sudah memahami langkah dan proses pelaksanaan kegiatan. Faktor Penghambat : Kurangnya kompetensi ASN yang memahami sistem pengelolaan Keuangan sehingga proses pengSPJan kegiatan sering mengalami keterlambatan yang berdampak pada capaian realisasi kinerja, Adanya beberapa kegiatan yang pada kegiatan DAK sehingga turut mempengaruhi capaian realisasi anggaran, Adanya Silpa Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memperkuat konsolidasi dan koordinasi internal unit kerja secara berjenjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada setiap Tahun Anggaran. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam renja OPD berikutnya : Merumuskan program dan kegiatan yang prioritas yang mendukung pencapaian target renstra dan RPJMD sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo																										

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat :

1. Usia Harapan Hidup

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat :

1. Usia Harapan Hidup

2. Angka Kelahiran Total (Fertility Rate)

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit SKPD Penangg		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	7.848.773	100	%	3.912.708	100	%	2.809.836	52	2.252.388	52,49	80,16	152	6.165.096	100	78,55
				Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100	%	61.705.473	100	%	37.641.040	100	%	52.352.234	48	49.871.776	47,89	95,26	148	87.512.816	100	100,00
		1.02.1.02.01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1	Kali	1.654.417	4	Kali	1.208.560	2	Kali	870.827	2	661.366	100	75,95	6	1.869.927	100	113,03
				Dokumen Renja, RKA, LAKIP, LKPJ dan LPPD (Dikes)	5	Dokumen	2.595.322	7	Dokumen	851.240	5	Dokumen	864.934	5	754.204	100	87,20	12	1.605.444	100	61,86
				Dokumen Renja, RKA, LAKIP, LKPJ dan LPPD (RSU Ainun)	0		-	0		-	3	Dokumen	244.316	3	237.251	100	97,11	3	237.251	0	0,00
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, RKA, LAKIP, LKPJ dan LPPD (Dikes)	5	Dokumen	2.595.322	7	Dokumen	851.240	5	Dokumen	864.934	5	754.204	100	87,20	12	1.605.444	240	61,86
				Dokumen Renja, RKA, LAKIP, LKPJ dan LPPD (RSU Ainun)	-		-	-		-	3	Dokumen	244.316	3	237.251	100	97,11	3	237.251	0	0,00
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1	Kali	1.654.417	4	Kali	1.208.560	2	Kali	870.827	2	661.366	100	75,95	6	1.869.927	600	113,03
		1.02.1.02.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	10	Dokumen	764.114	8	Dokumen	680.145	2	Dokumen	829.759	2	599.567	100	72,26	10	1.279.712	100	100,00
				Jumlah dokumen laporan keuangan (RSUD Ainun Habibie)	-		-	-		-	1	Dokumen	602.349	1	587.747	100	97,58	1	587.747	0	0,00
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan (Dikes)	10	Dokumen	764.114	8	Dokumen	680.145	1	Dokumen	227.411	1	226.833	100	99,75	9	906.978	90	118,70
				Jumlah dokumen laporan keuangan (RSUD Ainun Habibie)	-		-	-		-	1	Dokumen	602.349	1	587.747	100	97,58	1	587.747	0	0,00
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompetensinya melalui Diklat/Bimtek (Dikes)	75	Org	1.461.855	55	Org	825.267	100	Org	505.446	100	357.990	100	70,83	155	1.183.257	100	80,94
				Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompetensinya melalui Diklat/Bimtek (UPTD Labkesda)	25	Org	369.219	25	Org	-	15	Org	83.608	9	38.970	100	0,00	34	38.970	100	10,55
				Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompetensinya melalui Diklat/Bimtek (RSU Ainun)	184	Org	4.394.977	0	Org	-	10	Org	476.002	10	460.477	100	96,74	10	460.477	5	10,48
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompetensinya melalui Diklat/Bimtek (Dikes)	75	Org	1.461.855	55	Org	825.267	100	Org	505.446	100	357.990	100	70,83	155	1.183.257	207	80,94
				Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompetensinya melalui Diklat/Bimtek (UPTD Labkesda)	25	Org	369.219	25	Org	-	15	Org	83.608	9	38.970	60	46,61	34	38.970	136	10,55

Dinas Kesehatan Provinsi

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit SKPD Penangg	
					K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
				Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompetensinya melalui Diklat/Bimtek (RSU Ainun)	184	Org	4.394.977	0	Org	-	10	Org	476.002	10	460.477	100	96,74	10	460.477	5	10,48		
		1.02.1.02.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dikes	100	%	5.056.888	100	%	5.749.637	100	%	1.738.722	42	1.127.466	42	64,84	142	6.877.103	100	100,00		
				Persentase penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Labkesda	100	%	4.876.615	100	%	1.080.910	0	%	-	0	0	0	0,00	100	1.080.910	100	22,17		
				Persentase penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Ainun Habibie	100	%	16.452.415	100	%	13.341.960	100	%	689.750	100	666.125	100	96,57	200	14.008.085	100	85,14		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dikes & Labkesda	100	%	5.056.888	100	%	13.341.960	100	%	1.738.722	64	1.127.466	64	64,84	164	14.469.426	164	286,13		
				Persentase penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Labkesda	100	%	4.876.615	-		-	-		-	0	0	0	0,00	0	-	0	0,00		
				Persentase penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Ainun Habibie	100	%	16.452.415				100	%	689.750	100	666.125	100	96,57	100	666.125	100	4,05		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan dan manajemen Administrasi perkantoran Dikes	100	%	8.405.585	0	Org	3.280.102	100	%	4.296.123	98	3.330.975	98	77,53	98	6.611.077	98	78,65		
				Persentase layanan dan manajemen Administrasi perkantoran UPTD Labkesda	100	%	1.485.913				0	%	0	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00		
				Persentase layanan dan manajemen Administrasi perkantoran RSUD Ainun Habibie	100	%	19.202.007				100	%	6.158.014	100	5.485.205	100	89,07	100	5.485.205	100	28,57		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dan manajemen Administrasi perkantoran Dikes & Labkesda	100	%	8.405.585				100	%	4.296.123	98	3.330.975	98	77,53	98	3.330.975	98	39,63		
				Persentase layanan dan manajemen Administrasi perkantoran UPTD Labkesda	100	%	1.485.913				-	%	-	-	-	0	0,00	0	-	0	0,00		
				Persentase layanan dan manajemen Administrasi perkantoran RSUD Ainun Habibie	100	%	19.202.007				100	%	6.158.014	100	5.485.205	100	89,07	100	5.485.205	100	28,57		
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (RSU Ainun)	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang BLUD Rumah Sakit	-	%	-	100	%	35.893.927	100	%	38.404.569	100	38.404.569	100	100,00	200	74.298.496	0	0,00		
			Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSU Ainun)	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang BLUD Rumah Sakit	0	%	-	100	%	35.893.927	100	%	38.404.569	100	38.404.569	100	100,00	200	74.298.496	0	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																95,00	84,37				91,22	62,85	
Predikat kinerja																ST	T				ST	R	
	Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil beresiko yang didampingi selama kehamilan oleh mahasiswa dan dasawisma	2.654,00	Bumil	6.758.073	873	Bumil	1.897.080	545	Bumil	912.362	525	843.571	96,33	92,46	1398	2.740.651	53	40,55		
				Jumlah Bidan yang dilatih penanganan kegawat daruratan Ibu & Bayi	165,00	Bidan	566.625	98	Bidan	287.139	35	Bidan	-	0	-	0,00	0,00	98	287.139	59	50,68		
				Jumlah ibu hamil KEK dan Balita Kurang Gizi yang mendapat makanan tambahan	1.000,00	Orang	6.582.830	1.406	Orang	2.149.595	1.000	Org	1.769.206	992	1.441.320	99,20	81,47	2398	3.590.915	100	54,55		
				Persentase sarana air minum dan sanitasi lingkungan yang dilakukan pengawasan	73,00	%	2.971.694	100	%	756.480	72	%	468.520	72	447.958	100,00	95,61	172	1.204.439	100	40,53		
				Persentase Jumlah kasus KLB/Wabah yang ditangani < 1 x 24 jam	100	%	1.439.784	100	%	940.416	72	%	4.756.329	100	4.161.657	138,89	87,50	200	5.102.073	100	100,00		

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit SKPD Penangg
					K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Pelaksanaan Movev Istioah Kesehatan Jemaah Haji	4,00	Kali	510.785	12	Kali	431.666,00	4,00	Kali	93.886	4	79.570	100,00	84,75	16	511.236	100	100,09	
				Jumlah Populasi Umum yang dilakukan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	4.300,00	PTM	3.766.227	3.523	Org	#####	1.000	Org	629.163	1000	570.029	100,00	90,60	4523	1.717.153	100	45,59	
				Jumlah Siswa SMA/SMK/Sederajat yang memahami Bahaya Rokok dan Napza di sekolah	825,00	Siswa	512.427	377	Siswa	390.050,00	165	Siswa	220.777	165	201.392	100,00	91,22	542	591.442	66	100,00	
				Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki 50% Puskesmasnya yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	6,00	Kab/Kota	464.683	12	Kab/Kota	176.555,00	6	Kab/Kota	845.259	6	842.722	100,00	99,70	18	1.019.277	100	219,35	
				Jumlah Kab/Kota yang memperoleh Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Primer	6,00	Kab/Kota	3.324.470	12	Kab/Kota	#####	6	Kab/Kota	1.130.796	6	1.149.569	100,00	101,66	18	2.445.569	100	73,56	
				Jumlah Kab/Kota memperoleh dukungan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Risiko akibat krisis kesehatan	6	Kab/Kota	1.725.701	12	Kab/Kota	492.224,22	6	Kab/Kota	3.182.220	6	3.044.764	100,00	95,68	18	3.536.988	100	204,96	
				Jumlah Layanan Labkesda	5	Layanan	1.993.853	5	Layanan	913.571	5	Layanan	6.933.211	5	5.884.654	100,00	84,88	10	6.798.225	100	340,96	
				jumlah penduduk yang menerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Jamkesda/Jamkesda	205.584	Org	209.598.816	211	Org	89.797.115	205.584	Org	57.104.139	195.000	52.937.516	94,85	92,70	195.211	142.734.631	95	68,10	
				Jumlah Kab/Kota yang 80% PKM menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar	6	Kab/Kota	1.854.378	12	Kab/Kota	287.663	6	Kab/Kota	212.487	6	2.439.739	100	1148,18	18	2.727.402	100	147,08	
				Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	86,00	%	674.171	100	%	909.595	75,00	%	23.714.942	74	21.991.230	98,67	92,73	174	22.900.824	100	100,00	
				Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	77,00	%	713.757	100,00	%	852.614	100,00	%	765.682	93	647.134	93,00	84,52	193	1.499.747	100	100,00	
				Jumlah Saspras RS yang dilakukan pemeliharaan	100,00	%	4.662.707	100,00	%	3.515.622	100	%	4.872.428	100,40	4.661.257	100,40	95,67	200	8.176.879	100	100,00	
				Jumlah sarana prasarana RS Provinsi yang dibangun/ditingkatkan	1,00	Paket	29.735.900	1,00	Paket	8.352.268	1,00	Paket	3.549.934	1	3.327.614	100	93,74	2	11.679.882	100	39,28	
		1.02.1.02.01.01.16	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah ibu hamil beresiko yang didampingi selama masa kehamilan oleh mahasiswa dan dasawisma	2.654	Org	6.758.073	873	Org	1.897.080	545	Org	912.362	525	843.571	96,33	92,46	1398	2.740.651	53	40,55	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit SKPD Penangg		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)
				Jumlah Bidan yang dilatih penanganan kegawat daruratan Ibu & Bayi	165	Bidan	566.625	98	Bidan	287.139	35	Bidan	-	0	-	0,00	0,00	98	287.139	59	50,68
				Jumlah ibu hamil KEK dan Balita Kurang Gizi yang mendapat makanan tambahan	1.000	Org	6.582.830	1.406	Org	2.149.595	1.000	Org	1.769.206	992	1.441.320	99,20	81,47	2398	3.590.915	100	54,55
				Persentase sarana air minum dan sanitasi lingkungan yang dilakukan pengawasan	73	%	2.971.694	100	%	756.480	72	%	468.520	72	447.958	100,00	95,61	172	1.204.439	100	100,00
				Persentase Jumlah kasus KLB/Wabah yang ditangani < 1 x 24 jam	100	%	1.439.784	100	%	940.416	72	%	4.756.329	100	4.161.657	100,00	87,50	200	5.102.073	100	100,00
				Jumlah Pelaksanaan Movev Istioah Kesehatan Jemaah Haji	4	Kali	510.785	12	Kali	431.666	4	Kali	93.886	4	79.570	100,00	84,75	16	511.236	100	100,09
				Jumlah Populasi Umum yang dilakukan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	4.300	PTM	3.766.227	3.523	Org	1.147.125	1.000	Org	629.163	1000	570.029	100,00	90,60	4523	1.717.153	105	45,59
				Jumlah Siswa SMA/SMK/Sederajat yang memahami Bahaya Rokok dan Napza di sekolah	825	Siswa	512.427	377	Siswa	390.050	165	Siswa	220.777	165	201.392	100,00	91,22	542	591.442	66	115,42
				Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki 50% Puskesmasnya yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	6	Kab/Kota	464.683	12	Kab/Kota	176.555	6	Kab/Kota	845.259	6	842.722	100,00	99,70	18	1.019.277	100	219,35
				Jumlah Kab/Kota yang memperoleh Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Primer	6	Kab/Kota	3.324.470	12	Kab/Kota	1.296.000	6	Kab/Kota	1.130.796	6	1.149.569	100,00	101,66	18	2.445.569	100	73,56
				Jumlah Kab/Kota memperoleh dukungan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Risiko akibat krisis kesehatan	6	Kab/Kota	1.725.701	12	Kab/Kota	492.224	6	Kab/Kota	3.182.220	6	3.044.764	100,00	95,68	18	3.536.988	100	204,96
				Penduduk yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	205.584	Org	223.819.690	211	Org	89.797.115	205.584	Org	57.104.139	195000	52.937.516	94,85	92,70	195.211	142.734.631	95	63,77
				Jumlah Kab/Kota yang 80% PKM menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar	6	Kab/Kota	1.854.378	12	Kab/Kota	287.663	6	Kab/Kota	212.487	6	2.439.739	100	100	18	2.727.402	100	147,08
			<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan)</i>	<i>Jumlah Kab/Kota memperoleh dukungan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Risiko akibat krisis kesehatan</i>	6	Kab/Kota	1.725.701	12	Kab/Kota	492.224	6	Kab/Kota	3.182.220	6	3.044.764	100	95,68	18	3.536.988	100	204,96
			<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan)</i>	<i>Persentase Jumlah kasus KLB/Wabah yang ditangani < 1 x 24 jam</i>	100	%	1.439.784	100	%	940.416	100	%	4.756.329	100	4.161.657	100	87,50	200	5.102.073	100	100,00
			<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dinas Kesehatan)</i>	<i>Jumlah ibu hamil beresiko yang didampingi selama masa kehamilan oleh mahasiswa dan dasawisma</i>	2.654	Org	6.758.073	873	Org	1.897.080	545	Org	912.362	525	843.571	96	92,46	1398	2.740.651	53	40,55
				<i>Jumlah Bidan yang dilatih penanganan kegawat daruratan Ibu & Bayi</i>	165	Bidan	566.625	98	Bidan	287.139	35	Bidan	0	0	0	0	0,00	98	287.139	59	50,68
			<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)</i>	<i>Jumlah ibu hamil KEK dan Balita Kurang Gizi yang mendapat makanan tambahan</i>	1.000	Org	6.582.830	1406	Org	2.149.595	1000	Org	1.769.206	992	1.441.320	99	81,47	2398	3.590.915	100	54,55
			<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)</i>	<i>Jumlah Kab/Kota yang 80% PKM menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar</i>	6	Kab/Kota	1.854.378	12	Kab/Kota	287.663	6	Kab/Kota	212.487	6	203.015	100	95,54	18	490.678	100	100,00
			<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)</i>	<i>Persentase sarana air minum dan sanitasi lingkungan yang dilakukan pengawasan</i>	73	%	2.971.694	100	%	756.480	72	%	468.520	72	447.958	100	95,61	172	1.204.439	236	40,53

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit SKPD Penangg
					K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan)	Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki 50% Puskesmasnya yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	6	Kab/Kota	464.683	12	Kab/Kota	176.555	6	Kab/Kota	845.259	6	842.722	100	99,70	18	1.019.277	100	219,35	
				Jumlah Populasi Umum yang dilakukan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	4.300	PTM	3.766.227	3523	Org	1.147.125	1000	Org	629.163	1000	570.029	100	0,00	4523	1.717.153	105	45,59	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dinas Kesehatan)	Jumlah Pelaksanaan Monev Istioah Kesehatan Jemaah Haji	4	Kali	510.785	12	Kali	431.666	4	Kali	93.886	4	79.570	100	84,75	16	511.236	100	100,09	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Siswa SIMA/SMK/Sederajat yang memahami Bahaya Rokok dan Napza di sekolah	825	Siswa	512.427	377	Siswa	390.050	165	Siswa	220.777	165	201.392	100	91,22	542	591.442	66	115,42	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Penduduk yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	205.584	Org	223.819.690	211	Org	89.797.115	205.584	Org	57.104.139	204.000	52.937.516	99	92,70	204.211	142.734.631	99	63,77	
			Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Kab/Kota yang memperoleh Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Primer	6	Kab/Kota	3.324.470	12	Kab/Kota	1.296.000	6	Kab/Kota	1.130.796	6	1.149.569	100	101,66	18	2.445.569	100	73,56	
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana	Jumlah Saspras RS yang dilakukan pemeliharaan	100	%	4.662.707	100	%	3.515.622	100	%	4.872.428	100,40	4.661.257	100,40	95,67	200	8.176.879	100	100	
				Jumlah sarana prasarana RS Provinsi yang dibangun/ditingkatkan	1	Paket	29.735.900	1	Paket	8.352.268	1	Paket	3.549.934	1	3.327.614	100	93,74	2	11.679.882	100	39,28	
				Jumlah Layanan Labkesda	5	Layanan	1.993.853	5	Layanan	913.571	5	Layanan	6.933.211	5	5.884.654	100	84,88	10	6.798.225	100	340,96	
				Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	86	%	674.171	100	%	909.595	75	%	23.714.942	74	21.991.230	99	92,73	174	22.900.824	100	100	
			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah sarana prasarana RS Provinsi yang dibangun / ditingkatkan (RSU Ainun)	1	Paket	29.735.900	1	Paket	8.352.268	1	Paket	3.549.934	1	3.327.614	100	93,74	2	11.679.882	100	39,28	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Saspras RS yang dilakukan pemeliharaan (RSU Ainun)	100	%	4.662.707	100	%	3.515.622	100	%	4.872.428	100	4.661.257	100	95,67	200	8.176.879	100	100,00	
			Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Layanan Labkesda	5	Layanan	1.993.853	5	Layanan	913.571	5	Layanan	6.933.211	5	5.884.654	100	84,88	10	6.798.225	100	340,96	
			Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat (Dikes)	86	%	674.171	100	%	909.595	75	%	7.336.372	74	7.242.268	99	98,72	174	8.151.863	100	100,00	
				Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat (RSU Ainun)	0	%	-	0	%	p	75	%	16.378.571	75	14.748.962	100	90,05	75	#VALUE!	0	0,00	
		1.02.1.02.01.01.18	Kegiatan Penerbitan Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tkt. Daerah Provinsi	Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	77	%	713.757	100	%	852.614	100	%	765.682	93	647.134	93,00	84,52	193	1.499.747	100	100,00	
			Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	77	%	713.757	100	%	852.614	100	%	765.682	93	647.134	93,00	84,52	193	1.499.747	100	100,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																98,97	92,05			94	111	
Predikat kinerja																ST	ST			ST	ST	
3	Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Perencanaan dan distribusi nakes di FKTP & FKTL Tingkat Provinsi	6	Dokumen	1.469.942	14	Dokumen	824.370	6	Dokumen	14.619.224	6	12.319.512	100,00	84	20	13.143.881	100	100	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit SKPD Penangg
					K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Jumlah Nakes Teladan Tingkat Provinsi yang disaring mengikuti Nakes Teladan Tingkat Nasional	54	Nakes	622.877	42	Nakes	361.995	54	Nakes	132.221	44	114.907	81,48	87	86	476.902	159	77	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
				Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis serta Persentase capaian Retribusi RSU Ainun Habibie	0	0	0	0	0	0	100	%	5.022.814	98,61	4.804.001	98,61	96	99	4.804.001	-	-	
	1.02.1.02.01.0		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk	Dokumen Perencanaan dan distribusi nakes di FKTP & FKTL Tingkat Provinsi	6	Dokumen	1.469.942	14	Dokumen	824.370	6	Dokumen	14.619.224	6	12.319.512	100	84	20	13.143.881	100	100	
			Sub Kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dokumen Perencanaan dan distribusi nakes di FKTP & FKTL Tingkat Provinsi	6	Dokumen	1.469.942	14	Dokumen	824.370	6	Dokumen	14.619.224	6	12.319.512	100	84	20	13.143.881	100	100	
	1.02.1.02.01.01.20		Kegiatan Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM Tingkat daerah Provinsi	Jumlah Nakes Teladan Tingkat Provinsi yang disaring mengikuti Nakes Teladan Tingkat Nasional	54	Nakes	622.877	42	Nakes	361.995	54	Nakes	132.221	44	114.907	81,48	87	86	476.902	100	77	
				Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis serta Persentase capaian Retribusi RSU Ainun Habibie	-	-	-	0	-	-	100	%	5.022.814	98,61	4.804.001	98,61	96	99	4.804.001	-	-	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie)	Jumlah Nakes Teladan Tingkat Provinsi yang disaring mengikuti Nakes Teladan Tingkat Nasional	54	Nakes	622.877	42,00	Nakes	361.995	54	Nakes	132.221	44	114.907	81,48	87	86	476.902	159	77	
				Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis serta Persentase capaian Retribusi RSU Ainun Habibie	0	0	0	0	0	0	100	%	5.022.814	100	4.804.001	99,61	96	100	4.804.001	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																93,36	88,94				100	88
Predikat kinerja																ST	T					
4		1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	86	%	674.171	100	%	909.595	85	%	506.612	83,15	500.528	97,82	98,80	183	1.410.123	213	209,16	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
	1.02.1.02.01.01.21		Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat	Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	86	%	674.171	100	%	909.595	85	%	506.612	83,15	500.528	100	98,80	183	1.410.123	100	100	
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Dinas Kesehatan)	Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	86	%	674.171	100	%	909.595	85	%	506.612	83,15	500.528	97,82	98,80	183	1.410.123	100	100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	98,80				100	100
Predikat kinerja																ST	ST				ST	ST
5		1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS dan CSR	80	%	4.428.768	100	%	1.395.729	6	%	1.204.972	6	1.134.780	100	94,17	106	2.530.509	100	57,14	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
	1.02.1.02.01.01.23		Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyebarluasan informasi PHBS dan Isu-Isu Strategis Kesehatan melalui media elektronik dan Media Cetak	6	Dokumen	1.245.755	7	Dokumen	450.147	6	Dokumen	1.204.972	6	1.134.780	100	94,17	13	1.584.926	100	127,23	
			Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dinas Kesehatan)	Jumlah penyebarluasan informasi PHBS dan Isu-Isu Strategis Kesehatan melalui media elektronik dan Media Cetak	6	Dokumen	1.245.755	7	Dokumen	450.147	6	Dokumen	1.204.972	6	1.134.780	100	94,17	13	1.584.926	101	127,23	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	94,17				100	127,23
Predikat kinerja																ST	ST				ST	ST
6		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit SKPD Penangg
					K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi Masyarakat	2.14.02.1.01.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif	83	%	1.247.736	100	%	420.088	100	%	72.940	100	27.920	100	38,28	200	448.008	240,96	35,91	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
		2.08.1.02.01.01.15	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah	Dokumen Grand Desain Kependudukan Tingkat Provinsi Gorontalo	1	Dokumen	359.675	1	Dokumen	156.530	1	Dokumen	72.940	1,00	27.920	100	38,28	2	184.450	200,00	51,28	
			Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dinas Kesehatan)	Dokumen Grand Desain Kependudukan Tingkat Provinsi Gorontalo	1	Dokumen	359.675	1	Dokumen	156.530	1	Dokumen	72.940	1	27.920	100	38,28	2	184.450	200,00	51,28	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	38,28			200	51,28		
Predikat kinerja															ST	SR			ST	R		
7	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi Masyarakat	2.14.03.1.01.09	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif	83	%	1.247.736	100	%	420.088	100	%	230.494	12	87.542	12,00	37,98	112	507.630	135	40,68	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
		2.08.1.02.01.01.19	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan	Jumlah Bidan yang dilatih pelayanan KB Pasca Persalinan	100	Bidan	353.983	80	Bidan	248.761	20	Bidan	192.894	16	87.542	80	45,38	96	336.303	96	95,01	
			Sub Kegiatan Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dinas Kesehatan)	Jumlah fasilitator kesehatan reproduksi remaja yang dilatih	608	Orang	534.078	70	Orang	236.735	0	0	37.600	-	-	-	0,00	70	236.735	12	44,33	
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dinas Kesehatan)	Jumlah Bidan yang dilatih pelayanan KB Pasca Persalinan	100	Bidan	353.983	80	Bidan	248.761	20	Bidan	192.894	16	87.542	80	45,38	96	336.303	96	95,01	
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dinas Kesehatan)	Jumlah fasilitator kesehatan reproduksi remaja yang dilatih	608	Orang	534.078	70	Orang	236.735	0	0	37.600	-	-	-	0,00	70	236.735	12	44,33	
Rata-rata capaian kinerja (%)															80,00	45,38			53,76	69,67		
Predikat kinerja															T	SR			R	S		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													188.112.689	175.785.049								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)															95,33	77,43			105,56	87,17		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)															ST	S			ST	T		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pencapaian Realisasi Fisik : 47,73% .																						
Faktor penghambat : Pencapaian Realisasi Keuangan Hanya mencapai 36,74% disebabkan Karena Ada beberapa program kegiatan yang masih dalam proses Lelang bahkan untuk Kegiatan Pengadaan susu Sudah 2 kali Gagal Lelang.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya : -																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya* :																						

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

1. Indeks E-Government : 3,82

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	2.10 . 2.10.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100 %	26.650.000	195 %	6.332.597	100 %	2.486.603	96	2.463.225	96	99,06	291	8.795.822	291	33,00		
		2.10 . 2.10.1 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoran	60 bln	5.000.000	24 bln	1.004.226	12 bln	622.620	12	600.720	100	96,48	36	1.604.946	60	32,10		
		2.10 . 2.10.1 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Meningkatnya sarana prasarana perkantoran Jumlah peralatan penyebarluasan informasi	1 kantor 8 videotron	6.250.000 9.000.000	2 kantor 3 videotron	1.870.306 2.749.670	1 kantor 1 videotron	900.345 800.800	100% 1	899.838 800.800	100 100,00	99,94	3 4	2.770.144 3.550.470	100 44	44,32 39,45		
		2.10 . 2.10.1 . 01 . 03	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur di SKPD Jumlah SDM Pengelola TIK Provinsi Gorontalo Jumlah SDM Pengelolaan Data Statistik Jumlah SDM Sandi berklasifikasi Jumlah PPID Provinsi Gorontalo	1.305 org	6.400.000	425 org	708.396	261 org	162.837	166	161.867	64	99,40	591	870.262	45	13,60		
Rata-rata capaian kinerja (%)													121	132			62	32		
Predikat Kinerja													SR	SR						
		2.10 . 2.10.1 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100 %	750.000	200 %	488.750	100 %	272.928	85,00	257.748	85	94,44	285,00	746.497	285,00	99,53		
		2.10 . 2.10.1 . 02 . 01	Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlahdokumentaporan keuangan SKPD	60 Dokumen	750.000	12 Dokumen	488.750	6 Dokumen	272.928	6,00	257.748	100	94,44	18,00	746.497	30,00	99,53		
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	94			30	100		
Predikat Kinerja													SR	SR						
	Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah	2.10 . 2.10.1 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Meningkatnya infrastruktur dan akses jaringan e-Government	330 Titik Akses Internet 100 % 38 Layanan 50 Domain	26.125.000	469 Titik Akses Internet 60 % 62 Layanan	8.899.160	290 Titik Akses Internet 60 % 34 Layanan 50 Domain	4.284.855	290 60 34 50	4.663.057	100 100 100 100	108,83	759 120 96 150	13.562.217	230 120 253 300	51,91		
		2.10 . 2.10.01 . 15 . 01	Layanan Infrastruktur TIK Provinsi	Jumlahkoneksi Jaringan e-Government	330 Titik Akses Internet	14.500.000	534 Titik Akses Internet	6.694.421	290 Titik Akses Internet	3.832.885	290	4.216.550	100	110,01	824	10.910.972	100	75,25		
		2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	Infrastruktur Persandian Daerah	presentasi peralatan sandi	100 %	500.000	60 %	150.040	60 %	48.000	60	43.464	100	90,55	120	193.504	120	38,70		
		2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	Pengelolaan dan Layanan Data Informasi Sistem E-Government	Jumlah Layanan pemerintah yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Government	38 Layanan	3.000.000	62 Layanan	387.627	34 Layanan	5.385	34	5.385	100	100,00	96	393.012	100	13,10		
		2.10 . 2.10.01 . 15 . 04	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website Seluruh OPD	Jumlah domain di provinsi gorontalo	50 Domain	750.000	100 Domain	427.934	50 Domain	131.900	50	131.900	100	100,00	150	559.834	100	74,64		
		2.10 . 2.10.01 . 15 . 05	Layanan Komunikasi Publik	Jumlah sosialisasi Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif)	150 Desa/5 Kab	3.000.000	75 Desa/5 Kab	392.139	5 Kabupaten	76.696	1	76.285	20	99,46	76	468.424	51	15,61		
		2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Layanan Informasi	Dokumen Index kepuasan layanan informasi e-government	5 Dokumen	375.000	2 Dokumen	116.976	0 -	-	0	-	-	-	2	116.976	40	31,19		
		2.10 . 2.10.01 . 15 . 07	Pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan media tradisional	Jumlah lembaga Komunikasi sosial dan Infomasi yang diberdayakan	450 KIM	3.750.000	90 KIM	377.820	90 KIM	143.530	60	143.060	67	99,67	150	520.880	33	13,89		
		2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah	Laporan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi menggunakan	60 Laporan	250.000	24 Laporan	352.202	12 Laporan	46.460	12	46.413	100	99,90	36	398.615	60	159,45		
Rata-rata capaian kinerja (%)													117	117			76	53		
Predikat Kinerja													S	SR						

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		2.10 . 2.10.1 . 20	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	29 Dokumen	6.750.000	10 Dokumen	787.774	9 Dokumen	255.631	-	255.506	-	99,95	10	1.043.280	34,482759	15,46		
		2.10 . 2.10.1 . 20 . 01	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pembangunan Provinsi Gorontalo	Jumlah laporan penyusunan dan pemutakhiran data pembangunan daerah	10 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	594.049	2 Dokumen	95.648	2	95.643	100	100,00	6	689.692	60	17,24		
		2.10 . 2.10.1 . 20 . 02	Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan Provinsi Gorontalo	Jumlah dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD	1 Dokumen 1 Server 2 Pengolah Data	500.000	- Dokumen - Server - Pengolah Data	-	1 Dokumen 1 Server 2 Pengolahan Data	50.230	1 1 2	50.223	100 100 100	99,99	1 1 2	50.223	100 100 100	10,04	Dinas Kominfo & Statistik	
		2.10 . 2.10.1 . 20 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Data Sektor di SKPD	Jumlah laporan hasil moneyv dan pengawasan data sektor di SKPD	15 Dokumen	2.250.000	6 Dokumen	193.726	3 Dokumen	109.753	3	109.640	100	99,90	9	303.365	60	13,48		
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	100			210	14		
Predikat Kinerja													SR	SR						
Rata-rata capaian kinerja (%)													146	111						
Predikat Kinerja													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						60.275.000				7.300.016		7.639.535								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				(1) Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada ; (2) Merupakan kegiatan yang bersumber dana APBD yang pemanfaatannya sudah ditentukan																
Faktor Penghambat				(1) Kegiatan yang bersifat kontraktual, dalam proses pelelangan ; (2) Mundurnya pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu penjadwalan ulang ; (3) Adanya rasionalisasi anggaran ;																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				(1) Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal ; (2) Percepatan penyerapan anggaran sesuai progres kegiatan																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya *)				(1) Perlu adanya peningkatan integrasi sistem/aplikasi penganggaran yang terpadu (2) perlunya evaluasi terhadap proses pengadaan khususnya lelang																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket																	
					K		Rp.(000)	K		Rp.(000)	K		Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)																			
1	2	3	4	5	6			7			8			12= 8+9+10+11		13= 12/7*100		14= 6+12		15= 14/5*100																				
8			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang	15	Sertifikat	8.350.000	41	Sertifikat	1.812.603	3	Sertifikat	847.445	3	811.699	100	96	44	2.624.301	100,00	31,43																			
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	120	Pelaku Usaha	2.500.000	200	Pelaku Usaha	205.857	110	Pelaku Usaha	61.866	125	61.866	114	100	325	267.723	100,00	10,71																			
			Kegiatan Pelaksanaan Perindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen	80	Kasus	3.950.000	-	Kasus	-	60	Kasus	362.148	96	329.081	160	91	96	329.081	120,00	8,33																			
			Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang	3.500	Kali	6.300.000	3.064	Kali	1.542.696	700	Kali	285.235	683	284.018	98	100	3.747	1.826.714	107,06	29,00																			
				Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang	123	Pelaku Usaha	2.050.000	25	Pelaku Usaha	269.907	30	Pelaku Usaha	138.196	32	136.734	107	99	57	406.641	46,34	19,84																			
Rata-rata capaian kinerja (%)															119,47	97,35			93,35	16,97																				
Predikat Kinerja															FALSE	ST																								
9			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Ekspor	12	Komoditi	2.500.000	27	Komoditi	348.707	9	Komoditi	62.821	11	34.189	122	54	38	382.896	100,00	15,32																			
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Misi dagang ekspor dan antar pulau	1	Misi Dagang	3.750.000	-	Misi Dagang	348.707	-	Misi Dagang	-	-	-	-	-	-	348.707	0,00	9,30																			
				Jumlah Komoditi Produk Ekspor yang dipromosikan	10	Komoditi		27	Komoditi		9	Komoditi	62.821	11	62.521	122	100	38	62.521	100,00	0,00																			
				Jumlah UKM yang memahami prosedur ekspor	20	Calon Ekspor		20	Calon Ekspor		20	Calon Ekspor	-	30	-	150	-	50	-	250,00	0,00																			
Rata-rata capaian kinerja (%)															272,22	99,52			175,00	9,30																				
Predikat Kinerja															FALSE	ST																								
7			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang di bina	15.339	IKM	9.700.000	53	IKM	671.730	200	IKM	1.819.507	167	1.595.909	102,92	91,27	220	2.267.639	1,43	23,38																			
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan	140	IKM yang mendapat Bimtek/Bantuan Pengolahan Pangan	2.500.000	20	IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	150.346	60	IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	722.283	64	517.132	106,67	71,60	84	667.478	60,00	26,70																			
				Jumlah IKM berbasis Industri Kerajinan	100	IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan	1.250.000	32	IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan	389.539	60	IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan	667.657	83	660.941	138,33	98,99	115	1.050.480	100,00	84,04																			
				Jumlah IKM Logam, Mesin, dan Elektronik yang Dibina	120	IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	3.700.000	1	IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	9.777	30	IKM Logam, Mesin, dan Elektronik yang Dibina	210.388	20	202.030	66,67	96,03	21	211.807	17,50	5,72																			
				Jumlah Industri Agro Terpadu	1	Industri Agro Terpadu	2.250.000	-		122.068	1	Industri Agro Terpadu	219.179	1	215.807	100,00	98,46	1	337.875	100,00	15,02																			
Rata-rata capaian kinerja (%)															102,92	91,27			69,38	32,87																				
Predikat Kinerja															FALSE	ST																								
12			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	Jumlah IKM yang Dibin	15.339	IKM	13.950.000	453	IKM	2.592.834	1	IKM	154.319	0	63.720	0,00	41,29	453	2.656.554	2,95	19																			
			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Sistem Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM	1.250.000	1	Sistem Informasi IKM	389.539	1	Sistem Informasi IKM	154.319	1	144.104	100,00	93,38	2	533.644	200,00	43																			
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	93,38			200,00	42,69																				
Predikat Kinerja															ST	ST			R																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															16.458.738																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)															148,31	#DIV/0!																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)															FALSE	#DIV/0!																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																								
Faktor penghambat :																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikut :																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																								

KOD	Sasaran	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		KET					
					K	Rp. 000	K	Rp. 000	K	Rp. 000	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
					%		%		%		%		%		%		%							
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN	Indeks Kualitas Air	100	%	3.471.212	42	%	969.762	43,5		100.064	97	99.147	222	99	139	1.068.909	100	100	Indeks kualitas Lingkungan hidup belum bisa di hitung karena nilai keseluruhan data IKA, IKU, IKAL, IKATI		
2	11	08	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penuhulan	Jumlah masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	1200	orang	978.548	600	orang	503.225	190	orang	100.064	250	99.147	132	99	850	602.372	71	62			
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	1200	orang	978.548	600	orang	503.225	190	orang	100.064	250	99.147	132	99	850	602.372	71	62	
												Rata-rata capaian kinerja (%)		132	99			71	62					
												Predikat kinerja		R	ST									
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP LINTAS MASYARAKAT	Persentase SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	100	%	3.471.212	42	%	969.762	20,15	%	175.789	20,15	175.691	-	100	62	1.145.453	100	100			
2	11	09	1.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Jumlah lokasi penilaian Adiwirata	24	Kab/Kota	1.160.212	18	Kab/Kota	466.801	6	Kab/Kota	175.789	6	175.691	100	100	24	642.492	100	55		
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perindungan dan Pennelelaan	Jumlah Sekolah Adiwirata	100	Sekolah	1.160.212	10	Sekolah	466.801	20	Sekolah	175.789	6	175.691	100	100	24	642.492	100	55	usulan calon sekolah adiwiyata sementara pengusulan ke kemeterian HK
												Rata-rata capaian kinerja (%)		25	125			35	35					
												Predikat kinerja		SR	R			50	100					
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus LHK yang Diselesaikan	72,46	%	600.723	32	%	136.374	43,48	%	112.610	44	111.767	101	99	76	248.141	105	41			
2	11	10	1.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan kasus di bidang lingkungan hidup dan kebutuhan	8	Laporan	671.191	3	laporan	86.604	-	laporan	-	-	-	-	3	86.604	38	13			
					Jumlah laporan penyelesaian tindak pidana LHK	8	Laporan	671.190	5	laporan	49.770	2	Laporan	112.610	2	111.767	100	99	7	161.537	88	24		
2	11	09	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPH H Provinsi	Jumlah Kasus LHK yang tertangani, laporan hasil penanganan kasus	4	laporan	124.860	1	laporan	12.108	2	Laporan	112.610	2	111.767	100	99	3	123.875	75	99	
												Rata-rata capaian kinerja (%)		100	99			63	18					
												Predikat kinerja		SR	SR									
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	44.000	Ha	24.600.933	1.400	Ha	9.879.098	1.000	Ha	8.814.836	1.302	8.865.584	130	101	2.702	18.744.682	6	76			
				Jumlah pelaku usaha di dalam kawasan hutan yang diverifikasi dan difasilitasi	579	Pelaku usaha	1.654.087	230	Pelaku usaha	4.009.341	117	Pelaku usaha	1.106.007	83	1.188.073	71	-	313	5.197.414	54	100			
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan	280	Laporan	1.246.454	152	Laporan	419.546	2	Laporan	184.000	2	278.486	100	151	154	698.032	55	56		
				Persediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH yang tersedia dan terpelihara	1	Unit	94.900	-	n/a	-	1	unit	94.900	1	94.581	100	100	1	94.581	100	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan	280	Laporan	1.246.454	152	Laporan	419.546	2	Laporan	184.000	2	183.905	100	100	154	603.451	55	48		
3	28	03	1.01	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen Pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan	193	IPPHBK : 192 + IPJL 1	1.870.000	112	IPPHBK	595.006	40	IPPHBK : 37 + IPJL 1	184.000	41	183.888	103	100	153	778.894	79	42		
				Jumlah Lokasi Verifikasi Izin pemanfaatan Hutan	8	Lokasi	-	-	Lokasi	-	-	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	28	03	1.01	04	Pelayanan Penzinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Hutan	Jumlah dokumen Pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan	193	IPPHBK : 192 + IPJL 1	1.870.000	112	IPPHBK	595.006	40	IPPHBK : 37 + IPJL 1	184.000	41	183.888	103	100	153	778.894	79	42	
				Jumlah Lokasi Verifikasi Izin pemanfaatan Hutan	8	Lokasi	-	-	Lokasi	-	-	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan	3	Laporan	273.247	-	laporan	-	3	laporan	273.247	3	273.211	100	100	3	273.211	100	100		
3	28	03	1.03	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan Hutan Rakyat	245	Ha	2.465.000	70	Ha	544.784	1.063	Ha	6.863.013	1.018	6.954.505	96	101	1.088	7.499.289	444	304		
				Luas lahan yang direhabilitasi (Lemito dan Popavato)	230	Ha	1.326.000	150	Ha	596.834									284	1.760.209	123	133		
				Luas lahan yang direhabilitasi (Randangan dan Marisa)	220	Ha	1.308.500	90	Ha	368.296									90	368.296	41	28		
				Luas lahan yang direhabilitasi (Sumalata)	220	Ha	1.242.500	135	Ha	448.987	200	Ha	1.200.056	134	1.163.375	67	97	135	448.987	61	36			
				Luas lahan yang direhabilitasi (Tilamuta)	130	Ha	1.145.000	40	Ha	278.703									40	278.703	31	24		
				Luas lahan yang direhabilitasi (Limboto)	230	Ha	1.275.000	100	Ha	405.770									100	405.770	43	32		
				Luas lahan yang direhabilitasi (Bolango-Bone)	140	Ha	1.093.000	42	Ha	251.921									42	251.921	30	23		
				Jumlah bangunan DAM Penahan dan gully plug yang terbangun	14,00	Unit	-	-	-	-	8	unit Dam Penahan dan unit Gully Plug	554.978	14	553.280	175	-	14	553.280	100	100			

KOD	Sasaran	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		KET																			
					K	(Rp. 000)	K	(Rp. 000)	K	(Rp. 000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
3	28	03	1.01	04	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (DAU dan DAK)	Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan Hutan Rakyat	245	Ha	2.465.000	-	Ha	-	1008	Ha	6.771.139	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
					Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Yang Direhabilitasi (Lemito dan Popayato, Randangan dan Marisa, Sumalata, Tiamura, Limboto, Bolelomo, Bolelo)	1170	Ha	7.390.000	557	Ha	2.350.511	200	Ha	1.200.056	1008	6.766.559	100	100	1.008	6.766.559	411	275															
					Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan hutan rakyat	60	Ha	700.000	-	Ha	-	55	Ha	91.874	134	1.163.375	67	97	691	3.513.886	59	48															
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan gully plug yang terbangun	Jumlah bangunan DAM Penahan dan gully plug yang terbangun	-	unit	-	-	unit	-	8	unit Dam Penahan dan unit Gully Plug	554.978	10	91.796	18	100	10	91.796	17	13															
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan yang dilaksanakan	120	Kali	1.802.933	72	Kali	583.375	24	Kali	95.390	24	94.337	100	99	96	677.712	80	38															
						jumlah penurunan titik api karhuta	114	Titik Hot Spot	1.170.000	30	Titik Hot Spot	1.912.063	10	titik hotspot	101.400	10	100.087	100	99	40	2.012.150	35	100															
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Hutan yang dilindungi	Jumlah Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan yang dilaksanakan	120	kali	1.802.933	72	kali	583.375	24	Kali	95.390	24	94.337	100	99	96	677.712	80	38															
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah penurunan titik api karhuta	114	titik hotspot	1.170.000	30	titik hotspot	1.912.063	10	titik hotspot	101.400	10	100.087	100	99	40	2.012.150	35	172															
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan (pada KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III - Pohuwato, KPH IV - Gorontalo Utara, KPH V - Boalemo, KPH VI - Gorontalo, KPH VII - Bone Bolango dan Kota)	53	komoditas	6.971.306	34	komoditas	2.278.002	9	komoditas	522.127	9	510.874	100	98	43	2.788.876	81	40															
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan (pada KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III - Pohuwato, KPH IV - Gorontalo Utara, KPH V - Boalemo, KPH VI - Gorontalo, KPH VII - Bone Bolango dan Kota)	53	komoditas	6.971.306	34	komoditas	2.278.002	9	komoditas	522.127	9	510.874	100	98	43	2.788.876	81	40															
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah laporan pengawasan dan pendendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan	280	laporan	1.246.454	152	laporan	419.546	3	Laporan	215.881	7	343.289	233	159	159	762.835	57	150															
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah laporan pengawasan dan pendendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan	280	laporan	1.246.454	152	laporan	419.546	3	Laporan	215.881	4	214.825	133	100	156	634.371	56	51															
					fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu secara elektronik	Jumlah laporan pengawasan dan pendendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan	3	Laporan	128.990	-	Laporan	-	3	Laporan	128.990	3	128.464	100	100	3	128.464	100	100															
Rata-rata capaian kinerja (%)													179		113																							
Predikat kinerja																																						
3	28	04			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	44.000	Ha	24.600.933	2.065	Ha	8.573.324	1.000	Ha	414.376	25	364.556	3	88	2.090	8.937.880	5	36															
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Jumlah laporan perkembangan pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	5	Laporan	1.090.000	3	laporan	289.460	1	Laporan	97.700	1	97.258	100	%	100	4	386.718	80	%	35													
												25	Ha	316.676	25	316.676	-	100	25	316.676	-	%	-															
3	28	04	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Penanaman Tanaman Mangrove							25	Ha	316.676	25	316.676	-	100	25	316.676	-	%	-														
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah laporan perkembangan pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	5	Laporan	1.090.000	1	laporan	84.974	1	Laporan	97.700	1	97.258	100	100	2	182.232	40	%	17														
3	28	05			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penulisan dan Pemberdayaan	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	44000	Ha	2.528.933	-	Ha	-	1.000	Ha	2.528.933	594	2.447.121	59	97	594	2.447.121	1	97															
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi	35	Ha	2.528.933	-	Ha	-	35	Ha	2.528.933	594	2.447.121	1.697	%	97	594	2.447.121	1.697	%	97													
					Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif KTH dan KIUPS	12	Paket	1.090.000	-	Paket	-	12	Paket	2.400.000	12	2.318.513	100	97	12	2.318.513	100	%	213														
					Penyapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial	35	Ha	128.933	-	Ha	-	35	Ha	128.933	594	128.608	1.697	100	594	128.608	1.697	%	100														
Rata-rata capaian kinerja (%)													50		100																							
Predikat kinerja													SR		SR																							
3	28	06			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha)	44000	Ha	24.600.933	2.065	Ha	8.573.324	1.000	Ha	266.955	30	409.638	3	153	2.095	8.982.962	5	37															
3	28	06	1.01		Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal DAS Limboto yang direhabilitasi	590	Ha	2.725.000	235	Ha	618.919	10	Ha	105.556	-	248.689	-	%	236	235	867.608	40	%	32													
						Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	21.850	Ha	10.408.000	670	Ha	1.402.067	30	Ha	161.399	30	160.949	100	%	100	700	1.563.016	3	%	15													
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Luas areal DAS prioritas dan hutan rakyat yang direhabilitasi	21850	Ha	10.408.000	670	Ha	1.402.067	30	Ha	161.399	30	198.526	100	%	123	700	1.600.593	3	%	15													
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Luas areal DAS Limboto yang direhabilitasi	590	Ha	2.725.000	235	Ha	618.919	10	Ha	105.556	-	211.112	-	%	200	235	830.031	40	%	30													
Rata-rata capaian kinerja (%)													50		168																							
Predikat kinerja													S		T																							
Jumlah Anggaran dan realisasi dari seluruh Program											15.948.775,162		15.614.885,950																									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 s.d 10)													128,10		104,51																							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d 10)													S		R																							
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																																						
faktor penghambat :																																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan yang berikutnya :																																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																						

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

- 1 Meningkatkan skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan 66,6
2 Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) 84,4

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Keterangan		
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			Rp (000)	
		02:03	<u>Urusan Wajib</u>																				
		02:03:01	<u>Bidang Ketahanan Pangan</u>																				
1		2.03 . 2.03.01.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	2.459.000	100	1.451.710	100	Persen	447.230	100	428.199	100	96	200	1.879.908	100	76			
				Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100	%	4.587.000	100	3.151.405	100	%	697.360	97	673.149	97	97	197	3.824.554	100	83			
			Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA) yang tersedia	20	Dokumen	2.020.000	11	1.172.885	4	Dokumen	4	339.583	100	97	15	1.512.468	75	75				
				Jumlah Laporan Evaluasi OPD yang tersedia	15	Dokumen		5		2	Dokumen	2		100				7		47			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan keuangan OPD	20	Dokumen	439.000	7	278.824	2	Dokumen	98.158	2	88.616	100	90	9	367.440	45	84			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia	5	kegiatan	1.309.000	2	1.192.724	1	Kegiatan	385.458	1	379.382	100	98	3	1.572.105	60	100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia (UPTD)	3	kegiatan	365.000	-	-	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu	5	kegiatan	1.780.000	2	888.000	1	Kegiatan	311.902	1	293.768	94	3	1.181.768	60	66				
				Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersedia (Dinas dan UPTD)	24	Dokumen		-		6	Dokumen		4					67		4	17		
				Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu (UPTD)	3	Kegiatan	401.000	-	-	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		94,44	95,04		50,56	81,24			
														Predikat kinerja		ST	ST						

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Keterangan
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
2		2.03 . 2.03.01.01 . 16	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	7.575.000	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	1.990.972	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	507.000	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	485.824	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	96	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	2.476.796	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	32,70		Program Strategis
				Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)									
				Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	CPP 50 Ton, CPM 208 Ton		CPP 5 Ton, CPM 10 Ton		0		CPP 5 Ton, CPM 10 Ton									
				persentase/jumlah konsumsi energi per kapita perhari (Kkal/kapita/hari)	2150 kkal/kap/hari		4562		2150 kkal/kap/hari		###		100,00		6.712		312,19			
				persentase/jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)	55,8 gram/kap/hari		126,40		56,4 gram/kap/hari		55,60		98,58		182,00		326,16			
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan	10 laporan	1.738.000	5	757.458	2	Laporan	120.260	2,00	115.715	100,00	96	7	873.173	70	50,24	DINAS PANGAN
	Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan	104 ton		42	5		ton		5,00	100,00		47		45						
	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang dibina dalam upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen.	24 Gapoktan		6	6		Gapoktan		6,00	100,00		12		50						
	Jumlah komoditi pangan strategis dengan harga yang stabil	12 komoditi		10	5		Komoditi		5,00	100,00		15		100						
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan	50 CPP 50 Ton & CPM 104 Ton	3.675.000	35	806.354	14	CPP 50 Ton & CPM 104 Ton	242.620	14,00	237.807	100,00	98	49	1.044.161	98	28,41	
	Gudang Cadangan Pangan Provinsi	1 Gudang		-	-		Gudang (Pembangunan dan pengisian)		-	-		-								
			8 Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina	72 KRPL	2.975.000	20	1.007.261	10	KRPL	577.794	10,00	562.630	100,00	97	30	1.569.891	42	53	
	Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	2 kegiatan		3	2		Kegiatan		2,00	100,00		5		100						
	Jumlah Kelompok Pangan Olahan yang dibina	10 Kelompok		3	152.911		-		-	-		-		3		152.911		30		
			9 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH	2 laporan	1.085.000	2	410.259	2	Laporan	57.689	2,00	57.460	100,00	100	4	467.719	100	43	
	Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya	10 orang		-	15		Orang		15,00	100,00		15		100						
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	96,60		73,49	35,27			
Predikat kinerja													ST	ST						

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Keterangan				
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)		
3			ogram Pengawasan Keamanan Pang	Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan	21	Sertifikat /registrasi	2.947.000	12	751.215	5	Sertifikat /registrasi	235.520	5	224.825	100,00	95,46	17	976.040	81	33				
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	30	Dokumen	1.710.000	20	682.765	6	Dokumen	57.720	6	54.534	100,00	94,48	26	737.299	87	43				
				jumlah Sertifikat Mutu dan Keamanan Pangan Segar	21	sertifikat/registrasi	1.237.000	12	68.450	5	Sertifikat /registrasi	177.800	7	170.291	100,00	95,78	19	238.742	90	19				
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	95,13				88,57	31,21			
Predikat kinerja															ST	ST								
8	2.03 . 2.03.01.01 . 20		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya	135	Daerah rawan pangan	8.032.000	31	2.299.898	27	Daerah rawan pangan	333.689	27	322.484	100	97	58	2.622.382	100	33	Program Strategis			
				Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan (Rumah tangga miskin)	8.750	Rumah Tangga Miskin		3.250		1.500	Rumah Tangga Miskin		1.500									100	4.750	100
			Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	tenaga pengelola analisis ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang berkualitas	30	orang	1.269.000	6	323.705	6	Orang	59.039	6	56.060	100	95	12	379.765	40	30	DINAS PANGAN			
				Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	32	laporan		12		7	Laporan		7									100	19	59
			Kegiatan Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kios Akses Pangan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD)	27	LKD	2.575.000	12	757.925	15	LKD	84.350	15	84.118	100	100	27	842.043	100	33	DINAS PANGAN			
				jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien)	2.250	paket	4.188.000	4.100	1.218.268	1.500	Paket	190.300	1.500	182.306	100	96	5.600	1.400.574	100	33				
Predikat kinerja															100,00	97				75	32			
Predikat kinerja															ST	ST								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												98,61	95,90											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)															ST	ST								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
- Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada																								
- Laporan Pengesahan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu																								
Faktor penghambat :																								
- Keterlambatan penerbitan SK Gub Penerima Bantuan menyebabkan beberapa kegiatan utama mengalami kendala dalam serapan anggaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan triwulan berikutnya :																								
- Percepatan penyerapan anggaran sesuai progres kegiatan																								
- Percepatan Dokumen Kegiatan Utama pada triwulan berikutnya ;																								

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo**

1 Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang) : 7.599 Orang
 2 Jumlah Wisatawan Domestik (kunjungan) : 722.879 Orang
 3 Rata-rata lama tinggal Wisatawan : 3 hari

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	3 26 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100 Persen	724.231.750	100	1.291.206	100 Persen	584.381	100	581.173	100	99	200	1.872.379	200	0				
				Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100 Persen	2.015.447	100	2.945.344	100 Persen	1.740.585	88	1.675.348	100	96	188	4.620.692	188	229				
		3 26 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen	554.311	15	994.985	5 Dokumen	441.907	5	438.936	100	99	20	1.433.921	100	100				
		3 26 1 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen	554.311	15	994.985	5 Dokumen	441.907	5	438.936	100	99	20	1.433.921	100	100				
		3 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD	1 Dokumen	169.921	7	296.221	1 Dokumen	142.474	1	142.237	100	100	8	438.458	100	100				
		3 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	1 Dokumen	169.921	7	296.221	1 Dokumen	142.474	1	142.237	100	100	8	438.458	100	100				
		3 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/pelatihan/sosialisasi	59 Orang	728.425	21	171.176	7 Orang	-	-	-	-	-	21	171.176	36	23				
		3 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/pelatihan/sosialisasi	59 Orang	175.289	21	171.176	7 Orang	-	-	-	-	-	21	171.176	36	98		Target tidak tercapai karena anggaran		
		3 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	24 Paket	1.199.381	72	1.513.155	24 Paket	984.738	24	941.799	100	96	96	2.454.955	100	100				
		3 01 01 1.05 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	24 Paket	1.199.381	72	1.513.155	24 Paket	984.738	24	941.799	100	96	96	2.454.955	100	100				
		3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa adm.perkantoran	12 Bulan	640.777	36	1.261.012	12 Bulan	755.847	12	733.548	100	97	48	1.994.560	100	100				
		3 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan jasa adm.perkantoran	12 Bulan	640.777	36	1.261.012	12 Bulan	755.847	12	733.548	100	97	48	1.994.560	100	100				
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	97,96			87,12	84,70				
S																						
R																						
	Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara	3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang difasilitasi/dikembangkan	Fasilitasi 3 Obyek Wisata	1.799.490	11	4.080.545	Fasilitasi 3 Obyek Wisata	2.337.483	3	2.222.217	100	95	14	6.302.762	467	350				
		3 26 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah obyek wisata yang ditata	3 Obyek Wisata	777.860	13	1.637.125	3 Obyek Wisata	1.906.815	3	1.805.811	100	95	16	3.442.935	100,00	100,00				
		3 26 02 1.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah obyek wisata yang ditata	3 Obyek Wisata	777.860	13	1.637.125	3 Obyek Wisata	1.906.815	3	1.805.811	100	95	16	3.442.935	533,33	442,62				
		3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah obyek wisata yang ditata	3 Obyek Wisata	777.860	13	1.637.125	3 Obyek Wisata	254.288	3	249.505	100	98	16	1.886.630	100,00	100,00				
				Jumlah orang yang mengikuti rakornis	50 Orang	424.458	###	385.323	50 Orang	97.911	50	96.850	100	99	350	482.173	100,00	100,00				
		3 26 02 1.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah obyek wisata yang ditata	3 Obyek Wisata	777.860	13	1.637.125	3 Obyek Wisata	254.288	3	249.505	100	98	16	1.886.630	533,33	242,54				
		3 26 02 1.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah orang yang mengikuti rakornis	50 Orang	424.458	###	385.323	50 Orang	97.911	50	96.850	100	99	350	482.173	700,00	113,60				
		3 26 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mengikuti rakornis	50 Orang	424.458	###	385.323	50 Orang	78.468	50	70.051	100	89	350	455.374	100,00	100,00				
		3 26 02 1.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti rakornis	50 Orang	424.458	###	385.322	50 Orang	78.468	50	70.051	100	89	350	455.373	100,00	107,28				
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	95,25			100,00	100,00				
Predikat kinerja													ST	ST								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
	Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara	3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	4 Promosi Pariwisata	6.716.652	18	7.868.958	4 Promosi Pariwisata	789.257	4	767.688	100	97	22	8.636.646	550	129				
		3 26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Promosi Pariwisata dalam dan Luar Negeri	6 Lap. Kegiatan	1.921.724	24	1.762.981	8 Lap. Kegiatan	217.858	8	208.509	100	96	32	1.971.490	100	103				
				Jumlah pengolahan data dan informasi pariwisata	7 Lap. Kegiatan	793.048	9	1.094.238	1 Lap. Kegiatan	144.612	1	133.931	100	93	10	1.228.169	100	100				
				Jumlah media/bahan/keg. pemasaran pariwisata	8 Media/bahan/kegiatan	993.719	9	958.996	3 Media/bahan/kegiatan	426.787	3	425.247	100	100	12	1.384.243	100	100				
		3 26 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata dalam dan luar negeri	6 Lap. Kegiatan	1.921.724	24	1.762.981	8 Lap. Kegiatan	217.858	8	208.509	100	96	32	1.971.490	533	103				
		3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pengolahan data dan informasi pariwisata	7 Lap. Kegiatan	793.048	9	1.094.238	1 Lap. Kegiatan	144.612	1	133.931	100	93	10	1.228.169	143	155				
		3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media/bahan/keg. pemasaran pariwisata	8 Media/bahan/kegiatan	993.719	9	958.996	3 Media/bahan/kegiatan	426.787	3	425.247	100	100	12	1.384.243	150	139				
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	95,99			100,00	100,86				
Predikat kinerja													ST	ST								
	Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara	3 26 04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	100 Persen	1.202.229	100	1.453.363	100 Persen	432.336	75	409.328	75	95	175	1.862.691	175	155				
		3 26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif potensial	5 Kawasan Kreatif	475.721	5	899.895	2 Kawasan Kreatif (100 Orang)	432.336	100	409.328	100	95	105	1.309.223	100,00	100,00				
		3 26 04 1.01 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Potensial	5 Kawasan Kreatif	475.721	5	899.895	2 Kawasan Kreatif (100 Orang)	432.336	100	409.328	100	95	105	1.309.223	2.100	275				
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	94,68			100,00	100,00				
Predikat kinerja													ST	ST								
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	100 Persen	1.202.229	100	1.453.363	100 Persen	255.439	100	247.288	100	97	200	1.700.651	200	141				
		3 26 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif potensial	5 Kawasan Kreatif	475.721	5	899.895	2 Kawasan Kreatif (100 Orang)	255.439	2	247.288	100	97	7	1.147.183	100,00	100,00				
		3 26 05 1.01 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah pelatihan dan SDM yang terlatih	2 Kali	397.211	6	286.250	2 Kali	127.720	2	122.166	100	96	8	408.416	400	103				
		3 26 05 1.01 04	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Fasilitasi Lembaga Pariwisata	2 Kali	329.297	11	267.218	2 Kali	127.720	2	125.123	100	98	13	392.341	650	119				
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	96,81			100,00	100,00				
Predikat kinerja													ST	ST								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.139.482	5.903.042											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													100,00	96,14			97,42	97,11				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													ST	ST								
<p>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : kesesuaian target output kegiatan dalam dokumen perencanaan, perlunya kolaborasi masing-masing bidang dan seksi dalam pencapaian kinerja OPD</p> <p>Faktor Penghambat : tidak tercapainya target pada subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi disebabkan oleh refocusing anggaran pada Dinas Pariwisata Prov. Gorontalo</p> <p>Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang ada</p> <p>Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : Review renja dan renstra untuk penyesuaian target output dan outcome</p>																						

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPDPovinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDPovinsi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDPovinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100,00 persen	6.008.616	100,00 persen	870.623	100,00 persen	1.569.726	100,00 persen	1.481.344	100,00	94,37	200,00	2.351.967	200,00	39,14			
				Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu	1 Keg	1.876.356	1 Keg	287.925	1 Keg	433.957	1,00 Keg	408.574	100,00	94,15	2,00	696.499	200,00	37,12			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1 Keg	3.581.860	1 Keg	560.279	1 Keg	1.135.769	1,00 Keg	1.072.770	100,00	94,45	2,00	1.633.049	200,00	45,59			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61 orang	550.400	8 orang	22.419	12 orang	-	- orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												100,00	94,30			200,00	41,36				
												Predikat kinerja		ST	ST			FALSE	SR		
2			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100,00 persen	9.064.090	100,00 persen	5.515.327	100,00 persen	5.770.528	100,00 persen	5.744.137	100,00	99,54	200,00	11.259.464	200,00	124,22			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokume	3.220.820	1 Dokume	411.205	7 Dokumen	379.498	7 Dok	372.608	100,00	98,18	8	783.813	114,29	24,34			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.500.000	1 Tahun	5.039.442	1 Tahun	5.316.555	1,00 Tahun	5.297.349	100,00	99,64	-	-	-	-			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	12 Laporan	343.270	12 Laporan	64.680	12 Laporan	74.475	12 Lap	74.180	100,00	99,60	24	138.860	200,00	40,45			
												Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,14			157,14	32,39		
												Predikat kinerja		ST	ST			FALSE	SR		
3	Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah		Program peningkatan layanan transportasi	Persentase sarana dan prasarana transportasi yang tersedia	100,00 persen	5.866.660	100,00 persen	1.331.489	100,00 persen	1.198.129	100,00 persen	1.192.660	100,00	99,54	200,00	2.524.149	200,00	43,03		PROGR AM STRAT EGIS	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	5 Lintasan	4.420.100	4 Lintasan	1.206.261	5 Lintasan	997.551	5 Lintasan	992.363	100,00	99,48	9,00	2.198.624	180,00	49,74			
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	23 Kali	1.446.560	7 Kali	125.228	5 Kali	200.578	5 Kali	200.297	100,00	99,86	12	325.525	52,17	22,50			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,67		
												Predikat kinerja		ST	ST			FALSE	SR		
4	Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah		Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi	100,00 persen	2.763.998	100,00 persen	473.817	100,00 persen	576.826	100,00 persen	562.226	100,00	97,47	200,00	1.036.043	200,00	37,48		PROGR AM STRAT EGIS	
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Lap	1.783.165	12 Lap	401.784	12 Lap	454.900	12 Lap	444.249	100,00	97,66	24,00	846.033	200,00	47,45			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Tally	12 Lap	980.833	12 Lap	72.033	12 Lap	121.926	12 Lap	117.977	100,00	96,76	24,00	190.010	200,00	19,37			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	97,21		
												Predikat kinerja		ST	ST			FALSE	SR		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPDPovinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDPovinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDPovinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
5	Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah		Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi	Persentase peningkatan kapasitas keselamatan transportasi	100,00 persen	3.995.025	100,00 persen	1.056.628	100,00 persen	2.450.421	100,00 persen	2.318.282	100,00	94,61	200,00	3.374.910	200,00	84,48		PROGR AM STRAT EGIS	
			Pengadaan , Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ	13 Ruas jalan	3.155.025	3 Jas jalan	966.263	1 Ruas Jalan	1.747.339	1 Ruas Jalan	1.740.736	100,00	99,62	4,00	2.706.999	30,77	85,80			
				Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang dipelihara di ruas jalan Provinsi	14 TL 9 WL	840.000	14 TL 9 WL	90.365	14 TL 9 WL	-	14 TL 9 WL		14 TL 9 WL	14 TL 9 WL	14 TL 9 WL	90.365	14 TL 9 WL	10,76			
			Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas jalan Provinsi	-	-	-	-	1 Ruas Jalan	703.082	1 Ruas Jalan	577.546	92,22	82,14	1	577.546	100,00	0,01			
												Rata-rata capaian kinerja (%)		96,11	90,88			65,38	32,19		
												Predikat kinerja		ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.565.630		11.298.649									
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		99,22	97,69			147,72	35,09		
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		ST	ST			FALSE	SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Adanya perencanaan yang baik																					
- Adanya pengendalian dan evaluasi rutin secara berjenjang																					
- Adanya SOP Perencanaan																					
Faktor Penghambat : Anggaran yang ada di DPA lebih kecil dari Renja																					
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan pelaksanaan kegiatan																					
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : belanja agar konsisten dgn perencanaan ke depan																					

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo**

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

Sasaran : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

1 Jumlah Rumah Hunian yang terbangun bagi masyarakat miskin

Sasaran : Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman

1 Jumlah Unit Rumah yang terbangun/rehab bagi Korban bencana alam dan dampak pembangunan

2 Persentase Luasan Kawasan yang ditangani

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
					K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	rp	K	Rp.	K	Rp.		
I	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100 %	28.750.000.000	100 %	5.953.191.930	100 %	1.725.918.594	99,98	1.626.641.317	99,98	94,25	200	6.278.520.194	200	21,84		
				Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100 %	14.000.000.000	100 %	3.153.325.613	100 %	340.834.833	100,00	335.005.657	100,00	98,29	200	3.220.326.744	200	23,00		
1		04 01 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan	35 Lap	3.000.000.000	21 Lap	1.780.786.603	7 Lap	297.735.338	7,00	292.404.007	100,00	98,21	28	1.839.267.404	80,00	61,31		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
		04 1 04 01 02 03	Peningkatan Kinerja Penyusunan Program	Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan	75 Lap	9.250.000.000	15 Lap	1.014.318.000	-	-	-	-	-	-	15	1.014.318.000	20,00	10,97		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
1		04 01 1.02 07	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan	5 Lap	1.750.000.000	3 Lap	358.221.010	1 Lap	43.099.495	1,00	42.601.650	100,00	98,84	4	366.741.340	80,00	20,96		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
1		04 01 1.08 03	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Jasa admin perkantoran	95 %	12.500.000.000	100 %	2.977.417.237	100 %	1.527.237.634	99,94	1.446.989.183	99,94	94,75	200	3.266.815.074	100,00	26,13		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
1		04 01 1.06 02	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 Keg	15.000.000.000	3 Keg	2.466.635.913	1 Keg	125.686.960	1,00	107.855.000	100,00	85,81	4	2.488.206.913	80,00	16,59		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
1		04 01 1.05 09	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	57 Org	1.250.000.000	22 Org	509.138.780	3 Org	72.994.000	3,00	71.797.134	100,00	98,36	25	523.498.207	49,02	41,88		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
												Rata-rata capaian kinerja (%)	99,99	95,19			68,17	29,64		
												Predikat kinerja	ST	ST			T	SR		
I	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman	04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Hunian yang terbangun bagi masyarakat miskin																
				Jumlah Unit Rumah yang terbangun/rehab bagi Korban bencana alam dan dampak pembangunan provinsi	2 Keg	3.100.000.000	2 Keg	2.374.360.184	2 Keg	1.021.722.433	2	1.016.816.305	100,00	99,52	4	3.391.176.489	100	100,00		
1		04 02 1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen	10 Dok	1.750.000.000	6 Dok	1.218.683.921	3 Dok	659.539.746	3	657.254.510	100,00	99,65	9	1.875.938.431	90	100,00		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
1		04 02 1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan	20 Lap	1.350.000.000	10 Lap	1.155.676.263	2 Lap	362.182.687	2	359.561.795	100,00	99,28	12	1.515.238.058	60	100,00		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90
												0	100,00	99,46			75,00	100,00		
												Predikat kinerja	ST	ST			T	ST		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan	
					K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	rp	K	Rp.			
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman	04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kawasan yang di tangani	100 %	28.500.000.000	100 %	10.082.569.611	100 %	3.926.870.831	88	3.441.030.867	87,63	87,63	188	13.523.600.478	100	47,45		01	
				Jumlah Unit Rumah yang terbangun/ rehab bagi Korban bencana alam dan dampak pembangunan provinsi	3.850 Unit	164.500.982.000	2.138 Unit	72.792.366.400	208 Unit	8.535.217.752	150	6.359.627.650	72,12	74,51	2.288	79.151.994.050	100	100,00			
1		04 03 1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Kegiatan Masyarakat sadar kumuh yang dilaksanakan	10 Lap	2.750.000.000	16 Lap	733.617.620	2 Lap	440.079.485	2	440.042.306	100,00	99,99	18	1.173.659.926	100	42,68			
				Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan	10 Lap	1.500.000.000	6 Lap	1.202.527.657	2 Lap	644.281.135	2	637.475.462	100,00	98,94	8	1.840.003.119	80	100,00			
1		04 03 1.01 02	- Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan	10 Lap	2.750.000.000	16 Lap	733.617.620	2 Lap	440.079.485	2	440.042.306	100,00	99,99	18	1.173.659.926	100	42,68			
1		04 03 1.01 09	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan	10 Lap	1.500.000.000	6 Lap	1.202.527.657	2 Lap	644.281.135	2	637.475.462	100,00	98,94	8	1.840.003.119	80	100,00		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen	19 Dok	5.350.000.000	14 Dok	1.435.803.820	3 Dok	529.747.929	1	506.938.810	33,33	95,69	15	1.942.742.630	79	36,31			
				Jumlah Unit Rumah yang terbangun/rehab bagi Korban bencana alam Provinsi dan dampak pembangunan provinsi	3.850 Unit	164.500.982.000	2.138 Unit	72.792.366.400	208 Unit	8.535.217.752	150	6.359.627.650	72,12	74,51	2.288	79.151.994.050	59	48,12			
				Luasan Kawasan yang di tangani	109 Ha	18.900.000.000	47 Ha	6.710.620.514	20 Ha	2.312.762.282	20	1.856.574.289	100,00	80,28	67	8.567.194.803	62	45,33			
1		04 03 1.02 01	- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen	19 Dok	5.350.000.000	14 Dok	1.435.803.820	3 Dok	529.747.929	1	506.938.810	33,33	95,69	15	1.942.742.630	79	36,31		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90	
1		04 03 1.02 03	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Unit Rumah yang terbangun/rehab bagi Korban bencana alam Provinsi dan dampak pembangunan provinsi	3.850 Unit	164.500.982.000	2138 Unit	72.792.366.400	208 Unit	8.535.217.752	150	6.359.627.650	72,12	74,51	2.288	79.151.994.050	59	48,12		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90	
1		04 03 1.02 07	- H16	Luasan Kawasan yang di tangani	109 Ha	18.900.000.000	47 Ha	6.710.620.514	20 Ha	2.312.762.282	20	1.856.574.289	100,00	80,28	67	8.567.194.803	62	45,33		Pemetaan sesuai dengan Kepmen 50 dan Permendagri 90	
												81,09	89,88			76,00	54,49				
												T	T			T	R				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										15.550.564.443	12.779.121.796									REALISASI KEGIATAN PENUNJANG LEBIH BANYAK	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												93,69	94,85			93,69	61,38				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												ST	ST			T	R				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja												: Pendorong Keberhasilan Kinerja yaitu dengan efektifitas dan efisiensi, otoritas (wewenang), disiplin dan inisiatif									
Faktor penghambat												: Masih ada kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan yang dengan pusat dan belum dilaksanakannya kegiatan seleksi jabatan yang menghambat penerapan realisasi									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya												: percepatan kegiatan dan penerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang ada									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD Berikutnya*												: Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi kegiatan belum nampak ditriwulan I, sementara realisasi anggaran teresrap 7,22%. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pendukung lebih besar dibanding belanja output kinerja utama.									

No	Sasaran	No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
				Jumlah benih Cabai yang disalurkan(Ha) :		27.151.049	-	751.710		1.634.406	-	1.565.288	-	96	-	2.316.998	-	9			
				Benih Cabe pengembangan areal (Ha)	400	4.332.095	565	Ha	-	80	Ha	-	25	-	31	-	590	-	148	-	
				benih cabe dalam polybag (Polybag)	1.000.000	4.000.000	70.000	polybag	-	200.000	polybag	-	-	-	-	-	70.000	-	7	-	
				Jumlah Benih Bawang Merah yang disalurkan (Ha)	250	15.523.750	90	Ha	-	50	Ha	-	-	-	-	-	90	-	36	-	
				Jumlah Benih Tomat yang disalurkan (Ha)	125	1.381.408	5	Ha	-	25	Ha	-	-	-	-	-	5	-	4	-	
				Jumlah benih Sayuran lainnya yang disalurkan (Ha)	25	169.513	10	Ha	-	5	Ha	-	-	-	-	-	10	-	40	-	
				Jumlah Benih Tan. Biofarmaka yang disalurkan (Ha)	25	1.744.284	-	Ha	-	-	5	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah bibit Jeruk yang disalurkan (Ha)	25	696.696	-	Ha	-	219.433	5	Ha	-	-	-	-	219.433	-	31	-	
				Jumlah bibit Tanaman Buah lainnya yang disalurkan (Pohon)	55.000	5.950.000	3.000	Pohon	-	12.000	Pohon	-	-	-	-	-	3.000	-	5	-	
				Jumlah Bibit Tanaman Hias yang disalurkan (Tgk/Pohon)	2.500	1.105.126	-	Tgk/Pohon	-	500	Tgk/Pohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Tersedianya Produk Bibit/Benih Sumber Hortikultura (kg/phn)	111.815	7.300.800	-	Kg/pohon	946.585	23.383	Kg/pohon	521	-	-	2	-	521	946.585	0	13	
				Jumlah Benih Dasar (BD) : Savaran (Kg)	75	-	-	Kg	-	71,8	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Benih Pokok (BP) :	18.998	-	9.200	-	1,06	-	521	-	-	-	-	9.721	-	-	-	-	
				Savaran (Kg)	5.200	-	10.000	-	5,151	-	21	-	-	-	0	-	8.342	-	44	-	
				Jumlah bibit unggul buah-buahan (Pohon)	243	-	-	-	-	232	-	-	-	-	-	-	10.000	-	192	-	
				Jumlah bibit tanaman hias (Pohon)	488.785	7.921.756	127.054	-	542.728	-	-	-	-	-	-	-	132.829	542.728	27	7	
				Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang tersertifikasi :	452.785	3.960.878	74.739	Kg	-	110.000	Kg	-	-	-	-	-	74.739	-	17	-	
				Tanaman Savaran (Kg)	36.000	3.960.878	52.915	Pohon	-	8.000	Pohon	-	1.094	-	14	-	53.409	-	148	-	
				Tanaman Buah-Buahan (pohon)	750	4.903.998	725	Ha	709.907	-	709.683	-	699.041	-	99	725	1.408.948	97	29		
				Jumlah Benih Tanaman Semusim dan rempah :	250	3.660.731	525	Ha	-	50	Ha	-	-	-	-	525	-	210	-		
				Jumlah Bibit Cengkeh yang disalurkan (Ha)	500	1.243.267	200	Ha	-	100	Ha	-	-	-	-	200	-	40	-		
				Jumlah Benih Tanaman tahunan dan penyegar (Ha)	-	-	1.130	Ha	1.061.565	535	Ha	-	-	-	-	1.130	1.061.565	-	-		
				Jumlah Bibit Kakao yang disalurkan (Ha)	750	9.186.362	60	Ha	-	150	Ha	1.450	-	-	967	1.510	-	201	-		
				Jumlah Bibit Kelapa yang disalurkan (Ha)	1.925	6.169.367	1.070	Ha	-	385	Ha	10	-	3	1.080	-	-	56	-		
				Pengendalian Tingkat Serangan OPT Tanaman Perkebunan (%)	100	2.250.000	40	%	89.674	20	%	-	-	-	-	40	89.674	40	4		
				Jumlah benih Tanaman Perkebunan yang tersertifikasi (Pohon)	2.000.000	2.000.000	242.220	Pohon	654.872	450.000	Pohon	-	51.462	-	11	293.682	654.872	15	33		
				Jumlah wilayah yang diawasi pederatan benih perkebunan (Kab/Kota)	30	2.350.000	18	Kab/kota	-	6	Kab/kota	-	-	-	-	18	-	60	-		
				Jumlah Pohon induk terpilih tanaman perkebunan (Pohon)	366.500	1.800.000	54.252	Pohon	-	73.500	Pohon	-	16.923	-	23	71.175	-	19	-		
				Jumlah Pakan Ternak Ruminansia (Kg)	60.000	240.000	48.645	Kg	628.125	12.000	Kg	3.254.137	86.299	3.182.882	719	98	134.944	3.811.107	225	1.588	
				Jumlah Pakan Ternak Unggas (Kg)	393.750	2.165.625	107.826	Kg	-	78.750	Kg	-	15.252	-	19	123.078	-	31	-		
				Jumlah bibit ternak sapi yang disalurkan (ekor)	5.750	49.918.500	2.455	Ekor	24.284.175	-	Ekor	2.191.720	53	2.110.753	-	96	2.508	26.394.928	44	53	
				Jumlah bibit ternak kambing yang disalurkan (ekor)	4.000	31.077.400	726	Ekor	-	-	Ekor	-	-	-	-	-	726	-	18	-	
				Jumlah bibit ternak unggas yang disalurkan (ekor)	227.500	21.430.500	75.980	Ekor	-	-	Ekor	-	-	-	-	75.980	-	33	-		
				Jumlah sarana dan prasarana pasca panen komoditi tanaman pangan (Unit)	4.055	305.529.730	221	Unit	983.418	-	-	4.188.887	483	4.155.104	-	99	704	5.138.522	17	2	
				Jumlah sarana dan prasarana pasca panen komoditi Hortikultura (Unit)	1.630	4.068.300	25	Unit	307.655	330	Unit	-	105.152	-	31.864	-	105.177	307.655	6.453	8	
				Jumlah sarana dan prasarana pasca panen komoditi Perkebunan (Unit)	125	9.050.000	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah alat dan mesin pertanian (Unit)	12.945	22.166.603	626	Unit	480.232	-	-	52.510	-	-	-	53.136	480.232	410	2		
				Laporan Pengawasan Pupuk Bersubsidi (Dok)	5	610.510	1	Dok	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20	-		
				Luas areal lahan pertanian yang difasilitasi alsintan Brigade (Ha)	20.444	9.157.650	284.170	Ha	2.031.136	-	-	-	-	-	-	284.170	2.031.136	1.390	22		
				Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (kelompok) Hasil Tanaman Pangan	50	1.657.689	-	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (kelompok) Hasil Hortikultura	50	1.657.689	-	Kelompok	-	-	-	40	-	-	-	40	-	80	-		
				Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (kelompok) Hasil Perternakan	7	757.563	-	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (kelompok) Hasil Perkebunan	5	828.845	1	Kelompok	173.266	-	-	-	-	-	-	1	173.266	20	21		

No	Sasaran	No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Keg. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		149.501	88.660.542	438.342	20.263.197	-	4.773.582	-	4.587.731	96,11	438.342	24.850.928	100	28			
			Jumlah benih padi yang disalurkan (Ha)	62.802	15.892.175	170.673	20.263.197	69.666	2.429.493	24.839,00	2.323.402	35,65	95,83	195.512	22.586.599	100	100			
			Jumlah benih jagung yang disalurkan (Ha)	79.696	22.618.417	267.669	-	79.696	-	158.791,00	-	100,00	0,00	426.460	-	100	-			
			Jumlah benih kedelai yang disalurkan (Ha)	2.494	7.647.870	900	219.344	2.494	-	1.371	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah benih kacang-kacangan yang disalurkan (Ha)	526	946.316	-	-	521	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah benih Umbi-umbian yang disalurkan (Ha)	212	1.261.857	-	-	210	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
			Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan (Kg)	55.500	2.108.500	30.856	995.653	55.500	-	90,00	-	0,16	0,00	30.946	995.653	56	47			
			Jumlah Benih Dasar (RD)	6.900	-	17.530	-	6.900	-	4.335,00	-	62,83	0,00	21.865	-	100	-			
			- Padi Sawah (Kg)	1.500	-	16.785	-	1.500	-	3.335,00	-	22,33	0,00	20.100	-	100	-			
			- Jagung Komposit (Kg)	900	-	746	-	900	-	-	-	0,00	0,00	745	-	83	-			
			- Kedelai (Kg)	900	-	900	-	900	-	1.000,00	-	111,11	0,00	1.000	-	111	-			
			- Kacang-kacangan (Kg)	3.600	-	3.600	-	3.600	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
			Jumlah Benih Pokok (BP)	48.600	-	13.326	-	48.600	-	21.560,00	-	44,36	0,00	34.886	-	72	-			
			- Padi Sawah (Kg)	13.500	-	13.006	-	13.500	-	15.460,00	-	114,52	0,00	28.466	-	211	-			
			- Jagung Komposit (Kg)	2.700	-	-	-	2.700	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
			- Kedelai (Kg)	8.100	-	320	-	8.100	-	6.100,00	-	75,31	0,00	6.420	-	79	-			
			- Kacang-kacangan (Kg)	24.300	-	24.300	-	24.300	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
			Jumlah Benih Tanaman Pangan yang tersertifikasi :	12.216	15.400.399	628.093	294.774	2.378	1.634.406	1.804,42	-	100,00	0,00	629.897	294.774	100	2			
			Tanaman Padi (Ton)	0.144	5.024.136	626.946	-	1.829	-	1.283,17	-	70,16	0,00	628.239	-	100	-			
			Tanaman Jagung (Ton)	2.086	3.232.861	7.726	-	549	-	906,10	-	165,05	0,00	44	-	44	-			
			Tanaman Kedelai (Ton)	751	5.024.136	1.130	-	151,15	-	31,05	-	#VALUE!	0,00	1.170	-	100	-			
			Tanaman Kacang-kacangan (Ton)	271	1.944.267	-	-	57,43	-	-	-	#VALUE!	0,00	-	-	-	-			
			Jumlah benih Cabai yang disalurkan (Ha) :	490	4.332.025	565	751.710	80	1.634.406	-	-	1.565.288	0,00	95,77	-	-	-	9		
			Benih Cabai panjang/bawang putih (Ha)	1.000,000	4.000.000	70,000	-	200,000	-	125,00	-	100,00	0,00	690	-	100	-			
			Benih cabai dalam polibag (Polibag)	250	15.523.750	90	-	50	-	30,00	-	60,00	0,00	120	-	48	-			
			Jumlah Benih Tomat yang disalurkan (Ha)	125	1.381.400	5	-	25	-	5,00	-	20,00	0,00	10	-	8	-			
			Jumlah benih Sayuran lainnya yang disalurkan (Ha)	25	169.513	10	-	5	-	20,00	-	100,00	0,00	30	-	100	-			
			Jumlah Benih Tan. Biofarmaka yang disalurkan (Ha)	25	1.744.284	-	-	5	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
			Jumlah bibit Jenuk yang disalurkan (Ha)	25	696.696	-	219.433	5	-	-	-	100	0,00	-	219.433	100	31			
			Jumlah bibit Tanaman Buah lainnya yang disalurkan (Pohon)	55.000	5.950.000	3.000	-	12.000	-	6.125,00	-	51,04	0,00	9.125	-	17	-			
			Jumlah Bibit Tanaman Hias yang disalurkan (Tgk/Pohon)	2.500	1.105.126	-	-	500	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
			Tersedianya Produksi Bibit/Benih Sumber Hortikultura (kg/pn)	111.815	7.300.800	9.200	946.585	23.383	-	521,00	-	45,833	2,23	0,00	9.721	992.418	9	14		
			Jumlah Benih Dasar (RD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-			
			Sayuran (Kg)	75	-	9.200	-	71,8	-	521,00	-	#VALUE!	0,00	-	-	-	-			
			Jumlah Benih Pokok (BP)	-	-	-	-	1,06	-	-	-	100	0,00	9.721	-	-	-			
			Sayuran (Kg)	18.958	-	8.321	-	17.928	-	21,00	-	0,12	0,00	8.342	-	44	-			
			Jumlah bibit sayur buah-buahan (Pohon)	5.200	-	2.000	-	5.151	-	500,00	-	9,71	0,00	2.500	-	48	-			
			Jumlah bibit tanaman hias (Pohon)	251	-	-	-	23	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
			Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang tersertifikasi :	488.785	7.921.756	127.054	542.728	118.000	-	5.775,17	-	18,496	4,89	0,00	132.829	561.214	27	7		
			Tanaman sawan (Kg)	452.285	3.950.828	74.720	-	110.000	-	7.603,17	-	6,91	0,00	82.342	-	18	-			
			Tanaman Buah-Buahan (pohon)	36.000	3.950.828	52.315	-	8.000	-	10.500	-	131,25	0,00	62.815	-	100	-			
			Jumlah Benih Tanaman Semusim dan rempah -	750	4.903.998	725	709.907	150	709.683	151.107,00	-	699,041	100738,00	98,50	151.832	1.408.948	20.244	29		
			Jumlah Bibit Tebu yang disalurkan (Ha)	250	3.680.731	525	-	50	-	-	-	0,00	0,00	525	-	100	-			
			Jumlah Bibit Cengkeh yang disalurkan (Ha)	500	1.243.267	200	-	100	-	250,00	-	250,00	0,00	450	-	90	-			
			Jumlah Benih Tanaman tahunan dan perennar (Ha)	-	-	1.130	1.061.565	535	-	1.510,00	-	99,740	100,00	0,00	2.640	1.161.305	-	-		
			Jumlah Bibit Kabao yang disalurkan (Ha)	750	9.186.362	60	-	150	-	1.624,00	-	1082,67	0,00	1.684	-	100	-			
			Jumlah Bibit Kelapa yang disalurkan (Ha)	1.925	6.169.367	1.070	-	385	-	660,00	-	171,43	0,00	1.730	-	90	-			
			Pengendalian Tingkat Serangan OPT Tanaman Perkebunan (%)	100	2.250.000	40	89.674	20	-	-	-	0,00	0,00	40	89.674	40	4			
			Jumlah benih Tanaman Perkebunan yang tersertifikasi (Pohon)	2.000.000	2.000.000	242.220	654.872	450.000	-	-	-	51,462	0,00	242.220	706.334	12	35			
			Jumlah wilayah yang diawasi peredaran benih perkebunan (Kab/kota)	30	2.350.000	18	-	6	-	141.162,00	-	2352700,00	0,00	141.180	-	470.600	-			
			Jumlah Pohon induk terpilih tamanan perkebunan (Pohon)	366.500	1.800.000	54.252	-	73.500	-	6,00	-	0,01	0,00	54.258	-	15	-			

No	Sasaran	No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
			Sub Keg. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		149.501	88.660.542	438.342	Ha	20.263.197	149.362	2.426.493	16.923	Ha	2.323.402	100	96	455.265	Ha	22.586.559	100,00	25,48	
			Jumlah benih padi yang disalurkan (Ha)	69.805	15.842.125	170.672	Ha	20.263.197	69.666	Ha	24.839	24.839	Ha	-	100	-	-	Ha	-	100,00	-	
			Jumlah benih jagung yang disalurkan (Ha)	79.696	72.818.417	267.669	Ha	-	79.696	Ha	158.791	Ha	-	100	-	-	426.460	Ha	-	100,00	-	
			Jumlah benih kedelai yang disalurkan (Ha)	2.494	7.647.870	900	Ha	219.344	2.494	Ha	1.371	Ha	-	100	-	-	2.271	Ha	219.344	91	2,87	
			Jumlah benih kacang-kacangan yang disalurkan (Ha)	526	946.316	-	Ha	-	521	Ha	-	Ha	-	-	-	-	Ha	-	-	-	-	
			Jumlah benih Umbi-umbian yang disalurkan (Ha)	212	1.261.857	-	Ha	-	210	Ha	-	Ha	-	-	-	-	Ha	-	-	-	-	
			Terselenggara Benih Sumber Tanaman Pangan (Kg)	55.500	2.108.500	30.856	Kg	995.653	55.500	Kg	90	Kg	-	100	-	30.946	Kg	995.653	55,76	42,22		
			Jumlah Benih Dasar (RD)	6.900	-	17.530	-	-	6.900	-	3.332	-	-	-	-	-	20.865	-	-	302,30	-	
			- Padi Sawah (Kg)	1.500	-	16.785	Kg	-	1.500	Kg	2.035	-	100	-	-	-	18.620	-	-	100,00	-	
			- Jagung Komposit (Kg)	900	-	745	Kg	-	900	Kg	-	-	-	-	-	-	745	-	-	82,78	-	
			- Kedelai (Kg)	900	-	-	Kg	-	900	Kg	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	111,11	-		
			- Kacang-kacangan (Kg)	2.600	-	-	Kg	-	2.600	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			- Umbi-umbian (Kg)	48.600	-	-	BP	-	48.600	BP	-	-	-	-	-	-	21.560	-	-	44,36	-	
			- Padi Sawah (Kg)	13.500	-	13.006	Kg	-	13.500	Kg	15.460	-	100	-	-	-	28.456	-	-	210,86	-	
			- Jagung Komposit (Kg)	2.200	-	-	Kg	-	2.200	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			- Kedelai (Kg)	8.100	-	320	Kg	-	8.100	Kg	6.100	-	-	-	-	-	6.420	-	-	79,26	-	
			- Kacang-kacangan (Kg)	24.300	-	-	Kg	-	24.300	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Benih Tanaman Pangan yang tersertifikasi :	12.216	15.400.399	628.093	-	294.774	2.378	-	1.804	-	100	-	-	629.887	-	294.774	100	1,91		
			Tanaman Padi (Ton)	9.144	5.064.136	626.946	Ton	-	1.282	Ton	1.282	Ton	100	-	-	626.229	Ton	-	100	-	-	
			Tanaman Jagung (Ton)	2.006	3.322.861	7.226	Ton	-	906	Ton	906	Ton	100	-	-	914	Ton	-	100	-	-	
			Tanaman Kedelai (Ton)	255	5.064.136	1.126	Ton	-	15.145	Ton	31	Ton	100	-	-	1.126	Ton	-	100	-	-	
			Tanaman Kacang-kacangan (Ton)	221	1.944.262	-	Ton	-	57.43	Ton	-	Ton	-	-	-	-	Ton	-	-	-	-	
			Sub Keg. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		27.151.049	-	-	751.710	-	1.624.406	1.565.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Benih Cabe pengembasaan areal (Ha)	400	4.332.095	565	Ha	-	80	Ha	125	-	-	0,00	-	125	Ha	751.710	-	2,77	-	
			benih cabe dalam polybag (Polybag)	1.000.000	4.000.000	70.000	polybag	-	200.000	polybag	-	Ha	-	100	0,00	565	Ha	-	100,00	-	-	
			Jumlah Benih Bawang Merah yang disalurkan (Ha)	250	15.523.750	90	Ha	-	50	Ha	30	polybag	0	0,00	70.030	polybag	-	-	7,00	-	-	
			Jumlah Benih Tomat yang disalurkan (Ha)	125	1.381.408	5	Ha	-	25	Ha	5	Ha	-	100	0,00	95	Ha	-	38,00	-	-	
			Jumlah benih Sayuran lainnya yang disalurkan (Ha)	25	169.513	10	Ha	-	5	Ha	20	Ha	-	-	0,00	25	Ha	-	20,00	-	-	
			Jumlah Benih Tan. Biofarmaka yang disalurkan (Ha)	25	1.744.284	-	Ha	-	-	Ha	-	-	-	-	0,00	10	Ha	-	40,00	-	-	
			Jumlah bibit jeruk yang disalurkan (Ha)	25	606.606	-	Ha	219.432	6	Ha	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah bibit Tanaman buah lainnya yang disalurkan (Pohon)	55.000	5.950.000	3.000	Pohon	-	12.000	Pohon	6.125	Ha	-	122.500	-	6.125	Ha	219.432	24.500	31,50	-	
			Jumlah Bibit Tanaman Hias yang disalurkan (Tgk/Pohon)	2.500	1.105.126	-	Tgk/Pohon	-	500	Tgk/Pohon	-	Pohon	-	-	-	3.000	Pohon	-	5,45	-	-	
			Terselenggara Produk Benih/Benih Sumber Hortikultura (kg/pn)	111.815	7.300.800	-	Kg/pohon	946.585	23.383	Kg/pohon	521	Tgk/Pohon	-	-	-	521	Tgk/Pohon	-	20,84	-	-	
			Jumlah Benih Dasar (RD) :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Sausuran (Kg)	75	-	-	Kg	-	21,8	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	946.585	-	12,97	
			Jumlah Benih Padiok (RD) :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Sausuran (Kg)	18.998	-	18.321	Kg	-	23.314	Kg	521	Kg	-	-	-	521	Kg	-	684,67	-	-	
			Jumlah bibit unggul buah-buahan (Pohon)	5.200	-	10.000	Pohon	-	5.151	Pohon	500	Kg	-	100	-	18.342	Kg	-	-	-	-	
			Jumlah bibit tanaman hias (Pohon)	243	-	-	Pohon	-	222	Pohon	-	-	-	-	-	10.000	Pohon	-	100,00	-	-	
			Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang tersertifikasi :	488.795	7.921.756	127.054	-	542.728	-	5.775	Pohon	-	-	2.489	5.775	Pohon	-	2.376,61	-	-	-	
			Tanaman sausuran (Kg)	462.285	3.960.828	74.729	Kg	-	110.000	Kg	-	-	-	-	-	124.657	-	542.728	-	6,85	-	
			Tanaman Buah-Buahan (pohon)	36.000	3.960.828	52.315	Pohon	-	8.000	Pohon	-	-	-	10	-	85.239	Kg	-	18,82	-	-	
			Sub Keg. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		750	4.903.998	725	Ha	709.907	150	709.683	151.107	699.041	100	98,50	151.832	1.408.948	20.244,27	28,73			
			Jumlah Benih Tebu yang disalurkan (Ha)	250	3.660.731	525	Ha	-	50	Ha	-	Ha	-	100	-	525	Ha	-	100,00	-	-	
			Jumlah Bibit Cengkeh yang disalurkan (Ha)	500	1.243.267	200	Ha	-	100	Ha	250	Ha	-	250	-	450	Ha	-	90,00	-	-	
			Jumlah Benih Tanaman tahunan dan perennar (Ha)	-	-	1.130	Ha	1.061.565	535	Ha	-	1.510	Ha	-	100	-	2.640	Ha	1.061.565	-	36,38	
			Jumlah Bibit Kakao yang disalurkan (Ha)	260	9.186.262	60	Ha	-	150	Ha	1.684	Ha	-	-	-	1.684	Ha	-	224,53	-	-	

No	Sasaran	No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp.			
				Jumlah Bibit Kelapa yang disalurkan (Ha)	1,925	Ha	6.169.567	1,070	Ha	385	Ha	660	Ha	100	-	1.720	Ha	89,87	-						
				Pengendalian Tingkat Sarangan OPT Tanaman Perkebunan (%)	100	%	2.250.000	40	%	89,674	20	%	-	%	-	40	%	89,674	40,00	3,99					
				Jumlah berih Tanaman Perkebunan yang tersertifkasi (Pohon)	2.000.000	Pohon	2.000.000	242.220	Pohon	654,872	450.000	Pohon	141,162	Pohon	31	-	383.382	Pohon	654,872	19,17	32,74				
				Jumlah wilayah yang diawasi peredaran benih perkebunan (Kab/kota)	30	Kab/kota	2.350.000	18	Kab/kota	-	6	Kab/kota	6	Kab/kota	100	-	24	Kab/kota	-	80,00	-				
				Jumlah Pohon induk terpilih tanaman perkebunan (Pohon)	366.500	Pohon	1.800.000	54.252	Pohon	-	73.500	Pohon	5.895	Pohon	8	-	60.147	Pohon	-	16,41	-				
				Keg. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pakan Ternak Ruminansia (Kg)	572	Kg	7.485.992	162	Kg	3.038.105	123	Kg	3.254.137	81.384,00	3.182.982	66165,85	97,81	81.546	6.221.087	14.256	83			
				Sub Keg. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	Jumlah Pakan Ternak Unggas (Kg)	328.729	Kg	7.507.594	162.409	Kg	4.084.209	71.668	Kg	81.384,00	81.384,00	3.182.982	66.166	97,81	81.546	6.221.087	14.256,29	83,10			
					Jumlah kelahiran ternak (ekor) :	572	Ekor	7.485.992	162	Ekor	3.038.105	123	Ekor	3.254.137	81.384	3.182.982	66.166	97,81	81.546	6.221.087	14.256,29	83,10			
					Ternak sapi	297	Ekor	6.528.011	120	Ekor	3.038.105	63	Ekor	20	-	32	-	144	3.038.105	48,48	46,19				
					Ternak kambing	275	Ekor	907.882	36	Ekor	60	Ekor	4	-	42	-	42	-	42	15,21	-				
					Produksi bibit ayam/DOC (ekor)	328.729	Ekor	7.507.594	162.409	Ekor	4.084.209	71.668	Ekor	81.380	81.380	3.182.982	114	-	243.769	4.084.209	74,15	54,40			
				Keg. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak sapi yang disalurkan (ekor)	5.750	Ekor	49.918.500	2.455	Ekor	24.284.175	1.150	Ekor	2.191.720	154,00	2.110.753	13,39	96,31	2.609	26.394.928	45	53			
					Jumlah bibit ternak kambing yang disalurkan (ekor)	4.000	Ekor	31.077.400	726	Ekor	-	800	Ekor	-	-	0,00	0,00	726	-	-	18	-			
					Jumlah bibit ternak unggas yang disalurkan (ekor)	227.500	Ekor	21.430.500	75.980	Ekor	-	45.500	Ekor	-	66.108,00	-	145,29	0,00	142.088	-	62	-			
					Jumlah Pakan Ternak Ruminansia (Kg)	60.000	Kg	240.000	48.645	Kg	628.125	12.000	Kg	-	338.637,00	-	100,00	0,00	387.282	628.125	100	100			
					Jumlah Pakan Ternak Unggas (Kg)	393.750	Kg	7.165.625	107.826	Kg	-	78.750	Kg	-	122.823,00	-	155,97	0,00	230.649	-	59	-			
				Sub Keg. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak sapi yang disalurkan (ekor)	5.750	Ekor	49.918.500	2.455	Ekor	24.284.175	1.150	Ekor	2.191.720	154	2.110.753	13	96,31	2.609	26.394.928	45,37	52,88			
					Jumlah bibit ternak kambing yang disalurkan (ekor)	4.000	Ekor	31.077.400	726	Ekor	-	800	Ekor	-	-	-	-	726	-	-	18,15	-			
					Jumlah bibit ternak unggas yang disalurkan (ekor)	227.500	Ekor	21.430.500	75.980	Ekor	-	45.500	Ekor	-	66.108	Ekor	-	145	-	142.088	-	62,46	-		
				Sub Pengadaan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pakan Ternak Ruminansia (Kg)	60.000	Kg	240.000	48.645	Kg	628.125	12.000	Kg	-	338.637	Kg	-	2.822	-	387.282	628.125	645,47	261,72		
					Jumlah Pakan Ternak Unggas (Kg)	393.750	Kg	7.165.625	107.826	Kg	-	78.750	Kg	-	122.823	Kg	-	156	-	230.649	-	59,58	-		
				Keg. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana panen komoditi tanaman pangan (Unit)	4.055	Unit	305.529.730	221	Unit	983.418	884	Unit	4.188.887	394,00	4.155,104	44,57	99,19	615	5.138.522	15	2			
					Jumlah sarana dan prasarana pasca panen komoditi Hortikultura (Unit)	1.630	Unit	4.068.300	25	Unit	307.655	330	Unit	-	105.102,00	-	31849,09	0,00	105.127	307.655	6.450	8			
					Jumlah sarana dan prasarana pasca panen komoditi Perkebunan (Unit)	125	Unit	9.050.000	-	Unit	-	25	Unit	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
					Jumlah alat dan mesin pertanian (Unit)	12.945	Unit	27.166.602	626	Unit	480.232	7.290	Unit	-	52.510,00	-	1882,08	0,00	53.136	480.232	410	2			
					Laporan Pengawasan Pupuk Bersubsidi (Dok)	5	Dok	610.510	1	Dok	-	1	Dokumen	-	-	-	0,00	0,00	1	-	20	-			
					Luas areal lahan pertanian yang difasilitasi asuransi Bispaga (Ha)	20.444	Ha	9.157.650	284.170	Ha	2.031.136	4.283	Ha	-	118,65	-	2,77	0,00	284.289	2.031.136	100	22			
					Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (Kelompok) Hasil Tanaman Pangan	50	Kelompok	1.657.689	-	Kelompok	-	10	Kelompok	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
					Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (Kelompok) Hasil Hortikultura	50	Kelompok	1.657.689	-	Kelompok	-	10	Kelompok	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
					Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (Kelompok) Hasil Peternakan	7	Kelompok	757.563	-	Kelompok	-	1	Kelompok	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-			
					Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (Kelompok) Hasil Perkebunan	5	Kelompok	828.845	1	Kelompok	173.266	2	Kelompok	-	-	-	0,00	0,00	1	173.266	20	21			

No	Sasaran	No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket							
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
			Sub Keg. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pasca panen komoditi tanaman pangan (Unit)	4.055	Unit	305.529.730	221	Unit	983.418	884	Unit	4.188.887	394	Unit	4.155.104	45	99,19	615	K	5.138.522	15,17	Rp.	1,68			
				Jumlah sarana dan prasarana pasca panen komoditi Hortikultura (Unit)	1.630	Unit	4.068.300	25	Unit	307.655	330	Unit	-	105.102	-	-	31.849	-	-	105.127	K	307.655	6.449,51	Rp.	7,56		
				Jumlah sarana dan prasarana pasca panen komoditi Perkebunan (Unit)	125	Unit	9.050.000	-	Unit	-	25	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah alat dan mesin pertanian (Unit)	12.945	Unit	27.166.603	626	Unit	480.232	2.790	Unit	-	57.510	-	1.882	-	57.136	-	-	480.232	K	480.232	410,48	Rp.	2,17	
				Laporan Pengawasan Pupuk Bersubdi (Dok)	5	Dok	610.510	1	Dok	-	1	Dok	-	-	-	-	1	-	-	1	K	-	20,00	-	-		
				Luas areal lahan pertanian yang difasilitasi asuransi BPS (Ha)	20.444	Ha	9.157.650	284.170	Ha	2.031.136	4.283	Ha	-	119	-	3	-	284.289	-	-	2.031.136	K	1.390,57	Rp.	22,18		
				Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (Kelompok Hasil Tanaman Pangan)	50	Kelompok	1.657.689	-	Kelompok	-	10	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (Kelompok Hasil Hortikultura)	50	Kelompok	1.657.689	-	Kelompok	-	10	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (Kelompok Hasil Perkebunan)	7	Kelompok	757.563	-	Kelompok	-	1	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Bantuan Usaha Pengolahan Hasil (Kelompok Hasil Perkebunan)	5	Kelompok	828.845	1	Kelompok	173.266	2	Kelompok	-	-	-	-	-	1	-	-	173.266	K	20,00	Rp.	20,90		
3			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Tingkat Serangan OPT Tanaman Pangan (maks 3%)	15	%	7.000.000	3	%	851.840	3	%	681.464	-	-	658.257	-	96,59	3	3	K	1.510.097	20,00	Rp.	21,57		
				Luas Penerapan Penanganan DPI (Ha)	190	Ha	1.470.000	240	Ha	-	30	Ha	-	312	-	1.040	-	-	-	552	K	-	100,00	-	-		
				Persentase Tingkat Serangan OPT Tanaman Pangan (maks 3%)	15	%	7.000.000	3	%	851.840	3	%	681.464	-	-	658.257	0,00	96,59	3	3	K	1.510.097	20	Rp.	21,57		
				Luas Penerapan Penanganan DPI (Ha)	190	Ha	1.470.000	240	Ha	-	30	Ha	-	312	-	1.040	-	1040,00	0,00	552	K	-	100,00	-	-		
				Persentase Tingkat Serangan OPT Hortikultura (maks 3%)	15	%	5.550.000	9	%	595.658	3	%	-	25	-	816,67	0,00	34	-	595.658	K	223,3333333	10,73	-	-		
				Luas Penerapan Penanganan DPI (Ha)	40	Ha	470.000	5.020	Ha	-	5.000	Ha	-	41	-	0,82	0,00	5.061	-	-	100	K	-	0,00	-		
				Persentase Tingkat Serangan OPT Tanaman Pangan (maks 3%)	15	%	7.000.000	3	%	851.840	3	%	681.464	-	-	658.257	-	96,59	3	3	K	1.510.097	20	Rp.	21,57		
				Luas Penerapan Penanganan DPI (Ha)	150	Ha	1.000.000	240	Ha	-	30	Ha	-	312	-	1.040	-	-	-	552	K	-	100	-	-		
				Persentase Tingkat Serangan OPT Hortikultura (maks 3%)	15	%	5.550.000	9	%	595.658	3	%	-	25	-	817	-	-	34	%	595.658	K	223	10,73	-		
				Luas Penerapan Penanganan DPI (Ha)	40	Ha	470.000	5.020	Ha	-	5.000	Ha	-	41	-	1	-	-	-	5.061	K	-	100	-	-		
				Pengendalian Tingkat Serangan OPT Tanaman Perkebunan (%)	100	%	2.250.000	40	%	89.674	20	%	-	35	-	174	-	-	-	75	%	89.674	K	75	3,99	-	
													Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja		1.857,48	96,59											
															S	SR											
4	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah ternak yang tertangani (ekor) :	850.000	Ekor	7.487.230	54.004	Ekor	1.377.970	170.000	Ekor	835.381	825.511	Ekor	828.794	486	99	879.515	2.206.764	103,47	29,47			DISTAN		
				- Ruminansia	100.000	Ekor	7.487.230	46.250	-	-	20.000	Ekor	-	12.351	-	-	62	#DIV/0!	58.610	-	58,61	-	-	-	-		
				- Non Ruminansia	750.000	Ekor	-	7.745	-	-	150.000	Ekor	-	813.160	-	-	543	-	820.905	-	109,45	-	-	-	-		
				Jumlah Pengujian/Pemeriksaan Penyakit Hewan (Sampel)	3.500	Sampel	4.909.334	9.421	Sampel	773.085	600	Sampel	-	3.270	-	-	100	-	12.691	-	773.085	K	100	15,75	-		
				Bertambahnya jumlah ternak yang dipotong di RPH (ekor)	19.500	Ekor	13.194.144	1.473	Ekor	684.925	-	Ekor	-	-	-	-	-	-	1.473	-	684.925	K	7,55	5,19	-		
				Jumlah sampel	3.069	Sampel	3.019.757	1.802	Sampel	463.436	608	Sampel	-	741	-	-	100	-	2.543	-	463.436	K	82,86	15,35	-		
			Keg.Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah ternak yang tertangani (ekor) :	850.000		7.487.230	54.004		39.184	170.000		464.531	825.511		464.050	485,99	99,90	879.515		503.234	103,47	6,72				
				- Ruminansia	100.000	Ekor	7.487.230	46.250	-	39.184	20.000		464.531	12.351		464.050	61,76	99,90	58.610		503.234	58,61	6,721				
				- Non Ruminansia	750.000	Ekor	-	7.745	-	-	150.000		-	813.160		-	542,11	0,00	820.905		-	109,45	0,000				
				Bertambahnya Rumah Potong Hewan (Unit)	3	Unit	7881250	-	Unit	39184	-	Unit	-	-	-	0,00	1,00	-	-	39.184	K	0,00	1,000	-			
				Bertambahnya jumlah pengawas kesmavet dan Iru Sembelih (Orang)	3	Org	2.293.137	51	Org	0	87	Org	-	-	-	0,00	2,00	-	51	-	-	K	13,60	2,000	-		

No	Sasaran	No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
			Subkeg. Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terbangunnya Rumah Potong Hewan (Unit)	3 Unit	7.881.250	- Unit	39.184	- Unit	464.531	-	464.050	-	99,90	-	503.234	-	6,39				
				Bertambahnya jumlah pengawas kesmavet dan furs pembelth (Orang)	375 Org	2.293.137	51 Org		87 Org						51	-	13,60					
				Jumlah ternak yang terawatani (ekor)	850.000	2.487.230	54.004		170.000			625.511	-	486		625.515	-	103,47				
				- Ruminansia	100.000	2.487.230	46.492		20.000			12.351	-	62		38.610	-	38,61				
				- Mer Ruminansia	750.000		7.296		150.000			613.160	-	582		820.905	-	109,45				
			Keg. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian/Pemeriksaan Penyakit Hewan (sampel)	3.500 Sampel	4.909.334	9.421		773.085	800 Sampel	370.850	3.270	364.744	100,00	98,35	12.691	1.137.829	100,00	23,18			
				Jumlah Sampel	3.069	3.019.757	1.802		463.436	608 Sampel	-	741	-	100,00	0,00	2.543	463.436	82,86	15,35			
			Sub Keg. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian/Pemeriksaan Penyakit Hewan (PAH)(Sampel)	3.500 Sampel	4.909.334	9.421		773.085	800 Sampel	370.850	3.270	364.744	-	98,35	12.691	1.137.829	362,60	23,18			
				Jumlah sampel (PAH ASUH)	3.069	3.019.757	1.802		463.436	608 Sampel	-	741	-	1	-	2.542	463.436	82,86	15,35			
											Bata-rata capaian kinerja (%)											
											Predikat kinerja		S	SR					ST	SR		
5	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah metodologi penyuluhan (metodologi)	30	2.745.000	9	343.435	6	168.824	6	168.204	100	15	511.639	50	18,63892805					
				Jumlah kelompok tani yang dikukuhkan (Poktan)	1.820	755.000	300	549.322	-	Poktan	-	20	-	0	0	320	549.322	18	72,75786424			
				Dokumen database kelompok tani /simultanan (Dok)	5	1.750.000	1	Dokumen	-	Dokumen	-	1	-	0	0	2	-	40	0			
				Jumlah penyuluh yang menerima insentif (orang)	385	2.840.000	633	850.273	364	393.168	296	392.047	81	100	929	1.242.320	100	43,74365849				
				Jumlah kegiatan bimtek ketenagaan penyuluh (Kali)	15	1.500.000	3	Kali	1	Kali	30	-	3000	0	33	-	220	0				
				Jumlah aparaturnya pertanian yang mengikuti pelatihan (orang)	750	7.861.925	120		77	Org	403.663	487	380.222	632	94	607	380.222	81	4,84			
				Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang mengikuti pelatihan teknis (orang)	1.500	5.169.075	325	Org	822.246	300	Org	2.240.539	145	1.723.596	48	77	470	2.545.842	31	49,25141316		
				Terbangunnya percontohan terasering (Unit)	50	50.941.931	15	Unit	514.721	-	-	-	0	0	15	514.721	30	1,010407316				
				Penguatan Kawasan Pertanian Terpadu (Lokasi)	10	2.500.000	2	Lokasi	124.021	-	-	-	0	0	2	124.021	20	4,96				
				Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	2.250	13.031.000	445	Orang	822.246	-	-	-	0	0	445	822.246	20	6,309924096				
			Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang dikukuhkan (Poktan)	1.820	755.000	300	Poktan	549.322	-	-	20,00	-	0	0,00	320	549.322	18	72,76			
				Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang mengikuti pelatihan teknis (orang)	1.500	5.169.075	325	Org	822.246	300	Org	2.240.539	145,00	1.723.596	48	76,93	470	2.545.842	31	49,25		
			Sub Keg. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah kelompok tani yang dikukuhkan (Poktan)	1.820	755.000	300	Poktan	549.322	364	Poktan	393.168	20	392.047	5,49	99,71	320	941.369	17,58	124,68		
				Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Pertanian (Kali)	20	2.000.000	3,00	Kali	115.623	4	Kali	-	9	-	225,00	-	12	115.623	60	41		
				Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang mengikuti pelatihan teknis (orang)	1.500	5.169.075	325	Org	822.246	300	Org	-	145	-	48,33	-	470	822.246	31	-		
			Keg. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang menerima insentif (orang)	385	2.840.000	633	Orang	850.273	364	Org	393.168	296	392.047	81	99,71	929	1.242.320	100	43,74		

No	Sasaran	No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp.		
				Jumlah kegiatan bimtek ketenagaan penyuluh (Kali)	15	Kali	1.500.000	3	Kali	-	1	Kali	30,00	-	3000	0,00	33	-	220,00	0,00				
				Jumlah metodologi penyuluhan (Metodologi)	30	Metodologi	2.745.000	9	Metodologi	343.435	6	Metodologi	168.824	6,00	168.204	100	99,63	15	511.639	50	18,64			
			<i>Subkeg. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASU</i>	<i>Jumlah penyuluh yang menerima insentif (orang)</i>	385	Org	2.840.000	633	Org	850.273	77	Org	403.663	74	74.000	96,10	18,33	707	924.273	194	33			
				<i>Jumlah kegiatan bimtek ketenagaan penyuluh (Kali)</i>	15	Kali	1.500.000	3	Kali	-	3	Kali	30	-	306.222	100,00	-	33	-	220	62			
				<i>Jumlah metodologi penyuluhan (Metodologi)</i>	30	Metodologi	2.745.000	9	Metodologi	343.435	6	Metodologi	168.824	6	168.204	100,00	99,63	15	511.639	50,00	18,64			
			Keg. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti pelatihan (orang)	750	Org	7.861.925	120	Org	-	77	Org	403.663	487,00	380.222	632	94,19	607	380.222	81	4,84			
				Dokumen database kelompok tani /Simluhan (Dok)	5	Dokumen	1.750.000	1	Dokumen	-	-	-	1,00	-	0	0,00	2	-	-	40	0,00			
			Sub Keg. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti pelatihan (orang)	750	Org	7.861.925	120	Org	-	150	Org	487	-	487	-	324,67	607	-	81	-			
				Dokumen database kelompok tani /Simluhan (Dok)	5	Dok	1.750.000	1	Dok	1	1	Dok	1	-	100,00	-	2	-	-	40,00	-			
			Sub keg. Pelaksanaan Penyuluh dan Pemberdayaan Petani	Terkalangan pelatihan bagi penyuluh pendamping (angkatan)	-	-	-	-	-	9	Angkatan	2.240.539	-	-	1.723.596	100,00	76,93	9	1.723.596	-	-			
				Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja											965,53	92,62					77	38		
6			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Luas lahan sawah yang diasuransikan / AUIP (Ha)	5000	Ha	732.612	12.371	Ha	354.992	1.000	Ha	220.916	2.784	Ton/Ha	220.074	278	-	15.155	Ton/Ha	575.066	303	SR	78
				Jumlah Ternak Sapi yang diasuransikan / AUIS (Ekor)	5.000	Ekor	732.612	15.775	Ekor	-	1.000	Ekor		2.839	Ha	-	284	-	18.614	Ha	-	372	-	-
				Laporan evaluasi kelompok PUAP (Dok)	5	Dok	457.883	-	Dok	-	1	Dok			Ton/Ha	-	-	-	Ton/Ha	-	-	-	-	-
				Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Pertanian (Kali)	20	Kali	2.000.000	3	Kali	115.623	-								3	115.623	15	6		
				Laporan movev pengelolaan lahan dan air (Dok)	10	Dokumen	1.529.440	2	Dokumen	445.865	-								2	445.865	20	29		
				Dokumen perencanaan pengelolaan lahan dan air (Dok)	5	Dokumen	335.781	2	Dokumen	-	-								2	-	40	0		
				Dokumen data existing jaringan irigasi tersier (Dokumen)	5	Dokumen	503.671	1	Dokumen	-	-								1	-	20	0		
				Meningkatnya sarana prasarana pendukung UPTD Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pertanian (%)	-	%	-	100	%	5.160.509	100,00	%	3.571.800	100	3.265.257	100	91	200	8.425.766	-	-			
				Meningkatnya sarana prasarana pendukung Brigade Alsiintan (%)	-	%	-	100	%	4.350.055	-							100	4.350.055	-	-			
				Meningkatnya sarana prasarana pendukung Balai Perbibitan Ternak dan Laboratorium Kesmavet (%)	-	%	-	100	%	4.504.591	-							100	4.504.591	-	-			
			Keg. Penataan Prasarana Pertanian	Meningkatnya sarana prasarana pendukung UPTD Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pertanian (%)	-	%	-	100	%	5.160.509	100	%	3.571.800	100	3.265.257	100	91	200	8.425.766	-	-			
				Meningkatnya sarana prasarana pendukung Brigade Alsiintan (%)	-	%	-	100	%	4.350.055	100	%	-	100	-	100	0	200	4.350.055	-	-			
				Meningkatnya sarana prasarana pendukung Balai Perbibitan Ternak dan Laboratorium Kesmavet (%)	-	%	-	100	%	4.504.591	100	%	-	100	-	100	0	200	4.504.591	-	-			
				Jumlah Luas lahan sawah yang diasuransikan / AUIP (Ha)	5.000	Ha	732.612	12.371	Ha	354.992	1.000	Ha	220.916	3.292	220.074	100	100	15.662	575.066	100	78			
				Jumlah Ternak Sapi yang diasuransikan / AUIS (Ekor)	5.000	Ekor	732.612	15.775	Ekor	-	1.000	Ekor		4.229	-	423	0	20.004	-	100	-			
				Laporan evaluasi kelompok PUAP (Dok)	5	Dokumen	457.883	-	Dokumen	-	1	Dok				0	0	-	-	-	-			
				Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Pertanian (Kali)	20	Kali	2.000.000	3	Kali	115.623	4	Kali				0	0	3	115.623	15	6			
				Laporan movev pengelolaan lahan dan air (Dok)	10	Dokumen	1.529.440	2	Dokumen	445.865	2	Dok				0	0	2	445.865	20	29			
				Dokumen perencanaan pengelolaan lahan dan air (Dok)	5	Dokumen	335.781	2	Dokumen	-	1	Dok				0	0	2	-	40	-			
				Dokumen data existing jaringan irigasi tersier (Dokumen)	5	Dokumen	503.671	1	Dokumen	-	1	Dok				0	0	1	-	20	-			

No	Sasaran	No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)			Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp. (000)	%	K	Rp. (000)	%	K	Rp. (000)	%	K	Rp. (000)	%	K	Rp. (000)	%	K	Rp. (000)	%	K	Rp. (000)	%		
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Meningkatnya sarana prasarana pendukung UPTD Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pertanian (%)	-	%	-	100	%	3.160.509	100	%	3.571.800	100,00		3.265.257	100,00	91,42	200		8.425.766	-		-			
				Meningkatnya sarana prasarana pendukung Brigade Alasintan (%)	-	%	-	100	%	4.350.055	100	%		100		-	100,00	-	200		4.350.055	-		-			
				Meningkatnya sarana prasarana pendukung Balai Perbibitan Ternak dan Laboratorium Kesehatan (%)	-	%	-	100	%	4.504.591	100	%		100		-	100,00	-	200		4.504.591	-		-			
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemetaan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Luas lahan sawah yang diuruskan / AUIP (Ha)	5.000	Ha	732.612	12.371	Ha	354.992	1.000	Ha	220.916	3.292		220.074	329,18	99,62	15.662		575.066	313		78			
				Jumlah Ternak Sapi yang diuruskan / AUIP (Ekor)	5.000	Ekor	732.612	15.775	Ekor	-	1.000	Ekor		3.380		-	338,00	-	19.155		383		-				
				Laporan evaluasi jaringan irigasi (Dok)	5	Dokumen	457.883	-	Dokumen	-	1	Dok		2.839		-	283.900,00	-	2.839		56.780		-				
				Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Pertanian (Kali)	20	Kali	2.000.000	3	Kali	115.623	4	Kali		-		-	-	-	3		115.623	15		6			
				Laporan movev pengelolaan lahan dan air (Dok)	10	Dokumen	1.529.440	2	Dokumen	445.865	2	Dok		-		-	-	-	2		445.865	20		29			
				Dokumen perencanaan pengelolaan lahan dan air (Dok)	5	Dokumen	335.781	2	Dokumen	-	1	Dok		-		-	-	-	2		-	40		-			
				Dokumen data existing jaringan irigasi tersier (Dokumen)	5	Dokumen	503.671	1	Dokumen	-	1	Dok		-		-	-	-	1		-	20		-			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		411,45	95,52			49	38						
														Predikat kinerja		R	SR			SR	SR						
														62.295.931		60.262.681											
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM / PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		585,04	71,96			72,09	28,94						
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM / PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		R	SR			S	SR						

Faktor pendukung keberhasilan kinerja : (1). Selalu melakukan evaluasi dan pengawasan pada program/kegiatan serta koordinasi pada setiap level/tingkatan. (2). Realisasi jumlah benih padi yang disalurkan melampaui target (nilai signifikan) pada Kegiatan Pemediaan Benih Padi dan Jagung disebabkan oleh besarnya jumlah bantuan benih jagung dari Kementerian Pertanian RI.
Faktor penghambat : A (1) Beberapa kegiatan tidak mendapat alokasi anggaran sehingga target dan realisasi kinerja tidak tercapai yaitu : 1. Kegiatan Pemediaan benih Buah, Tanaman Hias dan puuk. 2. Kegiatan Penyelebaran OPT Tanaman Perkebunan. 3. Kegiatan Penyelenggaraan Penulhan Pertanian. 4. Kegiatan Pemeliharaan Kawasan Pertanian Terpadu. 6. Kegiatan Penyaluran Hasil Tanaman.
B. Perubahan mekanisme pengaliran pada kegiatan DAK (3) Perubahan kebijakan dan refovisno anggaran.
C. Realisasi capaian kinerja pada kegiatan Pemantauan, Peramalan dan Pemberdayaan OPT - Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditunda per tahun sehingga datanya diperoleh pada awal tahun 2020.

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas PMD-ADMINDUKAPIL Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi : Persentase peningkatan perkembangan desa dan Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

No	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.			
					K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.					
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pelayanan administrasi, Sarana dan Prasarana dan SDM Aparatur	100	%	5.815.837.446	100	%	3.807.006.420	100	%	1.351.904.932	100	1.334.713.255	100	99	200	5.141.719.675	200	88,41		
			1.596.759.161		Presentase Pelaksanaan Program, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	100	%	7.283.666.598	100	%	1.700.760.314	100	%	244.854.229	100	243.498.646	100	99	200	1.944.258.960	200	26,69	
			Kegiatan Penyediaan 1 Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kantor yang tersedia	25	Jasa kantor yg tersedia	2.617.520.603	15	Jasa kantor yg tersedia	2.279.265.385	5	Jasa kantor yg tersedia	795.148.320	5	790.343.543	100	99	20	3.069.608.928	80	117,27	DPMD-KC	
			2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan	50	Unit	2.430.657.130	55	Unit	1.068.980.457	10	Unit	340.364.090	10	338.363.084	100	99	65	1.407.343.541	100	57,90	DPMD-KC	
				Jumlah Desa Lokasi Stunting di Provinsi Gorontalo	9	Kab	1.300.000.000	6	Kab	458.760.578	3	Kab	216.392.522	3	206.006.628	100	95	9	664.767.206	100	51,14		
			3 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monev	25	Dokumen	3.985.570.000	15	Dokumen	1.439.832.414	6	Dokumen	227.451.275	6	226.100.546	100	99	21	1.665.932.960	84	41,80		
			4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai SOP	25	Laporan	989.648.299	15	Laporan	260.927.900	5	Lap. keu SKPD yg sesuai SAP	17.402.954	5	17.398.100	100	99,97	20	278.326.000	80	28,12		
			Rata-rata capaian kinerja (%)												100	99			89	59			
Predikat kinerja												ST	ST										

No	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.		
					K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.				
II			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	% aparatur pengelola kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang diberikan peningkatan	100	%	19.370.000.000	100	%	996.037.570	### %	1.035.416.485	100	1.029.912.310	100	99	200	2.025.949.880	200	10,46		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	Kab./Kota	485.000.000	-	Kab/Kota	-	6	Kab./Kota	1.035.416.485	6	1.029.912.310	100	99	6,00	1.029.912.310	33	212,35	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	99			33	212				
Predikat kinerja													ST	ST								
III			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	% aparatur pengelola kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang diberikan peningkatan	100	%	633.683.381	100	%	996.037.570	### %	67.307.500	100	67.299.050	100	100	200	1.063.336.620	200	167,80		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Aparatur pengelola pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota, Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kualitasnya	450	Orang	633.683.381	-	Orang	-	500	Orang	67.307.500	500	67.299.050	100	100	500	67.299.050	111	10,62	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	100			111	11				
Predikat kinerja													ST	ST								
IV			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	% aparatur pengelola kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang diberikan peningkatan	100	%	485.000.000	100	%	996.037.570	### %	32.620.719	100	32.610.050	100	100	200	1.028.647.620	200	212,09		
			Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	Kab./Kota	485.000.000	-	Kab./Kota	-	6	Kab./Kota	32.620.719	6	32.610.050	100	100	6	32.610.050	33	6,72	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	100			33	6,72				
Predikat kinerja													ST	ST								

No	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.			
					K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.					
V			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	34,5	%	3.200.000.000	8,6	%	1.954.420.346	9,20	%	158.785.617	9,2	157.493.950	100	99	18	2.111.914.296	52	66,00		
			% desa yang meningkat statusnya	34,5	%	2.763.384.400	9	%	2.659.144.921	9,20	%	106.665.265	9,2	97.459.720	100	91	18	2.756.604.641	53	99,75			
			% PKK aktif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga	100	%	5.962.951.815	100	%	3.992.059.272	100	%	868.662.346	100	853.977.005	100	98	200	4.846.036.277	200	81,27			
			Jumlah kelompok usaha ekonomi dan lembaga masyarakat yang berdaya dan meningkat pendapatannya	125	Kelompok	1.800.000.000	40	Kelompok	1.180.370.975	20	Kelompok	111.576.087	20,0	111.001.700	100	99	60	1.291.372.675	48	71,74			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam pembinaan tata kelola pemerintahan Desa sesuai UU Desa	15	Kab./Kota	2.300.000.000	-	Kab./Kota	-	5	Kab./Kota	103.790.212	5,0	103.465.550	100	100	5	103.465.550	33	4,50		
			Jumlah Lembaga Desa/Kelurahan yang dikembangkan Kapasitas Kerjasama	18	Lembaga di Kab/Kota	900.000.000	6	Lembaga di Kab/Kota	38.043.300	6	Lembaga di Kab/Kota	54.995.405	6,0	54.028.400	100	98	12	92.071.700	67	10,23			
			Jumlah masyarakat dan inovator yang ditingkatkan pemahamannya tentang pendayagunaan TTG	100	Orang	2.763.384.400	60	Orang	446.058.869	20	Orang	106.665.265	20,0	97.459.720	100	91	80	543.518.589	80	19,67			

No	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.	
					K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.			
				% terlaksananya peran PKK dalam rangka mendukung Tertib Administrasi PKK	100	% 3.210.124.739	100	% 3.003.668.962	100	%					200	3.857.645.967	100	100,00			
				% PKK yang dilibatkan dalam kegiatan penghayatan, pengamalan Pancasila dan Gotong royong	100	% 916.806.769	100	% 361.775.750	100	%					100	361.775.750	100	39,46			
				% PKK yang dilibatkan dalam kegiatan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi serta Pendidikan dan Keterampilan	100	% 612.006.769	100	% 194.790.000	100	%	868.662.346	100,0	853.977.005	100	98	100	194.790.000	100	31,83		
				% PKK yang dilibatkan dalam kegiatan Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	100	% 612.006.769	100	% 201.088.000	100	%					100	201.088.000	100	32,86			
				% PKK yang dilibatkan dalam kegiatan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat	100	% 612.006.769	100	% 230.736.560	100	%					100	230.736.560	100	37,70			
				Jumlah Pokmas dan Bumdes yang Di Dampingi	60	15 Bumdes,45 Pokmas 1.800.000.000	1	15 Bumdes,45 Pokmas 163.852.000	20	Bumdes 111.576.087	20,0	111.001.700	100	99	21	274.853.700	35	15,27			
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	97			79	32,39			
Predikat kinerja													ST	ST							
VI			PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DESA	% desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	34,5	% 1.985.730.859	8,6	% 1.954.420.346	9,20	% 567.093.663	9,2	564.333.000	100	100	18	2.518.753.346	52	126,84			
				Persentase desa berkembang	34,5	% 1.179.040.000	9,0	% 837.540.725	9,20	% 189.830.687	9,2	189.189.700	100	100	18	1.026.730.425	53	87,08			
				% desa yang meningkat statusnya	34,5	% 2.695.259.400	9,0	% 2.659.144.921	9,20	% 106.661.934	9	106.560.900	100	100	18	2.765.705.821	53	102,61			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10	Laporan 1.985.730.859	6	Laporan 1.090.562.882	2	Laporan 567.093.663	2	564.333.000	100	100	8	1.654.895.882	80	83,34			
				jumlah dokumen laporan evaluasi perkembangan desa	18	Dokumen (5 Kab 1 Kota) 1.179.040.000	6	Dokumen 70.285.600	6	Dokumen 189.830.687	6	189.189.700	100,00	100	12	259.475.300	67	22,01			
				Jumlah Pemenang Lomba Desa Tingkat Provinsi	6	Desa	-	Desa	-	Desa	0	-	-	-	-	-	-	-			
				Jumlah Kabupaten yang terbentuk dan optimalnya kelembagaan BP-SPAMS di Desa	25	Kabupaten 2.695.259.400	5	Kabupaten 494.240.418	5	Kabupaten 106.661.934	5	106.560.900	100	100	10	600.801.318	40	22,29			
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	100			62	42,55			
Predikat kinerja													ST	ST							

No	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.				
					K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.	K (%)	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
VII			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	% desa yang meningkat statusnya	34,5	%	3.799.759.400	9,0	%	564.110.480	9,2	%	307.499.498	6,0	303.709.160	65,22	99	15	867.819.640	43	22,84			
			Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rakor Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Provinsi Gorontalo	500	Orang	2.189.759.400	250	Orang	365.777.080	-	Orang	0	0,0	-	0	0	250	365.777.080	50	16,70			
				Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang kedudukannya dilintas Kab/Kota	9	Lembaga	950.000.000	3	Lembaga	123.704.500	3	Lembaga	237.999.527	3,0	234.475.760	100,00	99	6	358.180.260	67	37,70			
				Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana yang ada di tiap Kawasan	9	Dokumen	660.000.000	3	Dokumen	74.628.900	3	Dokumen	69.499.971	3,0	69.233.400	100,00	100	6	143.862.300	67	21,80			
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	99					61	25,40				
Predikat kinerja													ST	ST										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.148.878.962		5.091.758.446											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)													100	99										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 7)													ST	ST										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja					: Program dan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan																			
Faktor Penghambat					: Kurangnya nilai dikarenakan adanya Program dan kegiatan yang awalnya dianggarkan namun akhirnya kegiatan tersebut tidak dianggarkan lagi serta ada kegiatan yang anggarannya di Rasionalisasi untuk penanggulangan dampak Covid																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya					: Pelaksanaan Program dan Kegiatan harus sesuai jadwal yang telah ditentukan agar realisasi fisik dan keuangan bisa mencapai target																			

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

- 1 Kondisi Mantap Jalan Provinsi (%) **60,39**
 2 Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) **257.519**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KET
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luasan Sawah yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan Jaringan Irigasinya	11.074 Ha	39.063.867	44.296 Ha	81.480.632	11.074 Ha	78.610.383	- Ha	36.522.581	0,00 Ha	46,46	44.296 Ha	118.003.213	400,00	302	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	
	- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dok. data base SDA dan dok. perencanaan serta pengawasan	39 Dok	2.389.117	3 Dok	602.787	9 Dok	2.229.005	14 Dok	2.141.012	100 Dok	96	17 Dok	2.743.798	44 Dok	100		
	22.950.839	Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	11.074 Ha	14.174.750	33.222 Ha	10.328.945	11.074 Ha	15.078.303	5 Ha	11.231.188	0,05 Ha	74	33.227 Ha	21.560.133	100 Ha	100		
		Jumlah Luas operasi jaringan irigasi pertanian yang dipelihara	11.074 Ha	22.500.000	33.222 Ha	13.822.937	11.074 Ha	5.643.532	11.074 Ha	5.608.200	100 Ha	99	44.296 Ha	19.431.138	100 Ha	86		
	- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dok. data base SDA dan dok. perencanaan serta pengawasan	39 Dok	2.389.117	3 Dok	602.787	9,00 Dok	2.229.005	14 Dok	2.141.012	155,56 Dok	96,05	17 Dok	2.743.798	43,59 %	115		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	11.074 Ha	14.174.750	33.222 Ha	10.328.945	11.074,00 Ha	15.078.303	5 Ha	11.231.188	0,05 Ha	74,49	33.227 Ha	21.560.133	100,00 %	152		
	- Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Luas operasi jaringan irigasi pertanian yang dipelihara	11.074 Ha	22.500.000	33.222 Ha	13.822.937	11.074,00 Ha	5.643.532	11.074 Ha	5.608.200	100,00 Ha	99,37	44.296 Ha	19.431.138	100,00 %	86		
	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Panjang Pengaman Sungai dan Pengaman Pantai yang dibangun	20.850 M	96.312.365	2.394 M	15.218.856	4.400 M	55.659.543	- M	5.142.625	0,00 M	9,24	2.394 M	20.361.481	11,48	21		
	- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dok Perencanaan dan Pengawasan untuk bangunan pengendali banjir	28 Dok	4.068.282	5 Dok	1.294.912	6,00 Dok	207.366	1 Dok	206.664	16,67 Dok	99,66	6 Dok	1.501.576	21,43 %	37		
	- Pembangunan Breakwater	Jumlah Panjang Tanggul pengaman pantai yang dibangun	4.350 M	36.612.192	941 M	3.603.422	900,00 M	2.071.306	208 M	1.560.080	23,11 M	75,32	1.149 M	5.163.502	26,41 %	14		
	- Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Panjang Pengamanan Sungai/Tebing yang dibangun	16.500 M	55.631.891	5.394 M	11.615.434	3.500,00 M	53.332.302	3.220 M	3.327.516	92,00 M	6,24	8.614 M	14.942.950	52,21 %	27		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Keg. Wokshop, Koordinasi dan sosialisasi SDA lintas sektoral	15 Keg	619.631	4 Keg	238.669	3,00 Keg	48.570	1 Keg	48.365	33,33 Keg	99,58	5 Keg	287.035	33,33 %	46		
Rata-rata capaian kinerja (%)											66,68	69,79			63,77	76,88		
Predikat kinerja											S	S						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KET
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kondisi mantap Jalan	70,22 %	671.053.000	54,38 %	270.735.567	65,20 %	70.084.677	50 %	25.092.999	76,07 %	35,80	104 %	295.828.566	148,08 %	44		
-	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	61 Dok	5.610.773	35 Dok	9.267.472	1,00 Dok	2.546.805	10	605.452	1000,00	23,77	45	9.872.923	73,77	100		
		Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Jaringan Jalan	6 Keg	2.352.740	3 Keg	691.120	-	-	-	-	0,00	0,00	3	691.120	50,00	29		
		Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang Dibangun/ Ditingkatkan	47,50 KM	260.483.475	25 Km	82.181.368	9,50 Km	48.801.937	-	10.939.953	0,00	22,42	25	93.121.321	52,63	36		
		Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang Dibangun/ Ditingkatkan (DAK)	25 KM	67.202.500	3 Km	8.208.994	-	-	-	-	0,00	0,00	3	8.208.994	12,00	12		
		Jumlah Panjang Jalan Strategis dan Jalan Menuju Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi yang dibangun	30 KM	61.410.000	26 Km	41.146.240	-	-	-	-	0,00	0,00	26	41.146.240	86,67	67		
		Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara berkala	30 KM	56.348.000	25 Km	35.230.669	50,00 Km	11.350.926	170	11.186.178	100,00	98,55	195	46.416.847	100,00	82		
		Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara berkala (DAK)	32 KM	110.731.000	20 Km	51.017.882	-	-	-	-	0,00	0,00	20	51.017.882	62,50	46		
		Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang rutin dipelihara	250 KM	35.707.000	310 Km	12.331.401	-	-	-	-	0,00	0,00	310	12.331.401	100,00	35		
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan yang direhab	6 Dok	2.538.450	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-		
		Jumlah Panjang Jembatan Provinsi yang Dibangun/Diganti	5 Bh	20.193.189	2 Bh	18.733.956	1,00 Bh	6.869.210	-	1.992.710	0,00	29,01	2	20.726.666	40,00	100		
		Jumlah Panjang Jembatan Provinsi yang Dibangun/Diganti (DAK)	5 Bh	12.693.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-		
		Jumlah Panjang Jembatan Strategis dan Jembatan Akses Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi yang Dibangun	6 Bh	33.769.434	2 Bh	10.537.801	-	-	-	-	0,00	0,00	2	10.537.801	33,33	31		
		Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	1.500 M	2.013.314	832 M	1.388.665	300,00 M	515.800	450	368.706	100,00	71,48	1.282	1.757.371	85,46	87		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	61 Dok	5.610.773	35,00 Dok	9.267.472	1,00 Dok	2.546.805	10 Dok	605.452	1000,00 Dok	23,77	45 Dok	9.872.923	73,77 %	176		
		Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Jaringan Jalan	6 Keg	2.352.740	3 Keg	691.120	-	-	-	-	0,00	0,00	3	691.120	50,00	29		
	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang Dibangun/ Ditingkatkan	47,50 Km	260.483.475	25 Km	82.181.368	9,5 Km	48.801.937	- Km	10.939.953	0,00 Km	22,42	25 Km	93.121.321	52,63 %	36		
		Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang Dibangun/ Ditingkatkan (DAK)	25 Km	67.202.500	3 Km	8.208.994	-	-	-	-	0,00	0,00	3	8.208.994	12,00	12		
		Jumlah Panjang Jalan Strategis dan Jalan Menuju Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi yang dibangun	30 Km	61.410.000	26 Km	41.146.240	-	-	-	-	0,00	0,00	26	41.146.240	86,67	67		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara berkala	30 Km	56.348.000	25 Km	35.230.669	50,00 Km	11.350.926	170 Km	11.186.178	100,00 Km	98,55	195 Km	46.416.847	649,00 %	82		
		Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara berkala (DAK)	32 Km	110.731.000	20 Km	51.017.882	-	-	-	-	0,00	0,00	20	51.017.882	62,50	46		
		Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang rutin dipelihara	250 Km	35.707.000	310 Km	12.331.401	-	-	-	-	0,00	0,00	310	12.331.401	124,00	35		
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan yang direhab	6 Dok	2.538.450	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-		
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Provinsi yang Dibangun/Diganti	5 Bh	20.193.189	2 Bh	18.733.955,7	1,00 Bh	6.869.210	- Bh	1.992.710	0,00 Bh	29,01	2 Bh	20.726.666	40,00 %	103		
		Jumlah Panjang Jembatan Provinsi yang Dibangun/Diganti (DAK)	5 Bh	12.693.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-		
		Jumlah Panjang Jembatan Strategis dan Jembatan Akses Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi yang Dibangun	6 Bh	33.769.434	2 Bh	10.537.801	-	-	-	-	0,00	0,00	2	10.537.801	33,33	31		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	1.500 M	2.013.314	832 M	1.388.665	300,00 M	515.800	450 M	368.706	100,00 M	71,48	1.282 M	1.757.371	85,46 %	87		
Rata-rata capaian kinerja (%)											240,00	49,05			63,31	56,89		
Predikat kinerja											SR	SR						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KET					
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah jiwa yang terlayani sanitasi	35.900	Jiwa	57.957.000	7.180	Jiwa	5.261.372	3.981,00	Jiwa	1.558.367	4	Jiwa	1.262.058	0,10	Jiwa	80,99	7.184	Jiwa	6.523.430	20,01	%	11,26
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah jiwa yang terlayani sanitasi	35.900	Jiwa	57.957.000	7.180	Jiwa	5.261.372	3.981,00	Jiwa	1.558.367	4		1.262.058	0,10		80,99	7.184		6523430,32	20		11,26
	- Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah jiwa yang terlayani sanitasi	35.900		57.957.000	7.180	Jiwa	5.261.372	3.981,00	Jiwa	1.558.367	4		1.262.058	0,10		80,99	7.184		6.523.430	20,01	%	11,26
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,10		80,99			20,01	11,26						
Predikat kinerja											SR		T										
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	Perda	8.068.000	-	Perda	472.121	1	Perda	234.747	-	Perda	151.731	0,00	Perda	64,64	-	Perda	623.852	0,00	%	7,73
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	3	Keg	3.719.000	2	Keg	878.761	3	Keg	194.143	-	Keg	146.386	0,00	Keg	75,40	2	Keg	1.025.147	66,67	%	27,57
		Jumlah Laporan	30	Lap	2.970.960	7	Lap	976.543	6	Lap	232.143	7	Lap	149.955	116,67	Lap	64,60	14	Lap	1.126.497	46,67	%	37,92
	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Laporan	30	Lap	2.970.960	14	Lap	976.543	6,00	Lap	232.143	7	Lap	149.955	100		65	21		1.126.497	70		38
	- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Laporan	30	Lap	2.970.960	2	Lap	151.731	6,00	Lap	232.143	7	Lap	149.955	100	Lap	65	9	Lap	301.686	30,00	%	10,15
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	3	Keg	3.719.000	2	Keg	878.761	3,00	Keg	194.143	8	Keg	146.386	100		75	10		1.025.147	100		28
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	3	Keg	3.719.000	2	Keg	73.565	3,00	Keg	194.143	8	Keg	146.386	100,00	Keg	75,40	10	Keg	219.951	333,33	%	5,91
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	Perda	8.068.000	-	Perda	472.121	1,00	Perda	234.747	-	Perda	151.731	-	Perda	65	-	Perda	623.852	-		8
	- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	Perda	8.067.750		Perda	-	1,00	Perda	234.747	-	Perda	151.731	0,00	Perda	64,64	-	Perda	151.731	0,00	%	1,88
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	%	68,21			85,00	%	24,40					
Predikat kinerja											ST		S										
10	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN	Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan	22	Bidang Tanah	74.583.000	179	Bidang Tanah	54.648.850	22	Bidang Tanah	22.822.880	6,00	Bidang Tanah	3.130.671	27,27	Bidang Tanah	13,72	185	Bidang Tanah	57.779.521	100,00	%	77
	- Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan	22	Bidang Tanah	74.583.000	179	Bidang Tanah	54.648.850	22	Bidang Tanah	22.822.880	6,00	Bidang Tanah	3.130.671	27		13,72	185		57.779.521	100,00		77
	- Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan	22	Bidang Tanah	74.583.000	35	Bidang Tanah	12.362.754	22,00	Bidang Tanah	22.822.880	6,00	Bidang Tanah	3.130.671	27,27	Bidang Tanah	13,72	41	Bidang Tanah	15.493.425	100,00	%	21
Rata-rata capaian kinerja (%)											27	%	13,72			100	%	77					
Predikat kinerja											SR		SR										
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi	100	%	19.302.000	100	%	2.073.055	100	%	879.789	48	%	430.010	48,36	%	48,88	148	%	2.503.065	148,36	%	12,97
	- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Jasa Konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing	1.040	Org	9.466.000	400	Org	792.303	240,00	Org	350.195	50		138.578	20,83		39,57	450		930.881	43,27		9,83
		Jumlah Badan Usaha yang Berkualitas	800	Org	4.269.000	355	Org	597.724	105,00	Org	160.605	65		81.069	61,90		50,48	420		678.793	52,50		15,90
	- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Jasa Konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing	1.040	Org	9.465.615	400	Org	792.303	240,00	Org	350.195	50		138.578	20,83	%	39,57	450	%	930.880	43,27	%	9,83
	- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Berkualitas	800	Org	4.268.614	355	Org	597.724	105,00	Org	160.605	65		81.069	61,90	%	50,48	420	%	678.793	52,50	%	15,90
	- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan	14	Keg	5.568.000	5	Keg	683.029	3,00	Keg	368.990	1		210.363	33,33		57,01	6		893.392	42,86		16,05
	- Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Kegiatan	14	Keg	5.567.622	5	Keg	683.029	3,00	Keg	368.990	1		210.363	33,33	%	57,01	6	%	893.392	42,86	%	16,05
Rata-rata capaian kinerja (%)											38,69		49,02			46,21		13,93					
Predikat kinerja											SR		SR										

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KET
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100 %	14.264.953	100 %	13.663.740	100 %	7.154.396	11 %	4.061.055	11,11 %	56,76	111 %	17.724.795	111,11 %	124,25		
		Persentase Peningkatan Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100 %	4.100.534	100 %	4.618.692	100 %	1.625.659	73	983.276	72,64	60,48	173	5.601.968	172,64	136,62		
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa admin perkantoran	100 %	9.355.980	100 %	7.802.929	100 %	5.242.205	67	2.978.687	67,10	56,82	167	10.781.616	100,00	100,00		
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Jasa admin perkantoran	100 %	9.355.980	100 %	7.802.929	100 %	5.242.205	67	2.978.687	67,10 %	56,82	167 %	10.781.616	167,10 %	115,24		
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15 Keg	1.727.082	8 Keg	3.967.978	3 Keg	1.145.773	2	638.397	66,67	55,72	10	4.606.374	66,67	100,00		
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15 Keg	1.727.082	8 Keg	3.967.978	3 Keg	1.145.773	2	638.397	66,67 %	55,72	10 %	4.606.374	66,67 %	266,71		
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	750 Org	3.181.891	430 Org	1.892.834	150 Org	766.418	-	443.971	0,00	57,93	430	2.336.805	57,33	73,44		
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	750 Org	3.181.891	430 Org	1.892.834	150 Org	766.418	-	443.971	0,00 %	57,93	430 %	2.336.805	57,33 %	73,44		
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 Keg	503.656	2 Keg	558.617	1 Keg	199.999	1	150.014	100,00	75,01	3	708.631	50,00	100,00		
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 Keg	503.656	1 Keg	160.214	1 Keg	199.999	1	150.014	100,00 %	75,01	2 %	310.229	33,33 %	61,60		
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100 %	3.596.878	100 %	4.060.075	100 %	1.425.660	58 %	833.262	58,45	58,45	158	4.893.337	100,00	100,00		
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	18 Keg	2.348.878	5 Keg	2.169.375	3 Keg	678.361	8 Keg	507.195	100,00 %	74,77	13 %	2.676.570	72,22 %	113,95		
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 Keg	1.248.000	3 Keg	1.890.700	1 Keg	747.298	4 Keg	326.066	100,00 %	43,63	7 %	2.216.766	116,67 %	177,63		
Rata-rata capaian kinerja (%)											73,05 %	60,78			74,80 %	94,69		
Predikat kinerja											S	R						
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sapras dan SDM Aparatur UPTD TPA Talumelito	100 %	1.218.000	100 %	331.376	100 %	1.285.726	65 %	835.677	65,00 %	65	165 %	1.167.052	165,00 %	96		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD	100 %	1.218.000	100 %	331.376	100 %	1.285.726	65	835.677	65	65	165	1.167.052	100,00	96	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD	100 %	1.218.000	100 %	331.376	100 %	1.285.726	65 %	835.677	65 %	65	165 %	1.167.052	100,00 %	96		
Rata-rata capaian kinerja (%)											65	65			100	96		
Predikat kinerja											SR	SR						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KET	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
14	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dan Volume Sampah yang Dikelola	100 %	22.538.000	100 %	6.334.036	100,00 %	5.514.901	88 %	4.843.592	87,83 %	87,83	188 %	11.177.628	187,83 %	50			
-	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dan pelatihan pengelolaan Persampahan	3.140 Org	2.203.000	600 Org	357.286	640,00 Org	92.364	-	20.917	-	22,65	600	378.203	19,11	17			
		Jumlah Volume Sampah Yang Dikelola	148.520 Ton	20.335.000	96.766 Ton	5.976.749	24.880,00 Ton	5.422.537	8.722	4.822.675	35	88,94	105.488	10.799.424	71,03	53			
-	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Volume Sampah Yang Dikelola	148.520 Ton	20.335.049	96.766 Ton	5.976.749	24.880,00 Ton	5.213.708	8.722 Ton	4.822.675	35 Ton	92,50	105.488 Ton	10.799.424	71,03	53			
-	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dan pelatihan pengelolaan Persampahan	3.140 Org	2.202.750	600 Org	357.286	640,00 Org	50.140	- Org	20.917	0,00 Org	41,72	600 Org	378.203	19,11	17			
Rata-rata capaian kinerja (%)											35,06 %	55,79			45,07	35,14			
Predikat kinerja											SR	R							
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium	100 %	8.181.875	100 %	3.119.891	100 %	2.061.031	74 %	960.533	74,13 %	46,60	174 %	4.080.424	174,13 %	50			
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD	100 %	3.229.000	100 %	1.886.683	100 %	1.081.323	48 %	521.820	48	48,26	148	2.408.503	100,00	75			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD	100 %	3.229.000	100 %	1.886.683	100 %	1.081.323	48 %	521.820	48,26	48,26	148 %	2.408.503	100,00 %	75			
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Pengujian UPTD	6 Keg	4.952.875	3 Keg	1.233.208	1 Keg	979.708	1	438.714	100	44,78	4	1.671.921	66,67	34			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Jasa Pengujian UPTD	6 Keg	4.952.875	3 Keg	1.233.208	1 Keg	979.708	1 Keg	438.714	100,00 Keg	44,78	4 Keg	1.671.921	66,67 %	34			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											74,13	46,52			83,33	54,17			
Predikat Kinerja											S	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										205.849.387	83.230.689								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14)											74,54	53,10							
PREDIKSI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14)											R	R							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	(1)pengelolaan sumberdaya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi dan penanganan sungai dan pantai; (2) meningkatkan konektivitas daerah melalui pemeliharaan berkala dan peningkatan jalandi jembatan, pembangunan jalan provinsi dan jalan strategis provinsi, dan pembangunan jembatan; (3) pembangunan infrastruktur permukiman dan perkantoran berupa pembangunan prasarana dan sarana sanitasi bagi masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana gedung perkantoran, penyediaan prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat serta pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (4)pengembangan wilayah melalui penyusunan dokumen perencanaan tataruang dan RTRW Kawasan Strategis Provinsi (KSP); (5) pembinaan jasa konstruksi; (6) peningkatan akuntabilitas pengelolaan																		
Faktor penghambat :	Beberapa kegiatan fisik yang pencananaannya dilaksanakan dalam tahun yang sama sehingga proses pengadaan barang dan jasa harus menunggu selesainya dokumen perencanaan, adanya perubahan nomenklatur dan perubahan lokasi yang menyebabkan harus dilaksanakan survey kembali, adanya lokasi yang masuk kawasan hutan sehingga harus keluarnya ijin pinjam pakai kawasan.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	Mempercepat proses ijin dan revisi nomenklatur sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat segera dilaksanakan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya *) :	Proses perencanaan sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pada h-1 sebelum pekerjaan fisiknya dilaksanakan agar pada awal tahun anggaran proses pengadaan barang dan jasa bisa berlangsung.																		

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas SATPOL PP, LINMAS DAN KEBAKARAN Provinsi Gorontalo**

Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100 %	1.557.399	100,00	377.656	100,00	%	4.626.752	100,00	4.559.404	100,00	98,54	200,00	4.937.060	200,00	317,01		
		Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM anaratur	100 %	6.604.113	100,00	1.666.698	100,00	%	1.806.125	46,97	1.683.823	46,97	93,23	146,97	3.350.521	146,97	50,73		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	5	Dok	862.021	3	336.081	1	Dok	54.167	1,00	53.945	100,00	99,59	4,00	390.026	80,00	45,25	Sub Perencanaan dan Keuangan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan						1	Dok	4.572.585	1,00	4.505.459	100,00	98,53	1,00	4.505.459	20,00	522,66	Sub Perencanaan dan Keuangan
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	100	Orang	1.386.272	38	249.957	20	Orang	167.620	20	157.217	100,00	93,79	58,00	407.174	58,00	29,37	Sub Umum dan Kepegawaian
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarpras Kesekretariatan OPD	100	Jenis	4.368.349	55	2.106.512	20	Jenis	924.467	20,00	875.675	100,00	94,72	75,00	2.982.187	75,00	68,27	Sub Umum dan Kepegawaian
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran	100	Persen	849.492	100	1.567.608	100	Persen	714.038	100,00	650.930	100,00	91,16	200,00	2.218.538	100,00	100,00	Sub Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	95,56			66,60	153,11			
Predikat kinerja											T	T							

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket		
			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp				
II	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	45	Persen	3.844.760	###	1.311.925	###	Persen	3.462.006	30,00	3.371.016	30,00	97,37	130,00	4.682.941	288,89	121,80		
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	363	Lap	17.128.264	203	7.300.094	75	Lap	2.310.070	75,00	2.295.777	100,00	99,38	278,00	9.595.871	76,58	56,02		
		Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-Hari Keagamaan	32	Lap	484.586	33	1.114.495	8	Lap	542.886	8,00	534.374	100,00	98,43	41,00	1.648.869	100,00	100,00		
		Jumlah Peserta Rakor Trantibum	140	Org	174.264	50	31.215	50	Org	15.640	25,00	11.226	50,00	71,78	75,00	42.441	53,57	24,35		
		Jumlah Operasi Penanganan PGOT	20	Keg	422.209	11	313.518	4	Keg	87.162	4,00	86.954	100,00	99,76	15,00	400.471	75,00	94,85		
		Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	3.750	Org	416.693	1.500	121.623	750	Org	173.353	75,00	122.100	10,00	70,43	1575,00	243.723	42,00	58,49		
		Jumlah Personil Satlinmas	500	Personil	364.827	150	99.670	100	Personil	27.201	50,00	26.555	50,00	97,62	200,00	126.225	40,00	34,60		
7	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pengawasan Perda/Pergub Provinsi	50	Kali	725.075	27	283.204	10	Kali	60.625	10,00	57.300	100,00	94,52	37,00	340.504	74,00	46,96	Seksi PPNS	
		Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	20	Lap	1.110.788	13	555.797	5	Lap	208.474	5,00	201.505	100,00	96,66	18,00	757.302	90,00	68,18		
8	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Peserta Rakor PPNS	250	orang	881.504	100	223.893	50	Orang	36.595	25,00	35.224	50,00	96,25	125,00	259.117	50,00	29,39	Seksi PPNS	
rata-rata capaian kinerja (%)												73,33	91,65			66,80	56,98			
Predikat kinerja												S	T							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket		
			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp				
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	100 Persen	872.962	100	1.002.963	###	Persen	399.049	100,00	397.253	100,00	99,55	200,00	1.400.216	200,00	160,40			
9	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran	120 Kejadian	532.929	192	927.332	24	Kejadian	399.049	24,00	397.253	100,00	99,55	216,00	1.324.585	100,00	100,00	Seksi Pemadam Kebakaran		
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	99,55			100,00	100,00				
Predikat kinerja											ST	ST								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										10.293.932	10.011.495									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM 3)											91,11	95,59								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM 3)											T	R								
Faktor Keberhasilan																				
1. Sebaqaian Faktor Keberhasilan dipengaruhi oleh Kegiatan-kegiatan yang berkaitan kegiatan administrasi umum perangkat daerah																				
2 Target-taget pelaksanaan kegiatan mudah dicapai																				
3 Mengoptimalkan Anggaran yang tersedia																				
4 Pemanfaatan Teknologi informasi																				
Faktor penghambat																				
1. Pembatasan Jumlah Peserta Rapat yang di pengaruhi oleh pemberlakuan Protokol Kesehatan																				
2 Sebaqaian Kegiatan tidak terjadwalkan dengan baik.																				
3 Minimnya Tenaga PPNS yang ada																				
4 Minimnya SDM Satpol PP yang berkualitas																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya*																				

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi :

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi
- Menurunnya Tingkat Kemiskinan
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	87,00 persen	9.360.000	100 persen	5.065.114	100,00 Persen	2.300.882	91,11	2.096.291	91,11	91,11	191,11	7.161.405	100,00	77				
				Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	87,00 Persen	5.925.000	100 Persen	2.146.528	100,00 Persen	793.981	97,24	772.029	97,24	97,24	197,24	2.918.558	100,00	49				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat K	10,00 Laporan	4.395.000	12,00 Laporan	1.661.091	2,00 laporan	684.154	2,00	666.381	100,00	97,40	14,00	2.327.472	100,00	53				
				- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Laporan	4.395.000	12 Laporan	1.661.091	2 laporan	684.154	2,00	666.381	100,00	97,40	14,00	2.327.472	100,00	53				
				Koordinasi penyaluran bantuan pangan non tunai (RASTRA)	1 Keg	825.000	- Keg	-	- Keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	705.000	3 Laporan	319.642	1 laporan	109.827	1,00	105.649	100,00	96,20	4,00	425.290	80,00	60				
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	705.000	3 Laporan	319.642	1 laporan	109.827	1,00	105.649	100,00	96,20	4,00	425.291	80,00	60				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,00 Orang	710.000	12,00 Orang	251.460	15,00 Org	79.502	17,00	67.826	100,00	85,31	29,00	319.286	38,67	45				
				- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75 orang	700.000	12 Orang	251.460	15 org	79.502	17,00	67.826	100,00	85,31	29,00	319.286	38,67	46				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,00 Sarana dan Prasarana yang tersedia (1 paket)	5.800.000	32 sarana prasarana yang tersedia	3.463.969	1,00 Paket	1.550.011	11,00	1.478.160	100,00	95,36	42,87	4.942.129	100,00	85				
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Sarana dan Prasarana yang tersedia (1 paket)	5.594.000	31,87 sarana prasarana yang tersedia	3.463.969	1 paket	1.550.011	11,00	1.478.160	100,00	95,36	42,87	4.942.129	100,00	88								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,00 Jasa Kantor yang tersedia (1 paket)	2.850.000	32,00 Kantor yang tersedia	1.349.686	1,00 paket	671.370	1,00	550.305	100,00	81,97	33,00	1.899.990	100,00	67								
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jasa Kantor yang tersedia (1 paket)	2.850.000	32 jasa kantor yang tersedia (1 paket)	1.349.666	1 paket	671.370	1,00	550.305	100,00	81,97	33,00	1.899.971	100,00	67								
Rata Rata Capaian Kinerja (%)												100,00	91,25			83,73	62,03					
Predikat Kinerja												ST	T									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.							
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu di berdayakan.	90,00	15.463.000	100,00	6.619.482	100,00	1.601.453	99,50	1.445.078	99,50	90,24	199,50	8.064.560	221,67	52					
						Jumlah lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial	11,00	1.250.000	4,00	830.175	-	-	-	-	-	4,00	830.175	36,36	66						
						Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan.	305,00	5.090.000	119,00	655.077	-	-	-	-	-	119,00	655.077	39,02	13						
				1	06	02	1.01	Kegiatan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Pelayanan, pengawasan dan perijinan PSDBS (UGB dan PUB)	55	290.000	13	117.474	12	55.240	12,00	54.676	100,00	98,98	25,00	172.150	45,45	59		
				1	06	02	1.01	koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah pelayanan pengawasan dan perizinan PSDBS (UGB dan PUB)	55	290.000	13	117.474	12	55.240	12,00	54.676	100,00	98,98	25,00	172.150	45,45	59		
				1	06	02	1.02	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah TKSM yang di berdayakan.	500	2.475.000	172	740.683	550	706.178	77,00	700.379	14,00	99,18	249,00	1.441.062	49,80	58		
								Jumlah lembaga/organisasi sosial termasuk karang taruna yang diberdayakan.	180	1.625.000	40	410.662	40	840.035	17,00	690.022	42,50	82,14	57,00	1.100.684	31,67	68			
				1	06	02	1.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSM yang diberdayakan	500	2.475.000	172	740.683	550	706.178	77,00	700.379	14,00	99,18	249,00	1.441.062	49,80	58		
		1	06	02	1.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Wewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga atau Organisasi termasuk Karang Taruna yang di Berdayakan	180	1.625.000	40	410.662	40	840.035	17,00	690.022	42,50	82,14	57,00	1.100.684	31,67	68				
Rata Rata Capaian Kinerja (%)													78,25	93,43			42,31	61,77							
Predikat Kinerja													T	ST											
3		1	06	03	PROGRAM PENANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase (%) PMKS anak, lanjut usia terlanjar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam lembaga dan LKS termasuk layanan KPO.	89,00	1.989.000	100,00	534.812	100,00	166.851	78,68	131.275	78,68	78,68	178,68	666.087	200,76	33					
						Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasih di Daerah Provinsi untuk di Pulangkan ke Daerah Kab/Kota Asal	Jumlah Tuna Sosial dan KPO yang Memperoleh Pelayanan pendampingan Sosial	610	1.989.000	232,00	534.812	50,00	166.851	12,00	131.275	24,00	78,68	244,00	666.087	40,00	33				
						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasih di Daerah Provinsi untuk di Pulangkan ke Daerah Kab/Kota Asal	Jumlah Tuna Sosial dan KPO yang Memperoleh Pelayanan pendampingan Sosial	610	1.989.000	232	534.812	50	166.851	12,00	131.275	24,00	78,68	244,00	666.087	40,00	33				
Rata Rata Capaian Kinerja (%)													24,00	78,68			40,00	33,49							
Predikat Kinerja													SR	T											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RPKD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	1 06 04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam lembaga dan LKS termasuk layanan KPO.	89 persen	6.465.000	100,00	persen	2.604.537	100,00	Persen	3.991.254	97,48	3.890.508	97,48	97,48	197,48	6.495.045	221,88	100
		1 06 04 1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial.	1.725 Orang	2.575.000	491,00	Orang	934.945	345,00	Orang	242.999	46,00	215.646	13,33	88,74	537,00	1.150.591	31,13	45
		1 06 04 1.01 04		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial.	1.725 orang	2.575.000	491	orang	934.944	345	orang	242.999	46,00	215.646	13,33	88,74	537,00	1.150.590	31,13	45
		1 06 04 1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	Jumlah PMKS anak yang memperoleh pendampingan layanan sosial.	1.750 Orang	2.395.000	693,00	Orang	1.246.277	46,00	Orang/LK SA	847.161	36,00	839.273	78,26	99,07	729,00	2.085.550	41,66	87
		1 06 04 1.02 13		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah anak yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.	1.750 orang	2.395.000	693	orang	1.246.276	46	Orang/LKS A	847.161	36,00	839.273	78,26	99,07	729,00	2.085.549	41,66	87
		1 06 04 1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial.	200 Orang	920.000	335	Orang	229.380	400	Orang	996.039	577,00	930.592	100,00	93,43	912,00	1.159.972	100,00	126
		1 06 04 1.03 07		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial.	200 orang	920.000	336	orang	229.380	400	orang	996.039	577,00	930.592	100,00	93,43	913,00	1.159.972	100,00	126
		1 06 04 1.05		Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA Di Dalam Panti	Jumlah peserta sosialisasi penyalahgunaan Napza	325,00 Orang	575.000	189,00	Orang	193.935	100,00	Orang	1.905.054	143,00	1.904.997	100,00	100,00	332,00	2.098.932	100,00	100
		1 06 04 1.05 05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial	325 orang	575.000	189	orang	193.935	100	Orang	1.905.054	143,00	1.904.997	100,00	100,00	332,00	2.098.932	102,15	100
		Rata Rata Capaian Kinerja (%)													72,90	95,31		68,20	89,46		
Predikat Kinerja													S	ST							
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	1 06 05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga	95 persen	29.983.000	100,00	Persen	6.967.963	100,00	Persen	19.512.255	100,00	18.718.521	100,00	95,93	200,00	25.686.483	210,53	86
		1 06 05 1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai	50.000 Jiwa	9.055.000	68.163	Jiwa	5.355.204	90,00	Jiwa	19.512.255	90.265,00	18.718.521	100	95,93	158.428	24.073.725	100,00	100
		1 06 05 1.02 01		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan jaminan sosial	70.000 KK PMKS	7.100.000	68.163	KPM	4.866.060	90.000	KPM	18.498.594	90.000,00	17.706.642	100,00	95,72	158.163,00	22.572.702	225,95	100
		1 06 05 1.02 02		Pengolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah KK miskin di Daerah Kab/Kota yang memperoleh penanaman sosial	650 KK	1.955.000	136	KK	489.144	270	KK	1.013.661	270,00	1.011.879	100,00	99,82	406,00	1.501.023	62,46	100
Rata Rata Capaian Kinerja (%)													100	95,93		100,00	100				
Predikat Kinerja													ST	ST							
6	Penanganan Fakir Miskin	1 06 06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga.	95 persen	29.983.000	100,00	persen	2.101.904	100,00	Persen	628.940	100,00	625.638	100,00	99,47	200,00	2.727.542	210,53	9
		1 06 06 1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah KK yang mendapatkan bantuan sosial bencana alam	1.500 KK / KPM	1.400.000	520,00	KK / KPM	922.568	29,00	KK	333.612	29,00	330.375	100,00	99,03	549,00	1.252.942	36,60	89
					Jumlah yang Mendapatkan Jaminan dan Bantuan Bencana Sosial	10 Lokasi	2.250.000	12,00	Lokasi	1.179.336	5,00	Lokasi	295.328	5,00	295.263	100,00	99,98	17,00	1.474.599	100,00	66
		1 06 06 1.01 03		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah KK yang mendapatkan Bantuan Sosial Bencana Alam	1.500 KK	1.400.000	520	KK	922.568	29	KK	333.612	29,00	330.375	100,00	99,03	549,00	1.252.943	36,60	89
		1 06 06 1.01 05		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah yang mendapatkan bantuan bencana sosial	10 Lokasi	2.250.000	12	Lokasi	1.179.336	5	Lokasi	295.328	5,00	295.263	100,00	99,98	17,00	1.474.599	100,00	66
Rata Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	99,50		68,30	77,52				
Predikat Kinerja													ST	ST							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
7		1 06 07	PROGRAM PENGOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase PSKS yang mampu di berdayakan.	90,00 %	956.000	100,00 %	225.660	100 %	839.095	77,01	838.078	77,01	99,88	177,01	1.063.738	196,68	111			
		1 06 07 1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah keluarga pahlawan dan veteran yang memperoleh pelayanan sosial	376 Orang	956.000	288,00 Orang	225.660	87 Orang	839.095	67,00	838.078	77,01	100,00	355,00	1.063.738	94,41	100			
		1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah keluarga pahlawan dan veteran yang memperoleh pelayanan sosial	376 orang	956.000	288 Orang	225.660	87 Orang	839.095	67,00	838.078	77,01	100,00	355,00	1.063.738	94,41	100			
												Rata Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja		77,01	100,00			94,41	100,00		
8	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	2 08 02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi	0,02 persen	7.620.000	0,04 Persen	1.926.628	0,02 Persen	2.159.818	0,02	2.147.904	100,00	99,45	#VALUE!	4.074.532	100,00	53,47			
				Persentase ARG dalam APBD	9,05 persen		4,00 Persen		6,33 Persen		6,33		100,00	10,33	114,14						
		2 08 02 1.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilatih PPRG	10,00 OPD	1.250.000	35,00 OPD	388.727	25,00 OPD	170.000	25,00	164.995	100,00	97,06	60,00	553.722	100,00	44			
		2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang dilatih PPRG	10 OPD	1.250.000	35 OPD	388.727	25 OPD	170.000	25,00	164.995	100,00	97,06	60,00	553.722	100,00	44			
		2 08 02 1.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah PEKKA yang diberi bantuan usaha	250,00 Orang	1.000.000	98,00 Orang	905.754	50,00 Orang	1.653.165	34,00	1.650.105	68,00	99,81	132,00	2.555.860	52,80	100			
		2 08 02 1.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosisal, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) yang meningkat taraf ekonomi keluarga	250 orang	1.000	98 Orang	905.754	50 orang	1.653.165	34,00	1.650.105	68,00	99,81	132,00	2.555.859	52,80	100			
		2 08 02 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang mendapat penguatan kapasitas	10,00 Lembaga	1.050.000	3,00 Lembaga	513.056	7,00 Lembaga	336.653	7,00	332.804	100,00	98,86	10,00	845.859	100,00	81			
		2 08 02 1.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga pendukung prasyarat PUG yang difasilitasi (Pokja PUG, Gender Vocal Point, Sekber PUG, Lembaga Driver PUG (4 lembaga)	10 lembaga	1.050.000	3 lembaga	513.055	7 lembaga	336.653	7,00	332.804	100,00	98,86	10,00	845.859	100,00	81			
												Rata Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja		89,33	98,58			84,27	74,95		
9	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi	0,02 %	3.620.000	0,04 %	279.063	0,02 %	62.500	0,02	53.241	100,00	85,19	0,06	332.304	100,00	9			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wiyah Kerjanya Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Dudi yang mendukung pembangunan daerah urusan PPPA	20 DUDI	3.620.000	14 DUDI	279.063	25,00 DUDI	62.500	20,00	53.241	80,00	85,19	34,00	332.304	100,00	9		
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Konrenhensif bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	jumlah DUDI yang mendukung pembangunan urusan PPPA	20 DUDI	3.620.000	14 DUDI	279.063	25 DUDI	62.500	20,00	53.241	100,00	85,19	34,00	332.304	100,00	9		
												Rata Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja		80,00	85,19			100,00	9,18		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi / Ket							
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.						
10	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ARG dalam APBD	9,05	%	750.000	4,00	%	353.083	6,33	%	92.000	6,33	84.564	100,00	91,92	10,33	437.647	100,00	58									
		2 08 05 1.01		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersusunnya dokumen SIGA	1	Dokumen	750.000	12,00	Dokumen	353.083	1,00	Dokumen	92.000	1,00	84.564	100,00	91,92	13,00	437.647	100	58								
		2 08 05 1.01 01		Penyediaan Data Gender Anak dan Provinsi	Jumlah Dokumen SIGA yang tersedia	1	Dokumen	750.000	12	Dokumen	353.083	1	Dokumen	92.000	1,00	84.564	100,00	91,92	13,00	437.647	1.300	58								
Rata Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja																100,00	91,92			100,00	58,35									
11		2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Forum Anak yang dibentuk serta lembaga Layanan Perlindungan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	100	persen	1.550.000	100	persen	1.431.794	100,00	Persen	601.910	100,00	464.911	100,00	77,24	200,00	1.896.704	100,00	122									
		2 08 07 1.02		Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah anak korban kekerasan yang terlayani	15,00	Orang	500.000	82,00	Orang	234.276	15,00	Orang	548.770	15,00	412.728	100,00	75,21	97,00	647.004	100,00	100								
		2 08 07 1.02 03		Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah anak korban kekerasan yang terlayani	15	orang	500.000	82	orang	234.276	15	orang	368.436	15,00	360.179	100,00	97,76	97,00	594.455	100,00	100								
		2 08 07 1.02 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah kab/kota yang diadvokasi melaksanakan KLA	1	Kab/Kota	1.250.000	16	Kab/Kota	410.783	1	Kab/Kota	53.140	-	52.183	-	98,20	16,00	462.966	100,00	37								
		2 08 07 1.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kab/kota yang diadvokasi melaksanakan KLA	1	Kab/Kota	1.250.000	16	Kab/Kota	410.783	1	Kab/Kota	53.140	-	52.183	-	98,20	16,00	462.966	100,00	37								
		2 08 07 1.01 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang mendapat penguatan kapasitas	1	Lembaga	1.050.000	3,00	Lembaga	513.056	1,00	Lembaga	-	-	-	-	-	3,00	513.056	100,00	49								
		2 08 07 1.03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Unit Layanan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	10	Lembaga	1.050.000	3	Lembaga	513.056	1	Lembaga	-	-	-	-	-	3,00	513.056	30,00	49								
		2 08 07 1.03 03		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																										
Rata Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja																100,00	86,70			100,00	92,95									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																32.750.938		31.268.036												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																83,80		92,41												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																T		ST												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan. Faktor penghambat : Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penguatan koordinasi lintas bidang teknis lingkup OPD dan lintas sektor antar OPD Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : Konsistensi pencapaian target setiap periode renja																														

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
4		02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	%	41.884.237.286	100	35.412.158.686	100	38.021.973.035	25	32.594.796.270							
		4 02 02 1,08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	20	Laporan	Rp 2.376.758.391	20	863.687.732	20	1.332.725.733	20	1.250.645.506	100,00	93,84	40	2.114.333.238	200	88,96	SETWAN
		4 02 02 1,07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi	152	Kali	Rp 492.534.897	152	282.128.282	152	793.630.985	152	768.401.855	100,00	96,82	304	1.050.530.137	200	213,29	
		4 02 02 1,01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	50	Perda	Rp 11.095.041.702	5	2.524.591.409	10	5.156.836.414	3	3.628.566.533	30,00	70,36	-	6.153.157.942	-	55,46	
		4 02 02 1,04	Peningkatan Kapasitas DPRD																	
		4 02 02 1,04 02	Sub.Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek dan Orientasi DPRD	45	Anggota	Rp 24.937.884.956	45	15.777.228.744	45	8.386.041.345	45	7.958.435.615	100,00	94,90	90	23.735.664.359	200	95,18	
		4 02 02 1,04 06	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kerjasama Media Massa dan Media Elektronik	8	MOU	Rp 2.982.017.340	16	1.967.582.678	8	2.840.409.250	8	2.826.851.861	100,00	99,52	24	4.794.434.539	300	160,78	
		4 02 02 1,05 01	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																	
		4 02 02 1,05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	3	Kali	Rp 4.278.897.798	3	5.511.505.606	3	9.650.257.399	3	8.429.214.750	100,00	87,35	6	13.940.720.356	200	325,80	
		4 02 02 1,05 01	Kunjungan Kerja	Jumlah Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	96	Kali	Rp 11.649.034.235	96	8.485.434.235	96	9.862.071.909	96	7.732.680.150	100,00	78,41	192	16.218.114.385	200	139,22	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	90,00	75,34			185,71	154,10	
													Predikat kinerja	SR	SR			ST	ST	
II		4 01 05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	100	%	883.272.328	100	189.990.500	10	2.984.794.668		2.395.392.220							
		4 02 02 1,01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Tersosialisasinya Produk Hukum DPRD (Perda)	50	Perda	Rp 883.272.328	5	189.990.500	10	2.984.794.668	10	2.395.392.220	100,00	80,25	0	2.585.382.720	-	292,71	SETWAN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	80,25			-	97,57	
													Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPDP Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.				
II I.		4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100	%	557.467.731	100	124.719.100	25	45.372.524.482		41.740.466.620									
		4 02 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	30	Lap	Rp 557.467.731	6	124.719.100	6	234.305.415	6	225.591.118	100,00	96,28	12	350.310.218	40,00	62,84	SETWAN		
		4 02 02 1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
		4 02 02 1,02 01	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	3	31.430.355.898	3	31.420.739.266	100,00	99,97	-	-	-	-			
		4 02 02 1,02 07	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan	15	Laporan	Rp 627.338.374	3	129.950.800	3	173.147.544	3	105.828.403	100,00	61,12	-	235.779.203	-	37,58			
		4 02 01 1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek sesuai Tugas dan Fungsi	75	Orang	Rp 854.240.801	15	69.902.400	15	610.197.660	15	601.554.039	100,00	98,58	30	671.456.439	40	78,60			
		4 02 01 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana yang akan diadakan	1	Tahun	Rp 7.123.144.255	100	3.744.120.325	100	8.940.087.268	100	5.985.991.814	100,00	66,96	200	9.730.112.139	0,50	136,60			
		4 02 01 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Administrasi Perkantoran	100	Persen	Rp 1.311.164.450	100	1.376.379.564	100	1.779.564.585	100	1.554.113.952	100,00	87,33	200	2.930.493.516	50,00	223,50			
		4 02 01 1,16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas DPRD			-		-	40	2.204.866.112	40	1.846.648.028	100,00	83,75	40	-	0	-			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	84,86			25,25	180,05	
														Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
Faktor Penghambat : -																						
											Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program		86.379.292.185	76.730.655.110								
											Anggaran seluruh program		96,67	80,15	70,32	143,91						
											Kinerja dari seluruh Program		SR	SR	SR	SR						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya *) :																						

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1		60101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	100	17.040.651.000	100	7.143.748.861	100	18.396.516.015	100	16.246.571.973	100	88,31	100	24.848.633.526	100	145,82		
		6010108	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.611.774.000		2.365.445.057		737.202.476		716.923.385		97,25		3.082.368.442		85,34		
		601010803	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran	100	3.611.774.000	100	2.365.445.057	100	737.202.476	100	716.923.385	100	97,25	200	3.082.368.442	100,00	85,34		
		6010106	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.795.853.000		1.515.278.070		1.109.453.432		1.084.483.432		97,75		2.599.761.502		44,86		
		601010602	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	100	5.795.853.000	100	1.515.278.070	100	1.109.453.432	100	1.084.483.432	100	97,75	200	2.599.761.502	100,00	44,86		
		6010105	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.816.104.000		1.597.273.656		500.000.229		461.594.689		92,32		2.058.868.345		42,75		
		601010509	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop	164	4.816.104.000	##	1.597.273.656	30	500.000.229	30	461.594.689	100	92,32	220	2.058.868.345	134,15	42,75		
		6010101	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.259.226.000		1.458.312.692		192.780.730		191.335.300		99,25		3.107.960.684		137,57		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
		6 01 01 1 01 01	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penugasan Berbasis Resiko, Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	45 Dokumen	2.259.226.000	36	1.458.312.692	9	121.148.000	9	121.115.300	100	99,97	45	3.107.960.684	100,00	137,57		
		6 01 01 1 01 07	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						71.632.730		70.220.000	-	98,03							
		6 0 1 1 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			557.694.000	207.439.386		15.857.079.148		13.792.235.167		86,98		13.999.674.553		2510,28			
		6 01 01 1 02 01	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	-	-	-	12	15.782.079.385	12	13.717.329.643	100	86,92	12	13.717.329.643	100,00	0,00		
		6 01 01 1 02 01	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	10 Dokumen	557.694.000	6	207.439.386	2	74.999.763	2	74.905.524	100	99,87	8	282.344.910	80,00	50,63		
												86	96			88	52			
2		6 0 1 2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja OPD, Kategori BB	32 OPD	19.953.762.000	15	7.658.547.206	20	3.142.669.235	-	3.126.500.208	100	99,49	15	10.785.047.414	100	54,05		
		6 0 1 2 01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal			18.360.724.000		6.695.415.926		2.869.955.587		2.860.130.805		99,66		9.555.546.731		52,04		
		6 01 02 1 01 01	- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Jumlah Laporan Hasil Opname Kas, Jumlah Laporan Hasil Proby Audit, Jumlah Laporan Monitoring Kemajuan Pekerjaan Kegiatan, Jumlah Hasil Evaluasi Siransija, Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja, Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan	1138 Laporan	5.198.923.000	##	2.182.935.512	82	538.474.891	82	538.092.370	100	99,93	613	2.721.027.882	53,87	52,34		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
		6 01 02 1 01 02	- Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS	300 Laporan	1.894.426.000	##	736.526.100	60	174.999.997	60	173.078.850	100	98,90	245	909.604.950	81,67	48,01		
		6 01 02 1 01 03	- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD, Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD, Jumlah Laporan Hasil Reviu Renja, Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA, Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD, Jumlah Laporan Reviu KUA PPAS, Jumlah Laporan Hasil Evaluasi PPRG, Jumlah Laporan Hasil Reviu LPPD Provinsi, Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP SOPD, Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP Provinsi	103 Laporan	3.551.581.000	##	933.947.147	112	450.660.137	112	446.836.700	100	99,15	257	1.380.783.847	249,51	38,88		
		4 02 01 01 18 05	- Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Monev Dana Desa, Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP Kabupaten/Kota	190 Laporan	2.414.556.000	82	901.148.026	18	285.095.200	18	284.597.700	100	99,83	100	1.185.745.726	52,63	49,11		
		4 02 01 01 18 06	- Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dalam Rangka Sinergitas Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional	60 Laporan	2.272.916.000	33	1.018.338.690	12	1.133.214.280	12	1.133.174.757	100	100,00	45	2.151.513.447	75,00	94,66		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
		6 01 02 1 01 07	- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan s/d Tahun Berjalan, Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan s/d Tahun Berjalan	70	Persen	3.028.322.000	##	922.520.451	70	287.511.082	73	284.350.428	104	98,90	214	1.206.870.879	305,71	39,85			
		6 0 1 2 1 02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.593.038.000		963.131.280		272.713.648		266.369.403		97,67		1.229.500.683		77,18		
		6 01 02 1 02 02	- Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengaduan (Kasus) Yang Ditindaklanjuti Melalui Pemeriksaan Khusus	50	Laporan	1.593.038.000	44	963.131.280	12	272.713.648	12	266.369.403	100	97,67	56	1.229.500.683	112,00	77,18			
														101	99			133	57			
3		6 0 1 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kasus Korupsi	-	NIHIL	8.766.878.000	NIHIL	2.620.510.127	NIHIL	893.572.900		874.576.542	100	97,87		3.495.086.669	100	39,87			
		6 0 1 3 1 01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				2.231.803.000		552.857.842		127.703.287		126.879.105		99,35		679.736.947		30,46			
		6 01 03 1 01 01	- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah SOPD di Provinsi Gorontalo Yang Menerapkan SPIP Pada Level Berkembang	32	Laporan	2.231.803.000	32	552.857.842	32	127.703.287	32	126.879.105	100	99,35	64	679.736.947	200,00	30,46			
		6 0 1 3 1 02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi				6.535.075.000		2.067.652.285		765.869.613		747.697.437		97,63		2.815.349.722		43,08			
		6 01 03 1 02 04	- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Edukasi Publik dan Inspeksi Berkala	5	Laporan	2.398.177.000	3	679.910.834	1	480.900.534	1	466.922.337	100	97,09	4	1.146.833.171	80,00	47,82			

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)		Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	4 01 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan					100	1.378.950.330	100,00	1.306.176.408	100,00	94,72	100,00	1.306.176.408	-	-					
				Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur					100	#####	100,00	22.228.058.253	100,00	70,11	100,00	#####	-	-					
II.		4 01 02 02 15	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	100	1.378.950.330	100,00	1.306.176.408	100,00	94,72	100,00	1.306.176.408	-	-					
		4 01 02 01 15 01	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	-	-	-	100	1.154.821.800	100,00	1.083.519.648	100	94	100,00	1.083.519.648	-	-					
		4 01 02 02 15 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	-	-	-	100	224.128.530	100	222.656.760	100	99	99,64	222.656.760							
III.		4 01 01 01 16	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan kedinasan	100	%	46.763.397.225	100	#####	100	#####	100,00	22.228.058.253	100,00	70,11	200,00	#####	100,00	90,23				
		4 01 01 01 16 01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)	Jumlah kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)	60 Kali		20.989.050.657	36	12	4.296.368.216	12	3.502.192.021	100	82	48	13.178.241.470	80	62,79					
					15 Paket			9	3		3		100		12		80						
		4 01 01 01 16 02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)	Jumlah kegiatan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)	60 Kali		17.445.836.149	36	12	3.775.976.466	12	2.687.485.629	100	71	48	10.202.384.214	80	58,48					
					15 Paket			9	3		3		100		12		80						
		4 01 01 01 16 03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan Provinsi	25 Kali		8.328.510.419	13	5	2.773.473.442	5	16.038.380.603	100	68	18	18.811.854.045	72	225,87					
					5 Paket			3	1		1		100		4		80						
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	82,41			100,00	90,23					
Predikat kinerja													ST	T			ST						
TOTAL ANGGARAN										33.085.757.218	23.534.234.661												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)										100,00	82,41	100,00	90,23
Faktor Penghambat										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)										ST	T	ST	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya *)																							

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
RKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :

1. Angka melek huruf (%) : 99,94%
 2. Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) : 7,50%
 3. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK (%) : 77,25%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPD Povinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
					K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	21.367.027	100	%	6.812.462	100	%	854.234	74	1.389.362	74,17	162,64	174,17	8.201.824	174,17	38,39			
				Presentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100	%	9.446.878	100	%	19.154.086	100	%	6.419.781	75	8.511.639	75,00	132,58	175,00	27.665.725	175,00	292,86			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi program	75	Dok	8.641.751	45	Dokumen	5.457.679	15	Dokumen	727.911	11	1.188.737	73,33	163,31	56,00	6.646.416	74,67	76,91			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, DPA, RKA, LKPJ, SAKIP, LPPD, Profil Pendidikan, PK, Data Sektor, Cascading, Buku Saku, Profil Pendidikan dan Dokumen Emonep	75	Dok	8.641.751	45	Dokumen	5.457.679	15	Dokumen	727.911	15	1.188.737	100,00	163,31	60,00	6.646.416	80,00	76,91			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	20	Laporan	2.485.777	12	Laporan	956.882	4	Laporan	126.323	4	200.625	100,00	158,82	16,00	1.157.507	80,00	46,57			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	20	Laporan	2.485.777	12	Laporan	956.882	4	Laporan	126.323	4	200.625	100,00	158,82	16,00	1.157.507	80,00	46,57			
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Pendidikan, pelatihan, bimtek dan sosialisasi) Dinas Dikbudpora	12	Bulan	2.420.919	36	Bulan	1.230.155	12	Bulan	208.935	12	318.458	100,00	152,42	48,00	1.548.613	100,00	63,97			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan Bimtek	12	Bulan	2.420.919	36	Bulan	1.230.155	12	Bulan	208.935	12	318.458	100,00	152,42	48,00	1.548.613	100,00	63,97			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Dikbudpora	12	Bulan/Paket	6.266.435	22	Bulan/paket	1.303.276	12	Bulan	509.485	12	530.437	100,00	104,11	34,00	1.833.713	100,00	29,26			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC, Laptop, LCD, Printer	5	Paket	1.303.408	5	Paket	299.062	12	Bulan	509.485	12	530.437	100,00	104,11	17,00	829.499	100,00	63,64			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Dikbudpora	12	Bulan	6.466.231	36	Bulan	14.649.319	12	Bulan	5.701.361	12	7.662.744	100,00	134,40	48,00	22.312.063	100,00	100,00			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Layanan Kantor	12	Bulan	6.466.231	36	Bulan	14.649.319	12	Bulan	5.701.361	12	7.662.744	100,00	134,40	48,00	22.312.063	100,00	100,00			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		94,67	142,61			90,93	63,34		
															Predikat kinerja		R	S						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan RPKD Provinsi Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan		Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase APK	95,00	APK	281.165.698	2,82	APK	1	APK	41.268.123	-	445.203.926	0,00	3	548.589.391	2,97	195				
				Presentase APM	78,00	APM		2,30	APM		1		APM		-			0,00				2	2,95
				Presentase Indeks Integritas	76,00	INDEKS INTEGRITAS UN SISWA		74,88	INDEKS INTEGRITAS UN SISWA		-		INDEKS INTEGRITAS UN SISWA		-			0,00				75	98,53
				Jumlah GTK yang dibina	16.005	Orang		6.998	Orang		2.239		Orang		73.138.136			2.153				76.655.717	96,16
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Minat Bakat/ Kreatifitas/ prestasi Siswa SMA/SLB	7.310	Orang	6.949.709	5.220	Orang	2.292.637	1.462	Orang	571.593	1.462	261.539	100,00	45,76	6682,00	2.554.176	91,41	36,75		
				Jumlah Siswa Boarding School SMA dan SLB: SMAN 3 Gto 44 siswa, SMA Wirabakti 42 orang, MAN Cendekia 105 orang, SMA Dwiwarna 4 Orang, SLB 285 orang	1.663	Orang	21.877.194	677	Orang	7.160.302	342	Orang	40.696.531	342	444.942.387	100,00	1093,32	1019,00	452.102.689	61,27	2066,55		
				Jumlah pengawas satuan pendidikan yang melaksanakan supervisi manajerial dan akademik	285	Orang	2.624.176	144	Orang	1.233.129	57	Orang	129.326	57	212.454	100,00	164,28	201,00	1.445.583	100,00	55,09		
				Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang menerima insentif/tunjangan	10.480	Orang	262.035.965	6.288	Orang	129.426.357	2.096	Orang	52.083.600	6.288	75.101.210	100,00	144,19	12576,00	204.527.567	100,00	78,05		
				Jumlah GTK penerima beasiswa	700	Orang	1.071.945	563	Orang	951.121	86	Orang	179.556	86	232.351	100,00	129,40	649,00	1.183.472	92,71	100,00		
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Boarding School SMA dan SLB: SMAN 3 Gto 44 siswa, SMA Wirabakti 42 orang, MAN Cendekia 105 orang, SMA Dwiwarna 4 Orang, SLB 285 orang	1.663	Orang	21.877.194	677	Orang	7.160.302	342	Orang	40.696.531	342	481.908.223	100,00	1184,15	1019,00	489.068.525	61,27	2235,52		
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Minat Bakat/ Kreatifitas/ prestasi Siswa SMA/SLB	7.310	Orang	6.949.709	5.220	Orang	2.292.637	1.462	Orang	571.593	1.462	261.539	100,00	45,76	6682,00	2.554.176	91,41	36,75		
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang menerima insentif/tunjangan	10.480	Orang	262.035.965	6.288	Orang	129.426.357	2.096	Orang	52.083.600	6.288	75.101.210	100,00	144,19	12576,00	204.527.567	100,00	78,05		
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah GTK penerima beasiswa	700	Orang	1.071.945	563	Orang	951.121	86	Orang	179.556	86	232.351	100,00	129,40	649,00	1.183.472	92,71	100,00		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah pengawas satuan pendidikan yang melaksanakan supervisi manajerial dan akademik	285	Orang	2.624.176	144	Orang	1.233.129	57	Orang	129.326	57	212.454	100,00	164,28	201,00	1.445.583	100,00	55,09		
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa SMK yang mengikuti kerja Industri (Peserta Prakerin)	22.431	Siswa	8.333.366	8.406	Siswa	2.225.161	4.675	Siswa	20.206.779	4.675	522.212	100,00	2,58	13.081,00	2.747.373	58,32	100,00		
				Jumlah siswa/lulusan SMK yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi dan mendapatkan sertifikasi profesi	808	Orang	3.035.162	320	Orang	762.105	162	Orang	538.875	162	587.490	100,00	109,02	482,00	1.349.595	59,65	44,47		
				Jumlah Peserta Minat Bakat/ Kreatifitas/ prestasi Siswa SMK	4.725	Orang	5.706.740	3.736	Orang	1.697.446						3.736,00	1.697.446	79,07	29,74				
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa SMK yang mengikuti kerja Industri (Peserta Prakerin)	22.431	Siswa	8.333.366	8.406	Siswa	2.225.161	4.675	Siswa	20.206.779	4.675	522.212	100,00	0,00	13081,00	2.747.373	58,32	100,00		
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa/lulusan SMK yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi dan mendapatkan sertifikasi profesi	808	Orang	3.035.162	320	Orang	762.105	162	Orang	538.875	162	587.490	100,00	109,02	482,00	1.349.595	59,65	44,47		
				Jumlah Peserta Minat Bakat/ Kreatifitas/ prestasi Siswa SMK	4.725	Orang	5.706.740	3.736	Orang	1.697.446						3.736,00	1.697.446	79,07	29,74				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	241,22			80,30	313,83			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		S	S							
3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda dan Olahraga yang dibina	3.955	Orang	50.841.224	1.783	Orang	14.048.158	625	Orang	948.011	-	989.696	0,00	104,40	1.783	15.037.854	45,08	29,58		
			Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Paskibraka	5	Kegiatan	6.091.828	3	Kegiatan	2.654.873	1	Kegiatan	781.058	2	826.071	100,00	105,76	5,00	3.480.944	100,00	57,14		
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukal Pengibar Bendera	Jumlah kegiatan Paskibraka	5	Kegiatan	6.091.828	3	Kegiatan	2.654.873	1	Kegiatan	781.058	2	826.071	100,00	100,00	5,00	3.480.944	100,00	57,14		
			Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi PPAN,PPAP, Kirab Pemuda, Pemuda kreatif dan KPN Nasional dan Internasional	600	Orang	1.219.493	240	Orang	606.512	625	Orang	166.953	625	163.625	100,00	98,01	865,00	770.137	144,17	63,15		
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Seleksi PPAN,PPAP, Kirab Pemuda, Pemuda kreatif dan KPN Nasional dan Internasional	600	Orang	1.219.493	240	Orang	606.512	625	Orang	166.953	625	163.625	100,00	98,01	865,00	770.137	144,17	63,15		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	101,88			122,08	60,15			
													Predikat kinerja		R	SR							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPDP Provinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Provinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Provinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
4			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Pemuda dan Olahraga yang dibina	3.955	Orang	50.841.224	1.783	Orang	14.048.158	1.907	Orang	8.232.506	1.907	14.899.740	100,00	180,99	3.690	28.947.898	93,30	56,94		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kevenangan Daerah Provinsi	Jumlah peserta olahraga Tradisional	2.312	Orang	3.263.160	887	Orang	693.052	465	Orang	1.173.034	465	1.772.081	100,00	151,07	1352,00	2.465.133	58,48	75,54		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta olahraga Tradisional	2.312	Orang	3.263.160	887	Orang	693.052	465	Orang	1.173.034	465	1.772.081	100,00	151,07	1352,00	2.465.133	58,48	75,54		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet berprestasi	6.654	Atlet	8.594.029	1.440	Atlet	3.670.599	1.342	Atlet	891.874	1.342	916.337	100,00	102,74	2782,00	4.586.936	41,81	53,37		
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet berprestasi	6.654	Atlet	8.594.029	1.440	Atlet	3.670.599	1.342	Atlet	891.874	1.342	916.337	100,00	102,74	2782,00	4.586.936	41,81	53,37		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah atlet yang dibina	442	Atlet	24.952.573	242	Atlet	6.423.122	100	Atlet	6.167.598	100	12.211.322	100,00	197,99	342,00	18.634.444	100,00	74,68		
			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah atlet yang dibina	442	Atlet	24.952.573	242	Atlet	6.423.122	100	Atlet	6.167.598	100	12.211.322	100,00	197,99	342,00	18.634.444	100,00	74,68		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	151			67	68		
Predikat kinerja																R	SR						
5	Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Intaq		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Nilai Budaya yang dikembangkan	14,03	%	15.013.778	23,25	%	5.178.739	19	%	181.710	43	236.272	100,00	130,03	66	5.415.011	100,00	36,07		
			Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen yang tersusun dan diakui secara nasional dan internasional	25	Dokumen	107.554	16	Dokumen	179.707	35	Dokumen	181.710	35	236.272	100,00	130,03	51	415.979	100,00	100,00		
				Jumlah adat/tradisi dan nilai budaya yang terdokumentasi	70	Dokumen	1.119.649	52	Dokumen	447.577								52	447.577	74,29	39,97		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Dokumen yang tersusun dan diakui secara nasional dan internasional	25	Dokumen	107.554	16	Dokumen	179.707	35	Dokumen	181.710	35	236.272	100,00	130,03	51	415.979	100,00	100,00		
				Jumlah adat/tradisi dan nilai budaya yang terdokumentasi	70	Dokumen	1.119.649	52	Dokumen	447.577								52	447.577	74,29	39,97		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	130,03			87,14	69,99		
Predikat kinerja																ST	SR						
6			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Nilai Budaya yang dikembangkan	14,03	%	15.013.778	23,25	%	5.178.739	19	%	890.896	50	1.226.031	100,00	137,62	73	6.404.770	100,00	42,66		
			Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya	25	Kegiatan	8.687.495	14	Kegiatan	3.070.870	5	Kegiatan	890.896	2	1.226.031	40,00	137,62	16,00	4.296.901	64,00	49,46		
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya	25	Kegiatan	8.687.495	14	Kegiatan	3.070.870	5	Kegiatan	258.577	5	335.350	100,00	129,69	19,00	3.406.220	76,00	39,21		
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah peserta GSM dan Jumlah Peserta GBN							5	Kegiatan	632.319	5	890.681	100,00	140,86	5,00	890.681	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																40,00	137,62			64,00	49,46		
Predikat kinerja																SR	R						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Provinsi) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan RKPDPovinsi Tahun berjalan (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDPovinsi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDPovinsi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)	K		
7	Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Intaq		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Nilai Budaya yang dikembangkan	14,03	%	15.013.778	23,25	%	5.178.739	2	%	391.784	17	499.423	850	127,47	40	5.678.162	286,89	38		
			Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	40,00	Cagar Budaya	824.322	20,00	Cagar Budaya	570.936	17	Cagar Budaya	195.463	17	240.151	100	122,86	37	811.087	92,50	98		
				Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya yang tersertifikasi	25,00	Orang	945.054	25,00	Orang	681.886	15	Orang	196.321	15	259.272	100	132,07	40	941.158	100,00	100		
			- Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	40,00	Cagar Budaya	824.322	20,00	Cagar Budaya	570.936	17	Cagar Budaya	195.463	17	240.151	100	122,86	37	811.087	92,50	98		
			- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya yang tersertifikasi	25,00	Orang	945.054	25,00	Orang	681.886	15	Orang	196.321	15	259.272	100	132,07	40	941.158	100,00	100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	127			96	99		
Predikat kinerja																SR	SR						
132.325.181													549.611.806										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D PROGRAM 7)													76,38		129,14								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D PROGRAM 7)													R		R								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :				Adanya konsistensi dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan program dan kegiatan																			
Faktor penghambat :				Adanya revisi/gegeseran anggaran antar belanja maupun antar kegiatan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :				Mengoptimalkan program/kegiatan serta rincian belanja yang sudah ada untuk mengakomodir kebutuhan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				Mengevaluasi program/kegiatan ditahun sebelumnya serta tetap konsisten dalam pelaksanaan Renja ditahun berikutnya																			



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini menguraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata-mata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021, proyeksi Tahun 2022 dan 2023. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo 2021, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023 . Pada akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2023.

3.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Gorontalo berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 43.896,37 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 29.109,96 miliar.

Ekonomi Gorontalo tahun 2021 tumbuh sebesar 2,41 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,97 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 10,97persen. Ekonomi Gorontalo triwulan III-2018 terhadap triwulan sebelumnya (*q-to-q*) tumbuh sebesar 3,74 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,78 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 19,41 persen.

Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2021 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,92 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 61,80 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha pada tahun 2021 yang memiliki nilai paling tinggi adalah pada sektor jasa keuangan sebesar 8,97%, disusul oleh industri pengolahan sebesar 5,35% dan jasa keuangan 5,01%. Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran pada tahun 2021 sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan paling tinggi ada pada ekspor dengan nilai sebesar





10,97%, diikuti oleh impor dengan nilai 7,69% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 2,83%

Tabel 3.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
(miliar rupiah)

Lapangan Usaha			Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
			Triw IV-2020	Triw III-2021	Triw IV-2021	Triw IV-2020	Triw III-2021	Triw IV-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.012,10	4.404,67	4.319,56	2.582,09	2.728,67	2.693,66	
B.	Pertambangan dan Penggalian	112,70	124,61	126,40	78,64	87,64	88,33	
C.	Industri Pengolahan	434,06	496,71	462,91	281,51	316,29	293,55	
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	5,14	5,81	6,55	6,04	6,85	
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,34	7,18	6,44	4,38	4,77	4,37	
F.	Konstruksi	1.110,05	1.163,16	1.214,80	766,97	780,62	805,03	
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.212,84	1.394,13	1.407,59	789,24	888,92	893,10	
H.	Transportasi dan Pergudangan	576,75	580,85	591,12	392,79	395,67	398,34	
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,24	254,22	261,48	164,70	172,72	177,50	
J.	Informasi dan Komunikasi	296,25	300,53	311,80	257,80	261,28	271,07	
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	498,87	543,66	559,27	334,63	348,93	349,65	
L.	Real Estat	181,93	190,96	200,88	131,48	137,25	143,38	
M,N.	Jasa Perusahaan	9,23	9,33	9,69	6,27	6,23	6,48	
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	653,17	657,48	656,32	517,78	519,49	517,06	
P.	Jasa Pendidikan	476,66	497,10	521,16	323,26	334,88	348,70	
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	398,71	418,33	418,96	286,74	292,91	293,17	
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	147,91	149,34	156,06	110,86	110,75	115,25	
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		10.374,48	11.197,39	11.230,26	7.035,70	7.393,03	7.405,49	

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Tabel 3.2
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha			Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
			2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.018,13	16.188,12	17.085,46	10.652,83	10.478,71	10.665,33	
B.	Pertambangan dan Penggalian	450,54	468,20	483,23	333,86	332,18	339,34	
C.	Industri Pengolahan	1.755,20	1.799,86	1.936,07	1.159,78	1.172,89	1.235,68	
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	19,44	21,44	22,00	22,39	25,01	25,67	
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,71	26,18	26,88	17,99	18,21	18,10	



F.	Konstruksi	4.391,21	4.399,36	4.597,26	3.065,06	3.059,83	3.097,66
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.102,34	5.100,30	5.386,86	3.372,24	3.326,04	3.439,37
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.366,71	2.245,93	2.325,26	1.626,50	1.551,39	1.578,04
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	969,04	964,41	1.008,92	666,95	659,74	685,96
J.	Informasi dan Komunikasi	1.100,11	1.145,00	1.184,00	930,48	997,07	1.029,70
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.635,75	1.869,83	2.140,55	1.116,53	1.266,77	1.380,46
L.	Real Estat	771,44	778,97	756,45	558,87	563,73	543,50
M,N.	Jasa Perusahaan	38,62	36,49	37,54	26,58	24,86	25,16
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.599,96	2.628,17	2.644,99	2.073,67	2.077,45	2.076,81
P.	Jasa Pendidikan	1.822,04	1.947,54	2.018,18	1.262,79	1.328,11	1.360,66
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.473,89	1.528,89	1.642,18	1.084,81	1.105,94	1.161,37
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	605,31	581,08	600,53	458,64	437,30	447,15
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		41.145,45	41.729,77	43.896,37	28.429,97	28.425,21	29.109,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Triwulan IV 2021 (persen)

Lapangan Usaha		Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (q-to-q)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (y-on-y)	Kumulatif Triw IV-2021 Terhadap Kumulatif Triw IV-2020 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triw IV-2021 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1,28	4,32	1,78	1,59
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,80	12,32	2,16	0,14
C.	Industri Pengolahan	-7,19	4,28	5,35	0,17
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	13,48	4,50	2,62	0,00
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-8,31	-0,13	-0,58	0,00
F.	Konstruksi	3,13	4,96	1,24	0,54
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,47	13,16	3,41	1,48
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,68	1,41	1,72	0,08
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,77	7,77	3,98	0,18
J.	Informasi dan Komunikasi	3,75	5,15	3,27	0,19
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	4,49	8,97	0,21
L.	Real Estat	4,46	9,05	-3,59	0,17
M,N.	Jasa Perusahaan	3,93	3,42	1,22	0,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,47	-0,14	-0,03	-0,01
P.	Jasa Pendidikan	4,13	7,87	2,45	0,36
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,09	2,24	5,01	0,09
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	4,06	3,96	2,25	0,06
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		0,17	5,26	2,41	5,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo



Pada triwulan IV-2021, ekonomi Gorontalo tumbuh 5,26 persen dibandingkan triwulan IV- 2020 (y-on-y). Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,57 persen; diikuti komponen PK-P dan PK-LNPRT berturut-turut sebesar 7,77 persen dan 3,06 persen. Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2021 terhadap triwulan III-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,17 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada triwulan ini disebabkan oleh ekspansi komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto berturut-turut sebesar 27,88 persen dan 11,75 persen

PDRB Per Kapita

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau *percapita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.4 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel 3.4
PDRB Lapangan Usaha Per Kapita ADHB Provinsi Gorontalo
Tahun 2018 - 2020

PDRB Perkapita	2018	2019	2020
Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	31.647,68	33.943,2	33.896,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/ deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari presentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada bulan Januari 2022 Kota Gorontalo mengalami penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,12 pada Desember 2021 menjadi 106,88 pada Januari 2022 atau terjadi deflasi sebesar -0,22%

Dari 345 jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga untuk Kota Gorontalo di Bulan Desember 2018, 57 jenis barang dan jasa menunjukkan adanya kenaikan harga, 36 jenis barang dan jasa mengalami penurunan harga, 252 dan tidak mengalami perubahan harga.



Deflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya penurunan indeks pada 4 kelompok pengeluaran, kenaikan indeks pada 3 kelompok pengeluaran, serta 4 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -1,55 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,37 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,11 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,09 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,1 persen; kelompok transportasi sebesar 0,73 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,05 persen.

Laju Inflasi tahun kalender Januari 2022 sebesar -0,02% dan inflasi yoy (Januari 2022 terhadap Januari 2021) sebesar 1,73%. Bahan makanan pada Januari 2022 di Kota Gorontalo mengalami deflasi sebesar -2,42%.

Tabel 3.5

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Januari 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Januari 2021	IHK Desember 2021	IHK Januari 2022	Tingkat Inflasi Januari 2022 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Januari 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	105,06	107,12	106,88	-0,22	-0,22	1,73	-0,22
Makanan, Minuman, dan Tembakau	106,54	110,06	108,35	-1,55	-1,55	1,7	-0,463
Pakaian dan Alas Kaki	106,88	108,85	108,73	-0,11	-0,11	1,73	-0,0091
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,19	102,27	103,4	1,1	1,1	2,18	0,1972
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104,43	105,88	105,78	-0,09	-0,09	1,29	-0,0056
Kesehatan	103,85	105,44	105,44	0	0	1,53	0
Transportasi	105,96	107,07	107,85	0,73	0,73	1,78	0,0815
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,74	98,44	98,08	-0,37	-0,37	-0,67	-0,0228
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	98,22	103,57	103,57	0	0	5,45	0
Pendidikan	114,57	117,06	117,06	0	0	2,17	0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106,92	108,44	108,44	0	0	1,42	0
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	108,29	110,97	111,03	0,05	0,05	2,53	0,0036

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

¹⁾ Persentase perubahan IHK Januari 2022 terhadap IHK Desember 2021.

²⁾ Persentase perubahan IHK Januari 2022 terhadap IHK Desember 2021.

³⁾ Persentase perubahan IHK Januari 2022 terhadap IHK Januari 2021.

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang memberikan kontribusi terbesar terhadap deflasi mengalami penurunan indeks dari 110,06 pada Desember 2021 menjadi 108,35 pada Januari 2022. Dari 3 subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami deflasi dan 2 kelompok mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami



deflasi yaitu subkelompok makanan sebesar -2,16 persen. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok rokok dan tembakau sebesar 0,74 persen dan subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,42 persen.

Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau *Gini Ratio* telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Ratio Gorontalo selama periode September 2020 sampai dengan September 2021 terus mengalami peningkatan, hal ini harus menjadi perhatian serius dalam pengambilan kebijakan ke depannya. Meskipun tidak signifikan, tetapi tren nya mengalami kenaikan, dari semula 0,406 pada September 2020, menjadi 0,408 pada Maret 2021 dan 0,409 pada September 2021. Hal ini disinyalir merupakan imbas dari pandemic Covid-19 yang menyebabkan masyarakat kategori miskin menjadi lebih miskin sedangkan masyarakat yang mampu dengan segala instrument investasi dan ketahanan ekonominya dapat bertahan dan tumbuh di masa pandemic ini. Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 0,407 mengalami peningkatan sebesar 0,009 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,398 dan meningkat sebesar 0,017 poin dari September 2020 yang sebesar 0,390. Gini Rasio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,390, turun dibanding Gini Rasio Maret 2021 yang sebesar 0,397 dan turun dibanding Gini Rasio September 2020 yang sebesar 0,391. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 16,06 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang.

Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2021 sebesar 3,01 persen atau mengalami penurunan 0,4 poin dibandingkan Februari 2021 dan mengalami penurunan 1,27 persen jika dibandingkan Agustus 2020

Ditinjau dari tingkat pendidikan, Nilai TPT pada Agustus 2021 menurun pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan kondisi satu tahun lalu (Agustus 2020). Penurunan tertinggi ada pada pekerja dengan tingkat pendidikan SMA dan SMK yaitu berturut turut sebesar 3,44 persen poin dan 2,06 persen poin. Sedangkan penurunan paling rendah pada pada pekerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi yaitu 0.22 persen poin. Penurunan TPT pada pekerja pendidikan rendah yaitu tamatan SD atau kurang dan tamatan SMP berturut-turut sebesar 0,82 persen poin dan 1,14 persen poin. Pola TPT berdasarkan tingkat pendidikan masih sejalan dengan pola-pola sebelumnya di mana TPT pada pendidikan menengah ke atas jauh lebih tinggi dibandingkan TPT pada pendidikan rendah. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja untuk menyambung hidup. Sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung



memilih pekerjaan yang lebih sesuai. Pada Agustus 2021 TPT tertinggi ada pada pekerja pendidikan SMK yaitu sebesar 7,66 persen.

Tabel 3.6
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama,
Provinsi Gorontalo, Agustus 2020, Februari 2021 dan Agustus 2021

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021	Perubahan 1	Perubahan 6
				Tahun	Bulan
				Aug 20-Aug 21	Feb 21-Aug 21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja (AK+BAK, orang)	893 745	899 332	905 361	11 616	6 029
Angkatan Kerja (AK, orang)	593 973	605 913	596 968	2 995	-8 945
Bekerja	568 563	585 225	579 009	10 446	-6 216
Pengangguran	25 410	20 688	17 959	-7 451	-2 729
Bukan Angkatan Kerja (BAK, orang)	299 772	293 419	308 393	8 621	-14 974
Sekolah	67 189	72 533	64 609	-2 580	-7 924
Mengurus Rumah Tangga	194 191	183 267	200 250	6 059	16 983
Lainnya	38 392	37 619	44 534	6 142	6 915
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, persen)	4,28	3,41	3,01	-1,27	-0,4
Perkotaan	6,42	3,60	4,34	-2,08	0,74
Perdesaan	2,73	3,27	2,01	-0,72	-1,26
Laki-laki	4,53	3,62	3,05	-1,48	-0,57
Perempuan	3,86	3,08	2,94	-0,92	-0,14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK, persen)	66,46	67,37	65,94	-0,52	-1,43
Perkotaan	64,72	66,96	64,42	-0,3	-2,54
Perdesaan	67,77	67,70	67,12	-0,65	-0,58
Laki-laki	83,02	83,14	81,60	-1,42	-1,54
Perempuan	49,95	51,70	50,41	0,46	-1,29

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Kemiskinan, □ Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2021 sebesar 15,41 persen, menurun 0,20 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,18 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 184,60 ribu orang, menurun 1,69 ribu orang terhadap Maret 2021 dan menurun 0,71 ribu orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 4,06 persen, menurun 0,17 persen poin dari kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 24,38 persen, menurun 0,09 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 24,47 persen. Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2021 tercatat sebesar Rp400.504,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp308.586,- (77,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp91.918,- (22,95 persen).

Tabel 3.7

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo September 2020-September 2021

Daerah/Periode	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2020	4,18	21,55
Maret 2021	4,23	22,09
September 2021	4,06	21,51
Perdesaan		
September 2020	24,32	163,76
Maret 2021	24,47	164,19
September 2021	24,38	163,09
Perkotaan+Perdesaan		
September 2020	15,59	185,31
Maret 2021	15,61	186,29
September 2021	15,41	184,60

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Garis Kemiskinan sangat menentukan besar kecil penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) itu sendiri terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp389.827,- per kapita per bulan dan pada September 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp400.504,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp10.677,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 2,74 persen. Pada September 2021, GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp298.372,- dan perdesaan sebesar Rp315.316,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan di daerah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahal. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan adalah sebesar Rp102.847,- dan perdesaan sebesar Rp83.491,- maka terlihat bahwa di daerah perkotaan, GKNM cenderung lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa penduduk di daerah perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk di daerah perdesaan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh konsumsi kebutuhan non makanan di perkotaan yang lebih banyak dengan harga relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, seperti komoditi perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan, serta jasa. Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar Rp401.219,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp398.806,- per kapita per bulan.



Tabel 3.8

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo Menurut Daerah, September 2020 – September 2021

Daerah/Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2020	281.726	94.014	375.740
Maret 2021	292.463	97.496	389.959
September 2021	298.372	102.847	401.219
Perubahan Sep'20-Sep'21 (%)	5,91	9,40	6,78
Perubahan Mar'21-Sep'21 (%)	2,02	5,49	2,89
Perdesaan			
September 2020	298.431	75.481	373.911
Maret 2021	310.257	78.352	388.609
September 2021	315.316	83.491	398.806
Perubahan Sep'20-Sep'21 (%)	5,66	10,61	6,66
Perubahan Mar'21-Sep'21 (%)	1,63	6,56	2,62
Perkotaan+Perdesaan			
September 2020	291.402	83.441	374.843
Maret 2021	303.108	86.719	389.827
September 2021	308.586	91.919	400.504
Perubahan Sep'20-Sep'21 (%)	5,90	10,16	6,85
Perubahan Mar'21-Sep'21 (%)	1,81	6,00	2,74

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2021 yang menunjukkan recovery dari kondisi kontraksi yang cukup dalam di tahun sebelumnya dan mempertimbangkan faktor pendorong seperti inflasi yang tetap terjaga, mulai pulihnya konsumsi masyarakat dan vaksinasi yang terus digalakkan, maka perkiraan kondisi indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2022 diuraikan dalam tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.9

Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator	Perkiraan capaian tahun 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,01 %
2.	Inflasi	2,63 %
3.	Penduduk miskin	16,09 %
4.	Tingkat pengangguran terbuka	3,84 %
5.	PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah)	35,76

Sumber : RPD 2023 -2026

**TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2022 DAN TAHUN 2023**

Global, Prospek perekonomian pada tahun 2023 mendatang menurut Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4% di 2022 atau turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8% di 2023 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global, tantangan ekonomi dan arah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah.

pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 5,6% di 2021, menuju 4,0% di 2022, dan 2,6% di 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1%, 4,8% dan 5,2%, sedangkan di Eropa sebesar 5,2%, 3,9%, dan 2,5%. India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 9,0% di 2021 dan 9,0% di 2022, dan kemudian mengalami moderasi menjadi 7,1% di 2023. Sementara di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3%, 5,6%, dan 6,0%, sedangkan Malaysia 3,5%, 5,7%, dan 5,7%. Dalam periode yang sama, pertumbuhan PDB Thailand akan berada pada 1,3%, 4,1%, 4,7%, sedangkan Filipina 4,6%, 6,3%, dan 4,9%.

Rekomendasi dari IMF untuk Penguatan Kerangka Kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim

Ekonomi Nasional,

Berdasarkan proyeksi dari Bank Dunia (World Bank) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan melanjutkan momentum pertumbuhan pada 2022. Hal tersebut didukung oleh permintaan yang kuat dari dalam negeri serta kenaikan harga komoditas. Sedangkan pada Tahun 2023 Indonesia akan Kembali berada pada jalur regular dengan pertumbuhan di level 5,1% pada tahun 2023. Sejalan dengan rilis yang telah dikeluarkan oleh BPS bahwa pada Tahun 2021 secara yoy Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mencatat sebesar 3,69%. Sumber pertumbuhan tertinggi ada pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yakni 1,21%. Adapun Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2021 sebesar 5,02 secara yoy yang merupakan akumulasi dari semua kegiatan Pemerintah dan swasta pada akhir tahun kemarin. Pencapaian pada periode tersebut 5,02% lebih baik dari 3,51% kuartal III 2021 dan lebih bagus dari kuartal IV 2020 yang mencatatkan -2,17%.

Jika melihat proyeksi yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, dari 3,2-4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi



modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural.

Kokohnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di tahun 2021, sementara berjalan di 2022 diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023. Hal tersebut didukung dengan komitmen Pemerintah dalam penanganan pandemi yang menghasilkan signifikansi pada relatif cepat pulihnya Perekonomian Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting. Hal yang perlu dijaga adalah momentum pemulihan ke depan dengan tetap waspada terhadap berbagai risiko khususnya munculnya varian baru Covid-19 setelah Omicron. Selain itu isu disrupsi suplai dan volatilitas harga energi yang memberi ketidakpastian pada tingkat inflasi, risiko pada stabilitas keuangan emerging markets. Selain itu, normalisasi kebijakan moneter negara maju dengan menaikkan suku bunga, tensi geopolitik yang masih tinggi, dan isu perubahan iklim juga menjadi risiko-risiko yang perlu diwaspadai ke depan.

Ekonomi Gorontalo, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 221 berada pada angka 2,74 persen, yang berada pada posisi di atas Provinsi Papua Barat untuk regional Sulampua. Sedangkan pada kawasan Sulawesi menempati posisi di paling bawah, mengingat pada tahun 2020 sebelumnya berada pada -0,02 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang berkontraksi sedalam -2,07%. Untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun ini dan 2023, perlu percepatan realisasi belanja Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan UPT Kementerian pusat yang berada di Gorontalo untuk bisa mengakselerasi konsumsi pemerintah. Selain itu kinerja ekspor yang selama ini tumbuh positif di tengah pandemi terus didorong dengan mengembangkan komoditas unggulan selain jagung seperti kelapa, kakao dan industri turunan dan olahannya.

Disamping itu, dengan kondisi global dan dinamika nasional yang diyakini makin kuat serta mulai membaiknya perekonomian dunia akhir ini, secara makro pada tahun 2022 - 2023 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di prediksi masih dalam kondisi tumbuh dan baik, berdasarkan hal tersebut, maka indikator makro ekonomi Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel. 3.10
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2022-2023

Indikator	Proyeksi	
	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	4,01	6,21
Kemiskinan	15,61%	15,00%
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,84%	3,63%



PDRB Perkapita	35,76 juta	35,94
Inflasi	2,63%	2,03%

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo (diolah)

Kedepan Provinsi Gorontalo melalui Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026 yang telah disusun akan melakukan langkah strategis dengan melakukan proteksi pada sumber daya dan pendukung penopang Pertumbuhan PDRB seperti menjaga kelangsungan produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dengan pendekatan ekologis dan mengurangi penggunaan lahan di kemiringan, akselerasi realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik di Provinsi maupun Kabupaten / Kota, mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Pembangunan Bendungan Bolango Ulu, Pembangunan Bandara Pohuwato, Revitalisasi Danau Limboto dan Penuntasan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan PDRB di Provinsi Gorontalo.

Prioritas pembangunan di sektor strategis akan berfokus pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura dengan intensifikasi lahan yang telah tersedia, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air serta peningkatan ketahanan pangan dalam rangka mencapai kesejahteraan petani. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian, serta mendorong industrialisasi tanaman pangan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih



merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain PAD yang sah Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. Proyeksi/target pendapatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Pada tahun tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 5,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan sudah terjadi rebound perekonomian baik di daerah maupun secara nasional dari akibat adanya pandemic Covid-19 pada tahun 2019 dan 2020. Sub item pendapatan yang mengalami kenaikan paling signifikan yaitu 22,82% pada sektor PAD yang terealisasi dengan nominal Rp. 509.512.324.459. Dari berbagai komponen pendapatan asli daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan.

Tabel 3.11
Realisasi Pendapatan 2017 s/d 2021

Uraian	Realisasi								Rata2 Pertumbuhan	
	TA. 2017 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	%	TA. 2019 (Rp)	%	TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2021 (Rp)		%
PENDAPATAN	1.773.047.305.717,38	1.800.201.701.296,61	1,53	1.941.076.769.545,85	7,83	1.862.646.444.965,92	-	1.968.370.374.668,08	5,68	2,75
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>348.267.663.013,38</i>	<i>384.435.306.402,61</i>	<i>10,39</i>	<i>433.427.781.398,85</i>	<i>12,74</i>	<i>414.861.588.271,92</i>	<i>4,28</i>	<i>509.512.324.459,08</i>	<i>22,82</i>	<i>10,42</i>
Pajak Daerah	309.671.369.999,00	350.425.924.306,00	13,16	387.400.916.778,00	10,55	352.171.235.900,00	9,09	400.833.243.843,00	13,82	7,11
Retribusi Daerah	5.564.237.749,00	11.499.494.159,00	106,67	22.284.470.358,00	93,79	6.496.155.533,00	70,85	5.575.147.290,00	14,18	28,86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.772.045.784,00	4.347.392.785,00	56,83	5.679.904.143,00	30,65	3.230.454.894,00	43,12	5.092.544.065,00	57,64	25,50
Lain-lain PAD yang sah	30.260.009.481,38	18.162.495.152,61	39,98	18.062.490.119,85	0,55	52.963.741.944,92	193,23	98.011.389.261,08	85,05	59,44
<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>1.424.264.276.967,00</i>	<i>1.415.182.154.507,00</i>	<i>0,64</i>	<i>1.505.443.391.824,00</i>	<i>6,38</i>	<i>1.441.616.534.886,00</i>	<i>4,24</i>	<i>1.456.453.867.885,00</i>	<i>1,03</i>	<i>0,63</i>
Dana Bagi Hasil Pajak	22.148.141.008,00	19.881.801.282,00	10,23	13.537.847.000,00	31,91	18.310.631.609,00	35,26	22.437.813.010,00	22,54	3,91



Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.859.571.657,00	1.738.620.779,00	-	2.247.879.900,00	29,29	1.608.278.623,00	-	2.218.899.125,00	37,97	-	4,04
Dana Alokasi Umum	997.598.871.000,00	1.006.924.707.000,00	0,93	1.043.126.752.000,00	3,60	944.270.446.000,00	-	940.639.321.000,00	0,38	-	1,33
Dana Alokasi Khusus	393.157.693.302,00	369.637.025.446,00	-	436.242.138.924,00	18,02	445.006.020.654,00	2,01	451.415.054.750,00	1,40	-	3,87
Dana penyesuaian dan otonomi khusus (DID)	7.500.000.000,00	17.000.000.000,00	126,67	10.288.774.000,00	39,48	32.421.158.000,00	215,11	39.742.780.000,00	22,58	-	81,22
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	515.365.737,00	584.240.387,00	13,36	2.205.596.323,00	277,52	6.168.321.808,00	179,67	2.404.182.324,00	61,02	-	102,38
Hibah	515.365.737,00	584.240.387,00	13,36	2.058.820.031,00	252,39	5.308.321.808,00	157,83	1.959.237.740,00	63,09	-	90,12
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	146.776.292,00	-	860.000.000,00	485,93	444.944.584,00	48,26	-	218,83

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas yang terkandung didalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026. Kebijakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan *money follow program* (anggaran berorientasi pada program), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi belanja daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	TA. 2022	PROYEKSI	
			TA. 2023	
	BELANJA	1.739.466.983.468,00		2.061.154.358.398,28
1	Belanja Operasi	1.405.414.442.755,00		1.591.906.720.898,00
2	Belanja Modal	110.498.488.385,00		236.140.223.682,80
3	Belanja Tak Terduga	12.459.655.557,00		17.425.000.000,00
4	Belanja Transfer	211.094.396.771,00		215.682.413.817,48



Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk "menutup defisit" atau "memanfaatkan surplus" anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali.

Proyeksi struktur APBD Provinsi Gorontalo 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Proyeksi APBD Provinsi Gorontalo TA. 2023

Uraian	JUMLAH	
	Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
PENDAPATAN	1.757.290.537.108,00	1.774.597.025.452,62
<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	<i>446.441.807.108,00</i>	<i>463.748.295.452,62</i>
Pendapatan Pajak Daerah	376.125.487.471,00	393.483.336.500,85
Pendapatan Retribusi Daerah	11.098.089.991,00	12.706.203.230,70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.456.586.737,00	3.698.547.808,14
Lain-lain PAD yang Sah	53.761.642.909,00	53.860.207.912,93
<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>1.306.608.191.000,00</i>	<i>1.306.608.191.000,00</i>
Dana Bagi Hasil (DBH-DR)	19.304.524.000,00	19.304.524.000,00
Dana Alokasi Umum	940.903.029.000,00	940.903.029.000,00
Dana Alokasi Khusus	337.599.283.000,00	337.599.283.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	8.801.355.000,00	8.801.355.000,00
<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	<i>4.240.539.000,00</i>	<i>4.240.539.000,00</i>
Pendapatan Hibah	2.240.539.000,00	2.240.539.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
BELANJA	1.739.466.983.468,00	1.713.073.710.202,61
<i>Belanja Operasi</i>	<i>1.405.414.442.755,00</i>	<i>1.412.359.780.397,65</i>
Belanja Pegawai	652.700.830.506,00	669.018.351.268,65
Belanja Barang dan Jasa	620.116.810.160,00	600.000.000.000,00



Belanja Hibah	115.924.050.429,00	110.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	16.672.751.660,00	15.000.000.000,00
Belanja Bunga	-	18.341.429.129,00
Belanja Modal	110.498.488.385,00	93.000.000.000,00
Belanja Modal Tanah	5.337.673.649,00	15.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.952.923.391,00	30.000.000.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	24.987.689.623,00	25.000.000.000,00
Belanja Jaringan, Irigasi dan Jaringan	48.258.963.147,00	20.000.000.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.961.238.575,00	3.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	12.459.655.557,00	9.935.289.277,00
Belanja Tak Terduga	12.459.655.557,00	9.935.289.277,00
Belanja Transfer	211.094.396.771,00	197.778.640.527,96
Belanja Bagi Hasil	211.094.396.771,00	197.778.640.527,96
Belanja Bantuan Keuangan	-	-
PEMBIAYAAN	- 17.823.553.640,00	- 61.523.315.250,00
Penerimaan Pembiayaan	-	-
SILPA	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	17.823.553.640,00	61.523.315.250,00
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	12.823.553.640,00	51.523.315.250,00



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023. Dokumen RPD disusun sebagai panduan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam penyusunannya, RPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yang selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD ini menjadi arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2023 dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam penerapan kebijakan pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 dengan visi sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yaitu;

“Gorontalo Maju dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan system hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo **Mandiri**, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan Tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2007-2025 tersebut, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :



1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, adalah mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa.
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan, dan pemerataan akses Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, social budaya, adat olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, *right sizing* OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan public, serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada public.

Pada proses penyusunannya, RPD juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan Visi; "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk lebih mendetailkan arahan misi pembangunan tersebut, maka dikelompokkan penjabarannya melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

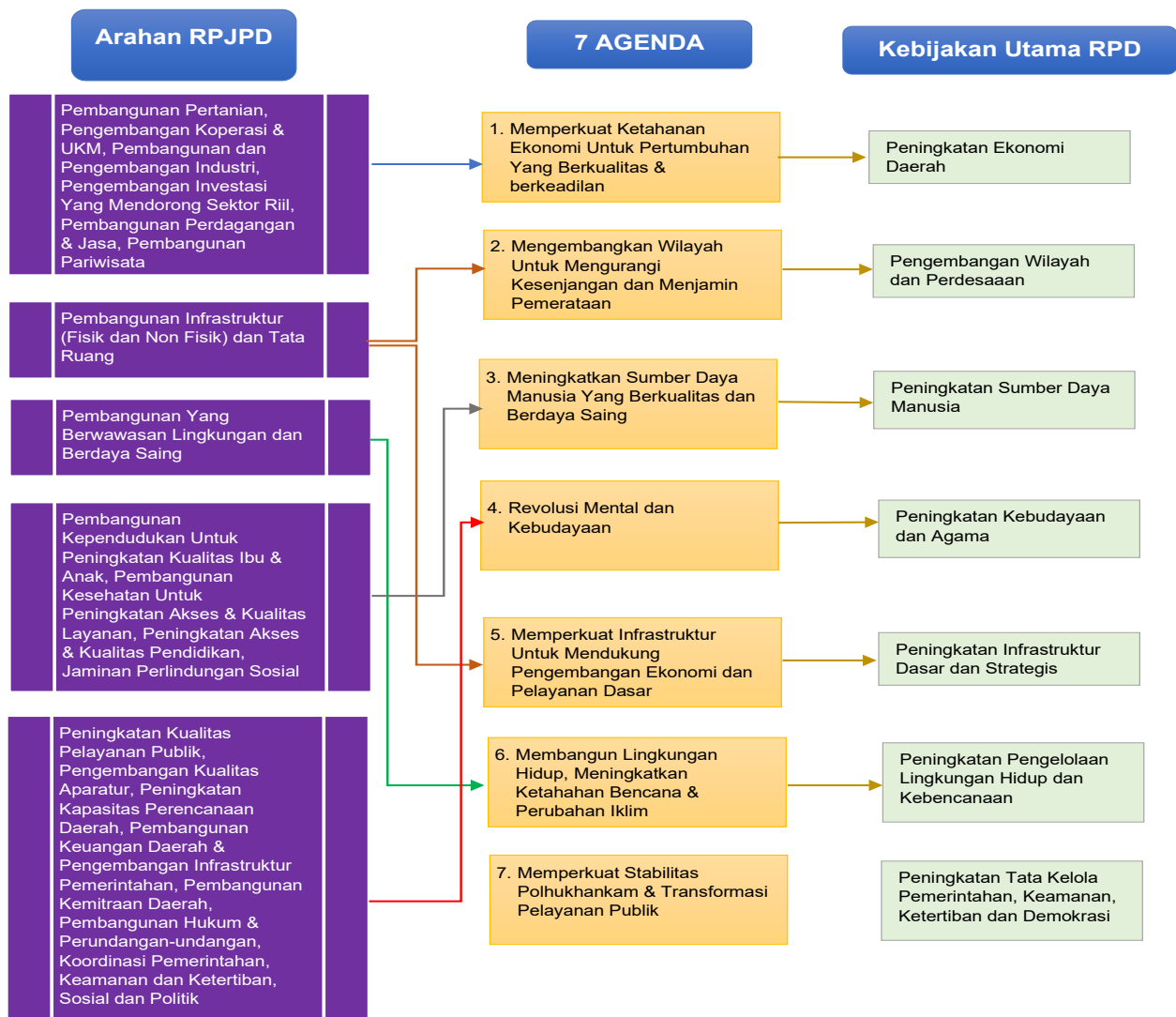


- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Keselarasan RPJPD, RPJMN dan RPD dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 4.1

Sinergi Arahan RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026



4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023

1. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian.



Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Di sisi lain, produksi pangan dipengaruhi oleh faktor musim, ketersediaan sarana prasarana produksi termasuk pengairan/irigasi, pengelolaan pasca panen yang belum maksimal, serta akses terhadap lahan yang terbatas. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya beli petani (Nilai Tukar Petani) relatif rendah khususnya untuk subsektor perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. NTP dan NTUP belum mencerminkan kondisi ideal/tingkat kesejahteraan petani. Perubahan iklim global juga merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan di daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2021 sebesar 76,66 sementara untuk skor PPH konsumsi sebesar 75,5. Hal ini dipengaruhi oleh produksi kelompok bahan pangan Umbi-umbian, Kacang-kacangan serta sayur dan buah masih sangat rendah sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus untuk pemenuhannya tanpa perlu mendatangkan dari wilayah lain diluar Provinsi Gorontalo.

Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: (1) tingginya rumah tangga miskin di sector perikanan dan kelautan, (2) produksi perikanan dan daya saing produk kelautan dan perikanan belum maksimal, (3) Nilai Tukar Nelayan (NTN) rendah, (4) akses pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan belum maksimal karena keterbatasan SDM.

2. Transformasi structural berjalan lambat

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh permasalahan (1) nilai tambah produksi rendah karena keterbatasan skill, (2) ketersediaan bahan baku lebih kepada komoditi pertanian yang notabene lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, (3) tingginya biaya dalam rantai distribusi perdagangan baik antar pulau maupun ekspor impor. (4) Belum adanya perencanaan dan penetapan Kawasan pengembangan ekonomi/ master plan pengembangan ekonomi daerah, serta (5) daya dukung lingkungan. Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. PDRB sektor pertanian tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun



2021 mencapai 17.085,46 Milyar Rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 38,92 persen terhadap PDRB, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 38,79 namun masih di bawah tahun 2019 yang mencapai 38,93 persen.

Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura dengan intensifikasi lahan yang telah tersedia, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air serta peningkatan ketahanan pangan dalam rangka mencapai kesejahteraan petani. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian, serta mendorong industrialisasi tanaman pangan.

3. Pembangunan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu terkait ketimpangan antar wilayah. Tantangan pembangunan kewilayahan yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah kabupaten/kota melalui pengembangan potensi sumber daya masing-masing, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan:

- a. Ketimpangan antar Wilayah
 - Masih tingginya angka kemiskinan pedesaan, Sept 2021 sebesar 24,38 %, sementara perkotaan sebesar 4,06%.
 - Masih adanya kesenjangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini pedesaan sebesar 0,390 dan perkotaan sebesar 0,398;
 - Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
- b. Pengembangan dan Penguatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah/Kawasan
 - Pengembangan Kawasan strategis Provinsi belum optimal.
 - Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang rendah.
 - Pengembangan kawasan belum terpusat
 - Belum masuk pada kawasan strategis Nasional untuk pengembangan wilayah Ekonomi Pariwisata maupun Industri.
- c. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah
 - Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi sebesar 94,16 persen).



- Belum maksimalnya pembangunan Rumah Layak Huni/Rumah Hunian Layak, yang ditandai dengan persentase rumah yang menempati rumah layak huni tahun 2020 sebesar 65,42 persen.
 - Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2020 persentase rumah tangga kumuh sebesar masih sebesar 8,34 persen (tahun 2020).
- d. Pemanfaatan Ruang
- Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - Belum adanya Roadmap pengembangan kawasan
 - Belum maksimalnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang

4. Sumber Daya Manusia

Tren IPM Provinsi Gorontalo selama 2 dekade ini mengalami peningkatan walaupun cenderung kecil. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen menjadi 69,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dari capaian rata-rata secara nasional yaitu 72,29 persen.

Namun dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten dapat dikatakan bahwa kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa awal daerah ini terbentuk menjadi provinsi pada tahun 2001. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pembangunan manusia Provinsi Gorontalo menjadi lebih maksimal.

Dua dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia dibangun oleh kesehatan dan pendidikan. Secara umum, kedua dimensi ini membaik akan tetapi masih belum dirasakan oleh seluruh penduduk.

Hal ini dapat disebabkan diantaranya belum meratanya SDM kesehatan pada puskesmas yaitu sebesar 26,9%. Bahkan masih terdapat 12,9% puskesmas yang belum memiliki dokter pada tahun 2020. Selain itu cakupan kunjungan nifas lengkap di Provinsi Gorontalo terendah bersama Papua dan Papua Barat (Profil Kesehatan 2020). Sementara itu cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 72,5% masih berada dibawah rata-rata nasional.

Cakupan Kesehatan Semesta/*Universal Health Coverage* di Provinsi Gorontalo, sampai dengan Februari 2022 mencapai 89,4% dan yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan sebesar 10,6%. Sebagaimana besaran target *Universal Health Coverage* (UHC) yang harus dicapai sebesar 95%, dimana masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama (FKTP) dan pelayanan di rumah sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta secara gratis.

Masih rendahnya capaian UHC provinsi Gorontalo yang jauh berada di bawah rata-rata standard UHC.



Dibidang pendidikan, pada tahun 2020 Angka partisipasi Murni pada jenjang pendidikan menengah adalah sebesar 57,6% terendah di wilayah Sulawesi. Nilai APM dari SD sampai perguruan tinggi selalu menurun tiap jenjangnya menunjukkan setiap tahunnya jumlah anak dengan usia yang sesuai yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi selalu berkurang. Wilayah yang memiliki APM terendah di Provinsi Gorontalo adalah kab. Boalemo dengan angka 52,82%.

Angka melek huruf sudah cukup tinggi untuk kelompok umur 15-59 yaitu sebesar 99,33%. Sementara itu, terdapat 28,69% penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah adalah 8,26 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SLTP (kelas VII) atau berhenti sekolah di kelas 3 SLTP (kelas X). terdapat disparitas RLS di perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan mencapai 9,44 tahun dan perdesaan 7,39 tahun. Sementara perempuan memiliki RLS yang lebih tinggi yaitu 8,57 tahun, sementara laki-laki 7,95 tahun.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah lulusan pendidikan menengah adalah salah satu penyumbang pengangguran terbanyak. Data BPS pada bulan Agustus 2021 memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebesar 7,66 persen terdapat pada jenjang pendidikan SMK. TPT pada SMK memperlihatkan tren fluktuatif setelah di bulan februari 2021 sebesar 5,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMK yang diharapkan sebagai tenaga yang siap kerja ternyata tidak mampu memenuhi pasar kerja atau berwirausaha sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari selama di SMK. BadanPemeriksa Keuangan dalam pemeriksaannya memberikan rekomendasi salah satunya adalah sinergi organisasi perangkat daerah terkait untuk merumuskan penyelenggaraan program kependidikan dan ketenagakerjaan daerah, selain itu reformasi pendidikan vokasi SMK diantaranya kerjasama dengan dunia industri.

5. Perlindungan Sosial

Sesuai data pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2021 Provinsi Gorontalo, alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan jaminan sosial pada tahun 2020 sebanyak RP. 93.417.356.659 atau sebesar 5,06%. Permasalahan keterbatasan finansial daerah menjadikan alokasi ini belum significant. Selain itu juga, peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan social seperti badan usaha Negara dan swasta belum dirintis .

Perlindungan social juga belum memihak sepenuhnya kepada kelompok khusus antara lain lansia dan penyandang disabilitas yang rentan miskin. Sesuai data Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk lanjut usia di Provinsi Gorontalo sebesar 7,9% atau meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yang sebesar 5,97%. Sementara penyandang disabilitas sesuai data Riskesdas 2018 berjumlah kurang lebih 10.000 orang dan didominasi oleh penduduk berusia 18-59 tahun. Data-data kelompok khusus ini belum terpetakan dengan



detail dalam kelompok sasaran. Selain itu, indikator yang secara spesifik merujuk kelompok ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan.

6. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

Presentase jumlah penduduk usia 0-17 di Provinsi Gorontalo sebesar 32,9% (Susenas BPS 2019). Indeks perlindungan anak pada tahun 2021 baru mencapai angka 64,49. Upaya pemenuhan hak anak, perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan kualitas juga harus menjadi perhatian, karena sesuai data Sensus Penduduk 2020, penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo sebesar 71,26. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Sesuai data pada Indeks Pembangunan Pemuda 2019, Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang masih belum optimal tingkat perkembangannya. Diantara indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang diukur, Provinsi Gorontalo memiliki angka kesakitan yang tertinggi secara nasional 11,96 persen. Tantangan untuk menurunkan angka ini makin besar karena pemuda mengalami beban ganda penyakit dan malnutrisi. Mereka tidak hanya rentan terhadap penyakit menular, tapi juga terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, anemia dan obesitas yang mengindikasikan pola diet pemuda yang cenderung tidak sehat (Laporan IPP 2019). Selain itu indikator lain yang termasuk dalam domain kesehatan dan kesejahteraan adalah persentase pemuda perokok. Provinsi Gorontalo berada pada posisi kedua tertinggi se-Indonesia dengan 30,17 persen. Sementara angka kehamilan remaja 23,96 persen menempati posisi ketiga tertinggi. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi. Permasalahan yang dihadapi adalah kecilnya proporsi pemuda wirausaha.

Perempuan merupakan salah satu sumber kekuatan pembangunan. Perempuan yang memiliki kualitas dan daya saing yang baik tentunya akan produktif dan mampu berpartisipasi serta berkontribusi pada proses pembangunan. Pemenuhan hak perempuan dicantumkan dengan jelas ada agenda TPB/SDGs. Dari 17 goals dan 169 target dalam SDGs, terdapat 16 goals dan target yang terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo 86,83 persen pada tahun 2019. Capaian ini dibawah rata-rata nasional yang sudah pada angka 91,07. IPM perempuan 61,9 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki 71,29 persen.

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo juga belum optimal. Hal ini dapat dicermati pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 hanya sebesar 50,41 persen dibandingkan laki-laki 81,60 persen. Selain itu terdapat perempuan sebagai kepala rumah tangga sebesar 15,46 persen sesuai data pada buku Profil Perempuan 2020. Kondisi ini perlu ditangani dengan serius, mengingat bahwa perempuan sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab ganda yaitu mengasuh anak sekaligus mencari nafkah.



Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016. Namun tindak kekerasan masih terjadi, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 332 kasus kekerasan.

7. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak.

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh positif pada beberapa tahun ini bahkan diatas rata-rata nasional kecuali pada saat Pandemi Covid 19. Namun belum memberikan pengaruh yang signifikan atas angka kemiskinan. Hal ini antara lain disebabkan sector ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah sektor keuangan dan jasa. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Gorontalo pertumbuhannya berkontraksi 0,93% pada triwulan 1 2021 (BI, 2021). Sebanyak kurang lebih 73% angkatan kerja di Provinsi Gorontalo bekerja pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan (Sakernas, Agustus 2020) yang notabene menjadi penyumbang angka kemiskinan hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan pertanian bagi masyarakat miskin serta minimnya akses pada pendanaan usaha.

Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo. Bahkan pada agenda 2030 TPB/SDGs, kemiskinan menjadi tujuan pertama. Secara tren, persentase angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan, meskipun masih belum terlalu signifikan. Dapat dilihat pada data BPS, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2016 persentase kemiskinan turun sebesar 2,68 persen menjadi 15,41 persen di tahun 2021. Kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu dituntaskan bersama-sama karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan multi dimensi. Sehingga diperlukan sinergi program dan anggaran semua pihak untuk memastikan masyarakat miskin mampu menikmati kehidupan yang berkualitas. Namun, keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) masih belum optimal dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di OPD terkait dan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

8. Belum optimalnya Pelestarian Warisan Budaya

Gorontalo merupakan salah satu Provinsi yang kental dengan budaya. Kebudayaan Gorontalo dapat ditemui dalam berbagai aktivitas masyarakat Gorontalo, khususnya dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pernikahan, khitanan, penerimaan tamu daerah, dan aktivitas lainnya. Kebudayaan juga merupakan bagian penting dari proses pembangunan



daerah. Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dan memiliki tata kelola yang efektif dan efisien. Kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah yang masuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar perlu mendapatkan perhatian besar khususnya dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan.

RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, kebudayaan menjadi salah satu arah kebijakan yang diamanahkan berupa Pembangunan keagamaan utk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan & pengamalan nilai & ajaran agama, Budaya dan adat isitiadat. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke- 24 dari 34 provinsi di level nasional. IPK Provinsi Gorontalo berada pada angka 49,86, sementara untuk nasional berada pada angka 53,74.

Pada dimensi warisan budaya, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa terdapat 345 catatan karya budaya tak benda (WBTB) yang tercatat dalam data budaya Kemendikbud RI, dari jumlah tersebut 31 WBTB telah ditetapkan, artinya sebesar 8,9 persen dari total WBTB terdaftar telah ditetapkan.

Sementara itu untuk warisan budaya benda (WBB), data Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Kemendikbud menunjukkan bahwa terdapat 84 cagar budaya yang telah terdaftar di Provinsi Gorontalo yang tersebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Dari jumlah tersebut, 6 cagar budaya telah ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau sebesar tujuh,1 persen yang telah ditetapkan.

Perhatian pada WBTB dan WTB ini relevan dengan prioritas provinsi Gorontalo yang saat ini mendorong penetapan Gorontalo menjadi salah satu Provinsi yang memiliki Geopark Nasional. Hal ini dikarenakan warisan budaya menjadi salah satu bagian dari komponen geopark yaitu cultural diversity.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2021 Gorontalo termasuk dalam kluster pulau sulawesi dengan capaian 68,74 hasil ini menurun dibandingkan pencapaian pada Tahun 2019 sebesar 73,83. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Agama beberapa indikator berpengaruh pelaksanaannya di pulau sulawesi.

9. Rendahnya Budaya Literasi

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan



menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejahteraan hidup (peradaban unggul)

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Nilai Budaya Literasi Provinsi Gorontalo berada pada angka 51,68. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 55,03.

Selanjutnya, data hasil kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2020, provinsi Gorontalo berada pada angka 49,72 dengan kategori sedang. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 54,17.

Di sisi lain, kaitannya dengan dunia pendidikan, hasil Indonesian National Assesment Program (INAP) untuk jenjang SD tahun 2016, diperoleh data bahwa distribusi literasi matematika, membaca dan sains masuk dalam kategori kurang, bahkan untuk literasi sains Provinsi Gorontalo merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sulawesi. Pada jenjang SMP berdasarkan data Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), Provinsi Gorontalo juga masuk dalam kategori kurang dan berada di bawah rata-rata nasional.

Hal yang tidak kalah pentingnya terkait literasi yang relevan juga dengan budaya daerah adalah pelestarian bahasa daerah Gorontalo sebagai bahasa masyarakat Gorontalo yang sering berjalannya waktu semakin terkikis dan berkurang penggunaannya di tengah masyarakat Gorontalo khususnya generasi muda.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2020 Provinsi Gorontalo adalah sebesar 28,18. Total perpustakaan di provinsi ini adalah sebanyak 2276, dengan yang terbanyak adalah Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjumlah 1314 perpustakaan. Sementara itu, ada 16,7% perpustakaan yang dipersepsi ber-SNP dengan persentase yang tertinggi dari Perpustakaan Perguruan Tinggi. Total jumlah koleksi buku yang terdapat pada perpustakaan-perpustakaan di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 152068. Koleksi buku Ilmu Pengetahuan Sosial adalah yang terbanyak, yaitu sejumlah 23334 buku, sedangkan koleksi yang paling banyak dipinjam di tahun 2020 adalah koleksi buku Geografi dan Sejarah sejumlah 24074 buku.

Seluruh perpustakaan umum daerah di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki koleksi berjenis Buku, Bahan Grafika, Rekaman Suara (Kaset, CD, Audio) dan Koran. Jenis lain yang juga banyak dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan umum daerah di provinsi ini adalah Majalah (85,7%), Gambar Hidup & Audio Visual (71,4%) dan E-Book dan Lainnya (71,4%)

Tenaga perpustakaan di Provinsi Gorontalo berjumlah 595 orang, di mana sebagian besar merupakan Pustakawan SK Fungsional. Jumlah pustakawan yang memiliki SK Fungsional adalah sebanyak 439 orang, sedangkan pustakawan dengan kualifikasi ilmu perpustakaan sebanyak 40 orang. Di perpustakaan umum daerah, 59,7% tenaga perpustakaan tersebut memiliki latar belakang jenjang pendidikan S1.

Jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar di Provinsi Gorontalo sebanyak 169.657 orang, dengan rata-rata kunjungan 511 orang/hari. Kebanyakan anggota perpustakaan



berusia < 18 tahun sebanyak 54,5%, dengan pekerjaan sebagai Pelajar/ Mahasiswa (75,6%). Berdasarkan capaian diatas secara umum Provinsi Gorontalo secara keseluruhan menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan data IPLM 2019 (9,83) dan IPLM 2020 (10,91) meskipun demikian beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kedepan diantaranya : Pengembangan standar Perpustakaan daerah dan umum menuju SNP, peningkatan koleksi buku, peningkatan kemudahan akses terhadap bahan bacaan, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga perpustakaan, penguatan digitalisasi perpustakaan, dan kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekosistem literasi yang lebih merata dan berkelanjutan.

10. Belum Mantapnya Infrastruktur Ekonomi dan Strategis Provinsi

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas – ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Berdasarkan data capaian Kondisi mantap jalan Provinsi pada tahun 2020, dari target 60,39% hanya tercapai 54,38%. Sedangkan untuk Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) pada tahun 2020 dari 257,2 km target, realisasinya hanya 220,6. Hal ini berarti ada gap 6% untuk indikator mantap jalan dan selisih 30 Km lebih Panjang jalan provinsi yang dalam keadaan tidak baik.

Berbagai penyebab dari tidak tercapainya target kedua indikator tersebut antara lain kualitas jalan ruas kewenangan Provinsi yang tidak maksimal dimana untuk beberapa ruas hanya dalam hitungan bulan, jalan yang baru dibangun dan yang sudah direhab terdapat kerusakan disebabkan faktor teknis seperti kondisi geologis tempat ruas jalan tersebut berada dan kurang optimalnya pengawasan dan pembatasan kendaraan yang over supply melintas di ruas jalan tersebut. Dengan adanya ruas jalan yang mengalami kerusakan maka akan menambah cost distribusi (kendaraan yang melintas cepat rusak dan butuh perbaikan) dan penambahan lama waktu barang sampai ke konsumen. Tantangan selanjutnya adalah pada masa pandemi menyebabkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran, kegiatan – kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan besar sering kali dijadikan kegiatan yang dimasukkan untuk ditunda pekerjaan atau tidak dibiayai dulu pada tahun berjalan untuk mendapatkan kuota pagu yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipotong pembiayaannya dan dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Di sisi pertanian, produksi Padi pada tahun 2020 di Provinsi Gorontalo sebesar 289.656 ton dengan luas panen 56.061 Ha dan produktivitas 51,67 Kw/Ha. Angka tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, mengingat pada beberapa wilayah waktu tanam hanya satu kali dalam setahun. Jika bisa dioptimalkan, maka potensi 1,5 kali dari produksi sekarang bisa tercapai dengan pemanfaatan teknologi pertanian, pemakaian bibit yang tepat, pemanfaatan pupuk yang tepat guna dan dukungan irigasi pertanian sebagai core major usaha padi sawah.



Pada periode kedua RPJMD 2017 – 2022 ada beberapa Proyek Strategis Provinsi yang sudah tuntas dan yang masih mengalami kendala. Pada periode RPMD ini diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan dan waktu yang bisa mendukung tuntasnya pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Gorontalo. Ada 2 fokus pembangunan yang direncanakan untuk dikerjakan pada tahun 2023 yaitu Pengelolaan Danau Limboto, Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Hasri Ainun Habibie, Blok Plan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Ayula dan Pembangunan Islamic Centre.

11. Depleksi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai; penurunan kualitas udara; kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau; kerusakan mangrove dan terumbu karang; dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat.

Dari Total 245.000 Ha Lahan di DAS Limboto- Bolango Bone, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di Danau Limboto. Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan pemukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koef pengaliran dan Indeks Erosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep *waterfront city*. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo , dimana 57% masyarakat tinggal di Kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo (*Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Banjir Provinsi Gorontalo, Bappenas RI Desember 2021*)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo Tahun 2019 berada pada poin 74,54. "Kondisi ini masih berada di atas IKLH rata-rata nasional," adapun indikator yang menjadi dasar perhitungan dari IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Misalnya saja pada Indeks Kualitas Air Tahun 2020 meningkat sebesar 49,33, lebih tinggi 2,33 point dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut berada pada status bahaya, dimana status Sungai Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu, dan Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh: Limbah Domestik, Limbah Pertanian, Limbah Peternakan, Limbah Industri, Prilaku masyarakat membuang tinja dan ketersediaan sarana sanitasi (jamban) yang masih kurang, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum maksimal, serta *Illegal Logging* dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah.

Adapun beberapa *Respons* yang harus dilakukan terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo antara lain: Penyusunan Dokumen perencanaan berbasis KLHS, Membangun koordinasi dengan instansi terkait Pembangunan sarana sanitasi



(Jamban, SPAL) secara bertahap, Memperketat proses perijinan berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Penguatan kapasitas masyarakat terkait lingkungan hidup, Rehabilitasi hutan dan lahan dengan Target Provinsi 1000 ha/tahun dan BP - DAS tahun 2020 2.500 ha, Pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial: pengembangan gula semut, jamur tiram, pembuatan handsanitizer, Pengelolaan DAS dan rehabilitasi, dan Pengembangan pertanian berbasis konservasi.

Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sampah juga masih menjadi permasalahan dalam Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo, hal ini dibuktikan dengan Timbulan sampah 623,55 ton/hr atau 227.577,28 ton/thn dan 65% Limbah B3 belum terkelola dengan maksimal (Sumber : DLHK Provinsi Gorontalo). Adapun target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) sampai dengan tahun 2024 diharapkan mencapai 28 % (70.095,050 Ton/Tahun).

Sementara kerusakan hutan juga menjadi perhatian yang serius dalam penanganannya hingga tahun 2020 luas lahan kritis dalam kawasan sebesar 140.446 Ha sementara di luar kawasan sebesar 191.852 Ha sehingga total lahan kritis 332.298 Ha. Kerusakan terbesar berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan luas 100.463 Ha.

12. Tingginya Risiko Bencana

Provinsi Gorontalo tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya. Bencana-bencana tersebut antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan serta cuaca ekstrim.

Melalui penerapan kerangka kebijakan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) dan meningkatkan ketahanan (resilience) yang menjadi titik simpul konvergensi adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB). Luas wilayah provinsi Gorontalo adalah 12.435,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.202.631 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 170 jiwa/km² (BPS, 2020). Bentuk bentang alam dan permukaan tanah di wilayah ini sebagian besar adalah perbukitan, oleh karenanya Gorontalo memiliki banyak gunung dengan ketinggian yang beragam. Selain itu kondisi tektonik wilayah ini juga dilintasi oleh Sesar Gorontalo yang melewati Kota Gorontalo.

Kondisi geologi demikian menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor. Berdasarkan data yang dihimpun dari

DIBI BNPB selama periode 5 tahun terakhir provinsi Gorontalo telah mengalami sebanyak 71 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020 Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 126,64 (sedang).



13. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pembangunan Rendah Karbon

Emisi RAD-GRK Provinsi Gorontalo berasal dari 3 (tiga) bidang yaitu 1) Berbasis Lahan, 2) Berbasis Energi dan 3) Pengelolaan Limbah. Hasil proyeksi Business as Usual (BAU) Provinsi Gorontalo tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi, bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 95,8%. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 3,8% dan 0,9% dari total BAU 2020 di Provinsi Gorontalo.

14. Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Capaian RB Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 "BB" sehingga perlu didorong terus pelaksanaannya hingga maksimal. Sementara itu, kesalahan dan kelalaian dalam proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga masih terjadi, hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa PNSD yang bermasalah hukum dan berproses hingga ke pengadilan.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis. Pertama, terkait dengan profesionalitas PNSD, penerapan sistem merit belum optimal dilaksanakan serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan PNSD.

Kedua, dari aspek tata laksana, perlu didorong penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan.

Ketiga, dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh predikat "B" atau baik untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja mulai terbangun dengan baik, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah, namun kedepan perlu terus dioptimalkan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

15. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penguatan konsolidasi demokrasi

Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat, Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan masih relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena itu, perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan penanganan khusus. Selama tahun 2020 kepolisian Daerah (Polda)



Gorontalo telah menyelesaikan 2.199 kasus kejahatan konvensional dari 3.485 kasus yang dilaporkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan 61 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus penganiayaan 989 kasus, pencurian biasa 398 kasus, penipuan 234 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 182 kasus dan penggelapan sebanyak 165 kasus.

Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam, meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Selain itu penegakan peraturan daerah masih lemah, dibuktikan dengan belum adanya laporan penindakan terhadap penegakan peraturan daerah

Dari sisi demokrasi, Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi, masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. capaian indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mencapai 83,21 atau naik 6,92 poin dibanding 2019. Angka ini masuk kategori baik, yang sebelumnya Gorontalo berada dalam kategori sedang, capaian tersebut perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

Mengacu pada focus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 adalah :

➤ **1. Peningkatan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi akan dititikbertkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

➤ **2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan**

Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

➤ **3. Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.



➤ **4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama**

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

➤ **5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis**

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

➤ **6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

➤ **7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi**

Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo, maka ditetapkan tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

“Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik”

Tabel 4.1
Unsur-unsur tema RKPD Tahun 2023

Peningkatan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah sector pertanian dan pariwisata 2. Peningkatan Sarana Prasarana pertanian dan perikanan 3. Memfasilitasi kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja 4. Menjaga daya beli rumah tangga khususnya masyarakat miskin 5. Pembangunan Infrastruktur dasar dan strategis
Peningkatan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sarana prasarana Pendidikan 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik 3. Peningkatan sarana prasarana RS Ainun dan Labkesda serta SDM kesehatan 4. Pemenuhan layanan PMKS 5. Menjamin pemenuhan hak anak dan kapasitas ekonomi perempuan 6. Fasilitasi minat dan potensi pemuda 7. Pengembangan pengelolaan kebudayaan dan Agama



Peningkatan Kualitas Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi hutan dan lahan 2. Mewujudkan pengembangan pengelolaan persampahan dan limbah B3 3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan resiko bencana 4. Mendorong pembangunan yang rendah karbon
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana 2. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur 3. Pelayanan publik yang lebih berkualitas 4. Akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan yang handal 5. Peningkatan sarana prasarana layanan public untuk peningkatan PAD

4.2.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menengah daerah yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan agar pembangunan lebih terarah, efektif dan efisien dalam perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka secara umum strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Strategi : Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan penganeekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia;
- 2) Peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground;
- 3) Peningkatan sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan dan balai benih ikan/udang;
- 4) Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan;
- 5) Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan;
- 6) Peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen;



- 7) Peningkatan tata Kelola system pertanian dan pangan
- 8) Penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan konservasi
- 9) Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan

2. Sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

Strategi : Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, peningkatan nilai tambah tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Arah Kebijakan :

- 1) Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan;
- 2) Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri;
- 3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial;
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM;
- 5) Digitalisasi promosi dan pemasaran;
- 6) Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil;
- 7) Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia;
- 8) Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor;
- 9) Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri;
- 10) Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar;
- 11) Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje)
- 12) Pengembangan industri pariwisata halal;
- 13) Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 14) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah;



- 15) Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.

3. Sasaran Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

Strategi : Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis.

Arah Kebijakan :

- 1) Revitalisasi lembaga ekonomi desa;
- 2) Kerjasama antar desa dan antar lembaga ekonomi desa;
- 3) Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa;
- 4) Peningkatan infrastruktur ekonomi desa;
- 5) Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa;
- 7) Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi;
- 8) Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian infrastruktur pedesaan;
- 9) Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go).

4. Sasaran Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Strategi : Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar;
2. Peningkatan pengelolaan dan penanganan sampah;
3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
4. Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya;
5. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
6. Mengurangi *Backlog*;
7. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi;
8. Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi;
9. Peningkatan keselamatan lalu lintas;
10. Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas.



Strategi : Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan *E-Government*

Arah Kebijakan :

1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
2. Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan;
3. Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan, meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi;
4. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.

5. Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas layanan Pendidikan

Strategi : Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
3. Meningkatkan kualitas kurikulum
4. Mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha
5. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship
6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan
7. Peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Pendidikan

6. Sasaran Meningkatnya derajat Kesehatan

Strategi : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital;
2. Pemenuhan SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi dan Kapasitas sesuai standar melalui pembinaan dan pengawasan serta kegiatan advokasi kepada pemangku kepentingan;



3. Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, Kosmetik, Makanan dan Minuman yang terjamin Kualitas, Mutu dan Kemananannya;
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Melalui Penguatan Aksi Multisektor Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka Pengendalian Penyakit baik penyakit infeksi baru yang menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maupun Penyakit tropis terabaikan (NTD).

7. Sasaran Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat

Strategi : Perlindungan sosial bagi masyarakat

Kebijakan :

1. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial;
2. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti;
4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu;
5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial
6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil.

8. Sasaran Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

Strategi : Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan;
3. Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual;
4. Mengembangkan potensi dan minat pemuda;
5. Menumbuhkan jiwa wirausaha muda.

9. Sasaran Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

Strategi : Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan

Arah Kebijakan :



1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo;
2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan;
3. Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual;
4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah;
5. Peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

10. Sasaran Meningkatnya budaya literasi masyarakat

Strategi : Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat;
2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah;
3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat;
4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.

11. Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi : Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan :

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup;
3. Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan;
4. Pembangunan Rendah Karbon;
5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan;
6. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
7. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan).



12. Sasaran Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

Strategi : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana

Arah Kebijakan :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
2. Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

Strategi : Pembangunan Rendah Karbon

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan;
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan;
4. Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri;
5. Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

13. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Strategi : Percepatan reformasi birokrasi

Arah Kebijakan :

Arah Kebijakan :

1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK;
2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan;
3. Transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu;
4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak;
5. Penguatan kebijakan kesejahteraan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance);



6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem integritas ASN;
7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah;
8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
10. Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik;
11. Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik;
12. Penataan produk hukum daerah;
13. Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset, inovasi, Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan Pimpinan;
14. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit;
15. Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi;
16. Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
17. Penyusunan dan penetapan regulasi dan pedoman teknis (SOP) tentang kearsipan;
18. Peningkatan Kapasitas dan kuantitas pejabat fungsional, pengelola arsip daerah ;
19. Peningkatan layanan kearsipan, pendampingan penatausahaan arsip, serta penyediaan sistem advokasi pengelolaan kearsipan ;
20. Mendorong pembentukan dan kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi profesi dan komunitas pemerhati arsip.

14. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

Strategi : Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi

Arah Kebijakan :

1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas;



2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI;
3. Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis;
4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila;
5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik;
8. Pemenuhan SPM kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam implementasinya sasaran pembangunan daerah di atas diukur berdasarkan indicator pembangunan yang relevan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan, secara ringkas tujuan, sasaran, indicator dan target capaian pada tahun 2023 disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian (2023)
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	2,41	6,21
		Indeks Gini	0,409	0,398
		Inflasi	2,59	2,03
		Pendapatan Perkapita	34,21	35,94
		TPT	3,01	3,63
		Persentase Kemiskinan	15,41	15,00
	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80*	38,14
		Indeks Ketahanan Pangan	80,40*	83,22
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	104,97
		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	108,55	109,9
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	96,73	97,77
	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31*	5,27
		Nilai Ekspor (juta USD)	13,2*	18,03



Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian (2023)
	daya saing perekonomian	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	11.824
		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	N/A	
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Kemiskinan perdesaan	24,32	23,5
		Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	4
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	58,00	60,4
		Rasio Elektrifikasi (%)	99,2*	99,5
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,34	7,69
		Persentase Cakupan Air minum Layak	94,57	95,35
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	78,61
		Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	50 %	60%
Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)		0,553	0,553	
Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	89,4 %		
	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	20		
Peningkatan Sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (point)	69	69,68
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,28
		Harapan lama sekolah	13,11	13,24





Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian (2023)	
	pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,30	71,63	
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (satuan pendidikan)	SMA : 52 SMK : 39		
		Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah (%)	20,3		
	Meningkatnya derajat kesehatan		Angka harapan hidup	68,19	68,80
			Prevalensi stunting	29	
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda		Indeks Pembangunan Gender	86,74	87,03
			Indeks Perlindungan Anak	64,49	67,57
			Indeks Pembangunan Pemuda	48,17	51,59
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama		Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda :15 Tak Benda: 20	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74	
Meningkatnya budaya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22,53	36,4	
Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Penurunan emisi GRK	27,3%		
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	77,32	74,31	
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Indeks Resiko Bencana	126,64*	123	
Terwujudnya		Nilai MCP (%)	89,72	92,65	





Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian (2023)
<i>Good and Clean Government</i>		Indeks Reformasi Birokrasi	63,90	65,1
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	B	BB
		Indeks Kematangan Organisasi	48	48
		Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	
		Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP
		Indeks Sistem Merit	238,5 (kurang)	
		Nilai Maturitas SPBE	2,51	
		Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Indeks Demokrasi (%)	70,54

4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan dengan kepentingan public dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian indicator tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 4.3
Program Prioritas Provinsi Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab
	Tujuan : Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	
	Sasaran : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian





4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
5	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
7	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
8	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
9	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)	UPTD-PPI Tilamuta
16	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)	UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut & Payau
17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	UPTD-PPI Gentuma

Sasaran : Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian

1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)	UPTD-BP2MDPP
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
4	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
7	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Diskumperindag
8	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Diskumperindag
9	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskumperindag
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumperindag
11	Program Pengembangan UMKM	Diskumperindag
12	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Diskumperindag
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Diskumperindag
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Diskumperindag
15	Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha	Diskumperindag
16	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskumperindag
17	Program Pengembangan Ekspor	Diskumperindag
18	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	UPTD Balai Pemantapan Sertifikasi Mutu Barang
19	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
20	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi



21	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
22	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
23	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
24	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
25	Program Hubungan Industrial	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
26	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
27	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi (UPT -BLK)
28	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
29	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi

Sasaran : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
4	Program Penataan Desa	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
5	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
6	Program Pencatatan Sipil	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
7	Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
9	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi

Sasaran : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan Penataan Ruang
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan Penataan Ruang
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU dan Penataan Ruang
4	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PU dan Penataan Ruang
5	Program Penataan Bangunan	Dinas PU dan Penataan Ruang
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PU dan Penataan Ruang
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan Penataan Ruang
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Dinas PU dan Penataan Ruang
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Dinas PU dan Penataan Ruang
11	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dinas PU dan Penataan Ruang
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Penataan Ruang
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan
14	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	UPT TPA Talumelito
15	Program Pengelolaan Persampahan	UPT TPA Talumelito



16	Program Kawasan Permukiman	Dinas PRKP
17	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
18	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
20	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
21	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Dinas Kominfo dan Statistik
22	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo dan Statistik
23	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Kominfo dan Statistik

Sasaran : Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat

1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, PP dan PA
2	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, PP dan PA
3	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial, PP dan PA
4	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, PP dan PA
5	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial, PP dan PA
6	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, PP dan PA
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, PP dan PA
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA
10	Program Peningkatan Kualitas keluarga	Dinas Sosial, PP dan PA
11	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
12	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA

Tujuan : Peningkatan Sumber daya manusia**Sasaran : Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan**

1	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	Program pengendalian perizinan pendidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4	Program Pendidikan Kurikulum	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan

1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Kesehatan
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD dr. Ainun Habibie

**Sasaran : Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda**

1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, PP dan PA
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
3	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA
4	Program Peningkatan Kualitas keluarga	Dinas Sosial, PP dan PA
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
6	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA

Sasaran : Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

1	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesbangpol
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol

Sasaran : Meningkatnya budaya literasi masyarakat

1	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan : Peningkatan kualitas lingkungan hidup**Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas LH & Kehutanan
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH & Kehutanan
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas LH & Kehutanan
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas LH & Kehutanan
5	Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas LH & Kehutanan
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas LH & Kehutanan
7	Program Pengelolaan Hutan	Dinas LH & Kehutanan



8	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas LH & Kehutanan
9	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas LH & Kehutanan
10	Program Pengelolaan DAS	Dinas LH & Kehutanan
Sasaran : Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim		
1	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PRKP
2	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
Tujuan : Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
1	Program pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Diklat
2	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
8	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPPEDA
9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
11	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Biro Pengadaan
12	Program perekonomian dan pembangunan	Biro Pembangunan & Ekonomi
13	Program kebijakan administrasi pembangunan	Biro Pembangunan & Ekonomi
14	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
15	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
16	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan & Kesra
17	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Pemerintahan & Kesra
18	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
19	Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	Sekretariat DPRD
20	Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
21	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo dan Statistik
Sasaran : Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
2	Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kesbangpol
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
4	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
5	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran



Selanjutnya, dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penelaahan program prioritas daerah terhadap prioritas nasional Tahun 2023, Adapun tujuannya agar dapat tergambarkan dukungan program prioritas Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan nasional sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Penyelarasan Prioritas Pembangunan
RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	1. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 2. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi 3. Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi 4. Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Ebt) 5. Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan 6. Peningkatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Ukm), Dan Koperasi 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Tkdn) 8. Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi 9. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan 10. Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Program Penempatan Tenaga Kerja 5. Program Hubungan Industrial 6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 8. Program Promosi Penanaman Modal 9. Program Pelayanan Penanaman Modal 10. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 11. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 12. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 13. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 14. Program Penanganan Kerawanan Pangan 15. Program Pengawasan Keamanan Pangan 16. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 17. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 18. Program Pemberdayaan



		Pangan	Dan Perlindungan Koperasi 19. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 20. Program Pengembangan Umkm 21. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 22. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 23. Program Pengembangan Ekspor 24. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 25. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 26. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 27. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 28. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 29. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 30. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 31. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 32. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 33. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 34. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 35. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 36. Program Penyuluhan Pertanian 37. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
--	--	--------	---



			<p>38. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>39. Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>40. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>41. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</p>
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sulawesi	<p>1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>2. Program Pengelolaan Pelayaran</p> <p>3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p> <p>4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	<p>1. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda</p> <p>3. Peningkatan Akses Mutu Dan Pelayanan Kesehatan</p> <p>4. Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan</p> <p>5. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial</p>	<p>1. Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>2. Program Pengembangan Kurikulum</p> <p>3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</p> <p>4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p> <p>8. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)</p> <p>11. Program Perlindungan</p>



			<p>Perempuan</p> <p>12. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>13. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>14. Program Pendaftaran Penduduk</p> <p>15. Program Pencatatan Sipil</p> <p>16. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>17. Program Kesejahteraan Rakyat</p>
04	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia 2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 4. Program Pengelolaan Permuseuman 5. Program Pembinaan Perpustakaan 6. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 7. Program Pengelolaan Arsip 8. Program Kesejahteraan Rakyat
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar 2. Infrastruktur Ekonomi 3. Infrastruktur Perkotaan 4. Transformasi Digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengembangan Permukiman 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Penyelenggaraan Jalan 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum



			<ul style="list-style-type: none"> 7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 8. Program Pengembangan Perumahan 9. Program Kawasan Permukiman 10. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 11. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 12. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 13. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 5. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 10. Program Pengelolaan Hutan



			<p>11. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</p> <p>12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p>
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	<p>1. Penegakan Hukum Nasional</p> <p>2. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</p> <p>3. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola</p> <p>4. Konsolidasi Demokrasi</p>	<p>1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>3. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum</p> <p>4. Program Penataan Organisasi</p> <p>5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p> <p>9. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</p> <p>10. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa</p> <p>11. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</p> <p>12. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>13. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>14. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>15. Program Pengelolaan</p>



			Barang Milik Daerah 16. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 17. Program Kepegawaian Daerah 18. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 19. Program Penyelenggaraan Pengawasan 20. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
--	--	--	---

4.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam proses penyusunannya juga mengakomodir proses politik dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 78 bahwa dalam penyusunan rancangan awal DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD selain disampaikan secara tertulis juga dimasukkan/diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahapan perencanaan. Setelah diterima oleh Kepala Bappeda, Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui proses penelaahan/verifikasi untuk diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Proses penelaahan/verifikasi dimaksud dilaksanakan melalui system SIPD yang merupakan hasil inputan dari seluruh anggota DPRD provinsi. Alur proses penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 4.2
Alur Verifikasi Pokok-pokok Pikiran DPRD



Selanjutnya, berdasarkan data dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hasil inputan dan verifikasi pokok-pokok pikiran DPRD dicantumkan dalam lampiran RKPDP. Untuk rekapitulasi jumlah pokok-pokok pikiran berdasarkan OPD tujuan dan status usulan digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi

No	OPD	Jumlah Usulan	Status					
			Validasi Sekretariat Dewan	Validasi Mitra Bappeda	Diteruskan Forum OPD	Diteruskan Musrenbang Prov/Kab/Kota	Disetujui	Ditolak
1	Kesbangpol	2					2	
2	Biro Hukum	3					3	
3	Biro Pemkesra	201			147	12	34	8
4	Dinas Kelautan Perikanan	120						120
5	Dinas Kesehatan	10				9		1
6	Diskominfotik	4				3	1	
7	Diskumperindag	106						106
8	Dinas LHK	6				5		1
9	Dinas Pangan	9				9		
10	Dinas Pariwisata	24						24
11	Dinas PUPR	689			12	342	20	315
12	Dinas PMD Dukcapil	5					1	4
13	Dinas PMESDMTrans	73				61		12
14	Dinas Dikbudpora	43				2	7	34
15	Dinas Perkim	106					13	93
16	Dinas Perhubungan	68				62		6
17	Dinas Pertanian	282			281			1
18	Dinas Sosial	114				21	6	87
18	OPD Tujuan Akhir Kosong (blanks)	66	1	52				13
		1931	1	52	440	526	87	825

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa tolinggula pantai, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
2	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	dusun ladapa, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
3	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	dusun ladapa, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
4	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa bulontiyoy, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
5	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Kota Jin, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
6	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Dusun Kota Jin, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
7	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Molangga, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
8	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa ilotunggula, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
9	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Ilotunggula, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
10	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa sembihinga, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
11	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Windu dan desa Topi, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
12	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Alata 2, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
13	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Botuwombato, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
14	10-03-2022	Ance Robot	Pendidikan	Masalah REHABILITASI RUANG KELAS BARU - Rehabilitasi RKB pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Sekolah SMK N 2 Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
15	10-03-2022	Ance Robot	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	SMK Negeri 2 Gorut, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
16	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Tolite, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
17	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa Molangga dan tolinggula Tengah, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
18	10-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Molangga, Desa Ilotunggula, desa tolinggula tengah, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Limbato, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
20	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa cempaka, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
21	10-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa ilotunggula, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
22	10-03-2022	Ance Robot	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS - Insentif GTK non ASN pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Se Kabupaten Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
23	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Desa Tolinggula Pantai, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
24	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa bulontio barat, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima karena termasuk KSP Gorontalo Koefisien : 500 Meter Anggaran : 0	Usulan disetujui
25	11-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dusun limututu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
26	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa mebongo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
27	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	pantai dionumo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
28	11-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Koluwoka, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
29	11-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Koluwoka, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
30	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dusun buade, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
31	11-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Datahu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	11-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa datahu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
33	11-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa datahu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
34	11-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Tolinggula Tengah, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
35	11-03-2022	Ance Robot	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Tolinggula Tengah, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
36	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Kecamatan Anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
37	12-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Sumalata Timur - Puloheuti, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
38	30-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Molangga Kecamatan Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
39	16-04-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	Desa Hutakalo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Validasi Mitra Bappeda
40	16-04-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	Desa Pontolo Atas, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Validasi Mitra Bappeda
41	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Tolinggula Pantai, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Tolinggula Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
42	10-03-2022	Ance Robot	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Tolinggula Pantai, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Tolinggula Pantai	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Kecamatan dan Desa yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Gorut yang menjadi kewenangan hanya 2 kecamatan yaitu: Kec. Kwandang, Kec. Anggrek

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa bulontiyu Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontiyu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
44	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Bulontiyu Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontiyu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
45	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa hutogalo, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Sumalata, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
46	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa mokonou, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Sumalata, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
47	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Pulohenti, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Pulohenti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPT
48	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa bulontiyu Barat, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontiyu Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi dan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	10-03-2022	Ance Robot	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa Bulontiyu timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontiyu Timur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Gorut yang menjadi kewenangan hanya 2 kecamatan yaitu: Kec. Kwandang, Kec. Anggerek.
50	10-03-2022	Ance Robot	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	desa bulontiyu, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontiyu Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
51	10-03-2022	Ance Robot	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	dusun Kota Jin, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Tolinggula Pantai	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
52	10-03-2022	Ance Robot	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa bulango Raya, Kab. Gorontalo Utara, Tomolito, Bulango Raya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
53	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Desa hutakalo, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Hutakalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
54	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	dusun popaya, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Hutakalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	10-03-2022	Ance Robot	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dusun kota Jin, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Tolinggula Pantai	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorut.
56	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa bulango raya, Kab. Gorontalo Utara, Tomolito, Bulango Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
57	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Hutakalo, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Hutakalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
58	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	Dusun popaya, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Hutakalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
59	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Dusun mokunowu, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Hutakalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
60	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Pulohenti, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Pulohenti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi dan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
61	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Desa Pulohenti, Kab. Gorontalo Utara, Pulohenti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	10-03-2022	Ance Robot	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa koluwoka, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Sumalata, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Gorut yang menjadi kewenangan hanya 2 kecamatan yaitu: Kec. Kwandang, <u>Kec. Angarek.</u>
63	10-03-2022	Ance Robot	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Molangga, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Molangga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Gorut yang menjadi kewenangan hanya 2 kecamatan yaitu: Kec. Kwandang, <u>Kec. Angarek.</u>
64	10-03-2022	Ance Robot	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Tolinggula Tengah, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Tolinggula Tengah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Gorut
65	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Desa Ilotunggula, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Ilotunggulo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak dikarenakan bukan kewenangan PUPR Provinsi Gorontalo
66	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa ilomangga, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Ilomanqqa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
67	10-03-2022	Ance Robot	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Kwandang, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	10-03-2022	Ance Robot	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Kecamatan kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Kwandang, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Tidak Setujui
69	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Wapalo dan Lantolo - AIBUKU, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Anggrek, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
70	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	kawasan mangrove, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Anggrek, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
71	10-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Ilotunggula, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Ilotunggulo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
72	10-03-2022	Ance Robot	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa bohulo dan desa potanga, Kab. Gorontalo Utara, Biau, Biau, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Ditolak, Kab. Gorut
73	10-03-2022	Ance Robot	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	kecamatan tolinggula, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Tolinggula, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
74	11-03-2022	Ance Robot	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Desa Bulontio, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	11-03-2022	Ance Robot	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Bulango Raya, Kab. Gorontalo Utara, Tomolito, Bulango Raya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
76	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	Desa Helumo, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Sumalata, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
77	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Bulontio Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara. BINA MARGA
78	11-03-2022	Ance Robot	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Bulontio barat, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT, alokasi rumpun tidak tersedia
79	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Dusun langge, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Ilotunqqulo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan strategis Provinsi Gorontalo
80	11-03-2022	Ance Robot	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa bulontio barat, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Desa Tolinggula Ulu, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Tolinggula Ulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak karena saluran irigasi bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi
82	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	Desa Bulontio Timur & Desa Pulohenti, Kab. Gorontalo Utara, Biau, Biau, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
83	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Molangga, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Molangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi
84	11-03-2022	Ance Robot	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Ilangata, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Ilangata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	itolak karena bukan merupakan kewenangan dinas PUPR Provinsi Gorontalo
85	30-03-2022	Ance Robot	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) KEC. SUMALATA KAB. GORONTALO UTARA, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Sumalata, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Perlu di lengkapi dengan nama dan NIK calon penerima bantuan listrik gratis
86	10-03-2022	Arifin Ali	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Kel. Siendeng dan Kel. Molosipat U, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
87	10-03-2022	Arifin Ali	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
88	10-03-2022	Arifin Ali	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl. sapta Marga (Perbatasan antara kel. Botu dengan Kel. Talumolo, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
89	10-03-2022	Arifin Ali	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Kel. Dembe I dan Kel. Siendeng, Kota Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	10-03-2022	Arifin Ali	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Kel. Padebuolo dan Kel. Dulomo Utara, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
91	10-03-2022	Arifin Ali	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan Limba B, Kota Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rekomendasi : disesuaikan dengan anggaran yang ada dan terdaftar dalam DTKS serta ketentuan lainnya Koefisien : 50 Orang Anggaran : 0	Usulan disetujui
92	10-03-2022	Arifin Ali	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Jl. Manggis, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Usulan disetujui
93	10-03-2022	Arifin Ali	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
94	11-03-2022	Arifin Ali	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Jl. Meranti, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
95	14-03-2022	Arifin Ali	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Se Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
96	15-04-2022	Arifin Ali	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kel. Pilolodaa, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
97	15-04-2022	Arifin Ali	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kel. Siendeng, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
98	10-03-2022	Arifin Ali	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jl. Moh. Yamin IV, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak karena drainase yang lokasinya di kota gorontalo bukan merupakan tuisi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	10-03-2022	Arifin Ali	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Jl. Moh. Yamin IV, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak karena status jalan merupakan kewenangan/aset dari Dinas PU Kota Gorontalo
100	10-03-2022	Arifin Ali	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kelurahan Donggala, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Donggala	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
101	10-03-2022	Arifin Ali	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Kelurahan Limba B, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba B	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan perbaikan jamban dapat di usulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
102	10-03-2022	Arifin Ali	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Siendeng	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Walikota Gorontalo yang menjadi kewenangan hanya 3 kecamatan Kec. Kota Selatan, Kec. Dumbo Rava. Kec. Kota Barat
103	10-03-2022	Arifin Ali	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Se Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
104	10-03-2022	Arifin Ali	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kelurahan Molosipat W, Kota Gorontalo, Kota Barat, Molosipat W	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak karena status jalan merupakan kewenangan DI dinas PU Kota Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	10-03-2022	Arifin Ali	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Kelurahan Dembe II, Kota Gorontalo, Kota Utara, Dembe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak bukan TUSI Dinas PUPR
106	10-03-2022	Arifin Ali	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kelurahan Pilolodaa, Kota Gorontalo, Kota Barat, Pilolodaa	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ditemukan dalam verifikasi lapangan
107	10-03-2022	Arifin Ali	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kelurahan Limba U2, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
108	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa Limehe Timur, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
109	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kelurahan Polohungo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
110	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Kumuh Kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Usulan 15 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 15 Unit Rumah Anggaran : 562500000	Usulan disetujui
111	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kecamatan Tilango, Kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto Barat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
112	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
113	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
114	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
116	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
117	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
118	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kec. Tilango, Kec. Limboto, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
119	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
120	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
121	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Pangadaa, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
122	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Duwanga, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
123	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Momala, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
124	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Ambara, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
125	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Pilolalenga, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
126	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Ambara, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Pilolalenga, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Dapat diakomodir dengan catatan : 1. Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan juknis;; 2. Lolos tahapan verifikasi; 3. Jika Merupakan Penerima Hibah Bansos di Tahun 2022 maka akan dipertimbangkan melalui Verifikasi Lapangan. Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Usulan disetujui
128	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Tenaga Kerja	Masalah Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Desa Ambara, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
129	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Kecamatan Tilango, Kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto Barat, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
130	11-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Kecamatan Tilango, Kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto Barat, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
131	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Desa Yosonegoro, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Yosonegoro	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
132	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Pangadaa, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Pangadaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
133	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Duwanga, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Duwanga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
134	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Momala, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Momala	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	12-03-2022	Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Desa Pilolalenga, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Pilolalenga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
136	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Raharja, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
137	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Harapan, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
138	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Desa Raharja, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
139	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Raharja, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
140	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Dulohupa, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
141	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Bongo 2, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
142	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Pangeya, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
143	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa Pangeya, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
144	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa Suka Maju, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
145	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa Dulohupa, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
146	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Permata, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
147	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Mutiara, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Diterima karena merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun masih akan di survey kembali oleh OPD Teknis dan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Boalemo. Untuk data lebih akurat dibutuhkan survey lapangan kembali Koefisien : 500 Meter Anggaran : 0	Usulan disetujui
148	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Mutiara, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
149	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Bongo 4, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
150	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Jatimulya, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
151	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Dulohupa, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Se Kabupaten Boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Usulan 100 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 100 Unit Rumah Anggaran : 3750000000	Usulan disetujui
153	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Se Kabupaten Boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
154	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Se Kabupaten Boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
155	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Se Kabupaten Boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
156	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Dulohupa, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
157	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kec. Wonosari, Kec. Paguyaman dan Kec. Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
158	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (1 Pokir hanya dapat dimaksimalkan untuk 10 Usulan Beasiswa/ 5 Hibah Bansos) dan Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan juknis;; 2. Lolos tahapan verifikasi; Koefisien : 10 Mahasiswa S1 Anggaran : 0	Usulan disetujui
159	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Pangeya, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
160	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Dimito, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
161	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
163	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Dulohupa, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
164	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kec. Wonosari, Paguyaman Pantai dan Dulupi, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
165	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kec. Wonosari, Paguyaman Pantai dan Dulupi, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
166	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kec. Wonosari, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Dulupi, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
167	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Dulohupa, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
168	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
169	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
170	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Kec. Dulupi, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
171	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kec. Wonosari, Paguyaman, dan Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
172	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Mekar Jaya, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
173	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Tri Rukun, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Desa Saritani, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
175	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Tanjung dan Desa Dimito, Kab. Boalemo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
176	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Desa mutiara, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
177	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Tenaga Kerja	Masalah Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Se Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
178	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Tenaga Kerja	Masalah Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kec. Paguyaman, Wonosari & Dulupi, Kab. Boalemo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
179	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Kec. Wonosari, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
180	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Kesatuan Bangsa dan Politik	Masalah Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Dapat diakomodir sambil menunggu proposal sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan anggaran dengan kapasitas fiskal serta berdasarkan hasil verifikasi tim. Koefisien : 7 Organisasi Anggaran : 637000000	Usulan disetujui
181	11-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Bongo II, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
182	11-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Sukamaju, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
183	30-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Bongo III Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Dulohupa, Kab. Boalemo, Dulohupa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
185	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Suka Maju, Kab. Boalemo, Wonosari, Sukamaju	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk kawasan Strategis Provinsi
186	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Sari tani, Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
187	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Diloato, Kab. Boalemo, Paguyaman, Diloato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
188	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Diloato, Kab. Boalemo, Paguyaman, Diloato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk kawasan Strategis Provinsi
189	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Diloato, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
190	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Kuala Lumpur, Kab. Boalemo, Paguyaman, Kuala Lumpur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Girisa, Kab. Boalemo, Paguyaman, Girisa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
192	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Girisa, Kab. Boalemo, Paguyaman, Girisa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk kawasan Strategis Provinsi
193	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Karya Murni, Kab. Boalemo, Paguyaman, Karya Murni	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
194	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Patoameme, Kab. Boalemo, Botumoita, Patoameme	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
195	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	se Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo, Wonosari, Wonosari, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
196	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Desa Bubaa, Kab. Boalemo, Paguyaman Pantai, Bubaa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Girisa, Kab. Boalemo, Paguyaman, Girisa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
198	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	se kecamatan wonosari, Kab. Boalemo, Wonosari, Wonosari, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
199	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kec. Wonosari, Kec. Paguyaman, Kec. Paguyaman Pantai dan Kec. Dulupi, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi
200	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kec. Wonosari, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Dulupi, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
201	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Kec. Wonosari dan Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Kec. Paguyaman dan Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT dan belum ada BNBA nya
203	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Bubaa, Apitalawo, Limba, olibuu, limbatihu, bangga, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
204	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Saritani, Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
205	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Saritani, Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk kawasan Strategis Provinsi
206	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Desa Saritani, Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk kawasan Strategis Provinsi
207	09-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kec. Wonosari, Paguyaman, Paguyaman Pantai dan Kec. Dulupi, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL P3A PROVINSI GORONTALO
208	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonosari dan Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Bubaa, Kab. Boalemo, Paguyaman Pantai, Bubaa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
210	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Dulupi, Kab. Boalemo, Dulupi, Dulupi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
211	10-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo, Wonosari, Wonosari, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
212	14-04-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masalah Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo, Paguyaman, Bongo IV	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bantuan sumur bor sudah bukan kewenangan, pada urusan kegeologian
213	31-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Bintana Kecamatan Atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Bintana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tdk masuk dalam usulan paripurna
214	31-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Pinontoyonga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk dalam usulan paripurna
215	31-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa sukamaju kec wonosari, Kab. Boalemo, Wonosari, Sukamaju	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk dalam usulan paripurna
216	31-03-2022	Dedy Hamzah, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Moronjoe Desa Tenilo Kec Paguyaman, Kab. Boalemo, Paguyaman, Tenilo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk dalam usulan paripurna

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	09-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	SEPANJANG JALAN ANDALAS DARI SIMPANG 5 TELAGA SAMPAI SIMPANG 4 JDS KOTA GORONTALO, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
218	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Alamat, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
219	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Pertanahan	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik, Rencana Pembangunan Dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Alamat, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
220	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Usulan disetujui
221	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jln. Beringin, Kota Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
222	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Alamat, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
223	12-04-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Alamat, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
224	10-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Jalan, Kota Gorontalo, Duingingi, Tomulabutao	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak dikarenakan bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR provinsi Gorontalo
225	10-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) - Pembangunan USB pendidikan menengah dan khusus	Jalan, Kota Gorontalo, Duingingi, Tomulabutao	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Alamat, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
227	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Alamat, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
228	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Alamat, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Talumolo	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
229	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Alamat, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
230	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Alamat, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Bugis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena merupakan kewenangan BWS
231	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Dinas Sosial, P3A provinsi Gorontalo tidak ada program Pengembangan Ekonomi Masyarakat

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Alamat, Kota Gorontalo, Kota Barat, Lekobalo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
233	11-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Alamat, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
234	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kota Gorontalo, Sipatana, Sipatana, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
235	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Jln. Padang, Kota Gorontalo, Sipatana, Sipatana, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
236	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jln. Bone, Kota Gorontalo, Sipatana, Molosifat U	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
237	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Jln. Padang Masjid Miftahul Jannah, Kota Gorontalo, Sipatana, Tapa	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ada dalam paripurna
238	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Alamat, Kota Gorontalo, Sipatana, Tapa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jln. M. Thaib Gobel, Kota Gorontalo, Sibatana, Molosifat U	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
240	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jln. Beringin, Kota Gorontalo, Dungi, Tomulabutao Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
241	19-03-2022	Dr. Drs. Abd. Wahab Thalib, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kota Gorontalo, Sibatana, Sibatana, Seluruh Kelurahan/Desa	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ditemukan saat verifikasi lapangan oleh OPD Teknis
242	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA PANTUNGO KEC. TELAGA BIRU. KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 325000000	Usulan disetujui
243	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DUSUN IV DESA PANTUNGO. KEC. TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
244	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pertanian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	DESA LUHU KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
245	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DUSUN 3 DESA LUWOO KECAMATAN TALAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
246	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	KAWASAN KUMUH KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Usulan 15 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 15 Unit Rumah Anggaran : 562500000	Usulan disetujui
247	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	KECAMATAN TABONGO, KECAMATAN TELAGA DAN KECAMATAN TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
248	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	SE KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
249	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	SE KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
250	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	SE-KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
251	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	SE KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
252	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	SE KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
253	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KEC. TELAGA, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
254	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	KECAMATAN BATUDAA, KECAMATAN TELAGA, KECAMATAN TABONGO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
255	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	SE - KAB. GORONTALO, LIMBOTO, TALAGA, BATUDAA DLL, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
256	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KEC. LIMBOTO, TALAGA, BONGOMEME, BATUDAA, TABUNGO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
257	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	SE KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima karena merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi .CIPTA KARYA Koefisien : 1000 1000 Anggaran : 0	Usulan disetujui
259	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA PANTUNGO KEC. TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
260	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA DULAMAYO SELATAN - DULAMAYO UTARA, Kab. Gorontalo, Telaga, Dulamayo Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
261	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	KECAMATAN TILANGO, KECAMATAN TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Telaga Biru, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
262	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	KECAMATAN BILUHU DAN KECAMATAN BATUDAA PANTAI, Kab. Gorontalo, Batudaa Pantai, Batudaa Pantai, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
263	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	SE-KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
264	12-03-2022	Dr. Drs. Paris R. A. Jusuf, S.sos.I, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	DESA LUHU KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo, Telaga, Luhu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak dikarenakan diluar TUSI Dinas PUPR
265	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA ISIMU SELATAN. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA ISIMU SELATAN. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
267	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanahan	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DESA ISIMU SELATAN. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
268	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA BAKTI. KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
269	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jembatan	DESA BUHU, KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
270	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA BUHU. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
271	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan Ruang	DESA ILOPONO, KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
272	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	DESA ILOPONU. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
273	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA ILOPONU. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
274	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA ILOPONU. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
275	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan Ruang	DESA ILOPONU. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
276	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan Ruang	DUSUN MOLOWAHU, DESA BAKTI KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah ada dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Usulan disetujui
277	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DESA BAKTI KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
278	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA ISIMU SELATAN, KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA ISIMU SELATAN. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
280	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA BOTUMOPUTI, KEC. TIBAWA KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
281	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA BOTUMOPUTI, KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
282	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA BOTUMOPUTI, KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
283	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA OLUBUA. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
284	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA OLUBUA. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi (AL-FALAH) Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
285	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	DESA TOYIDITI. KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
286	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA TOYIDITO. KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
287	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA ROYIDITO. KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
288	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DESA BAKTI, KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
289	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA BAKTI, KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Boliyohuto Kec. Boliyohuto, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
291	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Bihe, Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
292	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Pangahu. Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
293	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Gandaria Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
294	14-04-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Isimu Selatan, kEc. Tibawa, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
295	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA BOTUMOPUTI KEC. TIBAWA, KAB .GORONTALO, Kab. Gorontalo, Tibawa, Botumoputi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
296	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA BOTUMOPUTI KEC. TIBAWA, KAB .GORONTALO, Kab. Gorontalo, Tibawa, Botumoputi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
297	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA ILOMATA, KAB .GORONTALO, Kab. Gorontalo, Tibawa, Ilomata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
298	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	DESA ILOMATA. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo, Tibawa, Ilomata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
299	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA ILOMATA KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo, Tibawa, Ilomata	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo yang menjadi kewenangan hanya 2 Kecamatan yaitu: Kecamatan Limboto dan Kec. Telaga

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA BAKTI. KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo, Pulubala, Bakti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
301	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	DESA BAKTI KE. PULUBALA, Kab. Gorontalo, Pulubala, Bakti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
302	12-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jembatan	DESA BAKTI KE. PULUBALA, Kab. Gorontalo, Pulubala, Bakti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
303	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA ILOMATA. KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo, Tibawa, Ilomata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
304	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pertanahan	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DESA ILOMATA, KEC. TIBAWA,, Kab. Gorontalo, Tibawa, Ilomata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak dikarenakan Secaba sudah ada di desa Tabongo
305	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA OLUBUA KEC. TIBAWA, Kab. Gorontalo, Tibawa, Ulobua	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
306	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	DESA BAKTI. KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo, Pulubala, Bakti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
307	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA BAKTI. KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo, Pulubala, Bakti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
308	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA BAKTI KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo, Pulubala, Bakti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
309	14-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	DESA TOYIDITO KEC. PULUBALA, Kab. Gorontalo, Pulubala, Toyidito	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	14-04-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masalah Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	DEsa Bihe, Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo, Asparaga, Bihe	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bantuan sumur bor sudah bukan kewenangan, pada urusan kegeologian
311	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Desa Pangahu Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo, Asparaga, Pangahu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Penyediaan Tower Telkom Bukan Menjadi Kewenangan OPD PRKP, Usulan dapat diteruskan ke Dinas Infokom dan Statistik
312	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Desa Bihe Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo, Asparaga, Bihe	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak diluar kewenangan Pupr provinsi gorontalo
313	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU - Pembangunan RKB pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Desa Pangahu. Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo, Asparaga, Pangahu		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Wajib memperhatikan UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Kepmen 050/5889 Th. 2021, Dokren/prioritas/strategi/dan arah kebijakan Nasional dan Daerah, regulasi lainnya, serta ketersediaan fiskal daerah.
314	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Pangahu Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo, Asparaga, Pangahu	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ada dalam paripurna
315	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa pangahu kec. asparaga, Kab. Gorontalo, Asparaga, Asparaga, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	19-03-2022	Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Gandaria Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo, Tolangohula, Gandaria	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun jalan untuk pasar ikan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya.CIPTA KARYA
317	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	RT 2 RW 5 LIMba KelurahanU2, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
318	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
319	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Kelurahan Wongkaditi Barat, Kota Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
320	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
321	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Kelurahan Biawu, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
322	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Tanggikiki, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
323	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Limba U1, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
324	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Jl Makassar, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
325	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Gang Idola, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
326	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Wongkaditi Timur, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
327	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dulomo Selatan, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
328	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	RW II Dembe II, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Dembe II Kompleks RSAS, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
330	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Dulomo Selatan, Kota Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
331	12-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kel. Limba U II, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (TPQ AL-AMANA), Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 TPQ Anggaran : 0	Usulan disetujui
332	15-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
333	15-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
334	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
335	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo, Kota Timur, Ipilo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kota Gorontalo
336	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Biawu, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Biawu	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Buladu, Kota Gorontalo, Kota Barat, Buladu	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pada Tahun 2023 tidak ada program pengembangan Ekonomi Masyarakat
338	10-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tanggikiki, Kota Gorontalo, Sibatana, Tanggikiki	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Dinas Sosial, P3A tidak ada program Pengembangan ekonomi Masyarakat
339	12-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kel. Wongkaditi Timur, Kota Gorontalo, Kota Utara, Wongkaditi Timur	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
340	12-03-2022	Erwinsyah Ismail, S.Ikom	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kel. Limba U II, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
341	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kompleks Pesantren Hubulo, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
342	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
343	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
344	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
345	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	"PERBATASAN DESA TANGGILINGO & DESA DUTOHE KEC. KABILA", Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
346	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	"PERBATASAN DESA TANGGILINGO & DESA PADENGO", Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Dusun, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
348	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Dusun, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
349	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	PERBATASAN DESA CENDANA PUTIH & DESA MONANO, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
350	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Mesjid Al-Ikhsan Simpang 4 Dusun Tonala Utara, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Usulan disetujui
351	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Motilango Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
352	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Tanggilingo Kecamatan Kabila, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
353	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Luwohu, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
354	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kelurahan Tumbihe, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
355	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Dutohe, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
356	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
357	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
359	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Alo Kecamatan Bone Raya, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
360	09-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Sogitia Kecamatan Bone, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
361	10-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
362	10-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
363	10-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
364	10-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
365	10-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
366	10-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
367	10-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
368	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
369	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
370	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
371	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
372	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
373	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
374	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
375	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
376	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
377	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
378	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
379	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
380	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
381	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pangan	Masalah Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pangan		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
382	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
383	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Alamat, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
384	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
385	12-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
386	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pertanian	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
387	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
388	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Alamat, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
389	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
390	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Alamat, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
391	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
392	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
393	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Alamat, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
394	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Alamat, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
395	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Alamat, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
396	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Alamat, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
397	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo
398	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Alamat, Kab. Bone Bolango, Meranti	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
399	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo
400	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Alamat, Kab. Bone Bolango, Suwawa Timur, Tulabolo		Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, sudah ada usulan yang sama
401	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Alamat, Kab. Bone Bolango, Suwawa Timur, Tinemba	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
402	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Alamat, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
403	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Alamat, Kab. Bone Bolango, Tapa, Langge	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017
404	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Alamat, Kab. Bone Bolango, Dumbaya Bulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
405	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Alamat, Kab. Bone Bolango, Suwawa Timur, Tinemba	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
406	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo, Limboto, Hepuhulawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017
407	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Alamat, Kab. Bone Bolango, Suwawa Timur, Tinemba	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Kewenangan Pemerintah Pusat
408	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Tenaga Kerja	Masalah Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Alamat, Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Motilango	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, bantuan alat musik band tidak menjadi kewenangan
409	11-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Alamat, Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Butu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017
410	12-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Bone Bolango, Kabila Bone, Kabila Bone, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
411	12-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kab. Bone Bolango, Kabila, Kabila, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Lokus Usulan Desa/Kel tidak ada

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	15-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Tumbihe, Kab. Bone Bolango, Kabila, Tumbihe	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
413	15-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Desa, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
414	15-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Kelurahan, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
415	15-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Kelurahan dan Desa, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
416	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Telaga Biru, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
417	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Gorontalo, Telaga, Telaga, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
418	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Gorontalo, Tilango, Tilango, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
419	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Gorontalo, Tilango, Lauwunu	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
420	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Alamat, Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Motilango	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, PADA TAHUN 2023 TIDAK ADA LAGI PROGRAM BANTUAN KELOMPOK (KUBE)
421	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat tilango, Kab. Gorontalo, Tilango, Tilango, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, PADA TAHUN 2023 TIDAK ADA LAGI PROGRAM BANTUAN PERKELOMPOK (KUBE)
422	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Pariwisata	Masalah Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Objek Wisata Botubarani, Kab. Bone Bolango, Kabila Bone, Molutabu	Dinas Pariwisata	Stok ProgramDitolak	ditolak, tidak ada calon penerima (By Name By Address) dan usulan tidak masuk dalam data pikir hasil paripurna
423	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan di Laut - Benih	Alamat, Kab. Bone Bolango, Kabila Bone, Oluhuta	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Kegiatan yang sifatnya pemberdayaan budidaya ikan air tawar, bukan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi tetapi menjadi kewenangana kabupaten kota
424	19-03-2022	Faizal Hulukati, SE, M.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Alamat, Kab. Bone Bolango, Kabila Bone, Oluhuta	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
425	12-03-2022	Guntur M . Thalib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa Balahu, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
426	12-03-2022	Guntur M . Thalib	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Balahu, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Verifikasi OPD Provinsi
427	12-03-2022	Guntur M . Thalib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa Isimu Selatan, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
428	12-03-2022	Guntur M . Thalib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Isimu Selatan, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
429	12-03-2022	Guntur M . Thalib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Isimu Raya, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 355000000	Usulan disetujui
430	12-03-2022	Guntur M . Thalib	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Isimu Raya, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Verifikasi OPD Provinsi
431	12-03-2022	Guntur M . Thalib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Desa Balahu, Kab. Gorontalo, Tibawa, Balahu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR Provinsi
432	12-03-2022	Guntur M . Thalib	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Desa Isimu Raya, Kab. Gorontalo, Tibawa, Isimu Raya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
433	12-03-2022	Guntur M . Thalib	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Isimu Raya, Kab. Gorontalo, Tibawa, Isimu Raya	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
434	09-03-2022	H. Adhan Dambea, S.Sos, MA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kelurahan Paguyaman, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
435	09-03-2022	H. Adhan Dambea, S.Sos, MA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Kelurahan Biawu, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Kota Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak, merupakan Kewenangan BWS
436	09-03-2022	H. Adhan Dambea, S.Sos, MA	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Panti Griya Lansia milik Pemerintah Kota Gorontalo, bukan Pemerintah Provinsi. Pemprov Gorontalo telah merencanakan pembangunan panti terpadu pada RPD 2023-2026

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	09-03-2022	H. Adhan Damba, S.Sos, MA	Sekretariat Daerah	Masalah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - PENGADAAN MOBIL AMBULANCE	Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan kewenangan dinas sosial provinsi
438	09-03-2022	H. Adhan Damba, S.Sos, MA	Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi
439	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	dijalan trans wahab kel hepuhulawa kec. limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
440	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	kel. hepuhulawa kec limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
441	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	kel. hepuhulawa kec. limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
442	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	kel hepuhulawa, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
443	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	kompleks kantor desa huntu, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
444	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	kawasan kumuh kab. gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Usulan 15 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 15 Unit Rumah Anggaran : 562500000	Usulan disetujui
445	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pertanian	Masalah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	kec. limboto dan kec. limboto barat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
446	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se - kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
447	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se - Kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
448	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	se - Kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
449	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	se - Kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
450	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Se - Kab gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
451	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	kec limboto dan kec limboto barat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
452	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	se kab Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
453	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	kel bongohulawa kec limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
454	12-03-2022	H. Adnan Entengo	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	desa ilomangga, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
455	12-03-2022	H. Adnan Entengo	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	dusun 1 dan dusun 3 desa ombulo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
456	12-03-2022	H. Adnan Entengo	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Se - Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
457	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa huntu, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
458	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa tinelo, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
459	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	SMK 1 Limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
460	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	SMK 2 limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
462	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
463	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
464	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
465	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Luwoo, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
466	08-04-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Kec. dungaliyo kab gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
467	08-04-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	SMA 1 Dungaliyo, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
468	08-04-2022	H. Adnan Entengo	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	SMA 1 DUNGALIYO, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
469	08-04-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa malahu kec.limboto, Kab. Gorontalo, Limboto, Malahu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk dalam lampiran usulan paripurna

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
470	08-04-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa tohupo kec bongomeme kab gorontalo, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Tohupo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk dalam lampiran usulan paripurna
471	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	jln. sahmina nur kel. hepuhulawa kec. limboto, Kab. Gorontalo, Limboto, Hepuhulawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
472	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	kel hepuhulawa kec. limboto, Kab. Gorontalo, Limboto, Hepuhulawa		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, usulan di input dua kali
473	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	dusun anggageta desa dungaliyo, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Dungaliyo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk pada lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
474	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	kel hepuhulawa, Kab. Gorontalo, Limboto, Hepuhulawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
475	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	desa bongo, Kab. Gorontalo, Batudaa Pantai, Bongo	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa dungaliyo, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Dungaliyo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
477	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa dungaliyo, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Dungaliyo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
478	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	se kabupaten gorontalo, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
479	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa dungaliyo, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Dungaliyo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
480	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	kec limboto dan kec limboto barat, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
481	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	kec limboto, kec limboto barat,, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
482	11-03-2022	H. Adnan Entengo	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	dembe 1, kec. kota barat-kota gorontalo, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
483	12-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa limehu kec tabongo, Kab. Gorontalo, Tabongo, Limehu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
484	12-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	pentadio timur, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Pentadio Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tuisi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
485	12-03-2022	H. Adnan Entengo	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	kel. dembe 1 dan kel. lekobalo, Kota Gorontalo, Kota Barat, Kota Barat, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Lokasi Kelurahan/Desa yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh yang menjadi Kewenangan Provinsi, sesuai SK Walikota Gorontalo untuk Kec. Kota Barat hanya Kel. Buliide Kel. Tenilo
486	12-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	perumahan puribeta jalan delima kel. libo kec. kota barat, Kota Gorontalo, Duingingi, Libuo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	itolak, bukan kewenangan Dinas PUPR Provinsi
487	12-03-2022	H. Adnan Entengo	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	kel. bongohulawa, Kab. Gorontalo, Limboto, Bongohulawa	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pemasangan lampu PJU sudah menjadi kewenangan dinas perhubungan
488	13-03-2022	H. Adnan Entengo	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	kel. dembe 1, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
489	13-03-2022	H. Adnan Entengo	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	kel. dembe 1 dan kel. lekobalo, Kota Gorontalo, Kota Barat, Kota Barat, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	15-03-2022	H. Adnan Entengo	Sekretariat Daerah	Masalah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - PENGADAAN MOBIL AMBULANCE	Kantor sekretariat PPNI Provinsi Gorontalo kel.pulubala kec kota tengah kota gorontalo, Kota Gorontalo, Kota Tengah, Kota Tengah, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
491	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa huntu, Kab. Gorontalo, Batudaa, Huntu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tdk terlampir di usulan paripurna
492	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	kel.hepuluhawa, Kab. Gorontalo, Limboto, Hepuluhawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak terlampir dalam usulan paripurna
493	19-03-2022	H. Adnan Entengo	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Luwoo, Kab. Gorontalo, Talaga Jaya, Luwoo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk dalam usulan paripurna
494	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
495	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
496	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kelurahan Wurmialo. Kecamatan Kota Tengah. Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
497	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pertanahan	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik, Rencana Pembangunan Dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	kelurahan bulotadaa. kecamatan sipatana. kota gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
498	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan Limba B. Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rekomendasi : disesuaikan dengan anggaran yang ada dan terdaftar dalam DTKS serta ketentuan lainnya Koefisien : 5 5 Anggaran : 0	Usulan disetujui

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pertanahan	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	KELURAHAN DEMBE JAYA. KOTA UTARA. KOTA GORONTALO, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
500	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	kel. wumialo. kec. kota tengah. kota gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
501	09-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	KELURAHAN DONGGALA, KEC. HULOTHALANGI, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
502	06-04-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Kelurahan Donggala, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
503	06-04-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Perumahan Laguna 2. Kelurahan BULadu. kec. kota barat, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
504	06-04-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	JL. Yossudarso Ke. Tenda. Kec. HULonthalangi, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
505	15-04-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kel. Heledulaa Selatan, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
506	06-04-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Kelurahan Dembe Jaya, Kota Gorontalo, Kota Utara, Dembe Jaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk dalam usulan paripurna
507	06-04-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	jl. Thayeb M. Gobel. Kelurahan Molosifat U. Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, Sibatana. Molosifat U	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk dalam usulan paripurna

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
508	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalango, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Tenda	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan Tidak mencantumkan Nama Penerima dan Alamat yang Jelas
509	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Tenda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada data By Name By Address (BNBA) nya
510	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Kelurahan Tenda, Keca. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Tenda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
511	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kelurahan BUGIS, Kecamatan Dumbo Raya. Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Bugis	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
512	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Kota Timur, Ipilo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
513	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kelurahan Wonggaditi Timur, Kota Utara, Kota Gorontalo, Kota Utara, Wongkaditi Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan bahwa Kelurahan/Desa Wongkaditi Tmur tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah kota

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
514	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	KELURAHAN DEMBE JAYA, KECAMATAN KOTA UTARA, Kota Gorontalo, Kota Utara, Dembe Jaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Walikota Gorontalo yaitu: Kec. Kota Selatan (Kel. Limba U1) Kec. Dumbo Raya (kel. Leato Utara), Kec. Kota Barat (Kel. Buliide, Kel. Tenilo)
515	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	kelurahan Ipilo, Kecamatan KOTA Timur, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Kota Timur, Ipilo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Walikota Gorontalo yang menjadi kewenangan hanya 3 kecamatan yaitu kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kecamatan Kota Barat.
516	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penanggulangan Bencana/tanggap darurat	Kelurahan Buto, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Rekomendasi : ditolak dikarenakan diluar tupoksi dinas PUPR Koefisien : 500 500 Anggaran : 1000
517	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pertanahan	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	kelurahan siendeng. kec. hulonthalangi, kota gorontalo, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Siendeng	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Rekomendasi : di tolak karena merupakan Pekerjaan dari BWS. Penataan Ruang Koefisien : 5 5 Anggaran : 1000
518	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	kwlurahan biawu dan kelurahan donggala, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Biawu	Dinas Pertanian	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Pembangunan kandang ayam bukan merupakan kewenangan

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	JL. KH. ADAM ZAKARIA. KEL. DEMBE JAYA. KOTA UTARA, Kota Gorontalo, Kota Utara, Dembe Jaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017
520	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	JL. Dr. Sutomo, kelurahan Limba U I. KOta Selatan, KOta Gorontalo, Kota Selatan, Limba U I	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017
521	08-03-2022	H. Fikram AZ. Saijlama, S.IP	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Klaurahan Limba U I. Kec. Kota Selatan. kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U I	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A
522	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Bambulan, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
523	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Maleo, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
524	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Soginti, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
525	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Soginti, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
526	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pendidikan	Masalah PENGELOLAAN DANA BOS PENDIDIKAN MENENGAH - Manajemen, Tata kelola dana BOS pada satuan pendidikan menengah atas	Kel. Pentadu, Kab. Pohuwato	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
527	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Patuhu, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
528	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa Padengo, Kab. Pohuwato	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rekomendasi : disesuaikan dengan anggaran yang ada dan terdaftar dalam DTKS, serta ketentuan lainnya Koefisien : 5 KK Anggaran : 0	Usulan disetujui

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
529	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
530	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
531	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Duhiadaa, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 400000000	Usulan disetujui
532	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Duhiadaa, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
533	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Duhiadaa, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
534	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kel. Pentadu, Kab. Pohuwato	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Usulan 5 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 5 Unit Rumah Anggaran : 187500000	Usulan disetujui
535	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Duhiadaa, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
536	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kel. Siduan, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
537	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Popaya, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
538	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Bendung Iriqasi	Desa Duhidaa, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
539	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
540	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato	Biro Hukum	Rekomendasi : bisa di akomodir apabila pada kegiatan isbat nikah terhadap pasutri yang bermasalah, namun untuk pemberian hibah tidak dapat di akomodir karena tidak memiliki kewenangan Koefisien : 2 Orang Anggaran : 1000000	Usulan disetujui
541	30-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa yipilo, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542	30-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa manawa, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
543	16-04-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	desa telaga biru, Kab. Pohuwato			Validasi Mitra Bappeda
544	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Dengilo dan Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato, Paguat, Paguat, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Pohuwato
545	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kel. Pentadu, Kab. Pohuwato, Paguat, Pentadu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Bantuan Pembangunan Jamban dapat di usulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
546	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Telaga Biru, Kab. Pohuwato, Popayato Barat, Popayato Barat, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perhubungan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
547	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato, Paguat, Bumbulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi sesuai Draft SK Bupati Pohuwato yang menjadi kewenangan hanya 4 Kecamatan yaitu Kec. Duhiadaa, Kec. Paguat (Desa Pentadu) Kec. Taluditi, Kec. Popayato

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
548	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato, Paguat, Bumbulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tuisi atau kewenangan bidang SDA Dinas PUPR Provinsi.
549	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato, Paguat, Bumbulan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo
550	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato, Paguat, Bumbulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. POhuwato
551	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Soginti, Kab. Pohuwato, Paguat, Soginti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
552	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Desa Siduan, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. POhuwato
553	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Patuhu, Kab. Pohuwato, Randangan, Randangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
554	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Desa Patuhu, Kab. Pohuwato, Randangan, Patuhu	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
555	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Bumbulan, Kab. Pohuwato, Paguat, Bumbulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Pengadaan rumah nelayan dapat diusulkan pada, balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P)
556	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kel. Pentadu, Kab. Pohuwato, Paguat, Paguat, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak, bukan kewenangan Dinas PUPR Provinsi
557	10-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Libodu, Kab. Pohuwato, Patilanggio, Patilanggio, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
558	30-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	desa bumbulan, Kab. Pohuwato, Paguat, Bumbulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
559	30-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	desa bunuyo, Kab. Pohuwato, Paguat, Bunuyo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, PADA TAHUN 2023 TIDAK ADA LAGI PROGRAM BANTUAN KUBE
560	30-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	desa sipayo, Kab. Pohuwato, Paguat, Sipayo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, PADA TAHUN 2023 TIDAK ADA LAGI PROGRAM BANTUAN KUBE
561	30-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	desa bumbulan, Kab. Pohuwato, Paguat, Bumbulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562	30-03-2022	H. Ismail Alulu, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	desa yipilo, Kab. Pohuwato, Wanggarasi, Yipilo	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
563	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Tulabolo suwawa timur, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
564	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa bubeya - desa tinelo, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
565	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa bubeya, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
566	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
567	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
568	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
569	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
570	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
571	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
572	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
573	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
574	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	sekabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
575	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Aladi Kec. Bonepantai - Tulabolo Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
576	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pendidikan	Masalah REHABILITASI RUANG KELAS BARU - Rehabilitasi RKB pada satuan pendidikan menengah dan khusus	laut biru Kec. Bone Raya, Kab. Bone Bolango	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
577	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kab. bone bolango, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
578	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kabupaten Bone Bolango, Kab. Bone Bolango	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Usulan 100 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 100 Unit Rumah Anggaran : 3750000000	Usulan disetujui
579	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Kehutanan	Masalah Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	kab. bone bolango, Kab. Bone Bolango	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Stok Program
580	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	danau perintis desa holoduotamo menuju desa duano, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Huluduotamo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango
581	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa bondawuna, desa tulabolo, dan desa tulabolo barat, Kab. Bone Bolango, Suwawa Selatan, Bondawuna	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
582	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	desa tulabolo, Kab. Bone Bolango, Suwawa Timur, Tulabolo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
583	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa Pato"a, Kab. Bone Bolango, Bulawa, Patoa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
584	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	desa boludawa, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tuisi atau kewenangan bidang SDA
585	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
586	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
587	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	kecamatan kabila bone, kecamatan bonepantai, kecamatan bulawa, kecamatan bone raya dan kecamatan bone, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
588	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan menjadi kewenangan, perahu menjadi kewenangan kabupaten/kota sedangkan provinsi kewenangannya pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
589	12-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	se kabupaten bone bolango, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
590	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Aladi Kec. Bonepantai, Tulabolo Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango
591	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN RUANG LAB KOMPUTER - Pembangunan Lab pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Dumbayabulan Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, Suwawa Timur, Dumbaya Bulan	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui
592	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	desa alale kec. suwawa tengah, Kab. Bone Bolango, Suwawa Tengah, Alale	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak, bukan merupakan kewenangan PUPR Provinsi
593	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan di Air payau dan Air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan atau maffaatsn atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota - Benih	desa tingkohubu, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Tingkohubu	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Kegiatan yang sifatnya pemberdayaan budidaya ikan air tawar, bukan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi tetapi menjadi kewenangan kabupaten kota
594	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Kec. Kabila Bone, Kec. Bonepantai, Kec. Bulawa, Kec. Bone Raya, Kec. Bone, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
595	19-03-2022	H. Moh. Kris Wartabone, S.AP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dilaut - Benih	Kec. Bone, Kec. Boneraya, Kec. Bulawa, Kec. Bonepantai dan Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
596	09-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Lingkungan 5 Kelurahan Tenilo, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000	Usulan disetujui
597	09-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Lingkungan 5 Kelurahan Tenilo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
598	09-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Desa Tenggela Kecamatan Tilango, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
599	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Bunggalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
600	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Luwoo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
601	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Limehu, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
602	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Dulohupa, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
603	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Padengo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
604	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Luwoo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
605	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Bungalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (MASJID AL MULHIMMAH) Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
606	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Luwoo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (MASJID AL MUSYAWARAH) Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 mesjid Anggaran : 0	Usulan disetujui
607	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Bulota, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (MASJID AL MUBARAKAH) Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 Mesjid Anggaran : 0	Usulan disetujui
608	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Buhu, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (MASJID AL MU'INIINA), Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 Mesjid Anggaran : 0	Stok Program
609	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kelurahan Hepuhulawa, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (MASJID AL MUHAJIRIN), Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 mesjid Anggaran : 0	Usulan disetujui
610	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Tenilo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
611	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Pantungo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
612	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Lupoyo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
613	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Luwoo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
614	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa tenggela, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
615	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Mongolato, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
616	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Bulota, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
617	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Limehu, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
618	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Tuladenggi, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
619	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Lupoyo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
620	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Tenilo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
621	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Dumati, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
622	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Padengo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
623	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Tilote, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
624	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Dulohupa, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
625	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Pilohayanga, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
626	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Luhu, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
627	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Tinelo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
628	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
629	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
631	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Lingkungan 5 Kelurahan Tenilo, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
632	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Limehu, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
633	10-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
634	19-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
635	09-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Desa Tenggela, Kab. Gorontalo, Tilango, Tenggela	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
636	09-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Desa Luwoo, Kab. Gorontalo, Talaga Jaya, Luwoo	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
637	09-03-2022	H. Sofyan Puhi, ST	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Dulohupa, Kab. Gorontalo, Telaga, Dulohupa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo yang menjadi kewenangan untuk Kec. Telaga hanya Desa Bulila, Desa Luhu, Desa Dulamayo Barat

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
638	09-03-2022	H. Sofyan Puh, ST	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Mongolato, Kab. Gorontalo, Telaga, Mongolato	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo yang menjadi kewenangan untuk Kec. Telaga (Desa Bulila, Desa Luh, Desa Dulamavo Barat)
639	10-03-2022	H. Sofyan Puh, ST	Pariwisata	Masalah Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Desa Dumati, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Dumati	Dinas Pariwisata	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
640	14-03-2022	H. Sofyan Puh, ST	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa buloila, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Buloila	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
641	04-04-2022	Hamid Kuna	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Hutadaa, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
642	12-03-2022	Hamid Kuna	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Hutadaa, Kab. Gorontalo, Talaga Jaya, Hutadaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Stategis Provinsi
643	12-03-2022	Hamid Kuna	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Bunggalo, Kab. Gorontalo, Talaga Jaya, Bunggalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.BINA MARGA

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
644	12-03-2022	Hamid Kuna	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Pentadio, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Pentadio Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.BINA MARGA
645	12-03-2022	Hamid Kuna	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SERBA GUNA/AULA - Pembangunan Aula pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Desa Mongolato, Kab. Gorontalo, Telaga, Mongolato	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui
646	09-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Yosonegoro, Kab. Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
647	10-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	kabupaten gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
648	10-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	kabupaten gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
649	10-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	kecamatan batudaa, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
650	10-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	kec. telaga, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
651	10-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	kec. limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
652	10-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	kab. gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
653	09-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Daena, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) kawasan Strategis Provinsi
654	10-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	kab. gorontalo, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak karena bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655	10-03-2022	Hi. Fadli Hasan, ST, M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	dusun 4, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Daenaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi dan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
656	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan kumuh Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Sudah masuk dalam baseline anggaran 2023 Koefisien : 15 Unit Rumah Anggaran : 562500000	Usulan disetujui
657	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Sekabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
658	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Se kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
659	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
660	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (Siti L. Khansa Kadir, Mohamad S. Pakaya, Nadya N. A. Jusuf, Siti K. N. Aini Jusuf, Sintia P. Ilohuna, Mertawati Abdullah, Alan D. Rahman, Falensia Rahman, Milfandia Hasan, Sri Meylani Bobihu, Reski Lapasi) Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 11 Mahasiswa S1 Anggaran : 0	Usulan disetujui
661	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	se kabupaten gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (Hendros Hamzah) Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 Mahasiswa S2 Anggaran : 0	Usulan disetujui

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Se kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
663	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Se kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Haq, masjid Ar-rahim, Masjid alfatah, Masjid Al Kautsar) Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 5 Masjid Anggaran : 0	Usulan disetujui
664	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
665	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kecamatan limboto barat, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
666	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga biru, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
667	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	kelurahan kayubulan kecamatan limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
668	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
669	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	kelurahan polohungo kecamatan limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
670	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Dumati kecamatan telaga biru, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
671	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga biru, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
672	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
673	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa luhu kecamatan Telaga, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
674	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa mongolato kecamatan telaga, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
675	10-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
676	10-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
677	19-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pangan	Masalah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelurahan Hutuo, Kab. Gorontalo	Dinas Pangan		Stok Program
678	19-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pangan	Masalah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Majelis Taklim Al Muahidin, Kelurahan Hutuo, Kab. Gorontalo	Dinas Pangan		Stok Program
679	14-04-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
680	14-04-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
681	16-04-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	Desa Upomela, Kecamatan Bongomeme, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
682	16-04-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	Dusun III, Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
683	16-04-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	Kelurahan Hepuhulawa, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
684	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Dusun 2 Desa Dumati, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Dumati	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
685	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Kecamatan Bilhu, Kab. Gorontalo, Biluhu, Biluhu, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
687	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Kecamatan Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo, Batudaa Pantai, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
688	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	Kecamatan Bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Bongomeme, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
689	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	kecamatan bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Bongomeme, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
690	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	kecamatan bongomeme, Kab. Gorontalo, Tolangohula, Tolangohula, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
691	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	kecamatan bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Bongomeme, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi dan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Molanihu kecamatan bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Bongomeme, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
693	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Desa molanihu, kecamatan bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Molanihu	Dinas Pariwisata	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
694	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Desa molanihu kecamatan bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Molanihu	Dinas Pariwisata	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
695	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa molanihu, kecamatan bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Molanihu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
696	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Molanihu kecamatan bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Molanihu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
697	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	kelurahan bolihuangga kecamatan kecamatan limboto, Kab. Gorontalo, Limboto, Limboto, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
698	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kelurahan kayubulan kecamatan limboto, Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
699	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan
700	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan kewenangan dinas sosial p3a provinsi gorntalo
701	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa mongolato kecamatan telaga, Kab. Gorontalo, Telaga, Mongolato	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo Ditolak, yang menjadi kewenangan untuk Kecamatan Telaga (Desa Bulila, Desa Luhu, Desa Dulamayo Barat)
702	09-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kelurahan Tilihuwa kecamatan telaga biru, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Telaga Biru, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
703	10-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Desa molanihu, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Molanihu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo, dan Tidak masuk juga pada KSP

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
704	10-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Desa Haya Haya, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Haya-Haya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Bantuan pembangunan sumur bor bukan menjadi kewenangan OPD PRKP, usulan dapat diteruskan ke OPD ESDM
705	11-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun 1 Batanga Desa Upomela, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Upomela	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
706	11-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Biluhu Tengah - Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Bongomeme, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
707	16-04-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masalah Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Kelurahan Huide, Kecamatan Limboto Barat, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Huidu	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bantuan sumur bor sudah bukan kewenangan, pada urusan kegeologian
708	19-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
709	30-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	Desa Upomela Kecamatan Bongomeme, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Upomela	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
710	30-03-2022	Hj. Espin Tulie, SE., M.Si	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Tuladenggi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
711	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Sukma, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
712	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Timbuolo Tengah, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Usulan disetujui

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
713	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Timbuolo Timur, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
714	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Panggulo Barat, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
715	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kelurahan Tumbihe, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
716	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Huluduotamo, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
717	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Huluduotamo, Kab. Bone Bolango	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
718	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Huluduotamo, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
719	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa Huluduotamo, Kab. Bone Bolango	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rekomendasi : disesuaikan dengan anggaran yang ada dan terdaftar dalam DTKS serta ketentuan yang berlaku lainnya Koefisien : 10 KK Anggaran : 0	Usulan disetujui
720	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Moutong, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
721	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Desa Moutong, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
722	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Moutong, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
723	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Iloheluma, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
724	10-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kel. Padengo, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
725	10-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Desa Buludawa, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
726	10-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Desa Tapadaa, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
727	10-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kel. Pauwo, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
728	10-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Desa Bilungala, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
729	11-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Desa Bolantala, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
730	11-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Desa Bondaraya, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
731	14-04-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Popodu, Kab. Bone Bolango			Validasi Mitra Bappeda
732	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penggantian Jembatan	Desa Tapadaa, Kab. Bone Bolango, Suwawa Tengah, Tapadaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
733	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Luwohu, Kab. Bone Bolango, Botupingge, Luwohu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Bone Bolango
734	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Panggulo Barat, Kab. Bone Bolango, Botupingge, Panggula Barat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan pengadaaan rumah melalui program BSPS dapat diusulkan pada balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P)
735	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Desa Panggulo, Kab. Bone Bolango, Botupingge, Panggulo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan embangunan IPAL dapat diusulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
736	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kelurahan Tumbihe, Kab. Bone Bolango, Kabila, Tumbihe	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan embangunan IPAL dapat diusulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
737	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Huluduotamo, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Huluduotamo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Ditolak, Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Bone Bolango yang menjadi kewenangan hanya 2 kecamatan yaitu: Kec. Kabila (Kel. Pauwo dan Kel. Padengo) Kec. Suwawa (kel. Bube)

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
738	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Moutong, Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
739	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Moutong, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
740	09-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Huluduotamo, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Huluduotamo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
741	10-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Poowo, Kab. Bone Bolango, Kabila, Pauwo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak, karena masuk KSP KUMUH
742	10-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Tapadaa, Kab. Bone Bolango, Suwawa Tengah, Tapadaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
743	10-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Tunggulo Selatan, Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Tunggulo Selatan	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ada dalam paripurna
744	11-03-2022	Hj. Lolly Yunus	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Tingkohubu Timur, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Tingkohubu Timur	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ada dalam paripurna
745	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Taula"a, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
746	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Taula"a, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
747	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Taula"a, dan Desa Juriya, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
748	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Iloheluma, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
749	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Iloheluma, kecamatan boliyohuto kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
750	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa payu, Kecamatan mootilango, Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
751	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Mohiyolo, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
752	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Pasri putih, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
753	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Semua wilayah Kabupaten gorontalo B, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (Muhammad Sabrina k. G. Suka, Moh. Riza Pahlevi Iyabu, Ilham Jafar , Muhammad Nur Rifaldi Rachman, Alvita Habibie, Mohamad Rega Vael Walangadi, Muchliza Bintang Aulia Agus) Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 7 Mahasiswa S1 Anggaran : 0	Usulan disetujui
754	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Juriya, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
755	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Juriya & Desa Taula"a, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
756	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa Taula"a, Kab. Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rekomendasi : disesuaikan dengan anggaran yang ada dan terdaftar dalam DTKS serta ketentuan lainnya Koefisien : 12 KK Anggaran : 0	Usulan disetujui
757	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Harapan, Desa payu, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Pulubala, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 855000000	Usulan disetujui
759	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Tridharma, Kab. Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
760	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
761	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Juriya, Taula", Suka damai, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
762	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Iloheluma, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
763	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DUSUN 2 DESA MOTODUTO, DESA SIDOMULYO SELATAN, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
764	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DUSUN MOHUHULO DESA TRIDHARMA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
765	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Payu, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
766	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Molohu, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
767	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Se Kabupaten Gorontalo Wilayah Dapil IV, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
768	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Se Kab. Gorontalo Wilayah DAPIL IV/ Gorontalo B, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
769	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Se Kab. Gorontalo Wilayah Dapil IV / Gorontalo B, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
770	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Payu, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
771	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Sidomulyo, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Margomulyo, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
773	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Molohu, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
774	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Margomulyo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
775	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Se Kabupaten Gorontalo Wilayah Dapil IV / Gorontalo B, Kab. Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
776	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Iloheluma, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
777	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Taula" a, Kab. Gorontalo, Bilato, Taula'a	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
778	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Motodutu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo, Bilato, Bilato, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
779	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun mohuhulo, Kab. Gorontalo, Pulubala, Tridharma	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
780	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Banggai, Kab. Gorontalo, Mootilango, Sidomukti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
781	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Uwabanga, Kab. Gorontalo, Mootilango, Talumopatu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Tridarma, Kab. Gorontalo, Pulubala, Tridharma	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo yang menjadi kewenangan hanya 2 Kecamatan yaitu: Kecamatan Limboto dan Kec. Telaga
783	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Dulohupa, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Dulohupa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi dan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
784	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Desa Taula"a, Kab. Gorontalo, Bilato, Taula'a	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
785	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Desa Juriya, Kab. Gorontalo, Bilato, Juriya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
786	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Desa Suka Damai, Kab. Gorontalo, Bilato, Suka Damai	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Desa Taula"a, Kab. Gorontalo, Bilato, Taula'a	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
788	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Juriya, Kab. Gorontalo, Bilato, Juriya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupate Gorontalo
789	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Ilomata, Kab. Gorontalo, Bilato, Ilomata	Dinas Perhubungan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk Kawasan Startegis Provinsi
790	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Suka Damai, Kab. Gorontalo, Bilato, Suka Damai	Dinas Perhubungan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk Kawasan Startegis Provinsi
791	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA JURIA, TAULAA, SUKA DAMAI , PELEHU, MOTODUTO, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo yang menjadi kewenangan hanya 2 Kecamatan yaitu: Kecamatan Limboto (Desa Polohungo), Kec. Telaga (Desa Bulila, Desa Luhu, Desa Dulamayo Barat)

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA ILOHELUMA, SIDOMULYO INDUK, SIDOMULYO SELATAN, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Boliyohuto, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo, dan untuk BSPS dapat diusulkan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P)
793	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA SIDO MUKTI, Kab. Gorontalo, Mootilango, Mootilango, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo, untuk BSPS dapat diusulkan melalui Balai pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P)
794	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA MOHIYOLO, DESA OLIMOHULO, Kab. Gorontalo, Asparaga, Asparaga, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo, untuk BSPS dapat diusulkan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P)

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	10-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Payu, Kab. Gorontalo, Mootilango, Payu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun perbaikan drainase saluran bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA+S80
796	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Ilomata, Kab. Gorontalo, Tibawa, Ilomata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
797	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Desa Margomulya, Kab. Gorontalo, Tolangohula, Margomulya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
798	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Desa Diloniyohu, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Diloniyohu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
799	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Margomulyo, Kab. Gorontalo, Tolangohula, Margomulya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupate Gorontalo
800	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Diloniyohu, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Diloniyohu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupate Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Sidulmulyo, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Sidomulyo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo yang menjadi kewenangan hanya 2 Kecamatan yaitu: Kecamatan Limboto dan Kec. Telana
802	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun Aleni, Desas Diloniyohu, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Diloniyohu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo yang menjadi kewenangan hanya 2 Kecamatan yaitu: Kecamatan Limboto dan Kec. Telana
803	11-03-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Margomulyo & Desa Molohu, Kab. Gorontalo, Tolangohula, Tolangohula, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo
804	14-04-2022	Hj. Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masalah Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	se Kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bantuan sumur bor sudah bukan kewenangan, pada urusan kegeologian
805	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	DESA PATOAMEME, DESA TUTULO DAN DESA POTANGA, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
806	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	DESA TAPADAA DAN DESA RUMBIA, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
807	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	KABUPATEN BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Perhubungan		Stok Program
808	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	SE- KABUPATEN BOALEMO, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
809	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KABUPATEN POHUWATO, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
810	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA TANJUNG HARAPAN. KEC. WONOSARI, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
811	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pertanian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	DESA BANUROJA, KEC. RANDANGAN, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
812	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Kesehatan	Masalah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	DESA BANUROJA, KEC. RANDANGAN, Kab. Pohuwato	Dinas Kesehatan		Stok Program
813	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Desa Sarimurni Kec. Randangan, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
814	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Sarimurni Kec. Randangan, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
815	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pertanian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Desa Raharja Kec. Wonosari, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
816	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA TRI RUKUN. KEC. WONOSARI, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 PURA Anggaran : 0	Usulan disetujui
817	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DESA TRI RUKUN. KEC. WONOSARI, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
818	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	DESA BANUROJA. KEC. RANDANGAN, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
819	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	KAEB. BOALEMO DAN KAB. POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
820	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DESA BONGO 3 KEC. WONOSARI, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
821	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA BONGO 3. KEC. WONOSARI, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
822	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA SARITANI, KEC. WONOSARI, KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
823	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KEC. PAGUYAMAN DAN WONOSARI, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
824	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KAB. BOALEMO DAN POHUWATO, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
825	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KAB. BOALEMO PUHUWATO, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
826	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	SE KABUPATEN BOALEMO, Kab. Boalemo, Wonosari, Wonosari, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Dengan pertimbangan usulan pembuatan Jamban dapat di usulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
827	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	SE KEC. DULUPI. KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo, Dulupi, Dulupi, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan usulan tidak masuk pada KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
828	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA BANUROJA, KEC. RANDANGAN, Kab. Pohuwato, Randangan, Banuroja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
829	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah Domestik	DESA RAHARJA. KEC. WONOSARI, Kab. Boalemo, Wonosari, Raharja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan bukan kewenangan provinsi. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
830	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KAB. BOALEMO DAB KAB. POHUWATO, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
831	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	DESA SARITANI, KEC. WONOSARI, KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
832	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Bongo 3 Wonosari, Peradan, Kab. Boalemo, Wonosari, Bongo III	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
833	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	DESA HARAPAN KEC. WONOSARI, Kab. Boalemo, Wonosari, Harapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tuisi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
834	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA SARI TANI. KEC. WONOSARI, Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
835	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	DESA SARITANI, KEC. WONOSARI, KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi. SDA
836	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jembatan	DESA SARITANI, KEC. WONOSARI, KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk Kawasan Strategis Provinsi
837	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA SARI TANI, KEC. WONOSARI, Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Boalemo.
838	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KAB. BOALEMO DAN KAB. POHUWATO, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
839	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	KAB. BOALEMO DAN KAB. POHUWATO, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
840	15-03-2022	I Wayan Sudiarta, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	KEB. BAOLEMO POHUWATO, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
841	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	KEC. PONELO KEPULAUAN. KABUPATEN GORONTALO UTARA, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
842	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA CEMPAKA PUTIH, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000	Usulan disetujui
843	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Cempaka Putih Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
844	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
845	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Moluo Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
846	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
847	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
848	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
849	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Papualangi Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
850	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kecamatan Biluhu, Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
851	14-04-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Moluo, Kec Kwandang, Kab. Gorontalo Utara			Validasi Mitra Bappeda
852	14-04-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan SPAM lintas Kab/Kota	Desa Botungobungo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara			Validasi Mitra Bappeda
853	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA BULALO, KEC. KWANDANG, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Bulalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak, termasuk KAWASAN KUMUH
854	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	AIR TERJUN DESA PAPUALANGI KECAMATAN TOLINGGULA, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Papualangi	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
855	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pariwisata	Masalah Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	KECAMATAN PONELO KEPULAUAN, Kab. Gorontalo Utara, Ponelo Kepulauan, Ponelo Kepulauan, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
856	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	KECAMATAN PONELO KEPULAUAN, Kab. Gorontalo Utara, Ponelo Kepulauan, Ponelo Kepulauan, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
857	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	KECAMATAN PONELO KEPULAUAN, Kab. Gorontalo Utara, Ponelo Kepulauan, Ponelo Kepulauan, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
858	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pariwisata	Masalah Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	PULAU MOHINGGITO, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Kwandang, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
859	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	KECAMATAN PONELO KEPULAUAN, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Kwandang, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
860	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	DESA MALAMBE KECAMATAN PONELO KEPULAUAN, Kab. Gorontalo Utara, Ponelo Kepulauan, Malambe	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
861	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	KABUPATEN GORONTALO UTARA, Kab. Gorontalo Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
862	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	KABUPATEN GORONTALO UTARA, Kab. Gorontalo Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
863	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dilaut - Benih	DESA BULALO, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Bulalo	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
864	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	DESA BULALO. KEC. KWANDANG, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Bulalo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
865	12-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	DESA BULADU. KEC. SUMALATA TIMUR, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Buladu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
866	14-04-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dilaut - Benih	Desa Bulalu, kec. kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Bulalo	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
867	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Bulalo Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Bulalo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
868	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
869	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Kwandang, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
870	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dilaut - Benih	Desa Bubalo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Bulalo	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
871	19-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Desa Bulontio Timur. Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
872	28-03-2022	Idrus M.T Mopili, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dilaut - Benih	Desa Bulalo Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Bulalo	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
873	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa bulontio barat, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
874	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
875	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa mebongo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
876	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa bulontio barat dan bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
877	11-03-2022	Indri Monoarfa	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
878	11-03-2022	Indri Monoarfa	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	desa mebongo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
879	11-03-2022	Indri Monoarfa	Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	kecamatan sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan		Stok Program
880	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pangan	Masalah Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	desa bulontio barat, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pangan		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
881	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	desa topi, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
882	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	desa topi, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
883	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa putiana, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
884	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Limbato, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
885	11-03-2022	Indri Monoarfa	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Desa Limbato, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
886	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
887	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa deme I, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
888	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa deme I, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
889	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa windu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
890	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa windu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
891	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa topi, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
892	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa limbato, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
893	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
894	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
895	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	desa didinga, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
896	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa omuto, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
897	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa mebongo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
898	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa dulukapa, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
899	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa dulukapa, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
900	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa buluwatu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
901	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
902	12-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa kasia, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
903	12-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa kasia, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
904	12-03-2022	Indri Monoarfa	Kesehatan	Masalah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	desa kasia, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan		Stok Program
905	12-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa puncak mandiri, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
906	12-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa topi, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
907	12-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	dusun tengah, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
908	12-03-2022	Indri Monoarfa	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa mebongo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
909	16-04-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	desa monano, Kab. Gorontalo Utara			Validasi Mitra Bappeda
910	16-04-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara			Validasi Mitra Bappeda

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
911	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa pulohenti, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Pulohenti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
912	11-03-2022	Indri Monoarfa	Sekretariat Daerah	Masalah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - PENGADAAN MOBIL AMBULANCE	desa bulontio barat, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Barat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo
913	11-03-2022	Indri Monoarfa	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	kec. sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Sumalata, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
914	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	desa monano, Kab. Gorontalo Utara, Monano, Monano	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
915	11-03-2022	Indri Monoarfa	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	kecamatan sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Sumalata, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Bukan lagi Kewenangan Provinsi, disarankan dibiayai lewat Dana Desa
916	11-03-2022	Indri Monoarfa	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa bulontio barat, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Barat	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
917	11-03-2022	Indri Monoarfa	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa topi, Kab. Gorontalo Utara, Biau, Topi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, dengan pertimbangan bahwa Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Gorut yang menjadi kewenangan hanya 2 kecamatan yaitu: Kec. Kwandang, Kec. Anggrek
918	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	desa topi, Kab. Gorontalo Utara, Biau, Topi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tuisi atau kewenangan bidang SDA
919	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontiyo Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak, bukan kewenangan Dinas PUPR Provinsi
920	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	desa omuto, Kab. Gorontalo Utara, Biau, Omuto	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak bukan Kewenangan PUPR Provinsi Gorontalo
921	11-03-2022	Indri Monoarfa	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan di Air payau dan Air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan atau maffaatn atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota - Benih	desa omuto, Kab. Gorontalo Utara, Biau, Omuto	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
922	11-03-2022	Indri Monoarfa	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa buluwatu, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Buluwatu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Kecamatan dan Desa yang diusulkan Tidak Masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo Utara
923	11-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	desa buluwatu, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Buluwatu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) kawasan Stratgis Provinsi
924	12-03-2022	Indri Monoarfa	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	desa monano, Kab. Gorontalo Utara, Monano, Monano	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
925	12-03-2022	Indri Monoarfa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	desa puncak mandiri, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Puncak Mandiri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
926	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa bulontio barat, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
927	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
928	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa mebongo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
929	11-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa bulontio barat dan bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
930	11-03-2022	Indriani Dunda	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
931	11-03-2022	Indriani Dunda	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	desa mebongo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
932	11-03-2022	Indriani Dunda	Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	kecamatan sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan		Stok Program
933	11-03-2022	Indriani Dunda	Pangan	Masalah Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	desa bulontio barat, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pangan		Stok Program
934	11-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	desa topi, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
935	11-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	desa topi, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
936	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa putiana, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
937	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Limbato, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
938	11-03-2022	Indriani Dunda	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Desa Limbato, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
939	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
940	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa deme I, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
941	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa deme I, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
942	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa windu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
943	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa windu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
944	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa topi, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
945	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa limbato, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
946	11-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
947	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
948	11-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	desa didinga, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
949	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa omuto, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
950	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa mebongo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
951	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa dulukapa, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
952	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa dulukapa, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
953	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa buluwatu, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
954	11-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	desa monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
955	12-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa kasia, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
956	12-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa kasia, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
957	12-03-2022	Indriani Dunda	Kesehatan	Masalah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	desa kasia, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan		Stok Program
958	12-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa puncak mandiri, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
959	12-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa topi, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
960	12-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	dusun tengah, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
961	12-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa mebongo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
962	16-04-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	desa monano, Kab. Gorontalo Utara			Validasi Mitra Bappeda

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
963	16-04-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara			Validasi Mitra Bappeda
964	08-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	jl. anoa, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
965	08-03-2022	Indriani Dunda	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	KEL. LEKOBALO, Kota Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
966	08-03-2022	Indriani Dunda	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	KEL. BUGIS, Kota Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
967	08-03-2022	Indriani Dunda	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KEL. BIAWU, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
968	09-03-2022	Indriani Dunda	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KELURAHAN DEMBE JAYA, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Dapat diakomodir dengan catatan : 1. Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan juknis;; 2. Lolos tahapan verifikasi; 3. Jika Merupakan Penerima Hibah Bansos di Tahun 2022 maka akan dipertimbangkan melalui Verifikasi Lapangan. Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
969	09-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	kel. pilolodaa, Kota Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
970	09-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	kel. bugis, Kota Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
971	09-03-2022	Indriani Dunda	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	kel. siendeng, Kota Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
972	09-03-2022	Indriani Dunda	Komunikasi dan Informatika	Masalah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas - Layanan kelompok informasi masyarakat belum optimal	kel. dembe 2, Kota Gorontalo	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
973	09-03-2022	Indriani Dunda	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Layanan Desa/Kelurahan Digital belum optimal	kel. leato utara, Kota Gorontalo	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		Stok Program
974	09-03-2022	Indriani Dunda	Kesehatan	Masalah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	kel. leato utara, Kota Gorontalo	Dinas Kesehatan		Stok Program
975	09-03-2022	Indriani Dunda	Tenaga Kerja	Masalah Perluasan Kesempatan Kerja	KELURAHAN LEATO UTARA, Kota Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
976	09-03-2022	Indriani Dunda	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	KEL.LEATO SELATAN, Kota Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
977	09-03-2022	Indriani Dunda	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	KEL. SIENDENG, Kota Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
978	09-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	KELURAHAN LEATO SELATAN, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
979	09-03-2022	Indriani Dunda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	KELURAHAN TENILO, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
980	09-03-2022	Indriani Dunda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	kelurahan buladu, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
981	09-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	JL. G SEMERU, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
982	09-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	KEL. POHE, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
983	09-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	KEL. BUGIS, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
984	09-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	KEL. BIAWU, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
985	10-03-2022	Indriani Dunda	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	kota gorontalo, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
986	31-03-2022	Indriani Dunda	Pangan	Masalah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	SIENDENG, Kota Gorontalo	Dinas Pangan		Stok Program
987	31-03-2022	Indriani Dunda	Pangan	Masalah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DULOMO SELATAN, Kota Gorontalo	Dinas Pangan		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
988	16-04-2022	Indriani Dunda	Pangan	Masalah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jl. siendeng, Kota Gorontalo	Dinas Pangan		Stok Program
989	16-04-2022	Indriani Dunda	Pangan	Masalah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	kel. dulomo selatan, Kota Gorontalo	Dinas Pangan		Stok Program
990	08-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	jl. bandeng, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Bugis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena walaupun merupakan kewenangan kawasan strategis provinsi namun status jalan merupakan kewenangan Dinas PU Kota Gorontalo sehingga bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya
991	08-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	jl. jalaludin tantu, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Bugis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena walaupun merupakan kewenangan kawasan strategis provinsi namun status jalan merupakan kewenangan Dinas PU Kota Gorontalo sehingga bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUJPR Provinsi
992	08-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	jl. jend. pol. anto, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Bugis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena walaupun merupakan kewenangan kawasan strategis provinsi namun status jalan merupakan kewenangan Dinas PU Kota Gorontalo sehingga bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUJPR Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
993	08-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	jl. pangi, Kota Gorontalo, Kota Barat, Buliide	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena walaupun merupakan kewenangan kawasan strategis provinsi namun status jalan merupakan kewenangan Dinas PU Kota Gorontalo sehingga bukan merupakan tuisi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUIPR Provinsi
994	08-03-2022	Indriani Dunda	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	kel. pilolodaa, Kota Gorontalo, Kota Barat, Pilolodaa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial
995	08-03-2022	Indriani Dunda	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	KELURAHAN LEATO SELATAN, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
996	08-03-2022	Indriani Dunda	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	JALAN BANTENG, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Siendeng	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
997	08-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	KEL. LEATO SELATAN, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Selatan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
998	08-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KELURAHAN BUGIS, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Bugis	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
999	08-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KELURAHAN LIBUO, Kota Gorontalo, Duingi, Libuo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1000	08-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KEL.PILOLODAA, Kota Gorontalo, Kota Barat, Pilolodaa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1001	08-03-2022	Indriani Dunda	Kepemudaan dan Olahraga	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula - Pelatihan dan fasilitasi	KELURAHAN DONGGALA, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Donggala	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui
1002	08-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KEL.LIMBA UII, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1003	09-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	KELURAHAN DEMBE JAYA, Kota Gorontalo, Kota Utara, Dembe Jaya	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1004	09-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	kelurahan wongkaditi timur, Kota Gorontalo, Kota Utara, Wongkaditi Timur	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1005	09-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	kelurahan dulomo selatan, Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1006	09-03-2022	Indriani Dunda	Kesehatan	Masalah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	kel. leato utara, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Utara	Dinas Kesehatan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Permasalahan : FASILITASI BPJS KETENAGAKERJAAN SUBSIDI

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1007	09-03-2022	Indriani Dunda	Kepemudaan dan Olahraga	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula - Pelatihan dan fasilitasi	KELURAHAN LEATO UTARA, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Utara	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, nama dan jenis pelatihan harus di cantumkan
1008	09-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KELURAHAN HUANGOBOTU, Kota Gorontalo, Duingingi, Huangobotu	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan bentuk bantuan dengan jelas
1009	09-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	kelurahan huangobotu, Kota Gorontalo, Duingingi, Huangobotu	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan bentuk bantuan dengan jelas
1010	09-03-2022	Indriani Dunda	Kepemudaan dan Olahraga	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula - Pelatihan dan fasilitasi	KELURAHAN DEMBE 1, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1011	09-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	KEL.DEMBE 1, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1012	09-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	KEL.WONGKADITI TIMUR, Kota Gorontalo, Kota Utara, Wongkaditi Timur	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1013	09-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KEL.POHE, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Pohe	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014	09-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	JL. LUMBA LUMBA, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Bugis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena status jalan merupakan kewenangan DIInas PU Kota Gorontalo sehingga bukan menjadi tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUJPR Provinsi
1015	09-03-2022	Indriani Dunda	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	KELURAHAN LEATO SELATAN, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
1016	09-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	JL. RINJANI, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Siendeng	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017
1017	09-03-2022	Indriani Dunda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	JL. BANTENG, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Hulonthalangi, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017
1018	09-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KEL. TOMOLOBUTAO, Kota Gorontalo, Duingingi, Tomulabutao	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1019	10-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	kota gorontalo, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1020	10-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	kota gorontalo, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1021	10-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	kota gorontalo, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1022	10-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	kota gorontalo, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1023	16-04-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	kel. leato selatan, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Selatan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1024	16-04-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	kel. dembe 1, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1025	16-04-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	kel. siendeng, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Siendeng	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1026	16-04-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	kel. wongkaditi barat, Kota Gorontalo, Kota Utara, Wongkaditi Barat	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1027	31-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KEL. LEATO SELATAN, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Selatan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1028	31-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KEL. DEMBE 1, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1029	31-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	KEL. SIENDENG, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Siendeng	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1030	31-03-2022	Indriani Dunda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	KEL. WONGKADITI BARAT, Kota Gorontalo, Kota Utara, Wongkaditi Barat	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1031	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DUSUN MOLAMBI, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1032	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1033	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1034	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1035	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1036	09-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1037	09-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1038	09-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1039	09-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dusun II, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1040	10-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	tabongo barat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1041	10-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Barakati, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1042	10-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Bua, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1043	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Alamat, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1044	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	USULAN BEASISWA S 2, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1045	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	ALAMAT, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1046	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1047	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1048	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1049	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1050	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
1051	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1052	19-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pangan	Masalah Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pangan		Stok Program
1053	19-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1054	12-04-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jln. Wadipalapa, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1055	16-04-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Alamat, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1056	16-04-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Alamat Batudaa, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1057	16-04-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1058	16-04-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1059	16-04-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1060	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DUSUN, Kab. Gorontalo, Batudaa, Barakati	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan & Desa yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1061	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun, Kab. Gorontalo, Batudaa, Bua	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan & Desa yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Gorontalo
1062	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DUSUN, Kab. Gorontalo, Batudaa, Huntu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan & Desa yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Gorontalo
1063	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DUSUN, Kab. Gorontalo, Batudaa, Iluta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan & Desa yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Gorontalo
1064	08-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	jalan barakati Biluhu Timur, Kab. Gorontalo, Batudaa, Barakati	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, '- Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017
1065	09-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Dusun, Kab. Gorontalo, Batudaa Pantai, Lamu	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1066	09-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun, Kab. Gorontalo, Batudaa, Iluta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo
1067	09-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun, Kab. Gorontalo, Batudaa, Barakati	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo
1068	09-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun, Kab. Gorontalo, Batudaa, Bua	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo
1069	10-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Alamat, Kab. Gorontalo, Biluhu, Biluhu Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan lokasi tidak masuk pada lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
1070	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Alamat, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1071	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo, Batudaa, Iluta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo
1072	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan di Laut - Benih	Alamat, Kab. Gorontalo, Batudaa Pantai, Lamu	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
1073	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Alamat, Kab. Gorontalo, Biluhu, Biluhu Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan lokasi tidak masuk pada lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
1074	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Molopatodu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Msuk (KSP) Kawasan strategis Provinsi
1075	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Alamat, Kab. Gorontalo, Tabongo, Tabongo Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk pada lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
1076	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo, Limboto, Limboto, Seluruh Kelurahan/Desa		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, usulan ada yang sama
1077	11-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dilaut - Benih	Alamat, Kab. Gorontalo, Batudaa, Iluta	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Kegiatan yang sifatnya pemberdayaan budidaya ikan air tawar, bukan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi tetapi menjadi kewenangana kabupaten kota

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1078	12-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Gorontalo, Tabongo Barat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1079	12-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Alamat, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1080	12-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Alamat, Kab. Gorontalo, Batudaa, Batudaa, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk pada lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
1081	12-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Alamat, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Lokasi Usulan (nama Desa/Kelurahan) Tidak ada
1082	12-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Alamat, Kab. Gorontalo, Tilango, Lauwunu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang diusulkan Tidak Masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Gtlo
1083	19-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Jln. A.A. Wahab, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Pantungo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1084	19-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo, Telaga, Bulila	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1085	19-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Yosonegoro	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1086	19-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo, Telaga, Telaga, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Dengan pertimbangan bahwa lokasi seluruh Kelurahan/Desa tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
1087	19-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan di Air payau dan Air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan atau maffaatn atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota - Benih	Alamat, Kab. Gorontalo, Tilango, Lauwunu	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Kegiatan yang sifatnya pemberdayaan budidaya ikan air tawar, bukan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi tetapi menjadi kewenangana kabupaten kota
1088	19-03-2022	Ir. H. Awaludin Pauweni	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jln Wadipalapa, Kab. Gorontalo, Tilango, Lauwunu	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1089	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa molombulahe, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1090	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	desa molombulahe, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1091	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	dusun 1, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1092	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	dusun 3, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1093	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	duisun 3, Kab. Boalemo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1094	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa mutiara, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1095	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	desa salilama, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1096	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	dusub taitangi, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1097	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	desa mustika, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1098	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa mustika, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1099	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	desa wonggahu, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1100	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	desa wonggahu, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1101	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa wonggahu, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1102	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	dusun 4, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1103	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	dusun 1, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1104	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	desa mekar jaya, Kab. Boalemo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1105	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa sosial, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1106	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	dusun 1, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1107	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	desa bangga, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1108	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	desa limbatihu, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1109	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU - Pembangunan RKB pada satuan pendidikan menengah dan khusus	desa limbatihu, Kab. Boalemo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
1110	16-04-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/kota	dusun 1, Kab. Boalemo			Validasi Mitra Bappeda

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	dusun 1, Kab. Boalemo, Paguyaman, Tenilo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo
1112	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	dusun 3, Kab. Pohuwato, Paguat, Maleo	Dinas Perhubungan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
1113	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	dusun 2, Kab. Boalemo, Mananggu, Salilama	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak bukan Kewenangan PUPR Provinsi Gorontalo
1114	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	dusun taitangi, Kab. Boalemo, Paguyaman, Tangkobu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Boalemo
1115	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa mustika, Kab. Boalemo, Mustika	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai Sk Bupati Boalemo.
1116	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa kuala lumpur, Kab. Boalemo, Paguyaman, Kuala Lumpur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1117	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa bongo tua, Kab. Boalemo, Paguyaman, Bongo Tua	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab.Boalemo, untuk Kec. Paguyaman (Diloato 1 & 2, Tangkobu 1 & 2, Bongo Nol 1, Sumber Jaya 2, Huwongo 2, Hulawa)

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1118	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa saripi, Kab. Boalemo, Paguyaman, Saripi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang di usulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab.Boalemo, untuk Kec. Paguyaman (Diloato 1 & 2, Tangkobu 1 & 2, Bongo Nol 1, Sumber Jaya 2, Huwongo 2, Hulawa)
1119	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa huwongo, Kab. Boalemo, Paguyaman, Huwongo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Boalemo
1120	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	desa batu kramat, Kab. Boalemo, Paguyaman, Batu Kramat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1121	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	dusun linggoboto, Kab. Boalemo, Paguyaman, Sosial	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak bukan Kewenangan PUPR Provinsi Gorontalo
1122	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dilaut - Benih	desa bangga, Kab. Boalemo, Paguyaman Pantai, Bangga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Ikan Antoni belum masuk dalam komoditi ikan yang dibudidayakan, karena belum tersedianya bibit yang cukup (masih mengandalkan tanakanan alam

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1123	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Madrasah Ibtidaiyah, Kab. Boalemo, Paguyaman Pantai, Bangga	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Terkait Pembangunan Pagar Sekolah (MI) Wajib memperhatikan regulasi yang bersesuaian, kewenangan, Dokren/prioritas/strategi/dan arah kebijakan Nasional/Daerah, ketersediaan fiskal, daerah
1124	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa bangga, Kab. Boalemo, Paguyaman Pantai, Bangga	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPD Ditolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1125	10-03-2022	Ir. H. Irwan A. Berahim	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa limbatihu, Kab. Boalemo, Paguyaman Pantai, Limbatihu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Tidak masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1126	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kelurahan Siduan, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1127	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Buhu Jaya, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
1128	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Se Kabupaten Boalemo, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (Sri Fadila Ahmad, Gina Senia S. Matana , Sri Rahayu Uwete, Vigr Yumanda Husai, Faradila Husai, Abdul Rasyid Latif, Iin Anggriyani Latif, Feni Mutia Rahim) Dapat diakomodir jika Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung. Koefisien : 8 Mahasiswa Anggaran : 0	Usulan disetujui
1129	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	se Kabupaten Pohuwato, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1130	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (Abdul Rahman Huda, Dina Hodio) Dapat diakomodir jika Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan juknis Koefisien : 2 Mahasiswa S2 Anggaran : 0	Usulan disetujui
1131	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	se kabuapten pohuwato, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1132	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1133	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	se kabupaten Pohuwato, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1134	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa Huwongo, Kab. Boalemo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rekomendasi : Disesuaikan dengan anggaran yang ada dan terdaftar dalam DTKS serta ketentuan lainnya Koefisien : 224 KK Anggaran : 0	Usulan disetujui
1135	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	se Kabupaten Boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1136	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	se kabupaten pohuwato, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1137	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Bongo Nol, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Usulan disetujui
1138	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1139	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	se kabuapetn pohuwato, Kab. Pohuwato	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1140	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1141	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	se kabuapetn pohuwato, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1142	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Pontolo, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
1143	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Bukit Karya, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1144	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Kelurahan Siduan, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1145	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Desa Buhu Jaya, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1146	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Desa Huwongo, Kab. Boalemo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Sudah masuk dalam baseline anggaran 2023 Koefisien : 500 Meter Anggaran : 500000000	Usulan disetujui
1147	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Dusun Bilungala, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1148	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Desa Huwongo, Kab. Boalemo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Disetujui Dengan Penyesuaian Volume Koefisien : 200 Meter Anggaran : 0	Usulan disetujui
1149	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Desa Huwongo, Kab. Boalemo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Usulan disetujui
1150	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Bualo, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1151	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Bualo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1152	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Kehutanan	Masalah Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Desa Bualo, Kab. Boalemo	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1153	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dusun Taipangi, Desa Tangkobu, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1154	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Tangkobu, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1155	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Buntulia Utara, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Usulan disetujui
1156	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Buntulia Utara, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1157	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jl. Trans Sulawesi, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1158	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Dusun II, Desa Salilama, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Usulan disetujui
1159	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Pontolo, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Usulan disetujui
1160	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Pontolo, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1161	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Pontolo, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1162	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Desa Kramat, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1163	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dusun Pohilihe, Desa Kramat, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1164	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Kemiri, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1165	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kemiri, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1166	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Desa Sarimurni, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1167	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Kaaruyan, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1168	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Desa Pontolo, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1169	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Pontolo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1170	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se kabuapten boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1171	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se kabupaten pohuwato, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1172	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1173	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	se kabupaten pohuwato, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1174	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1175	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	se kabupaten pohuwato, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1176	10-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Kesatuan Bangsa dan Politik	Masalah Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi : Dapat diakomodir sambil menunggu proposal sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan anggaran dengan kapasitas piskal serta berdasarkan hasil verifikasi tim. Koefisien : 1 Organisasi Anggaran : 637000000	Usulan disetujui
1177	11-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Pontolo, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1178	11-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Buhu Jaya, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1179	19-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kaaruyan, Kab. Boalemo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1180	11-06-2022	Ir. Laode Haimudin	Kesatuan Bangsa dan Politik	Masalah Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kampus IV UNG, Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie - Bone Bolango, Kab. Bone Bolango			Validasi Sekretariat Dewan
1181	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Sesuai UU No. 23, Tahun 2014 Perahu di < 5 GT bukan menjadi kewenangan Provinsi tetapi menjadi kewenangan Kabupaten/kota. Usulan ini akan di kawal dalam menu DAK TA 2023
1182	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	se kabupaten pohuwato, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Bukan lagi menjadi kewenangan Provinsi, tetapi kewenangan kabupaten
1183	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Belum ada By Name By Address
1184	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	se kabupaten pohuwato, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
1185	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	se kabupaten boalemo, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Dinas Sosial tidak lagi melaksanakan program KUBE

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1186	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	se kabupaten Pohuwato, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Dinas Sosial tidak lagi melaksanakan program KUBE
1187	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	se kabupaten Boalemo, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ada lagi program KUBE
1188	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	se kabupaten pohuwato, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ada lagi Program KUBE
1189	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Desa Hungayonaa, Kab. Boalemo, Tilamuta, Hungayonaa	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
1190	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Salilama, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pada Tahun 2023 tidak ada program pengembangan usaha ekonomi masyarakat
1191	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Kemiri, Kab. Pohuwato, Paguat, Kemiri	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Bukan Tupoksi Dinas Sosial, P3A Provinsi
1192	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Kaaruyan, Kab. Boalemo, Mananggu, Kaaruyan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi
1193	09-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kaaruyan, Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Perhubungan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk Kawasan Startegis Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1194	10-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Desa Pontolo, Kab. Boalemo, Mananggu, Pontolo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang diusulkan tidak masuk pada kawasan kumuh kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Boalemo untuk kecamatan Mananggu hanya Desa Bendungan, Kramat II, dan Salilama
1195	10-03-2022	Ir. Laode Haimudin	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Kaaruyan, Kab. Boalemo, Mananggu, Kaaruyan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Lokasi yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Boalemo
1196	14-04-2022	Ir. Laode Haimudin	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masalah Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Desa Kemiri, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Bantuan sumur bor sudah bukan kewenangan, pada urusan kegeologian
1197	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA GANDASARI. KEC. BOLIYOHUTO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1198	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	SE KECAMATAN TOLANGOHULA DAN MOOTILANGO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1199	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA MOLOHU. KEC. TOLANGOHULA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1200	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA KARYAMUKTI DAN DESA TALUMOPATU. KEC. MOOTOLANGO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1201	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	SE KEC. BOLIYOHUTO DAN TOLANGOHULA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	SE KEC. BOLIYOHUTO DAN TOLANGOHULA, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1203	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA BANDUNG REJO DAN DESA PARIS, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1204	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA PARUNGI DAN SIDOMULYO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1205	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA MUYONEGORO S/D KARYA MUKTI, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1206	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pertanian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	DESA SIDODADI DAN DESA PARIS, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1207	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	DESA SIDOMULYO DAN SIDOMULYO SELATAN, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1208	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	DESA MONGGOLITO DAN SIDOMUKTI, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1209	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA SIDODADI DAN SIDO MUKTI, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1210	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	DESA TOLITE DAN DESA KUALA LUMPUR, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1211	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pertanian	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	KEC. BOLIYOHUTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1212	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pertanian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	DESA BULIA, DESA SIDOMULYO DAN SIDOMULYO SELATAN, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1213	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA SIDODADI KEC. BOLIOHUTO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Dapat diakomodir dengan catatan : 1. Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan juknis; 2. Lolos tahapan verifikasi; 3. Jika Merupakan Penerima Hibah Bansos di Tahun 2022 maka akan dipertimbangkan melalui Verifikasi Lapangan. Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
1214	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	BUKIT LASKAR DESA SIDOMUKTI KEC. MOOTILANGO., Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1215	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA SIDODADI KECAMATAN BOLIOHUTO KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1216	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DESA SIDODADI, DESA SIDOMULYO, DESA POTANGA KECAMATAN BOLIOHUTO KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1217	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1218	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	DESA PARUNGI. KEC. BOLIOHUTO, Kab. Gorontalo, Boliohuto, Parungi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1219	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	SE KECAMATAN BOLIYOHUTO DAN TOLANGOHULA, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Boliyohuto, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
1220	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Lingkungan Hidup	Masalah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	DESA SIDOMUKTI DAN DESA PILIMONU, Kab. Gorontalo, Mootilango, Pilomonu	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Tidak sesuai kewenangan OPD
1221	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	DESA TILOTE KEC. BOLIYOHUTO, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Tolite	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo
1222	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	DESA SIDOMULYO SELATAN DAN DESA DULOHUPA, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Dulohupa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo
1223	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jembatan	DESA OLIMOHULO KEC. ASPARAGA, Kab. Gorontalo, Asparaga, Olimohulo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo
1224	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	DESA KARYA BARU, DESA MOHIYOLO KEC ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo, Asparaga, Mohiyolo		Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Daerah Irigasi Provinsi
1225	15-03-2022	Ir. Wasito Somawiyono	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jembatan	DESA OLIMOHULO KECAMATAN ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo, Asparaga, Olimohulo		Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, sudah ada usulan yang sama

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1226	11-03-2022	Irwan Mamesah	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Desa Bongoime, desa suka damai, desa moutong, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1227	12-03-2022	Irwan Mamesah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa suka damai, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 600000000	Usulan disetujui
1228	12-03-2022	Irwan Mamesah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	dusun 1 dan dusun 2 desa lonuo, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1229	12-03-2022	Irwan Mamesah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	dusun 1 desa iloheluma, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1230	12-03-2022	Irwan Mamesah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	dusun 2 desa toto selatan, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1231	13-03-2022	Irwan Mamesah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa suka damai, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1232	13-03-2022	Irwan Mamesah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	desa suka damai, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
1233	13-03-2022	Irwan Mamesah	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	desa suka damai, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1234	13-03-2022	Irwan Mamesah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	desa panggulo barat, Kab. Bone Bolango	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1235	13-03-2022	Irwan Mamesah	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	semua desa, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
1236	13-03-2022	Irwan Mamesah	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa toto utara, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
1237	13-03-2022	Irwan Mamesah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	kelurahan dutohe, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1238	13-03-2022	Irwan Mamesah	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa oluhuta, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
1239	11-03-2022	Irwan Mamesah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	semua desa, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Lokus usulan (nama Desa/kelurahan) Tidak Ada

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1240	12-03-2022	Irwan Mamesah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa moutong dan desa suka damai, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1241	12-03-2022	Irwan Mamesah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	desa tomatoto, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1242	13-03-2022	Irwan Mamesah	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	semua desa, Kab. Bone Bolango, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1243	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa bulontio kec sumalata timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1244	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa bulontio kec sumalata timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1245	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN RUANG LAB KOMPUTER - Pembangunan Lab pada satuan pendidikan menengah dan khusus	desa bulontio, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
1246	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa monas kec monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1247	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa monas kec monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 400000000	Usulan disetujui
1248	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	semua desa, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Usulan 50 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 50 Unit Rumah Anggaran : 1875000000	Usulan disetujui
1249	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa monas kec monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1250	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa bualemo, desa moluo, desa leboto kec kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1251	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	semua desa kec kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1252	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	kec. anggrek, kec kwandang, kec. tomilito kec. atinggola, kec sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1253	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	kec. tomilito, kec anggrek, kec. gentuma, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1254	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	kec. anggrek, kec kwandang, kec monano, kec. gentuma, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1255	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	kec. anggrek, kec, sumalata, kec, gentuma, kec. kwandang, kec. atinggola, kec. tomilito, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1256	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	desa imana kec atinggola, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1257	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	semua kec se-kabupaten Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Usulan 100 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 100 Unit Rumah Anggaran : 3750000000	Usulan disetujui
1258	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	desa gentuma kec gentuma raya, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
1259	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	se kec sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Se- Kabupaten Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
1261	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	desa dudepo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1262	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pertanahan	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Desa Ilangata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1263	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	desa ipilo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1264	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa monas kec. monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1265	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa moluo kec kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1266	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa leboto kec kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1267	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa datahu kec. anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1268	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa bulontiyo kec sumalata timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1269	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa monas, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1270	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa ilodulunga, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1271	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa gentuma, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1272	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa imana, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1273	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa ilangata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1274	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa ipilo, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1275	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK)	desa kasia, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1276	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	desa bulontio timur kec sumalata timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak bukan Kewenangan PUPR Provinsi Gorontalo
1277	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	desa bulontio timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
1278	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	semua desa, Kab. Gorontalo Utara, Monano, Monano, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui
1279	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	semua desa, Kab. Gorontalo Utara, Monano, Monano, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1280	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa monas, desa ilodulunga, desa gentuma, desa imana, desa ilangata, desa ipilo,, Kab. Gorontalo Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak karena bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
1281	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	desa ilodulunga, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Ilodulunga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Bukan lagi kewenangan Provinsi, disarankan dibiayai lewat Dana Desa

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1282	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	semua desa dan kecamatan, Kab. Gorontalo Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1283	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	semua desa se - kecamatan se- kab gorontalo utara, Kab. Gorontalo Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1284	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa gentuma kec gentuma raya, Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Gentuma	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1285	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa kasia, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Kasia	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo
1286	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa Dudepo, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Dudepo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1287	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	desa datahu, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Datahu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tuisi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1288	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa bualemo kec. kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Bualemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1289	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa huidu melito kec. tomilito, Kab. Gorontalo Utara, Tomolito, Huidu Melito	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1290	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa dudepo kec anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Dudepo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1291	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa ipilo kec. gentuma, Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Ipilo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1292	11-03-2022	Jasin Usman Dilo, AMd, SAP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	desa kasia, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Kasia	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
1293	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Desa Lahumbo, Kab. Boalemo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1294	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Lahumbo, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1295	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun II Desa Tapadaa, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1296	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Padengo, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1297	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kec. Botumoito, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1298	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Mohungo, Kab. Boalemo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1299	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Dusun Dilehito, Kab. Boalemo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1300	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Padengo, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Padengo, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1302	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Desa Bendungan, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1303	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Tapadaa, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1304	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Tapadaa, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1305	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	desa Tapadaa, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1306	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Tapadaa, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1307	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Tapadaa, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1308	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Buntulia Barat, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (MASJID AL AQSA, NURUL JIHAD), Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 2 MASJID Anqqaran : 0	Usulan disetujui
1309	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa Padengo, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1310	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Desa Padengo, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1311	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Padengo, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
1312	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Padengo, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1313	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan banqunan pengaman pantai lainnya	Desa Bulili, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1314	15-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kab Pohuwato, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1315	15-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kab Boalemo, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1316	15-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kabupaten Pohuwato, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1317	15-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kab Boalemo, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1318	15-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kab Pohuwato, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1319	15-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Kab Boalemo, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1320	04-04-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Padengo, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1321	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Piloloyanga, Kab. Boalemo, Tilamuta, Piloloyanga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang diusulkan tidak masuk pada kawasan kumuh kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bunafi Boalemo
1322	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Dusun 3 Desa Lahumbo, Kab. Boalemo, Tilamuta, Tilamuta, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1323	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Dusun II Desa Lahumbo, Kab. Boalemo, Tilamuta, Lahumbo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1324	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Dusun III Desa Lahumbo, Kab. Boalemo, Tilamuta, Lahumbo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, wajib memperhatikan UU 23 Tahun 2014, Kepmen 050/5889 Th. 2021, dan regulasi lainnya yang bersesuaian.
1325	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Bolihutuo, Kab. Boalemo, Bolihutuo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1326	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dilaut - Benih	Desa Tapadaa, Kab. Boalemo, Botumoita, Tapadaa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
1327	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kec. Botumoito, Kab. Boalemo, Botumoita, Botumoita, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1328	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dusun 2 Botu Duluwo, Kab. Boalemo, Botumoita, Botumoito	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1329	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Kec. Botumoito, Kab. Boalemo, Botumoita, Botumoita, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1330	10-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Mohungo, Kab. Boalemo, Tilamuta, Mohungo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1331	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Desa Hungayonaa, Kab. Boalemo, Tilamuta, Hungayonaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
1332	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Hungayonaa, Kab. Boalemo, Tilamuta, Hungayonaa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa Yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Boalemo.
1333	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Dusun Dilehito, Kab. Boalemo, Tilamuta, Limbato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak karena bukan merupakan tuisi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi
1334	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Buntulia, Kab. Pohuwato, Buntulia, Buntulia, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Pohuwato

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1335	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Desa Bendungan, Kab. Boalemo, Mananggu, Bendungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
1336	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Tapadaa, Kab. Boalemo, Botumoita, Tapadaa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1337	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Tapadaa, Kab. Boalemo, Botumoita, Tapadaa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1338	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Dulangeya, Kab. Boalemo, Dulangeya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Bukan lagi kewenangan Provinsi, disarankan di biyai lewat Dana Desa
1339	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Tapadaa, Kab. Boalemo, Botumoita, Tapadaa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1340	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Tapadaa, Kab. Boalemo, Botumoita, Tapadaa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1341	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Desa Buntulia Barat, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Buntulia Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, " Rekomendasi : ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.
1342	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Padengo, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Duhiadaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak karena perbaikan jalan bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUJPR Provinsi
1343	11-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Padengo, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Padengo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1344	12-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Mohungo, Kab. Boalemo, Tilamuta, Mohungo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1345	19-03-2022	M. Hidayat H. Bouty, SE	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Alamat, Kab. Boalemo, Botumoita, Tapadaa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
1346	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	semua desa se - Kabupaten Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1347	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	desa pulubala desa bukit aren, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1348	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa toyiditi dan isimu utara, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1349	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	kec pulubala, kec tibawa, kec mootilango, Kab. Gorontalo	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
1350	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	kec. tibawa, kec. pulubala, kec. bilato, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1351	09-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan di Air payau dan Air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan atau maffaatn atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota - Benih	kelurahan dembe 1 dan kel. lekobalo, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Kegiatan yang sifatnya pemberdayaan budidaya ikan air tawar, bukan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi tetapi menjadi kewenangana kabupaten kota. Usulan ini akan dikawal bersama dalam kegiatan APBN KKP
1352	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Kec tibawa, kec pulubala, kec. mootilango, kec bilato, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
1353	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	kecamatan Bilato, Kab. Gorontalo, Bilato, Bilato, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1354	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Perindustrian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	kec tibawa, kec pulubala, kec. mootilango, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1355	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Datahu, Desa Isimu Raya, Desa balahu, desa isimu selatan, desa botumoputih, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1356	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Reksonegoro kec tibawa, Kab. Gorontalo, Tibawa, Reksonegoro	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1357	11-03-2022	Manaf A. Hamzah, S.Ag. M.Pd	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kec Tibawa , Kec Pulubala, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Pengadaan rumah melalui program BSPS dapat diusulkan pada balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Stok Program
1358	08-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Kel. Lekobalo, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1359	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	KELURAHAN HELEDULAA SELATAN & KELURAHAN MOODU KECAMATAN KOTA TIMUR, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1360	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	KELURAHAN TANJUNG KRAMAT KECAMATAN HULONTHALANGI, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1361	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	KELURAHAN DONGGALA, KECAMATAN HULONTHALANGI, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1362	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	KELURAHAN SIENDENG, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1363	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	KELURAHAN TAMALATE, KEC. KOTA TIMUR, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1364	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KELURAHAN MOODU, KEC. KOTA TIMUR, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima karena merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun masih di perlukan survey kembali terkait kejelasan status dan kondisi lahannya,serta data ukur yang akurat oleh OPD Teknis dan di koordinasikan dengan OPD terkait di kabupaten/kota Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000	Usulan disetujui
1365	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masalah Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	KELURAHAN DONGGALA, Kota Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1366	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pertanahan	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik, Rencana Pembangunan Dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	KEL. BIAWU, KEL. SIENDENG & KEL. DONGGALA), Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1367	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	KELURAHAN BIAWAO DAN KELURAHAN BIAWU, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1368	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	KELURAHAN LIBUO, KECAMATAN DUNGINGI, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1369	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KELURAHAN TOMULABUTAO SELATAN, KECAMATAN DUNGINGI, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1370	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	SE KOTA GORONTALO, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1371	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KELURAHAN TENDA, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1372	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	SE KOTA GORONTALO, Kota Gorontalo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Lokasi Usulan yang menjadi Kewenangan Provinsi berdasarkan SK Kawasan Kumuh Walikota Gorontalo. - Usulan 5 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 5 Unit Rumah Anggaran : 187500000	Usulan disetujui
1373	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KELURAHAN LIBUO, KECAMATAN DUNGINGI, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Dapat diakomodir dengan catatan : 1. Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan juknis; 2. Lolos tahapan verifikasi; 3. Jika Merupakan Penerima Hibah Bansos di Tahun 2022 maka akan dipertimbangkan melalui Verifikasi Lapangan. Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
1374	28-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kel. Buliide, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1375	28-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kel. Buliide, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1376	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kel. Buliide Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1377	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kel. Buliide Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1378	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kel. Dembe. Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1379	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Jl. Jeruk. Lorong Kecewa RT 2 RW 3. Kel. Wumialo. Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
1380	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kel. Buliide, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1381	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	JL. Usman Isa. Kel. Lekobalo. Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1382	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kel. Leato Selatan, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1383	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kelurahan Donggala. Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1384	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kel. Leato Selatan. Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1385	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	jl. Jambura. Kel. Molosipat Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1386	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan Ruang	Lorong Gelatik. Kel. Heledulaa Selatan, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
1387	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan Ruang	Lingkungan 5. Kel. Heledulaa Selatan, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1388	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan Ruang	Jl. Lorong Mutiara. Kel. Limba U 1. Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1389	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan Ruang	Lorong Panti Asuhan Al-Kautsar. Kel. Molosipat, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Verifikasi OPD Provinsi
1390	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan Ruang	Lorong Samping Kantor Lurah Dulomo Selatan, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1391	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan Ruang	jl. Sutomo Limba U 1, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1392	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kel. Dembe 1, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1393	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	kel. Dembe 1, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1394	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kel. Libuo. kec. Duingi, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1395	15-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kel. Pilolodaa, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1396	15-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KLe. Leato Utara, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1397	15-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KLe. Talumolo, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1398	08-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kel. Buliide. Kec. Kota Barat. Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Kota Barat, Buliide	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan Usulan pembuatan MCK Umum dapat di usulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
1399	08-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Kel. Dembe I. Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan Usulan pembuatan MCK Umum dapat di usulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
1400	08-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kel. donggala. Kec, Hulonthalango, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Donggala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan Kecamatan dan kelurahan yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Walikota Gorontalo.
1401	08-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	Kel. Letao Selatan. Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1402	08-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	KELURAHAN PILOLODAA, KELURAHAN DULOMO UTARA, KELURAHAN DULOMO SELATAN, LILUWO, Kota Gorontalo, Kota Barat, Pilolodaa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan Kelurahan yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Walikota Gorontalo Untuk Kecamatan Kota Barat hanya Kel. Buliide
1403	08-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	KELURAHAN LEATO SELATAN, KECAMATAN DUMBO RAYA, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Selatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan Kelurahan yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Walikota Gorontalo., untuk Kec. Dumbo Raya hanya Kel. Leato Utara
1404	08-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	JALAN SAMPING KANTOR KELURAHAN HELEDULAA UTARA, KEL. HELEDULAA UTARA, KECAMATAN KOTA TIMUR, Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan bahwa Kelurahan/Desa Heledulaa Utara tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah kota
1405	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	KELURAHAN TANJUNG KRAMAT KECAMATAN HULONTHALANGI, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Tanjung Kramat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tuisi atau kewenangan bidang SDA
1406	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	KELURAHAN TANJUNG KRAMAT KECAMATAN HULONTHALANGI, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Tanjung Kramat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1407	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	KELURAHAN SIENDENG, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Siendeng	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
1408	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	KELURAHAN TANJUNG KRAMAT, KEC. HULONTHALANGI, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Tanjung Kramat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
1409	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KELURAHAN HELEDULAA UTARA (BELAKANG KANTOR LURAH), Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1410	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	JALAN KASUARI KELURAHAN HELEDULAA UTARA, Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1411	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	SAMPING TVRI KEL. DULALOWO, Kota Gorontalo, Kota Tengah, Dulalowo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak karena walaupun masuk KSP namun status jalannya bukan merupakan tuisi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi
1412	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pariwisata	Masalah Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	KELURAHAN DEMBE I, KEC. KOTA BARAT, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
1413	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pariwisata	Masalah Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	KELURAHAN DONGGALA KECAMATAN HULONTHALANGI, Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Donggala	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1414	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KEL. HELEDULAA UTARA, JALAN GELATIK 2, Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1415	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KLE. HELEDULAA UTARA, Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan bahwa Kelurahan/Desa Heledulaa Utara tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah kota
1416	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	KLE. HELEDULAA UTARA, Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan bahwa Kelurahan/Desa Heledulaa Utara tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah kota
1417	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KLE. HELEDULAA UTARA, Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Utara	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Bukan kewenangan Dinas Sosial, P3A
1418	09-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	SE KOTA GORONTALO, Kota Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1419	11-04-2022	Meyke M. Camaru, SH	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	kel. Pilolodaa. Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Kota Barat, Pilolodaa	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan gardu listrik menjadi kewenangan PLN, dikoordinasikan dengan PLN UP3 Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1420	28-03-2022	Meyke M. Camaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kel. Dembe I. Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun Drainase lingkungan yang lokasinya di Kota Gorontalo bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUJPR Provinsi
1421	11-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	dusun baiiyaale – oluhuta, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1422	11-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Perhubungan		Stok Program
1423	11-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	dusun bainaale DESA oluhuta, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1424	11-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA HELUMO, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1425	11-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1426	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1427	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1428	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1429	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1430	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1431	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1432	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1433	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1434	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1435	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1436	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1437	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa monas, desa tudi dan desa pilohulata kecamatan monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1438	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	desa pilohulata kecamatan monano, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Perhubungan		Stok Program
1439	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa tombulilato kecamatan atinggola, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1440	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	desa tombulilato kecamatan atinggola, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1441	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa botuwombato kecamatan kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1442	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa botuwombato kecamatan kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1443	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	desa botuwombato kecamatan kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1444	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	desa botuwombato kecamatan kwandang, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Perhubungan		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1445	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Oluhuta, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1446	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Oluhuta, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1447	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA OLUHUTA, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Dapat diakomodir dengan catatan : 1. Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan juknis; 2. Lolos tahapan verifikasi; 3. Jika Merupakan Penerima Hibah Bansos di Tahun 2022 maka akan dipertimbangkan melalui Verifikasi Lapangan. Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
1448	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	Desa Milango, Desa Leyao dan Desa Bubode, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1449	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Milango, Desa Leyao dan Desa Bubode, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1450	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	PANTI MINANGA, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Perhubungan		Stok Program
1451	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Bendung Irigasi	Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1452	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1453	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1454	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1455	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
1456	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Perhubungan		Stok Program
1457	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1458	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1459	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Bendung Iriqasi	Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1460	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1461	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1462	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1463	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1464	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	Desa Hutokalo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1465	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Hutokalo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1466	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Hutokalo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1467	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Hutokalo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1468	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1469	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1470	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Layanan Desa/Kelurahan Digital belum optimal	Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		Stok Program
1471	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Lingkungan Hidup	Masalah Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Stok Program
1472	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1473	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Desa Deme 1, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 100 ORANG Anggaran : 0	Usulan disetujui
1474	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Deme 1, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1475	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1476	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Biro Hukum	Rekomendasi : usulan dapat diakomodir dengan catatan anggaran menyesuaikan dengan kapasitas fiskal Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 50000000	Usulan disetujui
1477	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1478	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DESA MOLINGKAPOTO SELATAN KECAMATAN KWANDANG, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1479	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA DUMOLODO KECAMATAN GENTUMA RAYA, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1480	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA DUMOLODO KECAMATAN GENTUMA RAYA, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Perhubungan		Stok Program
1481	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara	Biro Hukum	Rekomendasi : sudah di akomodir didalam pagu induk 2023 dengan catatan permasalahan pada tingkat gugatan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 50000000	Usulan disetujui
1482	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pertanian		Stok Program
1483	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1484	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Diteruskan ke Forum SKPD

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1485	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Heluma	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, PADA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARKAT
1486	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Heluma	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1487	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kepemudaan dan Olahraga	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula - Pelatihan dan fasilitasi	desa helumo kecamatan anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Heluma	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, PADA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO TIDAK ADA PROGRAM BANTUAN KUBE
1488	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	desa mokonou kecamatan monano, Kab. Gorontalo Utara, Monano, Mokonowu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1489	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	desa tombolilato kecamatan atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1490	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	desa tihengo kec. Ponelo kepulauan, Kab. Gorontalo Utara, Ponelo Kepulauan, Tihengo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL TIDAK ADA LAGI PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
1491	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	kecamatan atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Atinggola, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan yang diusulkan Tidak MASUK Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK BUInati Kab. Gorut

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1492	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	desa pilohulata dan desa mokonow, Kab. Gorontalo Utara, Monano, Pilohulata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
1493	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	kecamatan monano, Kab. Gorontalo Utara, Monano, Monano, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Kewenangan pihak ketiga
1494	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	desa tombulilato kecamatan atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
1495	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	desa tombulilato kecamatan atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1496	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan di Air payau dan Air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan atau maffaatn atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota - Benih	desa tombulilato kecamatan atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Kegiatan yang sifatnya pemberdayaan budidaya ikan air tawar, bukan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi tetapi menjadi kewenangana kabupaten kota
1497	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	desa nanati jaya kecamatan gentuma raya, Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Nanati Jaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, DEngan pertimbangan bantuan jamban dapat diusulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
1498	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	BANTUAN PENGADAAN AIR BERSIH, Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Nanati Jaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, DEngan pertimbangan Lokasi yang diusulkan tidak Masuk pada KSP

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1499	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa nanati jaya kecamatan gentuma raya, Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Nanati Jaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, lokasi yang diusulkan Tidak Masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan provinsi, sesuai SK Bupati Gorut
1500	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	desa imana, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Imana	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1501	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	ponelo kepulauan, Kab. Gorontalo Utara, Ponelo Kepulauan, Ponelo Kepulauan, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1502	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	kecamatan atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Atinggola, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pariwisata	Stok ProgramDitolak	Ditolak, usulan tidak jelas, baik output maupun lokasi
1503	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	KECAMATAN MONANO, Kab. Gorontalo Utara, Monano, Monano, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pariwisata	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
1504	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masalah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	desa botuwombato kecamatan kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Botuwombata	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ada dalam Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindukcapil (Renstra PD)
1505	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	desa botuwombato kecamatan kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Botuwombata	Dinas Pariwisata	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1506	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Desa Oluhuta, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Oluhuta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1507	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Desa Oluhuta, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Oluhuta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA K"
1508	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	DESA OLUHUTA, Kab. Atinggola, Oluhuta	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
1509	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	DESA OLUHUTA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Oluhuta	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1510	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	SELURUH KBUPATEN GORONTALO UTARA, Kab. Gorontalo Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1511	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	PANTAI MINANGA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Atinggola, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1512	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Kecamatan Gentuma, Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Gentuma Raya, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1513	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	PANTAI MINANGA ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Atinggola, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pariwisata	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
1514	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
1515	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara
1516	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Wubudu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Lokasi yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, SesuaiSK Bupati Kab. Pohuwato
1517	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Barat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
1518	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dilaut - Benih	Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Bulontio Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1519	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Mebongo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT (UMKM)
1520	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Mebongo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1521	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Hutokalo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Mebongo	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu Ditolak, menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1522	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Hutokalo, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Hutakalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1523	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Deme Dua	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1524	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Deme Dua	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1525	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS - Insentif GTK non ASN pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Desa Deme 1, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Deme Satu		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Wajib memperhatikan UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Kepmen 050/5889 Th. 2021, Dokren/prioritas/strategi/dan arah kebijakan Nasional dan Daerah, regulasi lainnya, serta ketersediaan fiskal daerah.
1526	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Motiheluma	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, lokasi yang diusulkan Tidak Masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan provinsi, sesuai SK Bupati Gorut
1527	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sosial	Masalah Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Motiheluma	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1528	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara, Sumalata Timur, Motiheluma	Dinas Pariwisata	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
1529	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Tolinggula Pantai	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1530	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	DESA DATAHU KECAMATAN ANGGREK, Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Datahu	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1531	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	DESA MOLONGGOTA KECAMATAN GENTUMA RAYA, Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Molonggota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Lokasi yang diusulkan tidak masuk pada lokasi KSP
1532	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	DESA DUMOLODO KECAMATAN GENTUMA RAYA, Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Dumolodo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1533	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masalah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DESA DUMOLODO KECAMATAN GENTUMA RAYA, Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Dumolodo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ada dalam Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Ditolak, Masyarakat Desa dan Admindukcapil (Renstra PD)
1534	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato	Dinas Pariwisata	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
1535	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1536	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Sosial	Masalah Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1537	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi dan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA "
1538	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Monggupo	Dinas Pariwisata	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
1539	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - Beasiswa, Prakerin pada satuan pendidikan menengah dan khusus	DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui
1540	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kepemudaan dan Olahraga	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula - Pelatihan dan fasilitasi	DESA POSONO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Posono	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1541	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA POSONO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Posono	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi dan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA "
1542	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA POSONO KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Posono	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1543	12-03-2022	Muhammad Nasir Majid, S.Ip., MH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	DESA OLUHUTA KECAMATAN ATINGGOLA, Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Oluhuta	Dinas Kelautan dan Perikanan	Diteruskan ke Forum SKPDDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Address (BNBA) nya
1544	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA POHUWATO TIMUR KEC. MARISA, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
1545	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	KEC. Duhiaadaa, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
1546	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	DESA BULILI KEC. MARISA, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1000000000	Usulan disetujui
1547	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
1548	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Stok Program
1549	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1550	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
1551	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1552	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA BOTUBILATAHU, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1553	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA MARISA SELATAN, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1554	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA MARISA SELATAN, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
1555	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA MARISA SELATAN, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1556	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA PALOPO, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1557	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	DESA PADENGO, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1558	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA PADENGO, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1559	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DESA PADENGO, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1560	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA PADENGO, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1561	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Kesehatan	Masalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	DESA BOTUBILATAHU, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Kesehatan		Stok Program
1562	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA BOTUBILATAHU, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1563	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA MARISA SELATAN, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1564	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA MARISA SELATAN, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1565	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Kesehatan	Masalah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	DESA ILOHELUMA, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Kesehatan		Stok Program
1566	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan Ruang	DESA ILOHELUMA, POHUWATO, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1567	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan Ruang	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Buntulia Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1568	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Buntulia Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1569	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Buntulia Barat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Lokasi yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, SesuaiSK Bupati Kab. Pohuwato
1570	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS - Insentif GTK non ASN pada satuan pendidikan menengah dan khusus	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Buntulia Barat	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui
1571	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sosial	Masalah Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DESA BUNTULIA BARAT, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Buntulia Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan kewenangan dinas PUPR Provinsi Gorontalo
1572	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan Ruang	DESA MARISA SELATAN, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Marisa, Marisa Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi dan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1573	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	DESA MARISA SELATAN, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Marisa, Marisa Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi dan bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA "
1574	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA MARISA SELATAN, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Marisa, Marisa Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1575	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Kebudayaan	Masalah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat - Honor Pemangku Adat	DESA BOTUBILATAHU, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Marisa, Batubilotahu	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Tidak Disetujui
1576	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA ILOHELUMA, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Patilanggio, Iloheluma	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1577	12-03-2022	Nani Mbuinga, S.Pd	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pembangunan Perahu Fiber	DESA POHUWATO TIMUR, POHUWATO, Kab. Pohuwato, Marisa, Pohuwato Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1578	15-03-2022	Nikma Tahir	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA SIDUAN, KEC, PAGUAT, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1579	15-03-2022	Nikma Tahir	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA KARYA BARU, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1580	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA SOGINTEI. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1581	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	DESA SOGINTEI. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1582	15-03-2022	Nikma Tahir	Pertanian	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	DESA SOGINTEI. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1583	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA SIPAYO. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1584	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA SOGINTEI. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1585	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	DESA BUHU JAYA, KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1586	15-03-2022	Nikma Tahir	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA BUNUYO. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1587	15-03-2022	Nikma Tahir	Pertanian	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	DESA BUNUYO. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1588	15-03-2022	Nikma Tahir	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA BUNUYO. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
1589	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA KEMIRI, KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1590	15-03-2022	Nikma Tahir	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA KEMIRI, KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Dapat diakomodir dengan catatan : 1. Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan juknis;; 2. Lolos tahapan verifikasi; 3. Jika Merupakan Penerima Hibah Bansos di Tahun 2022 maka akan dipertimbangkan melalui Verifikasi Lapangan. Koefisien : 1 Majelis Taklim. Anggaran : 0	Usulan disetujui
1591	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	DESA KEMIRI, KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1592	15-03-2022	Nikma Tahir	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA KEMIRI, KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
1593	15-03-2022	Nikma Tahir	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA SIPAYO DAN DESA SIDUAN KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1594	15-03-2022	Nikma Tahir	Tenaga Kerja	Masalah Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi	DESA SIPAYO. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Stok Program
1595	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA KEMIRI, KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1596	15-03-2022	Nikma Tahir	Pertanian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	DESA TABONGO, DESA ILOMANGA, DESA MOAHUDU, DESA DUWANGA, DESA LIMEHU SERTA DESA LIMEHU TIMUR KECAMATAN TABONGO KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1597	15-03-2022	Nikma Tahir	Sosial	Masalah Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DESA HUTA MOPUTI. KEC. DENGILU, Kab. Pohuwato	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
1598	15-03-2022	Nikma Tahir	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA SOGINTE. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1599	18-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa kemiri. Kec. Paguat, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1600	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA SOGINTE. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Soginti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1601	15-03-2022	Nikma Tahir	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	DESA SOGINTE. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Soginti	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1602	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA SOGINTE. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Soginti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato
1603	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	DESA BUHU JAYA.KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Buhu Jaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan usulan tidak masuk pada KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Pohuwato
1604	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	DESA ALUMBANGO. KEC., Kab. Boalemo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1605	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	DESA BUHU JAYA. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Buhu Jaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1606	15-03-2022	Nikma Tahir	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	DESA SIDUAN, KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Siduan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1607	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	DESA PENTADU, Kab. Pohuwato, Paguat, Pentadu		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Bukan Kewenangan dan dapat diusulkan melalui Dana Desa

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1608	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	DESA PENTADU, KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Pentadu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan usulan tidak masuk pada KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Pohuwato
1609	15-03-2022	Nikma Tahir	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	DESA BUMBULAN. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Bumbulan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1610	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA HUTAMOPUTI, Kab. Pohuwato, Dengilo, Hutamoputi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak Masuk (KSP) Kawasan Strategis Provinsi
1611	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jembatan	DUSUN LANSAT & DUSUN DURIAN DESA SOGINTI, Kab. Pohuwato, Paguat, Soginti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato
1612	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	DESA BAHU JAYA. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Buhu Jaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato
1613	15-03-2022	Nikma Tahir	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	DESA PENTADU, KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Pentadu	Dinas Kelautan dan Perikanan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Bukan lagi Kewenangan Provinsi, disarankan dibiayai lewat Dana Desa
1614	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA BUNUYO. KEC. PAGUAT, Kab. Pohuwato, Paguat, Bunuyo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan kewenangan dinas PUPR Provinsi Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1615	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	DESA TABONGO, DESA ILOMANGA, DESA MOAHUDU, DESA DUWANGA, DESA LIMEHU SERTA DESA LIMEHU TIMUR KECAMATAN TABONGO KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo, Tabongo, Tabongo, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak karena bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi
1616	15-03-2022	Nikma Tahir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	DESA TABONGO, DESA ILOMANGA, DESA MOAHUDU, DESA DUWANGA, DESA LIMEHU SERTA DESA LIMEHU TIMUR KECAMATAN TABONGO KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo, Tabongo, Tabongo, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak karena bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi
1617	09-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA PANGI. KEC. DULUPI. KAB. NOALEMO, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1618	09-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	DESA WONGGAHU KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1619	09-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA MOHUNGO KECAMATAN TILAMUTA KECAMATAN BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Pertanian		Stok Program
1620	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA MUTIARA KEC. PAGUYAMAN. KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1621	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA MUTIARA KEC. PAGUYAMAN, Kab. Boalemo	Dinas Perhubungan		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1622	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA BONGO II. KEC. WONOSARI KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1623	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	DESA RUMBIA KEC. BOTUMOITO. KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1624	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA RUMBIA KEC. BOTUMOTO KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1625	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	DESA RUMBIA. KEC. BOTUMOITO, Kab. Boalemo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1626	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA RUMBIA. KEC. BOTUMOITO, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1627	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA PONTOLO, KEC. MANANGU. KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1628	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA PONTOLO, KEC. MANANGGU. KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1629	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA PONTOLO. KEC. MANANGU. KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1630	14-04-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	DEsa Bongo II. Kec. Wonosari, Kab. Boalemo			Validasi Mitra Bappeda
1631	14-04-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo			Validasi Mitra Bappeda
1632	09-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	DESA MOLOMBULAHE KEC. PAGUYAMAN, Kab. Boalemo, Paguyaman, Molombulahe	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena bukan merupakan tuisi atau wewenang dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1633	09-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA PANGI KEC. DULUPI. KAB. GORONTALO, Kab. Boalemo, Dulupi, Pangji	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang diusulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenanga Provinsi, Sesuai SK Bupati Boalemo untuk kecamatan Dulupi (Desa Tangga iava)
1634	09-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	DESA MONGUNGO, KEC. TILAMUTA. KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo, Tilamuta, Mohungo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
1635	09-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SERBA GUNA/AULA - Pembangunan Aula pada satuan pendidikan menengah dan khusus	DESA MOHUNGO KECAMATAN TILAMUTA KECAMATAN BOALEMO, Kab. Boalemo, Tilamuta, Mohungo		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Terkait Pembagunan Aula Kantor Desa Mohungo Wajib memperhatikan regulasi yang bersesuaian, kewenangan, Dokren/prioritas/strategi/dan arah kebijakan Nasional/Daerah, ketersediaan fiskal, daerah
1636	09-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DUSUN IV LORONG BUHU DESA MOHUNGO, Kab. Boalemo, Tilamuta, Mohungo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1637	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA MUTIARA. KEC. PAGUYAMAN, Kab. Boalemo, Paguyaman, Mutiara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi
1638	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA MUTUARA, KEC. PAGUYAMAN, Kab. Boalemo, Paguyaman, Mutiara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena bukan merupakan tusi atau wewenang Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1639	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	DESA LAHUMBO TILAMUTA. KAB. BOALEMO, Kab. Boalemo, Tilamuta, Lahumbo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Boalemo
1640	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA LAHUMBO. KEC. TILAMUTA. KAB. GORONTALO, Kab. Boalemo, Tilamuta, Lahumbo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1641	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	DESA PILOLIYANGA KEC. TILAMUTA, Kab. Boalemo, Tilamuta, Piloliyanga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1642	12-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA PILOLIYANGA KEC. TILAMUTA, Kab. Boalemo, Tilamuta, Piloliyanga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1643	28-03-2022	Oktohari Dalanggo, SE	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masalah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kec. Tilamuta, Kec. Botumoito dan Kec. Mananggu, Kab. Boalemo, Tilamuta, Tilamuta, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1644	11-03-2022	Sintje Kadji	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Buntulia Selatan, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1645	11-03-2022	Sintje Kadji	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1646	11-03-2022	Sintje Kadji	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Buntulia Selatan, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1647	11-03-2022	Sintje Kadji	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Desa Buntulia Tengah, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1648	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Desa Buntulia Utara, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1649	11-03-2022	Sintje Kadji	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa Pohuwato, Kab. Pohuwato	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1650	11-03-2022	Sintje Kadji	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Duhiaadaa, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1651	11-03-2022	Sintje Kadji	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Desa Taluduyunu, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1652	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Desa Iloheluma, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1653	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Desa Iloheluma, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1654	11-03-2022	Sintje Kadji	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Iloheluma, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1655	11-03-2022	Sintje Kadji	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Balayo, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1656	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	desa Balayo, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1657	11-03-2022	Sintje Kadji	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa Hulawa, Kab. Pohuwato	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1658	11-03-2022	Sintje Kadji	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Hulawa, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1659	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Bulili, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1660	11-03-2022	Sintje Kadji	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Bulili, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1661	11-03-2022	Sintje Kadji	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa Dulomo, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1662	11-03-2022	Sintje Kadji	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Dulomo, Kab. Pohuwato	Dinas Pertanian		Stok Program
1663	11-03-2022	Sintje Kadji	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Dulomo, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1664	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Desa Dulomo, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1665	11-03-2022	Sintje Kadji	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa Botubilotahu, Kab. Pohuwato	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1666	11-03-2022	Sintje Kadji	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	Desa Pohuwato Timur, Kab. Pohuwato, Marisa, Pohuwato Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1667	11-03-2022	Sintje Kadji	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Pohuwato Timur, Kab. Pohuwato, Marisa, Pohuwato Timur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa Yang diusulkan Tidak MAsuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Pohuwato.

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1668	11-03-2022	Sintje Kadji	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Buntulia Selatan, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Buntulia Selatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi sesuai SK Bupati Kab. Pohuwato, untuk kec. Duhiadaa hanya Desa Teratai
1669	11-03-2022	Sintje Kadji	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Buntulia Tengah, Kab. Pohuwato, Buntulia, Buntulia Tengah	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1670	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rekonstruksi Jalan	Desa Buntulia Utara, Kab. Pohuwato, Buntulia, Buntulia Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato
1671	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Desa Teratai, Kab. Pohuwato, Marisa, Teratai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Pohuwato
1672	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Bitila, Kab. Pohuwato, Marisa, Bulangita	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak karena bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
1673	11-03-2022	Sintje Kadji	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Buntulia Utara, Kab. Pohuwato, Buntulia, Buntulia Utara	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1674	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Hulawa, Kab. Pohuwato, Buntulia, Hulawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1675	11-03-2022	Sintje Kadji	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Hulawa, Kab. Pohuwato, Buntulia, Hulawa	Dinas Perhubungan	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
1676	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa Hulawa, Kab. Pohuwato, Buntulia, Hulawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1677	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kecamatan Buntulia, Kab. Pohuwato, Buntulia, Buntulia, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan kewenangan dinas pupr provinsi Gorontalo
1678	11-03-2022	Sintje Kadji	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Bulili, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Bulili	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan BSPS dapat diusulkan pada Balai Pelaksana Penyediaan Peerumahan (BP2P)
1679	11-03-2022	Sintje Kadji	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Bulili, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Bulili	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1680	11-03-2022	Sintje Kadji	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Botubilotahu, Kab. Pohuwato, Marisa, Batubilotahu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan BSPS dapat diusulkan pada Balai Pelaksana Penyediaan Peerumahan (BP2P)
1681	11-03-2022	Sintje Kadji	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Desa Botubilotahu, Kab. Pohuwato, Marisa, Batubilotahu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk pada lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Pohuwato
1682	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	DESA BATULORENG-UPOMELA, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1683	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	DESA BATULORENG KECAMATAN BONGOMEME, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1684	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA BATULORENG KECAMATAN BONGOMEME, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1685	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	LINGKUNGAN 5 KELURAHAN KAYU BULAN KECAMATAN LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1686	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	KAWASAN KUMUH KABUPATEN GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : Usulan 15 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 15 Unit Rumah Anggaran : 562500000	Usulan disetujui
1687	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	KECAMATAN BILUHU DAN KECAMATAN LIMBOTO, KECAMATAN LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1688	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	SELURUH WILAYAH KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1689	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	SE-KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1690	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	SE-KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1691	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	SE-KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1692	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	SE-KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1693	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	SE-KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1694	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	KECAMATAN BILUHU DAN KECAMATAN LIMBOTO, KECAMATAN LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1695	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	SE-KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1696	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA BATULORENG KECAMATAN BONGOMEME, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1697	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Bendung Irigasi	DESA YOSONEGORO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : Diterima dan akan di survey kembali oleh OPD Teknis dan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo. SDA Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 0	Usulan disetujui
1698	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	KELURAHAN BULOTA KECAMATAN LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1699	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	SE-KAB. GORONTALO, Kab. Gorontalo	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1700	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA ILOMANGGA KEC TABONGO, Kab. Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1701	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA YOSONEGORO KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1702	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	DESA PILOLALENGA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1703	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masalah Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DESA PILOLALENGA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Rekomendasi : Usulan Ini dapat diakomodir di Tahun 2023 sebab lokus program kegiatan Di Desa dan Pola Digunakan Pola Pemberdayaan Masyarakat Desa, namun Anggaran Menyesuaikan dengan Fiskal Daerah Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 30000000	Usulan disetujui
1704	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Kesehatan	Masalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	DESA TABUMELA KEC TILANGO, Kab. Gorontalo	Dinas Kesehatan		Stok Program
1705	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA TABUMELA KEC TILANGO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
1706	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA PADENGO KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1707	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA PILOLALENGA KEC DUNGHALIYO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1708	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA PILOLALENGA KEC DUNGHALIYO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1709	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA PILOLALENGA KEC DUNGHALIYO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1710	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA AYUHULA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1711	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KELURAHAN HUNGGALUWA KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1712	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	KELURAHAN HUNGGALUWA KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1713	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	KELURAHAN KAYUBULAN KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1714	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Bendung Irigasi	KELURAHAN KAYUBULAN KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran, lokasi DI. Bongo, Desa Suka Makmur, Kec. Tolangohula Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 200000000	Usulan disetujui
1715	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	KELURAHAN KAYUBULAN KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1716	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih kurangnya sarana dan prasarana irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Bendung Irigasi	KELURAHAN TENILO KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : di terima namun akan ditinjau kembali terkait anggaran dan kewenangannya Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 0	Usulan disetujui
1717	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KELURAHAN TENILO KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1718	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	KELURAHAN TENILO KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1719	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	KELURAHAN TENILO KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1720	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	KELURAHAN HEPUHULA KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1721	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	DESA HUNTU KEC BATUDAA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1722	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA HUNTU KEC BATUDAA, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1723	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	DESA DUMATI KEC TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1724	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Lingkungan Hidup	Masalah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	DESA DUMATI KEC TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Stok Program
1725	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DESA PENTADIO BARAT KEC TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1726	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA TILOTE KEC TILANGO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1727	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	DESA TILOTE KEC TILANGO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1728	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA TIMUATO, Kab. Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1729	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DESA TIMUATO, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1730	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA TIMUATO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1731	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA HUTABOHU KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1732	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA HUTABOHU KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1733	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA PILOBUHUTA KEC BATUDAA, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1734	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA PILOBUHUTA KEC BATUDAA, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1735	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA PONE KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1736	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA PONE KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1737	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DESA PONE KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1738	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA PONE KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1739	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	DESA TALUMELITO KEC TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1740	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	DESA TALUMELITO KEC TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1741	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA TALUMELITO KEC TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1742	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KELURAHAN HUNG GALUWA KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Bukan Penerima Hibah/Bansos Tahun 2022, Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
1743	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	KELURAHAN HUNG GALUWA KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1744	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DUSUN BULA DESA BATU LORENG, Kab. Gorontalo, Bongomeme, Batuloreng	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi
1745	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	KELURAHAN HEPUHULAWA KECAMATAN LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Hepuhulawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Kelurahan /Desa yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo, Untuk Kec. Limboto (Polohungo)
1746	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KELURAHAN HUNG GALUWA KECAMATAN LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Hunggaluwa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1747	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	LINGKUNGAN 4 KELURAHAN KAYU BULAN KECAMATAN LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo
1748	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jembatan	LINGKUNGAN 5 KELURAHAN KAYU BULAN KECAMATAN LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo
1749	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	KECAMATAN TILANGO, KECAMATAN TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Telaga Biru, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
1750	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	KECAMATAN BILUHU DAN KECAMATAN LIMBOTO, KECAMATAN LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5- 30 GT
1751	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	KELURAHAN HEPUHULAWA KECAMATAN LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Hepuhulawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1752	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA PENTADIO BARAT KECAMATAN TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Pentadio Barat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYRAKAT
1753	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	KELURAHAHN BULOTA KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Bulota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1754	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DUSUN II DESA YOSONEGORO KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Yosonegoro	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1755	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA YOSONEGORO KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Yosonegoro	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1756	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DESA YOSONEGORO KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Yosonegoro	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Tidak Disetujui
1757	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA PILOLALENGA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Pilolalenga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1758	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	DESA PILOLALENGA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Pilolalenga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan tidak masuk lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1759	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA PILOLALENGA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Pilolalenga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Kecamatan dan Desa Yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo yang menjadi kewenangan hanya 2 yaitu Kec. Limboto dan Kec. Telaga
1760	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	DESA PILOLALENGA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Pilolalenga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, dengan pertimbangan Pembangunan Jamban dapat diusulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
1761	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA PILOLALENGA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Pilolalenga	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1762	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanahan	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DESA TABUMELA KEC TILANGO, Kab. Gorontalo, Tilango, Tabumela	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak dikarenakan bukan kewenangan dinas PUPR. Merupakan kewenangan Kanwil BPN.
1763	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA TABUMELA KEC TILANGO, Kab. Gorontalo, Tilango, Tabumela	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan Kecamatan dan Desa yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai Sk Bupati Kab. Gtlo. untuk BSPS dapat diusulkan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P)
1764	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA ILOTIDEA KEC TILANGO, Kab. Gorontalo, Tilango, Ilotidea	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Stok ProgramDitolak	Ditolak, Tidak ditemukan saat verifikasi lapangan oleh OPD teknis

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1765	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA TABUMELA KEC TILANGO, Kab. Gorontalo, Tilango, Tabumela	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1766	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA PILOLALENGA KEC DUNGHALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Pilolalenga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1767	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA PILOLALENGA KEC DUNGHALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1768	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	DESA AYUHULA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Ayuhula	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1769	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	DESA AYUHULA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Ayuhula	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, TIDAK masuk Kawasan Strategis Provinsi
1770	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	DESA AYUHULA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Ayuhula	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak,kecamatan dan Desa yang diusulkan Tidak Masuk Pada Lokasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
1771	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA AYUHULA KEC DUNGALIYO, Kab. Gorontalo, Dungaliyo, Ayuhula	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, DINAS SOSIAL TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
1772	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	KELURAHAN KAYUBULAN KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak,Dengan pertimbangan Kelurahan /Desa yang diusulkan Tidak MASUK Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo, Untuk Kec. Limboto (Polohungo)

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1773	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	KELURAHAN TENILO KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Tenilo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak diluar kewenangan Pupr provinsi gorontalo
1774	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	KELUARAHAAN HEPUHULAWA KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Hepuhulawa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
1775	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Kepemudaan dan Olahraga	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula - Pelatihan dan fasilitasi	DESA DUMATI KEC TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Dumati	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1776	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA PENTADIO BARAT KEC TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Pentadio Barat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1777	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masalah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	ESA PENTADIO BARAT KEC TELAGA BIRU, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Pentadio Barat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Stok ProgramDitolak	Ditolak,Tidak ada dalam Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Admindukcapil (Renstra PD)
1778	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	DESA TILOTE KEC TILANGO, Kab. Gorontalo, Tilango, Tilote	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Bukan kewenangan
1779	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	DESA TILOTE KEC TILANGO, Kab. Gorontalo, Tilango, Tilote	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak,Dengan Pertimbangan usulan pembuatan Jamban dapat di usulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
1780	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA TIMUATO, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Timuato	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Stok ProgramDitolak	Ditolak,Bukan merupakan kewenangan dan keterbatasan fiskal

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1781	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pariwisata	Masalah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DESA TIMUATO, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Timuato	Dinas Pariwisata	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Usulan tidak sesuai dengan kewenangan dan lokasi prioritas pariwisata
1782	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Pertanahan	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DESA TIMUATO, Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Timuato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak dikarenakan bukan kewenangan dinas PUPR. Merupakan kewenangan BWS.
1783	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA HUTABOHU KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Hutabohu		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak,Wajib memperhatikan UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Kepmen 050/5889 Th. 2021, Dokren/prioritas/strategi/dan arah kebijakan Nasional dan Daerah, regulasi lainnya, serta ketersediaan fiskal daerah.
1784	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sosial	Masalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DESA HUTABOHU KEC LIMBOTO BARAT, Kab. Gorontalo, Limboto Barat, Hutabohu	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,DINAS SOSIAL, P3A TIDAK ADA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
1785	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan di Air payau dan Air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan atau maffaatn atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota - Benih	DESA PILOBUHUTA KEC BATUDAA, Kab. Gorontalo, Batudaa, Pilobuhuta	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Kegiatan yang sifatnya pemberdayaan budidaya ikan air tawar, bukan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi tetapi menjadi kewenangana kabupaten kota
1786	13-03-2022	Sitti Nurayin Sompie	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	KELUARAHAN HUNGGALUWA KEC LIMBOTO, Kab. Gorontalo, Limboto, Hungqaluwa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1787	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1788	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Buntulia Barat, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1789	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun Hiasa Desa Buntulia Barat, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1790	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	desa Buntulia Barat, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
1791	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Teratai, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1792	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Buntulia Tengah, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1793	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Bulili, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1794	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Teratai, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1795	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Buntulia Tengah, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1796	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Botubilatahu, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1797	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Desa Buntulia Tengah, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1798	10-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	Desa Bulili, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1799	10-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Desa Mekar Jaya - Dulomo, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1800	10-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Marisa Selatan, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1801	10-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Botubilatahu, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1802	10-03-2022	Sri Masri Sumuri	Tenaga Kerja	Masalah Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Desa Marisa Selatan, Kab. Pohuwato	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1803	11-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa pohuwato Timur, Kab. Pohuwato	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1804	11-03-2022	Sri Masri Sumuri	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Dulomo, Kab. Pohuwato	Dinas Perhubungan		Stok Program
1805	14-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Desa Soginti, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1806	14-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Sepanjang Jalan Desa Soginti, Kab. Pohuwato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1807	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Desa, Kab. Pohuwato	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi : - Usulan 20 unit namun sesuai kuota dan baseline anggaran yang tersedia dan berproses sesuai mekanisme teknis OPD Koefisien : 20 Unit Rumah Anggaran : 750000000	Usulan disetujui
1808	19-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alamat, Kab. Pohuwato	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Stok Program
1809	12-04-2022	Sri Masri Sumuri	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Alamat, Kab. Pohuwato			Validasi Mitra Bappeda
1810	12-04-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Alamat, Kab. Pohuwato			Validasi Mitra Bappeda
1811	12-04-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Alamat, Kab. Pohuwato			Validasi Mitra Bappeda

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1812	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Buntulia Tengah, Kab. Pohuwato, Buntulia, Buntulia Tengah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Dinas Sosial, P3A Provinsi tidak ada lagi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
1813	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Buntulia Barat, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Buntulia Barat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi
1814	09-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Pohuwato Timur, Kab. Pohuwato, Marisa, Pohuwato Timur	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Bukan Kewenangan Dinas Sosial, P3A Provinsi
1815	10-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU - Pembangunan RKB pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Desa Iloheluma, Kab. Pohuwato, Patilanggio, Iloheluma		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak,Terkait Permohonan Bantuan RKB Perpustakaan Madrasah Wajib memperhatikan regulasi yang bersesuaian, kewenangan, Dokren/prioritas/strategi/dan arah kebijakan Nasional/Daerah, ketersediaan fiskal daerah
1816	10-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Dulomo, Kab. Pohuwato, Patilanggio, Dulomo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Stok ProgramDitolak	Ditolak,Tidak ditemukan saat verifikasi lapangan oleh OPD
1817	10-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Teratai, Kab. Pohuwato, Marisa, Teratai	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Dinas Sosial, P3A tidak ada lagi program KUBE
1818	11-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Desa Teratai, Kab. Pohuwato, Marisa, Teratai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1819	11-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Desa Milangodaa, Kab. Pohuwato, Popayato Timur, Milangodaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1820	11-03-2022	Sri Masri Sumuri	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Desa Palopo, Kab. Pohuwato, Marisa, Palopo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi.CIPTA KARYA
1821	11-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Buntulia Barat, Kab. Pohuwato, Duhiaadaa, Buntulia Barat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Pada Tahun 2023 tidak ada program bantuan KUBE
1822	11-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Teratai, Kab. Pohuwato, Marisa, Teratai	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,pada tahun 2023 tidak ada program bantuan KUBE
1823	14-03-2022	Sri Masri Sumuri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Desa Milangodaa, Kab. Pohuwato, Popayato Timur, Milangodaa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1824	14-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Botubilatahu, Kab. Pohuwato, Marisa, Batubilotahu	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,PADA TAHUN 2023 TIDAK ADA LAGI PROGRAM BANTUAN KUBE
1825	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Kebudayaan	Masalah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat - Honor Pemangku Adat	Desa Buntulia Tengah, Kab. Pohuwato, Buntulia, Buntulia Tengah	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Tidak Disetujui
1826	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Palopo, Kab. Pohuwato, Marisa, Palopo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1827	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Semua Desa, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak,Dengan pertimbangan Usulan Bantuan Jamban dapat diteruskan ke Balai Prasaranan Permukiman Wilayah (BPPW)

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1828	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Kebudayaan	Masalah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat - Honor Pemangku Adat	Semua Desa, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Tidak Disetujui
1829	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	Semua Desa, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
1830	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Desa Buntulia Tengah, Kab. Pohuwato, Buntulia, Buntulia Tengah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak,Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang diusulkan Tidak Masuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Pohuwato
1831	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Buntulia Tengah, Kab. Pohuwato, Buntulia, Buntulia Tengah	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1832	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Buntulia Barat, Kab. Pohuwato, Duhiadaa, Buntulia Barat	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1833	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Palopo, Kab. Pohuwato, Marisa, Palopo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1834	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Teratai, Kab. Pohuwato, Marisa, Teratai	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1835	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Marisa Selatan, Kab. Pohuwato, Marisa, Marisa Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1836	15-03-2022	Sri Masri Sumuri	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Desa, Kab. Pohuwato, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak,BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1837	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	kelurahan buladu, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekomendasi : diterima sudah masuk dalam baseline anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Usulan disetujui
1838	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Lingkungan III Kelurahan Pilolodaa, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1839	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Lingkungan II Kelurahan Pilolodaa, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1840	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	KELURAHAN WUMIALO, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1841	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	jl. andalas kota gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1842	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	pasar sentral kelurahan limba u2, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1843	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penataan Bangunan dan Lingkungan	kota gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1844	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kelurahan Buliide, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1845	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Kelurahan Piloodaa, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1846	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	kelurahan Buladu, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1847	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	kelurahan Iekobalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1848	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	KEL. LEKOBALO-TUALANGO, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1849	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	jl. raja eyato kota gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1850	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kelurahan tenilo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1851	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Lingkungan 1, Kelurahan Tenilo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1852	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	PONDOK PESANTREN AL HUDA KOTA GORONTALO, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : Dapat diakomodir dengan catatan : 1. Melengkapi proposal dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan teknis;; 2. Lolos tahapan verifikasi; 3. Jika Merupakan Penerima Hibah Bansos di Tahun 2022 maka akan dipertimbangkan melalui Verifikasi Lapangan. Koefisien : 1 PONPES Anggaran : 0	Usulan disetujui
1853	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	MADRASAH ALIYAH AL-KHAIRAT GORONTALO, Kota Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1854	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Kota gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1855	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kelurahan Lekobalo, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1856	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	SEPANJANG JALAN LAPODU kelurahan DEMBE, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1857	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Kec. Sipatana Kota gorontalo, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1858	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	Lorong Celebebes, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1859	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	LORONG YAYU KEL. LIMBA U2, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1860	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	JL. YAHDIN KEL. SIPATANA, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1861	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	JL. KANCIL KEL. BULIIDE, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1862	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	PONPES AL-HUDA KEL. LIMBA B, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1863	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	POMPES ALH KEL. KEL. TAMALATE, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1864	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	JL. AL ADHA V KEL. LIMBA B, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1865	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	JL. ISLAMIC CENTER KEL. LILUWO, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1866	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	PONPES (RUKYA) KEL. BULADU, Kota Gorontalo	Dinas Perhubungan		Stok Program
1867	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	KELURAHAN BULADU, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1868	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	LORONG CELEBES KELURAHAN LIMBA U II, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1869	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	LORONG YAYU KELURAHAN LIMBA U II, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1870	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	KELURAHAN LIMBA B, Kota Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1871	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	kelurahan dulalowo, Kota Gorontalo, Kota Tengah, Kota Tengah, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1872	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	kelurahan buladu, Kota Gorontalo, Kota Barat, Buladu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun bukan merupakan tuisi atau kewenangan bidang SDA
1873	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kelurahan Buladu, Kota Gorontalo, Kota Barat, Buladu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Pembangunan jamban dapat diusulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
1874	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Kelurahan Buladu, Kota Gorontalo, Kota Barat, Buladu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun Drainase lingkungan yang lokasinya di Kota Gorontalo bukan merupakan tuisi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
1875	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kadin Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Utara	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1876	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Sosial	Masalah Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Dulalowo Timur, Kota Gorontalo, Kota Tengah, Dulalowo Timur	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1877	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	jl. sudirman kota gorontalo, Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	: ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kota Gorontalo
1878	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	PONPES ALKHAIRAAT KEL. TAMALATE, Kota Gorontalo, Kota Timur, Kota Timur, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kota Gorontalo
1879	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	KEL. DULALOWO TIMUR, Kota Gorontalo, Kota Tengah, Dulalowo Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kota Gorontalo
1880	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pelebaran Jalan Menuju Standar	LORONG BNI KELURAHAN WUMIALO, Kota Gorontalo, Kota Tengah, Wumialo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kota Gorontalo
1881	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	KEL. MOLOSIPAT, Kota Gorontalo, Kota Barat, Molosipat W	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun saluran air yang lokasinya di Kota Gorontalo bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1882	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	JL. POTANGA KEL. BULADU, Kota Gorontalo, Kota Barat, Buladu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun saluran air yang lokasinya di Kota Gorontalo bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
1883	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	KEL. DEMBE I, Kota Gorontalo, Kota Barat, Dembe I	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun saluran air yang lokasinya di Kota Gorontalo bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
1884	11-03-2022	Sulyanto Pateda	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	KLURAHAN TENILO, Kota Gorontalo, Kota Barat, Tenilo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena walaupun merupakan Kewenangan Kawasan Strategis Provinsi namun saluran air yang lokasinya di Kota Gorontalo bukan merupakan tusi atau kewenangan bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi.CIPTA KARYA
1885	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1886	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1887	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1888	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1889	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1890	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Dusun, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1891	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1892	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pertanian	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1893	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1894	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1895	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1896	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1897	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1898	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pertanian	Masalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1899	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pertanian		Stok Program
1900	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1901	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1902	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Alamat, Kab. Gorontalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1903	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1904	12-04-2022	Usman Tahir Rajak	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Alamat, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1905	12-04-2022	Usman Tahir Rajak	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	Alamat, Kab. Gorontalo			Validasi Mitra Bappeda
1906	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun, Kab. Gorontalo, Asparaga, Tiohu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo
1907	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun, Kab. Gorontalo, Mootilango, Pilomonu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo
1908	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dusun, Kab. Gorontalo, Mootilango, Paris	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Kab. Gorontalo

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1909	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dusun, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Bongongoayu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan usulan lokasi tidak masuk pada lokasi KSP . usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo
1910	10-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	Dusun, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Bongongoayu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo
1911	11-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jembatan	Alamat, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Diloniyohu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo
1912	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo, Mootilango, Paris	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1913	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	Alamat, Kab. Gorontalo, Pulubala, Molalahu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi/Strategis dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo
1914	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Alamat, Kab. Gorontalo, Mootilango, Mootilango, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1915	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU - Pembangunan RKB pada satuan pendidikan menengah dan khusus	Alamat, Kab. Gorontalo, Mootilango, Pilomonu		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Terkait pembuatan ruang kelas baru MI Nurul Iman Wajib memperhatikan regulasi yang bersesuaian, Dokren/prioritas/strategi/dan arah kebijakan Nasional/Daerah, ketersediaan fiskal, serta OPD dan pilihan belanja yang bersesuaian.
1916	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Alamat, Kab. Gorontalo, Tiohu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan usulan dapat diterukan ke Balai Prasaranan Permukiman Wilayah (BPPW)
1917	12-03-2022	Usman Tahir Rajak	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Alamat, Kab. Gorontalo, Boliyohuto, Potanga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan bantuan jamban dapat diusulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
1918	12-04-2022	Usman Tahir Rajak	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masalah Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Alamat, Kab. Gorontalo, Asparaga, Tiohu	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Bantuan sumur bor sudah bukan kewenangan, pada urusan kegeologian
1919	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	DESA TINELO KEC. SUWAWA, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
1920	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Pertanian	Masalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	DESA BUTU KEC. TILONGKABILA, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1921	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	DESA BUTU, KEC. TILONGKABILA, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi
1922	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu - Bantuan Listrik	DESA BONGOHULAWA. KEC. TILONGKABILA, Kab. Bone Bolango	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi		Stok Program
1923	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Pertanian	Masalah Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DESA HUANGOBOTU. KEC. KABILA BONE, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
1924	15-04-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Desa Tinemba, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango			Validasi Mitra Bappeda
1925	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	DESA MOUTONG KECAMATAN TILONGKABILA, Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Bone Bolango
1926	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	DESA MOUTONG, TILONGKABILA. BONE BOLANGO, Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Dengan pertimbangan usulan bukan kepentingan strategis daerah provinsi. usulan ini akan diinformasikan ke pemerintah Kabupaten Bone Bolango

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1927	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) - Pembangunan USB pendidikan menengah dan khusus	DESA BUBU BARU. KEC. SUWAWA, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Bube Baru		Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Wajib memperhatikan UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Kepmen 050/5889 Th. 2021, Dokren/prioritas/strategi/dan arah kebijakan Nasional dan Daerah, regulasi lainnya, serta ketersediaan fiskal daerah.
1928	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	DESA BUBE BARU KECAMATAN SUWAWA, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Bube Baru	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, BUKAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL, P3A PROVINSI GORONTALO
1929	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jembatan	DESA HELUMO KEC. SUWAWA, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Helumo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	ditolak karena bukan merupakan Kewenangan Jalan Provinsi atau Jalan Strategis, dan akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Bone Bolango
1930	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DESA HELUMO KECAMATAN SUWAWA DAN DESA HUANGOBOTU KECAMATAN KABILA BONE, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Helumo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan pertimbangan Desa yang diusulkan Tidak MASuk Pada Kawasan Kumuh Kewenangan provinsi, Sesuai SK Bupati Kab. Bonebol
1931	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	DESA HELUMO KE. SUWAWA DAN DESA HUANGOBOTU KEC. KABILA BONE, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Helumo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1932	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	DESA BUTU KEC. TILONGKABILA, Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Butu	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1933	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Motor dan Cool Box	DESA BONGOHULAWA KEC. TILONGKABILA, Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Bongohulawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Belum ada by Name by Addres (BNBA) nya
1934	12-03-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	DESA HUANGOBOTU KECAMATAN KABILA BONE, Kab. Bone Bolango, Kabila Bone, Huangobotu	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. Perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sementara provinsi pada Kapal ukuran 5-30 GT
1935	14-04-2022	Yeyen Saptiani Sidiki, SE, MM	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masalah Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Kabila Bone, Huangobotu	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Bantuan sumur bor sudah bukan kewenangan, pada urusan kegeologian
1936	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Normalisasi/Restorasi Sungai	desa pangi, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1937	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa mootayu, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
1938	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	desa mootayu, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1939	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa toto selatan, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1940	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial - Beasiswa umum dan khusus	desa toto selatan, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Verifikasi OPD Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1941	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pertanian	Masalah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	desa berlian, Kab. Bone Bolango	Dinas Pertanian		Stok Program
1942	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jalan	desa berlian, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1943	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	desa molintogupo, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (MASJID ISTIQOMAH), Dapat diakomodir jika memenuhi persyaratan Koefisien : 1 MASJID Anggaran : 0	Usulan disetujui
1944	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	desa libungo, Kab. Bone Bolango	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi : (MASJID AZ-ZIKRA) Dapat Diakomodir Jika Persyaratan Terpenuhi Koefisien : 1 mesjid Anggaran : 0	Usulan disetujui
1945	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa tolomato, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program
1946	09-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	desa helumo, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
1947	09-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	desa ulanta, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
1948	09-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	desa huluduotamo, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
1949	09-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	desa toto selatan, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
1950	09-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Lampu Penerangan Jalan Umum	desa molintoggupo, Kab. Bone Bolango	Dinas Perhubungan		Stok Program
1951	19-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Kesehatan	Masalah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	desa tinelo, Kab. Bone Bolango	Dinas Kesehatan		Stok Program
1952	19-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	desa tolomato, Kab. Bone Bolango	Dinas Kesehatan		Stok Program
1953	19-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pendidikan	Masalah PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS - Insentif GTK non ASN pada satuan pendidikan menengah dan khusus	SMK 1 Bone Raya, Kab. Bone Bolango	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga		Stok Program
1954	19-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	desa kopi, Kab. Bone Bolango	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Stok Program

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1955	14-04-2022	Yuriko Kamaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Jl. Irigasi, Kab. Bone Bolango			Validasi Mitra Bappeda
1956	14-04-2022	Yuriko Kamaru, SH	Sekretariat Daerah	Masalah Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual - Hibah tempat ibadah, Majelis Taklim, TPQ, Pondok Pesantren	Jl. Yusuf Hasiru, Kab. Bone Bolango			Validasi Mitra Bappeda
1957	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Kelautan dan Perikanan	Masalah Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pembangunan Perahu Fiber	desa mootayu, Kab. Bone Bolango, Bone Raya, Mootayu	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Pengadaan Perahu di sesuaikan dengan kewenangan. perahu menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
1958	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	desa mootayu, Kab. Bone Bolango, Bone Raya, Mootayu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, Usulan pembuatan jamban dapat di usulkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
1959	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa bilungala, Kab. Bone Bolango, Bonepantai, Bilungala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra Bappeda Ditolak	Ditolak, dengan pertimbangan bahwa Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Bone Bolango yang menjadi kewenangan hanya 2 kecamatan yaitu Kec. Kabila Kel. Pauwo dan Kel. Padengo, Kec. Suwawa kel. Bube
1960	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) - Pembangunan USB pendidikan menengah dan khusus	desa bilungala, Kab. Bone Bolango, Bonepantai, Bilungala	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Verifikasi OPD Provinsi Ditolak	Ditolak, Tidak Disetujui

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1961	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa helumo, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Helumo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1962	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa tinelo, Kab. Bone Bolango, Suwawa, Tinelo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan pengadaaan rumah melalui program BPS dapat diusulkan pada balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) melalui satker SNVT
1963	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa toto selatan, Kab. Bone Bolango, Kabila, Kabila, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1964	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masalah Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	desa molintogupo, Kab. Bone Bolango, Suwawa Selatan, Molintogupo	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi OPD ProvinsiDitolak	Ditolak, Usulan tidak mencantumkan nama penerima dan alamat yang jelas
1965	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pemeliharaan Rutin Jalan	desa molintogupo, Kab. Bone Bolango, Suwawa Selatan, Molintogupo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, - Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017 - Tidak Masuk pada Kawasan Strategis Provinsi

**Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dalam aplikasi SIPD beserta status verifikasi**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	ALAMAT	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1966	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Rehabilitasi Jembatan	dusun III, Kab. Bone Bolango, Suwawa Tengah, Tolomato	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, - Rehabilitasi dan peningkatan Jalan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017 - Tidak Masuk pada Kawasan Strategis Provinsi
1967	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pendidikan	Masalah PEMBANGUNAN SAPRAS DAN UTILITAS SEKOLAH - Pembangunan Pagar pada satuan pendidikan menengah dan khusus	desa tolomato, Kab. Bone Bolango, Suwawa Tengah, Tolomato	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, wajib memperhatikan UU 23 Tahun 2014, Kepmen 050/5889 Th. 2021, dan regulasi lainnya yang bersesuaian
1968	08-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	desa tolomato, Kab. Bone Bolango, Suwawa Tengah, Tolomato	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, Dengan Pertimbangan Kecamatan dan Desa yang di usulkan tidak masuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sesuai SK Bupati Bone Bolango yang menjadi kewenangan hanya 2 kecamatan yaitu: Kec. Kabila Kel. Pauwo dan Kel. Padengo Kec. Suwawa kel. Bube
1969	19-03-2022	Yuriko Kamaru, SH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masalah Pembangunan Jembatan	desa bulontala timur, Kab. Bone Bolango, Suwawa Selatan, Bulontala Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Validasi Mitra BappedaDitolak	Ditolak, '- Rehabilitasi dan peningkatan Jalan dan Jembatan TIDAK Sesuai Kewenangan provinsi/ SK Jalan Provinsi Nomor 383/18/XI/2017 - Tidak Masuk pada Kawasan Strategis Provinsi+S5



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan adalah pedoman yang berfungsi untuk mengarahkan rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan. Pada hakekatnya, Arah Kebijakan merupakan dimensi ruang dan waktu dalam mengimplementasikan rumusan Strategi yang ditentukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Arah kebijakan berfungsi untuk memperjelas kapan suatu Sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, dengan pemilihan Strategi yang tepat, di lokasi yang tepat pula.

Arah Kebijakan untuk pembangunan Kabupaten dan Kota, agar senantiasa disinkronkan dengan arah pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. Keselarasan prioritas pembangunan dan strategi cakupan nasional dan provinsi supaya menjadi induk dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Untuk tahun 2023, rencana pembangunan pemerintah pusat mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan penguatan pada 7 Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional).

Adapun rencana pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tema “Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik”, dengan 4 (Empat) Unsur Tema sebagai penjabarannya, yakni:

- Peningkatan Ekonomi;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- Tata Kelola Pemerintahan

Elaborasi fokus pembangunan skala nasional dan provinsi tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten dan Kota.

Hal lain yang menjadi poin penting dalam kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota adalah pembangunan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.

Dalam rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang merupakan arahan dalam rancangan RTRW Provinsi Gorontalo, meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

5.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan lindung di Gorontalo bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Gorontalo.



Rencana polar uang Kawasan lindung Provinsi Gorontalo meliputi:

1. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan di Kabupaten/Kota, melalui
 - Penetapan kawasan hutan lindung;
 - Pemantauan dan pengendalian kawasan;
 - Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
 - Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
 - Pengawasan pengelolaan kawasan.
2. Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, seperti kawasan resapan air di Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo
3. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Perlindungan kawasan sempadan pantai, Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar danau, dan Kawasan sempadan mata air, dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau melalui perlindungan dan pelestarian RTH Publik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
4. Perlindungan dan pelestarian Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi :
 - a. Kawasan suaka alam, suaka alam laut, dan perairan lainnya di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
 - b. Kawasan suaka margasatwa : Kawasan Suaka Margasatwa Nantu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara.
 - c. Kawasan cagar alam dan cagar alam laut : Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Cagar Alam Tangale, di Kabupaten Gorontalo.
 - d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
 - e. Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut : TN. Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - f. Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - g. Kawasan cagar alam geologi di Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo
5. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan lindung cagar alam geologi : Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo
6. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi Cagar Alam Mas Popaya Raja (II/B/3) di Kabupaten Gorontalo Utara
7. Perlindungan Kawasan Rawan Bencana
 - a. Kawasan Rawan Tanah Longsor



- Pengamanan dan mitigasi bencana : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang
 - Pengamanan dan mitigasi bencana : Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - c. Kawasan Rawan Banjir
 - Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - d. Kawasan Rawan Gempa Bumi
 - Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir : Di kawasan laut pantai Utara dan kawasan laut pantai Selatan
 - e. Kawasan Yang Terletak Di Zona Patahan Aktif
 - Pengamanan dan mitigasi bencana : Sesar/patahan Gorontalo yang merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik di Kota Gorontalo , Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - f. Kawasan Rawan Tsunami
 - Pengamanan dan mitigasi bencana : Di sepanjang pantai selatan yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan sepanjang pantai utara di Kabupaten Gorontalo Utara
8. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah
- a. Kawasan Imbuhan Air Tanah : CAT Pinogu, CAT Tombulitato, CAT Soginti, CAT Popayato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Marisa, dan CAT Bone
 - b. Kawasan Sekitar Mata Air di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
9. Perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung lainnya, meliputi :
- a. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa Atau Biota Laut, yaitu Kawasan Teluk Tomini
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah, yaitu Kawasan konservasi danau limboto di Kabupaten Gorontalo, Kawasan konservasi danau perintis di Kabupaten Bone Bolango, Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango, Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo

5.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

1. Pengembangan dan pematapan Kawasan Peruntukan Hutan produksi, yang meliputi :
 - a. Kawasan hutan Produksi Terbatas : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara



- b. Kawasan hutan Produksi Tetap : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
- c. Kawasan hutan Produksi Peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat : Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
3. Pengembangan dan pelestarian Kawasan Peruntukan Pertanian
 - a. Pertanian Lahan Basah : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - b. Pertanian Lahan Kering : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - c. Hortikultura : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
4. Pengembangan dan pemantapan Kawasan peruntukan perkebunan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
5. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Perikanan
 - a. Kawasan Budidaya Perikanan
 - Kawasan Budidaya air tawar : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - Kawasan Budidaya Air Payau : Pesisir selatan (Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato; Pesisir utara di Kabupaten Gorontalo Utara
 - Kawasan Budidaya Perikanan Laut : Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - b. Kawasan Perikanan Tangkap : Kawasan Utara (Laut Sulawesi), dan Kawasan Selatan (Teluk Tomini)
 - c. Kawasan pengolahan hasil perikanan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - d. Kawasan Minapolitan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
 - e. Kawasan Peternakan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara
6. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Pertambangan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango
7. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Industri :
 - Kawasan industri Gopandang (KEK)
 - Industri perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara



- Industri pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Gorontalo
 - Industri peternakan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango
 - Industri pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Pohuwato
8. Pengembangan dan pematapan Kawasan Peruntukan Pariwisata
- a. Kawasan Strategis pariwisata Nasional :
 - Pentadio Resort (Kabupaten Gorontalo),
 - Museum Pendaratan Soekarno (Kabupaten Gorontalo)
 - Benteng Otanaha (Kota Gorontalo),
 - Pantai dan Taman Bawah Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango),
 - Pantai Botutonuo (Kabupaten Bone Bolango),
 - Pantai Botubarani (Kabupaten Bone Bolango)
 - Pantai Karang Citra/ Blue Marline (Kota Gorontalo)
 - b. Kawasan Pariwisata Unggulan Provinsi
 - Benteng Otanaha (Kota Gorontalo)
 - Museum Pendaratan Soekarno (Kabupaten Gorontalo)
 - Kawasan Air Panas Lombongo (Kabupaten Bone Bolango)
 - Pantai dan Taman Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango)
 - Suaka Margasatwa Hutan Nantu (Kabupaten Boalemo)
 - Desa Wisata Torosiaje (Kabupaten Pohuwato)
 - Pentadio Resort (Kabupaten Gorontalo)
 - Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara)
9. Pengembangan dan pematapan Kawasan Permukiman
- a. Kawasan permukiman perkotaan :
 - Kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 - Kawasan permukiman di PKN, PKW, dan PKL yang padat penduduknya; dan
 - Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka dan di tempat ketinggian.
 - b. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan :
 - Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan
 - Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung).
 - c. Kawasan Permukiman Pada Kawasan Khusus
 - kawasan permukiman yang tumbuh akibat perkembangan infrastruktur;
 - kawasan permukiman yang tumbuh akibat kegiatan sentra ekonomi;
 - kawasan industri yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja



industri;

- kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara;
- kawasan nelayan yang mengalami kerawanan terhadap bencana kebakaran, rawan terhadap terpaan gelombang termasuk tsunami dan angin ribut;
- kawasan khusus lainnya

10. Pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukan lainnya

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara
- b. Kawasan kepolisian negara : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
- c. Kawasan untuk kesehatan masyarakat : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
- d. Kawasan Pendidikan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara

5.3 Pengembangan dan pemantapan Kawasan Strategis Provinsi

1. Kawasan Strategis Nasional yang Ditetapkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Yang Terkait Dengan Wilayah Provinsi :
 - KSN Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara (II/E/2);
 - KSN Pertumbuhan Ekonomi / Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo – Paguyuman – Kwandang (II/A/2)
 - KSN Lingkungan Hidup Danau Limboto (II/B/2)
2. Usulan Kawasan Strategis Nasional Provinsi (KSNp) : KSNp Tibawa • KSNp Taman Nasional Nani Wartabone
3. Kawasan Strategis Provinsi :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya,
 - KSP Paguyaman Wonosari,
 - KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan sekitarnya;
 - KSP Pariwisata Teluk Tomini ,
 - KSP terpadu industri, perdagangan dan jasa, simpul transportasi Tibawa;
 - KSP terpadu pelabuhan, peti kemas dan pergudangan Anggrek; KSP Minapolitan



Kwandang

- b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya :
Kawasan Wisata Terpadu Telaga – Gorontalo – Tapa
- c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan :
 - Suaka Margasatwa Nantu
 - Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
 - DAS Limboto- Bolango-Bone



BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023 menjabarkan rencana Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada tahun 2023. Komposisi pendanaan dari Program dan Kegiatan merupakan elaborasi lebih lanjut dari fokus pembangunan yang tergambar pada Tema beserta Unsur Tema RKPD Tahun 2023.

Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta Pagu yang merupakan hasil perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah di masing-masing Perangkat Daerah.

Pada akhir proses sebelum penetapan RKPD dapat dijelaskan bahwa terjadi defisit pendanaan dimana pendanaan Program/Kegiatan pada RKPD melebihi proyeksi belanja pada Bab III. Hal ini dikarenakan masuknya belanja hibah dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak dimana daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada tahun 2023. Adapun anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, pendanaan perencanaan pembangunan Tahun 2023 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dicermati pada Tabel sebagai berikut:



Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023

Table with columns: Kode, Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target Akhir Periode RPJMD, Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021, Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022, Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Target 2023, Pagu Indikatif, Lokasi, Sumber Dana, Prioritas Nasional/Provinsi/Daerah), Kelompok Sasaran, Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (Target, Pagu Indikatif), and Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	435,023,000	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	11 Paket	364,113,054	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	4,418,713,350						12 Laporan	4,418,711,473	
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,418,713,350	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	12 Laporan	4,418,711,473	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah/Persentase warga negara usia 4-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus/Rata-rata kemampuan literasi SM dan Dikus/Rata-rata kemampuan numerasi SM dan Dikus	100/100/2,1,8 %/nilai/nilai		0 %/nilai/nilai	100/100/2,1,8 %/230,984,849,658							100/100/2,1,8 %/381,317,037,859		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 %		0 %	100 %	113,777,042,010						100 %	210,638,205,552	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	1,397,856,127	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	4 Unit	445,500,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	100,000,000	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	2 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				348 Peserta didik	42,274,786,500	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	348 Peserta didik	140,058,304,785	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				780 Peserta Didik	472,577,933	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	780 Peserta Didik	472,579,022	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				980 Orang	17,585,377,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	980 Orang	17,585,377,210	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				107 Orang	191,123,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	107 Orang	191,123,035	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				136 Satuan Pendidikan	57,912,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	136 Satuan Pendidikan	57,912,500	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				70 Satuan Pendidikan	51,603,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	70 Satuan Pendidikan	51,603,510,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	93,899,000	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	3 Dokumen	93,899,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 %		0 %	100 %	100,267,710,348						100 %	155,798,789,783	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	525,000,000	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	2 Unit	525,000,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	108,513,400	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	1 Ruang	108,513,400	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	191,709,000	Kab. Bone Bolango, Bone Raya, Laut Biru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	1 Unit	191,709,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				73 Paket	49,145,004,200	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	73 Paket	49,145,184,200	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2000 Peserta didik	1,454,030,500	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	2000 Peserta didik	1,455,070,500	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				371 Peserta Didik	395,447,800	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	371 Peserta Didik	395,447,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				843 Orang	15,655,487,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	843 Orang	15,655,487,592	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 121 Orang	186,872,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	0 Orang 121 Orang	186,872,993	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				136 Satuan Pendidikan	32,605,645,098	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	136 Satuan Pendidikan	88,105,505,098	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus	100 %		0 %	100 %	16,940,097,300					100 %	16,880,042,524		
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik 250 Peserta Didik	9,678,013,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	0 Peserta Didik 250 Peserta Didik	9,587,953,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.03 49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				175 Orang	3,365,734,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	175 Orang	3,365,734,295	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1 01 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				8 Satuan Pendidikan	3,896,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	8 Satuan Pendidikan	3,896,355,229	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tersusunnya kurikulum SM dan Dikus serta tersedianya buku teks pelajaran	12 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	93,844,500						3 Dokumen	93,999,932	
1 01 03 1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	100 %		0 %	100 %	93,844,500						100 %	93,999,932	
1 01 03 1.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya				40 Orang	93,844,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	40 Orang	93,999,932	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						5,968,012,162							5,968,012,365	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	2,2 %		0 %	1 %	948,012,614						1 %	948,012,508	
2 19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	7168 Orang		0 Orang	1792 Orang	781,059,614						1792 Orang	781,059,331	
2 19 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Kegiatan Paskibraka				1 Kegiatan	781,059,614		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	1 Kegiatan	781,059,331	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	480 Orang		0 Orang	120 Orang	166,953,000						120 Orang	166,953,177	
2 19 02 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Seleksi PPAN, PPAP, Kirab Pemuda, Pemuda Kreatif dan KPN Nasional dan Internasional				120 Orang	166,953,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	120 Orang	166,953,177	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	8 %		0 %	6 %	5,019,999,548						6 %	5,019,999,857	
2 19 03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Da Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Da Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Da	% % %	% % %	1 % 6 % 20 %		1,460,729,748					1 % 6 % 20 %	1,460,729,750		
2 19 03	1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan			1 Unit	1,460,729,748	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	1 Unit	1,460,729,750	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2 19 03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	5368 Atlet	0 Atlet	1342 Atlet	891,768,500					1342 Atlet	891,768,728		
2 19 03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi			1342 Atlet	891,768,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	1342 Atlet	891,768,728	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2 19 03	1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2,667,501,300					1 Dokumen	2,667,501,379		
2 19 03	1.04	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			2 Dokumen	2,667,501,300	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	2,667,501,379	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	22						4,564,031,264						3,064,016,975		
2	22	02					440,266,436					24 Objek	440,266,712		
2	22	02	1.02				440,266,436					5 Objek 6 Lembaga	440,266,712		
2	22	02	1.02	01				5 Objek	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kebudayaan dan Agama	0	5 Objek	181,709,473	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2	22	02	1.02	02				5 Laporan	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kebudayaan dan Agama	0	5 Laporan	258,557,239	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2	22	03					946,863,534	2/100 Lembaga/%					2/100 Lembaga/%	946,863,820	
2	22	03	1.01				946,863,534	3 Lembaga 30 Orang					3 Lembaga 30 Orang	946,863,820	
2	22	03	1.01	03			946,863,534	3 Lembaga	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	3 Lembaga	946,863,820	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2	22	05					391,798,417	3/100 CB/%					3/100 CB/%	391,783,566	
2	22	05	1.01				169,951,949	3 Objek					3 Objek	170,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 05 1.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				3 Objek	79,965,198	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	3 Objek	80,000,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2 22 05 1.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	89,986,751	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	3 Objek	90,000,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2 22 05 1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	12 Objek		0 Objek	3 Objek	221,846,468					3 Objek	221,783,566		
2 22 05 1.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				5 Objek	150,008,600	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kebudayaan dan Agama	0	5 Objek	150,000,000	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2 22 05 1.02 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	71,837,868	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kebudayaan dan Agama	0	30 Orang	71,783,566	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Penyelenggaraan Museum Provinsi (Persentasi Jumlah Kunjungan ke Museum)	100 %		0 %	100 %	2,785,102,877					100 %	1,285,102,877		
2 22 06 1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi	40 Unit		0 Unit	10 Unit	2,785,102,877					10 Unit	1,285,102,877		
2 22 06 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				10 Unit	1,753,199,836	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	10 Unit	253,199,836	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2 22 06 1.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				50 Orang	718,311,080	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	50 Orang	718,311,080	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2 22 06 1.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				22 Unit	313,591,961		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	22 Unit	313,591,961	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						88,449,966,415						0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan kantor	%		%	100 %	24,598,281,463						100 %	0	
1 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"100% Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan dilaksanakan sesuai standar " Presentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	1,157,252,400						100 % 100 %	0	
1 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	526,960,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	630,292,400				Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	0 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"100% Penyelenggaraan admistrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan sesuai standar " Presentase Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi serta Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	19,640,516,223						100 % 100 %	0	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ Bulan	19,431,100,223				Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	140 Orang/ Bulan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	111,960,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	97,456,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	1 Laporan	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"100% pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah terlaksana sesuai standar " Presentase Tersedianya Penatausahaan Kepagawaian di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	80,640,000						100 % 100 %	0	
1 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	80,640,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"100% pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan sesuai standar " Presentase Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Umum di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	1,448,044,840						100 % 100 %	0	
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,403,044,840				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	45,000,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"100% unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diadakan sesuai standar " Presentase Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	516,850,000						100 % 100 %	0	
1 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	516,850,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"100% kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai standar " Tersedianya jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	100 % 16 laporan		0 % 0 laporan	100 % 4 laporan	1,326,210,000						100 % 4 laporan	0	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	434,610,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	891,600,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"100% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan pemeliharaan sesuai standar " Presentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	428,768,000						100 % 100 %	0	
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	54,500,000						2 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	268,518,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	105,750,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100% implementasi tahapan pemenuhan SPM Provinsi dan pelaksanaan kewenangan serta fungsi Provinsi dalam pemenuhan dan Kabupaten Kota dan atau Layannan Kesehatan Lainnya denagn memaksimalkan sistem informasi kesehatan Presentase Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	60,386,918,407						100 % 100 %	0	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100% aktifitas pada sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengadaan Sarana, Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan termasuk Pemeliharaan, Sarana, Prasarana, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya, Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, serta Fasilitas Makanan dan Minuman dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Prosentase Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sesuai standar	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	3,328,117,080						100 % 100 %	0	
1 02 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Dokumen	757,274,480				Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	2,570,842,600					Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100% Implementasi tahapan SPM Provinsi, koordinasi dan sinkronisasi SPM kabupaten/Kota dan layanan prioritas kesehatan lainnya sesuai ketentuan	100 %		0 %	100 %	56,834,295,650						100 %	0	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				9937 Orang	675,418,000					Peningkatan Sumber Daya Manusia	9937 Orang	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9560 Orang	995,046,000						9560 Orang	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	668,241,000					Peningkatan Sumber Daya Manusia	6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	481,918,790					Peningkatan Sumber Daya Manusia	6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	1,444,279,860					Peningkatan Sumber Daya Manusia	6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				6 Dokumen	83,763,000					Peningkatan Sumber Daya Manusia	6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				100 Orang	338,316,000					Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 Orang	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6 Dokumen	43,883,580,000					Peningkatan Sumber Daya Manusia	6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				6 Dokumen	5,286,563,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				6 Dokumen	2,853,002,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				6 Unit	124,168,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Unit	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100% aktifitas pada sub kegiatan Pengelolaan data dan informasi kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan Tersedianya Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan sistem Informasi Kesehatan	100 % 8 dok	0 % 0 dok		100 % 2 dok	224,505,677						100 % 2 dok	0	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	224,505,677				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1,253,180,545							0	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1,253,180,545							0	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				50 Orang	915,775,305				Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	0	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				6 Dokumen	337,405,240				Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100% Sarana Kefarmasian, Produk Alat Kesehatan dan PKRT memenuhi persyaratan kemandirian, mutu, dan manfaat serta terstandar	100 %		0 %	100 %	520,985,000						100 %	0	
1 02 04 1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100% Pelaksanaan aktifitas pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK dilaksanakan sesuai ketentuan untuk penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %		0 %	100 %	520,985,000						100 %	0	
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakan Lanjut Penerbitan Perizinan				12 Sarana	520,985,000			Peningkatan Sumber Daya Manusia		12 Sarana	0	Dinas Kesehatan	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100% UKBM yang menjadi lokus aktif	100 %		0 %	100 %	1,690,601,000						100 %	0	
1 02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100% aktifitas pada sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi sebagai upaya meningkatkan % UKBM Aktif	100 %		0 %	100 %	1,459,487,000						100 %	0	
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				6 Dokumen	1,459,487,000			Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100% aktifitas pada sub kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi untuk mendukung upaya Meningkatnya Pelaksanaan PHBS di semua tatanan	100 %		0 %	100 %	231,114,000						100 %	0			
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	231,114,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		4 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						377,806,000							0			
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	100% kegiatan sinkronisasi kebijakan pusat dan pemerintah daerah Provinsi dalam rangka penendalian penduduk terpenuhi	100 %		0 %	100 %	164,787,500							100 %	0		
2 14 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100% kegiatan dalam rangka penyesuaian kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana terlaksana	100 %		0 %	100 %	164,787,500							100 %	0		
2 14 02 1.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				6 Dokumen	164,787,500							Peningkatan Sumber Daya Manusia	6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100 % kegiatan koordinasi dalam rangka pembinaan keluarga berencana terlaksana sesuai standar	100 %		0 %	100 %	213,018,500							100 %	0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100% aktifitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dalam rangka mendukung Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %		0 %	100 %	213,018,500						100 %	0	
2 14 03 1.01 08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi				6 Laporan	213,018,500				Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						73,589,191,163							83,623,789,940	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						58,371,350,163							64,741,709,940	
1 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						617,200,000							690,000,000	
1 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	418,320,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	450,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	89,440,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	120,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	109,440,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	120,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																Nasional					Daerah
1	02	01	1.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											20,323,004,740			
1	02	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				152 Orang/Bulan	19,684,340,980	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		152 Orang/Bulan	19,684,340,980	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1800 Dokumen	218,320,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1800 Dokumen	207,156,650	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	242,702,473	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	169,260,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	63,356,360	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		3 Dokumen	145,367,860	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	78,890,150	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa					11 Laporan	116,878,650	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													105,000,000	
1	02	01	1.03	05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	95,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	31,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													550,000,000	
1	02	01	1.05	05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	40,608,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	378,880,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		30 Orang	400,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	100,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						852,500,000							894,092,000	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	380,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	454,092,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	60,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	105,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	105,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	37,500,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	25,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						455,845,800							418,000,000	
1.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	72,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	78,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	183,045,800	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	200,800,000						0 Unit	240,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5,223,206,400							5,380,163,200	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2,024,826,400	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	2,024,843,200	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14,700,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	15,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,183,680,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	3,340,320,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						289,500,000							381,450,000	
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	29,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Unit	42,200,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	65,500,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	119,250,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	75,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	120,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	120,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						30,000,000,000							36,000,000,000	
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	30,000,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Unit Kerja	36,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						4,192,321,000							7,307,760,000	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						3,712,881,000							6,777,760,000	
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				6 Unit	411,605,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Unit	450,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				4 Paket	789,440,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		4 Paket	900,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	96,500,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				6 Unit	704,460,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Unit	800,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	1,710,876,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	4,127,760,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						479,440,000							530,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	139,440,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	340,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	280,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						11,025,520,000							11,574,320,000	
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						10,025,520,000							10,524,320,000	
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				363 Orang	10,025,520,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				363 Orang	10,524,320,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1,000,000,000							1,050,000,000	
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				100 Orang	900,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				20 Dokumen	100,000,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,034,976,500							0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan kantor	%		%	100 %	1,114,328,500						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"100% pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan sesuai standar " Presentase Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Umum di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	98,358,500						100 % 100 %	0	
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69,858,500				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	28,500,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"100% kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai standar " Tersedianya jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	100 % 16 laporan		0 % 0 laporan	100 % 4 laporan	991,420,000						100 % 4 laporan	0	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	333,708,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	657,712,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"100% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan pemeliharaan sesuai standar " Presentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	24,550,000						100 % 100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	750,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia	1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23,800,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia	1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100% implementasi tahapan pemenuhan SPM Provinsi dan pelaksanaan kewenangan serta fungsi Provinsi dalam pemenuhan dan Kabupaten Kota dan atau Layannan Kesehatan Lainnya denagn memaksimalkan sistem informasi kesehatan Presentase Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	2,920,648,000					100 % 100 %	0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100% aktifitas pada sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengadaan Sarana, Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan termasuk Pemeliharaan, Sarana, Prasarana, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya, Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, serta Fasilitas Makanan dan Minuman dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Prosentase Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sesuai standar	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	2,920,648,000						100 % 100 %	0	
1 02 02 1.01 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	700,000,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	90,000,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				1 Paket	1,260,000,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	870,648,000				Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1,559,810,744						600,000,000		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi	%		%	100 %	1,559,810,744						100 %	600,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah retribusi daerah yang dapat dikelola	Laporan		Laporan	500 Laporan	517,245,140						500 Laporan	0	
1 03 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				500 Laporan	517,245,140		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	500 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan peralatan uji material	Laporan		Laporan	2 Laporan	442,737,644						2 Laporan	0	
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	442,737,644		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	2 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan peralatan uji material	%		%	100 %	599,827,960						100 %	600,000,000	
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						599,827,960					0		600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2,009,593,608						2,076,834,547		
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sarana dan prasarana TPA Regional dalam kondisi baik	5 unit		0 unit	5 unit	2,009,593,608						5 unit	2,076,834,547	
1 03 04 1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem pengelolaan persampahan regional yang dikembangkan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	2,009,593,608						5 Unit	2,076,834,547	
1 03 04 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1,352,997,548		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	1 Dokumen	1,384,852,043	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04 1.01 06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan				3 Unit	443,989,260		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	3 Unit	500,951,028	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04 1.01 08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				3 Kelompok Masyarakat	212,606,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	3 Kelompok Masyarakat	191,031,476	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11						1,888,406,239						1,833,108,226		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	11					1,888,406,239						30000 ton	1,833,108,226	
2	11	11	1.01				1,888,406,239						30000 Ton	1,833,108,226	
2	11	11	1.01	02			30000 Ton	1,263,231,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	30000 Ton	1,213,658,226	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	11	11	1.01	03			5 Unit	625,174,339			Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	5 Unit	619,450,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03						112,273,650,713							56,593,717,089	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	01					100 %	28,446,816,951					100 %	28,450,000,000	
1	03	01	1.01				100 %	1,544,585,400					100 %	1,550,000,000	
1	03	01	1.01	01			11 Dokumen	928,517,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	11 Dokumen	950,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	07			4 Laporan	616,067,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	4 Laporan	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02				100 %	22,899,152,347					100 %	22,700,000,000	
1	03	01	1.02	01			233 Orang/ Bulan	22,699,550,647		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	233 Orang/ Bulan	22,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	199,601,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 Orang		0 Orang	100 Orang	810,420,500						100 Orang	700,000,000	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	810,420,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	100 Orang	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	20 Paket		0 Paket	5 Paket	363,620,000						5 Paket	500,000,000	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	363,620,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	5 Paket	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	2,829,038,704						1 Laporan	3,000,000,000	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,829,038,704		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pengaman Pantai yang dibangun dan dipelihara Panjang pengaman Sungai yang dibangun dan dipelihara	3,2 Km 2,4 Km		0 Km 0 Km	0,8 Km 0,6 Km	24,820,833,000						0,8 Km 0,6 Km	24,820,832,999	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun	KM		KM	1,4 KM	5,237,906,054						1,4 KM	4,600,889,765	
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai				4 Dok	837,704,066			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	4 Dok	793,084,327	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.1.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						1,179,817,600					0		1,232,422,573	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.15 KM	1,251,086,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0.15 KM	1,206,126,743	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0 KM	897,151,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0 KM	505,975,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.1.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				2.5 KM	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	2.5 KM	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.1.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	177,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	3 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.1.01.59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara				0.2 KM	593,729,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0.2 KM	505,975,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	200,897,688		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	2 Lembaga	157,306,122	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Iuran Irigasi yang Terlayani	9868 Ha		0 Ha	2467 Ha	19,582,926,946						2467 Ha	20,219,943,234	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				6 Dokumen	813,925,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	6 Dokumen	1,050,798,716	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.39 KM	273,401,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0.39 KM	605,975,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5 KM	14,320,833,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	5 KM	14,320,833,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				2 Bendung	373,401,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	2 Bendung	405,975,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				100 KM	3,427,965,346		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	100 KM	916,076,230	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				7 Bendung	373,401,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	7 Bendung	2,920,285,288	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan air minum	4 kegiatan		0 kegiatan	1 kegiatan	2,087,944,240						1 kegiatan	0	
1 03 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah layanan akses air minum yang dapat dikontribusi	4 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	2,087,944,240						1 Kegiatan	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 03 1.01 07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM				3 Kab/Kota	326,400,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	3 Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 1.01 08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM				5 Kab/Kota	1,761,543,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	5 Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase kapasitas Sistem Air Limbah Domestik Regional yang dapat terlayani	100 %		0 %	100 %	849,653,430						100 %	0	
1 03 05 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase meningkatnya kualitas Sistem Air Limbah Domestik Regional	100 %		0 %	100 %	849,653,430						100 %	0	
1 03 05 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun				1 Dokumen	646,946,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05 1.01 06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik				0 Kelompok Masyarakat	202,706,930		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0 Kelompok Masyarakat	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Drainase yang dibangun pada kawasan strategis provinsi	4 unit		0 unit	1 unit	1,258,460,772						1 unit	0	
1 03 06 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sistem drainase yang dikelola dan dikembangkan	4 Unit		0 Unit	1 Unit	1,258,460,772						1 Unit	0	
1 03 06 1.01 04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				1 Unit	1,258,460,772		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	4 Kawasan		0 Kawasan	1 Kawasan	6,255,243,600						1 Kawasan	0	
1 03 07 1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah infrastruktur sarana dan prasarana permukiman yang terlayani	4 Kawasan		0 Kawasan	1 Kawasan	6,255,243,600						1 Kawasan	0	
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				1 Sistem Jaringan	5,312,479,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		1 Sistem Jaringan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian				1 Sistem Jaringan	865,271,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		1 Sistem Jaringan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07 1.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				30 Orang	77,493,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		30 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan milik pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk kepentingan strategis	4 unit		0 unit	1 unit	4,703,477,000						1 unit	0	
1 03 08 1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah yang ditetapkan dan diselenggarakan	4 Unit		0 Unit	1 Unit	4,703,477,000						1 Unit	0	
1 03 08 1.01 01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				4 Dokumen	1,395,189,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		4 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				1 Unit	3,308,288,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kotasarana	5 kawasan		0 kawasan	5 kawasan	2,345,220,797						5 kawasan	0	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara	5 Kawasan		0 Kawasan	5 Kawasan	2,345,220,797						5 Kawasan	0	
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	731,926,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				5 Kawasan	426,897,597		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	5 Kawasan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				2 Kawasan	612,084,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	2 Kawasan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 09 1.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				5 Kawasan	574,312,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	5 Kawasan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik	KM		KM	405,22 KM	39,433,234,361					405,22 KM	0		
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Stratgeis Provinsi yang dibangun dan dipelihara	KM		KM	405.22 KM	39,433,234,361					405.22 KM	0		
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						2,069,522,245				0		0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	570,478,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	14,489,931,000		DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	2 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10 1.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				8 KM	7,206,048,316		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	8 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10 1.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				3 KM	14,886,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	3 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				150 KM	5,074,974,816		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	150 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				10 M	9,013,311,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	10 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				150 M	621,908,744		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	150 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana				0.01 KM	14,886,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0.01 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Jalan/Jembatan				3 dokumen	357,288,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	3 dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100 %		0 %	100 %	800,482,530						100 %	1,172,884,090	
1 03 11 1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah SDM bidang konstruksi yang bersertifikat dan terbina	495 Orang		0 Orang	120 Orang	434,229,360						120 Orang	650,194,522	
1 03 11 1.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan				60 Orang	303,311,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	60 Orang	350,194,522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 1.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi						130,917,400					0		250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen informasi kinerja penyedia jasa konstruksi	12 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	366,253,170						3 Dokumen	522,689,568	
1 03 11 1.02 03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI						366,253,170				0			447,689,568	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana penataan Ruang Kawasan strategis Provinsi	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1,272,284,032						1 Dokumen	2,150,000,000	
1 03 12 1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah dokumen rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi yang ditetapkan	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	429,140,900						1 Dokumen	500,000,000	
1 03 12 1.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi				1 Dokumen	287,460,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				0 Dokumen	141,680,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		0 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen rancangan tata ruang	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	268,137,812						1 Dokumen	600,000,000	
1 03 12 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	231,059,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.02 04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1 Laporan	37,078,572		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		1 Laporan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi penataan ruang	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	137,061,620						1 Dokumen	750,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				0 Dokumen 4 Dokumen	137,061,620		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0 Dokumen 4 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dan RRTR	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	437,943,700						1 Dokumen	300,000,000	
1 03 12 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				0 Dokumen 1 Dokumen	437,943,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0 Dokumen 1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						7,734,735,520						17,800,000,000		
2 10 03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Jumlah Penyediaan Bidang Tanah untuk Kepentingan Umum yang tersertikat	20 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	1,615,433,420						5 Dokumen	2,500,000,000	
2 10 03 1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen pengadaan tanah yang ditetapkan	20 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	1,615,433,420						5 Dokumen	2,500,000,000	
2 10 03 1.01 01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				5 Dokumen	1,615,433,420		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	5 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah penyelesaian Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan	Kasus		Kasus	1 Kasus	110,799,100						1 Kasus	300,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 10 04 1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi	Kasus		Kasus	1 Kasus	110,799,100						1 Kasus	300,000,000	
2 10 04 1.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	110,799,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah lokasi Tanah yang dilaksanakan Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	9 Lokasi		0 Lokasi	2 Lokasi	6,008,503,000						2 Lokasi	15,000,000,000	
2 10 05 1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	39 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	6,008,503,000						10 Dokumen	15,000,000,000	
2 10 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				10 Dokumen	6,008,503,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	10 Dokumen	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						15,568,852,690						37,392,000,000		
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%		%	100 %	8,670,061,724						100 %	8,820,000,000	
1 04 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	432,944,050						100 %	500,000,000	
1 04 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	139,312,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur Pemerintah Daerah	3 Dokumen	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	293,632,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur Pemerintah Daerah	3 Laporan	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah laporan keuangan serta ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %		0 %	100 %	6,697,835,359						100 %	6,100,000,000	
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/Bulan	6,668,905,021		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur Pemerintah Daerah	55 Orang/Bulan	6,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	28,930,338		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur Pemerintah Daerah	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	20 Orang		0 Orang	5 Orang	92,880,000						5 Orang	100,000,000	
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	92,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur Sipil Negara	5 Orang	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	1,446,402,315						100 %	1,750,000,000	
1.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				100 %	1,446,402,315		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pelayanan Administrasi	100 %	1,750,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase terhadap kebutuhan pelayanan dasar pada pemenuhan kebencanaan	100 %		0 %	100 %	1,210,641,471						100 %	3,532,000,000	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	163,962,400						2 Dokumen	400,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang berpotensi terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	97,082,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang terkena Relokasi Program Provinsi yang terverifikasi				1 Dokumen	66,880,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Jumlah Dokumen dan Laporan Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan	%		%	100 %	476,355,371						100 %	600,000,000	
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				50 Orang	188,938,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	50 Orang	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP				50 Orang	192,208,281	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	50 Orang	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.1.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Laporan Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan				1 Laporan	95,208,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Laporan	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Rumah yang terbangun/rehabilitasi bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	Unit Rumah		Unit Rumah	5 Unit Rumah	570,323,700						5 Unit Rumah	2,532,000,000	
1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang terbangun				5 Unit Rumah	570,323,700	Kab. Bone Bolango, Bulawa, Mopuya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Masyarakat Korban Bencana	5 Unit Rumah	2,532,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan provinsi	Kawasan		Kawasan	2 Kawasan	5,688,149,495						2 Kawasan	25,040,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 03 1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Kegiatan Penyadaran Publik, Koordinasi, dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	Laporan		Laporan	8 Laporan	1,187,596,694						8 Laporan	1,700,000,000	
1 04 03 1.01 02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				4 Laporan	366,846,336	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	4 Laporan	850,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 1.01 09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				4 Laporan	820,750,358	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	4 Laporan	850,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang diremajakan/dipugar Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha yang diperbaiki	Kawasan Kawasan Dokumen Unit		Kawasan Kawasan Dokumen Unit	2 Kawasan 2 Kawasan 2 Dokumen 32 Unit	4,500,552,801						2 Kawasan 2 Kawasan 2 Dokumen 32 Unit	23,340,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				2 Dokumen	849,999,200	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Dokumen	650,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				32 Unit Rumah	1,784,999,900	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	32 Unit Rumah	15,469,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar				2 Kawasan	1,865,553,701	Kab. Bone Bolango, Kabila, Pauwo Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Tolongio	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Kawasan	7,221,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9,378,734,572							11,165,138,683	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM Aparatur serta Perencanaan, Monev dan Pelaporan	%	%	100 %	6,370,180,293							100 %	6,785,226,993	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	32 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	109,153,400							8 Dokumen	97,397,410	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	59,053,800			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	5 Dokumen	59,379,640	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	50,099,600			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	3 Laporan	38,017,770	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4,749,367,958							4 Laporan	4,759,394,962	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/ Bulan	4,598,497,923			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	39 Orang/ Bulan	4,598,497,923	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	150,870,035		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	2 Laporan	160,897,039	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	
1 05 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang		0 Orang	20 Orang	204,507,000					20 Orang	196,728,400		
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	204,507,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	20 Orang	196,728,400	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	80 Paket		0 Paket	20 Paket	750,042,300					20 Paket	938,693,650		
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	750,042,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	20 Paket	938,693,650	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						557,109,635						793,012,571		
1 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	557,109,635		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	793,012,571	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2,702,823,431						3,929,737,570		
1 05 02 1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						2,411,893,370						3,609,934,502		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				100 Kasus	1,680,626,852		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		100 Kasus	2,589,680,887	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Kasus	379,685,933		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		10 Kasus	597,174,526	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				0 Dokumen 1 Dokumen	10,834,371		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		0 Dokumen 1 Dokumen	11,917,808	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	120,670,425		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Dokumen	143,923,946	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	153,493,191		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		50 Orang	196,122,510	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 1.01 06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	42,520,661		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		2 Dokumen	44,646,694	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1 05 02 1.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	24,061,937		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		2 Laporan	26,468,131	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1 05 02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						192,591,144							238,250,259	
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				15 Laporan	53,424,835		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		15 Laporan	66,687,319	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				6 Laporan	139,166,309		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		6 Laporan	171,562,940	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1 05 02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						98,338,917							81,552,809	
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	64,942,549		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	44,816,804	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1 05 02 1.03 02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP				4 Dokumen	33,396,368		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		4 Dokumen	36,736,005	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						305,730,848						450,174,120		
1 05 04 1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						246,313,000						392,734,487		
1 05 04 1.01 04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	246,313,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Dokumen	392,734,487	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	
1 05 04 1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						59,417,848						57,439,633		
1 05 04 1.02 02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				60 Laporan	59,417,848		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		60 Laporan	57,439,633	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11,061,121,094						11,686,210,094		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana SDM Aparatur serta Perencanaan, Monev dan Pelaporan	Persen		Persen	100 Persen	8,972,297,639					100 Persen	9,472,297,639		
1 05 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	759,825,900					100 %	759,825,900		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	759,825,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	3 Dokumen	759,825,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah laporan keuangan serta ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %		0 %	100 %	5,710,627,239						100 %	5,710,627,239	
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/ Bulan	5,658,397,039		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	53 Orang/ Bulan	5,658,397,039	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Dokumen	52,230,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	1 Dokumen	52,230,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	10 Orang		0 Orang	10 Orang	108,800,000						10 Orang	108,800,000	
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	108,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	10 Orang	108,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kantor yang dilaksanakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	1,637,041,500						1 Paket	2,137,041,500	
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,637,041,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	1 Paket	2,137,041,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %		0 %	100 %	756,003,000						100 %	756,003,000	
1 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				100 %	756,003,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	100 %	756,003,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana	%		%	80 %	2,088,823,455						80 %	2,213,912,455	
1 05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentasi Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebencanaan	100 %		0 %	100 %	900,625,990						100 %	900,625,990	
1 05 03 1.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				120 Orang	305,017,590	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	120 Orang	305,017,590	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				2 Dokumen	293,524,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	2 Dokumen	293,524,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi				2 Dokumen	302,084,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	2 Dokumen	302,084,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		0 %	100 %	643,365,465						100 %	643,365,465	
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	133,171,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	2 Laporan	133,171,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	265,130,465		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	100 Orang	265,130,465	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.1.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	245,064,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	2 Laporan	245,064,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Daerah	100 %		0 %	100 %	544,832,000						100 %	669,921,000		
1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	161,238,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	1 Dokumen	161,238,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				1 Laporan	174,911,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	1 Laporan	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				90 Keluarga	208,683,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	90 Keluarga	208,683,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							109,435,858,676							20,448,233,094	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	%		%	100 %	4,718,358,571						100 %	5,335,277,304	
8 01 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	157,162,300						2 Dokumen	170,000,000	
8 01 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	157,162,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Kesbang dan Politik Provinsi/Kab/Kota, Instansi Terkait		2 Dokumen	170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	3,749,801,921						2 Laporan	3,765,277,304	
8 01 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/ Bulan	3,655,277,321		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD Badan Kesbang & Politik Prov. Gtlo		30 Orang/ Bulan	3,655,277,304	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	94,524,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD Badan Kesbang & Politik Prov. Gtlo		2 Laporan	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pengembangan SDM Aparatur melalui Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	0 Orang	6 Orang	50,574,000						6 Orang	150,000,000	
8 01 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6 Orang	50,574,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur Badan Kesbang & Politik Prov. Gtlo		6 Orang	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang Memadai	12 Paket	0 Paket	3 Paket	225,203,100						3 Paket	700,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	225,203,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD Badan Kesbang & Politik Prov. Gtlo	3 Paket	700,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Kantor	32 Laporan		0 Laporan	8 Laporan	535,617,250					8 Laporan	550,000,000		
8 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	535,617,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	8 Laporan	550,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Capaian Penguatan Wasbang & Cinta Tanah air Serta Nilai-Nilai Pancasila	%		%	100 %	220,627,617					100 %	200,000,000		
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	300 Orang		0 Orang	75 Orang	220,627,617					75 Orang	200,000,000		
8 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				75 Orang	220,627,617		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Generasi Muda, Pelajar dan Mahasiswa	75 Orang	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih	%		%	100 %	101,782,850,378					100 %	2,922,133,078		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Politik Tentang Pendidikan Politik, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik dan Pemantauan Situasi Politik Yang Terlaksana	28 Kali		0 Kali	7 Kali	101,782,850,378						7 Kali	2,922,133,078	
8 01 03 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				6 Dokumen	196,084,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Dan Masyarakat		6 Dokumen	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	101,312,973,778		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Dan Masyarakat		50 Orang	1,722,133,078	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				7 Laporan	273,792,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Dan Masyarakat	7 Laporan	1,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	%	%		100 %	1,255,246,522						100 %	1,692,876,970	
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Ormas dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	92 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	1,255,246,522						23 Dokumen	1,692,876,970	
8 01 04 1.01 01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen				23 Dokumen	1,255,246,522		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	23 Dokumen	1,692,876,970	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Partisipan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat	%	%		100 %	367,905,703						100 %	497,945,742	
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Dalam Rangka Menjaga Stabilitas	48 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	367,905,703						12 Dokumen	497,945,742	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	179,639,503		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pelaku Ekonomi, Pedagang, Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional	12 Dokumen	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 Laporan	188,266,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pelaku Ekonomi, Pedagang, Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional	2 Laporan	297,945,742	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Yang Terdeteksi	%	%		100 %	1,090,869,885					100 %	9,800,000,000		
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Dalam Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Dalam Menjaga Stabilitas Daerah	24 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	1,090,869,885					6 Dokumen	9,800,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	188,186,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Anggota Forkopimda	5 Dokumen	8,400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				25 Orang	29,719,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Anggota Forkopimda	25 Orang	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				5 Laporan	371,587,685		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Anggota Forkopimda	5 Laporan	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				6 Dokumen	501,375,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Anggota Forkopimda	6 Dokumen	1,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												30,904,238,458			51,253,750,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	12,510,943,311						8 Dokumen	25,065,000,000	
1 06 01	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	32 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	823,057,426						1 dokumen	870,000,000	
1 06 01	1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	596,292,504	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 01	1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	9,886,700	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	90,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 01	1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	40,778,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	8 Laporan	60,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 01	1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	176,099,822	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	120,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase (%) kesesuaian laporan keuangan	100 %		0 %	100 %	9,729,634,669						100 %	17,170,000,000	
1 06 01	1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/Bulan	9,607,701,869	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	82 Orang/Bulan	17,000,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 01	1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	118,844,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3,088,800	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur Sipil Negara	18 Laporan	25,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi	100 %		0 %	100 %	81,648,000						100 %	950,000,000	
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	81,648,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12 Orang	170,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase (%) sarana dan prasarana yang tersedia	100 %		0 %	100 %	339,143,216						100 %	695,000,000	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,200,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Paket	40,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 1 Paket	46,350,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Paket 1 Paket	200,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	57,750,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Paket	100,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Paket	60,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18,495,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Paket	100,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	39,521,520	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Paket	15,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				280 Orang	84,000,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	280 Orang	70,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 orang	17,150,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	100 orang	30,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	48,676,696	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 paket		0 paket	2 paket	125,527,000					2 paket	3,700,000,000		
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	25,527,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah / Pemerintah Daerah	4 Paket	700,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah / Pemerintah Daerah	1 Unit	2,500,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100 %		0 %	100 %	567,480,000					100 %	750,000,000		
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	199,800,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	3 Laporan	350,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	367,680,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Laporan	400,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %		0 %	100 %	844,453,000					100 %	930,000,000		
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	66,972,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Unit	40,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	536,766,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	14 Unit	400,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	135,090,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	55 Unit	40,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	105,625,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Unit	175,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) PSKS perorangan yang diberdayakan /Persentase (%) kelembagaan sosial yang diberdayakan /Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan	100 %		0 %	100 %	1,249,581,124						100 %	560,000,000	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi PUB dan PUB	12 dokumen		0 dokumen	12 dokumen	54,981,100						12 dokumen	75,000,000	
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				12 Dokumen	54,981,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	Dunia Usaha	12 Dokumen	75,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	164 lembaga 317 orang		0 lembaga 0 orang	53 lembaga 137 orang	1,194,600,024						53 lembaga 137 orang	485,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				60 Orang	149,880,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	PSKS, PSM, TKSK	60 Orang	160,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				77 Orang	394,719,986	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	PSKS, PSM, TKSK	77 Orang	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				41 Lembaga	649,999,798	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	PSKS, PSM, TKSK	41 Lembaga	325,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	52 org		0 org	13 org	139,440,000						13 org	105,000,000	
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	52 orang		0 orang	13 orang	139,440,000						13 orang	105,000,000	
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	139,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan	15 Orang	105,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas dan gelandangan, pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar didalam panti	100 %		0 %	100 %	3,791,646,479						100 %	5,458,000,000	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	47 orang		0 orang	10 orang	244,718,793						10 orang	525,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				10 Orang	133,120,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat	10 Orang	30,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				2 Dokumen	111,598,793	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didlam panti	120 orang		0 orang	30 orang	1,000,180,700					30 orang	2,039,000,000		
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	513,750,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarkat Kurang Mampu	60 Orang	1,440,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				2 Dokumen	486,430,700	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	2 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didlam panti	105 orang		0 orang	23 orang	966,537,786					23 orang	1,394,000,000		
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				23 Orang	285,279,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	23 Orang	500,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				23 Orang	49,098,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	23 Orang	78,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				23 Orang	107,262,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	23 Orang	130,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				23 Orang	2,000,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	23 Orang	10,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				23 Orang	150,000,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	23 Orang	365,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				23 Orang	207,037,500	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	23 Orang	195,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				2 Orang	10,000,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	2 Orang	15,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	155,861,286	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	2 Dokumen	70,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah dokumen rehabilitasi sosial PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	4 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1,580,209,200						1 dokumen	1,500,000,000	
1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				1 Dokumen	1,580,209,200	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkatkan aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar/Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkatkan produktifitas sosial ekonominya/Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program	80 org 100 %		0 org 0 %	20 org 100 %	11,314,228,159						20 org 100 %	17,140,000,000	
1 06 05 1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak antar WNI	80 rekomendasi		0 rekomendasi	20 rekomendasi	50,000,000						20 rekomendasi	60,000,000	
1 06 05 1.01 01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Anak	50,000,000	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Kurang Mampu	20 Anak	60,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1 06 05 1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkatkan aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan produktifitas sosial ekonominya	42080 keluarga		0 keluarga	1520 keluarga	11,264,228,159					1520 keluarga	17,080,000,000		
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				70000 Keluarga	8,972,288,159	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat kurang mampu	70000 Keluarga	15,150,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				650 KPM	2,291,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat kurang mampu	650 KPM	1,930,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana dan sosial yang terlayani dan tertangani	4.000 orang		0 orang	1.000 orang	1,142,868,985					1.000 orang	2,095,750,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat	4000 orang		0 orang	1000 orang	1,142,868,985						1000 orang	2,095,750,000	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1500 Orang	540,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Korban Bencana	1500 Orang	693,750,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				1500 Orang	67,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Korban Bencana	1500 Orang	650,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1 Unit	289,793,185	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Korban Bencana	1 Unit	450,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				200 Orang	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Korban Bencana	200 Orang	45,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				300 Orang	229,575,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Korban Bencana	300 Orang	257,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase (%) penanaman dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	100 %		0 %	100 %	755,530,400						100 %	830,000,000	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola	2 makam		0 makam	2 makam	755,530,400						2 makam	830,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 07 1.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Dokumen	163,565,100	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	300,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Makam	591,965,300	Kab. Gorontalo, Telaga, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Suwawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	0	2 Makam	530,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2,950,514,122						4,685,600,000		
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase (%) anggaran responsif gender/Persentase (%) partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi /Persentase (%) lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	100 %		0 %	100 %	1,897,371,882						100 %	2,020,000,000	
2 08 02 1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan	SKPD		SKPD	40 SKPD	191,119,734						40 SKPD	285,000,000	
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				40 Perangkat Daerah	107,119,557		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	SKPD	40 Perangkat Daerah	160,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.02.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				30 Orang	84,000,177	Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	SKPD	30 Orang	125,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase (%) perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	%	%		0.46 %	1,380,159,988						0.46 %	1,400,000,000	
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				38 orang	80,159,988		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	38 orang	100,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota				3 Lembaga Kewanitaan	1,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	3 Lembaga Kewanitaan	1,300,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	8 lembaga		0 lembaga	2 lembaga	326,092,160						2 lembaga	335,000,000	
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	326,092,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 Lembaga	235,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						190,127,685							860,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						190,127,685						210,000,000		
2 08 03 1.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				40 orang	190,127,685		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		40 orang	110,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						127,098,488							550,000,000	
2 08 04 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						127,098,488							150,000,000	
2 08 04 1.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				20 Lembaga	127,098,488		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Lembaga	150,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						99,999,505							100,000,000	
2 08 05 1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						99,999,505							100,000,000	
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	99,999,505		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						139,999,588							470,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 06 1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						139,999,588						350,000,000		
2 08 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 Organisasi	139,999,588		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	4 Organisasi	260,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						495,916,974						685,600,000		
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						229,480,765						415,600,000		
2 08 07 1.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	229,480,765		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	1 Dokumen	95,600,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 07 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						266,436,209						140,000,000		
2 08 07 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	266,436,209		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						24,076,570,868						25,023,926,211		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6,328,776,906						6,388,742,507		
4 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						214,290,037						225,004,538		
4 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	214,290,037		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Dokumen	225,004,538	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,129,464,869						5,129,464,869		
4 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/ Bulan	5,129,464,869		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			33 Orang/ Bulan	5,129,464,869	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4 01 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						160,022,000						168,023,100		
4 01 01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				15 Orang	160,022,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15 Orang	168,023,100	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah						300,000,000						315,000,000		
4 01 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 Paket	315,000,000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4 01 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						525,000,000						551,250,000		
4 01 01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	525,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Laporan	551,250,000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4 01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						1,965,567,114						2,063,845,515		
4 01 03	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						764,958,082						803,205,986		
4 01 03	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	105,000,000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4 01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				6 Dokumen	187,409,581		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Dokumen	196,780,060	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 1.01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				2 Dokumen	477,548,501		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	501,425,926	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 01 03 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						775,609,032							814,389,529	
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				6 Dokumen	339,999,956		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Dokumen	357,000,000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	210,000,000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	235,609,076		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	247,389,529	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						425,000,000							446,250,000	
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				5 Dokumen	152,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	160,487,250	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 01 03 1.03 02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				3 Dokumen	103,723,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	108,909,150	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				5 Laporan	168,432,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	176,853,600	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Fasilitasi Bina Mental Spritual, Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	%		%	100 %	15,782,226,848						100 %	16,571,338,189	
4 01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Presentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	%		%	100 %	8,256,903,644						100 %	8,669,748,826	
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang Dikelola				1 Unit	929,262,524		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		1 Unit	975,725,650	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang Difasilitasi				150 Lembaga	7,327,641,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		150 Lembaga	7,694,023,176	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Presentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	%		%	100 %	7,425,325,094						100 %	7,796,591,348	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				800 Dokumen	7,425,325,094				0	800 Dokumen	7,796,591,348	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Presentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	%		%	100 %	99,998,110					100 %	104,998,015		
4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	99,998,110		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	104,998,015	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						5,098,148,513							0	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						4,486,394,097							0	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan laporan Evaluasi Hasil Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	163,104,657					100 %	0		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	158,928,657		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Program dan Kegiatan Biro	1 Dokumen	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,008,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Program dan Kegiatan Biro	1 Dokumen	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen 1 Laporan	3,168,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Program dan Kegiatan Biro	1 Dokumen 1 Laporan	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan SKPD	100 %		0 %	100 %	3,689,802,480						100 %	0	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/ Bulan	3,689,298,480		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh ASN Biro	1 Orang/ Bulan	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	504,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh ASN Biro	1 Laporan	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %		0 %	100 %	34,369,000						100 %	0	
4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh ASN & PTT Biro	1 Paket	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	23,569,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Seluruh ASN & PTT Biro	1 Orang	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	100 %		0 %	100 %	108,171,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,615,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Gedung dan Peralatan Kantor, Masyarakat, PNS, PTT, Tenaga Ahli dan Pembantu Tenaga Ahli	1 Paket	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	54,556,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Gedung dan Peralatan Kantor, Masyarakat, PNS, PTT, Tenaga Ahli dan Pembantu Tenaga Ahli	1 Laporan	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	48,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Gedung dan Peralatan Kantor, Masyarakat, PNS, PTT, Tenaga Ahli dan Pembantu Tenaga Ahli	1 Dokumen	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	27 Unit		0 Unit	7 Unit	55,183,000						7 Unit	0	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	55,183,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Gedung dan Peralatan Kantor	1 Unit	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dan Jasa yang disediakan	8 Lap		0 Lap	2 Lap	313,508,960						2 Lap	0	
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	52,808,960		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh ASN dan PTT Biro	1 Laporan	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	260,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh ASN dan PTT Biro	1 Laporan	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	100 Unit		0 Unit	25 Unit	122,255,000						25 Unit	0	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	99,145,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Mobil Dinas dan KDO	1 Unit	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	10,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Mobil Dinas dan KDO	1 Unit	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	12,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Mobil Dinas dan KDO	1 Unit	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan aktivitas pengendalian ekonomi	100 %		0 %	100 %	247,972,700						100 %	0	
4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	113 Dok		0 Dok	23 Dok	115,803,250						23 Dok	0	
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Dokumen	66,021,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh Masyarakat Gorontalo	1 Dokumen	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	49,782,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh Masyarakat Gorontalo	1 Dokumen	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	60 Dok		0 Dok	15 Dok	38,379,750						15 Dok	0	
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1 Dokumen	38,379,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh Masyarakat Gorontalo	1 Dokumen	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha dan Pendirian BLUD	48 Dok		0 Dok	12 Dok	93,789,700						12 Dok	0	
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	49,887,950		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh Masyarakat Gorontalo	1 Dokumen	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 06 1.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				1 Dokumen	43,901,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh Masyarakat Gorontalo	1 Dokumen	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota	12 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	363,781,716						3 Dokumen	0	
4 01 08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah	132 Lap		0 Lap	33 Lap	350,227,900						33 Lap	0	
4 01 08 1.01 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	236,787,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh OPD Provinsi Gorontalo,Kabu paten/Kota dan Satuan Kerja APBN	1 Laporan	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 08 1.01 02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	47,598,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh OPD Provinsi Gorontalo,Kabu paten/Kota dan Satuan Kerja APBN	1 Laporan	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 08 1.01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	65,841,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh OPD Provinsi Gorontalo,Kabu paten/Kota dan Satuan Kerja APBN	1 Laporan	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
4 01 08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	64 Dok		0 Dok	16 Dok	13,553,816						16 Dok	0	
4 01 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	13,553,816		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh OPD Provinsi Gorontalo,Kabu paten/Kota dan Satuan Kerja APBN	1 Dokumen	0	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1,825,000,500						2,060,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	100 %		0 %	25 %	1,105,000,200						25 %	1,350,000,000	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	orang		orang	150 orang	1,005,000,000						150 orang	1,150,000,000	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan				150 Orang	1,005,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pencari Kerja	150 Orang	1,150,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 07 03 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas tenaga kerja	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100,000,200						1 Dokumen	200,000,000	
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	100,000,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Tenaga Kerja	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar	100 %		0 %	25 %	100,000,300						25 %	100,000,000	
2 07 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	24000 Orang		0 Orang	6000 Orang	100,000,300						6000 Orang	100,000,000	
2 07 04 1.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				6000 Orang	100,000,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Perusahaan dan Pencari Kerja	6000 Orang	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	100 %		0 %	25 %	430,000,000						25 %	430,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	200 Kasus		0 Kasus	50 Kasus	100,000,000						50 Kasus	100,000,000	
2 07 05 1.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi				50 Kasus	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat	50 Kasus	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah dokumen UMP yang ditetapkan	4 SK		0 SK	1 SK	330,000,000						1 SK	330,000,000	
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	330,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Perusahaan dan Tenaga Kerja	1 Surat Keputusan	330,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	68 %		0 %	17 %	190,000,000						17 %	180,000,000	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	1680 Perusahaan		0 Perusahaan	420 Perusahaan	190,000,000						420 Perusahaan	180,000,000	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja				420 Perusahaan	190,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat	420 Perusahaan	180,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						18,319,908,370						18,473,393,000		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	16,479,788,170						100 %	16,633,274,000	
2 18 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	24 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	501,486,800						6 Dokumen	466,488,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	258,444,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	2 Dokumen	250,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	
2 18 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	243,041,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	4 Laporan	216,488,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	
2 18 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjingannya	177 Orang		0 Orang	177 Orang	14,104,785,313					177 Orang	14,079,786,000		
2 18 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/ Bulan	13,979,785,413		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	135 Orang/ Bulan	13,979,786,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	
2 18 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	124,999,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	
2 18 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	21 Orang		0 Orang	21 Orang	99,862,325					21 Orang	100,000,000		
2 18 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21 Orang	99,862,325		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	21 Orang	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	
2 18 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana yang disediakan	80 Paket		0 Paket	20 Paket	770,864,832					20 Paket	787,000,000		
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	770,864,832		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	20 Paket	787,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	
2 18 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1,002,788,900					1 Laporan	1,200,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,002,788,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	1,200,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	100 %		0 %	10 %	150,000,000						10 %	150,000,000	
2 18 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah perda dan Peta Potensi Investasi	9 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000						1 Dokumen	150,000,000	
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi				1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah dokumen LOI (Letter of Intent)	100 %		0 %	25 %	350,000,800						25 %	350,000,000	
2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan	4 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	350,000,800						1 Kegiatan	350,000,000	
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Promosi Investasi				1 Dokumen	350,000,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Ekonomi Daerah	Investor	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah izin dan non izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha	100 %		0 %	23 %	400,001,200						23 %	375,000,000	
2 18 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai kewenangan provinsi	940 izin dan non izin		0 izin dan non izin	220 izin dan non izin	400,001,200						220 izin dan non izin	375,000,000	
2 18 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi				110 Pelaku Usaha	275,001,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	250,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 1.02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi				220 Kegiatan Usaha	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	220 Kegiatan Usaha	125,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal	100 %		0 %	22 %	815,118,200						22 %	815,119,000	
2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pembinaan pelaksanaan penanaman modal Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pengawasan pelaksanaan penanaman modal	pelaku usaha kegiatan usaha		pelaku usaha kegiatan usaha	160 pelaku usaha 67 kegiatan usaha	815,118,200						160 pelaku usaha 67 kegiatan usaha	815,119,000	
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				160 Pelaku Usaha	588,666,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	160 Pelaku Usaha	588,667,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				67 Kegiatan usaha	226,452,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	67 Kegiatan usaha	226,452,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	98 %		0 %	96,50 %	125,000,000						96,50 %	150,000,000	
2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	125,000,000						4 Dokumen	150,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 18 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat	4 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						1,618,484,100							1,680,000,000		
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah	56 %		0 %	22 %	350,000,000							22 %	350,000,000	
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah data konservasi dan cekungan air tanah	4 Dokumen dan Peta		0 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	250,000,000							1 Dokumen dan Peta	250,000,000	
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pemanfaat air tanah	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah	4 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100,000,000							1 Laporan	100,000,000	
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pengguna air tanah	1 Laporan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Izin Usaha Pertambangan yang diawasi	100 %		0 %	100 %	263,484,100							100 %	275,000,000	
3 29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan	4 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	113,485,000							1 Laporan	125,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 03 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Laporan	113,485,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	1 Laporan	125,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi teknis pertambangan yang terbitkan dan diawasi	155 Dokumen	0 Dokumen	60 Dokumen		149,999,100						60 Dokumen	150,000,000	
3 29 03 1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen rekomendasi pertambangan yang terbitkan			30 Dokumen		149,999,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	30 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan	3,05 %	0 %	1,86 %		255,000,000						1,86 %	255,000,000	
3 29 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		255,000,000						1 Dokumen	255,000,000	
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan			1 Dokumen		100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 05 1.04 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan pemanfaatan pembangkit EBT				1 Laporan	155,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat	1 Laporan	155,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik	100 %		0 %	25 %	750,000,000						25 %	800,000,000	
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Operasi yang diterbitkan	5 Rekomendasi		0 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100,000,000						2 Rekomendasi	150,000,000	
3 29 06 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				0 2 Rekomendasi	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat	0 2 Rekomendasi	150,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	KK		KK	225 KK	650,000,000						225 KK	650,000,000	
3 29 06 1.06 02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				225 KK	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat	225 KK	650,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						550,000,000						550,000,000		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	225,000,000						100 %	225,000,000	
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	225,000,000						1 Laporan	225,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	225,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	225,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	100 %		0 %	25 %	325,000,000						25 %	325,000,000	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	930 Orang		0 Orang	195 Orang	225,000,000						195 Orang	225,000,000	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan				45 orang	225,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Pencari Kerja	45 orang	225,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2 07 03 1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan		0 Perusahaan	5 Perusahaan	100,000,000						5 Perusahaan	100,000,000	
2 07 03 1.03 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				5 Perusahaan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Perusahaan	5 Perusahaan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						503,410,000							0	
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%		%	100 %	188,970,000						100 %	0	
2 12 02 1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100 %		0 %	100 %	122,554,000						100 %	0	
2 12 02 1.02 04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	122,554,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	Masyarakat Provinsi Gorontalo	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2 12 02 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	%		%	100 %	66,416,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	66,416,000	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Terwujudnya Pelayanan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	150,000,000						100 %	0	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	150,000,000						100 %	0	
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	110,000,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparat Dukcapil Provinsi Gorontalo	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	40,000,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	Aparat Dukcapil Provinsi Gorontalo	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan	Paket		Paket	5 Paket	164,440,000						5 Paket	0	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan	Paket		Paket	5 Paket	58,200,000						5 Paket	0	
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	58,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	%		%	100 %	106,240,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				100 Orang	106,240,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	100 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					9,063,291,965						6,073,736,222			
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	%		%	100 %	7,277,805,660						100 %	6,023,736,222	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang tepat waktu	%		%	100 %	329,455,900						100 %	0	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	329,455,900	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	6,073,736,971						100 %	6,023,736,222	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	6,023,736,971	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	60 Orang/ Bulan	6,023,736,222	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%		%	100 %	45,495,420						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	45,495,420		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	10 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana prasarana	%		%	100 %	268,604,069						100 %	0	
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	268,604,069	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	2 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%		%	100 %	560,513,300						100 %	0	
2.13.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	560,513,300	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula			Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase desa yang meningkat kerjasamanya	%		%	0.76 %	114,880,582						0.76 %	0	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	%		%	0.76 %	114,880,582						0.76 %	0	
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	57,220,210	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	57,660,372	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	%		%	0.58 %	1,078,212,523						0.58 %	0	
2 13 04 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	%		%	0.58 %	1,078,212,523						0.58 %	0	
2 13 04 1.01 08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	125,948,378		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 04 1.01 09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	486,689,484		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 04 1.01 11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				30 Orang	34,281,361		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	30 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 04 1.01 12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				1 Dokumen	351,293,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 04 1.01 22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri	%		%	100 %	592,393,200						100 %	50,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga Masyarakat, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih profuktif dan mandiri	%		%	100 %	592,393,200						100 %	50,000,000	
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	91,261,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				1 Lembaga	35,468,300	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Lembaga	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	64,440,100	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	91,263,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05 1.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	309,960,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	%		%	70 %	7,034,003,767						70 %	400,000,000	
2 09 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	lap dok		lap dok	2 lap 3 dok	359,704,200						2 lap 3 dok	400,000,000	
2 09 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen 4 Dokumen	359,704,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur	3 Dokumen 4 Dokumen	400,000,000	Dinas Pangan
2 09 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 (Satu) Tahun	lap org/bulan		lap org/bulan	2 lap org/bulan	6,027,298,737						2 lap org/bulan	0	
2 09 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	5,961,472,237		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	aparatur	55 Orang/ Bulan	0	Dinas Pangan
2 09 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	65,826,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	aparatur	2 Laporan	0	Dinas Pangan
2 09 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian selama 1 (Satu) Tahun Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian selama 1 (Satu) Tahun Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian selama 1 (Satu) Tahun	dokumen paket orang		dokumen paket orang	1 dokumen 1 paket 70 orang	44,972,000						1 dokumen 1 paket 70 orang	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	44,972,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur	20 Orang	0	Dinas Pangan
2 09 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran selama 1 (Satu) Tahun Terlaksananya Administrasi Perkantoran selama 1 (Satu) Tahun	Laporan paket		Laporan paket	2 Laporan 3 paket	290,938,900						2 Laporan 3 paket	0	
2 09 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	290,938,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Paket	0	Dinas Pangan
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan selama 1 (Satu) Tahun	Laporan		Laporan	3 Laporan	311,089,930						3 Laporan	0	
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	311,089,930		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur	1 Laporan	0	Dinas Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat yang tersedia Persentase Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang tersedia	ton %		ton %	8 ton 23 %	780,845,148						8 ton 23 %	1,050,000,000	
2 09 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Unit dokumen		Unit dokumen	8 Unit 1 dokumen	194,465,688						8 Unit 1 dokumen	250,000,000	
2 09 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	78,525,788	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Poktan dan Gapoktan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pangan
2 09 03 1.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				5 Unit	115,939,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Poktan dan Gapoktan	5 Unit	150,000,000	Dinas Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton		Ton	30 Ton	182,479,800						30 Ton	250,000,000	
2 09 03 1.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara				10 Ton	182,479,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Poktan/Gapoktan dan Masyarakat Daerah Rawan Pangan/Bencana	10 Ton	250,000,000	Dinas Pangan
2 09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Skor PPH Konsumsi, Angka Kecukupan Energi (KKal/Kap/hr)	dokumen Laporan		dokumen Laporan	1 dokumen 4 Laporan	403,899,660						1 dokumen 4 Laporan	550,000,000	
2 09 03 1.04 01	Promosi Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	349,419,730	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Poktan, KWT dan Masyarakat Daerah Rawan Pangan	1 Dokumen	450,000,000	Dinas Pangan
2 09 03 1.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	54,479,930	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Poktan, KWT dan Masyarakat Daerah Rawan Pangan	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%		%	12 %	315,440,252						12 %	500,000,000	
2 09 04 1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan, serta Skor PPH Ketersediaan	dokumen		dokumen	1 dokumen	55,480,067						1 dokumen	100,000,000	
2 09 04 1.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	55,480,067	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	Stakeholder terkait	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pangan
2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	dokumen		dokumen	2 dokumen	259,960,185						2 dokumen	400,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 04 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				1000 paket 1 Dokumen	168,979,889	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	1000 paket 1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pangan
2 09 04 1.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bantuan Kelompok Ekonomi Produktif yang disalurkan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				5 paket 1 Dokumen	90,980,296	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	5 paket 1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	85 %		0 %	85 %	208,230,025						85 %	400,000,000	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan pangan Segar Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kabupaten/Kota	sertifikat dokumen		sertifikat dokumen	30 sertifikat 8 dokumen	208,230,025						30 sertifikat 8 dokumen	400,000,000	
2 09 05 1.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Sertifikat	138,249,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	20 Sertifikat	250,000,000	Dinas Pangan
2 09 05 1.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	69,980,185	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	6 Dokumen	150,000,000	Dinas Pangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	28,244,486,950						100 %	30,177,805,628	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%		%	100 %	793,900,872						100 %	2,000,000,000	
2 11 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	644,624,900	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas, KPH dan stakeholder terkait	2 Dokumen	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 11 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	149,275,972	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas, KPH dan stakeholder terkait	4 Laporan	1,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	26,173,705,628				100 %	26,200,305,628	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				225 Orang/Bulan	26,050,305,628	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas dan KPH	225 Orang/Bulan	26,050,305,628	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	123,400,000	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas dan KPH	1 Laporan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	paket		paket	7 paket	256,457,050						7 paket	810,000,000	
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	37,068,050	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	5 Paket	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11,199,500	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	2 Paket	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	24,437,500	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	1 Laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	183,752,000	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	13 Laporan	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	laporan		laporan	2 laporan	624,033,200						2 laporan	752,500,000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	177,605,200	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	1 Laporan	252,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	446,428,000	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	1 Laporan	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	18 unit	396,390,200						18 unit	415,000,000	
2 11 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	359,162,000	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	11 Unit	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	11,290,000	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	6 Unit	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,938,200	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	1 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemarannya	lokasi		lokasi	2 lokasi	539,681,373						2 lokasi	1,025,000,000	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang dilakukan pengujian	lokasi		lokasi	2 lokasi	343,168,055						2 lokasi	725,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	243,168,055	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	3 Dokumen	375,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	196,513,318	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	2 Laporan	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Limbah B3 yang terkelola sebesar 33.868 ton dalam 4 tahun	ton		ton	8467 ton	58,382,600						8467 ton	350,000,000	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha atau fasyankes yang terkelola pengelolaan Limbah B3 nya Jumlah unit usaha/fasyankes yang terkelola pengelolaan Limbah B3 nya melalui kegiatan pengumpulan sebesar 1.848 ton dalam 4 tahun	fasyankes fasyankes/unit usaha		fasyankes fasyankes/unit usaha	12 fasyankes 12 fasyankes/unit usaha	58,382,600						12 fasyankes 12 fasyankes/unit usaha	350,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	58,382,600	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	%		70 %	321,256,075						70 %	562,500,000	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pemegang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	unit usaha		unit usaha	25 unit usaha	321,256,075						25 unit usaha	562,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				8 Dokumen	149,070,118	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Pemegang Izin Lingkungan	8 Dokumen	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi				25 Laporan	172,185,957	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Pemegang Izin Lingkungan	25 Laporan	337,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	%		%	100 %	99,894,900						100 %	250,000,000	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang dilakukan pembinaan	orang		orang	250 orang	99,894,900						250 orang	250,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	99,894,900	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan	100 %		0 %	100 %	191,286,249						100 %	350,000,000	
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan	penghargaan		penghargaan	12 penghargaan	191,286,249						12 penghargaan	350,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				12 Entitas	191,286,249	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	12 Entitas	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3,509,920,416						6,442,928,000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola	2,44 %		0 %	0,54 %	3,105,171,948						0,54 %	4,642,928,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan	dokumen		dokumen	2 dokumen	186,980,032						2 dokumen	375,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				2 Dokumen	186,980,032	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	2 Dokumen	375,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	4 dokumen	241,247,986						4 dokumen	305,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.03 03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	134,698,351	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat dan Pelaku Usaha Bidang Kehutanan	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				2 Dokumen	89,338,600	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	2 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu- langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				5 Laporan	102,985,472	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	5 Laporan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri		industri	12 industri	277,691,858						12 industri	325,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.07 01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah				10 Unit Managemen	171,141,888	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	10 Unit Managemen	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.07 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				2 Unit Managemen	106,549,970	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	2 Unit Managemen	195,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya	KTH/KUPS		KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	265,799,762						2 KTH/KUPS	1,500,000,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kapasitasnya Jumlah Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kapasitasnya	KTH Penyuluh		KTH Penyuluh	2 KTH 25 Penyuluh	265,799,762						2 KTH 25 Penyuluh	1,500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				25 Orang	105,623,122	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan	25 Orang	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				500 Ha	160,176,640	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan	500 Ha	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Presentase DAS yang dikelola	persen		persen	5.56 persen	138,948,706						5.56 persen	300,000,000	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS		DAS	6 DAS	138,948,706						6 DAS	300,000,000	
3 28 06 1.01 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS				0 1 Laporan	138,948,706		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat sekitar DAS	0 1 Laporan	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	58,080,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihar	unit		unit	1 unit	49,800,000						1 unit	45,500,000	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	49,800,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	45,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola	Ha		Ha	325 Ha	4,412,484,339						325 Ha	2,431,250,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan	dokumen		dokumen	1 dokumen	107,874,000						1 dokumen	200,000,000	
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				3 Unit	107,874,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	3 Unit	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan yng direhabilitasi di luar kawasan hutan negara	Ha		Ha	325 Ha	4,304,610,339						325 Ha	2,231,250,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (DAK Fisik) Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (DAU)				325 Ha 33 Ha	4,304,610,339	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	325 Ha 33 Ha	2,231,250,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,652,277,600							3,797,750,000	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	241,835,062						100 %	842,000,000	
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	paket		paket	5 paket	59,882,648						5 paket	585,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	11,799,418	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	4 Paket	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,678,230	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6,875,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	37,530,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	laporan		laporan	2 laporan	106,567,314						2 laporan	156,000,000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	27,367,314	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	79,200,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	4 unit	75,385,100						4 unit	101,000,000	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	63,887,100	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1,220,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,278,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,01 %	1,410,442,538						0,01 %	2,955,750,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara (DAK Fisik)	Ha		Ha	80 Ha	1,329,277,600						80 Ha	2,555,750,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (DAK Fisik) Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (DAU)				80 Ha 20 Ha	1,012,000,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	80 Ha 20 Ha	2,199,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				44 Ha	71,277,600	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	44 Ha	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				12 Unit	246,000,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	12 Unit	246,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	81,164,938					7 Kegiatan	400,000,000		
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				7 Dokumen	81,164,938	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	7 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,933,311,712					3,653,500,220			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	233,440,012					100 %	810,000,000		
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	paket		paket	7 paket	37,394,812					7 paket	577,000,000		
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12,499,965	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	4 Paket	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	501,847	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	1 Paket	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	24,393,000	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas LHK	2 Laporan	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	laporan		laporan	2 laporan	116,550,000						2 laporan	156,000,000	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	39,110,000	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	77,440,000	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	7 unit	79,495,200						7 unit	77,000,000	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	73,525,200	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	4 Unit	71,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5,970,000	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	3 Unit	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,03 %	2,644,871,700						0,03 %	2,783,500,220	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara	Ha		Ha	200 Ha	2,594,749,700						200 Ha	2,583,500,220	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (DAK Fisik)				175 Ha	2,213,750,000	Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Papulangi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	175 Ha	2,202,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	99,999,700	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	25 Ha	100,000,220	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				5 Unit	281,000,000	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	5 Unit	281,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan	147 kegiatan		0 kegiatan	33 kegiatan	50,122,000						33 kegiatan	200,000,000	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				6 Dokumen	50,122,000	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	6 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya	KTH		KTH	1 KTH	55,000,000						1 KTH	60,000,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan	KTH		KTH	1 KTH	55,000,000						1 KTH	60,000,000	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	55,000,000	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Kelompok Tani Hutan	1 Kelompok	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	96,800,000	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	3 unit	95,021,277						3 unit	47,000,000	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50,300,000	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	41,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	7,470,000	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	37,251,277	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,03 %	2,733,702,800						0,03 %	2,226,500,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan	dokumen		dokumen	1 dokumen	113,102,800						1 dokumen	24,000,000	
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				1 Unit	113,102,800	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	1 Unit	24,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara	Ha		Ha	200 Ha	2,620,600,000						200 Ha	2,202,500,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (DAK Fisik)				200 Ha	2,530,000,000	Kab. Boalemo, Tilamuta, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	200 Ha	2,202,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun (DAK Fisik)				5 Unit	90,600,000	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,806,787,728							3,136,403,942	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	288,558,801						100 %	308,903,942	
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	paket		paket	5 paket	81,589,978						5 paket	90,403,942	
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	17,599,725	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil negara	4 Paket	11,903,942	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,268,253	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil negara	1 Paket	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6,250,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil negara	1 Laporan	1,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	56,472,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil negara	2 Laporan	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	laporan		laporan	2 laporan	88,518,823						2 laporan	170,500,000	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28,678,823	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	45,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	59,840,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	4 unit	118,450,000						4 unit	48,000,000	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	55,400,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	42,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3,050,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60,000,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,02 %	2,263,432,093						0,02 %	2,727,500,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	umlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	unit		unit	1 unit	46,464,900						1 unit	24,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				1 Unit	46,464,900	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	1 Unit	24,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara	Ha		Ha	150 Ha	2,178,500,000						150 Ha	2,503,500,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (DAK Fisik)				150 Ha	1,897,500,000	Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	150 Ha	2,222,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				5 Unit	281,000,000	Kab. Gorontalo, Tibawa, Buhu Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Ulapato B	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	5 Unit	281,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK	unit		unit	1 unit	38,467,193						1 unit	200,000,000	
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	38,467,193	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	1 Unit Managemen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya	KTH		KTH	1 KTH	254,796,834						1 KTH	100,000,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan	KTH		KTH	1 KTH	254,796,834						1 KTH	100,000,000	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	254,796,834	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Kelompok Tani Hutan	1 Kelompok	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
3																		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	28																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																		
3	28	01																
3	28	01																
3	28	01	1.06															
3	28	01	1.06	02														
3	28	01	1.06	05														
3	28	01	1.06	08														
3	28	01	1.06	09														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	laporan		laporan	2 laporan	99,556,377					2 laporan	142,000,000		
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21,236,377	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	78,320,000	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	5 unit	40,068,000					5 unit	46,000,000		
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	37,628,000	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2,440,000	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara	3 Unit	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,01 %	462,846,400					0,01 %	745,659,000		
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan	dokumen		dokumen	1 dokumen	31,064,000					1 dokumen	24,000,000		
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				1 Unit	31,064,000	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	1 Unit	24,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara	Ha		Ha	55 Ha	359,782,400					55 Ha	321,659,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				44 Ha	160,915,000	Kab. Bone Bolango, Bulango Utara, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	44 Ha	121,550,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	198,867,400	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	25 Ha	200,109,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan	147 kegiatan		0 kegiatan	33 kegiatan	72,000,000						33 kegiatan	400,000,000	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	72,000,000	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat	0 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						11,146,377,111							0	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan pelaporan	Persen		Persen	100 Persen	6,700,470,511							100 Persen	0
2 15 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	532,466,000							5 Dokumen	0
2 15 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen 0 Dokumen	532,466,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	5 Dokumen 0 Dokumen		0 Dinas Perhubungan
2 15 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan OPD Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	12 Laporan 1 Tahun		0 Laporan 0 Tahun	12 Laporan 1 Tahun	5,093,557,274							12 Laporan 1 Tahun	0

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia				0 Orang/ Bulan 1 Tahun	5,040,504,774		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0 Orang/ Bulan 1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan OPD				0 Laporan 12 Laporan	53,052,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0 Laporan 12 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek	Orang		Orang	3 Orang	63,405,330						3 Orang	0	
2 15 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek				0 Orang 12 Orang	63,405,330		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pegawai Dinas Perhubungan	0 Orang 12 Orang	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sapras kantor yang tersedia	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	560,644,192						1 Kegiatan	0	
2 15 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Sapras Kantor yang tersedia				0 Paket 1 Kegiatan	560,644,192		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0 Paket 1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	450,397,715						1 Kegiatan	0	
2 15 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu				1 Kegiatan	450,397,715		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi	Persen		Persen	100 Persen	4,254,818,600						100 Persen	0	
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit		Unit	100 Unit	741,782,000						100 Unit	0	
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				100 Unit	741,782,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	100 Unit	0	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Laporan		Laporan	12 Laporan	1,801,416,000						12 Laporan	0	
2 15 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				12 Laporan	934,256,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		12 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.05 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan				5 Unit	867,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		5 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang anrat Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	14 Unit 5 Laporan		0 Unit 0 Laporan	14 Unit 5 Laporan	1,671,620,600						14 Unit 5 Laporan	0	
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang anrat Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				14 Unit	1,473,127,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		14 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)Provinsi				5 Laporan	198,493,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0		5 Laporan	0	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	4 Unit		0 Unit	1 Unit	40,000,000					1 Unit	0		
2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan Jumlah aplikasi layanan publik				0 Unit 1 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	0	0 Unit 1 Unit	0	Dinas Perhubungan	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kinerja pelayanan transportasi	%		%	100 %	191,088,000					100 %	0		
2 15 03 1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan laut, Tally mandiri dan depo peti kemas	Laporan		Laporan	12 Laporan	191,088,000					12 Laporan	0		
2 15 03 1.06 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				12 Laporan	191,088,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Masyarakat pengguna jasa transportasi	12 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16							14,155,195,644						16,832,000,000		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi	%	%		100 %	8,279,514,844						100 %	9,750,000,000	
2 16 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	29 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	403,781,800						7 Dokumen	400,000,000	
2 16 01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	281,459,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas KomInfo dan Statistika Prov. Gorontalo	3 Dokumen	250,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2 16 01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	122,322,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas KomInfo dan Statistika Prov. Gorontalo	4 Laporan	150,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2 16 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan	100 %	0 %	100 %	4,702,972,025						100 %	4,650,000,000	
2 16 01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/ Bulan	4,647,392,125		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo	37 Orang/ Bulan	4,500,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2 16 01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	55,579,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo	1 Laporan	150,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2 16 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM	40 Orang	0 Orang	10 Orang	120,723,400						10 Orang	100,000,000	
2 16 01	1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	120,723,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	SDM Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo	10 Orang	100,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2 16 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kesediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	0 %	100 %	1,703,814,000						100 %	2,100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1,703,814,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo	5 Paket	2,100,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2 16 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa peralatan perlengkapan kantor	100 %		0 %	100 %	1,348,223,619					100 %	2,500,000,000		
2 16 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,348,223,619		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo	1 Laporan	2,500,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Ketersediaan Informasi pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah Daerah	100 % Informasi Program Kegiatan Pemda		0 % Informasi Program Kegiatan Pemda	100 % Informasi Program Kegiatan Pemda	3,756,167,300					100 % Informasi Program Kegiatan Pemda	5,837,000,000		
2 16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan dan komunikasi publik	100 %		0 %	100 %	3,756,167,300					100 %	5,837,000,000		
2 16 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	1,097,100,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Mitra Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Masyarakat	12 Dokumen	845,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	866,831,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Mitra Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Masyarakat	12 Dokumen	1,092,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				12 Dokumen	582,716,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Mitra Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Masyarakat	12 Dokumen	710,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1,209,519,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Mitra Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Masyarakat	1 Dokumen	2,955,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Aplikasi Informatika	50 Layanan Internet OPD Sub Domain Pemda		0 Layanan Internet OPD Sub Domain Pemda	50 Layanan Internet OPD Sub Domain Pemda	2,119,513,500					50 Layanan Internet OPD Sub Domain Pemda	1,245,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000						1 Dokumen	50,000,000	
2 16 03 1.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentasi Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	100 %		0 %	100 %	1,969,513,500						100 %	1,195,000,000	
2 16 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				2 Dokumen	64,764,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Mitra kerja Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo		2 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1,904,749,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Mitra kerja Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							654,090,620						700,000,000	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	81 %		0 %	75 %	654,090,620						75 %	700,000,000	
2 20 02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kualitas dan validitas data statistik sektoral	81 %		0 %	75 %	654,090,620						75 %	700,000,000	
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	307,813,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	152,722,810		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 20 02 1.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				5 Orang	193,554,310		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo	5 Orang	150,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						238,315,200						0		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Optimalisasi Pelaksanaan Keamanan Informasi	100 %		0 %	100 %	238,315,200					100 %	0		
2 21 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	48 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	238,315,200					12 Dokumen	0		
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	238,315,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	KDH/WKDH, Pimpinan Setda dan OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo	12 Laporan	0	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						19,498,132,353						30,433,192,612		
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14,534,047,453						17,026,912,612		
2 17 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						975,385,500						1,665,800,000		
2 17 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	551,760,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		4 Dokumen	989,500,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	423,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		6 Laporan	676,300,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,672,375,853						10,306,112,612		
2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/Bulan	9,525,980,853		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		87 Orang/Bulan	10,106,112,612	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	146,395,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	200,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						366,090,000						355,000,000		
2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				87 Orang	366,090,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		87 Orang	355,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,920,057,000						2,750,000,000		
2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	1,920,057,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		30 Paket	2,750,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,600,139,100						1,950,000,000		
2 17 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,600,139,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	1,950,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI						340,000,200						412,000,000		
2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						340,000,200						412,000,000		
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				20 Unit Usaha	340,000,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah		20 Unit Usaha	412,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						1,654,646,500						1,714,280,000		
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1,654,646,500						1,714,280,000		
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				390 Orang	1,654,646,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UKM		Peningkatan Ekonomi Daerah	390 Orang	1,714,280,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						363,394,900						550,000,000		
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						363,394,900						550,000,000		
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				15 Unit Usaha	363,394,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	15 Unit Usaha	550,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						1,736,276,400						3,630,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	17	07	1.01				1,736,276,400							3,630,000,000		
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		200 Unit Usaha	530,576,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah		200 Unit Usaha	1,550,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		278 Orang	1,205,700,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM			278 Orang	2,080,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				869,766,900						7,100,000,000	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				869,766,900						7,100,000,000	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		30 Unit Usaha	869,766,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ekonomi Daerah		30 Unit Usaha	7,100,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,299,408,774						9,365,500,000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				187,454,386						610,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 02 1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi						74,995,010						380,000,000		
3 30 02 1.02 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				1 Dokumen	74,995,010		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	1 Dokumen	380,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 02 1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						112,459,376						230,000,000		
3 30 02 1.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				8 Dokumen	112,459,376		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	8 Dokumen	230,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						993,772,192						1,820,000,000		
3 30 04 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						841,236,182						1,570,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 1.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	159,817,410		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Laporan	220,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4 Laporan	681,418,772		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		4 Laporan	1,350,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 04 1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						152,536,010							250,000,000	
3 30 04 1.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	152,536,010		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Laporan	250,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						298,488,341							750,000,000	
3 30 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						298,488,341							750,000,000	
3 30 05 1.01 03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				6 Pelaku Usaha	298,488,341		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		6 Pelaku Usaha	750,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						1,819,693,855							6,185,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 06 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						933,905,071						2,020,000,000		
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				6 BPSK	933,905,071		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		6 BPSK	2,020,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						708,989,740						3,840,500,000		
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau				3 Komoditi	108,599,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		3 Komoditi	190,500,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06 1.02 02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang				100 Dokumen	444,330,740		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		100 Dokumen	3,150,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06 1.02 03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan				2 Sertifikat	156,060,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Sertifikat	500,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						176,799,044						325,000,000		
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				12 Laporan	176,799,044		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Laporan	325,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,978,969,405						1,992,687,473		
3 31 02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1,607,609,785						1,442,687,473		
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						1,607,609,785						1,442,687,473		
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				12 Dokumen	597,863,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Dokumen	0	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				12 Dokumen	711,499,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Dokumen	1,042,687,473	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				12 Dokumen	298,246,585		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Dokumen	400,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						150,000,545							175,000,000	
3 31 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						150,000,545							175,000,000	
3 31 03 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						150,000,545		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah			175,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						221,359,075							375,000,000	
3 31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						221,359,075							375,000,000	
3 31 04 1.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	221,359,075		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Dokumen	375,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	23						340,005,059						1,100,000,000					
2	23	02					314,660,059						750,000,000					
2	23	02	1.01				135,646,060						600,000,000					
2	23	02	1.01	01					1 Perpustakaan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa	1 Perpustakaan	200,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	1.01	06					30 orang	35,646,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa	30 orang	400,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	1.02						30 lokus	179,013,999						30 lokus	150,000,000	
2	23	02	1.02	04					3 Kabupaten	179,013,999		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa	3 Kabupaten	150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	03														20 %	350,000,000	
2	23	03	1.02						50 Entry	25,345,000						50 Entry	350,000,000	
2	23	03	1.02	01					50 Eksemplar	25,345,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan Kab/Kota	50 Eksemplar	350,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24									7,918,834,549							10,240,000,000	
2	24	01							20 %	7,593,834,473						20 %	9,460,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	200,000,000						3 Dokumen	210,000,000	
2 24 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	3 Dokumen	210,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	59 Orang		0 Orang	59 Orang	6,313,546,673						59 Orang	7,550,000,000	
2 24 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan				60 ASN	6,263,546,673		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	60 ASN	7,500,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan				3 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	3 Dokumen	50,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket		0 Paket	5 Paket	231,024,000						5 Paket	400,000,000	
2 24 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan untuk pelayanan kantor				3 Bidang	231,024,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	3 Bidang	400,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	849,263,800						3 Laporan	1,300,000,000	
2 24 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Meningkatnya Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 3 Bidang	849,263,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	0 Laporan 3 Bidang	1,300,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase meningkatnya pengelolaan arsip provinsi	80 %		0 %	20 %	176,300,472						20 %	550,000,000	
2 24 02 1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pengelolaan arsip dinamis provinsi dan pengawasan arsip KabKota	800 berkas		0 berkas	200 berkas	91,800,170						200 berkas	400,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 02 1.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan				200 Arsip	91,800,170		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi Gorontalo, Organisasi masyarakat, organisasi sosial politik	200 Arsip	400,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis daerah provinsi yang dikelola	400 Arsip		0 Arsip	100 Arsip	84,500,302						100 Arsip	150,000,000	
2 24 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terkelolanya Akuisisi pengolahan, preservasi dan akses arsip statis				100 Arsip	84,500,302	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi Gorontalo, SMA/SMK	100 Arsip	150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	80 %		0 %	20 %	148,699,604						20 %	230,000,000	
2 24 03 1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah dokumen arsip yang dilindungi dan diselamatkan Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	340 Arsip		0 Arsip	50 Arsip	77,999,802						50 Arsip	120,000,000	
2 24 03 1.02 01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah arsip yang di evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana				50 Arsip	77,999,802		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat Provinsi Gorontalo	50 Arsip	120,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kab//Kota	400 Daftar		0 Daftar	100 Daftar	70,699,802						100 Daftar	110,000,000	
2 24 03 1.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah arsip yang dibuat daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah provinsi				100 Arsip	70,699,802	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD yang digabung dan atau dibubarkan, Pemekaran Kab/Kota	100 Arsip	110,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						23,722,473,163						23,728,569,981		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14,090,061,366							13,928,569,981	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						764,999,800						550,000,265		
3 25 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	519,999,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		10 Dokumen	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	245,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		8 Laporan	265	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,157,174,616						11,178,569,716		
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/ Bulan	10,953,569,716		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		96 Orang/ Bulan	10,953,569,716	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	203,604,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Laporan	225,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						346,743,000						300,000,000		
3 25 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	346,743,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		20 Orang	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						537,018,055						900,000,000		
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	537,018,055		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		20 Paket	900,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,284,125,895						1,000,000,000		
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1,284,125,895		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		5 Laporan	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						2,122,831,000						1,950,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1,525,330,000						1,525,000,000		
3 25 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	99,043,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				2.264 Ha	1,266,069,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2.264 Ha	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				1 Ha	160,217,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Ha	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						60,083,000						75,000,000		
3 25 02 1.02 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	60,083,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		5 Rekomendasi	75,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						537,418,000						350,000,000		
3 25 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	68,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		30 Orang	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.03 02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				3 Kelompok	350,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		3 Kelompok	125,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 02 1.03 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	118,723,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Kelompok	125,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						3,470,080,000							3,800,000,000	
3 25 03 1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						3,044,971,000							3,400,000,000	
3 25 03 1.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 Dokumen	184,971,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Dokumen	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				3 Unit	2,860,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		3 Unit	3,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						425,109,000							400,000,000	
3 25 03 1.03 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				10 Dokumen	171,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		10 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.03 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				10 Dokumen	253,869,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		10 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1,033,274,000							1,400,000,000	
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						1,033,274,000							1,400,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				9 Unit	764,047,500		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Peningkatan Ekonomi Daerah	9 Unit	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				4 Unit	81,428,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	4 Unit	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	187,798,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	5 Unit	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						620,000,000						600,000,000		
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						620,000,000						600,000,000		
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				10 Dokumen	112,263,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	10 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				10 Dokumen	196,892,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	10 Dokumen	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				15 Kelompok	310,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	15 Kelompok	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						2,386,226,797						2,050,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						234,055,597						300,000,000		
3 25 06 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Rekomendasi	234,055,597		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	10 Rekomendasi	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						639,482,000						650,000,000		
3 25 06 1.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	307,870,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	10 Unit Usaha	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				1 Unit Usaha	331,612,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	1 Unit Usaha	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1,512,689,200						1,100,000,000		
3 25 06 1.03 02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas				25 Unit Usaha	1,318,323,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		25 Unit Usaha	900,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 1.03 03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir				4 Dokumen	194,365,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		4 Dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2,688,162,811							2,300,000,000	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						942,337,400							1,200,000,000	
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						568,136,400							600,000,000	
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	568,136,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		10 Paket	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						374,201,000							600,000,000	
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	374,201,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		4 Laporan	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1,745,825,411							1,100,000,000	
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						1,745,825,411							1,100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				9 Unit	1,059,525,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		9 Unit	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	686,300,411		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		5 Unit	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5,557,702,066						2,350,000,000		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						736,183,066						1,050,000,000		
3 25 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah						248,667,200						500,000,000		
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	248,667,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		10 Paket	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						487,515,866						550,000,000		
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	487,515,866		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		4 Laporan	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						4,821,519,000						1,300,000,000		
3 25 03	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						4,821,519,000						1,300,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				5 Unit	4,246,232,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	5 Unit	750,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				5 Layanan	575,287,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	5 Layanan	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3,719,291,803						2,200,000,000		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							489,189,487						1,100,000,000	
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							46,864,560						550,000,000	
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	46,864,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	10 Paket	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							442,324,927						550,000,000	
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	442,324,927		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	4 Laporan	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							3,230,102,316						1,100,000,000	
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi							3,230,102,316						1,100,000,000	
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				5 Unit	2,749,102,316		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	5 Unit	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				5 Layanan	481,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	5 Layanan	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4,366,861,818						2,750,000,000		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							449,062,093						1,150,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						96,969,274						600,000,000		
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	96,969,274		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		10 Paket	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						352,092,819						550,000,000		
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	352,092,819		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		4 Laporan	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						3,917,799,725						1,600,000,000		
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						3,917,799,725						1,600,000,000		
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				5 Unit	3,560,117,865		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		5 Unit	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				5 Layanan	357,681,860		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		5 Layanan	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						756,802,896							475,000,000	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						652,808,896							350,000,000	
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						449,179,770							150,000,000	
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	449,179,770		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		13 Paket	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203,629,126							200,000,000	
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	203,629,126		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Laporan	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/ Bulan	6,311,748,227		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	58 Orang/ Bulan	6,311,748,227	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	145,018,295		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	1 Laporan	182,197,363	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	10 Orang	35,002,000						10 Orang	38,589,705	
3 26 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	35,002,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	10 Orang	38,589,705	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	1,021,947,608						12 Paket	6,050,000,000	
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,021,947,608		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	12 Paket	6,050,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	805,630,440						1 Laporan	901,530,048	
3 26 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	805,630,440		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	1 Laporan	901,530,048	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan	Obyek Wisata		Obyek Wisata	6 Obyek Wisata	2,393,359,987						6 Obyek Wisata	3,255,000,000	
3 26 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi		Lokasi	8 Lokasi	1,277,941,887						8 Lokasi	1,575,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 1.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				8 Lokasi	1,277,941,887		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	8 Lokasi	1,575,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	Dokumen/Laporan	940,411,300						9 Dokumen/Laporan	525,000,000	
3 26 02 1.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	700,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				8 Laporan	240,411,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	8 Laporan	525,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Industri Pariwisata yang Tersertifikasi	Laporan/Unit Usaha		Laporan/Unit Usaha	3 Laporan/Unit Usaha	175,006,800						3 Laporan/Unit Usaha	630,000,000	
3 26 02 1.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata				3 Laporan	175,006,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Usaha/Industri Pariwisata	3 Laporan	315,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	1,267,864,581						12 Dokumen/Laporan	4,462,500,000	
3 26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	1,267,864,581						12 Dokumen/Laporan	4,462,500,000	
3 26 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Laporan	545,850,981		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	3 Laporan	892,500,000	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	261,730,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	4 Dokumen	1,575,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	460,283,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	5 Dokumen	1,470,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Subsektor Industri Kreatif Yang Difasilitasi	Subsektor		Subsektor	6 Subsektor	508,514,761						6 Subsektor	656,250,000	
3 26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Laporan Zona Kreatif yang Dikembangkan	Laporan		Laporan	2 Laporan	326,541,000						2 Laporan	131,250,000	
3 26 04 1.01 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Ekonomi Kreatif/Masyarakat	1 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif				1 Laporan	176,541,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Ekonomi Kreatif/Masyarakat	1 Laporan	131,250,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	Dokumen/Laporan	181,973,761						5 Dokumen/Laporan	525,000,000	
3 26 04 1.02 03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Ekonomi Kreatif/Masyarakat	1 Laporan	157,500,000	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 04 1.02 06	Pemberian Insentif	Jumlah Pemberian Insentif yang diberikan				1 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Ekonomi Kreatif/Masyara kat	1 Laporan	157,500,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	92,881,761		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Ekonomi Kreatif/Masyara kat	1 Dokumen	157,500,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	19,092,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Ekonomi Kreatif/Masyara kat	1 Dokumen	52,500,000	Dinas Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkompeten	Orang		Orang	175 Orang	359,491,632						175 Orang	535,500,000	
3 26 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang		Orang	125 Orang	298,278,522						125 Orang	430,500,000	
3 26 05 1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya				75 Orang	124,714,572		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	SDM Pariwisata (Hotel/Homestay, Restoran, Tour/Diving Guide, Pelaku Ekraf) dan Mitra Pariwisata	75 Orang	183,750,000	Dinas Pariwisata
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				50 Orang	73,407,950		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	SDM Pariwisata (Hotel/Homestay, Restoran, Tour/Diving Guide, Pelaku Ekraf) dan Mitra Pariwisata	50 Orang	105,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 05 1.01 07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata				1 Laporan	100,156,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	SDM Pariwisata (Hotel/Homestay, Restoran, Tour/Diving Guide, Pelaku Ekraf) dan Mitra Pariwisata	1 Laporan	141,750,000	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 26 05 1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, Bimtek dan orang yang tersertifikasi	Orang		Orang	50 Orang	61,213,110						50 Orang	105,000,000		
3 26 05 1.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				50 Orang	61,213,110		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Ekonomi Ekraf	50 Orang	105,000,000	Dinas Pariwisata	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
							46,166,037,024								0	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						35,999,297,892								0	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,699,875,792								0	
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	833,944,230		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		3 Dokumen		0	Dinas Pertanian
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	865,931,562		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		4 Laporan		0	Dinas Pertanian
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						31,660,498,960								0	
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				302 Orang/ Bulan	31,510,498,960		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		302 Orang/ Bulan		0	Dinas Pertanian
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Laporan		0	Dinas Pertanian
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						343,479,673								0	
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	343,479,673		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		30 Orang		0	Dinas Pertanian
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						293,829,993								0	
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	293,829,993		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Paket		0	Dinas Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,001,613,474						0		
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,001,613,474		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	1 Laporan	0	Dinas Pertanian	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						7,378,505,168						0		
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						2,376,793,172						0		
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2,274,553,872		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Peningkatan Ekonomi Daerah	2 Laporan	0	Dinas Pertanian	
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	102,239,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pertanian	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						2,780,853,996						0		
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				2 Laporan	633,514,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	2 Laporan	0	Dinas Pertanian	
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				2 Dokumen	1,747,007,996		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Peningkatan Ekonomi Daerah	2 Dokumen	0	Dinas Pertanian	
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				3 Laporan	400,331,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	3 Laporan	0	Dinas Pertanian	
3 27 02 1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						2,220,858,000						0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 1.07 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				200 Ekor	2,000,790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		200 Ekor	0	Dinas Pertanian
3 27 02 1.07 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				5 Ton	220,068,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		5 Ton	0	Dinas Pertanian
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						132,916,000							0	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						132,916,000							0	
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				4 Dokumen	132,916,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		4 Dokumen	0	Dinas Pertanian
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						575,407,682							0	
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						575,407,682							0	
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	575,407,682		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Laporan	0	Dinas Pertanian
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						2,079,910,282							0	
3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						311,939,282							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	311,939,282		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		90 Orang	0	Dinas Pertanian
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						1,586,595,000							0	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2 Dokumen	288,415,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Dokumen	0	Dinas Pertanian
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				65 Kelompok	1,298,180,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		65 Kelompok	0	Dinas Pertanian
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan						181,376,000							0	
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi				2 Unit	181,376,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Unit	0	Dinas Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2,553,117,200							0	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						561,883,600							0	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						561,883,600							0	
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	561,883,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Laporan	0	Dinas Pertanian
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1,991,233,600							0	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						1,835,990,600							0	
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						479,189,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah			0	Dinas Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				2 Laporan	648,981,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Laporan	0	Dinas Pertanian	
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				2 Dokumen	449,426,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Dokumen	0	Dinas Pertanian	
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				2 Laporan	258,394,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Laporan	0	Dinas Pertanian	
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi						155,243,000							0		
3 27 02 1.03 02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme						155,243,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah			0	Dinas Pertanian	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,545,455,970							0	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							495,683,970							0	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						495,683,970							0		
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	495,683,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Laporan	0	Dinas Pertanian	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							1,049,772,000						0		
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						1,049,772,000							0		
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				248.818 Ha	949,772,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		248.818 Ha	0	Dinas Pertanian	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				1000 Ha	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1000 Ha	0	Dinas Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	203,871,710		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Laporan	0	Dinas Pertanian
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	295,983,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Laporan	0	Dinas Pertanian
3 27 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan														
3 27 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				2 Dokumen	249,447,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Dokumen	0	Dinas Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	27						718,449,210							0	
3	27	01					434,898,310							0	
3	27	01	1.08				434,898,310							0	
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	434,898,310		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	1 Laporan	0	Dinas Pertanian
3	27	07					283,550,900							0	
3	27	07	1.02				283,550,900							0	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	283,550,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	2 Dokumen	0	Dinas Pertanian
3															
3	27						2,576,336,788							0	
3	27	01					351,934,788							0	
3	27	01	1.08				351,934,788							0	
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	351,934,788		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah	1 Laporan	0	Dinas Pertanian
3	27	02					2,224,402,000							0	
3	27	02	1.05				2,224,402,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi				2 Laporan	2,224,402,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Laporan	0	Dinas Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi	%		%	25 %	325,000,000						25 %	325,000,000	
3 32 03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun	Kawasan		Kawasan	4 Kawasan	325,000,000						4 Kawasan	325,000,000	
3 32 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Transmigrasi	1 Dokumen	125,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi (Urusan Transmigrasi)
3 32 03 1.01 17	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non- Standar yang Diberikan kepada Transmigran				4 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Transmigrasi	4 Paket	200,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi (Urusan Transmigrasi)
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan	%		%	4 %	200,000,000						4 %	200,000,000	
3 32 04 1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	SP		SP	4 SP	200,000,000						4 SP	200,000,000	
3 32 04 1.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan				4 SP	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Daerah	Masyarakat Transmigrasi	4 SP	200,000,000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi (Urusan Transmigrasi)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH														
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5,277,959,778							5,022,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						249,894,000							350,000,000	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	89,248,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		2 Dokumen	150,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	73,050,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		2 Dokumen	100,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	87,594,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		4 Laporan	100,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,248,498,150							4,252,000,000	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	4,150,379,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		30 Orang/ Bulan	4,152,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	98,118,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		4 Laporan	100,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						125,598,780							150,000,000	
4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	24,970,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		30 Paket	30,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	100,628,280		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		25 Orang	120,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						381,912,148							30,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19,266,148		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Paket	30,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	362,646,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	0	Biro Hukum
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						46,976,100							0	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	46,976,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		4 Unit	0	Biro Hukum
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						92,400,000							100,000,000	
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	92,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	100,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132,680,600							140,000,000	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	97,345,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		8 Unit	110,000,000	Biro Hukum
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	35,335,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		15 Unit	30,000,000	Biro Hukum
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2,581,537,500							4,050,000,000	
4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						887,615,200							1,800,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Pergub yang Tersusun Jumlah Ranperda yang Disusun				50 Dokumen 10 Dokumen	136,936,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	50 Dokumen 10 Dokumen	200,000,000	Biro Hukum	
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				350 Dokumen	103,124,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	350 Dokumen	250,000,000	Biro Hukum	
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				410 Dokumen	185,276,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	410 Dokumen	600,000,000	Biro Hukum	
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				60 Dokumen	462,278,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	60 Dokumen	750,000,000	Biro Hukum	
4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						1,693,922,300						2,250,000,000		
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				6 Kasus	1,190,369,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	6 Kasus	1,500,000,000	Biro Hukum	
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				24 Kasus	503,552,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	24 Kasus	750,000,000	Biro Hukum	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							5,139,800,866						0	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							4,204,745,645						0	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							87,666,000						0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	87,666,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		8 Dokumen	0	Biro Pengadaan	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,635,998,895						0		
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/ Bulan	3,635,998,895		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		29 Orang/ Bulan	0	Biro Pengadaan	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						66,150,000						0		
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	66,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Paket	0	Biro Pengadaan	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						414,930,750						0		
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	414,930,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	0	Biro Pengadaan	
4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						935,055,221						0		
4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						532,601,226						0		
4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	60,202,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	0	Biro Pengadaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	346,232,640		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	1 Laporan	0	Biro Pengadaan	
4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	126,166,486		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	1 Laporan	0	Biro Pengadaan	
4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						161,807,393						0		
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	64,285,962		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	1 Laporan	0	Biro Pengadaan	
4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	69,793,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	1 Laporan	0	Biro Pengadaan	
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	27,728,431		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	1 Laporan	0	Biro Pengadaan	
4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						240,646,602						0		
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	61,054,544		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	30 Orang	0	Biro Pengadaan	
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	113,705,913		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	1 Laporan	0	Biro Pengadaan	
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	65,886,145		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	1 Laporan	0	Biro Pengadaan	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	179,680,000	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo	20 Orang	193,229,100	Biro Umum
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	2,051,334,000						100 %	2,199,530,224	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	2,051,334,000	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang/Jasa	20 Paket	2,199,530,224	Biro Umum
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 %		0 %	100 %	1,687,588,220						100 %	2,218,485,162	
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,687,588,220	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Unit-Unit Kerja di Lingkungan Setda Provinsi Gorontalo	1 Laporan	2,218,485,162	Biro Umum
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	3,910,767,400						100 %	4,463,197,627	
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	948,911,200	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Gedung, Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit	1,020,103,190	Biro Umum
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	2,961,856,200	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Gedung, Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit	3,443,094,437	Biro Umum
4 01 01 1.14	Fasilitas Keprotokolan	Persentase Pelayanan Keprotokolan yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	1,235,489,000						100 %	1,356,098,068	
4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	428,740,000	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Pusat	1 Laporan	488,884,802	Biro Umum

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	494,668,000	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Pusat	1 Laporan	531,759,500	Biro Umum	
4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	312,081,000	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Pusat	1 Laporan	335,453,766	Biro Umum	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						32,862,832,407						33,407,302,653		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo	%		%	100 %	32,862,832,407					100 %	33,407,302,653		
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	2,673,327,239					100 %	0		
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/ Bulan	2,673,327,239	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN dan Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah	7 Orang/ Bulan	0	Pimpinan Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksa an Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		0 %	100 %	1,052,937,938					100 %	0		
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	176,283,825	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	0	Pimpinan Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				0 Paket	181,100,000	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Paket	0	Pimpinan Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang	75,000,000	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	0	Pimpinan Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/ Bulan	620,554,113	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/ Bulan	0	Pimpinan Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100 %		0 %	100 %	29,136,567,230					100 %	33,407,302,653		
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	4,369,212,800	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Sekretariat Daerah serta Pegguna Barang/Jasa	12 Paket	4,912,615,529	Pimpinan Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1,864,778,900	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Sekretariat Daerah serta Pegguna Barang/Jasa	12 Paket	2,246,176,583	Pimpinan Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	22,902,575,530	Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Sekretariat Daerah serta Pegguna Barang/Jasa	12 Paket	26,248,510,541	Pimpinan Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						6,112,937,663							1,450,000,000	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	305,189,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		3 Dokumen	0	Biro Organisasi	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
4 01 01 1.02							4,147,876,088							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/ Bulan	4,000,000,288		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		26 Orang/ Bulan	0	Biro Organisasi
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	147,875,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		3 Laporan	0	Biro Organisasi
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70,856,000							0	
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	70,856,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		26 Orang	0	Biro Organisasi
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						236,741,576							0	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	236,741,576		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Paket	0	Biro Organisasi
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						209,187,000							0	
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	209,187,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	0	Biro Organisasi
4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1,143,087,699							1,450,000,000	
4 01 02 1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						452,950,379							700,000,000	
4 01 02 1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	203,172,795	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		2 Dokumen	450,000,000	Biro Organisasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	103,570,984		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		2 Dokumen	250,000,000	Biro Organisasi
4 01 02 1.01 03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				2 Dokumen	146,206,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		2 Dokumen	0	Biro Organisasi
4 01 02 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						690,137,320							750,000,000	
4 01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen 1 Dokumen	139,389,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		0 Dokumen 1 Dokumen	250,000,000	Biro Organisasi
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	100,058,038		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Dokumen	250,000,000	Biro Organisasi
4 01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	107,288,120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	250,000,000	Biro Organisasi
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	134,141,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Dokumen	0	Biro Organisasi
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	209,260,262		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Dokumen	0	Biro Organisasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 02	SEKRETARIAT DPRD						78,309,786,843						83,204,173,064		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan layanan administrasi ,Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	%		%	100 %	40,864,961,017						100 %	42,824,583,361	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		dokumen	6 dokumen	266,509,736						6 dokumen	266,509,736	
4 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen 6 Laporan	266,509,736		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo		6 Dokumen 6 Laporan	266,509,736	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi dan Keuangan	12 dok 284 Org/Bln		0 dok 0 Org/Bln	3 dok 71 Org/Bln	6,745,661,600						3 dok 71 Org/Bln	6,745,661,565	
4 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/ Bulan	6,572,514,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo		71 Orang/ Bulan	6,572,514,377	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi dan Keuangan				3 Dokumen	173,146,740		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo		3 Dokumen	173,147,188	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 org		0 org	10 org	327,549,620						10 org	335,411,886	
4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	327,549,620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo		10 Orang	335,411,886	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56 paket		0 paket	14 paket	3,532,508,700						14 paket	5,515,660,004	
4 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	3,532,508,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo		14 Paket	5,515,660,004	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan		0 laporan	1 laporan	1,755,378,118						1 laporan	1,723,986,811	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,755,378,118		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	1 Laporan	1,723,986,811	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	180 org/bln		0 org/bln	45 org/bln	25,606,658,220						45 org/bln	25,606,658,220	
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/ Bulan	25,606,658,220		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	45 Orang/ Bulan	25,606,658,220	Sekretariat DPRD	
4 02 01 1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	160 laporan		0 laporan	40 laporan	2,630,695,023						40 laporan	2,630,695,139	
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	2,630,695,023		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	40 Laporan	2,630,695,139	Sekretariat DPRD	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPR	%		%	100 %	37,444,825,826						100 %	40,379,589,703	
4 02 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	20 dok		0 dok	5 dok	7,335,745,159						5 dok	10,033,002,040	
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				5 Dokumen	7,335,745,159		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Legislatif dan Eksekutif	5 Dokumen	10,033,002,040	Sekretariat DPRD	
4 02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	96 dok 32 dok		0 dok 0 dok	24 dok 8 dok	14,436,203,721						24 dok 8 dok	14,668,008,167	
4 02 02 1.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				24 Dokumen	11,543,539,791		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	24 Dokumen	11,543,539,648	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				8 Dokumen	2,892,663,930		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	8 Dokumen	3,124,468,519	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						14,333,940,760							14,333,940,786	
4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				96 Laporan	3,912,429,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		96 Laporan	3,912,429,536	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	10,421,511,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		3 Dokumen	10,421,511,250	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD						1,338,936,186							1,344,638,710	
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3 Dokumen	1,338,936,186		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		3 Dokumen	1,344,638,710	Sekretariat DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						5,793,115,082							6,156,000,000	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5,793,115,082							6,156,000,000	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,570,049,082							5,356,000,000	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	3,105,198,358		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		0 Orang/ Bulan	3,300,000,000	Badan Penghubung
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1,416,250,724		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		0 Dokumen	2,000,000,000	Badan Penghubung

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	48,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		0 Laporan	56,000,000	Badan Penghubung	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						807,524,000							300,000,000		
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	737,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		0 Paket	150,000,000	Badan Penghubung	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	70,524,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		12 Laporan	150,000,000	Badan Penghubung	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						415,542,000							500,000,000		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	415,542,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		0 Unit	500,000,000	Badan Penghubung	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG							1,036,179,189							1,345,000,000	
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							1,036,179,189							1,345,000,000	
5 07 02 1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung							1,036,179,189							1,345,000,000	
5 07 02 1.01 02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				1 Laporan	379,115,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	520,000,000	Badan Penghubung	
5 07 02 1.01 04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						142,084,480		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			175,000,000	Badan Penghubung	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						514,979,709		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		650,000,000	Badan Penghubung	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 01	PERENCANAAN						16,757,186,084						19,536,000,000		
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	%		%	100 %	13,610,072,697						100 %	15,075,000,000	
5 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	100 %		0 %	100 %	1,075,432,000						100 %	1,400,000,000	
5 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	917,943,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian/ Lembaga dan DPRD	2 Dokumen	1,200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	157,489,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian/ Lembaga dan DPRD	2 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan serta Ketersediaan Gaji & Tunjangan ASN	100 %		0 %	100 %	9,568,151,877						100 %	9,850,000,000	
5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/ Bulan	9,498,152,655	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo	84 Orang/ Bulan	9,750,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	69,999,222	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo	3 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui diklat/bimtek	100 %		0 %	100 %	500,655,372						100 %	540,000,000	
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	82,128,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo	1 Paket	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	418,527,372	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo	84 Orang	375,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah/unit)	100 %		0 %	100 %	1,494,756,800						100 %	1,785,000,000	
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1,494,756,800	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparat BAPPEDA Provinsi Gorontalo	6 Paket	1,750,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	100 %		0 %	100 %	971,076,648						100 %	1,500,000,000	
5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	971,076,648	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparat BAPPEDA dan stakeholder lain	1 Laporan	1,000,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kualitas Perencanaan, Panganggaran dan Pelaporan	100 %		0 %	100 %	1,048,461,555						100 %	960,000,000	
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Panganggaran Tahunan	100 %		0 %	100 %	448,952,480						100 %	485,000,000	
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				1 Dokumen	448,952,480	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	485,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		0 %	100 %	287,532,707						100 %	300,000,000	
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	287,532,707	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD Provinsi dan Stakeholder lainnya	1 Dokumen	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	100 %		0 %	100 %	311,976,368						100 %	175,000,000	
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	143,372,168	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Bappeda dan OPD Kabupaten/Kota	2 Laporan	175,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	168,604,200	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Bappeda dan OPD Kabupaten/Kota	3 Laporan	0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100 %		0 %	100 %	2,098,651,832						100 %	3,501,000,000	
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		0 %	100 %	759,157,572						100 %	1,270,000,000	
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	12,375,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya	2 Dokumen	160,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				18 Perangkat Daerah	85,302,972	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya	18 Perangkat Daerah	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				1 Laporan	85,550,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya	1 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	65,652,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya	2 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	71,142,400	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya	1 Dokumen	360,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				14 Perangkat Daerah	119,537,200	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya	14 Perangkat Daerah	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				18 Perangkat Daerah	188,002,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya	18 Perangkat Daerah	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	131,596,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya	2 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %		0 %	100 %	646,734,260						100 %	1,066,000,000	
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	210,141,900	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	230,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				8 Perangkat Daerah	19,967,500	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Perangkat Daerah	85,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				8 Perangkat Daerah	17,396,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Perangkat Daerah	1,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	204,128,910	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	28,615,950	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				8 Perangkat Daerah	34,036,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Perangkat Daerah	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				8 Perangkat Daerah	57,410,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Perangkat Daerah	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	75,038,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		0 %	100 %	692,760,000						100 %	1,165,000,000	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	105,034,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait	3 Dokumen	210,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				7 Perangkat Daerah	26,000,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait	7 Perangkat Daerah	180,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				7 Perangkat Daerah	26,940,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait	7 Perangkat Daerah	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	257,611,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	73,628,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen	175,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				7 Perangkat Daerah	17,900,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait	7 Perangkat Daerah	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7 Perangkat Daerah	26,940,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait	7 Perangkat Daerah	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	158,707,000	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1,134,367,116							1,735,000,000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti	100 %		0 %	100 %	1,134,367,116						100 %	1,735,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %		0 %	100 %	355,187,100						100 %	265,000,000	
5 05 02 1.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	355,187,100	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	165,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %		0 %	100 %	204,955,100						100 %	760,000,000	
5 05 02 1.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	204,955,100	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	210,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %		0 %	100 %	296,832,400						100 %	450,000,000	
5 05 02 1.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	83,494,900	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	134,216,300	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	79,121,200	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %		0 %	100 %	277,392,516						100 %	260,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 1.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	179,382,244	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Semua OPD yang ada di kabupaten kota se-provinsi Gorontalo,serta PeruruanTinggi, LPPM, pelaku usaha dan masyarakat	1 Laporan	130,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	98,010,272	Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Semua OPD yang ada di kabupaten kota se-provinsi Gorontalo,serta PeruruanTinggi, LPPM, pelaku usaha dan masyarakat	1 Laporan	130,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						277,975,086,061						301,568,337,331		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase layanan administrasi pemerintahan	%		%	100 %	45,993,240,766						100 %	59,266,026,448	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	1,088,293,800						8 Dokumen	1,528,452,844	
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	694,429,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Keuangan dan Stakeholder	4 Dokumen	974,654,773	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	393,864,200		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Keuangan dan Stakeholder	4 Laporan	553,798,071	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan	100 %		0 %	100 %	42,141,894,788						100 %	48,673,502,436	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	42,041,889,203		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	150 Orang/ Bulan	48,512,373,067	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	100,005,585		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	5 Laporan	161,129,369	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	160 orang		0 orang	40 orang	277,504,700					40 orang	480,729,595		
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	277,504,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo	40 Orang	480,729,595	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	84 paket		0 paket	18 paket	1,718,515,490					18 paket	5,793,151,248		
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	1,718,515,490		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	21 Paket	5,793,151,248	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	767,031,988					1 Laporan	790,190,325		
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	767,031,988		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Bidang-bidang, UPTD dan Samsat Badan Keuangan	1 Laporan	790,190,325	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase penetapan APBD dan LKPD	Tepat Waktu		0 Waktu	Tepat Waktu	228,826,479,315					Tepat Waktu	237,418,384,172		
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana anggaran daerah	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	773,864,773					8 Dokumen	1,275,793,885		
5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD, TAPD, dan DPRD Provinsi Gorontalo	2 Dokumen	247,497,723	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	175,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD, TAPD, dan DPRD Provinsi Gorontalo	2 Dokumen	201,932,874	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	448,863,873		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD, TAPD, dan DPRD Provinsi Gorontalo	2 Dokumen	646,363,555	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 02 1.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	75,000,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD, TAPD, dan DPRD Provinsi Gorontalo	2 Dokumen	179,999,733	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	18 Dokumen		0 Dokumen	18 Dokumen	124,999,759						18 Dokumen	499,802,800	
5 02 02 1.02 08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				12 Dokumen	124,999,759		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	APBD kabupaten/kota	12 Dokumen	499,802,800	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	19,142,588,504						4 Dokumen	1,118,354,582	
5 02 02 1.03 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	255,909,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD dan Masyarakat	1 Dokumen	323,205,181	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 02 1.03 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	152,799,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD dan Masyarakat	2 Dokumen	217,311,943	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 02 1.03 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	18,503,869,129		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD dan Masyarakat	1 Dokumen	214,826,862	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	230,010,775		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD dan Masyarakat	1 Dokumen	363,010,596	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	652,505,751					2 Dokumen	983,761,200		
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Laporan	180,332,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD Provinsi Gorontalo	2 Laporan	276,286,998	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	298,932,351		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD Provinsi Gorontalo	2 Dokumen	441,347,526	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	173,241,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	266,126,676	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen bantuan keuangan dan bagi hasil	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	207,778,640,528					2 Laporan	232,416,770,671		
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	10,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pemerintah Kabupaten dan Kota	1 Laporan	9,935,289,277	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	197,778,640,528		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pemerintah Kabupaten dan Kota	1 Laporan	222,481,481,394	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	353,880,000						1 Dokumen	1,123,901,034	
5 02 02 1.06 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	353,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD se-Provinsi Gorontalo		1 Dokumen	1,123,901,034	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah	Tepat Waktu		0 Waktu	Tepat Waktu	1,418,401,800						Tepat Waktu	1,746,653,307	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dan laporan BMD	3 Dokumen & Laporan		0 Dokumen & Laporan	3 Dokumen & Laporan	1,418,401,800						3 Dokumen & Laporan	1,746,653,307	
5 02 03 1.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	321,025,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Keuangan dan Stakeholder		1 Dokumen	423,256,353	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 03 1.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	337,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Keuangan dan Stakeholder		1 Dokumen	446,536,593	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 03 1.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	759,906,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Keuangan dan Stakeholder		1 Laporan	876,860,361	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,24		0	26,13	1,736,964,180						26,13	3,137,273,404	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian PAD	100 %		0 %	100 %	1,736,964,180						100 %	3,137,273,404	
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	503,304,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak		1 Dokumen	657,658,006	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen 1 Laporan	171,744,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak		1 Dokumen 1 Laporan	876,860,361	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 02 04 1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Sarana dan Prasarana	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	2 Sarana dan Prasarana	865,269,542	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	289,301,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Laporan	488,920,094	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	172,614,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Laporan	248,565,401	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 02	KEUANGAN						1,432,078,150							2,825,431,766		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase layanan administrasi pemerintahan	%		%	100 %	751,402,150							100 %	1,380,069,086	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	84 paket		0 paket	18 paket	257,229,100							18 paket	741,775,882	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	257,229,100	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	11 Paket	741,775,882	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	494,173,050							1 Laporan	638,293,204	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	494,173,050	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	1 Laporan	638,293,204	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,24		0	26,13	680,676,000							26,13	1,445,362,680	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian PAD	100 %		0 %	100 %	680,676,000							100 %	1,445,362,680	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	290,676,000	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen Ketetapan	710,062,680	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	390,000,000	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen SSPD	735,300,000	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						1,584,020,865							2,783,741,580	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase layanan administrasi pemerintahan	%		%	100 %	727,595,865						100 %	1,268,932,380	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	84 paket		0 paket	18 paket	378,531,815						18 paket	641,335,702	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	378,531,815	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	11 Paket	641,335,702	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	349,064,050						1 Laporan	627,596,678	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	349,064,050	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	1 Laporan	627,596,678	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,24		0	26,13	856,425,000						26,13	1,514,809,200	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian PAD	100 %		0 %	100 %	856,425,000						100 %	1,514,809,200	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	464,300,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat Wajib Pajak	1 Dokumen Ketetapan	823,969,200	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	392,125,000	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat Wajib Pajak	1 Dokumen SSPD	690,840,000	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						870,283,900							2,672,941,371	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase layanan administrasi pemerintahan	%		%	100 %	414,553,900						100 %	1,179,484,371	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	84 paket		0 paket	18 paket	180,490,600						18 paket	511,992,326	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	180,490,600	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	11 Paket	511,992,326	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	234,063,300						1 Laporan	667,492,045	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	234,063,300	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	1 Laporan	667,492,045	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,24		0	26,13	455,730,000						26,13	1,493,457,000	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian PAD	100 %		0 %	100 %	455,730,000						100 %	1,493,457,000	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	95,730,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen Ketetapan	510,207,000	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	360,000,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen SSPD	983,250,000	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						852,589,880							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase layanan administrasi pemerintahan	%		%	100 %	432,261,880						100 %	0	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	84 paket		0 paket	18 paket	190,651,000						18 paket	0	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	190,651,000	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	11 Paket	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	241,610,880						1 Laporan	0	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	241,610,880	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	1 Laporan	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,24		0	26,13	420,328,000						26,13	0	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian PAD	100 %		0 %	100 %	420,328,000						100 %	0	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	165,328,000	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen Ketetapan	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	255,000,000	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen SSPD	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						957,722,600						0		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase layanan administrasi pemerintahan	%		%	100 %	493,257,600						100 %	0	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	84 paket		0 paket	18 paket	223,457,400						18 paket	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	223,457,400	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	11 Paket	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	269,800,200						1 Laporan	0		
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	269,800,200	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	1 Laporan	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,24		0	26,13	464,465,000						26,13	0		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian PAD	100 %		0 %	100 %	464,465,000						100 %	0		
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	208,190,000	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen Ketetapan	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	256,275,000	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen SSPD	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 02	KEUANGAN						1,390,549,300							0		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase layanan administrasi pemerintahan	%		%	100 %	621,919,300							100 %	0	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	84 paket		0 paket	18 paket	268,598,200							18 paket	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	268,598,200	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	11 Paket	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	353,321,100						1 Laporan	0	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	353,321,100	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat	1 Laporan	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,24		0	26,13	768,630,000						26,13	0	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian PAD	100 %		0 %	100 %	768,630,000						100 %	0	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	206,130,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen Ketetapan	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	562,500,000	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak	1 Dokumen SSPD	0	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 03	KEPEGAWAIAN						10,726,095,016							11,273,487,766	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	9,229,426,719						100 %	9,702,721,261	
5 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	261,003,260						100 %	285,141,150	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	261,003,260	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Anggaran serta adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah	6 Dokumen	285,141,150	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	8,001,008,945						100 %	8,401,058,883	
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/ Bulan	7,893,772,018	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah	76 Orang/ Bulan	8,288,460,033	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	107,236,927	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah	1 Laporan	112,598,850	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	100 %		0 %	100 %	74,628,000						100 %	78,750,000	
5 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	74,628,000	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah	20 Orang	78,750,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	414,088,210						100 %	410,064,900	
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	414,088,210	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran	6 Paket	410,064,900	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %		0 %	100 %	478,698,304						100 %	527,706,328	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	478,698,304	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo	1 Laporan	527,706,328	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit	%	%		80 %	1,496,668,297						80 %	1,570,766,505	
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	95 %		0 %	80 %	678,521,915						80 %	711,713,205	
5 03 02 1.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	270,571,961	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Peningkatan kinerja PNS di seluruh lini pemda provinsi Gorontalo	2 Dokumen	284,100,600	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	248,824,943	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Peningkatan kinerja PNS di seluruh lini pemda provinsi Gorontalo	2 Lembaga	260,531,250	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pengelohan data kepegawain Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5385 Arsip Dok 1 Dokumen	159,125,011	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Peningkatan kinerja PNS di seluruh lini pemda provinsi Gorontalo	5385 Arsip Dok 1 Dokumen	167,081,355	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Presentase penyelenggaraan mutasi dan promosi ASN	95 %		0 %	80 %	421,712,447						80 %	442,797,600	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				2 Dokumen	159,793,940	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Meningkatnya Sistem Pelayanan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	167,783,700	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	116,102,427	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Meningkatnya Sistem Pelayanan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Kepegawaian	2 Laporan	121,907,100	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	145,816,080	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Meningkatnya Sistem Pelayanan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	153,106,800	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase pengembangan kompetensi ASN	95 %		0 %	80 %	226,433,975					80 %	237,755,700		
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				30 Dokumen	226,433,975	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar	30 Dokumen	237,755,700	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	95 %		0 %	80 %	169,999,960					80 %	178,500,000		
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	79,999,900	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Jumlah Aparatur yang dilayani Kenaikan Gaji Berkala, Karpeg, Karis/Karsu	2 Dokumen	84,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				25 Orang	90,000,060	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Jumlah Aparatur yang dilayani Kenaikan Gaji Berkala, Karpeg, Karis/Karsu	25 Orang	94,500,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						14,719,131,891						18,736,951,891		
5 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	11,108,951,227					100 %	12,100,000,000		
5 04 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dokumen		dokumen dokumen	3 dokumen 2 dokumen	278,937,150					3 dokumen 2 dokumen	300,000,000		
5 04 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	189,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Perangkat Daerah	3 Dokumen	200,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	89,497,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Perangkat Daerah	2 Laporan	100,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen		dokumen laporan Orang	2 dokumen 1 laporan 62 Orang	8,765,132,282						2 dokumen 1 laporan 62 Orang	8,250,000,000	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	8,534,380,410		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN dan Perangkat Daerah	62 Orang/ Bulan	8,000,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	130,696,762		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN dan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	100,055,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN dan Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	laporan dokumen		laporan dokumen	1 laporan 1 dokumen	100,065,900						1 laporan 1 dokumen	100,000,000	
5.04.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50,048,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50,017,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5 04 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dokumen dokumen orang		dokumen dokumen orang	1 dokumen 1 dokumen 25 orang	144,160,010						1 dokumen 1 dokumen 25 orang	150,000,000	
5 04 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	25,043,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Dokumen	25,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5 04 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	19,396,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Dokumen	25,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5 04 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	99,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	25 Orang	100,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		paket	2 paket	824,109,585						2 paket	2,200,000,000	
5 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	824,109,585		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Perangkat Daerah	1 Paket	2,200,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	996,546,300						1 Laporan	1,100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	996,546,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Perangkat Daerah	1 Laporan	1,100,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat, bimtek, workshop, seminar, Coaching, kursus, penataran, sosialisasi, orientasi, dan jalur pengembangan kompetensi klasikal yang sejenis	100 %		0 %	20,44 %	3,610,180,664						20,44 %	6,636,951,891	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	orang orang dokumen dokumen dokumen laporan		orang orang dokumen dokumen dokumen laporan	60 orang 429 orang 1 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 22 laporan	2,842,957,052					60 orang 429 orang 1 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 22 laporan	5,407,201,891		
5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				4 Dokumen	99,596,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SDM Aparatur	4 Dokumen	100,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan	
5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				60 Orang	110,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SDM Aparatur	60 Orang	100,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				22 Laporan	282,764,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SDM Aparatur	22 Laporan	1,045,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				3 Dokumen	146,416,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SDM Aparatur	3 Dokumen	250,000,000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				429 Orang	2,204,079,552		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SDM Aparatur	429 Orang	3,837,201,891	Badan Pendidikan dan Pelatihan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						15,782,262,914						135,000,000		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	12,956,006,584						100 %	135,000,000	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	36 Dokumen		0 Dokumen	9 Dokumen	170,314,700						9 Dokumen	135,000,000	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	119,528,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	3 Dokumen	135,000,000	Inspektorat
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	50,786,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	6 Laporan	0	Inspektorat
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %		0 %	95 %	11,317,863,334						95 %	0	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/ Bulan	11,240,985,334		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	104 Orang/ Bulan	0	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700 Dokumen	40,562,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	700 Dokumen	0	Inspektorat
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	36,316,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	0	Inspektorat
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang		0 Orang	30 Orang	456,729,400						30 Orang	0	
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	456,729,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	30 Orang	0	Inspektorat
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket		0 Paket	10 Paket	153,320,000						10 Paket	0	
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	153,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	10 Paket	0	Inspektorat
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	681,424,150						2 Laporan	0	
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	174,049,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	0	Inspektorat
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	193,357,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	0	Inspektorat
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	314,017,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Laporan	0	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	228 Unit		0 Unit	57 Unit	176,355,000						57 Unit	0	
6 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	46,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0		6 Unit	0	Inspektorat
6 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	29,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0		50 Unit	0	Inspektorat
6 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,555,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0		1 Unit	0	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	% %	% %		87 % 75 %	1,989,487,700						87 % 75 %	0	
6 01 02 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	820 Laporan		0 Laporan	205 Laporan	1,694,137,200						205 Laporan	0	
6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				95 Laporan	445,670,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0		95 Laporan	0	Inspektorat
6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	171,444,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0		60 Laporan	0	Inspektorat
6 01 02 1.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				26 Laporan	322,409,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0		26 Laporan	0	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				24 Laporan	263,442,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	24 Laporan	0	Inspektorat
6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	223,823,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Kesepakatan	0	Inspektorat
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				3 Dokumen	267,346,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	3 Dokumen	0	Inspektorat
6 01 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	48 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	295,350,500						12 Laporan	0	
6 01 02 1.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	295,350,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	12 Laporan	0	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	dan WBBM	OPD		OPD	2 OPD	836,768,630						2 OPD	0	
6 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	141,325,430						1 Rekomendasi	0	
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	141,325,430		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	1 Rekomendasi	0	Inspektorat
6 01 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	33 OPD		0 OPD	33 OPD	695,443,200						33 OPD	0	
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				33 Perangkat Daerah	137,140,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	33 Perangkat Daerah	0	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				33 Perangkat Daerah	140,136,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	33 Perangkat Daerah	0	Inspektorat
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				33 Kegiatan	151,754,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	33 Kegiatan	0	Inspektorat
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				33 Perangkat Daerah	266,413,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	0	33 Perangkat Daerah	0	Inspektorat
TOTAL							1,796,143,734,204							1,747,014,125,147	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah menjadi alat ukur dalam memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Utama
Provinsi Gorontalo

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2023	Target Nasional 2023
Pertumbuhan Ekonomi	3,97	6,21	5,3
Indeks Gini	0,406	0,398	0,375
Inflasi	0,81	2,03	3,00
Pendapatan Perkapita	34,57	35,94	-
TPT	3,01	3,63	5,3
Persentase Kemiskinan	15,41	15,00	7
Indeks Pembangunan Manusia (point)	69	69,68	73,29
Penurunan emisi GRK (%)	27,3	-	27
Nilai MCP	89,72	92,65	-
Indeks Reformasi Birokrasi	63,90	65,1	-



Tabel 7.2.
Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Gorontalo

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	2	3	4	5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	3,97	4,01	6,21
1.2	Indeks Gini	0,406	0,404	0,398
1.3	Inflasi	0,81	2,63	2,03
1.4	Pendapatan Perkapita	34,57	35,76	35,94
1.5	Persentase Kemiskinan	15,41	15,61	15,00
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (point)	69	69,62	69,68
Fokus Kesejahteraan Sosial				
2	Pendidikan			
2.1	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,12	8,28
2.2	Harapan lama sekolah	13,11	13,16	13,24
2.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,30	71,45	71,63
2.4	Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)	SMA : 52 SMK : 39		
2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah	20,3		
3	Kesehatan			
3.1	Angka harapan hidup	68,19		68,2
3.2	Prevalensi stunting	29		26





No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	2	3	4	5
Fokus Budaya dan Agama				
4	Kebudayaan dan Agama			
4.1	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda :15 Tak Benda: 20		
4.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74		
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Pelayanan Urusan Wajib				
6	Pekerjaan Umum			
6.1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	54,38*	59,8	60,4
6.2	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	50 %	55 %	60 %
7	Perumahan			
7.1	Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,34	8,01	7,69
7.2	Persentase Cakupan Air minum Layak	94,57	94,96	95,35
7.3	Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	77,14	78,61
8	Lingkungan Hidup			
8.1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	77,32	73,39	74,31
9	Sosial			
9.1	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	89,4 %		
9.2	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	20		
10	Ketenagakerjaan			
10.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	3,84	3,63
11	Pemerintahan			
11.1	Nilai MCP	89,72	91,2	92,65
11.2	Indeks Reformasi Birokrasi	63,90	64,5	65,1



No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	2	3	4	5
11.3	Nilai SAKIP	B		BB
11.4	Indeks Kematangan Organisasi	48	48	48
11.5	Indeks Kualitas Perencanaan	N/A		
11.6	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP
11.7	Indeks Sistem Merit	238,5 (kurang)		
11.8	Nilai Maturitas SPBE	2,51		
11.9	Indeks Demokrasi (%)	70,54		
12	Ketahanan Pangan			
12.1	Indeks Ketahanan Pangan	80,40*	81,86	83,22
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
13.1	Kemiskinan perdesaan	24,32	23,78	23,5
13.2	Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	3	4
14	Komunikasi dan Informatika			
14.1	Nilai Maturitas SPBE	2,51	2,64	2,77
14.2	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,0	2,5
15	Penanggulangan Bencana			
15.1	Indeks Resiko Bencana	126,64*	123,84	123
16	Penanaman Modal			
16.1	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	11.345	11.824
17	Perhubungan			
17.1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,553	0,553
18	Kepemudaan dan Olahraga			
18.1	Indeks Pembangunan Gender	86,74	86,93	87,03
18.2	Indeks Perlindungan Anak	64,49	66,12	67,57
18.3	Indeks Pembangunan Pemuda	48,17	50,58	51,59



No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	2	3	4	5
19	Perpustakaan			
19.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22,53	27,12	36,40
Pelayanan Urusan Pilihan				
20	Pertanian			
20.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80*	38,04	38,14
20.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	104,46	104,97
20.3	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	108,55	105,01	109,90
21	Kehutanan			
21.1	Penurunan emisi GRK (%)	27,3		
22	Pariwisata			
22.1	Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	N/A	N/A	2,5
23	Kelautan dan Perikanan			
23.1	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	96,73	-	97,77
24	Energi dan Sumber Daya Mineral			
24.1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,2*	99,3	99,5
25	Industri			
25.1	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31*	4,82	5,27
26	Perdagangan			
26.1	Nilai Ekspor (juta USD)	13,2*	15,59	18,03

**BAB VIII
PENUTUP**

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang mengemban amanat pembangunan tahun pertama dari empat tahun perencanaan pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 – 2026. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang berlaku sedari Tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2023, ditetapkan prinsip dan kaidah yang harus menjadi komitmen seluruh elemen masyarakat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembangunan daerah. Prinsip dan Kaidah dimaksud adalah:

1. Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan semua Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo serta elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di Gorontalo, berkewajiban untuk melaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 secara sinergis, sinkron dan terintegrasi.
2. Untuk memaksimalkan pendanaan pembangunan, kontribusi dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri harus senantiasa dioptimalkan, sekaligus juga agar berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan.
3. RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023.
4. Untuk mengoptimalkan integrasi, sinergitas, sinkronisasi, harmonisasi dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Renja PD masing-masing dengan mempedomani RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023.
5. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renja PD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing – masing, kemudian melaporkan hasilnya secara berkala kepada Pj. Gubernur, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.
6. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi



Gorontalo Tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, kemudian melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.

7. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota, maka RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023.